BSI BANK SYARIAH INDONESIA















Energi Baru untuk Indonesia

2021 Laporan Tahunan

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan operasional, keuangan, proyeksi, penerapan strategi serta kebijakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan yang bersifat prospektif dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis BSI menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, BSI tidak menjamin bahwa dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mudah dibaca dan dapat diunduh di situs resmi BSI, yaitu: https://www.bankbsi.co.id/. Penyusunan laporan ini terutama mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



Energi **Baru** untuk **Indonesia**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang lahir dari *merger* 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru berusia 1 (satu) tahun. Kelahirannya pada 1 Februari 2021 langsung diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.

Di usia yang masih belia, BSI telah menorehkan pencapaian yang menakjubkan. Rata-rata kinerja keuangan tumbuh tinggi. Integrasi kegiatan operasional dari bank *legacy* pun berjalan lancar. Bahkan BSI telah resmi membuka *representative office* di Dubai, yang merupakan pusat keuangan dunia.

Semua itu berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Insan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan, sehingga Bank mampu memberikan manfaat besar. Atas dasar inilah, kami semua meneguhkan tekad, mengobarkan semangat, untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih kuat agar mampu menjadi Energi Baru Untuk Indonesia.

5 tahun Kesinambungan Laporan Tahunan

Hijrah untuk Terbuka dan Lebih Amanah

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dengan sejumlah torehan prestasi yang cukup membanggakan, tahun 2017 BRISyariah memantapkan niat untuk hijrah menjadi Perusahaan Publik. Hijrah merupakan pilihan bagi BRISyariah untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi Perusahaan sekaligus ikut mendorong kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia.

Untuk sampai pada tahapan tersebut, BRISyariah telah melakukan sejumlah persiapan baik dari sisi organisasi maupun kinerja usaha agar menjadi perusahaan yang menarik bagi investor.

BRISyariah meyakini dengan menjadi Perusahaan Publik, perlibatan pemegang saham akan semakin besar, sehingga BRISyariah dituntut untuk lebih terbuka. Selain itu, BRISyariah juga berupaya untuk lebih amanah dalam menjaga kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya.



2017

Menapak Esok dengan Digitalisasi

BRIsyariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah antara lain dengan pengembangan produk digital eksisting melalui integrasi dari iBank dan Mobile Banking, BRIS Online. Sejalan dengan hal itu, praktik tata kelola terbaik terus diimplementasikan untuk lebih memperkuat branding Solusi Keuangan yang Amanah. Selanjutnya, sebagai salah satu bank pelopor green banking, Perseroan terus memperkokoh landasan keberlanjutan antara lain melalui persyaratan pembiayaan yang pro lingkungan maupun penggunaan sumber daya yang efisien dalam operasional Bank.

Seluruh strategi tersebut adalah kekuatan BRIsyariah untuk dapat mencapai visi menjadi bank syariah dan bank ritel modern yang terkemuka di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah, dimana BRIsyariah memiliki fokus meningkatkan pembiayaan syariah untuk pembangunan Negeri.

2018



Berinovasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Pada tahun 2019, BRIsyariah yang telah mencapai usia ke-11 tahun tak pernah henti bermuhasabah demi kemajuan dan berkembang bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan yang berkelanjutan senantiasa menjadi goal BRIsyariah dalam beraktivitas dan menapaki bisnis ke depan. Di balik pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut tentu ada banyak sekali elemen bisnis yang semuanya saling berkaitan dan bersinergi baik dalam hal operasional, kepatuhan, maupun segmen yang menjadi fokus bisnis BRIsyariah.

Inovasi dalam hal ini sangat berperan besar dan berlaku universal di tiap lini struktur organisasi BRIsyariah. Inovasi dalam hal operasional, misalnya. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, BRIsyariah berkomitmen memperkaya dan melengkapi fitur-fitur electronic banking (e-banking) dengan terus melakukan inovasi yang dilandasi pengalaman dan atau kebutuhan nasabah. Di tahun 2019 BRIsyariah meluncurkan i-Kurma, Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani. i-Kurma, yang merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro diluncurkan di milad BRIsyariah ke 11. i-Kurma akan mempercepat proses pencairan pembiayaan mikro.

Tak hanya fitur, BRIsyariah juga selalu berupaya menghadirkan produk dan layanan baru yang dapat menggugah nasabah akan Solusi Keuangan yang Amanah. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, aktivitas yang dilakukan BRIsyariah senafas dengan yang diinginkan Pemerintah dan Otoritas Keuangan terkait, yakni adanya peningkatan inklusi keuangan dan merata di seluruh khalayak.



2019

2020



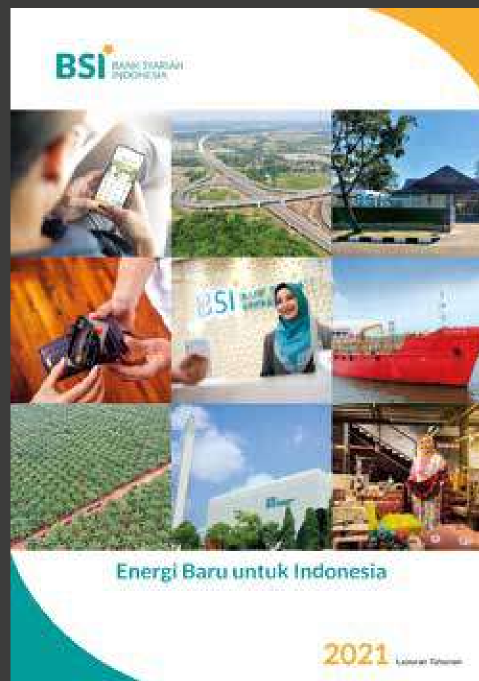
Menyebarkan Layanan untuk UMKM Di Pelosok Negeri

BRIsyariah berkomitmen untuk terus memberikan layanan perbankan syariah yang amanah, melalui pengembangan teknologi dan inovasi digital guna kemudahan bagi para nasabah, utamanya untuk mencapai aspirasi dan visi misi menjadi bank ritel melalui digitalisasi, sebagai satu kesatuan dalam integrasi inklusi finansial Grup BRI yang dapat diandalkan.

Di tengah pandemi COVID-19, BRIsyariah melakukan sejumlah langkah agar pertumbuhan bisnis Bank tetap sehat. Yang utama dilakukan adalah optimalisasi layanan perbankan digital sebagai langkah adaptive operations, selektif dalam menyalurkan pembiayaan serta melakukan restrukturisasi sebagai pre-emptive strategies for sustainable financing portfolio.

Selain itu, Bank juga meningkatkan dana murah yang sehat serta buffer likuiditas sebagai penerapan healthy liquidity management. Hasilnya di tahun 2020, selain kenaikan laba, BRIsyariah juga tumbuh di sisi aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga.

2021



Energi Baru untuk Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang lahir dari merger 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru berusia 1 (satu) tahun. Kelahirannya pada 1 Februari 2021 langsung diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.

Di usia yang masih belia, BSI telah menorehkan pencapaian yang menakjubkan. Rata-rata kinerja keuangan tumbuh tinggi. Integrasi kegiatan operasional dari bank *legacy* pun berjalan lancar. Bahkan BSI telah resmi membuka *representative office* di Dubai, yang merupakan pusat keuangan dunia.

Semua itu berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Insan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan, sehingga Bank mampu memberikan manfaat besar. Atas dasar inilah, kami semua meneguhkan tekad, mengobarkan semangat, untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih kuat agar mampu menjadi Energi Baru Untuk Indonesia.

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Mewujudkan Harapan Pemangku Kepentingan

Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada tahun 2021 menjadi warna tersendiri bagi industri perbankan nasional. BSI yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) bank: : Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, saat ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Di antara bank umum di Indonesia, BSI yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021, berada di posisi ke-7 dari sisi aset.

Kehadiran BSI juga merupakan jawaban atas ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap perbankan syariah, mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk.

Usia belia tidaklah menghalangi BSI untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholder. Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Insan BSI di tahun pertama terbukti membuahkan hasil yang membawa manfaat.

Hery Gunardi
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk

16 Desember 2020

Akta penggabungan 3 (tiga) bank: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah untuk menjadi BSI ditandatangani.

BRIsyariah

mandiri syariah

BNI Syariah

BSI akan memberikan energi baru untuk Indonesia, terutama melalui fungsi intermediasi yang dijalankan. BSI hadir dengan menggabungkan kekuatan atau kelebihan yang ada pada ketiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, maupun produk dan solusi layanan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah yang bersifat inklusif.

BSI juga memiliki infrastruktur dan fundamental yang kuat. Total aset pada tahun 2021 mencapai Rp265 triliun. Jaringan cabang yang berjumlah 1.244 tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Bank juga didukung oleh jumlah karyawan yang mencapai 19.510 orang. Infrastruktur ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bank untuk berkontribusi positif pada industri perbankan dan perekonomian nasional.

Sebagai kado istimewa dari tahun kelahirannya yang pertama, BSI mendapatkan Authorization Letter berupa Licence Notice dari Dubai Financial Service Autority (DFSA). Otoritasasi ini menandai BSI dapat mengoperasikan Representative Office di Dubai, dan diresmikan pada kuartal I-2022.

1 Februari 2021

BSI secara resmi hadir dan diresmikan langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.



1 November 2021

Operational merger yang disebut sebagai “Operational Day 1” atau “Customer Day 1” menjadi penanda terintegrasinya kegiatan operasional 3 (tiga) bank legacy menjadi sistem tunggal, yaitu BSI.

28 Januari 2022

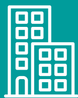


Licence Notice dari Dubai Financial Service Autority (DFSA) sebagai pertanda beroperasinya BSI di Dubai, salah satu pusat keuangan dunia.

Kinerja Keuangan

Menyatukan Kekuatan sebagai Bank Syariah Terbesar di Tanah Air

Integrasi Operasional Selesai 1 November 2021



1.244

Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu



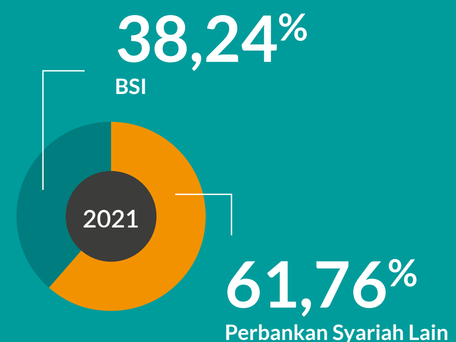
19.449

Jumlah Karyawan



Pangsa pasar di Industri perbankan syariah berdasarkan aset per Desember 2021

38,24%





Peringkat

Peringkat **#7** Bank Umum di Indonesia Berdasarkan Aset





Pembiayaan tumbuh 9,32% yoy

Rp171,3 Triliun



Sumber Pendanaan meningkat 11,04% yoy

Rp235,6 Triliun





Fondasi Bank yang Kokoh



22,09 %

Rasio Kecukupan Modal/ Capital Adequacy Rasio (CAR) lebih baik dibandingkan sebelumnya yang 18,24%.



0,87 %

NPF Net, turun 0,25% yoy



Rp265,3 Triliun

Aset tahun 2021 tumbuh 10,73% dibandingkan tahun 2020.



Rp25 Triliun

Ekuitas tumbuh 15,04% dibandingkan tahun sebelumnya.



Rp3,0 Triliun

Laba bersih tumbuh 38,42% dibandingkan tahun sebelumnya.







Rp17,8
Triliun

Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib meningkat 5,19% dibandingkan tahun sebelumnya.



Rp26,5
Triliun

Kas dan setara kas akhir tahun 2021 tumbuh 0,11% dibandingkan tahun 2020.



49,59%

Laba komprehensif tahun berjalan menjadi Rp3,2 triliun dari Rp2,2 triliun.



Representative Office BSI di Dubai

Setelah diterimanya *Letter of Incorporation* dari Dubai Internasional Financial Center (DIFC) pada 4 November 2021, BSI bersiap memperkuat posisi Indonesia di Kancah Global menjadi Bank dari Indonesia pertama yang memiliki kantor perwakilan di Kawasan Timur Tengah dengan telah beroperasinya BSI di Dubai pada tanggal 28 Januari 2022.



Jumlah Rekening DPK
21.374.779

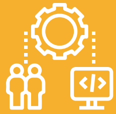
Pembiayaan
1.142.469



Jumlah Nasabah DPK
17.966.481

Pembiayaan
951.829

Penyaluran Pembiayaan



Rp15,2 Triliun

Infrastruktur



Rp4,5 Triliun

Kesehatan



Rp3,6 Triliun

Pendidikan



Rp39,4 Triliun

UMKM



Rp9,1 Triliun

Kredit Usaha Rakyat





Daftar Isi

05

Penunjang Bisnis

06

Tata Kelola Perusahaan

07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

08

IKHTISAR KINERJA

Bank berhasil membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang ditunjukkan oleh peningkatan sejumlah indikator keuangan, yang tersaji dalam laporan tahunan ini.

73 Penghargaan

BSI memperoleh beragam penghargaan sepanjang 2021 sebagai bentuk pengakuan kinerja dari pihak luar, baik nasional maupun internasional.



Ikhtisar Keuangan

Posisi Keuangan Konsolidasian

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Kas	4.119.903	3.180.739	2.210.290
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	20.563.580	21.527.933	23.840.556
Giro dan Penempatan pada Surat Berharga-Neto	1.841.551	8.695.805	3.710.161
Investasi pada Surat Berharga-Neto	67.579.070	49.105.637	38.709.977
Tagihan Akseptasi	159.880	292.789	234.895
Piutang Murabahah	101.685.560	89.844.090	73.000.131
Piutang Istishna	359	637	2.970
Piutang Sewa Ijarah	101.570	39.167	21.422
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang	(3.450.506)	(3.294.706)	(1.939.242)
Pinjaman Qardh- Neto	9.081.400	9.054.373	8.470.296
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.592.314	2.598.787	3.674.396
Pembiayaan Musyarakah-Neto	53.903.123	50.896.175	46.393.775
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	901.565	1.509.461	2.251.266
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	4.055.953	3.397.075	1.876.250
Aset Pajak Tangguhan	1.445.324	1.109.281	808.511
Aset Lain-lain-Neto	1.708.435	1.624.281	2.031.373
Investasi pada Entitas Asosiasi	-	-	-
TOTAL ASET	**265.289.081**	**239.581.524**	**205.297.027**
Liabilitas Segera	608.554	989.362	665.220
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	158.478	170.010	200.900
SIMPANAN			
Giro Wadiah	22.411.614	30.822.613	16.428.240
Tabungan Wadiah	34.836.276	29.580.970	21.135.628
Total	**57.247.890**	**60.403.583**	**37.563.868**
Simpanan dari Bank Lain	115.938	806.560	106.895
Kewajiban Akseptasi	161.495	295.337	237.254
Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
Utang Pajak	504.078	537.514	378.752
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	17.194	20.323	19.452
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	836.491	908.751	727.861
Liabilitas Lain-lain	2.236.358	1.908.921	4.106.641
JUMLAH LIABILITAS	**61.886.476**	**66.040.361**	**44.006.843**

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro Mudharabah	13.318.627	5.370.452	11.880.204
Tabungan Mudharabah	65.102.491	59.008.934	48.064.346
Deposito Mudharabah	98.592.553	86.043.632	80.997.689
Sukuk Mudharabah Subordinasi	1.375.000	1.375.000	1.279.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**178.388.671**	**151.798.018**	**142.221.239**
EKUITAS			
Modal disetor	20.564.654	3.142.019	2.989.022
Tambahan Modal Disetor	(6.366.776)	-	-
Ekuitas Merging Entities	-	10.903.586	9.823.110
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	444.530	395.725	395.725
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti	140.271	53.998	47.049
Keuntungan/(Kerugian) Surat Berharga - bersih	22.263	-	710
Cadangan Umum	779.036	597.804	597.804
Saldo Laba	9.429.956	6.650.013	5.215.525
· Tahun lalu	6.468.781	5.215.525	3.940.491
· Tahun berjalan	2.961.175	1.434.488	1.275.034
TOTAL EKUITAS	**25.013.934**	**21.743.145**	**19.068.945**
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	265.289.081	239.581.524	205.297.027

* Disajikan kembali

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	**17.808.432**	**16.929.592**	**15.739.431**
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	4.378.807	5.004.254	5.363.576
Hak Bagi Hasil Milik Bank	13.429.625	11.925.338	10.375.855
Pendapatan Operasional Lainnya	3.012.246	2.776.701	2.418.234
Jumlah Pendapatan setelah Distribusi bagi Hasil, Imbalan dan Bonus	**16.441.871**	**14.702.039**	**12.794.089**
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**8.782.773**	**7.955.227**	**7.166.873**
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto	**3.551.249**	**3.620.446**	**2.855.517**
Laba Usaha	**4.107.849**	**3.126.366**	**2.771.700**
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto	(147.325)	(121.169)	(139.881)
Laba Sebelum Beban Pajak	3.960.524	3.005.197	2.631.818
Beban Pajak Penghasilan	932.319	817.548	679.616
Laba Bersih	**3.028.205**	**2.187.649**	**1.952.202**
Laba (Rugi) Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:			
· Pemilik Entitas Induk	3.028.205	2.187.649	1.952.202
· Kepentingan Non Pengendali	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	189.591	(36.503)	(80.733)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan Dapat Diatribusikan kepada:	3.217.796	2.151.146	1.871.469
· Pemilik Entitas Induk	3.217.796	2.151.146	1.871.469
· Kepentingan Non Pengendali	-	-	-
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	73,69	53,52	47,79
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh)	73,66	53,51	47,79

* Disajikan kembali

Arus Kas

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Arus Kas Aktivitas Operasi	18.676.808	12.187.412	7.457.737
Arus Kas Aktivitas Investasi	(18.571.038)	(11.747.901)	(4.054.061)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	(77.929)	(140.494)	(10.660)
Kas & Setara Kas Awal Tahun	26.514.431	26.215.414	22.872.398
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	26.542.272	26.514.431	26.265.414

* Disajikan kembali

Rasio Keuangan

(%)

URAIAN	2021	2020	2019
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	22,09	18,24	18,71
Rasio Pembiayaan Bermasalah Gross	2,93	2,88	3,21
Rasio Pembiayaan Bermasalah Net	0,87	1,12	1,58
ROA	1,61	1,38	1,44
ROE	13,71	11,18	11,28
Margin Pendapatan Bersih (NIM)	6,04	6,04	3,97
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,46	84,61	85,27
Cost to Income Ratio (CIR)	52,57	53,74	58,05
Cost Efficiency Ratio (CER)	52,07	50,56	53,61
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	73,39	74,52	76,15
Persentase Pelampauan BMPD	0,51	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	4,55	3,12	5,12
Giro Wajib Minimum (GWM) Valas	1,03	1,16	2,89
Posisi Devisa Netto	0,27	4,47	1,73

Ikhtisar Saham

Informasi Harga Saham

TAHUN	HARGA PER SAHAM (Rp)				JUMLAH SAHAM BEREDAR (LEMBAR SAHAM)	VOLUME TRANSAKSI (LEMBAR SAHAM)	KAPITALISASI PASAR (Rp TRILIUN)
	PEMBUKAAN	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN			
2021							
Triwulan I	2.350	2.350	2.210	2.290	41.031.208.943	10.061.997.400	93,96
Triwulan II	2.180	2.370	2.150	2.300	41.128.868.743	3.808.326.000	94,60
Triwulan III	2.050	2.080	2.010	2.040	41.128.868.743	4.356.091.600	83,90
Triwulan IV	1.790	1.805	1.780	1.780	41.129.307.343	1.880.546.500	73,21
2020 *							
Triwulan I	190	210	190	196	9.716.113.498	732.856.900	1,90
Triwulan II	310	312	306	308	9.716.113.498	3.986.666.700	2,99
Triwulan III	750	760	725	750	9.716.113.498	15.807.047.400	7,29
Triwulan IV	2.290	2.370	2.200	2.250	9.900.508.698	15.875.453.300	22,28
2019 *							
Triwulan I	535	540	530	530	9.716.113.498	513.546.800	5,15
Triwulan II	500	510	500	505	9.716.113.498	575.097.000	4,91
Triwulan III	408	412	402	404	9.716.113.498	363.572.400	3,93
Triwulan IV	334	340	330	330	9.716.113.498	382.463.900	3,21

* PT Bank BRIsyariah Tbk

Harga Penutupan

(Rp/lembar)

	2021	2020*	2019*
Triwulan I	2.290	196	530
Triwulan II	2.300	308	505
Triwulan III	2.040	750	404
Triwulan IV	1.780	2.250	330

* PT Bank BRIsyariah Tbk

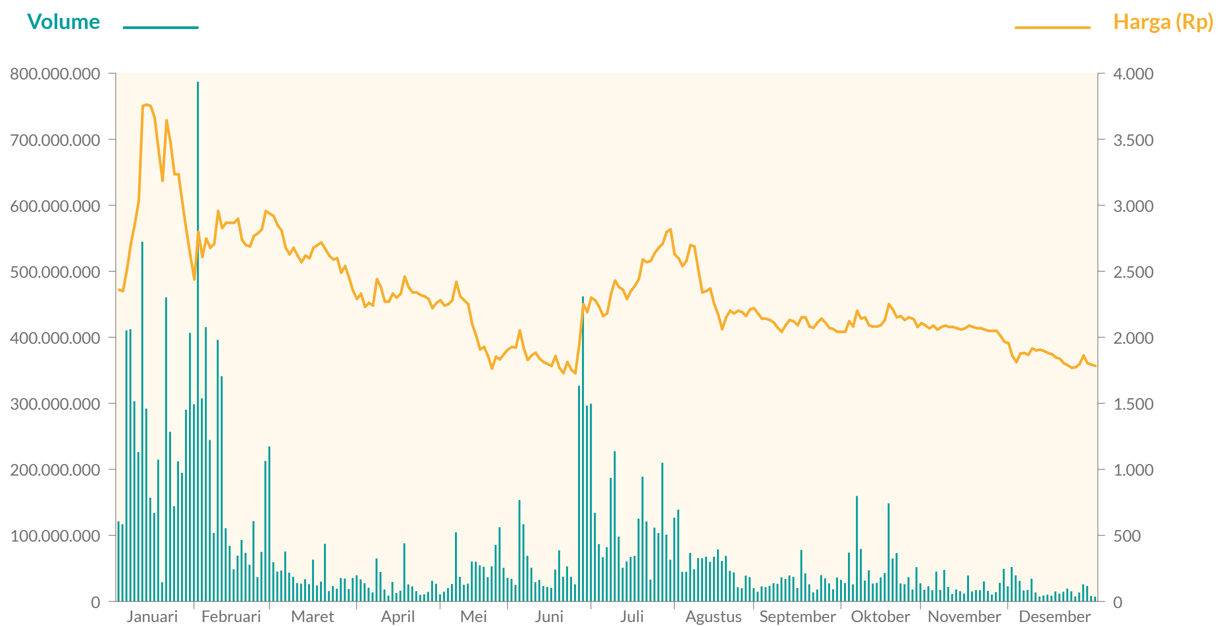
Volume Perdagangan

(Lembar)

	2021	2020*	2019*
Triwulan I	10.061.997.400	732.856.900	513.546.800
Triwulan II	3.808.326.000	3.986.666.700	575.097.000
Triwulan III	4.356.091.600	15.807.047.400	363.572.400
Triwulan IV	1.880.546.500	15.875.453.300	382.463.900

* PT Bank BRIsyariah Tbk

Kinerja Saham



Aksi Korporasi

Aksi korporasi BSI yang berpengaruh terhadap saham Bank, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

TANGGAL PELAKSANAAN AKSI KORPORASI	PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM	JUMLAH SAHAM BEREDAR		HARGA SAHAM	
		SEBELUM AKSI KORPORASI	SESUDAH AKSI KORPORASI	SEBELUM AKSI KORPORASI	SESUDAH AKSI KORPORASI
9 Mei 2018 (Penawaran Umum Perdana Saham)	-	7.092.762.898	9.716.113.498	500	545
2 November 2020-8 Desember 2020 (Exercise MSOP)	-	9.716.113.498	9.900.508.698	1.235	1.460
1 Februari 2021 (Merger BRIS,BSM, dan BNIS)	-	9.900.508.698	41.031.208.943	2.440	2.800
10 Mei 2021-18 Juni 2021 (Exercise MSOP)	-	41.031.208.943	41.128.868.743	2.310	1.765
1 November 2021-9 Desember 2021 (Exercise MSOP)	-	41.128.868.743	41.129.307.343	2.110	1.900

Informasi Penghentian Saham Sementara

Hingga 31 Desember 2021, BSI tidak mengalami atau mendapat penghentian sementara dalam perdagangan saham Bank.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Lainnya

PENERBITAN	NAMA OBLIGASI	NILAI OBLIGASI	JATUH TEMPO	SUKU BUNGA	PERINGKAT DAN LEMBAGA PEMERINGKAT	
					2021	2020
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonsia Tbk (d.h PT Bank BRIsyariah	Rp1 Triliun	16 November 2023	9,5%	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia)	A (PT Fitch Ratings Indonesia)
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h PT Bank Syariah Mandiri)	Rp375 Miliar	22 Desember 2023	10%	AA (PEFINDO)	AA- (PEFINDO)

Penghargaan dan Sertifikasi



PENGHARGAAN



iNews Maker Awards 2021

The Best in Emerging Synergetic Business Initiative
I-News
20 April 2021



Infobank-UMKM Millenial Summit 2021

The Best
Infobank
6 Mei 2021



World's Best Banks Forbes 2021

The World's Best Banks 2021
Forbes
24 Mei 2021



The 12th IICD Corporate Governance Award 2021

Top 50 MID CAPITALIZATION PUBLIC LISTED COMPANY
Berita Satu & Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
31 Mei 2021



10th Infobank Digital Brand Award 2021

Best Overall BUS
Infobank
3 Juni 2021



10th Infobank Digital Brand Award 2021

Best Overall Tabungan BUS
Infobank
3 Juni 2021



10th Infobank Digital Brand Award 2021

Best Overall Deposito BUS
Infobank
3 Juni 2021



10th Infobank Digital Brand Award 2021

Best Overall KPR BUS
Infobank
3 Juni 2021



10th Infobank Digital Brand Award 2021

Best Overall Kartu Debit BUS
Infobank
3 Juni 2021



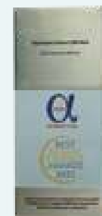
18th Banking Service Excellence Awards 2021

Golden Trophy Best Overall Performance
Infobank
29 Juni 2021



13th Best Islamic Finance Awards 2021

Best Islamic Finance Bank
Alpha South East Asia
05 Juli 2021



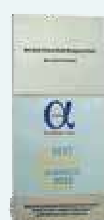
13th Best Islamic Finance Awards 2021

Best Islamic Finance SME Bank
Alpha South East Asia
05 Juli 2021



13th Best Islamic Finance Awards 2021

Best Islamic Finance Retail Bank
Alpha South East Asia
05 Juli 2021



13th Best Islamic Finance Awards 2021

Best Islamic Wealth Management Bank
Alpha South East Asia
05 Juli 2021



26th Infobank Awards 2021

The Strongest Performance Bank
Infobank
7 September 2021



26th Infobank Awards 2021

The Most Consistence Bank In Good Corporate Governance
Infobank
7 September 2021



PENGHARGAAN



26th Infobank Awards 2021

Platinum Trophy
Infobank
7 September 2021



Global Islamic Finance Awards 2021

GIFA Market Leadership Award (Islamic Banking) 2021
Global Finance Foundation
14 September 2021



Bisnis Indonesia Award 2021

Bank Terbaik Sektor Bank Syariah
Bisnis Indonesia
15 September 2021



10th Infobank Sharia Awards 2021

The Best Performance 2020
Infobank
30 September 2021



10th Infobank Sharia Awards 2021

The Best GCG 2020
Infobank
30 September 2021



10th Infobank Sharia Awards 2021

Platinum Awards as Sharia Institution with Predicate "10 Years Excellent"
Infobank
30 September 2021



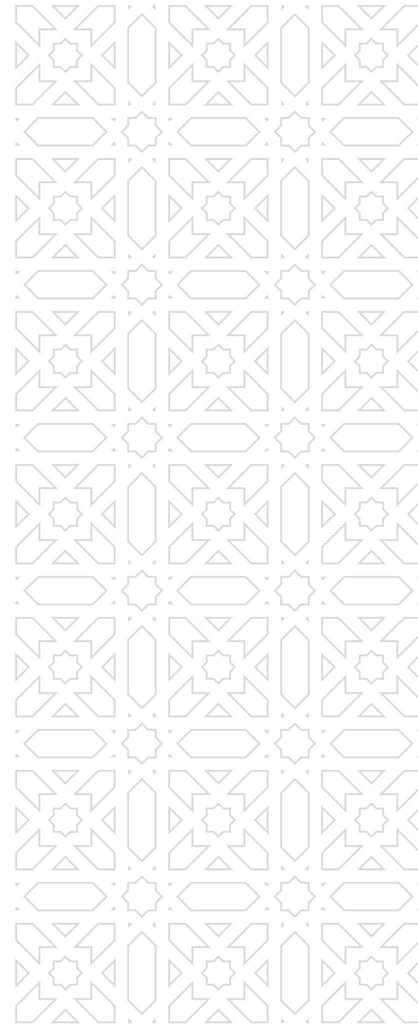
Best Syariah 2021

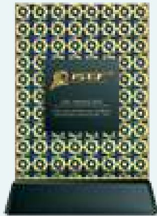
Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRI Syariah Tahun 2016
Majalah Investor
21 Oktober 2021



Best Syariah 2021

Bank Syariah Terbesar
Majalah Investor
21 Oktober 2021





ISEF Award 2021

Nominal Pembiayaan Bus dengan Aset di atas Rp50 Triliun
Bank Indonesia
30 Oktober 2021



CNBC Indonesia Awards 2021

The Strongest Islamic Bank 2021
CNBC Indonesia
11 November 2021



BI Awards 2021

Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik
Bank Indonesia
24 November 2021



Indonesia Best Brand Award 2021

The Most Valuable Brand in Indonesia category Sharia Banking
SWA
25 November 2021



CGPI Awards 2021

Most Trusted Companies 2021
IICG
8 Desember 2021



PENGHARGAAN



Anugerah Syariah Republika 2021

Bank Syariah Terbaik
Republika
8 Desember 2021



Anugerah Syariah Republika 2021

Bank Syariah Inovasi Digital Terbaik
Republika
8 Desember 2021



Islamic Retail Banking Award 2021

The Strongest Islamic Retail Bank in Indonesia 2021
Cambridge International Financial Advisory
16 Desember 2021



Islamic Retail Banking Award 2021

The Strongest Islamic Retail Bank in Asia-Pacific 2021
Cambridge International Financial Advisory
16 Desember 2021



SERTIFIKASI

	TANGGAL PEROLEHAN	SERTIFIKASI	PEMBERI/LEMBAGA SERTIFIKASI	MASA BERLAKU
	18 Mei 2021	ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu	British standards institution	2023
	20 Mei 2021	ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	British standards institution	2023
	17 Desember 2021	ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)	Tuvnord	2024

Peristiwa Penting





1 FEBRUARI

Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai 1 (satu) entitas hasil merger 3 (tiga) bank syariah BUMN.

4 FEBRUARI

Bank Syariah Indonesia memulai debut di pasar modal. BSI resmi masuk dalam jajaran 10 emiten dengan kapitalisasi pasar/*capitalitation market* terbesar.





23 APRIL

BSI salurkan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp8,6 triliun kepada lebih dari 60 ribu nasabah sebagai dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional.

7 MEI

BSI meluncurkan produk pembiayaan perumahan "Griya Si Muda" yang menyasar segmen milenial dalam mewujudkan: "Muda punya rumah, hobi gak ngalah".





3 MARET

BSI menjajaki kerja sama sukuk global, peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan di Uni Emirat Arab (UAE), serta struktur pembiayaan untuk pengembangan produk dengan Dubai Islamic Bank.

16 MARET

Bank Syariah Indonesia memulai penjualan perdana SR-014.





20 MEI

BSI meresmikan UPZ BSI untuk mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF. BAZNAS RI resmi menunjuk UPZ BSI sebagai salah satu mitra strategis dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahik.

26 MEI

Forbes nobatkan BSI sebagai The World’s Best Banks 2021.





4 JUNI

BSI berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan PT Pertamina (Persero) salurkan pembiayaan pertashop untuk pesantren. Hal ini mencakup bisnis pertashop serta fasilitas pembiayaan di lingkungan pesantren sebagai wujud komitmen membangun ekonomi umat bagi UMKM berbasis pesantren.

24 JUNI

BSI meluncurkan Inovasi fitur *Know your customer-Biometric* untuk pembukaan rekening secara *online* dengan cepat, mudah dan *seamless*. Hal ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam rangka menghadirkan kenyamanan & kemudahan bagi calon nasabah.





24 AGUSTUS

BSI Gelar RUPSLB dan menyepakati perubahan susunan Dewan Komisaris.

25 AGUSTUS

BSI gelar akad massal KPR Sejahtera dengan target penyaluran Rp1,1 triliun.





9 JULI

BSI dan Plasticpay luncurkan *vending machine* sampah plastik dalam program “Gerakan Ekonomi Hijau”.

21 JULI

BSI Salurkan lebih dari 3.000 hewan qurban di momen Idul Adha 1442 H.





2 SEPTEMBER

BSI bersama Kemensos RI melakukan percepatan penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Aceh.

13 SEPTEMBER

BSI meresmikan 13 kantor cabang digital di Gedung The Tower Jakarta untuk mewujudkan *One Stop Financial Banking* serta memberikan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi melalui kecepatan akses, ketepatan, serta keamanan dalam bertransaksi.





22 SEPTEMBER

BSI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 5 (lima) universitas terkemuka tentang program SSBM.

25 SEPTEMBER

BSI dan Dewan Masjid Indonesia jalin kerja sama untuk optimalkan peran masjid di tengah masyarakat.





1 NOVEMBER

BSI resmi beroperasi dengan Single System. BSI juga meluncurkan layanan pembiayaan mitraguna online melalui aplikasi BSI Mobile, sehingga proses pembiayaan lebih cepat, mudah, aman dan tentunya sesuai prinsip syariah.

4 NOVEMBER

BSI dapatkan Izin Prinsip Operasional di Dubai. BSI menerima *letter of incorporation* terkait operasional di Dubai. Dengan akta pendirian tersebut, BSI resmi menjadi bagian dari DIFC (Dubai International Financial Center)



19 OKTOBER

BSI meresmikan 4700 Agen BSI Smart sebagai agen layanan keuangan tanpa kantor, dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).





22 NOVEMBER

BSI gelar BSI Otoshow berkolaborasi dengan MUF Syariah untuk membidik pangsa pasar otomotif.

29 DESEMBER

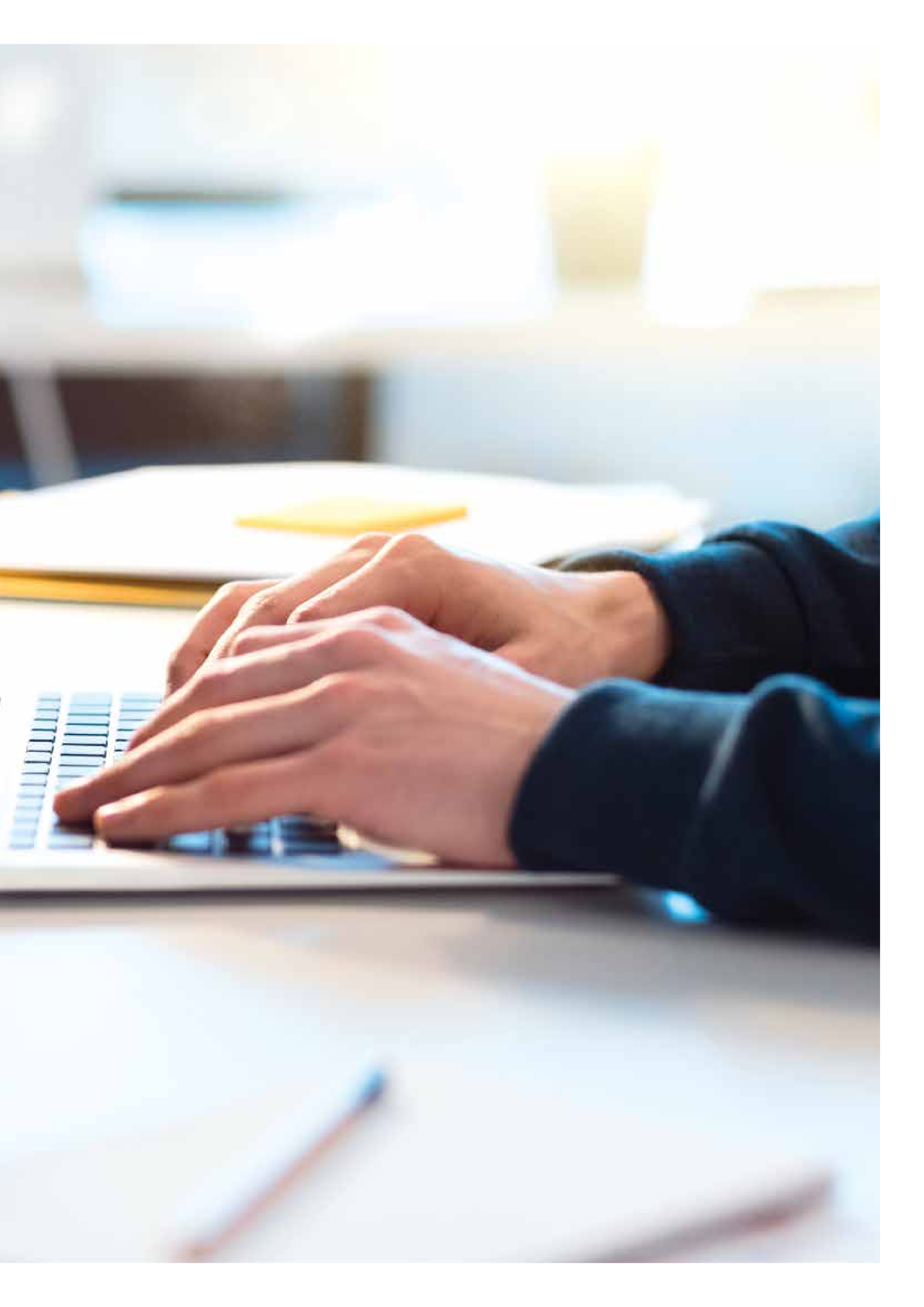
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI UMKM Center di Provinsi Aceh sebagai dukungan nyata dalam mengembangkan usaha rakyat yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Fasilitas dan layanan tersebut akan menjadi wadah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendapatkan pelatihan, pembinaan, pembiayaan hingga membantu proses pemasaran produk.

LAPORAN MANAJEMEN

Meskipun di tengah tantangan pandemi COVID-19, BSI mampu merespons situasi dengan baik melalui beragam inisiatif strategis yang tepat.

Rp265,3 Triliun

Total aset yang dibukukan oleh Bank pada tahun buku 2021





Adiwarman Azwar Karim*
Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen

* efektif menjabat per 7 Februari 2022

Laporan Dewan Komisaris

BSI hadir untuk melengkapi pilihan terhadap kebutuhan pelayanan jasa keuangan di negara dengan masyarakat yang majemuk ini. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi dikotomi antara bank syariah dan bank konvensional, karena BSI hadir bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua, demi kemajuan bersama.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") mampu menuntaskan peristiwa yang sangat fundamental, yaitu proses merger yang berlangsung dengan sangat baik. Dengan demikian, saat ini BSI telah memiliki standardisasi yang seragam dan dapat melayani nasabah melalui *single system*.

Kehadiran BSI tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang hingga kini terus dirasakan oleh Bank. Atas dukungan yang besar tersebut, kami senantiasa mendorong manajemen agar BSI mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional serta menjadi katalisator bagi ekosistem syariah.

BSI hadir untuk melengkapi pilihan terhadap kebutuhan pelayanan jasa keuangan di negara dengan masyarakat yang majemuk ini. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi dikotomi antara bank syariah dan bank konvensional, karena BSI hadir bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua, demi kemajuan bersama.

Kami berharap BSI menjadi lembaga penggerak dan dapat menyebarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi semua pihak. Kami akan selalu berupaya agar BSI mampu untuk terus memberikan kinerja terbaiknya serta senantiasa merangkul seluruh masyarakat dan memberikan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan.

Pandangan terhadap Kondisi Ekonomi dan Industri

Dalam pandangan Dewan Komisaris, tahun 2021 merupakan tahun pemulihan bagi perekonomian Indonesia setelah pandemi COVID-19 memberikan efek yang sangat berat bagi perekonomian nasional. Bahkan pada semester II-2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% (yoy), setelah mengalami kontraksi berturut-turut selama 4 (empat) kuartal.

Namun pada kuartal III-2021, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,51% (yoy). Hal tersebut, antara lain, merupakan implikasi dari pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 varian Delta di Tanah Air.

Untuk sektor perbankan, di tengah kondisi ekonomi yang menantang, pertumbuhan industri perbankan syariah terbukti lebih tangguh (*resilient*). Dari sisi aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan perbankan syariah berada di atas pertumbuhan perbankan nasional. Pada September 2021 misalnya, aset perbankan syariah tumbuh sebesar 12,24% (yoy), sedangkan perbankan nasional sebesar 7,46%.

Di sisi kredit/pembiayaan, perbankan syariah berhasil tumbuh sebesar 7,48% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional sebesar 2,26% (yoy). Begitu juga dari sisi DPK, perbankan syariah mampu tumbuh lebih tinggi dari perbankan nasional, yakni dengan pertumbuhan masing-masing 9,42% (yoy) dan 7,75% (yoy).

Penilaian Kinerja Direksi

Mengacu pada perkembangan kondisi ekonomi dan industri perbankan syariah, Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi sangat efektif dalam merespons situasi yang ada. Setidaknya kami menilai telah terdapat 4 (empat) fokus strategi yang direalisasikan sepanjang tahun 2021.

Pertama, integrasi operasional pasca *legal merger*. Kedua, mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Ketiga, mengelola efisiensi. Keempat, mendorong akselerasi kapabilitas digital. Inisiatif-inisiatif tersebut telah memberikan dampak positif bagi BSI.

Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris meninjau pencapaian kinerja operasional dan keuangan dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian dan industri. Penilaian juga memperhatikan laporan atas kertas kerja *self-assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester, dimana hal tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kriteria *self-assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. Ketiga aspek tersebut terbagi dalam beberapa indikator penilaian, yaitu *Governance Structure* terdiri dari 15 indikator, *Governance Process* terdiri dari 25 indikator, sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 14 indikator.

Dari seluruh aspek tersebut, hasil *self-assessment* GCG BSI untuk semester I dan II tahun 2021, keduanya mendapatkan peringkat Komposit 2 (“Baik”).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi atas pencapaian kinerja Bank yang sangat baik di 2021. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi mampu menghadapi tantangan perekonomian dan industri serta meraih peluang yang ada.

Pengawasan terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Berdasarkan SEOJK No.14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, yang antara lain mencakup kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan kepada OJK setiap semester.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap RBB berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasinya, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Realisasi RBB sebagai berikut:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Bisnis berupa Penilaian Aspek Kuantitatif maupun Kualitatif terhadap realisasi rencana bisnis, termasuk penerapan prinsip syariah, terdiri dari:
    a. Laporan Kinerja BSI
    b. Teknologi Informasi (TI)
    c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
    d. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
    e. Laporan Kinerja Kepatuhan
    f. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)
    g. *Sustainable Finance* (SF)
    h. Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK dan Auditor Ekstern Lainnya
    i. *Milestones* Pencapaian BSI
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank secara umum, khususnya faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), tata kelola yang baik, profil risiko, terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai Upaya Perbaikan Kinerja Bank.

Dewan Komisaris juga telah memberikan perhatian secara khusus terhadap jalannya kegiatan usaha Bank, salah satunya terkait operasional *merger* Bank di tengah masa pandemi. BSI harus mampu memastikan bahwa layanan kepada nasabah dapat berjalan dengan kualitas yang baik di tengah proses penggabungan operasional.

Integrasi budaya perusahaan atau proses "One Culture" dalam masa proses merger operasional turut menjadi perhatian Dewan Komisaris. Sinergi 3 (tiga) bank *legacy* dibutuhkan untuk optimalisasi pencapaian kinerja BSI ke depan agar Bank mampu menjadi 10 besar pemain global. Dewan Komisaris berharap "One Culture" dapat dibumikan ke dalam bentuk yang lebih konkret, seperti *standard operating procedur* (SOP) bahkan hingga mekanisme *reward and punishment*.

Penerapan teknologi informasi (TI) juga menjadi bagian dari perhatian Dewan Komisaris, karena merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan usaha Bank. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara berkala (triwulanan) melakukan rapat dengan Direksi guna memonitor progres penyelesaian proyek-proyek pengembangan TI termasuk pengembangan *digital banking*. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi, antara lain untuk memastikan seluruh inisiatif strategis proyek TI tahun 2021 selesai dilaksanakan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan, menetapkan *project charter* untuk setiap *project*, serta mengoptimalkan *project committee* sampai dengan level Direksi.

Merujuk pada berbagai hal tersebut di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah merumuskan rencana bisnis BSI dengan baik dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bahkan dari sisi implementasi, berdasarkan pemantauan Dewan Komisaris, Direksi telah menjalankan segala sesuatunya dengan sangat baik, dari pemantauan hingga keterlibatannya yang maksimal, mengingat BSI merupakan entitas yang baru lahir.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional. Pertimbangan Dewan Komisaris mengacu pada proyeksi kondisi perekonomian dan industri perbankan ke depan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki Bank serta tren pertumbuhan kinerja Bank. Dewan Komisaris meyakini bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar, khususnya pada segmen ritel sebagaimana fokus pertumbuhan BSI ke depan.

Dewan Komisaris akan memastikan prospek BSI ke depan tetap sejalan dengan amanah dari Presiden Republik Indonesia. Pertama, BSI harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal. Artinya, harus terbuka, inklusif, menyambut baik siapa pun yang ingin menjadi nasabah agar menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air.

Kedua, BSI mampu menarik minat generasi muda untuk menjadi nasabah dan turut berperan dalam memajukan ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Sebab, jumlah generasi muda Indonesia saat ini yang cukup besar menjadi peluang bagus bagi perwujudan hal tersebut.

Ketiga, produk dan layanan keuangan syariah BSI harus kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen nasabahnya, mulai dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), korporasi, hingga ritel. Keempat, BSI juga diharapkan dapat memfasilitasi nasabah agar cepat naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi negara.

Dewan Komisaris menilai masih banyak ruang yang bisa dijangkau oleh Bank. Di antaranya, pengembangan ekonomi umat melalui sektor zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf), misalnya melalui masjid dan pesantren, pendampingan dan pengembangan UMKM, dan banyak hal lainnya bahkan dalam aspek pendidikan, di mana Bank dapat berkontribusi lebih melalui BSI University.

Dari sisi global, Dewan Komisaris meyakini Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi perbankan syariah di dunia, yang ditandai dengan berdirinya BSI. Hal ini juga didukung oleh kemampuan perekonomian serta diakuinya moderasi beragama di Indonesia oleh dunia.

Dewan Komisaris melihat bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi juga telah mengarah pada pemenuhan seluruh amanah di atas, sehingga kami meyakini bahwa Bank akan mampu mewujudkan visi dan misi yang dimilikinya sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BSI telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*/GCG) yang berasaskan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, serta mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan usahanya.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara proses, penerapan GCG di seluruh Bank telah berjalan dengan baik. Evaluasi efektivitas penerapan GCG telah dilaksanakan oleh BSI secara periodik (semesteran) melalui mekanisme *self-assessment* terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *self-assessment* tersebut juga dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hasilnya, pada semester I-2021 dan semester II-2021, *self-assessment* terhadap GCG BSI mendapatkan skor 2 atau masuk ke dalam kategori "Baik".

Efektivitas penerapan GCG Bank juga telah mendapat pengakuan dari pihak eksternal. BSI mendapatkan penghargaan sebagai "Indonesia Most Trusted Companies" dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) *Award* 2021 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Whistleblowing System (WBS): Penerapan di Bank dan Peran Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, BSI juga telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Penerapan WBS bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan transparan, yaitu dengan menindaklanjuti pengaduan atau pengungkapan atas berbagai hal yang dapat mengakibatkan kerugian baik yang terkait keuangan maupun non keuangan, termasuk penurunan citra Bank. WBS telah dirancang untuk memastikan setiap pelanggaran di lingkungan Bank dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu proses bisnis yang sedang berlangsung demi menjaga reputasi Bank.

Dewan Komisaris mencermati bahwa penerapan WBS berjalan dengan cukup baik. Pengaduan terhadap masalah dan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, dan pengelola WBS dapat memastikan bahwa pihak pengadu (*whistleblower*) menyampaikan informasi dengan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai sistem WBS yang diterapkan Bank, setiap Insan BSI ataupun pihak eksternal yang menjadi penyampai informasi akan mendapatkan perlindungan, sejalan dengan komitmen Bank untuk menegakkan etika, moral dan hukum.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung peningkatan efektivitas implementasi WBS dan mendorong pengelola WBS untuk dapat meningkatkan efektifitasnya. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang berintegritas dan menciptakan iklim transparansi terhadap sumber daya yang ada di Bank. Pelaksanaan WBS merupakan bagian dari pengawasan Dewan Komisaris, sehingga kami memiliki keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sistem tersebut.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Anggota Direksi

Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Komisaris memastikan berbagai rencana dan strategi yang tertuang dalam RBB telah dilaksanakan oleh Direksi. Hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting mengingat pelaksanaan rencana dan strategi tersebut akan sangat menentukan tercapainya target yang dituangkan dalam RBB.

Terkait dengan mekanisme pengawasan, Dewan Komisaris telah melaksanakannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat aktivitas Bank maupun ke unit-unit dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi. Sedangkan mekanisme secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi melakukan kunjungan lapangan ke Region 1 Aceh, Region IX Surabaya, Region X Banjarmasin dan Region XI Makassar.

Pemberian Nasihat

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi telah terjalin dengan sangat baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati pada tugas dan wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi terkait operasional dan finansial Bank.

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi, yaitu dalam rapat gabungan, untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi. Dalam forum itu, Dewan Komisaris telah meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Bank dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga telah menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat terkait hal tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 35 kali rapat, yang terdiri dari 22 kali rapat internal Dewan Komisaris, 10 kali rapat Komisaris-Direksi dan 3 kali rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.

Selain forum rapat gabungan, Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat dengan tersebut telah dilakukan dengan mengundang Direksi atau grup terkait, untuk rapat Komite Audit telah dilakukan sebanyak 26 kali, Komite Pemantau Risiko sebanyak 49 kali, serta Komite Nominasi dan Remunerasi 5 (lima) kali.

Di luar mekanisme rapat, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung melalui surat menyurat. Hal ini dilakukan agar terdapat dokumentasi yang jelas dan baku serta lebih sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Penilaian Terhadap Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris menilai ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris dengan baik.

Komite Audit secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Satuan Pengawas Internal untuk membahas rencana, realisasi, dan temuan audit. Hasil pertemuan tersebut secara periodik telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko secara rutin melakukan pengawasan dari laporan yang disajikan oleh manajemen, khususnya yang terkait dengan eksposur risiko yang dihadapi oleh BSI. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Komite Pemantau Risiko juga telah mengadakan pertemuan dengan grup terkait dan melakukan pemantauan secara langsung di lapangan.

Begitu pula dengan Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah melakukan penilaian terhadap kesesuaian organisasi BSI dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melakukan penjaringan dan seleksi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk direkomendasikan kepada RUPS.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2021, BSI telah melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 24 Agustus 2021, yaitu memberhentikan dengan hormat Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen serta memberhentikan dengan hormat Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya mengangkat Adiwarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen serta mengangkat Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Perubahan tersebut merupakan usulan Pemegang Saham Pengendali Utama (PSPU) yang disampaikan kepada RUPS dalam surat PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk nomor CMB/823/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris, yang kemudian diputuskan oleh RUPS Luar Biasa BSI tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah RUPSLB Nomor 38, dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 8 September 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris BSI per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	**Adiwarman Azwar Karim**
Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	**Muhammad Zainul Majdi**
Komisaris Independen	**Komaruddin Hidayat**
Komisaris Independen	**Bangun Sarwito Kusmulyono**
Komisaris Independen	**Muhammad Arief Rosyid Hasan**
Komisaris	**Suyanto**
Komisaris	**Masduki Baidlowi**
Komisaris	**Imam Budi Sarjito**
Komisaris	**Sutanto**

Penutup dan Apresiasi

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi atas capaian Direksi dalam menghadapi tantangan maupun menangkap peluang yang terjadi pada kondisi perekonomian dan industri di tahun 2021. Tidak lupa juga kami memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap karyawan atas kerja keras, kekompakan, dan dedikasinya sehingga BSI dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia serta berhasil memberikan kinerja terbaiknya.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemegang saham, pemerintah, nasabah, mitra strategis, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada BSI. Kami berharap ke depan, sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga BSI mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi seluruh *stakeholders.*

Jakarta, 30 Maret 2022

Atas Nama Dewan Komisaris

Adiwarman Azwar Karim
Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen





Dewan Komisaris

Dari kiri ke kanan:

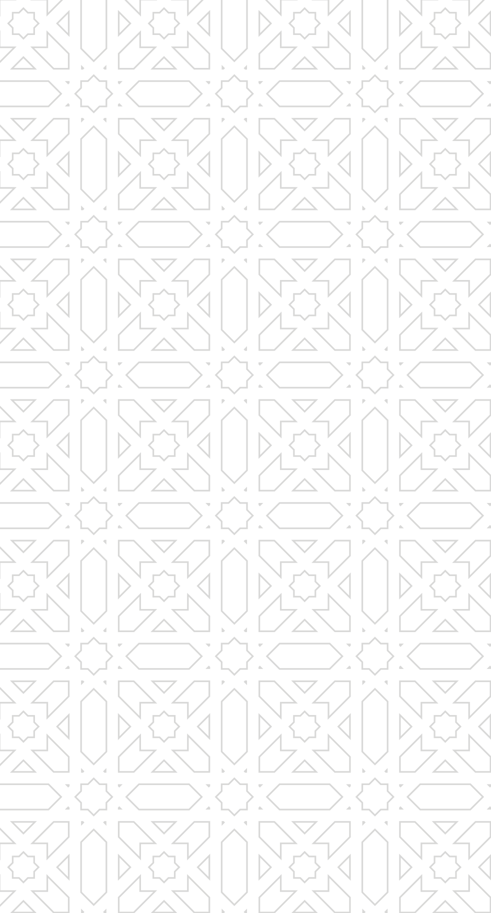
1. M. Arief Rosyid Hasan
   Komisaris Independen
2. Muhammad Zainul Majdi
   Wakil Komisaris Utama
   Komisaris Independen
3. Suyanto
   Komisaris
4. Adiwarman Azwar Karim
   Komisaris Utama
   Komisaris Independen
5. Bangun Sarwito Kusmulyono
   Komisaris Independen
6. Sutanto
   Komisaris
7. Komaruddin Hidayat
   Komisaris Independen
8. Imam Budi Sarjito
   Komisaris
9. Masduki Baidlowi
   Komisaris


BSI

Laporan Direksi

Hery Gunardi
Direktur Utama

Penerapan kebijakan strategis Bank & bersikap agile menghadapi perkembangan kondisi merupakan kunci dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik.



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas izin dan karunia-Nya, tahun 2021 menjadi tahun bersejarah, karena kelahiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank"), yang hadir dengan mengemban sebuah amanah besar untuk perkembangan perbankan syariah nasional dan memberikan energi baru untuk Indonesia.

Merupakan kehormatan bagi saya, mewakili seluruh anggota Direksi untuk menyampaikan bahwa amanah tersebut dapat kami jalankan sepanjang tahun 2021 dengan pencapaian kinerja yang sangat baik di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2021 masih merupakan langkah awal bagi BSI untuk dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* dan berkontribusi lebih dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi kami optimis peluang BSI akan semakin terbuka luas untuk terus berkembang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga penetrasi ke pasar global.

Keberhasilan BSI dalam mencapai kinerja yang solid pada tahun 2021 tidak hanya terkait aspek keuangan, namun juga tercermin dalam rangkaian proses kehadiran BSI sebagai sebuah entitas besar hasil penggabungan 3 (tiga) bank: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRIsyariah. Dalam hal ini, pencapaian dimaksud, antara lain berkenaan dengan merger dari sisi operasional dan integrasi untuk melahirkan tata kelola perusahaan yang baik, organisasi yang kuat serta mekanisme atau alur kerja yang tepat dan efisien, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar sehingga BSI tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh nasabah.

Alhamdulilah, proses integrasi tersebut berjalan baik. Setelah resmi bergabung pada 1 Februari 2021 (*Legal Day 1*), Bank secara resmi berhasil mengoperasikan *single system* pada 1 November 2021 yang kami namai sebagai *Operational Day 1* atau *Customer Day 1*. Dengan layanan sistem tunggal tersebut, BSI dapat melayani seluruh nasabah dari ketiga bank yang bergabung melalui produk dan layanan yang prima.

Kini, semua telah menjadi 1 (satu) ekosistem di dalam BSI. Nyaris tidak ada hambatan berarti. Semua ini tentu saja berkat kerja keras tim merger serta seluruh pemangku kepentingan dalam memproses penggabungan serta mengintegrasikan aktivitas operasional, layanan, serta produk, sehingga saat ini BSI telah memiliki fundamental yang kuat untuk menatap masa depan.

Energi Baru untuk Indonesia

Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi warna tersendiri bagi industri perbankan nasional pada tahun 2021. BSI saat ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, dan mampu bersaing dengan bank umum lainnya, dimana BSI berada di posisi ke-7 bank dengan aset terbesar di Indonesia.

BSI akan memberikan energi baru untuk Indonesia, terutama melalui fungsi intermediasi yang dijalankan. BSI hadir dengan menggabungkan kekuatan atau kelebihan yang ada pada ketiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, maupun produk dan solusi layanan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah yang bersifat inklusif.

BSI juga memiliki infrastruktur dan fundamental yang kuat. Total aset pada tahun 2021 mencapai Rp265 triliun. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang berjumlah 1.244 tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Bank juga didukung oleh jumlah karyawan yang mencapai 19.449 orang. Infrastruktur ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bank untuk berkontribusi positif pada industri perbankan dan perekonomian nasional.

Kehadiran BSI juga merupakan jawaban atas ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap perbankan syariah, mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk. Walaupun perbankan syariah sudah hadir selama 30 tahun di industri perbankan nasional, namun pangsa pasarnya masih di bawah 10%. Penyebab rendahnya daya serap pasar perbankan syariah antara lain adalah permodalan, jaringan dan literasi.

Oleh karena itu, kehadiran bank syariah yang memiliki kemampuan baik dari sisi finansial maupun teknologi menjadi sangat penting, untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan meraih pangsa pasar syariah yang saat ini belum terjamah.

Kemampuan BSI yang setara dengan bank-bank besar di Tanah Air akan mampu memberikan kontribusi besar bagi nasabah, masyarakat, industri perbankan, serta perekonomian nasional. Dengan modal serta jaringan kuat, BSI memiliki banyak kesempatan untuk mendistribusikan manfaat, baik dari sisi fungsi intermediasi maupun layanan jasa keuangan lainnya.

Kendati demikian, BSI bukan merupakan bank yang eksklusif, karena terbuka bagi seluruh segmen. Siapa pun dapat menjadi nasabah atau mitra Bank, karena BSI merupakan bank syariah yang modern dan universal. BSI hadir untuk memberikan manfaat bagi nasabah, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Perubahan Penting pada Bank

Sekitar 7 (tujuh) bulan setelah merger secara legal rampung, BSI berhasil mengintegrasikan sistem dari ketiga bank *legacy*, yang menjadi bagian penting dari integrasi di bidang operasional, yaitu menjadi *single system*. Seluruh produk dan jasa telah dilayani dalam 1 (satu) sistem di bawah BSI. Begitu juga dengan sistem pelaporan.

Selain itu, pada 2021 BSI telah mulai menunjukkan kehadirannya di luar negeri, melalui *representative office* di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal ini tentu menjadi tahap awal bagi Bank untuk dapat menggarap potensi pasar global serta menjadi jendela alternatif bagi investor global untuk masuk ke Indonesia.

BSI telah menerima *letter of incorporation* dari Dubai International Financial Center (DIFC) pada 4 November 2021, sebagai tanda BSI dapat beroperasi di Dubai. Langkah strategis ini menandai bahwa bank syariah terbesar di Tanah Air ini secara resmi dapat membuka pasar di wilayah Timur Tengah.

Melalui akta yang diterima tersebut, BSI resmi menjadi bagian dari DIFC. Hal itu membuat BSI selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya sebagai pemain kunci dalam industri perbankan syariah global.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berharap dapat meraih potensi pasar syariah di dunia yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh perbankan nasional. Melalui kehadiran di Dubai, Bank ingin menjadi pelaku utama dalam mendorong dan menumbuhkan ekonomi syariah Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi tokoh utama dalam ekonomi syariah dunia.

Langkah ini juga menandai rekam jejak pertama BSI di pasar global. BSI akan menjadi bank dari Indonesia pertama yang memiliki kantor perwakilan di kawasan Timur Tengah. Dengan ekspansi ini, BSI berharap dapat mewujudkan misinya sebagai "Top 10 Global Islamic Bank" berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2025.

Kondisi Perekonomian dan Industri

Memasuki tahun 2021, kondisi perekonomian masih bergerak dinamis. Kinerja perekonomian nasional pada Triwulan I-2021 masih mengalami kontraksi, namun jauh lebih baik dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Memasuki Triwulan II-2021 terjadi pembalikan. Ekonomi nasional tumbuh sebesar 7,07% secara tahunan (*year on year*/yoy). Namun kembali bergerak turun menjadi 3,51% (yoy) pada Triwulan III-2021 karena konsumsi menurun dan aktivitas bisnis di berbagai sektor yang bergantung pada aktivitas fisik terhenti akibat penyebaran varian baru COVID-19, yaitu varian Delta di dalam negeri.

Kondisi tersebut terjadi sebagai konsekuensi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan Pemerintah melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga aktivitas sosial dan ekonomi kembali melambat.

Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi yang masif, mampu meredakan pandemi. Aktivitas masyarakat pun kembali bergairah.

Keberhasilan pengendalian pandemi tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV-2021 tumbuh 5,1% (yoy). Pada periode ini, hampir seluruh sektor usaha telah tumbuh positif.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, kinerja industri perbankan khususnya syariah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun penghimpunan dana. Bahkan pangsa pasar perbankan syariah sudah mendekati 7% dalam perbankan nasional.

BSI akan terus melakukan upaya untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi sejalan dengan program pemerintah, antara lain dengan melakukan restrukturisasi debitur terdampak COVID-19 agar tetap terus dapat menjalankan usaha, sesuai dengan kebijakan stimulus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sektor jasa keuangan khususnya terkait dengan restrukturisasi pembiayaan.

Seiring dengan upaya tersebut, Bank juga akan terus menyalurkan pembiayaan, terutama kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar lebih berkembang dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank, menerbitkan produk dan layanan yang inovatif sesuai trend pertumbuhan digitalisasi saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara syariah, serta ekspansi bisnis lainnya untuk mencapai tujuan Bank sesuai visi dan misi BSI.

Kinerja Usaha Tahun 2021

Kendala dan Tantangan

Pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali masih menjadi tantangan bagi industri perbankan, begitu juga yang dialami oleh BSI. Bahkan pada tahun 2021 Indonesia sempat mengalami 2 (dua) kali lonjakan kasus COVID-19, yaitu pada Januari dan Juli.

Kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah untuk meredam tingkat penyebaran pandemi turut menurunkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga hal ini juga menekan kegiatan dunia usaha. Industri perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi turut terdampak, seperti terjadinya perlambatan tingkat permintaan kredit.

Terkait dengan industri, kehadiran bank digital dan financial technology (Fintech) yang mampu menghadirkan layanan keuangan dengan tingkat kecepatan inovasi tinggi menjadikan pemicu percepatan digitalisasi perbankan. Selain itu, tingkat kebutuhan nasabah terhadap layanan digital yang dapat diandalkan juga berkembang pesat, yang antara lain diakselerasi oleh kondisi pandemi, sehingga membuat nasabah lebih banyak melakukan transaksi perbankan melalui sistem *online*.

Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi oleh Bank terutama pada proses integrasi operasional. Di antaranya, berkenaan dengan jaringan dan layanan, produk, teknologi informasi dan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kultur perusahaan.

Kebijakan dan Strategi 2021

Menjawab tantangan tersebut, BSI menetapkan beberapa strategi untuk terus tumbuh di era pandemi. Salah satunya adalah fokus ekspansi pada sektor-sektor usaha yang terbukti mampu bertahan di periode pandemi tahun sebelumnya, yaitu segmen konsumer dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terdapat tiga fokus utama BSI pada tahun 2021, yaitu mengoptimalkan pasar ritel, mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan UMKM, dan peningkatan penetrasi pada sektor *wholesale*.

Optimalisasi pasar ritel dilakukan melalui pertumbuhan pembiayaan konsumer, *priority banking*, peningkatan penetrasi produk digital dalam memenuhi kebutuhan nasabah serta penurunan *cost of fund* yang lebih efisien.

Pada aspek digital, BSI terus melakukan inovasi produk dan layanan *digital banking*. Upaya ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam serta merespons perkembangan yang terjadi di industri keuangan, khsusunya perbankan. Bank mengutamakan kecepatan, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi melalui berbagai layanan digital yang ditawarkan.

Sebagai upaya memperlancar integrasi operasional, Bank telah membentuk *Project Management Office* (PMO) yang berperan banyak dalam proses merger, baik dari proses awal seperti *due dilligent*, menganalisa aspek hukum, dan sebagainya hingga memetakan strategi ke depan. Hal ini dapat dicapai tentunya dengan adanya pelaksanaan manajemen proyek yang ketat dan disiplin.

Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil. Mulai 1 November 2021, BSI dapat beroperasi dengan satu *core banking system*, satu kode bank, satu pelaporan, dan satu *e-channel* untuk seluruh nasabah di Indonesia.

Dalam segmen UMKM, BSI fokus pada penyaluran pendanaan termasuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebagai bentuk dukungan kami terhadap Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selain segmen konsumer dan UMKM tersebut, BSI juga meningkatkan penetrasi pada sektor Wholesale yang selama ini belum maksimal dijangkau oleh perbankan syariah, melalui kerjasama dengan berbagai institusi yang mendukung ekosistem industri syariah.

Kebijakan dan strategi penting lainnya yang diambil oleh Bank adalah membuka cabang di Dubai, Uni Emirat Arab. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari visi BSI untuk "Menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar pada tahun 2025" dengan arah pengembangan BSI: *Beyond Banking*, *Beyond Organic*, dan *Beyond* Indonesia.

Dalam strategi *Beyond* Indonesia, Dubai sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia menjadi *footprint* strategis untuk memperat hubungan bilateral Indonesia dan United Arab Emirates serta Negara Timur Tengah lainnya.

Ekspansi di Dubai diharapkan akan memberikan manfaat yang optimal sekaligus untuk menggali potensi bisnis skala global, yang antara lain adalah:

1. Memperluas *investor base* di skala global.
2. Menciptakan perspektif positif di pasar yang mendorong peningkatan *market capitalization* Bank Syariah Indonesia.
3. Menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai *One-Stop Sharia Financial Solution* berskala global.
4. Mendukung Bank Syariah Indonesia untuk mengembangkan ragam produk dan layanannya sesuai dengan *global best practice.*
5. Menciptakan talenta *global sharia banker* yang profesional dan berwawasan global
6. Memberikan dukungan nasabah *wholesale* dalam melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri khususnya di kawasan Timur Tengah.

Dengan telah diterimanya *letter of incorporation* terkait operasional BSI di Dubai, maka BSI resmi menjadi bagian dari Dubai International Financial Center (DIFC). Selanjutnya, kehadiran BSI di Dubai akan menggarap bisnis global sukuk dan remitansi dengan menyasar segmen *wholesale banking* & *retail banking*.

Peran Direksi: Perumusan Strategi dan Implementasi Kebijakan

Dalam perumusan strategi Bank, sebagai *top manajemen*, Direksi memiliki peran penting untuk menentukan strategi yang akan dijalankan oleh Bank. Strategi tersebut merupakan rangkaian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan visi dan misi BSI secara jangka panjang.

Direksi berperan merumuskan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, membuat kerangka rencana dan kebijakan, serta mengatur sumber daya organisasi. Selain itu, Direksi juga merumuskan strategi khusus untuk mencapai target yang ditetapkan.

Untuk memastikan seluruh kebijakan dan strategi berjalan sesuai yang direncanakan, Direksi membuat agenda rapat secara berkala dengan direktorat dan grup terkait. Hal ini bertujuan untuk memantau pencapaian target dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menentukan strategi untuk mengatasi kendala dan tantangan yang teridentifikasi.

Selain itu, proses pemantauan implementasi strategi oleh Direksi dilakukan melalui laporan berkala yang dibuat oleh organisasi Bank, baik harian maupun bulanan. Dengan demikian, Direksi dapat memantau kondisi terkini bisnis Bank, termasuk pelaksanaan strategi yang telah ditentukan.

Perbandingan Realisasi dan Target

Meskipun masih dalam tahap intergrasi mengingat tahun buku 2021 merupakan tahun pertama setelah merger, Bank telah mampu mencapai kinerja yang sangat baik. Dari sisi laba bersih, BSI berhasil membukukan Rp3,02 triliun, tumbuh 38,42% secara tahunan atau *year on year* (yoy). Dibandingkan dengan target sebesar Rp2,9 triliun, realisasi ini mencapai 104,28%.

Pencapaian di atas, antara lain berasal dari penurunan beban bagi hasil dengan *cost of fund* yang menurun, dari 2,68% pada 2020 menjadi 2,03% pada 2021. Selain itu, pendapatan *fee based income* mencapai Rp3,06 triliun atau 111,25% dari target. Kontribusi *fee based income* terhadap total pendapatan adalah sebesar 17,32%.

Penyaluran dana Bank pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp171,29 triliun, meningkat 9,32% yoy atau 102,65% dari target. Kualitas aset juga tetap terjaga, dengan *non performing financing* (NPF) sebesar 2,93% serta *cash coverage* sebesar 148,87%.

Penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang direalisasikan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp39,37 triliun atau sebesar 23,05% dari total pembiayaan yang mencapai Rp171,29 triliun. Nominal penyaluran tersebut meningkat Rp4,38 triliun dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp34,99 triliun atau 22,39% terhadap pembiayaan yang sebesar Rp156,70 triliun.

Untuk penghimpunan dana, Bank membukukan Rp233,25 triliun pada tahun 2021, meningkat 11,12% yoy. Dibandingkan dengan target, realisasinya adalah 107,78%. Adapun komposisi dana murah (CASA) tercatat sebesar 57,91% dari total penghimpunan dana.

Total aset yang dibukukan oleh Bank pada tahun buku 2021 mencapai Rp265,3 triliun, naik 10,73% secara yoy.

Persentase Imbalan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

BSI menerapkan beberapa kebijakan untuk mendukung kinerja Bank, antara lain dengan memberlakukan pembatasan spesial nisbah. Dengan demikian, Bank dapat menurunkan *cost of fund* hingga 65 basis poin (bps) secara tahunan, dari 2,68% di Desember 2020 menjadi 2,03% pada tahun 2021.

Di samping itu, untuk meningkatkan ekspansi pembiayaan, Bank juga memberikan *special pricing* untuk beberapa segmen yang menjadi fokus pertumbuhan. Secara *blended yield*, pembiayaan BSI turun dari 10,13% di tahun 2020 menjadi 9,57% di tahun 2021.

Analisis Prospek Usaha 2022 dan Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang

Prospek Usaha

Prospek usaha Bank pada tahun 2022 diharapkan semakin membaik seiring dengan kebijakan pemerintah yang terus berupaya mengendalikan COVID-19. Aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan mendorong gairah perekonomian. Dengan demikian, fungsi intermediasi Bank berpotensi tumbuh seiring dengan naiknya tingkat permintaan dari pemulihan kegitan usaha.

Didukung olah permodalan yang memadai, Bank optimistis mampu menjangkau pembiayaan yang lebih luas, bahkan hingga kebutuhan korporasi besar serta melayani beragam segmen. BSI akan lebih leluasa untuk melakukan ekspansi dan inovasi dari sisi produk serta layanan.

Guna mendorong pengembangan kapabilitas dan pencapaian bisnis, Bank akan memaksimalkan pertumbuhan baik dari sisi organik dan non organik. Semua itu telah disiapkan oleh Bank, termasuk di dalamnya adalah mengembangkan produk dan layanan.

Sejumlah inisiatif strategi telah disiapkan pada tahun 2022, di antaranya penguatan pada lini bisnis *wholesale* & *transactional banking*, *retail banking*, serta akselerasi kapabilitas digital. Bank juga menyiapkan strategi untuk menggarap potensi *islamic ecosystem*, penataan jaringan kantor, dan menggali peluang pertumbuhan non organik. Semua upaya pengembangan tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan dan produk yang lebih lengkap kepada nasabah.

Pada saat bersamaan, Bank juga menerapkan tingkat kehati-hatian yang tinggi, sehingga pertumbuhan yang diraih akan berjalan secara berkesinambungan.

Hal-hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang

Saat ini, sekitar 53,8% masyarakat Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Dalam 7 (tujuh) tahun ke depan, generasi tersebut berada pada rentang usia produktif dan merupakan generasi yang *digital minded.*

Fenomena kehadiran bank digital dan *fintech* telah mengubah perilaku nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, dari semula lebih banyak *offline* seperti datang ke cabang atau anjungan tunai mandiri, menjadi online melalui sistem *digital banking*. Bahkan saat ini jumlah perusahaan *fintech* telah mencapai lebih dari 100 perusahaan yang terdaftar di OJK. Perkembangan ini ikut mempercepat perubahan perilaku tersebut.

Industri perbankan harus beradaptasi. Perbankan didorong untuk memiliki kemampuan menghadirkan layanan keuangan dengan tingkat kecepatan inovasi yang tinggi.

Menghadapi perkembangan tersebut, BSI terus melakukan inovasi produk dan layanan *digital banking* guna memenuhi kebutuhan nasabah, terutama milenial dan Gen Z, yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Selain itu, tren yang juga sedang berkembang di masyarakat adalah semakin banyaknya komunitas-komunitas syariah, yaitu komunitas yang berkeinginan menjalankan gaya hidup yang halal (*halal lifestyle*) sesuai prinsip syariah. Beberapa di antaranya meliputi sejumlah komunitas pengajian, komunitas hijrah (Hijrah Fest), komunitas sedekah, komunitas sastra Islami, komunitas pengusaha muslim, komunitas penghafal Al-Qur'an, dan sebagainya.

Pekembangan sosial tersebut merupakan bagian dari tren hijrah yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Berdasarkan data IDN Research Institute 2019, meskipun hijrah merupakan tidakan individu, namun banyak komunitas yang sering mengadakan kegiatan untuk menyebarkan kesadaran hijrah di masyarakat. Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan hijrah sebagian besar akan mengubah perilaku sosial dalam mengonsumsi produk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi peluang bagi BSI untuk menggarap komunitas tersebut.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun pangsa pasar perbankan syariah masih berada di level 6%. Penyebabnya, antara lain masih kurangnya literasi dan inklusi keuangan syariah, yang masing-masing baru mencapai 8,9% dan 9,1%. Perbankan syariah jauh tertinggal dari perbankan konvensional yang tingkat literasi masyarakatnya telah mencapai 37,7% dan inklusi keuangannya mencapai 75,3%.

Begitu juga dengan masih terbatasnya akses perbankan syariah, yang saat ini masih sangat rendah dibandingkan layanan keuangan konvensional. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi perkembangan perbankan syariah.

BSI perlu menjawab peluang dan tantangan tersebut. Di antaranya, dengan mendorong kapabilitas digital untuk menjawab tantangan era digitalisasi termasuk *fintech* dan neobank konvensional, menggarap potensi *islamic ecosystem* yang sedang menjadi tren, penataan jaringan kantor, dan melakukan *inorganic growth* untuk memperkuat permodalan.

Adapun beberapa hal yang dianggap penting oleh Bank atas perkiraan yang terjadi di masa akan datang antara lain adalah:

1. Banking *Anywhere* & *Anytime*
   Ke depan, *mindset* nasabah yang membutuhkan layanan praktis dan cepat dalam segala hal akan terus berkembang, tidak terkecuali pada sektor perbankan.
2. *Agile Organization*
   Secara internal, Bank akan lebih efisien dan fleksibel dalam kegiatan operasional agar lebih tanggap pada perubahan yang akan terjadi.
3. *Value Proposition*
   Untuk mampu bertahan Bank harus mempunyai nilai yang unggul dan berbeda. Nilai syariah yang menjunjung tinggi nilai kebaikan, dapat menjadi faktor penentu ke depannya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BSI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi guna mendukung upaya Bank dalam mencapai tujuan serta visi, misi dan target yang telah ditetapkan. Penerapan tata kelola tersebut, baik secara sistem maupun prosedur telah dirumuskan sejak sebelum dimulainya proses merger dan terus diperbaiki seiring dengan berjalannya kegiatan usaha Bank. Dalam menyusun sistem tata kelola perusahaan, BSI mengambil *best practice* dari masing-masing bank *legacy* untuk kemudian disempurnakan dan diimplementasikan di BSI.

Secara prinsip, BSI menerapkan *Three Lines Model* guna membantu organisasi Bank dalam mengidentifikasi struktur dan proses yang paling efektif untuk mencapai tujuan perusahaan, serta memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Selain memiliki organ pendukung, BSI juga memiliki hierarki ketentuan untuk mendukung pelaksanaan kegitan bisnis dan operasional Bank.

Untuk membangun ketahanan dan pertumbuhan Bank secara berkelanjutan, salah satu yang dilakukan oleh BSI adalah dengan menerapkan GRC (*governance*, *risk*, *compliance*). Fungsi dari metode ini adalah untuk mengintegrasikan proses-proses pengelolaan bisnis dan risiko dalam rangka mencapai tujuan, yang mengacu pada panduan mencapai model GRC yang disusun oleh GRC Forum Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) sebagai salah satu kunci dalam melakukan inovasi produk dan layanan menjadi faktor penting yang terus dikembangkan BSI. Manfaat teknologi informasi antara lain adalah untuk efisiensi proses, *enabler* unit bisnis guna menunjang kebutuhan nasabah, serta sebagai alat dalam menghadapi persaingan bisnis dengan memperhatikan kebutuhan nasabah dan perubahan teknologi yang sesuai dengan rencana Bank.

Setelah *operational merger*, BSI secara operasional dijalankan dengan satu *business process*, satu kode bank, dan satu *core banking*. Pengembangan TI tentu menjadi prioritas utama guna memastikan operasional dan bisnis Bank tetap berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, BSI telah menyiapkan *roadmap* sebagai panduan seluruh unit kerja di Bank dalam mempersiapkan strategi pengembangan TI.

Dalam pengembangan TI, BSI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan layanan yang maksimal dan memudahkan nasabah. Misalnya dengan pembukaan rekening yang dapat dilakukan melalui metode *know your customer* (KYC), sehingga memudahkan nasabah tanpa perlu datang ke cabang. Kemudian, terkait pengembangan *mobile banking*, Bank tidak hanya menghadirkan solusi finansial dengan menjadi "sahabat finansial", tetapi juga ditujukan untuk menjadi "sahabat sosial" dan "sahabat spritual".

Pada tahun 2021, BSI fokus dalam menyatukan sistem yang digunakan untuk operasional bank termasuk yang bertujuan memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Selain itu, Bank fokus dalam penguatan kapasitas *infrastructure*, *cybersecurity improvement*, pengembangan *product champion*, pengembangan *mobile banking super apps*, serta persiapan infrastruktur API untuk *open banking*.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

BSI secara terus menerus akan melakukan *review* terhadap organisasi untuk mendukung *key metric* Bank, antara lain peningkatan *customer base*, *profitabilitas*, dan *volume asset* Bank.

Pengembangan struktur organisasi bertujuan untuk memperbaiki proses bisnis yang dapat mempercepat dan memperbaiki pelayanan Bank terhadap nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka Bank lebih fokus pada segmen dan produk unggulan sehingga dapat berkontribusi secara langsung terhadap *financial indicator*.

Dalam rangka membangun ketahanan dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan, Bank telah menetapkan *Human Capital Roadmap* untuk mendukung transformasi organisasi dan sumber daya manusia (SDM) BSI yang inovatif dan proaktif dalam menjawab tantangan serta perubahan di masa yang akan datang. Beberapa kegiatan yang mendukung tujuan tersebut adalah dengan memberikan pelatihan, pendidikan lanjutan, menjaga *work life balance*, serta memberikan suasana kerja yang kondusif.

Bank juga terus melakukan transformasi organisasi secara bertahap sejak *legal merger*. Di samping dalam menyatukan sistem yang digunakan untuk operasional, di tahun 2021 BSI juga fokus dalam melakukan penyeragaman budaya kerja. Sebagai bentuk apresiasi, manajemen telah melakukan penyesuaian remunerasi, pemberian token bonus di tengah tahun, serta pemberian *employee stock allocation*.

Fokus transformansi organisasi dan SDM sepanjang 2021 terdiri dari 3 (tiga) hal, pertama melaksanakan integrasi kultur berlandaskan *core values* AKHLAK, kedua adalah *aligning* organisasi dan peningkatan produktivitas pegawai, dan fokus ketiga adalah akselerasi kapabilitas SDM.

Inisiatif strategis ke depan, yaitu di tahun 2022, BSI akan membentuk susunan organisasi yang lebih ramping dan lincah dengan melakukan *merger* terhadap organisasi-organisasi masa transisi atau organisasi dari bank *legacy* sebelumnya, pada semester pertama. Tujuannya agar proses bisnis dapat dilaksanakan secara ringkas dan cepat.

Untuk mendukung pencapaian visi BSI menjadi "Top 10 Global Islamic Bank", BSI akan memperkuat segmen *wholesale*, investasi, dan kompetensi bisnis internasional.

Perubahan Komposisi Direksi Beserta Alasannya

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Berikut adalah susunan Direksi BSI per 31 Desember 2021.

Direktur Utama	**Hery Gunardi**
Wakil Direktur Utama I	**Ngatari**
Wakil Direktur Utama II	**Abdullah Firman Wibowo**
Direktur Wholesale & Transaction Banking	**Kusman Yandi**
Direktur Retail Banking	**Kokok Alun Akbar**
Direktur Sales & Distribution	**Anton Sukarna**
Direktur Information Technology	**Achmad Syafii**
Direktur Risk Management	**Tiwul Widyastuti**
Direktur Compliance & Human Capital	**Tribuana Tunggadewi**
Direktur Finance & Strategy	**Ade Cahyo Nugroho**

Penutup dan Apresiasi

Direksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah atas arahan dan nasihatnya sehingga Bank dapat membukukan kinerja solid di tahun 2021 yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan untuk seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank Syariah Indonesia atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan kepada Bank.

Direksi juga berterima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan lain, seperti regulator, mitra kerja, serta nasabah.

Semoga ke depannya BSI senantiasa mampu meningkatkan kinerja dan mampu menjadi bank kebanggaan serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta, 30 Maret 2022

Atas Nama Direksi

Hery Gunardi
Direktur Utama



Direksi

Dari kiri ke kanan:

1. Ade Cahyo Nugroho
   Direktur Finance & Strategy
2. Kusman Yandi
   Direktur Wholesale & Transaction Banking
3. Kokok Alun Akbar
   Direktur Retail Banking
4. Abdullah Firman Wibowo
   Wakil Direktur Utama 2
5. Tiwul Widyastuti
   Direktur Risk Management



6. Hery Gunardi
   Direktur Utama
7. Tribuana Tunggadewi
   Direktur Compliance & Human Capital
8. Ngatari
   Wakil Direktur Utama 1
9. Achmad Syafii
   Direktur Information Technology
10. Anton Sukarna
   Direktur Sales & Distribution


BSI

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Ketua Dewan Pengawas Syariah

DPS telah melakukan penyeragaman standardisasi pemenuhan aspek syariah, sehingga pemenuhan aspek tersebut dalam aktivitas Bank berjalan maksimal dan optimal.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillaahi Rabbil 'Aalamin, Washshalatu Wassalamu 'Ala Nabiyyina Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam, Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Ajma'in, Amma Ba'du.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan serta salam semoga tercurah untuk Baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha selama tahun buku 2021.

Dengan ridho *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, tepat pada tanggal 1 Februari 2021, BSI lahir sebagai hasil penggabungan dari 3 (tiga) bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Kehadiran BSI merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Terlebih lagi, BSI hadir di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi setiap negara. Dengan kekuatan 3 (tiga) bank yang menjadi satu tersebut, terutama dari sisi aset, menjadikan BSI sebagai bank terbesar ketujuh di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpandangan, kekuatan aset dan permodalan BSI membuat ruang gerak Bank menjadi semakin leluasa dalam industri perbankan. Daya jangkau Bank juga semakin luas dengan sebaran jaringan kantor yang luas.

Dengan posisi tersebut, bukan tidak mungkin cita-cita Bangsa yang telah lama yaitu menjadi pusat keuangan syariah dunia akan terwujud. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, bagi kami, penggabungan ini merupakan momentum yang bagus dan menjadi awal dari awal dari cita-cita tersebut.

Fokus Tahun 2021

Pada tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki sejumlah fokus dalam pemenuhan aspek syariah sebagai rekomendasi kami kepada manajemen, baik terkait dengan operasional, maupun bisnis Bank.

Dari sisi layanan, DPS menilai manajemen perlu mengakselerasi penataan ulang infrastruktur layanan, seperti jaringan, sistem dan juga anjungan tunai mandiri (ATM), yang merupakan kelanjutan proses dari penggabungan ketiga bank menjadi BSI dan pelaksanaan Qanun untuk wilayah Daerah Istimewa Aceh, agar masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik meskipun terjadi efisiensi infrastruktur, migrasi sistem *core banking* menjadi *single system*, peningkatan fitur-fitur layanan digital bank, serta produk-produk BSI akibat adanya penggabungan ini.

Dalam implementasi aspek syariah, DPS melakukan penyeragaman standardisasi pemenuhan aspek syariah. Dengan demikian, pemenuhan aspek tersebut dalam aktivitas Bank berjalan maksimal dan optimal. Hal ini mengingat Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan dari tiga Bank yang memiliki standardisasi berbeda-beda.

Terkait dengan produk, DPS mengkaji ulang produk-produk *existing* dan akan memberikan opini terhadap produk-produk baru. DPS membuat *template* akad yang dapat digunakan lintas produk sebagai standar dan telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islami serta memenuhi kaidah-kaidah syariah. Setelah itu, DPS juga melakukan pengawasan atas implementasi perjanjian akad tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dan memastikan nasabah mendapatkan produk sesuai dengan prinsip syariah.

Dari sisi sumber daya manusia, DPS meminta kepada manajemen untuk meningkatkan kompetensi Insan BSI, khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk dapat memahami secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip syariah melalui pelatihan yang memadai. Penyampaian prinsip-prinsip syariah itu juga harus dilakukan dengan akhlak yang baik sehingga mampu menciptakan citra positif di mata masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tahun 2021

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis BSI agar sesuai serta mematuhi prinsip-prinsip syariah di samping tentunya berbagai regulasi terkait. Kepatuhan tersebut mencakup kebijakan, produk, prinsip, alur aktivitas serta *Standard Procedure Operational* (SPO) dan Pedoman Teknis Operasional (PTO) Bank.

Dalam kegiatan pengawasan, DPS dibantu oleh unit *sharia compliance* yang berada di bawah Direktur Kepatuhan serta Komite Syariah. Keduanya menjadi pelaksana awal bagi pengawasan kegiatan usaha serta produk Bank. Selanjutnya, DPS memberikan opini serta justifikasi hasil pengawasan terhadap implementasi produk-produk tersebut. Terdapat 37 Opini Syariah yang telah dikeluarkan DPS sepanjang tahun 2021, sebagaimana terinci dalam Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap implementasi produk tersebut dilakukan melalui uji petik ke beberapa kantor cabang Bank. Pada tahap awal, kegiatan uji petik dilakukan oleh unit *sharia compliance* untuk memetakan materi yang menjadi permasalahan untuk kemudian dilakukan pemberian nasihat dan arahan oleh DPS. Uji petik tersebut kami kami lakukan sebanyak 14 kali.

Seluruh kegiatan pengawasan DPS telah dikoordinasikan dengan Direksi melalui rapat rutin. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dengan bidang tugas yang terkait dengan agenda yang dibahas pada rapat tersebut. Jumlah rapat koordinasi dengan Direksi telah kami lakukan sebanyak 21 kali sepanjang tahun 2021.

Selain dengan Direksi, permasalahan-permasalahan terkait pemenuhan prinsip syariah khususnya yang menjadi fokus kami pada tahun 2021, juga kami sampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris bersama dengan DPS. Komunikasi dan koordinasi tersebut kami lakukan baik secara tertulis maupun dalam bentuk rapat. Sepanjang tahun 2021, kami telah menerbitkan 2 (dua) surat kepada Dewan Komisaris dan 2 (dua) kali rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris Bank dalam forum Rapat Gabungan (Ragab).

Ke depan, DPS berharap manajemen dapat mengoptimalkan jumlah personel unit *sharia compliance* sebagai kepanjangan tangan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan aspek syariah, serta meningkatkan levelnya dalam organisasi Bank. Hal itu sejalan dengan besarnya kapasitas BSI, sehingga fungsi pengawasan kepatuhan terhadap aspek syariah Bank dapat terakomodir secara maksimal, efektif dan efisiensi waktu.

Selain mengawasi kegiatan internal, DPS berserta unit *sharia compliance* berencana mengkaji peraturan-peraturan terkait perbankan syariah yang dirasa masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar dapat menjaga integritas Bank sebagai bank syariah. Kajian tersebut akan menjadi dasar bagi BSI menyampaikan masukan kepada regulator terkait regulasi perbankan syariah. Hal ini dilakukan agar BSI sebagai *icon* perbankan syariah di Indonesia dapat berkontribusi lebih terhadap perkembangan perbankan syariah pada umumnya dan penegakan prinsip syariah dalam tubuh regulasi perbankan syariah pada khususnya di Tanah Air.

Perubahan Komposisi

Pada tahun 2021, terdapat perubahan susunan DPS Bank Syariah Indonesia sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Mei 2021 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 42 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH.

Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia U-822/DSN-MUI/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan Surat Nomor U-034/DSN-MUI/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penjelasan DSN MUI yang telah merekomendasikan dan menetapkan nama-nama yang akan duduk dalam Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia.

Perubahan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Sebelum:

Ketua	**Dr. H. Mohamad Hidayat**
Anggota	**Dr. KH. Hasanudin, M.Ag**
Anggota	**Dr. H. Oni Sahroni, MA**
Anggota	**Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc**

Sesudah:

Ketua	**Dr. KH. Hasanudin, M.Ag**
Anggota	**Dr. H. Mohamad Hidayat**
Anggota	**Dr. H. Oni Sahroni, MA**
Anggota	**Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc**

Apresiasi

DPS sangat mengapresiasi upaya keras manajemen BSI dalam mewujudkan Bank yang sehat dan senantiasa patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal itu diharapkan mampu menjadi fondasi bagi BSI untuk melayani dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Semoga manajemen selalu memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya, termasuk dalam mengejar target kinerja.

Meskipun demikian, kami memandang masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BSI. Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting, agar pada gilirannya masyarakat akan memberikan dukungan dan andil untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Kami selaku Dewan Pengawas Syariah akan senantiasa berupaya mendorong dan mengawasi manajemen agar selalu mengimplementasikan aspek syariah dalam kegiatan bisnis Bank guna memberikan layanan dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kami mengharapkan segala masukan yang membangun dari para pemangku kepentingan agar BSI dapat hadir menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 30 Maret 2022

Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Maret 2022

Dewan Komisaris

Adiwarman Azwar Karim
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Muhammad Zainul Majdi
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen

Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen

Bangun S. Kusmulyono
Komisaris Independen

Sutanto
Komisaris

Imam Budi Sarjito
Komisaris

Masduki Baidlowi
Komisaris

Suyanto
Komisaris

Direksi

Hery Gunardi
Direktur Utama

Ngatari
Wakil Direktur Utama 1

Abdullah Firman Wibowo
Wakil Direktur Utama 2

Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Kokok Alun Akbar
Direktur Retail Banking

Kusman Yandi
Direktur Wholesale & Transaction Banking

Achmad Syafii
Direktur Information Technology

Tiwul Widyastuti
Direktur Risk Management

Tribuana Tunggadewi
Direktur Compliance & Human Capital

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

PROFIL PERUSAHAAN

BSI memiliki visi untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank, dengan misi Memberikan Akses Solusi Keuangan Syariah di Indonesia, Menjadi Bank Besar yang Memberikan Nilai Terbaik Bagi Para Pemegang Saham dan Menjadi Perusahaan Pilihan dan Kebanggaan para Talenta Terbaik Indonesia.



1.244

Jumlah Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu



Identitas Perusahaan



Nama Perusahaan

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk



Dasar Hukum Pendirian

- Berita Negara RI No. 43 - 28 Mei 1971 - Tambahan No. 242
- Berita Negara RI No. 85 - 23 Oktober 2009 - Tambahan No. 26142
- Berita Negara RI No. 96 - 1 Desember 2009 - Tambahan No. 27908



Izin Usaha

- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009



Informasi Perubahan Nama

Efektif berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada 1 Februari 2021 dari sebelumnya bernama PT Bank BRIsyariah Tbk karena adanya penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah



Bidang Usaha

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah



Modal Dasar

Rp40.000.000.000.000



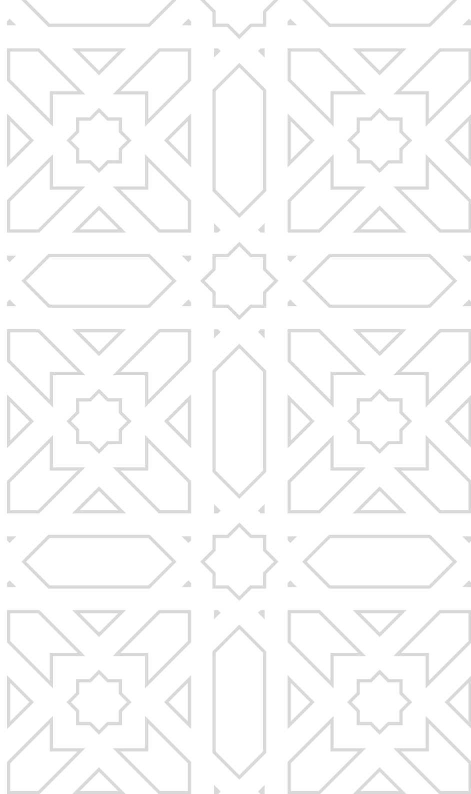
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp20.564.653.671.500



Kode Saham

BRIS





Bursa Efek
Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018



Jumlah Karyawan
19.449



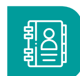
Akses terhadap Perusahaan
Alamat Kantor Pusat:
Gedung The Tower,
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930



Website
https://www.bankbsi.co.id/
https://www.ir.bankbsi.co.id/



Call Center
14040
1500789
(khusus melayani nasabah perusahaan dan institusi)



Media Sosial

Facebook : Bank Syariah Indonesia
Instagram : @banksyariahindonesia
@lifewithbsi
@BSIMobile
Youtube : Bank Syariah Indonesia
Twitter : @bsihelp
@bankbsi_id



Telepon
(62-21) 30405999



Faksimili
(62-21) 30421888

Sekilas Perusahaan



Penggabungan yang melahirkan Bank Syariah Indonesia ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Jejak Langkah

2007

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta.

2008

- Bank Indonesia mengeluarkan izin usaha melalui suratnya no.10/67/ Kep.GBI/ DpG/2008.
- Pada 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah secara resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
- Pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan unit usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

2009

Grand launching BRIsyariah oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada 1 Juli 2009.

2010

- Peluncuran 7 nilai budaya kerja BRIsyariah: PASTI OKE, yaitu Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, Tawakal, Integritas, Orientasi bisnis dan Kepuasan pelanggan.
- *Live Core Banking System* SyIAR (*Syariah Integrated & Automated Realtime*) yang dilengkapi dengan aplikasi *electronic Financing Originating System* (efoS) dan *Management Information System* (MIS).

2015

- BRIsyariah ditunjuk oleh OJK sebagai Indonesia *First Movers on Sustainable Banking*.
- BRIsyariah sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang meluncurkan laku pandai Syariah BRISSMART.
- BRIsyariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Berharga Syariah negara (SBSN).

2016

BRIsyariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRIsyariah tahun 2016 untuk memperkuat permodalan.

2017

- Bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah.
- Bekerja sama dalam penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk ASN dan swasta untuk pembiayaan KPR FLPP pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp950 miliar.
- Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

2011

Implementasi layanan syariah Bank BRIsyariah di 18 kantor cabang BRI.

2012

- BRIsyariah mengukuhkan diri sebagai bank syariah pertama di dunia yang memiliki layanan *mobile banking* di 4 (empat) *market online*, yaitu *Blackberry App World, Google Play, Apple Store* dan *Nokia Store*.
- Peluncuran tabungan Impian BRIsyariah.

2013

- BRIsyariah mengembangkan program *Sharia Officer Development Program* (SODP) untuk menciptakan bankir-bankir yang memiliki kompetensi besar dalam perbankan syariah serta kesamaan pemahaman terhadap bisnis BRIsyariah.
- *Rebranding* Tabungan BRIsyariah iB menjadi Tabungan Faedah BRIsyariah iB.
- BRIsyariah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai bank devisa.

2014

- Peluncuran internet banking BRIsyariah.
- Implementasi aplikasi penunjang pembiayaan elektronik (Appel) untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan secara cepat dan akurat.

2018

BRIsyariah *go public* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia, melakukan penawaran saham perdana (*initial public offering*) sebesar 2.623.350.600 kepada investor domestik maupun asing, dengan nilai nominal Rp500 per saham.

2019

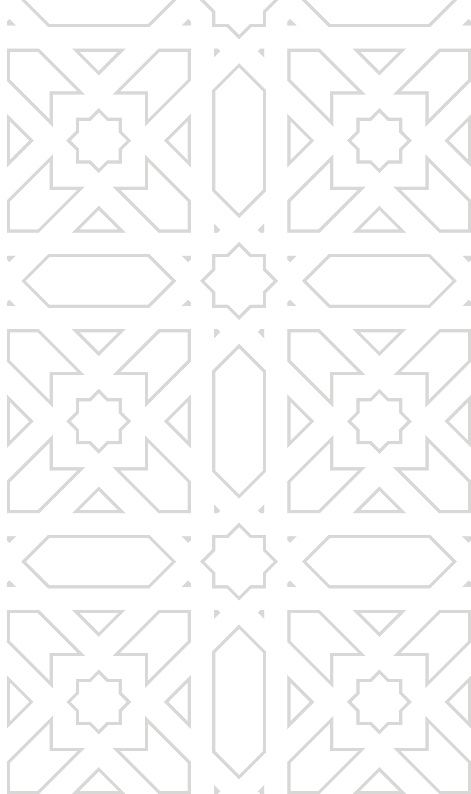
- Pada milad ke-11, BRIsyariah mengembangkan inovasi teknologi untuk internal *business process* guna mempercepat layanan kepada nasabah, yaitu Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (i-Kurma). i-Kurma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro.
- Dimulainya implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang dilakukan oleh BRI dan BRIsyariah.

2020

BRIsyariah melakukan pengembangan i-Kurma. Gen 2 untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. i-Kurma Gen 2 ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya untuk mempercepat proses permohonan pencairan pembiayaan mikro.

2021

BRIsyariah bergabung dengan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H.



Visi

TOP 10

GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi



Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.



Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

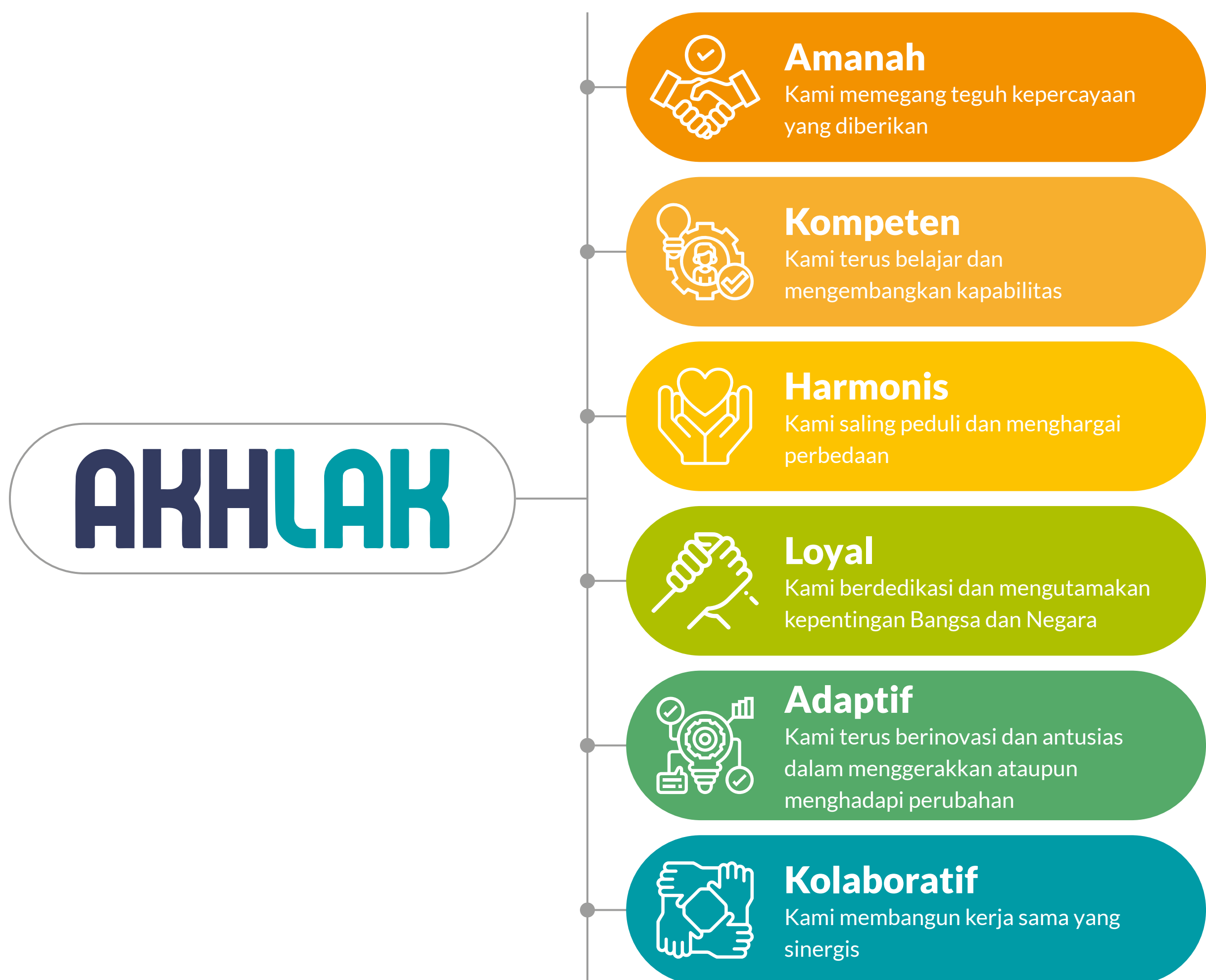


Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Budaya/Nilai-Nilai Perusahaan

Bank Syariah Indonesia didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saat ini menjadi pemegang saham mayoritas Bank. Sejalan dengan hal itu, BSI menjadikan "AKHLAK" sebagai nilai perusahaan, selaras dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 yang mewajibkan setiap BUMN mengimplementasikan nilai-nilai utama (*core values*) tersebut sebagai dasar pembentukan karakter SDM.



Bidang Usaha

Sesuai Anggaran Dasar

A. Kegiatan usaha utama

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan - barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau - sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
    i. Wakalah
    ii. Hawalah
    iii. Kafalah
    iv. Rahn
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan - oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia



12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga -- atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah
14. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah
16. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah
17. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah
18. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah
19. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah
20. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan utama

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai Dijalankan pada Tahun Buku

Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku 2021 telah sejalan dengan yang berada di Anggaran Dasar Bank.

Produk dan Layanan

Hingga berakhirnya tahun 2021, Bank Syariah Indonesia menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu individu, perusahaan, digital banking dan kartu.

INDIVIDU

BISNIS	
Bank Guarantee Under Counter Guarantee	Instrumen penjaminan perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontra jaminan (*counter guarantee*) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.
BSI Bank Garansi	Bank garansi yang dikhususkan kepada vendor/kontraktor dari PT PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.
BSI Cash Management	Saluran distribusi elektronik berupa layanan internet banking bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas dengan aman, cepat dan mudah.
BSI Deposito Ekspor SDA	Bersama membangun negeri dengan devisa ekspor.
BSI Giro Ekspor SDA	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah atau properti berhadiah porsi haji.
BSI Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.
BSI Giro Pemerintah	Dana berkah untuk negeri.
BSI Pembiayaan Investasi	Fasilitas Pembiayaan Jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Giro Vostro	Layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (*financial institutions*) Bank dan bukan Bank, koresponden domestik maupun internasional pada BSI.
Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank	Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek under LC/SKBDN yang dimiliki oleh Nominated Bank kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (*issuing Bank*) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada *Nominated Bank* berdasarkan berita akseptasi dari *Issuing Bank* ke *Nominated Bank*.
Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada pada underlying aset PYD yang disepakati.
SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan	Layanan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, dan Praktik Dokter Gigi.
EMAS	
BSI Cicil Emas	Pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian.
BSI Gadai Emas	Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
HAJI DAN UMROH	
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan Ibadah Haji dan Umrah bagi anak.

INVESTASI	
Bancassurance	Kerja sama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
BSI Deposito Valas	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
BSI Reksa Dana Syariah	Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.
Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)	Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Deposito Rupiah	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Referral Retail Brokerage	Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.
SBSN Ritel	SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan • Sukuk Negara Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. • Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
PEMBIAYAAN	
Bilateral Financing	Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.
BSI Cash Collateral	Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.
BSI Distributor Financing	Pembiayaan modal kerja dengan skema value chain adalah pembiayaan post financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan supplier khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.
BSI Griya Hasanah	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: 1. Pembelian rumah baru/ rumah second /ruko/rukan/apartemen 2. Pembelian kavling siap bangun 3. Pembangunan/renovasi rumah 4. Ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over) 5. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah
BSI Griya Mabrur	Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.
BSI Griya Simuda	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.
BSI Griya Take Over	Layanan take over dari KPR Bank lain.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
BSI KUR Kecil	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp50 juta s.d Rp500 juta.
BSI KUR Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp10 juta s.d Rp50 juta.
BSI KUR Super Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon s.d Rp10 juta.

BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)	Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/ musyarakah mutanaqishah/ ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.
BSI Mitraguna Berkah	Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
BSI Multiguna Hasanah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk: • Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/ furniture rumah, dll. • Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll. • Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.
BSI OTO	Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.
BSI Pensiun Berkah	Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, di antaranya sebagai berikut: 1. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN. 2. Pensiunan BUMN/BUMD. 3. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
BSI Umrah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui Bank yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan prinsip syariah.
Mitraguna Online	Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.
PRIORITAS	
BSI Prioritas	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.
BSI Private	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar Rp5 miliar.
Safe Deposite Box (SDB)	Merupakan suatu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunanya.
TABUNGAN	
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui teller dan net banking.
BSI Tabungan Easy Mudharabah	Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Easy Wadiah	Tabungan dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Efek Syariah	Tabungan efek syariah dengan akad mudharabah muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di pasar modal.
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Junior	Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Mahasiswa	Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/assosiasi/organisasi profesi yang bekerja sama dengan Bank.
BSI Tabungan Payroll	Produk turunan dari Tab wadiah/mudharabah reguler yang dikhususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.
BSI Tabungan Pendidikan	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebit dan mendapat perlindungan asuransi.

BSI Tabungan Pensiun	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerja sama dengan bank.
BSI Tabungan Prima	Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad mudharabah dan wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.
BSI Tabungan Rencana	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebit dan gratis perlindungan asuransi.
BSI Tabungan Simpanan Pelajar	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederahana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Smart	Basic saving account dengan akad wadiah yad dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BSI Tabungan Valas	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah dalam mata uang dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.
BSI TabunganKu	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BSI Tapenas Kolektif	Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
TRANSAKSI	
BSI Giro Rupiah	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.
BSI Giro Valas	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.



PERUSAHAAN

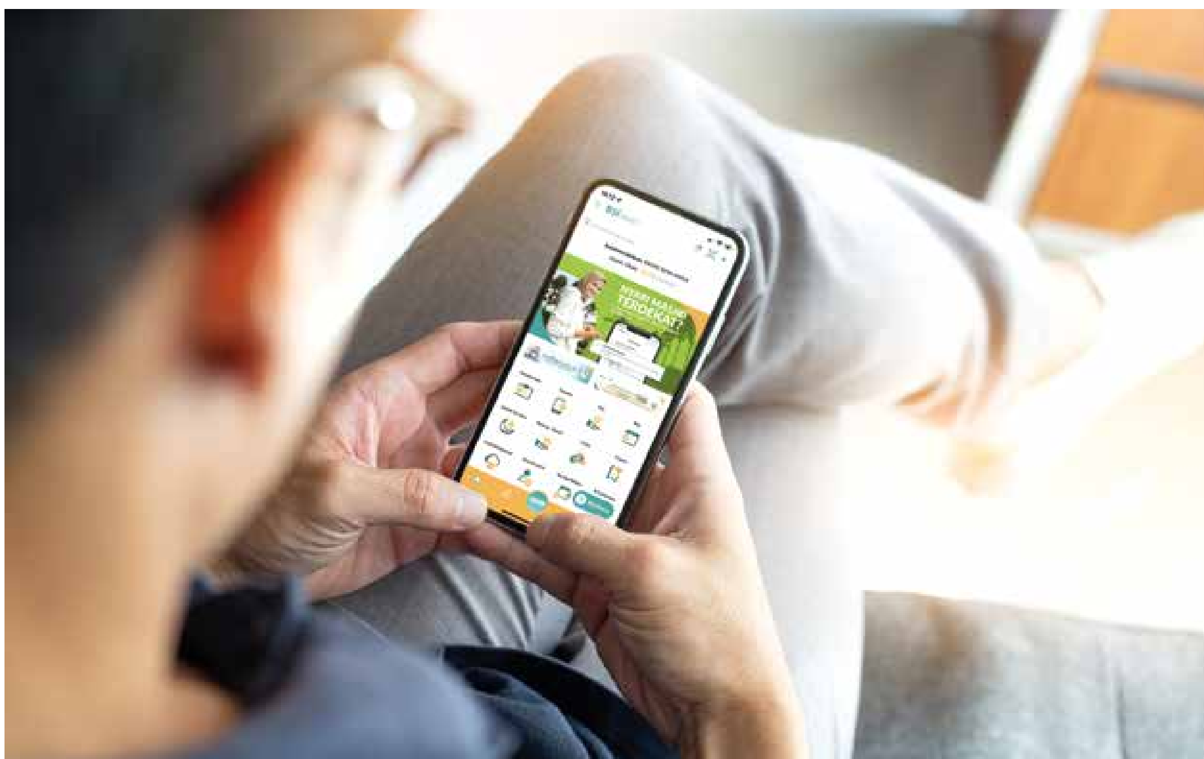
CASH MANAGEMENT	
CMS	Layanan transaksi meliputi transfer kepada rekanan atau pihak ketiga di bank BSI maupun bank lain (online, SKN, RTGS), transfer kepada pegawai (payroll), pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dan pembelian produk Pertamina, pembayaran tagihan utilitas serta tagihan lainnya.
OPBS (SO/DO) Pertamina	BSI Pembayaran Pertamina adalah layanan pembayaran dan penerimaan atas produk Pertamina. Bersama dengan Pertamina, BSI hadir dengan layanan host to host untuk memudahkan mitra/pelanggan Pertamina dalam melakukan pemesanan dan atau pembayaran produk Pertamina melalui BSI Cash Management System dan Cabang BSI.
TRESURI	
Transaksi Sukuk	Melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah (sukuk): · Sukuk Negara · Sukuk Korporat
Deposito On Call (DOC)	Produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. Akad yang digunakan mudharabah mutlaqah.
BSI Lindung Nilai Syariah	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Akad yang digunakan aqd' al-tahaww al-basith dan al sharf.
Transaksi Valuta Asing - Devisa Umum/ Telegraphic Transfer	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi today untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi tomorrow (Tom) untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi spot untuk penyerahan setelah dua hari kerja. Mata uang yang ditransaksikan adalah USD, SAR, EUR, SGD, JPY, AUD, HKD, CHF, CAD, CNY dan GBP.
Transaksi Valuta Asing - Uang Kertas Asing (Banknotes)	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (banknotes) baik untuk penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah, dengan akad al sharf.
SERVICE	
Wali Amanat	Mewakili pemegang sukuk, serta dapat bertindak selaku agen pemantau, agen jaminan, dan agen escrow terkait dengan transaksi di pasar modal syariah. • Wali Amanat Memantau kewajiban emiten sesuai perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk. • Agency Memantau kewajiban para pihak terkait layanan agen pemantau, agen jaminan, agen escrow pasar modal.
Kustodian	Tata kelola sesuai prinsip syariah dengan sistem kustodian yang modern dan terpercaya. **Core Custody** • Safekeeping Konsep dari penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • Transaction Handling Service Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • Corporate Action Fungsi kustodian sebagai corporate action antara lain yaitu jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain *(corporate action)* serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya *(proxy)*. • Sub Registry (Government Bond) Layanan pembukuan, pencatatan dan pengadministrasian untuk transaksi obligasi pemerintah baik perusahaan maupun individu, baik secara langsung dengan nasabah dan/ atau melalui *selling agent* lain. • Income Collection Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak-hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • Portofolio Accouting Jasa atas pembukuan atau pencatatan portofolio aset milik nasabah.

	Fund Services And Unit Link • Fund Accounting Pembukuan transaksi efek atau surat berharga dalam suatu portofolio dan melaporkannya ke nasabah. • Fund Administration Pencatatan atas kepemilikan unit penyertaan nasabah reksa dana dan atau unit link dan melaporkannya kepada investor dari pada produk tersebut. • Safekeeping Konsep penyimpanan efek adalah penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • Transaction Handling Service Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • Income Collection Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • Reporting / Tax Hasil akhir atau jasa pelaporan yang dilakukan Bank Kustodian atas aset Reksa Dana yang dikirim kepada manager investasi dan/atau *unit holder*.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).
Penyelesaian Wesel Ekspor	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah (Eksportir) dalam rangka membantu pengurusan dokumen, penagihan piutang, serta membantu pemenuhan modal kerja nasabah. Termasuk penyelesaian wesel ekspor single bank, documentary, non documentary, dan open account baik dilakukan secara collection (services) maupun negosiasi/diskonto (financing).
LC Issuance/SKDBN	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Buyer Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Distributor Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Supplier Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia dimana pihak yang berpiutang (supplier) mewakilkan kepada Bank untuk melakukan penagihan piutang. Bank kemudian melakukan penagihan piutang kepada pihak yang berutang (buyer), atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
Bank Garansi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
PEMBIAYAAN	
Investasi Terikat Syariah Mandiri	Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah muqayyadah.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).
Refinancing	Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana fresh money atas aset/objek eksisting calon nasabah untuk kebutuhan: • Akuisisi aset • Take over • Kebutuhan investasi lainnya
Multifinance	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan kepada multifinance dengan pola channeling atau executing.
Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja seasonal.
Agency, Sindikasi dan Clubdeal	Seiring berkembangnya usaha nasabah, seringkali diperlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Indonesia yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.
Pembiayaan Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).

SIMPANAN	
Giro SBSN	Simpanan non saving account yang dikelola dengan akad mudharabah diperuntukkan kepada institusi yang memerlukan imbal hasil maksimal.
Deposito DHE SDA	Simpanan saving account yang bersumber dari dana DHE SDA milik nasabah di Bank atau bank lain.
Giro DHE SDA	Simpanan non saving account yang dikelola dengan akad mudharabah dan wadiah diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA.
Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.

DIGITAL BANKING

BSI Mobile	Solusi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani nasabah 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.
Buka Rekening Online	Layanan pembukaan rekening online melalui BSI Mobile adalah solusi untuk nasabah yang ingin membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke cabang.
Solusi Emas	Layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian emas mulai dari Rp50.000. Nasabah bisa beli, jual, transfer, serta tarik fisik emas dan gadai emas online dengan mudah dan aman tanpa perlu datang ke cabang.
BSI QRIS	Layanan transaksi dengan scan kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia
BSI Cardless Withdrawal	Solusi praktis bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia dan Indomaret.
BSI Debit Card	BSI Kartu Debit merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan International (Visa).
BSI Debit OTP	BSI Debit OTP merupakan layanan transaksi berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap penggunaan transaksinya.



BSI ATM CRM	BSI ATM CRM (Cash Recycle Machine) atau ATM Setor Tarik merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Indonesia.
BSI Aisyah	Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru dari Bank Syariah Indonesia
BSI Net	Transaksi bisnis kini lebih mudah melalui layanan BSI Net kapanpun dan dimanapun. Berbagai kemudahan bertransaksi seperti melakukan transfer secara massal dan monitoring transaksi bisa anda lakukan di BSI Net.
BSI JadiBerkah.id	Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Berbagai pilihan program ziswaf dapat anda temukan di platform Jadiberkah.id.
BSI Merchant Business	EDC Bank Syariah Indonesia merupakan layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada pelanggannya.
BSI API Platform	BSI API Platform adalah sebuah portal yang menyediakan layanan open banking untuk memudahkan proses integrasi antara layanan Bank Syariah Indonesia dengan aplikasi nasabah.
BSI Smart Agent	BSI Smart Agent merupakan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) BSI untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi.
BSI Payment Point	Layanan transaksi Payment Point di Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet Bank Syariah Indonesia atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (cash).
Deposito Mobile	Mudahnya investasi dengan deposito di BSI Mobile, kapanpun dan dimanapun, tanpa perlu datang ke cabang.
Griya Hasanah Online Top Up Melalui BSI Mobile	Pembiayaan BSI Griya Hasanah *Online Top Up* merupakan Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia dalam bentuk penambahan pembiayaan dari pembiayaan eksisting Bank Syariah Indonesia untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan Griya Hasanah *Online Top Up* menggunakan akad refinancing syariah dengan skema al-bai' dalam rangka musyarakah mutanaqishah (MMQ).

KARTU

KARTU PEMBIAYAAN	
BSI Hasanah Card Classic	BSI Hasanah Card Classic merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Classic dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Classic Rp4 juta hingga Rp6 juta.
BSI Hasanah Card Gold	BSI Hasanah Card Gold merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Gold Rp8juta hingga Rp 30 juta.

BSI Hasanah Card Platinum	BSI Hasanah Card Platinum merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp40 juta hingga Rp 900 juta.
KARTU DEBIT	
BSI Debit GPN	BSI Debit GPN, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
BSI Debit OTP	Kartu ATM debit dimana sistem PIN menggunakan One Time Password (OTP) yang diregister melalui mobile banking.
BSI Debit Visa	BSI Debit Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Visa Worldwide yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh dunia (Internasional).
Kartu BSI Debit Sabi	BSI Debit SaBi, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan anak yang terafiliasi dengan orang tua. Kartu BSI Debit SaBi mendukung edukasi literasi keuangan bagi anak dengan limitasi khusus untuk menjaga keamanan anak dalam bertransaksi.
Kartu Debit BSI SimPel	BSI Debit SimPel, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik Tabungan Simpanan Pelajar. Kartu BSI Debit SimPel memiliki limit khusus agar para pelajar dapat bertransaksi dengan aman dan mudah. Kartu dapat dipergunakan oleh pelajar di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
Kartu Haji BSI Visa	Kartu Haji BSI Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi nasabah Tabungan Haji Indonesia untuk memberikan kemudahan bertransaksi saat nasabah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.



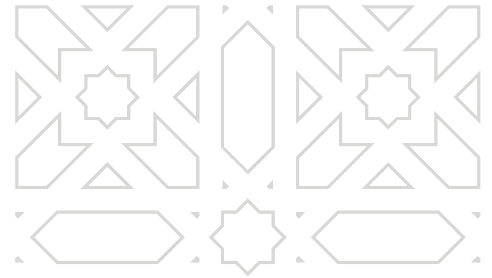
Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Jaringan bisnis dan wilayah operasi BSI didukung oleh kantor wilayah hingga kantor fungsional operasi, yang rinciannya dijelaskan di bawah ini.

NO.	JENIS KANTOR	JUMLAH
1	Kantor Wilayah	10
2	Kantor Cabang (KC)	272
3	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	972
4	Kantor Fungsional Operasional (KFO) Gadai	44
5	Kantor Fungsional Operasional (KFO) Mikro	3
6	Kantor Kas (KK)	74
7	Payment Point (PP)	179
8	KFNO	0
9	Konter Layanan Priority	60
10	Konter Layanan Gadai	530
11	Konter Layanan Mikro	244
12	Layanan Syariah Bank (LSB)	4.667
13	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	2.618



Nanggroe Aceh Darussalam
Kalimantan Timur
Sumatera Utara
Kalimantan Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Kepulauan Bangka Belitung
Sumatera Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Bengkulu
Jakarta
Jawa Tengah
Bali
Sumatera Selatan
Lampung
Banten
Jawa Barat
Yogyakarta
Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat





Kehadiran 1.244 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BSI di banyak provinsi sejalan dengan visi Bank untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Sulawesi Utara

Sulawesi Barat

Gorontalo

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Timur

Papua Barat

Papua

KANTOR CABANG

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
1	KC Banda Aceh Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 6, Banda Aceh, Aceh	(0655) 7551109, 7551558	(0651) 33945
2	KC Banda Aceh Ahmad Dahlan	Jl. Ahmad Dahlan No. 111	(0651) 32313, 32314, 32301	(0651) 32317
3	KC Banda Aceh Daud Beureueh 2	Jl. T. Daud Beureuh No.172-174	(0651) 638 304-5	(0651) 638306
4	KC Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam	Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 100 A - 100 D	(0651) 22900 (hunting), 7410714, 32929, 33869, 23577, 32587	(0651) 31190
5	KC Sigli 2	Jalan Merdeka No. 6	(0653) 22450	(0653) 21306
6	KC Sigli 1	Jl. Prof. A Majid Ibrahim No. 6	-	-
7	KC Lhokseumawe Merdeka 4	Jl. Merdeka No. 72D	(0645) 47005, 47006	(0645) 47009
8	KC Langsa 1	Jl. Ahmad Yani No. 20-22, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota Langsa, Aceh	(0641) 426135, 21357, 426451	(0641) 426051
9	KC Lhokseumawe Merdeka 1	Jl. Merdeka No. 24-25, Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kotif Lhokseumawe, Aceh	(0645) 631146, 631147, 631148	(0645) 41555
10	KC Lhokseumawe Merdeka 2	Jl. Merdeka No.39-40	(0645) 401 85	(0645) 421 85
11	KC Bireuen Simpang IV	JL. Medan - Banda Aceh, Simpang IV	(0644) 21126, 22044	(0644) 22040
12	KC Kuala Simpang	Jl. Tengku Panglima Polem No. 23 - 24	(0641) 333366	(0641) 333367
13	KC Langsa Darussalam	Jl. Darussalam No. 1	(0641) 21033	(0641) 21170
14	KC Lhokseumawe Merdeka 3	Jl. Merdeka No. 1	(0645) 41906	(0645) 21306
15	KC Takengon	Jl. Yos Sudarso No. 164, Takengon	(0643) 21294	(0643) 21119
16	KC Langsa 2	Jl. Jend. A Yani No. 59	-	-
17	KC Bireuen Chik Johan	Jl. T.H Chik-Johan Alamsyah No. 1	-	-
18	KC Meulaboh Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol	(0655) 7551961	(0655) 7551010
19	KC Simeulue	Pertokoan Suak Tungkul Kavling 1 No. 5/6, Jl. Tgk. Diujung Sinabang, Simeuleu, Aceh.	(0650) 21547	(0650) 21556
20	KC Meulaboh Nasional	Jl. Nasional No. 107, Gampong Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh	(0655) 7551109, 7551558	(0655) 7551184
21	KC Blangpidie	Jl. Persada No. 99A	(0659) 91008, 91127	(0659) 91070
22	KC Kutacane	Jl. Iskandar Muda No. 14	(0629) 21031	(0629) 21170
23	KC Tapaktuan	Jl. Nyak Adam Kamil No. 42	(0656) 21456	(0656) 21088
24	KC Meulaboh Imam Bonjol 1	Jl. Imam Bonjol No. 28	-	-
25	KC Batam Windsor Central	Komplek Windsor Central Blok A No. 3-4, Jl. Pembangunan, Kota Batam	(0778) 431331	(0778) 432727
26	KC Tanjung Pinang	Jl. Basuki Rahmat No. 1-3, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kep. Riau	(0771) 313788	(0771) 313995
27	KC Batam Raden Patah	Jl. Raden Patah No. 67, 69 dan 71	(0778) 7418200, 7418257, 7418258	(0778) 7418282
28	KC Batam Business Center	Komplek Pertokoan Rafflesia Business Centre Blok E No. 8-9	(0778) 466749, 467229 - 594	(0778) 463462
29	KC Medan A Yani	Jl. Jenderal Achmad Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara	(061) 4153866, 4151466	(061) 4511867
30	KC Medan Kampung Baru	Jl. Brigjen Katamso No. 717 B, Medan, Sumatera Utara	(061) 7878383	(061) 7872323

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
31	KC Medan Aksara	Jl. Letda Sujono No. 110, Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	(061) 7325939, 7325957	(061) 7332936
32	KC Lubuk Pakam	Jl. Diponegoro No. 45-46 Pasar I, Kel. Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	(061) 7952555	(061) 7950419
33	KC Medan Adam Malik	Jl. Adam Malik No.151/Jl. Makmur	(061) 80088173, 80085057	(061) 80084526
34	KC Medan S Parman	Jl. S. Parman No. 250 E/8	(061) 4556870, 4515683	(061) 4515671
35	KC Medan Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 7, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan. Sumatera Utara	(061) 4550755	(061) 4550766, 4537627
36	KC Binjai	Jl. Sukarno Hatta No. 22-23, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara	(061) 8826396	(061) 8826138
37	KC Kabanjahe	Komplek Raja Lahir Munte Blok E No. 1-2, Jl. Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara	(0628) 21999	(0628) 21859
38	KC Pekanbaru Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 450, Pekanbaru, Riau	(0761) 849191, 849192, 849193, 849194	(0761) 849190, 31668
39	KC Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No. 162, Dumai, Riau	(0765) 33555	(0765) 32379
40	KC Pekanbaru Harapan Raya	Jl. Haji Imam Munandar No. 8, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau	(0761) 862222	(0761) 849799
41	KC Duri	Jl. Hangtuah, Kel. Balai Makam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau	(0765) 598990	(0765) 598993
42	KC Pekanbaru Sudirman 2	Jl. Jend.Sudirman No. 484	(0761) 859694 , 859695, 859697, 859698	(0761) 839837, 859819
43	KC Panam Arengka	Ruko Panam Raya Permai No. 83 Jl. HR Soebrantas KM 8,5 RT.005/002	(0761) 563804, 587556, 563944	(0761) 587556
44	KC Pekanbaru Arifin Ahmad	Jl. Arifin Ahmad No. 7-9	(0761) 6700081	(0761) 6700085
45	KC Pematangsiantar Perintis	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Pematangsiantar, Sumatera Utara	(0622) 435858, 435857, 435861	(0622) 435848
46	KC Rantau Prapat	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 4, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara	(0624) 24880, 24205, 25186	(0624) 24653
47	KC Padangsidempuan	Jl. Sudirman No. 130 A, Kel. Wek I, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara	(0634) 28200	(0634) 28103
48	KC Sibolga	Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22, Sibolga Utara, Sibolga, Sumatera Utara	(0631) 24555	(0631) 26722
49	KC Pematangsiantar Kartini	Jl. Kartini No. 6 G	(0622) 435977, 435988	(0622) 435966
50	KC Bandar Lampung Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 189, Kel. Gotong Royong, Kec. Gotong Royong, Kota Bandarlampung, Lampung	(0721) 258952, 258960	(0721) 263588
51	KC Baturaja Slamet Riadi	Jl. Slamet Riadi No. 231, RT. 02/02, Kel. Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan	(0735) 325111	(0735) 322552
52	KC Bandar Jaya	Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya, Yukum Jaya, Lampung Tengah, Lampung	(0725) 529825, 529826	(0725) 529831
53	KC Metro A Yani	Jalan Ahmad Yani	(0725) 7851606	(0725) 7851605
54	KC Bandar Lampung Tanjung Karang	Jl. Jend. Sudirman No. 62	(0721) 242528, 242517	(0721) 242432
55	KC Bandar Lampung Teluk Betung	Jl. Diponegoro No. 6	(0721) 472651, 472644, 472639, 472642	(0721) 472644, 472639

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
56	KC Baturaja Rahman Hamidi	Jl. Let. R Hamidi No. 30 RT 03 RW 01	(0735) 324888, 0735 323333, 0735 325522, 0735 325554	(0735) 324888
57	KC Bandar Lampung Kedaton	Jl. Teuku Umar No. 17 RT 006 Lk.1	(0721) 253333, 265003, 267020	(0721) 265007
58	KC Bengkulu S Parman 1	Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu	(0736) 342007	(0736) 346707
59	KC Bengkulu S Parman 2	Jl. S. Parman, No. 51 A & B	(0736) 27688, 20938	(0736) 26448
60	KC Bengkulu Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 41-43, RT 09 RW 13,	(0736) 341996, 341997	(0736) 342760
61	KC Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso RT 03 No. 89	(0733) 7329623 / 14 / 16, 082881131705, 082881131704	-
62	KC Bengkulu Panorama	Jl. Semangka RT. 15 RW. 05	(0736) 347932, 347963	(0736) 347935
63	KC Jambi Gatot Subroto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi	(0741) 27730, 27726	(0741) 27733
64	KC Jambi Hayam Wuruk 1	Jl. Hayam Wuruk No. 73 - 74	(0741) 7552571, 7552572, 7552573	(0741) 7552574
65	KC Jambi RD Mataher	Jl. Rd. Mataher No. 33 RT 10	(0741) 7555174, 7555194, 7555274, 7554914	(0741) 7554914
66	KC Jambi Hayam Wuruk 2	Jl. Hayam Wuruk No.32, RT.35	(0741) 444430	(0741) 43008
67	KC Padang Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol No.17, Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat	(0751) 21113, 20765	(0751) 24768
68	KC Bukittinggi Sudirman 1	Jl. Jenderal Sudirman No. 73, Bukittinggi, Sumatera Barat.	(0752) 627633	(0752) 627637
69	KC Payakumbuh	Jl. Ade Irma Suryani No. 3 D-E, Payakumbuh, Sumatera Barat.	(0752) 796640	(0752) 93167
70	KC Padang Belakang Olo	Jl. Belakang Olo No. 45	(0751) 841818, 841819	(0751) 841808
71	KC Bukittinggi Sudirman 2	Jl. Jend. Sudirman No. 16 B-C	(0752) 31146 (hunting)	(0752) 22378
72	KC Padang Ki Mangunsarkoro	Jl. Kis Mangunsarkoro No. 39	(0751) 812660	(0751) 8957177
73	KC Bukittinggi Guru Hamzah	Jl. Guru Hamzah No. 16A	(0752) 626796	(0752) 626797
74	KC Palembang Demang	Jl. Demang Lebar Daun No. 2311, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	(0711) 421919	(0711) 419952
75	KC Pangkal Pinang	Jl. Masjid Jamik No. 123, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung	(0717) 432229	(0717) 431445
76	KC Prabumulih Sudirman 1	JL. Jend. Sudirman No. 7-8 Rt 01/10, Kel. Muara dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan	(0713) 322888	(0713) 322565
77	KC Palembang Pasar 16 Ilir	Pasar 16 Ilir, Jl. Masjid Lama No. 30-31, Palembang, Sumatera Selatan	(0711) 377322	(0711) 353594
78	KC Palembang Simpang Patal	Jl. R. Soekamto No. 6A, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan	(0711) 819850	(0711) 811078
79	KC Palembang Sudirman	Jl. Jend. Sudirman KM 3,5	(0711) 315999, 310751	(0711) 310752
80	KC Palembang Sukodadi	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Km. 12 RT 14/03 Simpang Kades	(0711) 5645022, 5645021, 5645023	-
81	KC Palembang A Rivai	Jl. Kapten A Rivai, Ruko Taman Mandiri Blok A No. 1-2	(0711) 373444, 359927	(0711) 321 616
82	KC Prabumulih Sudirman 2	Jl. Jend. Sudirman RT 01/RW 02	(0713) 3300543 - 4	(0713) 3300541

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
83	KC Jakarta Kebon Jeruk 1	Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 54 D (Jl. Raya Kelapa Dua No. 1) RT 004/RW 003, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	(021) 53662464, 53662465, 53662467	(021) 53662471, 53662472
84	KC Jakarta Cipulir	Jl. Ciledug Raya Cipulir No. 123E, Jakarta Selatan	(021) 7244664, 72786414, 72786361	(021) 72786360
85	KC Tangerang Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto No. 69, Ciledug, Tangerang, Banten.	(021) 73458147, 73458148, 73458149	(021) 73458150
86	KC Jakarta Cengkareng	Ruko Mutiara Taman Palem Blok A2 No. 9-10, Jl. Kamal Raya Outering Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat	(021) 54353515, 54353540	(021) 54353155
87	KC Jakarta Pluit	Jl. Pangeran Tubagus Angke, Perum Taman Duta Mas Blok D/9 B, Kav. No. 1, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	(021) 29388018, 22563967	(021) 29388019
88	KC Jakarta Barat	Jl. Arteri Kelapa 2 No. 40A RT 013/RW 001	(021) 22123271, 5866388, 5865715, 586719	(021) 58901202
89	KC Jakarta Kebon Jeruk 2	Jl. Lapangan Bola No. 5 A-B	(021) 53660288, 53660287	(021) 53660895
90	KC Jakarta Kelapa Gading 1	Komplek Graha Bulevar Blok KGC No. A-02 dan A-03, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	(021) 29375262, 29375261	(021) 29375197, 29375198
91	KC Jakarta Tanjung Priok 1	Jl. Enggano No. 42B - 42, Tanjung Priok, Jakarta Utara	(021) 43906060, 43906055	(021) 43906058, 43906059
92	KC Jakarta Harco Mangga Dua	Komplek Ruko Harco Blok C No. 11, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	(021) 6128715	(021) 6120065
93	KC Jakarta Kelapa Gading 2	Jl. Boulevard Raya QA.I/1 Kelapa Gading Barat	(021) 4500695, 4500694, 45841585	(021) 4514121
94	KC Jakarta Tanjung Priok 2	Jl. Kebon Bawang VII No. 22 RT 03/RW 06	(021) 43931555	-
95	KC Tangerang BSD Pahlawan Seribu	Ruko Tol Boulevard Blok D, No. 20-21 Jl. Pahlawan Seribu	(021) 53156565	(021) 53160099
96	KC Tangerang Bintaro	Bintaro Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Blok A1 No. 7 - 8, Bintaro Sektor 7, Pondok Aren, Tangerang, Banten	(021) 7450120, 7453301, 7450296, 7450297	(021) 7450116
97	KC Tangerang BSD Pasar Modern	Pasar Modern Timur BSD Blok A No. 19, 20, 21 BSD, Jl. Letnan Sutopo, Rw. Mekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15111	(021) 6259000	(021) 6297427
98	KC Tangerang BSD ITC	Jl. Pahlawan Seribu ITC BSD No. 21-23A	(021) 53153155, 53153144-46	(021) 53161611
99	KC Tangerang Hasyim Ashari	Jl. KH. Hasyim Ashari 8 A-C	(021) 55781230, 55781231, 55781232	(021) 55781233
100	KC Cilegon Tirtayasa 1	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115 A, Cilegon, Banten	(0254) 399444, 375648	(0254) 375645
101	KC Serang	Jl. Ahmad Yani No. 175 C-D, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kab. Serang, Banten	(0254) 222984, 210191	(0254) 222985
102	KC Cilegon A Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 A-C	(0254) 398777, 378793, 378792	(0254) 378704
103	KC Tangerang 2	Ruko Premium Bisnis Park Tangerang City Blok A No. 9 Jl. Jend Sudirman	(021) 29239604 (hunting)	(021) 29239606
104	KC Tangerang Daan Mogot	Jl. Daan Mogot No. 39	(021) 5583554, 5583596, 5583595, 5583590	(021) 5583593
105	KC Cilegon Tirtayasa 2	Jl. SA Tirtayasa No. 62	(0254) 393277	(0254) 393288
106	KC Bekasi 1	Komplek Pertokoan Kalimalang Comm Center, Jl. A Yani A5 No. 6-7, Bekasi, Jawa Barat	(021) 8853990, 8856368, 8840355, 8853991, 88855418	(021) 8856406
107	KC Bekasi Cikarang	Ruko Cikarang Central City, Blok G No. 1-2, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	(021) 89902076, 89902077	(021) 89906765

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
108	KC Bekasi Pondok Gede	Jl. Jatiwaringin Raya No. 110 D-E, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.	(021) 84970255, 84900806, 84900810	(021) 84970265
109	KC Bekasi 2	Komplek Sentra Niaga Jl. Jend. A. Yani Blok A6 No. 1-2	(021) 89469111	(021) 88966464
110	KC Karawang	Jl. Panatayuda I No 68	(0267) 8490449 (hunting), 0828-17096715 / 16 / 17 / 18 / 29 / 30 / 31 / 32	(0267) 401505
111	KC Bekasi Square	Jl. Ahmad Yani, Revo Town Mall No. 60-61	(021) 82437834	(021) 82437835
112	KC Jakarta Pemuda	Komplek Graha Mas Pemuda, Blok AB1 dan AB2 Jl. Pemuda, Rawamangun	(021) 47882680 / 81 / 82 / 83	(021) 47882684 / 85
113	KC Jakarta Rawamangun	Jl. Paus Raya No. 86, Rawamangun, Jakarta Timur	(021) 4711987	(021) 4711963
114	KC Jakarta Pondok Kelapa	Ruko Komplek Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur	(021) 86903501	(021) 86903502
115	KC Jakarta Jatinegara	Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 8-9, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur	(021) 85904866	(021) 85905634
116	KC Jakarta Thamrin	Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat.	(021) 2300509, 39839000	(021) 39832939
117	KC Jakarta Sudirman	Mayapada Tower II Lantai GF, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan	(021) 2500511, 2500533	(021) 2500422
118	KC Jakarta Bendungan Hilir	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A - B	(021) 57851054 - 56	(021) 57851038
119	KC Jakarta Abdul Muis	Jl. Abdul Muis No. 2-4	(021) 381 0226	(021) 3810225
120	KC Jakarta Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim No. 228	(021) 392 4588	(021) 3805272, 31903680
121	KC Bogor Pajajaran Sukasari	Jl. Pajajaran No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat	(0251) 8350562, 8350563, 8350564	(0251) 8350565
122	KC Sukabumi Sudirman	Jl. Jend. Sudirman Blok 112 RT 05/RW 001, Kel. Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat	(0266) 243888, 243897	(0266) 243898
123	KC Bogor Cibinong	Ruko Graha Cibinong Blok D No. 2, Jl. Raya Bogor KM 43, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.	(021) 87915703, 87915704	(021) 87919008
124	KC Bogor Pajajaran Bantarjati	Jl. Pajajaran Raya No. 63 Kota Bogor	(0251) 8337306, 8337620, 8337828	(0251) 8384968
125	KC Sukabumi A Yani	Jl. A. Yani No. 29	(0266) 6247300	(0266) 6247400
126	KC Bogor Tanah Sareal	Jl. Raya Sholeh Iskandar Ruko Permata No. 1 - 2	(0251) 8377001, 8345211, 8345225	(0251) 8345211
127	KC Bogor Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 19	(0251) 8312129, 8312130	(0251) 8312128
128	KC Sukabumi Martadinata	Jl. R.E. Martadinata No. 37 RT 06/RW 07	(0266) 245688	(0266) 214281
129	KC Depok Margonda 2	Jl. Margonda Raya No. 209	(021) 77210117 (hunting)	(021) 77210027
130	KC Depok Margonda 1	Ruko Depok Mas Blok A1-2, Jl. Margonda Raya No. 42, Depok, Jawa Barat	(021) 7765231, 7765251, 7765289, 77213804	(021) 77202905, 77203598
131	KC Jakarta Cibubur Citra Gran	Ruko Citra Gran Blok R-2 No. 8-9, Jl. Raya Alternatif, Cibubur, Jakarta Timur	(021) 84300107, 84300108, 8449778	(021) 84590918
132	KC Depok Margonda 3	Margonda Aarden Office Park Blok 7-8 Jl. Margonda Raya No. 41	(021) 77210587, 77201155	(021) 77205754
133	KC Jakarta Fatmawati 2	Jl. RS Fatmawati No. 12	(021) 7696807, 7696808, 75902925, 75902930, 75902934	(021) 75902899, 75902983
134	KC Jakarta Hasanudin	Jl. S. Hasanudin No. 57, Jakarta Selatan	(021) 2701515, 2701505	(021) 7220362
135	KC Jakarta Mayestik	Jl. Kyai Maja Blok D/1 Persil No. 6-6A, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	(021) 7202451, 7202728, 7202509, 7394952	(021) 7220822

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
136	KC Jakarta Warung Buncit	Mampang Square Blok A5-6, Jl. Mampang Prapatan No. A6, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	(021) 27534514, 27534515	(021) 27534505
137	KC Jakarta Fatmawati 1	Jl. Fatmawati No. 110 A RT 001/RW 004	(021) 27822722	-
138	KC Jakarta Pondok Indah	Komp. Ruko Pondok Indah Kav. II No. 11 Blok UA, Jl. Taman Duta I Sektor II, Jakarta Selatan	(021) 7662029, 7662030	(021) 7662028, 7665391
139	KC Tangerang Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No. 111, RT 006/001, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten	(021) 7425267	(021) 7423018
140	KC Jakarta Saharjo	Jalan Saharjo No. 204A RT 04/05	(021) 8308768, 8292824, 8357309	(021) 8308769, 8357310
141	KC Jakarta Kalibata	Jl. Raya Pasar Minggu No. 75, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan	(021) 7940323, 7940341, 7940353	(021) 7940420
142	KC Bandung Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Cibeunying, Bandung, Jawa Barat	(022) 84469443	(022) 4200011
143	KC Garut	Jl. Ciledug No. 148-149, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Jawa Barat	(0262) 243689, 243692	(0262) 233137
144	KC Bandung Asia Afrika	Jl. Asia Afrika No. 174 RT 009/RW 004	(022) 7314546, 7323142, 7323143	(022) 7323141
145	KC Bandung Astana Anyar	Jl. Kopo No. 61 A	(022) 5209654, 022 5209768	(022) 5220566
146	KC Bandung Citarum	Jl. Taman Citarum No. 4	(022) 7234255, 7234256	-
147	KC Bandung Suniaraja	Jl. Suniaraja No. 82	(022) 4232584, 4231185, 4236614, 4232585, 4232586, 4232587 42386, 42389	-
148	KC Bandung Ahmad Yani	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 252, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Bandung, Jawa Barat	(022) 7202688, 7231090, 0828 19030694	(022) 7271334
149	KC Purwakarta RE Martadinata	Jl. Raden Edi Martadinata, RT 25/RW 05, Kel. Nagri Tengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat	(0264) 231760	(0264) 231761
150	KC Cimahi	Jl. Jend. Amir Machmud No. 118, Cibabat, Cimahi, Jawa Barat	(022) 6632228	(022) 6632212
151	KC Cianjur Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 6, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat	(0263) 284648	(0263) 284677
152	KC Purwakarta Gandanegara	Jl. Gandanegara No. 12 RT 30/RW 05	(0264) 8227010, 8227011	(0264) 8227012
153	KC Cianjur Abdullah Bin Nuh	Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No.40 RT 05/RW 08	(0263) 270097	(0263) 271909
154	KC Cirebon Dr Cipto	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 89, Cirebon, Jawa Barat	(0231) 202760, 202092, 202093, 200423	(0231) 202067
155	KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 74-78, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.	(0265) 312995, 312999	(0265) 311199
156	KC Cirebon Sisingamangaraja	Jl. Sisingamangaraja No. 28	(0231) 246063, 246064, 246065,246102, 246104	(0231) 246105
157	KC Tasikmalaya Masjid Agung	Jl. Mesjid Agung No. 26, Blok Kaum Kaler	(0265) 2354002, 2354003, 2354006	(0265) 2354007
158	KC Tasikmalaya A Yani	Jl. Ahmad Yani No. 15 & 17	(0265) 325 859/-861/-862	-
159	KC Cirebon Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 181	(0231) 231313 / 414	(0231) 207311
160	KC Purwokerto Karangkobar	Jl. Karangkobar RT 03/RW 08	(0281) 622777	(0281) 627100
161	KC Purwokerto Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 433, Purwokerto, Jawa Tengah.	(0281) 641108, 641685	(0281) 625955

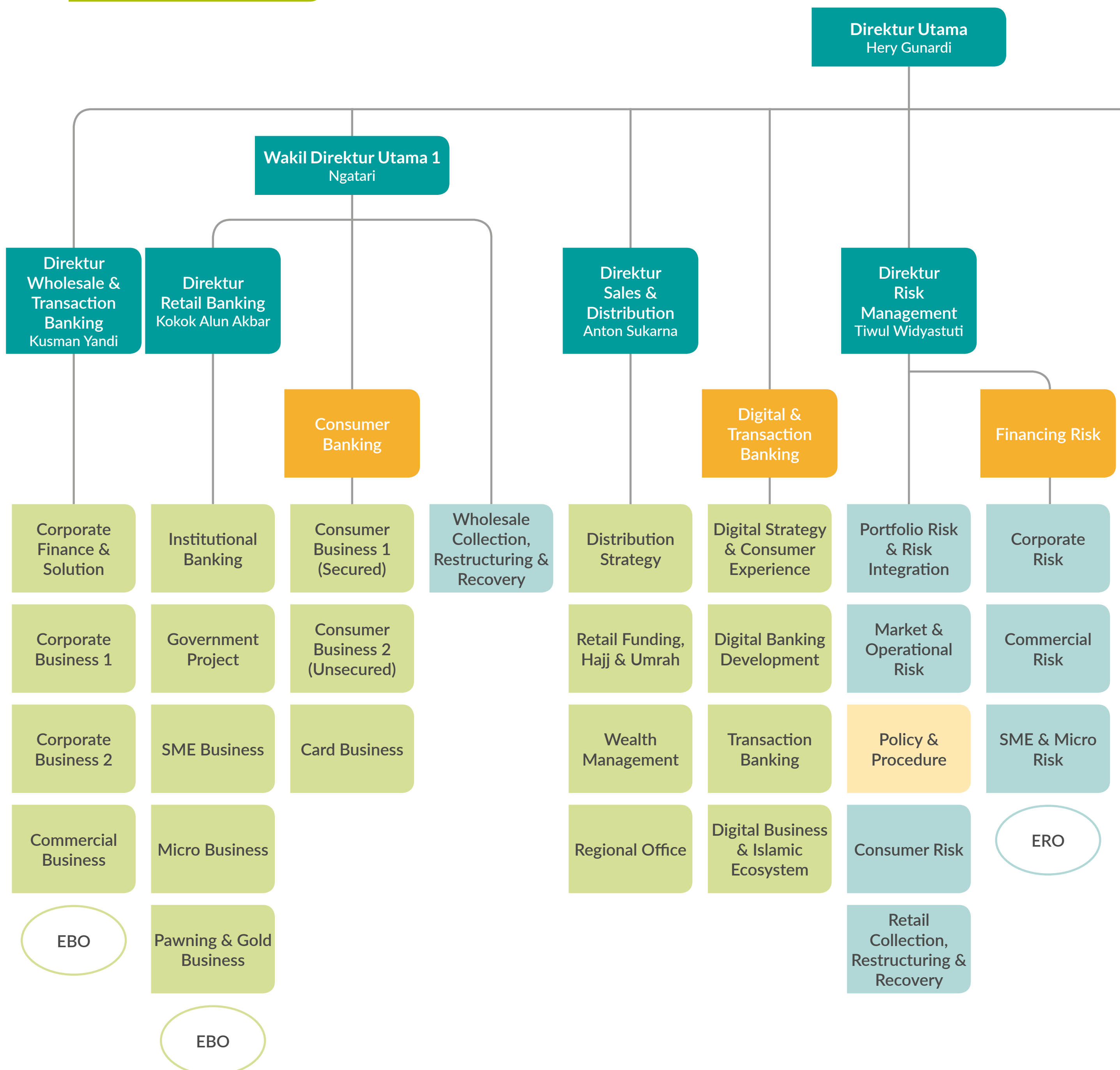
NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
162	KC Cilacap A Yani	Jl. A. Yani No. 97, Cilacap, Jawa Tengah.	(0282) 531015, 531038	(0282) 535870
163	KC Purwokerto Sudirman 2	Jl. Jenderal Sudirman No. 626 RT 003/004	(0281) 632633, 632301, 634248	(0281) 638882
164	KC Semarang A Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 152	(024) 8313247, 8315027	(024) 8313217
165	KC Semarang Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 90, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	(024) 3568891, 3568894	(024) 3568890
166	KC Kudus A Yani 1	Ruko Ahmad Yani No. 9, Jl. Ahmad Yani, Kab. Kudus, Jawa Tengah	(0291) 439272	(0291) 439274
167	KC Pati Sudirman	Jl. P. Sudirman No. 207, Plaza Pati Blok A1-A2, Kel. Pati Lor, Kab. Pati, Jawa Tengah	(0295) 386699	(0295) 387799
168	KC Salatiga	Jl. Diponegoro Ruko Salatiga Square No. 77-A6 dan 77-A7, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah	(0298) 328558, 328885	(0298) 314407
169	KC Kudus A Yani 2	Jl. A.Yani No .23 A-B,	(0291) 444894	(0291) 444895
170	KC Semarang Mt Haryono	Jl. MT. Haryono No. 655 A RT 01/RW 12	(024) 8317000	(024) 8313041
171	KC Pekalongan Wahid Hasyim	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11A, Kel. Kauman, Kec. Kota Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah	(0285) 434911, 434912	(0285) 434894
172	KC Tegal Gajahmada	Jl. Gajahmada No. 90, Tegal, Jawa Tengah	(0283) 325300, 325301	(0283) 351460
173	KC Kendal Soetta	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 325, Kel. Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah	(0294) 388173, 388175	(0294) 388172
174	KC Pekalongan Pemuda	Masjid Syuhada, Jl. Pemuda No. 52-54	(0285) 434918, 434919	(0285) 434920
175	KC Tegal Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 42	(0283) 350800	(0283) 350360
176	KC Pekalongan Yagis	Jl. Bandung No. 60, RT 02/RW 04	(0285) 421282 / 292	(0285) 421272
177	KC Solo Slamet Riyadi 1	Jl. Slamet Riyadi No. 388, Solo, Jawa Tengah	(0271) 710820	(0271) 742085, 742086
178	KC Solo Slamet Riyadi 2	Jl. Slamet Riyadi No. 318	(0271) 742555, 725222	(0271) 736718
179	KC Solo Veteran	Jl. Veteran No. 120	(0271) 644800	(0271) 639339
180	KC Yogyakarta Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 42, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta	(0274) 555022	(0274) 555021
181	KC Yogyakarta Kusumanegara	Jl. Kusumanegara No. 112	(0274) 417222, 417555, 450374	(0274) 417111
182	KC Yogyakarta Kolonel Sugiyono	Jl. Kolonel Sugiono No. 104	(0274) 560066, 557117, 587117, 587337	(0274) 512235
183	KC Denpasar By Pass	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 27 A, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	(0361) 231999	(0361) 237100
184	KC Mataram Hasanudin	Jl. Hasanudin No. 40, Mataram, Nusa Tenggara Barat	(0370) 644888, 622300, 622700	(0370) 634999
185	KC Kupang	JL. Sudirman No. 33, Kupang, Nusa Tenggara Timur.	(0380) 834100, 823466, 828617	(0380) 826150
186	KC Denpasar Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto No. 288 A - 288 B	(0361) 429745	(0361) 429746
187	KC Mataram Pejanggik 1	Jl. Pejanggik No. 23 Cakranegara	(0370) 644622, Anak Hunting: 644288, 644471, 622322	(0370) 622246
188	KC Mataram Cakranegara	Jl. Panca Usaha No. 08 Cakranegara	(0370) 643937, 643183, Area (0370) 643271, 643721	(0370) 643721
189	KC Bima Soetta 1	Jl. Soekarno Hatta No 53 - 55	(0374) 44447, 44443, 44433, 44461	(0374) 44447
190	KC Mataram Pejanggik 2	Jl. Pejanggik No. 103	(0370) 630833	(0370) 649271

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
191	KC Bima Soetta 2	Jl. Soekarno Hatta No. 329 RT 01/RW 01	(0374) 44403, 44404	(0374) 44486
192	KC Denpasar Mahendradatta	Jl. Mahendradatta No. 100x	(0361) 9076993, 9078177	(0361) 9075268
193	KC Jember Sudirman	Jl. P. B. Sudirman No. 41-43, Jember, Jawa Timur	(0331) 411522	(0331) 411525
194	KC Banyuwangi Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rakhmat No. 30, Kel. Singotrunan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	(0333) 418624, 418625, 418626, 418627	(0333) 418628
195	KC Jember A Yani	Jl. Ahmad Yani No. 39, RT 002/RW 006	(0331) 489500	(0331) 487617
196	KC Banyuwangi A Yani	Jl. A. Yani No. 95	(0333) 420 555	(0333) 424 015
197	KC Jember Trunojoyo	Jl. Trunojoyo No 101	(0331) 482617	(0331) 482446
198	KC Kediri Hassanudin	Ruko Hassanuddin Bussines Center Jl. Hasanuddin No. 21	(0354) 672114-5	(0354) 672685
199	KC Kediri Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk No. 49, Kediri, Jawa Timur	(0354) 672000	(0354) 672105
200	KC Madiun Agus Salim	Jl. Agus Salim No. 120, Kel. Nambangan Lor, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur	(0351) 454000	(0351) 458300
201	KC Kediri Trade Center	Ruko Hayam Wuruk Trade Centre Blok A.5 - A. 6, Jl. Hayam Wuruk	(0354) 680977, 680966, 680952	(0354) 672627
202	KC Madiun S Parman	Jl. S. Parman No. 44	(0351) 466247	(0351) 466073
203	KC Malang Sutoyo	Jl. Letjen Sutoyo No. 77B, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	(0341) 402290	(0341) 495311
204	KC Blitar	Jl. Cokroaminoto No. 10 RT 01/RW 02	(0342) 816999	(0342) 816777
205	KC Malang Suprapto	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48	(0341) 359129, 359130	(0341) 359128
206	KC Probolinggo	Jl. Soekarno Hatta, Ruko Grand Soetta Kav. 12C & 12D	(0335) 4381866	-
207	KC Malang Dinoyo	Jl. Raya Tlogomas No. 54	(0341) 578589, 2991170, 579488	(0341) 578598
208	KC Malang Soetta	Jl. Soekarno Hatta Malang, Ruko Taman Niaga Kav. 12, 15 - 17	(0341) 4377979, 4352033, 4351102	(0341) 4373088
209	KC Pasuruan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 77	(0343) 418955	(0343) 418956
210	KC Surabaya Darmo	Jl. Raya Darmo No. 17, Surabaya, Jawa Timur	(031) 5674848, 5679842, 5677062	(031) 5679841
211	KC Sidoarjo Jenggolo	Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No. 9, Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur	(031) 8946449, 8947231, 8921033, 8922129	(031) 8957429
212	KC Surabaya Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rachmat No. 17-19	(031) 99254882, 99254883, 99254885, 99254887	(031) 7385678
213	KC Surabaya Dharmawangsa	Jl. Dharmawangsa No. 115 A	(031) 5045082, 5045085, 5030222	(031) 5037222
214	KC Surabaya Merr 1	Ruko Business Park Kav.10 Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 6 (Dahulu Jl. Semolowaru II C/10)	(031) 59176869, 59176007	-
215	KC Surabaya Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 16D	(031) 561 1223-1228	(031) 5676631
216	KC Surabaya Merr 2	Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 370, 370A & 370B	(031) 87852999	(031) 87852666
217	KC Sidoarjo Ahmad Yani	Jl. A.Yani No.41 A-B	(031) 8050261-4361	(031) 8054362
218	KC Pamekasan	Jl. KH. Agus Salim No. 3A, Pamekasan, Jawa Timur.	(0324) 331223, 331224, 331225	(0324) 331218
219	KC Gresik Kartini	Jl. RA. Kartini No. 180, Gresik, Jawa Timur	(031) 3972053	(031) 3972065, 3979791
220	KC Bojonegoro	Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	(0353) 892124, 892125	(0353) 892123
221	KC Surabaya Jemur Handayani	Jl. Jemur Handayani No. 3, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur	(031) 8411230, 8411250	(031) 8411260
222	KC Gresik Dr Sutomo	Jl. Dr. Sutomo No. 140 RT 002/RW 03	(031) 3980980	(031) 3980973
223	KC Jombang Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim No. 9A 1-2	(0321) 874455	(0321) 874433

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
224	KC Balikpapan Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 330, Balikpapan, Kalimantan Timur	(0542) 413382, 414630	(0542) 412109
225	KC Samarinda Antasari	Jl. Antasari No. 33 RT 02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	(0541) 7271271, 7271272, 7271273, 7271274	(0541) 7271276, 7271277, 7271278
226	KC Kutai Kartanegara	Jl. KH. Akhmad Muksin RT. 01, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	(0541) 665362, 665365	(0541) 665017
227	KC Bontang	Jl. MT. Haryono No. 53, Kel. Gunung Elai (d/h Desa Bontang Baru), Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur	(0548) 20007	(0548) 25005
228	KC Balikpapan Sudirman 2	Jl. Jend. Sudirman No. 30	(0542) 738668 , 737734, 731354,	(0542) 737733
229	KC Samarinda Juanda	Jl. Ir. Juanda No. 216 B	(0541) 7771320	(0541) 7771326
230	KC Balikpapan Sudirman 3	Jl. Jend. Sudirman No. 5	(0542) 733456, 736157	(0542) 735495
231	KC Samarinda Bhayangkara	Jl. Bhayangkara No. 33	(0541) 739997, 739998	(0541) 732653
232	KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	Jl. Lambung Mangkurat No. 16, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	(0511) 3366408, 3366409	(0511) 3366426
233	KC Palangkaraya 2	Jl. Ahmad Yani No. 75, Palangkaraya, Kalimantan Tengah	(0536) 3222223	(0536) 3227000
234	KC Martapura	Jl. A. Yani No. 20 Km. 37,4 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan	(0511) 4722713, 4722755	(0511) 4722714
235	KC Pangkalan Bun	Jl. Sukma Arianingrat No. 14, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	(0532) 25624, 25625	(0532) 25636
236	KC Tanjung	Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor No. 12, Desa Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan	(0526) 2024484	(0526) 2024494
237	KC Sampit	Jl. M. T. Haryono No. 6, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	(0531) 24222	(0531) 24400
238	KC Banjarmasin A Yani 1	Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4 No. 385	(0511) 3259146, 3256946	(0511) 3251346
239	KC Palangkaraya 1	Jl. A.Yani No. 59	(0536) 3224862, 3224863, 3224864	(0536) 3224870
240	KC Banjarbaru	Jl. A.Yani Km 35,5	(0511) 4774939, 6749031	(0511) 4774939
241	KC Banjarmasin A Yani 2	Jl. A. Yani KM 3 No. 147C	(0511) 3257991-7922	(0511) 3257995
242	KC Palangkaraya 3	Jl. Ahmad Yani No. 56 RT 01/05	(0536) 3222569, 3222620	(0536) 3222932
243	KC Pontianak Abdurrachman	Jl. Sultan Abdurrachman No. 23, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	(0561) 745004	(0561) 744774
244	KC Ketapang	Jl. R. Soeprapto No. 88, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat	(0534) 34600	(0534) 34395
245	KC Sambas	Jl. Gusti Hamzah No. 41, Dusun Kubu, Desa Durian, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat	(0562) 391900	(0562) 392200
246	KC Singkawang	Jl. Alianyang No. 16 C-D, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat	(0562) 639866	(0562) 639865
247	KC Pontianak A Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 34 C-D	(0561) 746290, 746291, 746292, 746293, 746294	(0561) 746295

NO.	KANTOR CABANG	ALAMAT	NO. TELP	FAKS
248	KC Pontianak Gusti Sulung	Jl. Gusti Sulung Lalanang, Komp. Pontianak Mall Blok C No. 6-8	(0561) 737433	(0561) 761627, 767268
249	KC Makassar 1	Jl. Dr. Ratulangi No.79, Makassar, Sulawesi Selatan	(0411) 833070	(0411) 833069
250	KC Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No. 44, Mamuju, Sulawesi Barat	(0426) 22651, 2703380	(0426) 21922
251	KC Bone	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48, Watampone, Kel. Macanang, Kec. Tanette Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan	(0481) 28774	(0481) 28775
252	KC Makassar 2	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140	(0411) 8914670, 8914610, 8914130	(0411) 8914275
253	KC Makassar Veteran	Jl. Veteran Selatan No. 295 B,	(0411) 879365, 879132, 4091066	-
254	KC Palopo	Jl. Andi Jemma No.150	(0471) 327432, 327225, 327360	-
255	KC Parepare	Jl. Lahalede No.15	(0421) 22456, 26534, 24624	-
256	KC Makassar Pettarani	Jl. Andi Pangeran Pettarani No.70	(0411) 430003, 434900	(0411) 425454
257	KC Manado Mega Mas	Kawasan Mega Mas, Jl. Piere Tendean Boulevard Blok I D-1 No. 28, Manado, Sulawesi Utara	(0431) 879444	(0431) 879492
258	KC Jayapura	Komplek Perniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2, Entrop, Jayapura, Papua	(0967) 550965, 550966	(0967) 550968
259	KC Ternate Jatiland	Ruko Jatiland Business Center No. 19-20, Ternate, Maluku Utara	(0921) 3127220	(0921) 3127336
260	KC Sorong	Jl. Ahmad Yani No. 21, Sorong, Papua Barat	(0951) 323366	(0951) 323360
261	KC Ambon	Jl. Pala No. 2, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku	(0911) 344572, 344337	(0911) 344582
262	KC Ternate Hasan Esa	Jl. Hasan Esa No. 79B	(0921) 3122162, 3122141, 3122169, 3128574	-
263	KC Manado Mantos	Jl. Tendean (Boulevard) Ruko Mantos No. 11-12	(0431) 876166	(0431) 8881502
264	KC Palu Gajah Mada	Jl. Wolter Monginsidi No. 77 Palu, Sulawesi Tengah	(0451) 426222	(0451) 452108
265	KC Gorontalo	Jl. Ahmad Yani No. 127, Gorontalo	(0435) 828666	(0435) 830056
266	KC Luwuk	Jl. Urip Sumoharjo No. 18C dan 18D, Kel. Simpong, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah	(0461) 21214, 22779, 0811 8671544	(0461) 325456
267	KC Kendari A Silondae 1	Jl. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	(0401) 3128822, 3128245, 3128897	(0401) 3127478
268	KC Palu M Yamin	Komplek Paluta Building Kav. 8 -10 Jl. Mohammad Yamin	(0451) 424848, 424244	(0451) 422399
269	KC Kendari Mt Haryono	Jl. MT Haryono No. 155	(0401) 3193494, 3192297	(0401) 3193493
270	KC Kendari Mandonga	Jl. Sych Yusuf No. 12	(0401) 3131317, 3131318	(0401) 3131318, 3131319
271	KC Kendari A Silondae 2	Jl. Abdullah Silondae No. 123 RT 11/RW 03	(0401) 3129502	(0401) 3128420
272	KC Palu Wolter Monginsidi	Jl. Wolter Monginsidi No. 133 C	(0451) 487666, 487910	-

Struktur Organisasi



Dewan Komisaris

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi & Remunerasi
- Komite Integrated Corporate Governance

Wakil Direktur Utama 2
Abdullah Firman Wibowo

Direktur Compliance & Human Capital
Tribuana Tunggadewi

- Compliance
- AML/APU PPT
- Legal
- Corporate Secretary & Communication
- Human Capital
  - Human Capital Strategy & Policy
  - Human Capital Business Partner 1
  - Human Capital Business Partner 2
  - Human Capital Services
  - BSI Corporate University

Direktur Finance & Strategy
Ade Cahyo Nugroho

- Strategic Planning & Performance Management
- Corporate Finance & Accounting
- Investor Relation
- Enterprise Data Management
- Change Management & Transformation Office
- Executive Legacy Officer (Finance & Accounting
- Asset & Liabilities Management
- Financial Institution
- Treasury & Global Market
- Procurement

Direktur Information Technology
Achmad Syafii

- Operations
  - Financing Operational
  - Cash & Trade Operations
  - Customer Care
  - Digital Banking & E-Channel Operations
  - Executive Legacy Officer (Operational)
- IT Strategic Planning
- IT Development
- IT Operations
- CISO Office
- Executive Legacy Officer (IT)

Internal Audit

- Audit Policy & Counterpart
- Internal Audit 1
- Internal Audit 2
- Internal Audit 3

- Marketing Communication
- Office of Chief Economist

Catatan:

- Direksi
- SEVP

Daftar Keanggotaan Asosiasi

NO.	ASOSIASI	POSISI
1.	Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas)	Anggota
2.	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)	
3.	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Ketua Umum
4.	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota
5.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota
6.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Wakil Bendahara
7.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
8.	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota
9.	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota

Profil Dewan Komisaris



Adiwarman Azwar Karim*

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 58 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021

Riwayat Pendidikan

- Master of Arts in Economics and Economics Policy, Boston University, United State of America (1990-1992)
- Master of Business Administration in General Management, European University, Belgium (1989-1990)
- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1983-1989)
- Insinyur Pertanian Institut Pertanian Bogor (1982-1986)

Pengalaman Kerja

- Dewan Pengawas Syariah/DPS PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, (2020 - 2022).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah/DPS PT Veritra Sentosa Internasional, (2017 – 2021)
- Founder, KARIM Consulting Indonesia (2013 - 2021)
- Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna (2012 – 2020)
- Founder, KARIM Business Consulting (2001 – 2013)

Hubungan Afiliasi

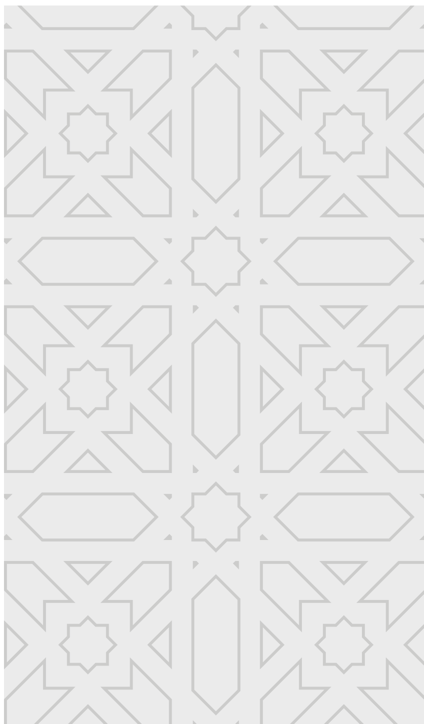
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

* efektif menjabat per 7 Februari 2022



Muhammad Zainul Majdi*
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang
Usia : 49 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021

Riwayat Pendidikan

- Doktoral Universitas Al - Azhar Cairo Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir & Ilmu Al-Quran (2011)
- Pasca Sarjana Universitas Al - Azhar Cairo Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir & Ilmu Al-Quran (2001)
- Sarjana Universitas Al - Azhar Cairo Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir & Ilmu Al-Quran (1995)

Rangkap Jabatan

Rektor Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi

Pengalaman Kerja

- Rektor Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi (2003-Sekarang)
- Gubernur Provinsi NTB (2013-2018)
- Gubernur Provinsi NTB (2008-2013)
- Anggota DPR-RI (2004-2008)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

* efektif menjabat per 7 Februari 2022



Masduki Baidlowi
Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jawa Barat
Usia : 63 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Tarbiyah Sekolah Tinggi Tarbiyah Taruna (2004)
- Sarjana Muda IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab (1983)

Rangkap Jabatan
Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden)

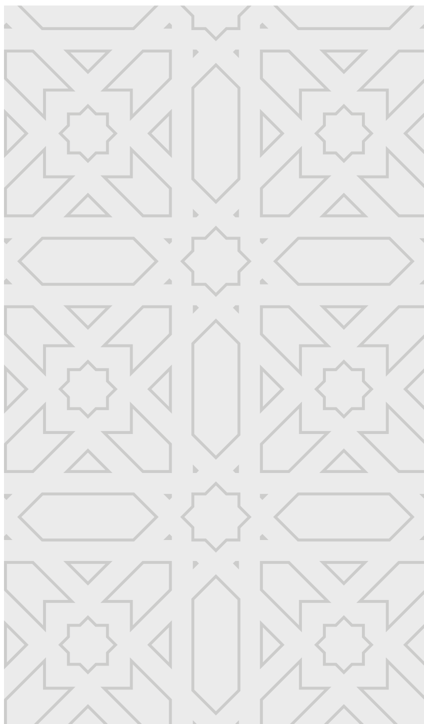
Pengalaman Kerja
- Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden) (2019-Sekarang)
- Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Anggota DPR RI Anggota Komisi IV Bidang Pertanian dan Kelautan(2007-2009)
- Anggota Komisi I Bidang Politik Luar Negeri (2007-2007)
- Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan (2004-2007)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Imam Budi Sarjito
Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 62 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021

Riwayat Pendidikan

- Doctor Economy Claremont Graduate School, USA (1995)
- Master Economy University of Illinois USA (1990)
- Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro (1982)

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank BNI Syariah (2018-2021)
- Direktur Kepatuhan Dan Risiko Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018)
- Komisaris PT Bank BNI Syariah (2012-2015)
- Pempimin Divisi Enterprise Risk Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015)
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005-2011)

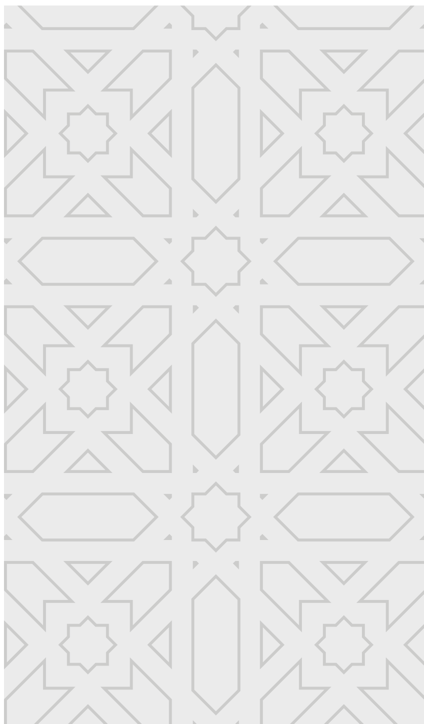
Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Sutanto
Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 58 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
Sarjana Administrasi Niaga Universitas Diponegoro (1989)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Komisaris PT Bank BRIsyariah Tbk (2019-2021)
- Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019)
- Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018)
- Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016)
- Wakil Inspektur, Bidang Audit KP , KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Suyanto
Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 59 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan
- Doctor Universitas Trisakti (2020)
- Pasca Sarjana Universitas Pertahanan (2011)
- Sarjana Ekonomi Universitas Balikpapan (1994)

Rangkap Jabatan
Staff Khusus Ka BIN di Badan Intelijen Negara

Pengalaman Kerja
- Staff Khusus Ka BIN (2020-Sekarang)
- Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Agen Madya, pada Staff SDA - LH (2020)
- Staff Ahli Ka BIN - Bidang SDA -LH (2019)
- Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I (2018)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 35 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan
- Pasca Sarjana Kebijakan Kesehatan - Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2014)
- Sarjana Pendidikan Dokter Gigi Universitas Hassanudin (2010)

Rangkap Jabatan
Komisaris PT Merial Health

Pengalaman Kerja
- Komisaris PT Merial Health (2018 - Sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (2020 - 2021)
- Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020)
- Chairman/Co-founder MilenialFest (2020)
- Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI (2019)

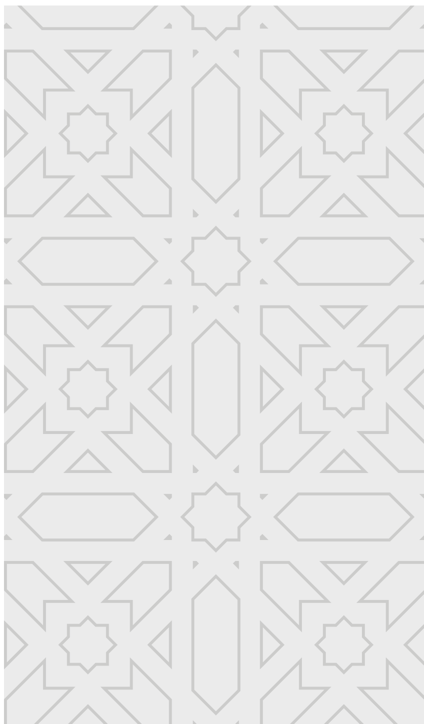
Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jawa Barat
Usia : 68 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan

- Doktor di Ilmu Filsafat, Middle East Technical University, Ankara, Turki (1990)
- Master di Bidang Filsafat dari Middle East Technical University, Turki (1986)
- Sarjana Ushuluddin dari IAIN Syarif Hidayatullah (1981)

Rangkap Jabatan

Rektor di Universitas Islam Internasional Indonesia

Pengalaman Kerja

- Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (2019 - sekarang)
- Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta (2015 - sekarang)
- Pengawas Yayasan Pendidikan Madania (2018-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (2019-2020)
- Anggota Timsel dan Calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI (2017-2022)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 78 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan
- Program Doktoral Institute Pertanian Bogor, (2007)
- Pasca Sarjana University of Southern California Los Angeles, USA (1974)
- Sarjana Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (1970)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro (PKMI) (2021)
- Komisaris Independen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019)
- Komisaris Independen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015)
- Komisaris Independen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2010)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Profil
Dewan Pengawas Syariah



Hasanudin
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Jawa Barat
Usia : 60 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021

Riwayat Pendidikan

- Doktor Bidang Syariah UIN Syarif Hidayatullah (2008)
- Magister Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1997)
- Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1989)

Rangkap Jabatan

- Anggota DPS UUS Bank Danamon
- Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services
- Ketua DPS PT Trimegah Asset Management
- Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI

Pengalaman Kerja

- Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI (2020- sekarang)
- Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang)
- Ketua DPS PT Trimegah Asset Management (2015-sekarang)
- Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services (2014-sekarang)
- Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (2012-2016)
- Ketua dan Anggota DPS PT Bank BNI Syariah (2010-2021)
- Anggota DPS UUS Bank Danamon (2002- sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Mohamad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 54 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021

Riwayat Pendidikan

- Doktor Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti (2014)
- Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum: Institute of Business Law and Legal Management (2004)
- Magister Bussiness Administration IPWI Jakarta (1999)
- Sarjana Syariah IAIN / UIN Syarief Hidayatullah Jakarta (1992)

Rangkap Jabatan

- Anggota DPS UUS PT BTN Syariah
- Ketua DPS UUS PT BRI Life Syariah
- Ketua DPS UUS PT Manulife Syariah
- Ketua DPS UUS PT Allianz Syariah

Pengalaman Kerja

- Ketua DPS PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021)
- Ketua DPS PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2019 – 2021)
- Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri Tbk (1999 – 2019)
- Anggota DPS UUS PT BTN Syariah (2018 – sekarang)
- Ketua DPS UUS PT BRI Life Syariah (2017 – sekarang)
- Ketua DPS UUS PT Manulife Syariah (2020 – sekarang)
- Ketua DPS UUS PT Allianz Syariah (2020 – sekarang)

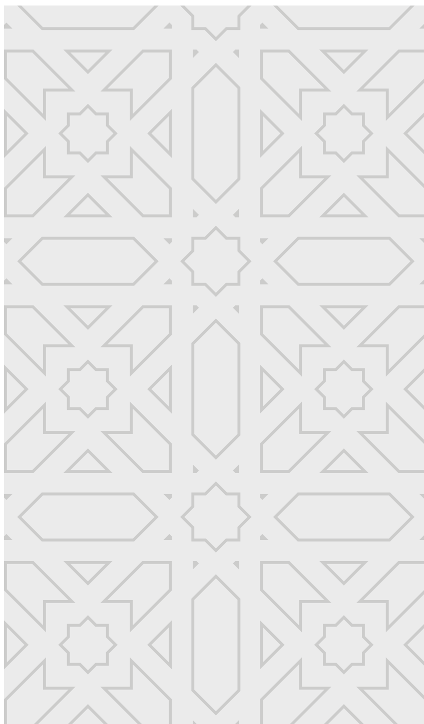
Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Oni Sahroni
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok, Jawa Barat
Usia : 46 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan
- Doktor Bidang Fiqih Muqaran (Perbandingan Madzhab) Universitas al-Azhar Kairo (2009)
- Magister Bidang Fiqih Muqaran (Perbandingan Madzhab) Universitas al-Azhar Kairo (2005)
- Serjana Bidang Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar Kairo (2000)

Rangkap Jabatan
Anggota DPS PT BNP Paribas Investment Partners

Pengalaman Kerja
- Anggota DPS PT BNP Paribas Investment Partners (2016 – sekarang)
- Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri (2020 - 2021)
- Anggota DPS Maybank Islamic Berhard Syariah (2018-2020)
- Anggota DPS UUS PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017 - 2020)
- Anggota DPS UUS PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2012 – 2020)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Didin Hafidhuddin
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bogor
Usia : 70 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali ditunjuk sebagai melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan
- Doktor Bidang Ilmu Agama/Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001)
- Diploma Bidang Bahasa Arab Universitas Madinah Saudi Arabia (1994)
- Magister Sains Bidang Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (1987)
- Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978)

Rangkap Jabatan
- Ketua DPS PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah
- Ketua DPS PT BPRS Amanah Ummah Bogor
- Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Pengalaman Kerja
- Ketua DPS PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah (2014-sekarang)
- Ketua DPS PT Bank BRIsyariah Tbk (2010-2020)
- Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2010-sekarang)
- Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2009-sekarang)
- Ketua DPS PT BPRS Amanah Ummah Bogor (1992-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Profil Direksi



Hery Gunardi
Direktur Utama

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 59 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran (2021)
- Master Finance and Accounting University of Oregon USA (1991)
- Sarjana Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus (1987)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020)
- Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020)
- Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019)
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Ngatari
Wakil Direktur Utama 1

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 56 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali diangkat sebagai Wakil Direktur Utama I melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/Pengolahan Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya (1985-1990)

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Pengalaman Kerja

- Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk periode (2019-2021)
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung (2018-2019)
- Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 (2017-2018)
- Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar (2016-2017)
- Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin (2016-2014)

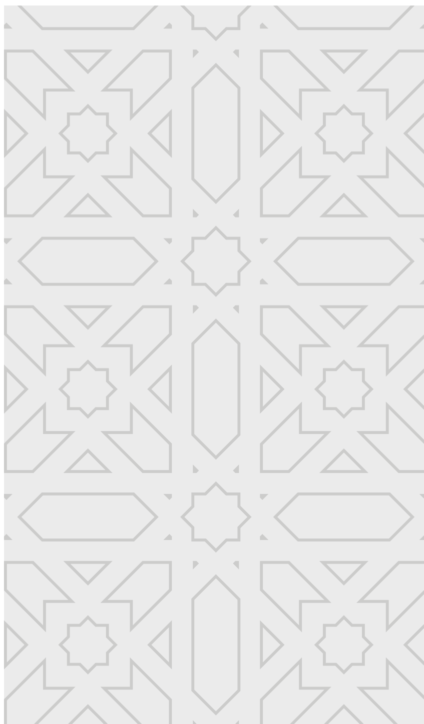
Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Abdullah Firman Wibowo
Wakil Direktur Utama 2

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 57 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Wakil Direktur Utama II melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen, Ilmu – Ilmu Sosial (Banking Management), Universitas Gajah Mada (UGM) - (1993)
- Sarjana Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian/Ekonomi Pertanian, Universitas Gajah Mada (UGM) - (1986)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Direktur Utama, PT Bank BNI Syariah (2017-2021)
- Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2017)
- Senior Executive Vice President (SEVP) Business Risk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015–2016)
- Pemimpin Divisi International PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015)
- Pemimpin Divisi Treasury PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2011)

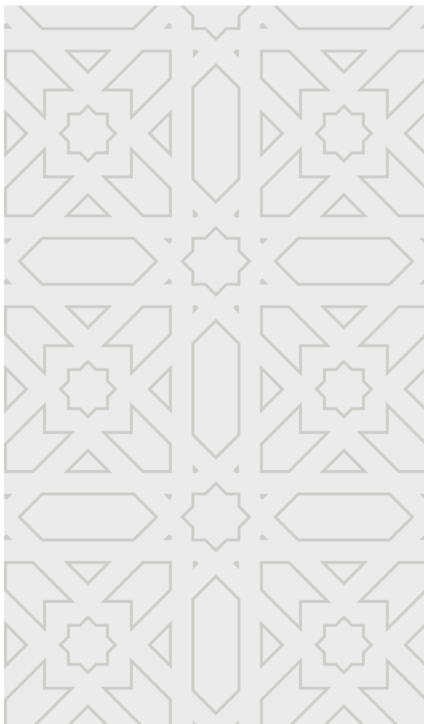
Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Kusman Yandi

Direktur Wholesale & Transaction Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 56 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali diangkat sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan

- Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis S2 / Master of Business Administration (2009)
- Perguruan Tinggi Universitas Negeri Riau, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi S1 / Sarjana Ekonomi (1989)

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Pengalaman Kerja

- Direktur Wholesale Banking, PT Bank Syariah Mandiri (2015 – 2021)
- Senior Executive Vice President of Wholesale Banking Directorate, PT Bank Syariah Mandiri (2015 – 2015)
- Senior Executive Vice President of Wholesale, Treasury & International Banking Directorate, PT Bank Syariah Mandiri (2014 – 2015)
- Executive Business Officer of Commercial and Business Banking Directorate, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013 - 2014)
- Vice President/CBC Manager of Commercial Banking Centre, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2013)

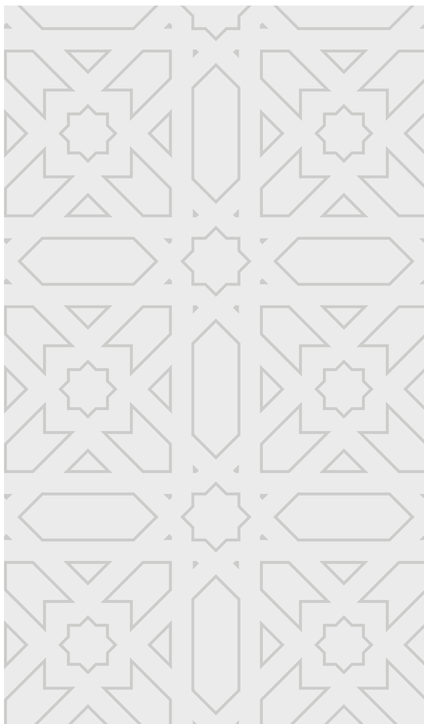
Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Kokok Alun Akbar
Direktur Retail Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Timur
Usia : 55 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Retail Banking melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
Sarjana Pertanian Perlindungan Tanaman Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" (1989)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

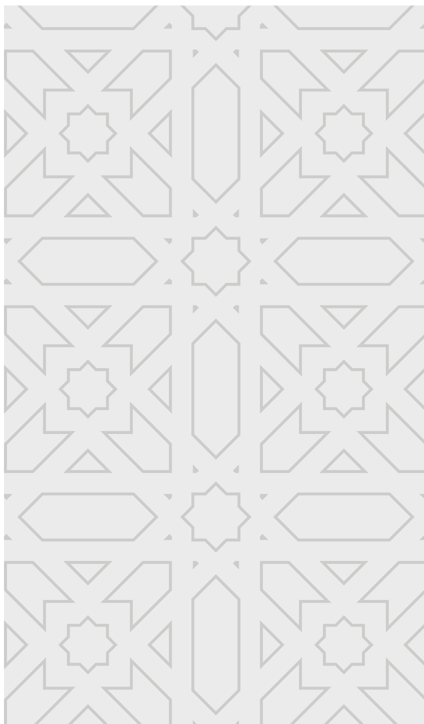
Pengalaman Kerja
- Direktur Bisnis Komersil, PT Bank BRIsyariah Tbk (2018 - 2020)
- Kepala Divisi BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 - 2018)
- Wakil Kepala Divisi BUMN 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012- 2016)
- Group Head Divisi Agribisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010 - 2012)
- Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Muara Teweh (2008-2009)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 51 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Sales & Distribution melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknologi Produksi Ternak, Institut Pertanian Bogor (1994)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

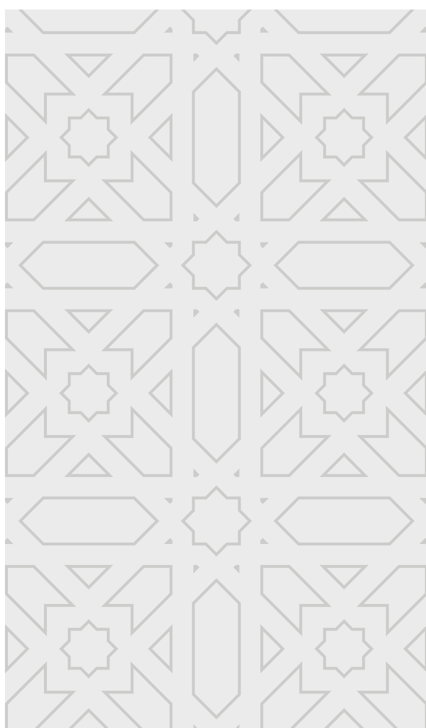
Pengalaman Kerja
- Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020)
- Regional Head – Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri (2018-2019)
- Regional Head – Region VII/Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018)
- Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri tahun (2015-2016)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Achmad Syafii
Direktur Information Technology

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Kota Tangerang
Usia : 54 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Information Technology melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Pascasarjana Manajemen Informatika STMIK Budi Luhur (2013)
- Sarjana Teknik Informatika & Komputer STMIK Budi Luhur (2009)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

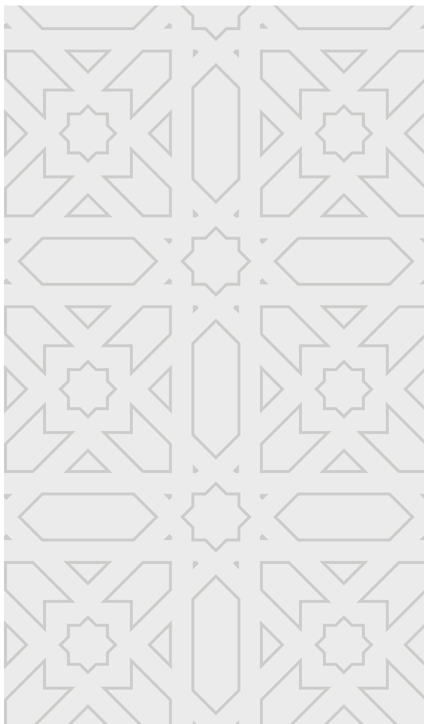
Pengalaman Kerja
- Direktur IT, Operation & Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Direktur IT & Operation PT Bank Syariah Mandiri (2017-2020)
- Group Head IT Application Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017)
- Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Departement Head Integration Hub & Common Application Service PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2015)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Tiwul Widyastuti
Direktur Risk Management

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bekasi
Usia : 55 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Risk Management melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen International STIM Prasetya Mulya (2001)
- Sarjana Pertanian Institut Pertanian Stiper (1989)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

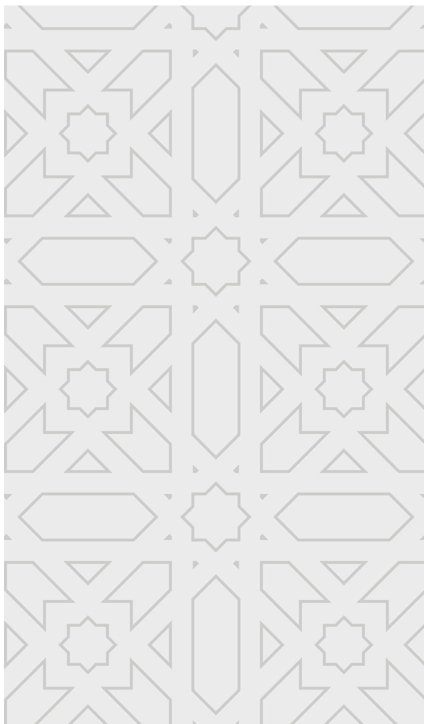
Pengalaman Kerja
- Direktur Risk Management PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Group Head Commercial Risk 2 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2018)
- Group Head Corporate Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018)
- Komisaris PT Usaha Gedung Mandiri (2017-2020)
- Departement Head Multi Industri I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2010)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Tribuana Tunggadewi
Direktur Compliance & Human Capital

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 54 Tahun



Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Compliance & Human Capital melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Hukum Bisnis, Universitas Indonesia (2002)
- Spesialis Kenotariatan, Universitas Airlangga (1993)
- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1990)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Direktur Kepatuhan & Risiko, PT Bank BNI Syariah (2017-2021)
- Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi, PT Bank BNI Syariah (2015-2017)
- Senior Vice President (SVP) – Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015)
- Vice President (VP) – Wakil Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2011)
- VP Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2009)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 43 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Finance & Strategy melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Master in Business Administration bidang studi Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherland (2011)
- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (2003)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Direktur Finance, Strategy & Treasury PT Bank Syariah Mandiri tahun (2018-2021)
- Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2017-2018)
- SEVP Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016-2017)
- Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016)
- SEVP/Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance (2014-2015)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Profil Pejabat SEVP



Wahyu Avianto
SEVP Operations

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 49 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64316-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Universitas Indonesia (2004)
- Sarjana Teknik Institut Teknologi Bandung (1995)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Direktur Keuangan PT Bank BNI Syariah (2018 – 2021)
- Pemimpin Divisi Keuangan PT Bank BNI Syariah (2017 – 2018)
- Koordinator Divisi Keuangan & Jaringan PT Bank BNI Syariah (2016 – 2017)
- Pemimpin Divisi Strategi & Keuangan PT Bank BNI Syariah (2013 – 2016)
- Pemimpin Divisi Perencanaan & Kinerja Strategis PT Bank BNI Syariah (2010 - 2013)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Babas Bastaman
SEVP Financing Risk

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bekasi
Usia : 54 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64315-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Industri Kecil Menengah Institut Pertanian Bogor (2009)
- Sarjana Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1992)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah (2020 - 2021)
- Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2020)
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017 – 2019)
- Pemimpin Divisi Kredit Komersial PT Bank BNI Syariah (2016)
- Wakil Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Rosma Handayani
SEVP Human Capital

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 52 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64312-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada (2005)
- Sarjana Hukum Perdata Universitas Indonesia (1993)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021)
- SVP Human Capital Business Partner Supporting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017)
- SVP Human Capital Services Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2017)
- Chief Administration Officer CKB Logistics a Member of PT ABM Investama Tbk (2013-2015)
- VP Organization Development Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2013)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.



Wawan Setiawan
SEVP Consumer Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 48 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64317-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Keuangan PPM Graduate School of Management (2000)
- Sarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia (1997)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- SEVP PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021)
- Senior Vice President, Micro Banking Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019)
- Vice President, Regional Retail Head Kantor Wilayah Sumatera II, Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Vice President, Deputy Regional Manager Kantor Wilayah Jateng – DIY, Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015)
- Vice President, Area Manager Bandung Braga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2014)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Profil Pejabat Eksekutif

NO.	NAMA	
1	Fiti Syam	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 16/09/1976 JABATAN Corporate Business 1 Group Head AWAL BERGABUNG 03/09/2002 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
2	Buyung Ichman Lukman	TEMPAT LAHIR Yogyakarta TANGGAL LAHIR 21/07/1967 JABATAN Corporate Business 2 Group Head AWAL BERGABUNG 06/04/2017 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
3	Ivan Hartawan	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 07/12/1968 JABATAN Commercial Business Group Head AWAL BERGABUNG 01/07/2018 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
4	Ida Triana Widowati	TEMPAT LAHIR Magelang TANGGAL LAHIR 10/05/1970 JABATAN Institutional Banking Group Head AWAL BERGABUNG 22/04/1998 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degreee

NO.	NAMA	
5	Astridiana Sjamanti	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 14/02/1970 JABATAN Government Project Group Head AWAL BERGABUNG 01/09/2017 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
6	Dedy Suryadi Dharmawan	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 07/03/1979 JABATAN SME Business Group Head AWAL BERGABUNG 03/09/2002 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
7	Mohammad Isnaeni	TEMPAT LAHIR Tangerang TANGGAL LAHIR 20/10/1969 JABATAN Micro Business Group Head AWAL BERGABUNG 01/02/2010 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
8	Agus Suhendro	TEMPAT LAHIR Mojokerto TANGGAL LAHIR 10/08/1974 JABATAN Pawning & Gold Business Group Head AWAL BERGABUNG 01/01/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
9	Elvera Melladiana	TEMPAT LAHIR Semarang TANGGAL LAHIR 19/09/1966 JABATAN Executive Business Officer AWAL BERGABUNG 24/05/2010 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
10	Okky Fachrizal Achmad	TEMPAT LAHIR Surabaya TANGGAL LAHIR 24/10/1968 JABATAN Executive Business Officer AWAL BERGABUNG 01/06/2015 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
11	Ali Muafa	TEMPAT LAHIR Jombang TANGGAL LAHIR 02/07/1969 JABATAN Executive Business Officer AWAL BERGABUNG 25/04/1995 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
12	Yoana Irawati	TEMPAT LAHIR Padang TANGGAL LAHIR 25/01/1977 JABATAN Executive Business Officer AWAL BERGABUNG 13/03/2000 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
13	Ferry Hendrawan	TEMPAT LAHIR Bontang TANGGAL LAHIR 22/05/1978 JABATAN • Corporate Finance & Solution Group Head • Executive Business Officer AWAL BERGABUNG 25/09/2017 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
14	Praka Mulia Agung	TEMPAT LAHIR Surabaya TANGGAL LAHIR 02/12/1978 JABATAN Consumer Business 1 (Secured) Group Head AWAL BERGABUNG 01/03/2019 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
15	Dien Lukita Purnamasari	TEMPAT LAHIR Jayapura TANGGAL LAHIR 10/05/1974 JABATAN Consumer Business 2 (Unsecured) Group Head AWAL BERGABUNG 21/03/2001 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
16	Rima Dwi Permatasari	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 10/04/1973 JABATAN Card Business Group Head AWAL BERGABUNG 01/03/2016 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree

NO.	NAMA	
19	Jon Sujani Pasaribu	TEMPAT LAHIR Padang Sidempuan TANGGAL LAHIR 24/07/1966 JABATAN Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head AWAL BERGABUNG 25/01/1994 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
20	Adjat Djatnika Basarah	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 12/04/1971 JABATAN Distribution Strategy Group Head AWAL BERGABUNG 05/06/1995 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
21	Vita Andrianty	TEMPAT LAHIR Tangerang TANGGAL LAHIR 18/08/1981 JABATAN • Retail Funding, Hajj & Umrah Group Head • Wealth Management Group Head AWAL BERGABUNG 01/09/2003 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
22	Riko Wardhana	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 30/10/1973 JABATAN Digital Banking Development Group Head AWAL BERGABUNG 01/07/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
23	Wijayanto	TEMPAT LAHIR Bantul TANGGAL LAHIR 03/10/1970 JABATAN Digital Business & Islamic Ecosystem Group Head AWAL BERGABUNG 15/12/2008 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
24	Cera Wirastuti	TEMPAT LAHIR Surabaya TANGGAL LAHIR 12/11/1969 JABATAN Product & Transaction Banking Group Head AWAL BERGABUNG 01/07/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
25	M. Fanny Fansyuri	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 14/04/1967 JABATAN Portfolio Risk & Risk Integration Group Head AWAL BERGABUNG 01/11/1999 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
26	Ferry Ardiansyah	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 20/09/1977 JABATAN Market & Operational Risk Group Head AWAL BERGABUNG 26/04/2010 PENDIDIKAN AKHIR Doctor

NO.	NAMA	
27	Ana Nurul Khayati	TEMPAT LAHIR Madiun TANGGAL LAHIR 26/03/1972 JABATAN Policy & Procedure Group Head AWAL BERGABUNG 13/01/2000 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
28	Asnah Faekhah	TEMPAT LAHIR Lampung Tengah TANGGAL LAHIR 26/02/1969 JABATAN • Consumer Risk Group Head • SME & Micro Risk Group Head AWAL BERGABUNG 01/04/2016 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
29	Rustanti Rachmi	TEMPAT LAHIR Gombong TANGGAL LAHIR 20/01/1967 JABATAN Retail Collection, Restructuring & Recovery Group Head AWAL BERGABUNG 01/11/1999 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
30	Diar Fitrada	TEMPAT LAHIR Sumedang TANGGAL LAHIR 07/06/1986 JABATAN Corporate Risk Group Head AWAL BERGABUNG 15/12/2010 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree

NO.	NAMA	
31	Ir Supriono	TEMPAT LAHIR Magetan TANGGAL LAHIR 27/07/1969 JABATAN Commercial Risk Group Head AWAL BERGABUNG 12/02/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
32	M Kadarsyah	TEMPAT LAHIR Medan TANGGAL LAHIR 01/02/1967 JABATAN Executive Risk & Recovery Officer AWAL BERGABUNG 06/07/2009 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
33	Andri Vendredi	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 12/04/1968 JABATAN Executive Risk & Recovery Officer AWAL BERGABUNG 06/06/2005 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
34	Mochamad Samson	TEMPAT LAHIR Surabaya TANGGAL LAHIR 11/06/1968 JABATAN Executive Risk & Recovery Officer AWAL BERGABUNG 01/08/2011 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
35	Suryo Kuncoro	TEMPAT LAHIR Gombong TANGGAL LAHIR 07/09/1973 JABATAN Executive Risk & Recovery Officer AWAL BERGABUNG 01/10/2010 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
36	Ali	TEMPAT LAHIR Banyuwangi TANGGAL LAHIR 15/11/1978 JABATAN Executive Risk & Recovery Officer AWAL BERGABUNG 08/10/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
37	Rosalina Dewi T	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 23/07/1979 JABATAN Compliance Group Head AWAL BERGABUNG 01/12/2008 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
38	Finorita Fauzi	TEMPAT LAHIR Padang TANGGAL LAHIR 26/08/1968 JABATAN AML/APU-PPT Group Head AWAL BERGABUNG 01/11/2017 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
39	Irfan Lesmana	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 24/02/1971 JABATAN Legal Group Head AWAL BERGABUNG 15/07/2016 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
40	Gunawan Arief Hartoyo	TEMPAT LAHIR Sukoharjo TANGGAL LAHIR 26/03/1971 JABATAN Corporate Secretary & Communication Group Head AWAL BERGABUNG 27/12/1999 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
41	Tri Budi Tjahjono	TEMPAT LAHIR Madiun TANGGAL LAHIR 01/06/1967 JABATAN Head of Human Capital Business Partner 1 AWAL BERGABUNG 01/10/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
42	Bambang Sutrisno	TEMPAT LAHIR Blora TANGGAL LAHIR 17/05/1970 JABATAN Human Capital Services Group Head AWAL BERGABUNG 15/11/1995 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
43	Andrianto Daru Kurniawan	TEMPAT LAHIR Surakarta TANGGAL LAHIR 31/03/1970 JABATAN Human Capital Strategy & Policy Group Head AWAL BERGABUNG 30/01/1995 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
44	Dharmawan P. Hadad	TEMPAT LAHIR Bekasi TANGGAL LAHIR 17/03/1966 JABATAN BSI Corporate University Group Head AWAL BERGABUNG 01/03/2015 PENDIDIKAN AKHIR Doctor
45	M. Misbahul Munir	TEMPAT LAHIR Semarang TANGGAL LAHIR 06/05/1971 JABATAN Strategic Planning & Performance Management Group Head AWAL BERGABUNG 01/12/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
46	Priyo Hartono	TEMPAT LAHIR Kediri TANGGAL LAHIR 16/11/1977 JABATAN Corporate Finance & Accounting Group Head AWAL BERGABUNG 08/06/2015 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree

NO.	NAMA	
47	Ir Anna Kristanty	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 14/10/1974 JABATAN • Financial Institution Group Head • Financial Institution Group Head AWAL BERGABUNG 11/11/2019 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
48	Herrias Yusmawan	TEMPAT LAHIR Semarang TANGGAL LAHIR 16/12/1975 JABATAN Enterprise Data Analytics Group Head AWAL BERGABUNG 01/08/2021 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
49	Suhendar	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 11/05/1976 JABATAN Change Management & Transformation Office Group Head AWAL BERGABUNG 26/08/2004 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
50	Siddiq Rochmadi	TEMPAT LAHIR Bogor TANGGAL LAHIR 02/07/1975 JABATAN Asset & Liabilities Management Group Head AWAL BERGABUNG 01/08/2013 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree

NO.	NAMA	
51	Ahmad Safrizal	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 23/05/1967 JABATAN Treasury & Global Market Group Head AWAL BERGABUNG 07/01/2019 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
52	Yuwono	TEMPAT LAHIR Cianjur TANGGAL LAHIR 05/07/1980 JABATAN Procurement Group Head AWAL BERGABUNG 04/03/2003 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
53	Yan Rasdiansyah	TEMPAT LAHIR Palembang TANGGAL LAHIR 13/01/1976 JABATAN Financing Operations Group Head AWAL BERGABUNG 07/01/2019 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
54	Edhie Rosman	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 13/12/1966 JABATAN Cash & Trade Operations Group Head AWAL BERGABUNG 06/03/2000 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
55	Dwi Hesti Mulyaningrum	TEMPAT LAHIR Boyolali TANGGAL LAHIR 15/05/1974 JABATAN Customer Care Group Head AWAL BERGABUNG 01/08/2019 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
56	Arief Sunandar	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 08/04/1973 JABATAN Digital Banking & E-Channel Operations Group Head AWAL BERGABUNG 15/10/2019 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
57	Hikmat Dani Wijaya	TEMPAT LAHIR Jayapura TANGGAL LAHIR 22/09/1964 JABATAN IT Development Group Head AWAL BERGABUNG 01/10/2020 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
58	Syafid Hidayat	TEMPAT LAHIR Palembang TANGGAL LAHIR 01/12/1972 JABATAN • IT Operations Group Head • Chief Information Security Officer AWAL BERGABUNG 01/02/2012 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree

NO.	NAMA	
59	Bayu Isnandar	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 09/07/1985 JABATAN IT Strategic Planning Group Head AWAL BERGABUNG 15/04/2018 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
60	Mirza Manthovani	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 30/11/1969 JABATAN Executive Legacy Officer AWAL BERGABUNG 01/10/1994 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
61	Zefri Ananta	TEMPAT LAHIR Binjai TANGGAL LAHIR 24/03/1969 JABATAN Executive Legacy Officer AWAL BERGABUNG 04/06/1996 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
62	Sam'on Hidayat. S. Si	TEMPAT LAHIR Pamekasan TANGGAL LAHIR 28/08/1970 JABATAN Executive Legacy Officer AWAL BERGABUNG 25/08/2014 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree

NO.	NAMA	
63	Budi Aristianto	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 17/12/1971 JABATAN Executive Legacy Officer AWAL BERGABUNG 01/07/2011 PENDIDIKAN AKHIR Diploma 3
64	Indriati Tri Handayani	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 03/05/1972 JABATAN Audit Policy & Counterpart Group Head AWAL BERGABUNG 04/08/2014 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
65	Movianto	TEMPAT LAHIR Semarang TANGGAL LAHIR 19/06/1971 JABATAN Internal Audit 1 Group Head AWAL BERGABUNG 25/03/2019 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
66	Agus Subekti	TEMPAT LAHIR Banyumas TANGGAL LAHIR 19/11/1971 JABATAN Internal Audit 2 Group Head AWAL BERGABUNG 02/07/2020 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
67	Khoirul Huda S Riyadi	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 06/10/1975 JABATAN Internal Audit 3 Group Head AWAL BERGABUNG 01/09/2003 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
68	Ivan	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 26/10/1978 JABATAN Marketing Communication Group Head AWAL BERGABUNG 01/03/2020 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
69	Banjaran Surya Indrastomo	TEMPAT LAHIR Bogor TANGGAL LAHIR 19/07/1990 JABATAN Chief Economist AWAL BERGABUNG 01/03/2021 PENDIDIKAN AKHIR Doctor

Profil Regional CEO

NO.	NAMA	
1	Dade Dermawan	TEMPAT LAHIR Cilegon TANGGAL LAHIR 22/01/1969 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 31/07/1995 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
2	Firman Jatnika	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 26/02/1970 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 01/11/1999 PENDIDIKAN AKHIR Doctor
3	Imam Hidayat Sunarto	TEMPAT LAHIR Purworejo TANGGAL LAHIR 21/01/1970 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 11/03/1996 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
4	Mahendra Nusanto S	TEMPAT LAHIR Serang TANGGAL LAHIR 07/07/1971 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 15/07/2002 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
5	Alhuda Dj	TEMPAT LAHIR Bukit Tinggi TANGGAL LAHIR 16/05/1972 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 15/05/2000 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degree
6	Deden Durachman	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 17/09/1972 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 02/06/2000 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degress

NO.	NAMA	
7	Kemas Erwan Husainy	TEMPAT LAHIR Palembang TANGGAL LAHIR 29/10/1975 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 21/02/2001 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree
8	Wisnu Sunandar	TEMPAT LAHIR Jakarta TANGGAL LAHIR 01/10/1978 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 01/09/2003 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

NO.	NAMA	
9	Ficko Hardowiseto	TEMPAT LAHIR Bandung TANGGAL LAHIR 03/10/1978 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 16/03/2005 PENDIDIKAN AKHIR Bachelor Degress
10	Affan Mawardi	TEMPAT LAHIR Bogor TANGGAL LAHIR 20/08/1980 JABATAN Regional CEO AWAL BERGABUNG 01/10/2009 PENDIDIKAN AKHIR Master Degree

Demografi Karyawan

Demografi karyawan yang ditampikan pada Laporan Tahunan ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Untuk data karyawan tahun 2021, yang ditampilkan adalah karyawan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan hasil penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, 3 (tiga) entitas yang bergabung.

Sedangkan untuk data tahun 2020 dan 2019, ditampilkan individual: PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah

A. Komposisi Karyawan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

	TOTAL	%
Pegawai Tetap	17.462	62,48
Pegawai Kontrak	1.987	7,11
Alih Daya	8.501	30,42
Grand Total	**27.950**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan*

PENDIDIKAN PEGAWAI	2021	
	TOTAL	%
SMU	50	0,26
Diploma	2.026	10,42
S1	16.515	84,91
S2	848	4,36
S3	10	0,05
Grand Total	**19.449**	**100,00**

* Tidak termasuk alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia*

USIA PEGAWAI	2021	
	TOTAL	%
18-25 Tahun	1.822	9,37
26-35 Tahun	10.736	55,20
36-45 Tahun	5.654	29,07
Di atas 45 Tahun	1.237	6,36
Grand Total	**19.449**	**100,00**

* Tidak termasuk alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan*

LEVEL JABATAN	POSISI JABATAN	2021	
		TOTAL	%
N2	Group Head, Regional Head, Project Manager	83	0,43
N3	Dean, Area Manager, Dept Head, Manager	429	2,21
N4	Manager, Team Leader & Branch Manager, Sec, Head	2.320	11,93
N5	Relationship Officer, Branch Manager (Cash Outlet Manager), Officer, ODP	6.389	32,85
N6	Staff/Pelaksana/Pegawai Dasar	10.228	52,59
	Grand Total	**19.449**	**100,00**

* Tidak termasuk alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender*

GENDER PEGAWAI	TOTAL	%
Pria	11.522	59,24
Wanita	7.927	40,76
Grand Total	**19.449**	**100,00**

* Tidak termasuk alih daya

B.1. Komposisi Karyawan PT Bank BRIsyariah Tbk

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KARYAWAN	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Tetap dan Kontrak	6.157	81,95	4.611	77,73
Alih Daya	1.356	18,05	1.321	22,27
Jumlah	**7.513**	**100,00**	**5.932**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan*

JENJANG PENDIDIKAN	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
SMA (SMA, D1, D2)	37	0,60	56	1,21
D3 (D3 dan D4)	478	7,76	527	11,43
S1	3.874	62,92	3.935	85,34
S2	86	1,40	92	2,00
S3	2	0,30	1	0,02
Penugasan BRI Qanun Aceh	1.680	27,29	-	-
Jumlah	**6.157**	**100,00**	**4.611**	**100,00**

* Tidak termasuk alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

USIA	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
<25	783	12,72	790	17,13
26-30	1.172	19,04	1.215	26,35
31-35	990	16,08	1.074	23,29
36-40	807	13,11	857	18,59
41-45	435	7,07	418	9,07
46-50	200	3,25	178	3,86
>50	90	1,46	79	1,71
Penugasan BRI Qanun Aceh	1.680	27,29	-	-
Jumlah	**6.157**	**100,00**	**4.611**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan (Tidak termasuk alih daya)

LEVEL ORGANISASI	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Executive Vice President	-	-	-	-
Senior Vice President	3	0,05	4	0,09
Vice President	17	0,28	12	0,26
Senior Assistant Vice President	17	0,28	18	0,39
Assistant Vice President	41	0,67	38	0,82
Senior Manager	103	1,67	79	1,71
Manager	135	2,19	160	3,47
Assistant Manager	440	7,15	463	10,04
Officer	547	8,88	553	11,99
Officer	715	11,61	771	16,72
Senior Staff	620	10,07	545	11,82
Staff	1.402	22,77	1.592	34,53
Junior Staff	437	7,10	376	8,15
Penugasan BRI Qanun Aceh	1.680	27,29	-	-
Jumlah	**6.157**	**100,00**	**4.611**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender

GENDER	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Pria	4.221	67,39	2.960	35,81
Wanita	2.043	35,81	1.651	64.19
Jumlah	**6.264**	**100,00**	**4.611**	**100,00**

B.2. Komposisi Karyawan PT Bank Syariah Mandiri

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KARYAWAN	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Pegawai Tetap	8.130	94,76	8.106	94,78
Kontrak	450	5,24	446	5,22
Jumlah	**8.580**	**100,00**	**8.552**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
S3	2	0,02	0	0
S2	389	4,53	346	4,05
S1	7.275	84,79	7.283	85,16
Diploma	891	10,38	900	10,52
SD-SMU	23	0,27	23	0,27
Jumlah	**8.580**	**100,00**	**8.552**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

USIA	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
>50	205	2,39	178	2,08
>45-50	316	3,68	294	3,44
>40-45	803	9,36	650	7,60
>35-40	1.979	23,07	1.689	19,75
>30-35	3.230	37,65	3.348	39,15
>25-30	1.381	16,10	1.702	19,90
≤25	666	7,76	691	8,08
Jumlah	**8.580**	**100,00**	**8.552**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

LEVEL JABATAN	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Senior Management	46	0,54	49	0,57
Middle Management	892	10,40	847	9,90
Officer	3.381	39,41	2.958	34,59
Staff	4.254	49,58	4.690	54,84
Non Staff	7	0,08	8	0,09
Jumlah	**8.580**	**100,00**	**8.552**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender

GENDER	2020		2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Pria	4.996	58,23	5.034	58,86
Wanita	3.584	41,77	3.518	41,14
Jumlah	**8.580**	**100,00**	**8.552**	**100,00**

B.3. Komposisi Karyawan PT Bank BNI Syariah

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Karyawan	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai Tetap	5.233	91,19	4.513	78,86
Kontrak	505	8,80	1.210	21,14
Jumlah	**5.738**	**100,00**	**5.723**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Doktoral	1	0,02	1	0,02
Pasca Sarjana	292	5,09	243	4,25
Sarjana	4.780	83,30	4.395	76,80
Diploma 4	77	1,34	59	1,03
Diploma 3	587	10,23	1.024	17,89
Sekolah Menengah	1	0,02	1	0,02
Jumlah	**5.738**	**100,00**	**5.723**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Usia	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
>50	148	2,58	108	1,89
>40-49	536	9,34	495	8,65
>30-39	2.140	37,30	2.027	35,42
<30	2.914	50,78	3.093	54,05
Jumlah	**5.738**	**100,00**	**5.723**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Executive Manager	29	0,51	28	0,49
Senior Manager	200	3,49	159	2,78
Manager	495	8,63	437	7,64
Junior Manager	1.962	34,19	1.849	32,31
Clerk	3.052		3.250	56,79
Jumlah	**5.738**	**100,00**	**5.723**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender

Gender	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pria	3.183		3.175	55,48
Wanita	2.566		2.548	44,52
Jumlah	**5.738**	**100,00**	**5.723**	**100,00**

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Biaya Pengembangan Kompetensi

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, BSI telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp82,646 miliar. Adapun untuk tahun buku 2022, Bank mengalokasikan biaya sebanyak Rp 100 miliar. Rincian pengembangan kompetensi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

NO.	LEVEL JABATAN	JUMLAH PESERTA	JENIS PELATIHAN	TUJUAN PELATIHAN	PENYELENGGARA
1	Senior Manager	168	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		1.172	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		437	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		93	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
		56	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		42	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		158	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**2.126**			
2	Middle Manager	383	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		6.426	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		1.488	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		516	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University

Pengembangan Kompetensi Karyawan

NO.	LEVEL JABATAN	JUMLAH PESERTA	JENIS PELATIHAN	TUJUAN PELATIHAN	PENYELENGGARA
		423	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		546	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		754	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**10.536**			
3	Manager	1.318	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		40.831	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		2.145	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		3.644	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
		7.137	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		1.325	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		1.762	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**58.162**			
4	Officer	827	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University

Pengembangan Kompetensi Karyawan

NO.	LEVEL JABATAN	JUMLAH PESERTA	JENIS PELATIHAN	TUJUAN PELATIHAN	PENYELENGGARA
		91.068	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		208	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		9.500	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
		12.693	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		2.738	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		2.349	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**119.383**			
5	Staff	164	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		116.745	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		173	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		18.874	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
		11.044	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		2.309	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University

Pengembangan Kompetensi Karyawan

NO.	LEVEL JABATAN	JUMLAH PESERTA	JENIS PELATIHAN	TUJUAN PELATIHAN	PENYELENGGARA
		717	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	150.026			
6	Lainnya	3	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		1	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
	Total	4			
	Grand Total	340.237			

Rekapitulasi Program Pelatihan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
Program	Satuan penuh	1.079
Peserta Pelatihan	Orang	340.237
Rata-rata Hari Pelatihan	Hari	2,57
Mandays/Orang	Hari	7,11
Jumlah Jam Rata-rata	Jam	20,53
Man Hour	Jam	3.639
Man Day	Hari	455

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1	**Adiwarman A Karim**	Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI AMBIDEXTROUS "Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	Kamis, 16 Desember 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk. Prof. Ric Roi - Professor Leadership & Organization IMD Bussiness School
2	**M.Zainul Majdi**	Pembekalan Manajemen Risiko Level 1	Rabu & Jumat, 28 & 30 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah	Jumat, 20 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Karim Consulting Indonesia
		Pembekalan Manajemen Risiko Level 2	Selasa, 07 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank SyariahIndonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI AMBIDEXTROUS "Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	Kamis, 16 Desember 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk. Prof. Ric Roi - Professor Leadership & Organization IMD Bussiness School
3	**Masduki Baidlowi**	Pelatihan Manajemen Risiko	Kamis, 13 Januari 2021	R. Rapat Maximal Contribution Wisma Mandiri 1 Lantai 3	Peak Pratama Indonesia
		Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Rabu, 17 Februari 2021	via Online: Zoom Webinar	Hadiputranto Hadinoto dan Partners (HHP)
		WEBINAR: Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Zoom Webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	Rabu, 14 April 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Refreshment Manajemen Risiko Untuk Dewan Komisaris Topic: a. Penerapan Secured Open Banking Menuju Percepatan Transformasi Digital Perbankan dan Mitigasinya Terhadap Risiko Operasional Fasilitator: Bapak Rico Usthavia Frans b. Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank (Operation Risk) Fasilitator: Bapak Novan	Kamis, 17 Juni 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment of Strategic Business Post Merger"	Kamis, 01 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Pelatihan Pasar Modal untuk Dewan Komisaris dan Anggota Komite	Kamis, 08 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Institute Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesi Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 5 "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	Senin, 25 Oktober 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Drs. Suhardi Alius - Komisaris Jendral Polisi. (Purn)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI AMBIDEXTROUS "Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	Kamis, 16 Desember 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk. Prof. Ric Roi - Professor Leadership & Organization IMD Bussiness School
4	**Imam Budi Sarjito**	Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Rabu, 17 Februari 2021	via Online: Zoom Webinar	Hadiputranto Hadinoto dan Partners (HHP)
		WEBINAR: Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Zoom Webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	Rabu, 14 April 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Refreshment Manajemen Risiko Untuk Dewan Komisaris Topic: a. Penerapan Secured Open Banking Menuju Percepatan Transformasi Digital Perbankan dan Mitigasinya Terhadap Risiko Operasional Fasilitator: Bapak Rico Usthavia Frans b. Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank (Operation Risk)	Kamis, 17 Juni 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	Kamis, 01 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Pelatihan Pasar Modal untuk Dewan Komisaris dan Anggota Komite	Kamis, 08 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt. Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Institute BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 5 "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	Senin, 25 Oktober 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Drs. Suhardi Alius - Komisaris Jendral Polisi. (Purn)
5	**Sutanto**	Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Rabu, 17 Februari 2021	via Online: Zoom Webinar	Hadiputranto Hadinoto dan Partners (HHP)
		WEBINAR: Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Zoom Webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	Rabu, 14 April 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Refreshment Manajemen Risiko Untuk Dewan Komisaris Topic: a. Penerapan Secured Open Banking Menuju Percepatan Transformasi Digital Perbankan dan Mitigasinya Terhadap Risiko Operasional Fasilitator: Bapak Rico Usthavia Frans b. Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank (Operation Risk) Fasilitator: Bapak Novan	Kamis, 17 Juni 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Pelatihan Pasar Modal untuk Dewan Komisaris dan Anggota Komite	Kamis, 08 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt. Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Institute BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 5 "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	Senin, 25 Oktober 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Drs. Suhardi Alius - Komisaris Jendral Polisi. (Purn)
6	**Suyanto**	Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Rabu, 17 Februari 2021	via Online: Zoom Webinar	Hadiputranto Hadinoto dan Partners (HHP)
		WEBINAR: Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Zoom Webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	Rabu, 14 April 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	Kamis, 01 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Pelatihan Pasar Modal untuk Dewan Komisaris dan Anggota Komite	Kamis, 08 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt. Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Institute BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 5 "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	Senin, 25 Oktober 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Drs. Suhardi Alius - Komisaris Jendral Polisi. (Purn)
7	**M. Arief Rosyid Hasan**	Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Rabu, 17 Februari 2021	via Online: Zoom Webinar	Hadiputranto Hadinoto dan Partners (HHP)
		WEBINAR: Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Zoom Webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	Rabu, 14 April 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Business English Conversation (Upper Elementary)	Selasa, 25 Mei s.d 28 September 2021	R. Rapat Maximal Contribution Wisma Mandiri 1 Lantai 3	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk English Today Indonesia
		Refreshment Manajemen Risiko Untuk Dewan Komisaris Topic: a. Penerapan Secured Open Banking Menuju Percepatan Transformasi Digital Perbankan dan Mitigasinya Terhadap Risiko Operasional Fasilitator: Bapak Rico Usthavia Frans b. Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank (Operation Risk) Fasilitator: Bapak Novan	Kamis, 17 Juni 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Pelatihan Pasar Modal untuk Dewan Komisaris dan Anggota Komite	Kamis, 08 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt. Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Institute BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 5 "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	Senin, 25 Oktober 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Drs. Suhardi Alius - Komisaris Jendral Polisi. (Purn)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI AMBIDEXTROUS "Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	Kamis, 16 Desember 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk. Prof. Ric Roi - Professor Leadership & Organization IMD Bussiness School
8	**Komaruddin Hidayat**	Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Rabu, 17 Februari 2021	via Online: Zoom Webinar	Hadiputranto Hadinoto dan Partners (HHP)
		WEBINAR: Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Zoom Webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Refreshment Manajemen Risiko Untuk Dewan Komisaris Topic: a. Penerapan Secured Open Banking Menuju Percepatan Transformasi Digital Perbankan dan Mitigasinya Terhadap Risiko Operasional Fasilitator: Bapak Rico Usthavia Frans b. Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank (Operation Risk) Fasilitator: Bapak Novan	Kamis, 17 Juni 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	Kamis, 01 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Pelatihan Pasar Modal untuk Dewan Komisaris dan Anggota Komite	Kamis, 08 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt. Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sosialisasi: "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap Tindakan *Fraud* Pegawai PUJK"	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Otoritas Jasa Keuangan
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Institute BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI AMBIDEXTROUS "Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	Kamis, 16 Desember 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk. Prof. Ric Roi - Professor Leadership & Organization IMD Bussiness School

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
9	**Bangun S. Kusmulyono**	Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Rabu, 17 Februari 2021	via Online: Zoom Webinar	Hadiputranto Hadinoto dan Partners (HHP)
		WEBINAR: Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Zoom Webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	Kamis, 25 Maret 2021	via Online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	Rabu, 14 April 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	Kamis, 01 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt. Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021	via Online: Zoom Webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	Kamis, 12 Agustus 2021	via Online: Zoom Webinar	OJK Institute BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Best Practices and The Future Banking Industry	Sabtu, 25 September 2021	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	PT Bank Syariah Indonesia Tbk McKinsey
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk Prof. Rhenald Kasali - Founder Rumah Perubahan
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI AMBIDEXTROUS "Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	Kamis, 16 Desember 2021	via Online: Zoom Webinar	BSI Corporate University Pembicara: Bpk. Prof. Ric Roi - Professor Leadership & Organization IMD Bussiness School

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1	**Dr. KH. Hasanudin, M.Ag**	Webinar workshop pra Ijtima' sanawi DPS tahun 2021 bidang Perbankan Syariah	Senin & Selasa, 4&5 Oktober 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
		Webinar workshop pra Ijtima' sanawi DPS tahun 2021 bidang Perasuransian	Rabu, 6 Oktober 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
		Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021	Kamis-Jumat, 2-3 Desember 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
2	**Dr. H. Mohamad Hidayat**	*Knowledge Sharing Forum*: Peran *Leader* dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar workshop pra Ijtima' sanawi DPS tahun 2021 bidang Perbankan Syariah	Senin & Selasa, 4&5 Oktober 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
		Webinar workshop pra Ijtima' sanawi DPS tahun 2021 bidang Perasuransian	Rabu, 6 Oktober 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
		Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021	Kamis-Jumat, 2-3 Desember 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
3	**Dr. H. Oni Sahroni, MA**	*Knowledge Sharing Forum*: Peran *Leader* dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar workshop pra Ijtima' sanawi DPS tahun 2021 bidang Perbankan Syariah	Senin & Selasa, 4&5 Oktober 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
		Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021	Kamis-Jumat, 2-3 Desember 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
4	**Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc**	*Knowledge Sharing Forum*: Peran *Leader* dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi Narasumber: Bpk Syarief Hidayat Plt Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK RI	Rabu, 21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar workshop pra Ijtima' sanawi DPS tahun 2021 bidang Perbankan Syariah	Senin & Selasa, 4&5 Oktober 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI
		Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021	Kamis-Jumat, 2-3 Desember 2021, melalui zoom webinar	DSN-MUI

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1.	**Hery Gunardi**	APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 202, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	22 April 2021, melalui zoom webinar	Maisa Edukasi LSPP
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2	**Ngatari**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Leading with Question "Menjadi Pemimpin yang Transformasional melalui Pendekatan CARE Model Berbasis Neurosains"	29 September 2021, melalui zoom webinar	Vanaya dan BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP Series 4 - "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Top Executive Learning Program (TELP) series-5 dengan Tema "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	25 Oktober 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		CEO Live series 4 dengan tema "Digital Infrastructure for SME Role on Economic Recovery"	16 November 2021, melalui zoom webinar	Kompas
		Menghadiri Board Forum Q3 2021 Bank Mandiri "Sinergi Inovasi dan Solusi Industri Kesahatan di Masa Depan"	24 November 2021 di Auditorium Plaza Mandiri	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI dengan Tema "Ambidextrous Leadership and How Can Grow and Nurture Leaders"	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
3	**Abdullah Firman Wibowo**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		The Finance Forum	10 Maret 2021, melalui zoom webinar	The Finance
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Teams	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Teams	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	Senin, 27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	Rabu, 29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
4	**Kusman Yandi**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		BSMR Level 5 Refreshment Program: *Trending Fraud Risk in Digital Era*	10 Maret 2021, melalui zoom webinar	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Banking Competency Center (BCC)
		Webinar FHCPI X Bank Mandiri Great start 2021 with "Drastic Action Leadership - Agile Leader for Day After Tomorrow"	5 Maret 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Digital Transformation Journey Sharing Session oleh Bank DBS	28 April 2021 di The Tower Lt. 6	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	8 Juni 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Webinar EXPERD "Spiritual Leadership: Membangun Kehidupan Lebih Bermakna"	8 Juni 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Two days Leadership Sesson "Building Alignmet Force"	13 - 14 Juni 2021 di di The Tower Lt. 3	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar BUMN Muda Erick Thohir Menyapa "Fast Break Menuju Generasi Muda BUMN"	14 Juni 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		CEO Talk Kegiatan Indonesia Finance Learnung Institute (IFLI) dalam rangka Sinergi BUMN : "Prospek Perbankan Syariah After Merger"	17 Juni 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing: "Aku Pilih Bahagia"	23 Juni 2021, melalui zoom webinar	BUMN & Perhutani Forestry Institute
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Masterclass Vol. 8: "Tough Learner: EscalatePerformance Through Active Learning"	7 Juli 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah bersama OJK	12 Agustus 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 “Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital”	22 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI “Leading with Question” bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		“Top Executive Learning Program (TELP) - Series V Tema: “Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Terorisme”	25 Oktober 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar OJK - Membangun Optimisme Baru untuk Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	26 November 2021 di OJK	OJK
		“Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI Tema: Ambidextrous Leadership & How can Grow and Nurture Leaders”	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum Bank Syariah Indonesia: “Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar sari Masalah Hukum?”	20 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
5	**Kokok Alun Akbar**	Leaders Alignment Session BSI 2021 “Leaders as Meaning Maker”	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 “Islam Rahmat bagi Semesta Alam”	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Narasumber dalam acara RAKORNAS MUI, Tema: “Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi: Peluang Pembiayaan”	3 April 2021, webinar	Manjelis Ulama Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 “Hubungan Agama, Bangsa dan Negara”	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 “Alignment Of Strategic Business Post Merger”	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Menghadiri Undangan dari BSU terkait Pelaksanaan Kegiatan Leadership Youth Forum dengan Tema “ Meningkatkan Agility Generasi Muda BSI di Era VUCA”	29 Agustus 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI “Leading with Question” bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
6	**Anton Sukarna**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Keuangan Sosial dan Kesejahteraan Umat : Strategis Optimalisasi Peran Wakaf Uang dan Instrumen Keuangan Sosial Lainnya	24 Februari 2021, melalui zoom webinar	IAEI
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Akselerasi Bisnis Otomotif melalui Skema Joint Financing "Kemudahan Proses Bisnis Joint Financing untuk Mendorong Performance BSI Oto di Cabang"	5 Mei 2021 di The Tower Lt. 6	PT Mandiri Utama Finance
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Two Days Leadership Session " Strengtening Strategic Vision In Supporting Business	10 Oktober 2021 di Wisma Mandiri Lt. 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		"Top Executive Learning Program (TELP) - Series 5 Tema: "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	25 Oktober 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Management Muhasabah	3 Desember 2021 di Mandapa Ritz Carlton Ubud Bali	Corporate Secretary & Communication Group PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		"Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI Tema: Ambidextrous Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum Bank Syariah Indonesia: "Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar dari Masalah Hukum?"	20 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
7	**Achmad Syafii**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Digital Transformation Journey Sharing Session oleh Bank DBS	28 April 2021 di The Tower Lt. 6	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	8 Juni 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP Series 4 - "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University
		CEO Forum Bank Anggota Perbanas "The Future of Banking - How Bank Stay Relevant"	30 September 2021, melalui zoom webinar	PERBANAS
		TELS Vol.5 Bank Mandiri "Visionary Leadership: Kepemimpinan Efektif dalam Menangkap Potensi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" Pembicara: Bpk Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan RI)	12 Oktober 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Webinar "Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital"	14 Oktober 2021, online	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Top Executive Learning Program (TELP) series-5 dengan Tema "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	25 Oktober 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University
		Webinar "Transformasi Digital Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah"	1 Desember 2021, melalui zoom webinar	Republika
		Webinar "Prospect & Challenges in Digital Banking in The New Normal Era"	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	AIT Graduates Club
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI dengan Tema "Ambidextrous Leadership and How Can Grow and Nurture Leaders"	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
8	**Tribuana Tunggadewi**	Webinar "Masa Depan Ekonomi Berbasis Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Terbesar Di Indonesia"	10 Februari 2021, melalui zoom webinar	ILUNI FHUI
		Refreshment Sertifikasi Kepatuhan Level 3.	18-19 Februari 2021, melalui zoom webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt. 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Refreshment Workshop LHKPN bagi Perusahaan Anak	26 Februari 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
		Narasumber Webinar HKHPM: Strategi dan Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Merger Bank BUMN Syariah	17 Maret 2021, melalui zoom webinar	HKHPM Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Seminar Nasional "Perempuan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif"	10 April 2021 di D'Colonel Cipanas	Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Pusat
		TELP (Top Executive Learning Program)- Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Narasumber Webinar DPW IAEI DKI Jakarta dengan Tema "Peran Perempuan dalam Dimensi Ekonomi dan Bisnis Islam"	28 April 2021, melalui zoom webinar	DPW IAEI DKI Jakarta
		Certified Human Resources Professional (CHRP)	2 Juni 2021-21 Agustus 2021, melalui zoom webinar	Universitas Atma Jaya
		Webinar OJK Penerapan Governance, Risk & Compliance di Era Digital: Strategi dan Aksi	3 Juni 2021, melalui zoom webinar	Otoritas Jasa Keuangan
		Refreshment Asesor Kompetensi	19 Juni 2021 di Sekretariat LSP Ekbisi Gedung Dhanapala lt.2	LSP Ekbisi
		TELP (Top Executive Learning Program)- Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Workshop PPATK terkait Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021	26 Agustus 2021, melalui zoom webinar	PPATK – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		Webinar AHCA Atma Jaya: Ready Toward 2022 : HC Priority & Key Agenda	18 September 2021, melalui zoom webinar	AHCA Atma Jaya
		TELP (Top Executive Learning Program)-Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question"	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar FKDKP "Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber"	7 Oktober 2021, melalui zoom webinar	FKDKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
		Webinar CEO Talk Bank Mandiri: "Managing Corporate Risk in Uncertain Era"	19 Oktober 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		"Top Executive Learning Program (TELP) - Series V Tema: "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Terorisme"	25 Oktober 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		PwC Webinar: "Global Culture Survey 2021: The link between culture and competitive advantage"	2 Desember 2021, melalui zoom webinar	PwC
		"Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI Tema: Ambidextrous Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum Bank Syariah Indonesia: "Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar Dari Masalah Hukum?"	20 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
9	**Tiwul Widyastuti**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Digital Transformation Journey Sharing Session oleh Bank DBS	28 April 2021 di The Tower Lt. 6	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	8 Juni 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
10	**Ade Cahyo Nugroho**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		BSMR Level 5 Refreshment Program: *Trending Fraud Risk in Digital Era*	10 Maret 2021, melalui zoom webinar	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Banking Competency Center (BCC)
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program)-Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Digital Transformation Journey Sharing Session oleh Bank DBS	28 April 2021 di The Tower Lt. 6	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	8 Juni 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	22 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		"Top Executive Learning Program (TELP) - Series 5 Tema: "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	25 Oktober 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi SEVP

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1	**Wawan Setiawan**	Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt. 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Digital Transformation Journey Sharing Session oleh Bank DBS	28 April 2021 di The Tower Lt. 6	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	8 Juni 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	12 Agustus 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk Pemateri: Otoritas Jasa Keuangan
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Virtual Assessment Center FBAC Bank Mandiri	25 Oktober 2021, melalui online: Microsoft Teams	Bank Mandiri bekerja sama dengan PT Daya Dimensi Indonesia
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series 6 Tema: Ambidextrous Leadership and How Can Grow and Nurture Leaders	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2	**Rosma Handayani**	BSMR Level 5 Refreshment Program: Manajemen Risiko Operasional pada Kasus Kejahatan Siber Perbankan dan E-Commerce	10 Februari 2021, melalui zoom webinar	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Banking Competency Center (BCC)
		Leaders Alignment Session BSI 2021 "Leaders as Meaning Maker"	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi SEVP

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Webinar FHCPI X Bank Mandiri Great start 2021 with 'Drastic Action Leadership' "Agile Leader for The Day After Tomorrow"	5 Maret 2021, melalui online: Microsoft Teams	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) "Memimpin Perubahan melalui Keberanian untuk Bermimpi"	17 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 "Islam Rahmat bagi Semesta Alam"	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar EXPERD "Spiritual Leadership: Membangun Kehidupan lebih bermakna"	8 Juni 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Two Days Leadership Session "Building Alignment Force"	13-14 Juni 2021 di The Tower Lt. 3	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar BUMN Muda Erick Thohir Menyapa "Fast Break Menuju Generasi Muda BUMN"	14 Juni 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		CEO Talk Kegiatan Indonesia Finance Learning Institute (IFLI) dalam Rangka Sinergi BUMN "Prospek Perbankan Syariah After Merger"	17 Juni 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing "Aku Pilih Bahagia"	23 Juni 2021, melalui zoom webinar	BUMN & Perhutani Forestry Institute
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Masterclass Vol. 8: "Tough Learner: EscalatePerformance Through Active Learning"	7 Juli 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Bincang Kondisi Perbankan Terkini bersama Regulator dan Menteri Keuangan	9 Juli 2021, melalui zoom webinar	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Banking Competency Center (BCC)
		Webinar Learning and Development Forum Asia 2021 "Winning Today, Building for Tomorrow: How you can help company's leaders drive the dual transformation"	15 Juli 2021, melalui zoom webinar	IMD
		Webinar CEO Talk BRI "Cracking The Transformation Secret"	15 Juli 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi SEVP

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Webinar CEO Talk BNI “People First: The Key Aspect Toward BUMN Go Global”	23 Juli 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
		Webinar Spesial Kemerdekaan “Bersyukur & Berbagi untuk Indonesia Tangguh”	27 Agustus 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar Coaching Style Leadership “Leading with Question”	29 September 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Two Days Leadership Session (Day 1) “Strengthening Strategic Vision in Supporting Business”	10 Oktober 2021 di Wisma Mandiri Lt. 11	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Two Days Leadership Session (Day 2) “Strengthening Strategic Vision in Supporting Business”	11 Oktober 2021 Wisma Mandiri Lt. 11	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) – Series 5 “Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme”	25 Oktober 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Top Excecutive Leaders Session (TELS) Vol.5 “Visionary Leadership: Kepemimpinan Efektif dalam Menangkap Potensi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”	26 Oktober 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Pelatihan Crisis Management Handling	1 Desember 2021 di The Tower Lt. 3	Asbisindo & IGICO Advisory
		Webinar “Global Culture Survey 2021: The Link Between Culture and Competitive Advantage”	2 Desember 2021, melalui zoom webinar	PwC
		16 Th Indonesia HR EXPO Virtual Conference “Monitoring & Tracking Remote Workforce Effectively (Track 14)”	9 Desember 2021, melalui zoom webinar	HR Expo
		16 Th Indonesia HR EXPO Virtual Conference “OKR: Obstacle and Effectiveness (Track 19)”	9 Desember 2021, melalui zoom webinar	HR Expo
		Top Excecutive Learning Program (TELP) - Series 6 “Ambidextrous Leadership and How Can Grow Nurture Leaders”	16 Desember 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum JAMDATUN “Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar Dari Masalah Hukum?”	20 Desember 2021, melalui zoom webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi SEVP

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
3	**Wahyu Avianto**	BSMR Level 5 Refreshment Program: *Trending Fraud Risk in Digital Era*	10 Maret 2021, melalui zoom webinar	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Banking Competency Center (BCC)
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4	**Babas Bastaman**	Leaders Alignment Session BSI 2021 “Leaders as Meaning Maker”	22 Februari 2021 di Wisma Mandiri Lt 11	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 1 “Islam Rahmat bagi Semesta Alam”	25 Maret 2021, melalui online: Microsoft Team	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		APU PPT Executive Forum: Urgensi Peran Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	31 Maret 2021, melalui zoom webinar	LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Hubungan Agama, Bangsa dan Negara"	14 April 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Digital Transformation Journey Sharing Session oleh Bank DBS	28 April 2021 di The Tower Lt. 6	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Narasumber Webinar OJK "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan"	28 Mei 2021, melalui zoom webinar	Otoritas Jasa Keuangan
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	1 Juli 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	21 Juli 2021, melalui zoom webinar	KPK, Compliance Group BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Coaching Leadership dengan Pak Hasnul Suhaimi	Mei - September 2021, melalui zoom	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021, melalui zoom webinar	BSI Corporate University PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1	**Widuri Mentari Kusumawati**	Cyber Risk Management Fundamentals	2021	CRMS Indonesia
		Risk Beyond: Journey to The Frontier	2021	ERMA International Conference
		Aspek Legal Pengelolaan Perusahaan Grup di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pelaporan Keuangan	2021	IAPI
		Enhacing Internal Audit Capability: A Strategy to Safeguard Goals of State and Regionally-Owned Corporations	2021	BPKP
		Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	2021	IAPI-IKAI-IIA
		ISO 37001 Beyond Certification_ Implementing Effective Anti Bribery Controls in Organization	2020	EY
		Risk Beyond: Reimagine The Future	2020	ERMA International Conference
		Pengelolaan Risiko Sistem Informasi dan Tantangannya untuk Lembaga Publik	2020	CRMS & LPS
		Sertifikasi Halal Supervisor	2019	LSP LP POM MUI
		Certification in Audit Committee Practices	2019	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		Certified on Enterprise Risk & Governance (CERG-3120163)	2016 - 2021	
2	**Djoko Seno Adji**	Menjadikan Industri Jasa Keuangan Adaptif dan Antisipatif	2021	LPPI
		Mengelola Risiko Siber dalam Industri Digital	2021	LPP
		Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan	2021	OJK
		Masa Depan Bank Digital di Indonesia	2021	OJK
		Transformasi Perbankan di Era Digital	2021	OJK
		Strategi dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah	2021	OJK
		Penguatan Pengendalian Internal untuk Menciptakan Nilai	2021	LPPI
		Sertifikasi Kompetensi Auditor Level Kualifikasi Senior Auditor	2012	
		Qualified Internal Auditor	1999	

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
3	**M. Zacky Thayib**	Sosialisasi Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	2021	LPPI
		Fraudulent Financial Statement	2020	The ACFE Indonesia Chapter
		Digital Governance for Digital Transformation	2020	Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
		Sertifikasi Kompetensi Auditor Level Manager	2015	LSPP
		Sertifikasi Kepatuhan & AML Level II	2015	LSPP Divisi Kepatuhan
		Certified Fraud Examiner (CFE)	2013	Association of Certified Fraud Examiner (ACFA)
		Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko (SMR) Level III	2012	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) & Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		Training PSAK 50 & 55	2010	Price Water House (PWC)
			Hotel Ambara	
		Risk Based Audit	2009	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Quality Internal Audit (QIA)	1999	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1	**Kayim Hanuri**	Cyber Risk Management Fundamentals	2021, Jakarta	Center For Risk Management Sustainability
		Enterprise Risk Management Masterclass	2011, Kuala Lumpur	Pinnacle Training Group
		Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah	2018, Jakarta	
		Risk Management for Bank Competencies Certificate Level III	2010, Jakarta	LSPP
		Credit Risk Masterclass	2009, Singapore	Euromoney Training
		Managing Oppurtunity and Risk in Crisis	2009, Jakarta	Banker Association for Risk Management (BARa)
		Early Warning Signals: Liquidity and Refinancing Challenges	2008, Hongkong	Fitch Training
		Political Shanghai Risk And Insurance	2007	Euromoney Training
		Indonesian School for Banking Leaders Educational Program (SESPIBANK) Batch XL-with comparison study to London and Abu Dhabi Banking Industry	2005, Jakarta	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Syndicated Loans, International Faculty of Finance	2004, London	
		INSEAD Leadership Senior Training	2004, Jakarta	INSEAD France
		Transformation Leadership from Within (Personal, Interpersonal, Organizational and Managerial Leadership Module)	2004, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Marketing Analysis, Strategic Marketing and Product Development	2002, Jakarta	Citibank
		Managing Productivity	2001, Jakarta	Citibank
		Bank Mandiri Advanced Leadership Course	2001, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Selling Commercial and Corporate Bank Services	2000, Jakarta	Citibank
		Branch Manager Course	1998, Jakarta	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Oil and Gas Project Finance	1997, Singapore	Euromoney Institute of Finance
2	**Saifuddin Latief**	Cyber Risk Management Fundamentals, Center For Risk Management Sustainability	2021, Jakarta	
		A to Z Sharia Banking	2021, Jakarta	Karim Consulting
		Manager as a Coach	2013, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Great Leader Program Phase III	2011, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Training 4 DX (4 Dicipline for Excecution)	2010, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Transactional Banking Course	2010, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Coaching For Excellence	2010, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Enterprise Risk Management Course	2010, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Advance Trade Finance	2009, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Financial Modelling for Mergers & Acquisitions	2008, Honkong	Euromoney Training
		Advance Corporate Credit Course	2008, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		SESPIBANK	2007, Jakarta	Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3	2006-2008, Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Senior Leadership Training	2004, Jakarta	INSEAD
		Marketing Analysis, Stretegic Marketing & Product Development	2001, Jakarta	Citibank
		Selling Commercial & Corporate Bank Services	2000, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
		Credit Principles Implementation	1998, Jakarta	Deutsche Bank
		Corporate Finance	1994, Jakarta	Citibank
3	**Bowo Setiyono**	RCC Risk Management (CRP) Refreshment	2021	TAP Kapital Indonesia
		Bank Risk Management (RM 1 & 2) Certifications	2021	LSPP
		General Banking (GB) Certifications	2021	LSPP
		Cyber Risk Management Fundamentals	2021	CRMS Indonesia
		Capital Buffer, Risk, and Competition: Does Business Group Matters? Evidences on Islamic Banks in ASEAN and MENA	2019, Singapore	Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA)
		Certified Risk Professional (CRP)	2018	
		International Islamic Risk Management Refreshment Program for Executive	2017	
		International Risk Management Refreshment Program for Executive, Master of Management Faculty of Economics and Business	2015	
		Training/Course on Bank Risk, Compensation, and Basel III Capital Regulation at Université de Limoges by Prof. Robert (Bob) De Young	2014	University of Kansas/Capitol Federal Professor in Financial Markets and Institutions
		Training for Trainers Risk Management Certification. Certified Trainer for Financial Risk Management	2005, Jakarta	Indonesian Risk Management Certification Agency (BSMR) & Global Association of Risk Professionals (GARP)
		Risk Management Certification	2005	Indonesian Risk Management Certification Agency (BSMR) & GARP

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Sertifikasi Manejemen Risiko Perbankan Level 4	2021	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS)
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan Topik Bahasan "Optimalisasi Pengelolaan Risiko Hukum Dampak Restrukturisasi Kredit"	2016, Jakarta	BSMR
		Sertifikasi Manejemen Risiko Perbankan Level 4	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	2015, Jakarta	Muamalat Institute & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	2013, Jakarta	PT Talents Indonesia
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko "Risk Based Bank Rating – RBBR"	2011, Jakarta	PT Talents Indonesia
		Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level IV	2010	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level II	2008	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level I	2006	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Banking Crime Mitigation Training	2011	Muamalat Institute
		Two Days Capital Market Master Class "Equity Analysis & Corporate Action for Corporate Secretary & Investor Relations"	2010, Lombok	Indonesia Investor Relations Institute (I2RI)
		2 Days Training Fraud Risk Management	2010, Jakarta	Synergy Partner Consulting
		GCG Workshop Series "Strategi Korporasi dalam Pelaksanaan Whistleblowing System from Strategic to Operation"	2010, Jakarta	MUC Consulting – Russel Bedford
		Pelatihan Manajemen Risiko Level IV	2009, Jakarta	ORBIT
		Training "The Celestial Management"	2009, Jakarta	Bank Muamalat Indonesia
		Pelatihan Transaksi Luar Negeri Syariah Akt II/2006	2006, Jakarta	
		Training "Communicating Sharia Products"	2005, Jakarta	MarkPlus Institute of Marketing
		Pelatihan Sertifikasi Financial Advisor	2005	Unit Bancassurance BNI & International Association of Registered Financial Consultants

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
		Indonesia Wealth Management and Financial Planning Masterclass	2005, Bandung	Private Bankers Club
		In House Training Bank Syariah	2002, Jakarta	Karim Business Consulting (KBC)
		Pelatihan Perbankan Syariah Lanjutan (Advance)	2002, Jakarta	Karim Business Consulting (KBC) & BNI
		Pelatihan Perbankan Syariah	2001, Jakarta	Institut Tazkia & BNI
		Pelatihan Operational Leadership Development Program (Seven Habits)	1999, Jakarta	Dunamis Organization Services
		Pelatihan Management Development Training Program I Bank BNI (Brevet B)	1999, Jakarta	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1.	Gunawan Arief Hartoyo	Webinar Penguatan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	25 Maret 2021, Via Zoom	LPPI
		BSI One "Financing Risk" Culture	14 April 2021, Via Zoom	BSI Corporate University
		Top Executive Learning Program Series 3	01 Juli 2021, Via Zoom	BSI Corporate University
		Esprit de Corps	14 Agustus 2021, Via Zoom	BSI Corporate University

Pengembangan Kompetensi Audit Internal

NO.	NAMA PESERTA	JENIS PELATIHAN	WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARA
1.	Movianto	Webinar Digital Banking Sharing	18 Maret 2021, Via Zoom	BSI Corporate University
		Cascading Culture Roadmap - Socialization BSI One Culture	19 Maret 2021, Via Zoom	ACT Consulting
		Webinar Penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	25 Maret 2021, Via Zoom	LPPI
		KSF Audit Investigasi	30 Maret 2021, Via Zoom	BSI Corporate University
		Top Executive Learning Program Series 2: Hubungan Agama, Bangsa & Negara	14 April 2021, Via Zoom	BSI Corporate University
		International Webinar: Global Sukuk "Prospects & Challenges"	27 Mei 2021, Via Zoom	BSI Corporate University

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,905,219,379	50.83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,220,230,418	24.85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	17.25
Pemegang Saham Lainnya	2,911,095,891	7.08
Total	**41,129,307,343**	**100.00**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
Institusi Lokal	39.381.974.950	95,75%
Institusi Asing	155.558.200	0,38%
Individu Lokal	1.590.164.793	3,87%
Individu Asing	1.609.400	0,00%
Total	**41.129.307.343**	**100,00%**

20 Pemegang Saham Terbesar

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	50,83%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	24,85%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	17,25%
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah	379.142.500	0,92%
Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	316.200.343	0,77%
Dana Pensiun BRI	69.071.500	0,17%
UL Equity Solid	61.199.400	0,15%
JPMCB Na Re - Vanguard Emerging Markets	40.014.287	0,10%
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	38.268.900	0,09%
JPMCB Na Re-Vanguard Total International	36.876.117	0,09%
PT Prudential Life Assurance - Go Kiong Hwoo	32.588.300	0,08%
Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	26.760.400	0,07%
PT Prudential Life Assurance - SEF	25.217.100	0,06%
Kokok Alun Akbar	19.294.400	0,05%
Fahmi Subandi	17.682.500	0,04%
PT Prudential Life Assurance - REF	17.149.800	0,04%
Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara	16.117.900	0,04%
Ngatari	15.000.000	0,04%
Reksa Dana Ashmore Saham Sejahtera Nusantara	14.099.700	0,03%
JPMCB Na Re-Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International S	12.355.900	0,03%
Total	**39.355.250.499**	**95,69**

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris (Secara Langsung)

NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	0	0
Muhammad Zainul Majdi	Wakil Komisaris Utama	0	0
Suyanto	Komisaris	0	0
Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
Imam Budi Sardjito	Komisaris	0	0
Sutanto	Komisaris	1.500.000	0,003%
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	0	0
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0

Kepemilikan Saham Direksi (Secara Langsung)

NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	15.000.000	0,036%
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	0	0
Kusman Yandi	Direktur	0	0
Kokok Alun Akbar	Direktur	19.294.400	0,046%
Anton Sukarna	Direktur	0	0
Achmad Syafii	Direktur	0	0
Tiwul Widyastuti	Direktur	0	0
Tribuana Tunggadewi	Direktur	0	0
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	0	0

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
Hassanudin	Ketua	0	0
Mohamad Hidayat	Anggota	0	0
Oni Sahroni	Anggota	0	0
Didin Hafidhuddin	Anggota	0	0

Kepemilikan Saham Berdasarkan Klasifikasi

KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
NASIONAL			
Perseroan terbatas	111	28.033.696.684	68,16%
Dana Pensiun	28	468.744.100	1,14%
Yayasan	16	321.406.443	0.78%
Reksadana	91	153.313.601	0,37%
Asuransi	30	177.515.315	0,37%
Koperasi	9	2.063.300	0,01%
Perorangan Indonesia	172.496	1.590.164.793	3,87%
Bank	4	10.225.235.507	24,86%
Sub Total	**172.785**	**40.972.139.743**	**99.62%**
ASING			
Badan Usaha Asing	70	155.558.200	0,38%
Perorangan Asing	69	1.609.400	0,00%
Sub Total	**139**	**157.167.600**	**0.38%**
TOTAL	**172.924**	**41.129.307.343**	**100.00%**

Pemegang Saham Utama dan Pengendali



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
50,83%



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
24,85%



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
17,25%



Struktur Korporasi

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki perusahaan anak sehingga informasi mengenai struktur korporasi tidak dapat disajikan.

Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki entitas anak dan perusahaan asosiasi sehingga rincian mengenai hal tersebut tidak dapat disajikan.

Kronologi Pencatatan Saham

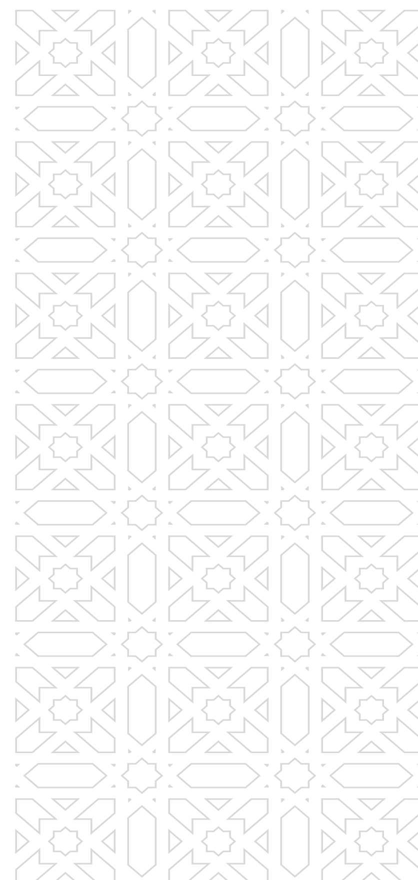
TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL SAHAM (Rp)	JUMLAH SAHAM	JUMLAH SAHAM BEREDAR	BURSA
1 Januari 2018	Modal ditempatkan dan disetor penuh	500	0	3.958.000.000	-
2 Maret 2018	Berdasarkan RUPS tanggal 2 Maret 2018, telah dilakukan penambahan modal berupa: • Setoran tambahan modal sebesar Rp1 triliun. • Kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp567.381.449. Tambahan modal menyebabkan adanya penambahan saham induk sebesar Rp1.567.381.449	500	3.134.762.898	7.092.762.898	-
9 Mei 2018	BRIsyariah melakukan penawaran umum perdana Saham dengan melepas sebanyak 2.623.350.600 saham baru atau sebesar 27.00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah penawaran umum perdana saham, termasuk saham yang dialokasikan untuk pelaksanaan program *Employee Stock Allocation* (ESA) sebesar 2.50% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham tersebut dengan nilai nominal Rp.500 per saham dan nilai penawaran Rp510 per saham.	500	2.623.350.600	9.716.113.498	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
8 Desember 2020	Penambahan Saham BRIsyariah melalui program kepemilikan saham MESOP tahun 2020 periode pelaksanaan sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 (30 hari bursa) sebesar 184.395.200 saham.	534	184.395.200	9.900.508.698	Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

TAHUN PENERBITAN	NAMA OBLIGASI	NILAI EMISI	TINGKAT BUNGA (PER TAHUN)	TANGGAL JATUH TEMPO	NAMA BURSA	PERINGKAT OBLIGASI	
						2021	2020
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonsia Tbk (d.h PT Bank BRIsyariah	Rp1 Triliun	16 November 2023	9,5%	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia)	A (PT Fitch Ratings Indonesia)	A
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h PT Bank Syariah Mandiri)	Rp375 Miliar	22 Desember 2023	10%	AA (PEFINDO)	AA- (PEFINDO)	

Kantor Akuntan Publik





Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan

Jl. Jend. Sudirman No.5, RW.4, Kuningan,
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Telp. : (021)50992901
Faks. : (021) 52905555
Website: www.pwc.com

Jasa yang Diberikan: Audit Laporan Keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal



INSTITUSI PASAR MODAL

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Indonesia
Telp. : (021) 5150515
Faks. : (021) 5254153
Website: www.idx.co.id

Jasa yang Diberikan: Jasa Pencatatan Tahunan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa efek Indonesia Tower 1 lt.5
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia
No. Telp.: (021)5152855
Faks: (021)52991199
Website: www.ksei.co.id

Jasa yang Diberikan: Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk)



BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120
Telp. : (021)3508077
Faks. : (021)3508078
Website: www.datindo.com

Jasa yang Diberikan: Jasa Administrasi Saham



LEMBAGA PEMERINGKAT PERUSAHAAN

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower 20th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910
Telp. : (021) 57957755
Faks. : (021) 57957750
Website: www.fitchratings.co.id

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower - Senayan City, 17th Floor,
Jl. Asia Afrikas Lot. 19 Jakarta 10270
Indonesia
Telp. : (021) 72782380
Faks. : (021) 72782370
Website: www.pefindo.com

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan



WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Gedung Grha BNI,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Telp. : (021) 2511946
Faks. : (021) 2511214



KONSULTAN HUKUM

Dewan Syam & Partners Law Firm

Gedung Permata Kuningan Lantai 6,
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. : (021) 39838679

Jasa yang Diberikan:
Pada tahun 2021, Bank tidak memiliki perjanjian atau kontrak bersifat tetap yang mengacu pada periode penugasan tertentu/ berkala (retainer) dalam rangka penggunaan/pemakaian jasa Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar modal.

SSF Law Firm & Partners

Gedung Arva Lantai 3,
Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 3905930

Suhendra & Partners

Up. Yandi Suhendra
Taman Dutamas,
Jl. Kusuma 1 Blok B1/18 Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460
Telp. : 081901133888

James Purba & Partners

Up. James Purba
Wisma Nugraha Santosa, 8 Floor, Suit 807,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav, 7-8 Jakarta 10220
Telp. : (021) 570 3844

Website Perusahaan

Informasi yang termuat dalam *website* Bank Syariah Indonesia untuk para pemangku kepentingan telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, di antaranya ialah mengenai:

1. Informasi Umum Mengenai Emiten atau Perusahaan Publik
2. Informasi bagi pemodal atau investor
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penyediaan informasi tersebut juga sebagai implementasi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.bankbsi.co.id.



INFORMASI	LINK
INFORMASI UMUM	**www.bankbsi.co.id**
Nama, alamat dan kontak kantor pusat/ perwakilan	www.bankbsi.co.id
Riwayat singkat perusahaan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur organisasi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur kepemilikan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/struktur-kepemilikan
Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, dan ventura bersama	PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak memiliki perusahaan anak
Struktur Grup	PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak memiliki perusahaan anak
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/direksi-dewan?corporateType=Dewan%20Direksi
Nama dan alamat: Akuntan publik, pemeringkat efek, wali amanat, biro administrasi efek, dokumen Anggaran Dasar	https://www.bankbsi.co.id/company-information/profil-penunjang
INFORMASI BAGI INVESTOR	**https://ir.bankbsi.co.id/**
Prospektus penawaran umum	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Prospektus/Prospektus-Hijrah.pdf
Laporan Tahunan (5 tahun)	https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html
Laporan Keuangan	https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	https://ir.bankbsi.co.id/general_meeting.html

INFORMASI	LINK
Ikhtisar Saham	https://ir.bankbsi.co.id/stock_chart_interactive.html
Informasi Obligasi	https://ir.bankbsi.co.id/bond_info.html
Informasi Dividen	https://ir.bankbsi.co.id/dividend.html
Informasi Aksi Korporasi	https://ir.bankbsi.co.id/corporate_action.html
Informasi Fakta Material	https://ir.bankbsi.co.id/regulatory_filings.html
INFORMASI TATA KELOLA PERUSAHAAN	**https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola**
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Piagam-Audit-Intern.pdf
Pengangkatan/Pemberhentian atau kekosongan Sekretaris Perusahaan serta informasi pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/sekretaris_perusahaan
Piagam Unit Audit Internal	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Piagam-Audit-Intern.pdf
Isi Kode Etik	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kode_etik
Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit
Uraian Prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/nominasi&remunerasi
Kebijakan Manajemen Risiko	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_management_resiko
Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (jika ada)	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/whistle_blowing_system
Kebijakan Anti Korupsi (jika ada)	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_anti_fraud
INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	**https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr**
Lingkungan Hidup	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Tanggung Jawab Produk dan/atau Layanan serta Informasi Pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Kinerja BSI terus tumbuh seperti ditunjukkan oleh kinerja segmen usaha Bank di masa pandemi COVID-19. Bank juga mampu memberikan manfaat besar bagi para pemangku kepentingan.

Rp3,03 triliun

Laba bersih tahun 2021 meningkat 38,42%



Tinjauan Ekonomi dan Industri



Kondisi perekonomian pada tahun 2021 masih bergerak dinamis, mengingat adanya varian baru COVID-19 pada pertengahan tahun.



3,69%
Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021



1,87%
Inflasi tahun 2021, lebih rendah dari tahun sebelumnya



13,94%
Pertumbuhan aset perbankan syariah secara tahunan per Oktober 2021

EKONOMI GLOBAL

Kinerja pemulihan ekonomi global di tahun 2021 berlangsung dengan baik di tengah tekanan Covid-19 varian Delta, disrupsi rantai pasok global, serta meningkatnya inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Akselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 yang mulai dilakukan oleh sebagian negara maju dan negara berkembang memberikan dampak positif bagi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi.

Pemulihan pandemi di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, yang tercermin pada menurunnya angka pengangguran di mayoritas negara anggota G20, PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansi, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dunia. Beberapa perkembangan ini mendorong *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan perekonomian global dapat tumbuh di level 6,1% pada tahun 2021.

Pemulihan tersebut diperkirakan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada negara maju, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi di negara berkembang. IMF juga memperkirakan bahwa negara berkembang akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,8%, lebih tinggi dari negara maju yang sebesar 5,2%.

Volume perdagangan dan harga komoditas dunia tetap tumbuh di tengah kekhawatiran disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tensi geopolitik di beberapa kawasan seperti Timur Tengah dan Eropa, maupun terganggunya pasokan seiring rencana beberapa negara yang mulai beralih ke energi terbarukan dalam menanggulangi isu perubahan iklim.

Pertumbuhan ekspor negara berkembang tetap positif didorong kenaikan harga komoditas dan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, dampak disrupsi rantai pasok juga menyebabkan tingginya inflasi di negara-negara maju yang mendorong tekanan normalisasi kebijakan moneter. Beberapa bank sentral negara maju seperti *The Fed* di AS, *European Central Bank* di Uni-Eropa, *Bank of England* di Inggris, serta *Bank of Korea* di Korea Selatan telah memulai program normalisasi moneternya di akhir kuartal III-2021.

Pengurangan stimulus seperti *tapering* hingga kenaikan suku bunga acuan mulai dilakukan, sehingga memberikan risiko terhadap pasar keuangan negara berkembang, termasuk keluarnya aliran modal asing hingga tekanan terhadap nilai tukar. Namun demikian, indikator perekonomian global menunjukkan sinyal pertumbuhan positif di tahun 2021 seiring sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif.

Sumber: IMF, Our World in Data, Bloomberg (2021)

EKONOMI NASIONAL

Perkembangan pemulihan ekonomi global yang positif mendorong kenaikan permintaan komoditas dan perdagangan antarnegara. Kondisi tersebut ikut mendukung pemulihan ekonomi domestik di tengah upaya penanganan pandemi gelombang kedua pasca masuknya Covid-19 varian Delta ke Indonesia.

Puncak penambahan kasus tertinggi menyentuh angka 56.757/hari pada pertengahan Juli 2021 atau 4 (empat) kali lipat dibandingkan puncak kasus tertinggi sebelumnya pada awal tahun 2021. Hal ini mendorong pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga berjenjang (level) dalam mencegah penambahan kasus yang lebih masif ke depan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran vaksinasi Covid-19 guna melindungi masyarakat dari dampak penularan virus serta menahan penyebaran virus. Rasio penyaluran vaksinasi dengan dosis penuh tercatat telah menyentuh angka lebih dari 40% di akhir tahun 2021 atau naik 5 (lima) kali lipat dibandingkan periode sebelum masuknya varian Delta di bulan Mei 2021.

Dampak gencarnya vaksinasi Covid-19 serta penerapan aturan protokol kesehatan yang ketat, membuat momentum pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tahun 2021. Berbagai indikator ekonomi sektor riil menunjukkan tren yang positif.

Indeks Mobilitas Masyarakat menunjukkan tren pemulihan pada akhir 2021, tercermin dari laporan *Google Mobility Index* yang menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat tumbuh 191% pada akhir 2021 dibandingkan periode saat diterapkannya PPKM pada awal Juli 2021. Selain itu, indikator konsumsi juga menunjukkan tren positif, tercermin dari indeks penjualan ritel Desember 2021 yang diperkirakan berada di level 216,28 atau mendekati level pra-pandemi yang sebesar 216,36 pada Februari 2020.

Pemulihan ekonomi yang berjalan baik juga mendorong ekspektasi positif konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan. Indeks Keyakinan Konsumen Desember 2021 berada di level 118,34 atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi yang mencapai 117,65. Indeks manufaktur juga tumbuh dengan baik, tercermin dari indeks PMI manufaktur yang berada di level *all time high*, yaitu sebesar 57,2 pada Oktober 2021 setelah sempat terpukul dari Juli (40,1) hingga Agustus (43,7) akibat gelombang kedua Covid-19.

Sektor eksternal masih tumbuh sangat kuat, yang tercermin dari tingginya angka pertumbuhan ekspor dan impor. Laju pertumbuhan ekonomi kuartal-IV 2021 diperkirakan dapat berada di atas level 5,02% (yoy), sehingga secara keseluruhan kinerja ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,69%.

Akselerasi pemulihan ekonomi domestik tidak hanya didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19, melainkan juga dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Inflasi domestik terjaga dalam level yang terkendali, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh All Time High pada tahun 2021. Di sisi lain, sektor perbankan juga menujukkan kinerja yang solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit.

Inflasi tumbuh 1,87% (yoy) pada tahun 2021 relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2020, yang menunjukkan sinyal perbaikan tingkat permintaan dan konsumsi domestik. Inflasi tahun 2021 masih stabil seiring dengan sinergi pelaksanaan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat-daerah, dengan otoritas moneter. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pangan masyarakat, menjaga keterjangkauan harga, serta meningkatkan kelancaran arus distribusi.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memberikan insentif fiskal sebagai stimulus bagi masyarakat, di antaranya insentif PPnBM untuk mobil, subsidi PPh bagi UMKM, serta PPh bagi karyawan. Demikian juga Bank Indonesia yang memberikan stimulus berupa relaksasi *Loan to Value* (LTV) maupun *Financing to Value* (FTV) untuk pembiayaan kepemilikan rumah guna mendorong bisnis properti.

Selain itu, sejak bulan Maret 2021, Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan *(BI 7 Days Reverse Repo Rate)* tetap rendah di level 3,5% untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dalam koridor pemulihan.

Sumber: IMF, Bloomberg, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia (2021)

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL DAN SYARIAH

Kinerja industri perbankan sepanjang tahun 2021 tetap kokoh (*resilient*), yang ditunjukkan oleh fungsi intermediasi yang tetap baik dan risiko kredit yang terkendali di masa pandemi Covid-19. Total aset perbankan menyentuh Rp10.298 triliun pada Oktober 2021, atau tumbuh 10,16% (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 12,19% (yoy) menjadi Rp7.608 sejalan dengan preferensi masyarakat yang menyimpan asetnya pada produk perbankan akibat ketidakpastian kondisi pandemi di Indonesia.

Penyaluran kredit tetap tumbuh, tercermin dari kenaikan penyaluran kredit nasional sebesar 5,25% YoY sehingga total kredit berada di level Rp5.897 triliun pada akhir tahun 2021. Peningkatan kembali penyaluran kredit tersebut didukung pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas yang disertai pemberian insentif oleh pemerintah dan regulator lain seperti Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selama tahun 2021, pemerintah telah menyalurkan dana program PEN sebesar Rp658,6 triliun, yang sebagian di antaranya disalurkan melalui perbankan melalui skema subsidi margin serta penjaminan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tingkat kesehatan perbankan juga tetap terjaga sejalan dengan efisiensi dalam mendukung keberlanjutan bisnis di masa pandemi. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada di level 25,67% pada Desember 2021, atau di atas ketentuan minimum BASEL III yaitu 10%. Di sisi lain, rasio likuiditas (AL/DPK) tetap stabil, yakni sebesar 35,12%.

Sementara itu, rasio efisiensi perbankan tetap baik, tercermin dari rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) sebesar 83,42%, atau lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yang mencapai 86,44%. Rasio kualitas pembiayaan tetap terjaga didukung oleh insentif restrukturisasi pembiayaan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa pandemi Covid-19. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) tercatat sebesar 3,09% (*gross*).

Kinerja industri perbankan yang positif pada 2021, tidak lepas dari dukungan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Merger Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada Februari 2021 menjadi salah satu pendorong kinerja industri perbankan syariah. Konsolidasi ketiga bank syariah anak usaha BUMN tersebut menghasilkan bank syariah yang masuk ke jajaran 10 besar bank nasional. Merger tersebut juga mengubah lanskap industri perbankan syariah, di mana BSI menguasai 38% *marketshare* perbankan syariah nasional dengan aset sebesar Rp265,29 triliun pada akhir tahun 2021.

Total aset perbankan syariah naik Rp85 triliun dan menyentuh level Rp694 triliun pada Desember 2021, atau tumbuh 13,94% (yoy). Penghimpunan dana juga mencatat kinerja positif, dimana DPK perbankan syariah naik Rp76 triliun ke level Rp549 triliun pada Oktober 2021, atau tumbuh 15,30% yoy sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi. Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional tercatat menyentuh level 7,21%.

Sementara dari sisi pembiayaan, penyaluran pembiayaan naik Rp36 triliun dan menyentuh level Rp422 triliun pada Desember 2021, atau tumbuh 6,9% yoy. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional tercatat sebesar 7,15%.

Tingkat kesehatan perbankan syariah juga terjaga dengan baik di masa pandemi Covid-19. Rasio CAR tercatat sebesar 25,71% pada Desember 2021 atau lebih tinggi dibandingkan CAR industri perbankan nasional.

Namun demikian, rasio efisiensi perbankan syariah lebih baik dibandingkan nasional. Rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat sebesar 80,33% pada Oktober 2021, atau lebih rendah dibandingkan rasio BOPO industri perbankan nasional. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja yang positif. Tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross* membaik dari 3,2% di akhir 2020 menjadi 2,7% pada Desember 2021 atau lebih rendah dibandingkan industri perbankan nasional.

Dukungan pemerintah melalui imbauan Kementerian BUMN serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* juga berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah di tahun 2021.

Sumber: OJK Oktober (2021)

TINJAUAN POSISI BANK SYARIAH INDONESIA DI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Sebagai perbandingan kinerja Bank Syariah Indonesia terhadap industri perbankan syariah dan perbankan nasional, berikut ini merupakan rincian kinerja Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Perbankan Nasional, Perbankan Syariah dan Bank Syariah Indonesia per Oktober 2021

(dalam %)

INDIKATOR	BANK SYARIAH INDONESIA	PERBANKAN SYARIAH	PERBANKAN NASIONAL
Aset	10,73	13,94	10,16
Pembiayaan	9,32	6,90	5,25
Dana Pihak Ketiga	11,12	15,30	12,19
Ekuitas	38,42	16,20	32,74
Laba Bersih	15,04	11,46	15,75

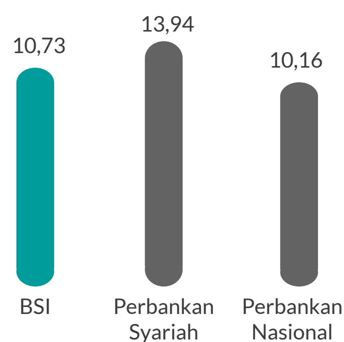
Sumber: Internal BSI, SPI, dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Desember 2021

Pertumbuhan aset Bank Syariah Indonesia mencapai 7,97%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah dan perbankan nasional yang masing-masing sebesar 11,05% dan 8,27%. Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah Indonesia mencapai 7,00%, atau di atas pertumbuhan perbankan nasional yang sebesar 3,27%, namun di bawah pertumbuhan perbankan syariah yang sebesar 7,86%.

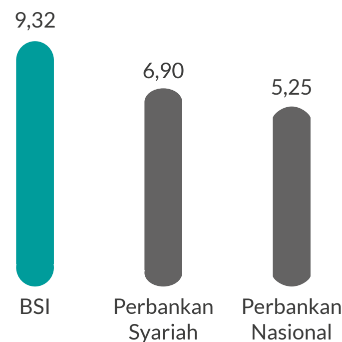
Demikian halnya dengan pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia yang mencapai 7,50%, atau di bawah pertumbuhan perbankan syariah dan perbankan nasional yang masing-masing sebesar 8,52% dan 9,47%. Sementara itu, pertumbuhan laba bersih Bank Syariah Indonesia melonjak yang hingga 53,77%, jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah sebesar 24,50% dan perbankan nasional sebesar 26,36%.

Grafik Pertumbuhan Kinerja Perbankan Nasional, Perbankan Syariah dan Bank Syariah Indonesia
(dalam %)

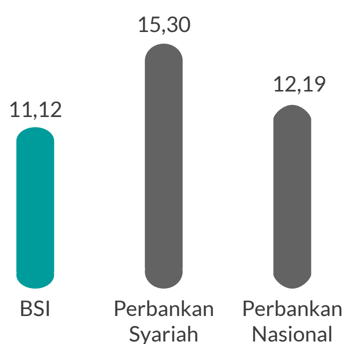
Aset



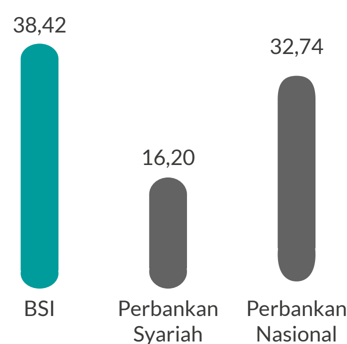
Pembiayaan



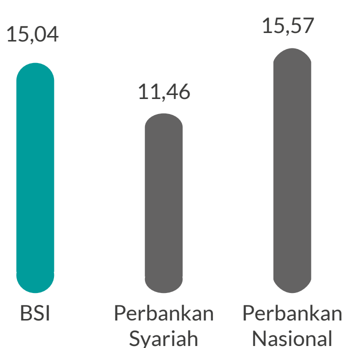
Dana Pihak Ketiga



Laba Bersih



Ekuitas





Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha

"

Kinerja segmen usaha Bank pada tahun 2021 secara umum tumbuh sangat sangat baik. Segmen usaha mikro menjadi lini bisnis BSI dengan kenaikan laba tahun berjalan paling tinggi, yakni 217,92% yoy.

Segmen operasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") dibagi menjadi 5 (lima): segmen *wholesale, small and medium enterprise* (SME) atau usaha kecil dan menengah (UKM), konsumer, mikro dan lainnya. Penjelasan kinerja masing-masing segmen usaha tersebut dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Wholesale Banking

Segmen usaha *wholesale* melayani badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya, lembaga negara, *multinational company*, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura *non linkage*). Selain itu, termasuk dalam segmen ini adalah pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, pemerintah daerah, rumah sakit, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta surat berharga.

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, produk dan layanan yang disajikan oleh segmen usaha *wholesale* diurai dalam tabel berikut.

PRODUK	LAYANAN
Pembiayaan Investasi	Pembiayaan untuk tujuan investasi tempat usaha, modal usaha atau sarana produksi lainnya sesuai dengan prinsip Syariah
Pembiayaan Modal Kerja	Pembiayaan untuk keperluan modal kerja usaha dengan skema sesuai prinsip Syariah .
Pembiayaan *Supply Chain*	Pembiayaan yang diberikan kepada Mitra Usaha (*supplier*/*buyer*/kontraktor) dari nasabah-nasabah utama BSI
Pembiayaan *Trade*	Pembiayaan yang diberikan untuk keperluan Ekspor / Impor baik melalui penerbitan LC dan jaminan (Garansi Bank / SBLC)
Kustodi	Layanan penitipan efek, transaksi dan pengadministrasian berbagai efek syariah di pasar modal
Wali Amanat	Wali Amanat adalah Layanan untuk mewakili kepentingan pemegang sukuk dalam suatu penerbitan sukuk di pasar modal syariah

Strategi Tahun 2021

1. Melakukan sinergi bisnis dengan Induk melalui pemanfaatan *customer base*, *join-marketing* dan sindikasi atau *club-deal*.
2. Pengembangan dan peningkatan *value chain* dengan BUMN.
3. Berperan sebagai pintu masuk produk BSI kepada perusahaan BUMN dan swasta besar dengan sektor terpilih.
4. Meningkatkan kolaborasi dengan segenap unit bisnis untuk memasarkan produk BSI
5. Meningkatkan peran sindikasi baik sebagai *arranger, agent* ataupun *participant*.

Kinerja

Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib bersih segmen usaha *wholesale* pada tahun 2021 sebesar Rp2,9 triliun, meningkat 24.27% dibandingkan pencapaian tahun 2020 yang Rp2,3 triliun.

Sedangkan pendapatan usaha lainnya di segmen *wholesale* lebih rendah 4,57% menjadi Rp520,1 miliar pada 2021, dari Rp545,0 miliar pada tahun sebelumnya.

Penyaluran pembiayaan meningkat sebesar 2,70% dari posisi tahun 2020 yang Rp48,0 triliun menjadi Rp49,4 triliun pada tahun 2021.

Tabel Kinerja Segmen Usaha Wholesale (Rp juta)

URAIAN	WHOLESALE	
	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana Bersih	2.909.025	2.340.799
Pendapatan usaha lainnya	520.101	545.033
Beban usaha	(1.516.453)	(1.561.514)
Beban CKPN	(1.556.506)	(1.077.840)
Pendapatan / (Beban) non Opr	(7.880)	(9.219)
Piutang dan Pembiayaan Bersih	45.183.228	44.849.283

*: Disajikan kembali

Profitabilitas

Meskipun sejumlah indikator kinerja tercatat mengalami penurunan, namun laba tahun berjalan segmen usaha Wholesale pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 54,04% menjadi Rp259,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp168,6 miliar.

Kinerja Profitabilitas Segmen Usaha Wholesale (Rp juta)

URAIAN	2021	2020*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	348.287	237.258
Zakat	(8.718)	(5.717)
Beban pajak	(79.935)	(62.990)
Laba tahun berjalan	259.634	168.552

*: Disajikan kembali

Rencana Strategis Tahun 2022

1. Pengembangan *Customer Base*, melalui perluasan sektor industri prioritas dan fokus kepada potensi bisnis perusahaan swasta nasional dan regional.
2. Pengembangan layanan transaksional yang inovatif dan *end-to-end* berbasis digital
3. Pengembangan *comprehensive financial* solution dalam ekosistem bisnis nasabah untuk menciptakan *closed loop transaction*
4. Pengembangan organisasi/jaringan untuk dapat menjangkau nasabah yang lebih luas
5. Mempercepat Proses Bisnis guna memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah
6. Pembukaan Representative Office BSI di DIFC Dubai sebagai salah satu pusat Halal Ekosistem Dunia dan Hub keuangan Syariah global

Segmen SME

Segmen SME Bank Syariah Indonesia melayani kegiatan usaha pembiayaan produktif kepada kepada badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan non badan hukum, pendidikan dasar & menengah dan klinik. Termasuk menyalurkan pembiayaan melalui koperasi, pola *linkage*, dan/atau inti plasma.

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha ini diuraikan dalam tabel berikut.

PRODUK	URAIAN
Investasi	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BSI untuk pemenuhan kebutuhan investasi calon nasabah, baik investasi tempat usaha, kendaraan usaha atau alat-alat kebutuhan usaha. Termasuk investasi untuk pembangunan tempat usaha dan pembanguna kebun.
Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BSI untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah, baik modal kerja rekening koran, modal kerja usaha atau modal kerja berdasarkan kontrak. Termasuk modal kerja kepada lembaga keuangan seperti koperasi dan BMT.

Strategi Tahun 2021

Dalam rangka menghadapi tantangan bisnis perbankan tahun 2021, Bank Syariah Indonesia menerapkan strategi dengan menyalurkan pembiayaan pada fokus sektor yang masih tahan di masa pandemi diantaranya ekosistem perkebunan kelapa sawit, koperasi BUMN/Swasta bonafit, *Fintech* Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, *value chain* BUMN & Perusahaan Swasta, *cluster industry*, usaha/nasabah *local champion*. Di tahun 2021 BSI juga melakukan perbaikan kualitas portfolio pembiayaan *existing* diantaranya dengan melakukan *build up* pencadangan pembiayaan SME dalam rangka mengantisipasi potensi risiko di masa depan.

Kinerja

Pada tahun 2021, pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib bersih untuk segmen usaha SME tercatat sebesar Rp1,3 triliun, turun 21.71% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1,7 triliun.

Hal ini juga terjadi pada pendapatan usaha lainnya yang tercatat sebesar Rp283,1 miliar, menurun sebesar 26,80% dari Rp386,7 miliar pada tahun 2021.

Sementara beban usaha tercatat mengalami penurunan sebesar 25,51% dari posisi tahun 2020 yang sebesar Rp1,1 triliun menjadi Rp825,4 miliar.

Begitu juga dengan penyaluran pembiayaan tahun 2021 yang sebesar Rp18,3 triliun, lebih rendah 27,02% dibandingkan posisi tahun 2020 yang mencapai Rp24,1 triliun menjadi Rp25,1 triliun.

Tabel Kinerja Segmen Usaha SME

(Rp juta)

URAIAN	SME	
	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana Bersih	1.300.407	1.660.923
Pendapatan usaha lainnya	283.075	386.730
Beban usaha	(825.360)	(1.107.979)
Beban CKPN	(740.589)	(579.841)
Pendapatan/(Beban) non Opr	(4.289)	(6.541)
Piutang dan Pembiayaan Bersih	17.312.925	24.127.366

*:Disajikan kembali

Profitabilitas

Sejalan dengan penurunan kinerja operasional, laba tahun berjalan segmen usaha SME ikut melemah. Pada tahun 2021, yang berhasil dibukukan sebesar Rp9,9 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp Rp251,0 miliar, terjadi penurunan 96,07%.

Kinerja Profitabilitas Segmen Usaha SME

(Rp juta)

URAIAN	2021	2020*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	13.244	353.292
Zakat	(332)	(8.513)
Beban pajak	(3.040)	(93.795)
Laba tahun berjalan	9.872	250.985

*:Disajikan kembali

Rencana Strategis Tahun 2022

Adapun strategi bisnis SME yang akan diterapkan di tahun 2022 secara umum yaitu SME tumbuh sesuai *Risk Acceptance Criteria*, target nasabah, dan fokus sektor yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Fokus pada sektor unggulan dan memperluas ekosistem bisnis.
2. Peningkatan bisnis *value chain* dan *fintech*, serta ekosistem berbasis digital
3. Percepatan proses bisnis SME dan digitalisasi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Segmen Konsumer

Segmen usaha konsumer saat ini difokuskan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk griya, multiguna, kendaraan, pensiunan, kartu pembiayaan, cicil emas dan gadai emas, pembiayaan program pemerintah).

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha Konsumer seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

PRODUK	URAIAN
BSI Griya	Fasilitas pembiayaan untuk tujuan pembelian rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor, maupun pembangunan rumah dengan kondisi rumah baru, rumah second, atau kavling siap bangun.
BSI Oto	Fasilitas pembiayaan untuk tujuan pemilikan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan dukungan FLPP dan disalurkan kepada MBR dalam rangka pemilikan rumah sejahtera susun.
BSI Mitraguna Berkah	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan/Lembaga negara/Yayasan/ badan usaha lainnya baik dilakukan dalam pengajuan massal maupun perorangan.
BSI Pensiun/Pra Pensiun Berkah	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan melalui BSI sebagai kantor bayar, ataupun pegawai ASN yang akan memasuki masa pensiun.

Strategi Tahun 2021

1. Fokus ekspansi bisnis konsumer pada segmen *upper mass* khususnya nasabah *fixed income*
2. Memperluas saluran pemasaran produk Griya dan Mitraguna melalui peningkatan kerjasama dengan developer, institusi, maupun pihak ketiga dengan proses *maintenance* yang lebih intensif.
3. Mengembangkan fitur produk eksisting dan digitalisasi proses pembiayaan dalam rangka mendukung pemasaran pembiayaan konsumer.
4. Meningkatkan penetrasi akusisi Kartu Pembiayaan Syariah kepada nasabah produk lainnya dan staff perusahaan nasabah untuk meningkatkan kualitas pemegang kartu serta meningkatkan *Product Holding Ratio*.
5. Memperluas saluran akuisisi Kartu Pembiayaan Syariah melalui kerjasama dengan *e-commerce*, *channel* digital, penggunaan tanda tangan elektronik dan persetujuan elektronik.

Kinerja

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, segmen usaha konsumer mencatatkan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp6,2 triliun, meningkat 35,67% dari posisi tahun 2020 yang sebesar Rp4,6 triliun.

Begitu juga dengan pendapatan usaha lainnya yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 27,82% menjadi Rp1,4 triliun dibandingkan dengan pembukuan tahun 2020 yang sebesar Rp1,1 triliun.

Beban usaha tercatat meningkat sebesar 30,08% menjadi Rp3,9 triliun, dari posisi per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp3,1 triliun.

Kemudian, untuk piutang dan pembiayaan segmen usaha konsumer Bank pada tahun 2021 sebesar Rp82,7 triliun, meningkat 27,30% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp65,0 triliun.

Tabel Kinerja Segmen Usaha Konsumer (Rp juta)

URAIAN	KONSUMER	
	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana	6.225.037	4.588.279
Pendapatan usaha lainnya	1.365.552	1.068.337
Beban usaha	(3.981.525)	(3.060.777)
Beban CKPN	(1.085.395)	(1.633.548)
Pendapatan/(Beban) non Opr	(20.691)	(18.071)
Piutang dan Pembiayaan	85.749.598	67.972.492

*:Disajikan kembali

Profitabilitas

Sejalan dengan peningkatan kinerja, laba tahun berjalan segmen usaha konsumer 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 178,16% menjadi Rp1,9 triliun dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya Rp670,8 miliar.

Kinerja Profitabilitas Konsumer (Rp juta)

URAIAN	2021	2020*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	2.502.978	944.220
Zakat	(62.654)	(22.752)
Beban pajak	(574.460)	(250.681)
Laba tahun berjalan	1.865.864	670.787

*:Disajikan kembali

Kinerja *Pawning* (Gadai/Cicil Emas)

Produk Gadai atau Cicil Emas yang merupakan produk unik dari Bank BSI mencatatkan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp425,58 miliar, meningkat 11,61% dari posisi tahun 2020 yang sebesar Rp381,29 miliar.

Begitu juga dengan pendapatan usaha lainnya yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 15,10% menjadi Rp71,99 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp62,54 triliun.

Beban usaha mengalami peningkatan sebesar 17,14% menjadi Rp209,89 miliar dari posisi per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp179,17 miliar.

Kemudian, untuk piutang dan pembiayaan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp4,6 triliun, meningkat 12,79% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,0 triliun.

Tabel Kinerja Pawning (Gadai/Cicil Emas)

(Rp juta)

URAIAN	PAWNING	
	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana Bersih	425.582	381.299
Pendapatan usaha lainnya	71.986	62.539
Beban usaha	(209.889)	(179.173)
Beban CKPN	(2.545)	(3.652)
Pendapatan/(Beban) non Opr	(1.091)	(1.058)
Piutang dan Pembiayaan Bersih	4.581.481	3.901.669

*:Disajikan kembali

Profitabilitas Pawning (Gadai/Cicil Emas)

Profitabilitas untuk Produk Gadai atau Cicil Emas pada tahun 2021 mencatatkan laba bersih sebesar Rp211,74 miliar, meningkat 14,65% dari posisi tahun 2020 yang sebesar Rp184,68 miliar.

Kinerja Profitabilitas Pawning (Gadai/Cicil Emas)

(Rp juta)

URAIAN	2021	2020*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	284.043	259.956
Zakat	(7.110)	(6.264)
Beban pajak	(65.191)	(69.015)
Laba tahun berjalan	211.742	184.676

*:Disajikan kembali

Rencana Strategis Tahun 2022

1. Fokus target nasabah pada pegawai PNS/ASN, BUMN terpilih, RS terpilih, Swasta terpilih, dan Pensiunan
2. Memperluas *channel* pemasaran konsumer melalui platform digital, *developer*, maupun mitra pihak ketiga
3. Mempercepat proses bisnis dan meningkatkan *customer solution* untuk memenuhi kebutuhan nasabah
4. Memperkuat kolaborasi dengan bisnis *wholesale* dan *funding* untuk menggarap pegawai dari perusahaan atau instansi

Segmen Usaha Mikro

Segmen usaha mikro BSI untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat. Kemudian, produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

Per 31 Desember 2021, produk-produk dan layanan yang ditawarkan oleh segmen usaha Mikro dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Produk dan Layanan Segmen Usaha Mikro

PRODUK	URAIAN
BSI Usaha Mikro	Pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada nasabah individu atau badan usaha atau kelompok yang produktif dengan atau tanpa agunan dengan margin komersial (tanpa subsidi)
KUR	Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah Pembiayaan Modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang terdiri dari KUR. (Program Subsidi Margin dari Pemerintah)
KUR Super mikro	Penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah sampai dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
KUR Mikro	Penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Strategi Tahun 2021

Rencana strategi sepanjang tahun 2021 yaitu fokus pada target pasar:

1. Berbasis komunitas (pasar, pedagang tahu/tempe, penjual bakso, dll).
2. Ekosistem halal (pesantren, masjid dan komunitas halal).
3. Nasabah binaan BUMN dan Kementerian (perdagangan, pariwisata/Be Kraf, Pemda, dll).
4. *Trickle Down Business* nasabah *wholesale*.
5. Kerjasama *e-commerce*.
6. Maintain nasabah eksisting.
7. Implementasi digitalisasi pembiayaan.

Kinerja

Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib segmen usaha mikro pada tahun 2021 mencapai Rp1,9 triliun, naik 54,81% dari posisi tahun 2020 yang sebesar Rp1,3 triliun.

Per 31 Desember 2021, pendapatan usaha lainnya di segmen mikro meningkat 13,07% menjadi Rp329,3 miliar dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp291,2 miliar.

Begitu juga dengan beban usaha. Hingga akhir tahun 2021, nilai yang dibukukan sebesar Rp960,3 miliar, naik 15,07% dari capaian tahun 2020 yang sebesar Rp834,5 miliar.

Kemudian, untuk penyaluran piutang dan pembiayaan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 13,64% dari posisi tahun 2020 yang sebesar Rp14,4 triliun menjadi Rp16,3 triliun.

Tabel Kinerja Segmen Usaha Mikro

(Rp juta)

URAIAN	MIKRO	
	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana	1.936.528	1.250.939
Pendapatan usaha lainnya	329.347	291.269
Beban usaha	(960.273)	(834.484)
Beban CKPN	(168.759)	(329.217)
Pendapatan/(Beban) non Opr	(4.990)	(4.927)
Piutang dan Pembiayaan	15.569.634	13.698.843

*:Disajikan kembali

Profitabilitas

Laba tahun berjalan segmen usaha mikro tahun 2021 sebesar Rp843,7 miliar, tumbuh 217,92% dari tahun 2020 yang sebesar Rp265,4 miliar.

Kinerja Profitabilitas Segmen Usaha Mikro

(Rp juta)

URAIAN	2021	2020*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	1.131.853	373.580
Zakat	(28.332)	(9.002)
Beban pajak	(259.772)	(99.182)
Laba tahun berjalan	843.749	265.396

*:Disajikan kembali

Rencana Strategis Tahun 2022

Adapun strategi Bank untuk menciptakan pertumbuhan pembiayaan segmen Mikro diantaranya menjaga kualitas aset produktif serta lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dengan memanfaatkan stimulus pemerintah, memperkuat kompetensi aspek penunjang bisnis utama pada bidang teknologi berupa digitalisasi bisnis proses dan IT, penguatan sinergi bisnis dengan menyalurkan pembiayaan pada *Fintech* Syariah, *E-commerce* dan ekosistem halal.

Segmen Lainnya

Segmen usaha Lainnya merupakan segmen yang melayani produk-produk di luar pembiayaan, produk simpanan dan non-simpanan.

Sepanjang tahun 2021, Bank memiliki produk dan layanan dalam segmen usaha Lainnya yang mencakup:

PRODUK	LAYANAN
Foreign Exchange	E-Channel
Securities Services	Remmitance
Giro, Tabungan, Deposito	Custody

Strategi Tahun 2021

Fokus pada peningkatan portofolio dana murah (CASA), peningkatan layanan digital, dan optimalisasi *excess liquidity*.

Kinerja

Pada tahun 2021, pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib bersih untuk segmen usaha lainnya mencapai Rp1,1 triliun turun sebesar 49,21% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 yang sebesar 2,1 triliun.

Pendapatan usaha lainnya juga mencatatkan pertumbuhan yang positif, yakni meningkat 5,94%, dari Rp485,3 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp514,2 miliar di tahun 2021. Kontribusi utama dari peningkatan tersebut berasal dari layanan *digital banking*.

Beban usaha meningkat sebesar 7,82% dari akhir tahun buku 2020 yang sebesar Rp1,4 triliun, sehingga menjadi Rp1,5 triliun pada 2021.

Tabel Kinerja Segmen Usaha Lainnya

(Rp juta)

URAIAN	LAINNYA	
	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana Bersih	1.058.628	2.084.398
Pendapatan usaha lainnya	514.171	485.332
Beban usaha	(1.499.162)	(1.390.473)
Beban CKPN	-	-
Pendapatan / (Beban) non Opr	(7.791)	(8.209)
Piutang dan Pembiayaan Bersih	-	-

*:Disajikan kembali

Profitabilitas

Bank membukukan laba tahun berjalan segmen usaha lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp49,1 miliar, menurun 94,10% dari pencapaian tahun 2020 yang sebesar Rp831,9 miliar. Penurunan tersebut akibat dari peningkatan hak pihak ketiga atas bagi hasil.

Kinerja Profitabilitas Segmen Usaha Lainnya

(Rp juta)

URAIAN	2021	2020*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	65.846	1.171.048
Zakat	(1.648)	(28.218)
Beban pajak	(15.112)	(310.900)
Laba tahun berjalan	49.086	831.930

*:Disajikan kembali

Rencana Strategis Tahun 2022

Fokus peningkatan portofolio dana murah dengan meningkatkan komposisi dana ritel, terus meningkatkan layanan digital melalui pengembangan Ekosistem Halal, dan optimalisasi *excess liquidity* dengan cara melakukan rekomposisi investasi surat berharga dengan fokus pada peningkatan komposisi investasi pada surat berharga *Capital Market*.

Tinjauan Keuangan



Kinerja keuangan BSI pada tahun 2021 sangat solid, dengan laba bersih tumbuh 38,42%.



Rp265,3 Triliun
Aset tumbuh10,73% yoy



Rp3,2 Triliun
Laba komprehensif tahun berjalan meningkat 49,59% yoy



Rp25,0 triliun
Ekuitas tumbuh 15,04% yoy

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Bank yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material

ASET

Total aset yang dibukukan oleh Bank pada tahun buku 2021 mencapai Rp265,3 triliun, naik 10,73% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp239,6 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan investasi pada surat berharga sebesar Rp18,5 triliun atau 37,62% dan pertumbuhan piutang & pembiayaan bersih sebesar Rp13,2 triliun atau 18,64%.

Rincian Aset

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Kas	4.119.903	3.180.739	2.210.290
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	20.563.580	21.527.933	23.840.556
Giro dan penempatan pada Bank Lain-Neto	1.841.551	8.695.805	3.710.161
Investasi pada Surat Berharga-Neto	67.579.070	49.105.637	38.709.977
Tagihan Akseptasi	159.880	292.789	234.895
Piutang Net	98.336.983	86.589.188	71.085.281
Pinjaman Qardh- Neto	9.081.400	9.054.373	8.470.296
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.592.314	2.598.787	3.674.396
Pembiayaan Musyarakah-Neto	53.903.123	50.896.175	46.393.775
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	901.565	1.509.461	2.251.266
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	4.055.953	3.397.075	1.876.250
Aset Pajak Tangguhan	1.445.324	1.109.281	808.511
Aset Lain-lain-Neto	1.708.435	1.624.281	2.031.373
Investasi pada Entitas Asosiasi	-	-	-
TOTAL ASET	**265.289.081**	**239.581.524**	**205.297.027**

*: Disajikan kembali

Kas

Posisi kas Bank pada tahun 2021 mencapai Rp4,1 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,2 triliun, mengalami peningkatan 29,53%. Kas dengan mata uang rupiah mengalami peningkatan terbesar yaitu Rp3,0 triliun pada 2020 meningkat Rp1,1 triliun atau 36,23% sehingga pada 2021 kas rupiah mencapai Rp4,0 triliun. Sedangkan untuk kas valas mengalami penurunan dari 2020 sebesar Rp220,8 miliar menjadi Rp87,7 miliar pada 2021, turun sebesar Rp133,1 miliar atau 60,30%.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Pada tahun 2021 Bank mencatat giro dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp20,6 triliun, turun 4,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp21,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penempatan pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020 Bank melakukan penempatan pada instrumen SBIS sebesar Rp7 triliun. Selain SBIS, instrumen penempatan pada Bank Indonesia yang mengalami pergerakan yang signifikan yaitu peningkatan FASBIS sebesar Rp4,8 triliun atau 132,46% dan penurunan deposito berjangka sebesar Rp4,7 triliun atau 90,40%.

Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto

Giro dan penempatan pada bank lain-neto pada tahun 2021 senilai Rp1,8 triliun, menurun 78,82% dari tahun 2020 senilai Rp8,7 triliun. Perubahan tersebut disebabkan oleh penurunan atas giro dan penempatan pada bank lain valas sebesar Rp5,9 triiliun atau 83,61% dari Rp7,1 triliun pada 2020 menjadi Rp1,2 triliun di tahun 2021.

Investasi pada Surat Berharga-Neto

Bank membukukan investasi surat berharga-neto pada tahun 2021, naik 37,59% menjadi Rp67,6 triliun dari pembukuan tahun 2020 yang sebesar Rp49,1 triliun. Pertumbuhan yang positif tersebut didorong oleh peningkatan biaya perolehan surat berharga yang diamortisasi meningkat sebesar Rp13 triliun atau 26,44% dengan peningkatan terbesar pada biaya perolehan yang diamortisasi pada instrumen sukuk Bank Indonesia dari Rp18,5 triliun pada 2020 menjadi Rp26,9 triliun pada 2021, meningkat Rp8,5 triliun atau 45,74%.

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi Bank pada tahun 2021 sebesar Rp159,9 miliar, menurun 45,39% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp292,8 miliar. Penyebabnya adalah penurunan LC ekspor SKBDN sebesar Rp89,8 miliar atau 51,03%.

Piutang

Pada tahun 2021, piutang Bank senilai Rp101,8 triliun, meningkat 13,24% dari tahun 2020 senilai Rp89,9 triliun. Perubahan tersebut akibat dari peningkatan atas penyaluran pembiayaan pada sektor konsumer, pedagangan, dan pertanian masing-masing meningkat sebesar Rp9,9 triliun atau 15,00%, Rp2,0 triliun atau 26,11%, dan Rp1,3 triliun atau 30,39%.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Kerugian Piutang

Pada tahun 2021, CKPN dan penyisihan kerugian piutang Bank senilai Rp3,5 triliun, meningkat 4,73% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3,3 triliun. Penyebabnya adalah peningkatan atas CKPN pada kolektibilitas NPF sebesar Rp452,067 miliar atau 32,97%. Hal tersebut dalam rangka untuk menjaga rasio coverage.

Pinjaman Qardh

Pada tahun 2021, pinjaman qardh-neto naik tipis 0,30% dari Rp9.054,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp9.081,4 miliar. Pergerakan tersebut didukung oleh peningkatan pada pembiayaan rahn sebesar Rp521,8 miliar atau 16,22%, Namun hal tersebut diimbangi dengan penurunan atas pinjaman qardh sebesar Rp423,2 miliar atau -7,41%.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah-neto Bank pada 2021 tercatat menurun 38,73%, menjadi Rp1,6 triliun dari pembukuan tahun 2020 yang sebesar Rp2,6 triliun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh peningkatan pembiayaan mudhrabah pada sektor jasa usaha Rp10,5 miliar atau 39,64% dari Rp26,3 miliar menjadi Rp36,7 miliar. Namun peningkatan tersebut diikuti dengan penurunan pada sektor lain yaitu sektor lainnya dan sektor perdagangan dengan nilai masing-masing Rp850,1 miliar dan Rp158,7 miliar.

Pembiayaan Musyarakah

Total pembiayaan musyarakah-neto hingga akhir 2021 sebesar Rp53,9 triliun, meningkat 5,91% dibandingkan tahun 2020 yang Rp50,9 triliun. Kenaikan itu disebabkan oleh peningkatan pada sektor konstruksi sebesar Rp2,4 triliun atau 24,03% dan peningkatan pada sektor pertambangan sebesar Rp1,2 triliun atau 117,03%.

Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset Bank yang diperoleh untuk ijarah-neto tercatat Rp901,6 miliar. Dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp1,5 triliun, terjadi penurunan 40,27%. penurunan terjadi pada ijarah lainnya sebesar Rp184,8 miliar atau 48,31% dan penurunan atas ijarah instalasi sebesar Rp201 miliar atau 27,14%.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Total aset tetap dan aset hak guna-neto pada tahun 2021 mencapai Rp4,1 triliun, naik 19,40% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3,4 triliun. Hal itu disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp605,3 miliar atau 22,13%.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1,4 triliun, lebih tinggi 30,29% dibandingkan tahun 2020 yang Rp1,1 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada CKPN aset produktif sebesar Rp240,5 miliar atau 46,60% dari Rp516,1 miliar di tahun 2020 menjadi Rp756,6 miliar di 2021.

Aset Lain-lain

Secara kumulatif, jumlah aset lain-lain-neto senilai Rp1,7 triliun, lebih tinggi 5,18% dibandingkan posisi tahun 2020 yang sebesar Rp1,6 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada piutang pendapatan surat berharga sebesar Rp105,1 miliar, peningkatan atas persediaan alat tulis kantor dan materai sebesar Rp55,5 miliar, dan peningkatan tagihan SKBDN kepada nasabah sebesar Rp37,3 miliar.

LIABILITAS

Total liabilitas Bank sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp61,9 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp66,0 triliun, turun 6,29%. Penurunan tersebut disebabkan oleh Simpanan dalam bentuk Giro Wadiah dari Rp30,8 triliun pada 2020 menjadi Rp22,4 triliun pada 2021. Meski demikian, tabungan wadiah mengalami peningkatan sebesar Rp5,3 triliun yaitu dari Rp29,6 triliun pada 2020 menjadi Rp34,8 triliun.

Rincian Liabilitas

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Liabilitas Segera	608.554	989.362	665.220
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	158.478	170.010	200.900
SIMPANAN			
Giro Wadiah	22.411.614	30.822.613	16.428.240
Tabungan Wadiah	34.836.276	29.580.970	21.135.628
Total	**57.247.890**	**60.403.583**	**37.563.868**
Simpanan dari Bank Lain	115.938	806.560	106.895
Kewajiban Akseptasi	161.495	295.337	237.254
Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
Utang Pajak	504.078	537.514	378.752
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	17.194	20.323	19.452
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	836.491	908.751	727.861
Liabilitas Lain-lain	2.236.358	1.908.921	4.106.641
JUMLAH LIABILITAS	**61.886.476**	**66.040.361**	**44.006.843**

*: Disajikan kembali

Penyaluran Dana

Peningkatan Investasi BSI pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,40% atau Rp4,7 triliun menjadi Rp78,4 triliun dari Rp73,7 triliun pada 2020. Komponen investasi yang mengalami peningkatan yaitu pada investasi surat berharga dengan kenaikan sebesar Rp18,5 triliun atau 37,59%. Sedangkan untuk Penempatan pada BI dan giro & penempatan pada bank lain mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp6,8 triliun atau 43,33% dan Rp6,9 triliun atau 78,79%.

Sementara itu, pembiayaan BSI pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup memuaskan yaitu sebesar Rp14,6 triliun atau 9,32%. Piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah merupakan komponen pembiayaan yang mengalami peningkatan terbesar yaitu masing-masing sebesar Rp11,8 triliun atau 13,18% dan Rp4,2 triliun atau 7,88%.

Rincian Penyaluran Dana (Investasi dan Pembiayaan)

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	2019
Investasi	**78.404.771**	**73.686.632**	**58.646.018**
Penempatan pada BI	8.948.837	15.791.939	16.180.440
Giro dan Penempatan pada Bank Lain	1.858.789	8.764.198	3.714.568
Investasi pada Surat Berharga	67.597.145	49.130.495	38.751.010
Pembiayaan	**171.291.158**	**156.693.725**	**135.651.242**
Murabahah	101.685.560	89.844.090	73.000.131
Istishna	359	637	2.970
Piutang Sewa	101.570	39.167	21.422
Qardh	9.419.231	9.280.855	8.565.226
Mudharabah	1.628.437	2.670.982	3.737.620
Musyarakah	57.554.436	53.348.533	48.072.607
Aset Ijarah - Neto	901.565	1.509.461	2.251.266
Total Penyaluran Dana	**249.695.929**	**230.380.357**	**194.297.260**

Dana Pihak Ketiga dan Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan BSI terdiri dari simpanan dan dana syirkah temporer. Untuk sumber pendanaan yang berasal dari simpanan, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3,2 triliun atau 5,22% dengan rincian yaitu giro wadiah mengalami penurunan sebesar Rp8,4 triliun atau 27,29%,sedangkan tabungan wadiah mengalami peningkatan Rp5,3 triliun atau 17,77%.

Untuk sumber dana yang berasal dari dana syirkah temporer mengalami peningkatan sebesar Rp26,6 triliun atau 17,52% dengan peningkatan terbesar secara berturut-turut berasal dari deposito mudharabah sebesar Rp12,6 triliun atau 14,58%, Kemudian giro mudharabah Rp8,0 triliun atau 148,00% dan tabungan mudharabah Rp 6,1 triliun atau 10,33%.

Rincian Dana Pihak Ketiga dan Sumber Pendanaan Lainnya (Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	2019
Simpanan	**57.247.890**	**60.403.583**	**37.563.868**
Giro Wadiah	22.411.614	30.822.613	16.428.240
Tabungan Wadiah	34.836.276	29.580.970	21.135.628
Dana Syirkah Temporer	**178.388.671**	**151.798.018**	**142.221.239**
Giro Mudharabah	13.318.627	5.370.452	11.880.204
Tabungan Mudharabah	65.102.491	59.008.934	48.064.346
Deposito Mudharabah	98.592.553	86.043.632	80.997.689
Sukuk Mudharabah Subordinasi	1.375.000	1.375.000	1.279.000
Total Sumber Pendanaan	**235.636.561**	**212.201.601**	**179.785.107**

EKUITAS

Total ekuitas Bank sampai dengan berakhirnya tahun buku 2021 sebesar Rp25,0 triliun, mengalami kenaikan sebesar 15,04% dibandingkan dengan tahun buku 2020 yang sebesar Rp21,7 triliun. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari pencapaian laba dengan peningkatan saldo laba Rp2,8 triliun atau 41,80%.

Rincian Ekuitas (Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	2019
Modal Disetor	20.564.654	3.142.019	2.989.022
Tambahan Modal Disetor	(6.366.776)	-	-
Ekuitas merging entities	-	10.903.586	9.823.110
Keuntungan revaluasi aset tetap	444.530	395.725	395.725
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	140.271	53.998	47.049
Keuntungan/(kerugian) Surat Berharga - bersih	22.263	-	710
Cadangan Umum	779.036	597.804	597.804
Saldo Laba	9.429.956	6.650.013	5.215.525
- Tahun Lalu	6.468.781	5.215.525	3.940.491
- Tahun Berjalan	2.961.175	1.434.488	1.275.034
Total Ekuitas	**25.013.934**	**21.743.145**	**19.068.945**

KINERJA LABA-RUGI

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Bank berhasil membukukan jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp17,8 triliun, naik 5,19% dari posisi tahun buku 2020 yang mencapai Rp16,9 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan atas pendapatan dari jual beli sebesar Rp1,1 triliun atau 11,59% dan peningkatan atas pendapatan usaha utama lainnya sebesar Rp147,7 miliar atau 5,01%.

Perkembangan Laba Rugi

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	**17.808.432**	**16.929.592**	**15.739.431**
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	4.378.807	5.004.254	5.363.576
Hak Bagi Hasil Milik Bank	**13.429.625**	**11.925.338**	**10.375.855**
Pendapatan Operasional Lainnya	3.012.246	2.776.701	2.418.234
Jumlah Pendapatan setelah Distribusi bagi Hasil, Imbalan dan Bonus	**16.441.871**	**14.702.039**	**12.794.089**
Beban Operasional Lainnya	8.782.773	7.955.227	7.166.873
Beban CKPN Aset Produktif and Non Produktif - Neto	3.551.249	3.620.446	2.855.517
Laba Usaha	**4.107.849**	**3.126.366**	**2.771.700**
Pendapatan (Beban) Non-Operasional- Neto	(147.325)	(121.169)	(139.881)
Laba Sebelum Beban Pajak	3.960.524	3.005.197	2.631.818
Beban Pajak Penghasilan	932.319	817.548	679.616
Laba Bersih	**3.028.205**	**2.187.649**	**1.952.202**
Laba (Rugi) Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:			
· Pemilik Entitas Induk	3.028.205	2.187.649	1.952.202
· Kepentingan Non Pengendali	-	-	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	189.591	(36.503)	(80.773)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	3.217.796	2.151.146	1.871.469
Dapat Diatribusikan kepada:			
· Pemilik Entitas Induk	3.217.796	2.151.146	1.871.469
· Kepentingan Non Pengendali	-	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan Dapat Diatribusikan kepada:	3.217.796	2.151.146	1.871.469
Laba per Saham Dilusian	73,66	53,51	47,79
*: Disajikan kembali			

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer Bank tahun 2021 senilai Rp4,4 triliun, turun 12,50% dibandingkan dengan tahun 2020 yang senilai Rp5,0 triliun. Hal tersebut akibat dari penurunan beban bagi hasil atas deposito mudharabah sebesar Rp521,2 miliar atau 13,07% dari Rp4,0 triliun pada 2020 menjadi Rp3,5 triliun pada 2021.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pada tahun buku 2021, pendapatan operasional lainnya Bank sebesar Rp3,0 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,8 triliun, mengalami peningkatan sebesar 8,48%. Peningkatan terbesar terutama pada penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapus buku yang meningkat Rp222,4 miliar atau 41,17% menjadi Rp762,5 miliar pada 2021 dari posisi tahun 2020 sebesar Rp540,2 miliar.

Beban Usaha

Sepanjang tahun 2021, beban usaha Bank tercatat Rp8,8 triliun, naik 10,40% dibandingkan dengan posisi tahun 2020 yang sebesar Rp7,9 triliun. Peningkatan ini, antara lain pada beban gaji & tunjangan sebesar Rp400,7 miliar atau 9,80% dan beban umum dan administrasi meningkat Rp506,6 miliar atau 14,63%.

Laba Bersih

Bank mencatatkan laba bersih tahun 2021 meningkat 38,42 % dari pembukuan tahun 2020 yang mencapai Rp2,2 triliun menjadi Rp3,0 triliun. Pertumbuhan yang positif tersebut merupakan hasil dari peningkatan pendapatan atas penyaluran dana sebesar Rp878,8 miliar atau 5,19% dan penurunan beban bagi hasil sebesar Rp625,4 miliar atau -12,50%.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3,2 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp2,2 triliun, mengalami kenaikan sebesar 49,59%. Kenaikan itu diakibatkan oleh peningkatan laba bersih sebesar Rp840,6 miliar atau 38,42% dan peningkatan jumlah pendapatan komprehensif lain bersih sebesar Rp226,1 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

ARUS KAS

Bank membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun buku 2021 sebesar Rp26,54 triliun, meningkat 0,11% dibandingkan tahun buku 2020 yang sebesar Rp26,51 triliun. Perubahan tersebut, antara lain didorong oleh peningkatan pada arus kas aktivitas operasi sebesar Rp6,5 triliun atau 53,25% yang diimbangi dengan penurunan atas arus kas aktivitas investasi sebesar Rp6,8 triliun atau 58,08%,

Rincian Arus Kas

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020*	2019
Arus Kas Aktivitas Operasi	18.676.808	12.187.412	7.457.737
Arus Kas Aktivitas Investasi	(18.571.038)	(11.747.901)	(4.054.061)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	(77.929)	(140.494)	(10.660)
Kas & Setara Kas Awal Tahun	26.514.431	26.215.414	22.872.398
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	26.542.272	26.514.431	26.265.414

*: Disajikan kembali

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun buku 2021 mencapai Rp18,7 triliun, mengalami peningkatan sebesar 53,25% dibandingkan tahun buku 2020 yang sebesar Rp12,2 triliun. Kenaikan arus kas operasi diperoleh dari aktivitas operasi yang berasal dari kenaikan dana syirkah temporer dari Rp9,5 triliun pada 2020 menjadi Rp26,6 triliun pada 2021, atau meningkat 180,47% setara dengan Rp17,1 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi hingga 31 Desember 2021 sebesar -Rp18,6 triliun, turun sebesar 58,08% dari pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar -Rp11,7 triliun. Hal tersebut didorong oleh aktivitas perolehan surat berharga yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan atas surat berharga dengan nominal Rp7,1 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sepanjang tahun 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar -Rp77,9 miliar, meningkat sebesar 44,53% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang sebesar -Rp140,5 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan turunnya pembayaran atas liabilitas sewa dari -Rp241,3 miliar pada 2020 menjadi -Rp130,2 pada 2021, atau mengalami perbaikan sebesar Rp111,1 miliar atau 46,04%. Selain itu, pada 2021 tidak terdapat pembayaran dividen.

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN

Analisis Kualitas Aset Produktif

Kualitas aset produktif 2021 berhasil tercatat sebesar Rp 242,1 triliun atau meningkat 11,80% setara dengan Rp25,56 triliun, dari jumlah aset produktif pada 2020 yang sebesar Rp216,6 triliun. Peningkatan aset produktif terbesar terdapat pada tumbuhnya surat berharga yang diimiliki dan peningkatan pembiayaan berbasis piutang dan sewa dengan kenaikan masing-masing sebesar Rp18,5 triliun atau 37,64% dan Rp11,3 tiliun atau 11,31%.

Adapun jumlah aktiva produktif dengan kualitas non performance (NPF) mengalami peningkatan Rp508,4 miliar atau 11,26%. Peningkatan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan total aktiva produktif. Peningkatan jumlah NPF terbesar terdapat pada pembiayaan berbasis piutang dan sewa sebesar Rp478,2 miliar atau 17,79%.

Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan BSI yang meliputi rasio kinerja secara umum mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2021. Perbandingan rasio Bank tahun 2020 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Perkembangan Rasio Keuangan Utama

URAIAN	2021	2020	2019
Laba (Rugi) terhadap Aset	1,14%	0,91%	0,95%
Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	12,11%	10,06%	10,24%
Laba (Rugi) terhadap Pendapatan/Penjualan	17,00%	12,92%	12,40%
Rasio Lancar	442,73%	372,54%	511,02%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	247,41%	303,73%	230,78%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	23,33%	27,56%	21,44%
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	22,09%	18,24%	18,73%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Gross	2,93%	2,88%	3,21%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Net	0,87%	1,12%	1,58%
ROA	1,61%	1,38%	1,44%
ROE	13,71%	11,18%	11,28%
Margin Pendapatan Bersih (NIM)	6,04%	6,04%	3,97%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,46%	84,61%	85,27%
Cost to Income Ratio (CIR)	52,57%	53,74%	58,05%
Cost Efficiency Ratio (CER)	52,07%	50,56%	53,61%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	73,39%	74,52%	76,15%
Persentase Pelampauan BMPD	0,51%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)			
- GWM Rupiah	4,55%	3,12%	5,12%
- GWM Valas	1,03%	1,16%	2,89%
Posisi Devisa Netto	0,27%	4,47%	1,73%

INFORMASI KINERJA KEUANGAN LAINNYA

Distribusi Bagi Hasil

Berikut adalah laporan distribusi bagi hasil BSI dalam dua tahun terakhir.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

(Rp Juta)

No.	Jenis Penghimpunan Dana	2021	
		Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan
		A	B
1	Liabilitas Kepada Bank Lain	710.370	5.565
2	Giro *Mudharabah*	12.656.974	99.152
3	Tabungan *Mudharabah*	61.423.876	481.183
4	Deposito *Mudharabah*	96.431.076	755.423
5	Surat Berharga yang diterbitkan	1.375.000	23.496
6	Pembiayaan yang Diterima	-	-
	Total	**172.597.296**	**1.365.696**

No.	Jenis Penghimpunan Dana	2021	
		Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan
		A	B
1	Penempatan pada Bank Lain	316.296	45
2	Surat Berharga yang dimiliki	61.252.124	89.445
3	Piutang Murabahah	96.680.261	892.759
4	Piutang *Istishna*	383	19
5	Piutang Multijasa	-	-
6	Pembiayaan Gadai	-	-
7	Pembiayaan *Mudharabah*	1.920.441	14.461
8	Pembiayaan Musyarakah	53.251.122	374.234
9	Pembiayaan Sewa	1.139.043	13.163
10	Pembiayaan Lainnya	-	-
	Total	**214.559.670**	**1.384.126**

Sumber dan Penyaluran Zakat

Sumber dana zakat Bank terdiri dari internal Bank dan eksternal Bank, yang berasal dari pegawai serta nasabah dan umum. Pada tahun 2021, Bank membukukan sumber dana zakat sebesar Rp158,9 miliar, meningkat 43,55% dari posisi yang sama tahun 2020 yakni Rp110,7 miliar. Kenaikan itu didukung oleh peningkatan yang merata yaitu peningkatan internal Bank dan eksternal Bank, masing-masing sebesar Rp27,5 miliar dan Rp20,7 miliar.

Pada tahun 2021, Bank menyalurkan dana zakat ke lembaga lain sebesar Rp127,6 miliar, naik 21,58% dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp105,0 miliar.

Sementara itu, saldo awal zakat tahun 2021 sebesar Rp72,9 miliar meningkat Rp31,3 miliar sehingga saldo akhir dana zakat Bank pada 2021 menjadi Rp104,2 miliar atau naik sebesar 42,92% dari posisi tahun sebelumnya.

Perkembangan Sumber dan Penyaluran Zakat

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	2019
Sumber dana zakat			
Internal bank	101.684	74.202	66.650
Eksternal bank	57.218	36.491	33.369
Total Penerimaan Zakat	**158.902**	**110.693**	**100.020**
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan ke lembaga lain	**(127.611)**	**(104.962)**	**(69.367)**
Kenaikan dana zakat	31.291	5.731	30.653
Saldo awal dana zakat	72.911	67.180	36.528
Saldo Akhir Dana Zakat	**104.202**	**72.911**	**67.180**

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Sumber dana kebajikan Bank terdiri dari infak dan sedekah, denda, pendapatan non-halal dan lainnya. Hingga 31 Desember 2021, sumber dana kebajikan tercatat sebesar Rp72,6 miliar, naik 34,54% dari posisi yang sama tahun 2020 yakni sebesar Rp54,0 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya penerimaan atas infak dan sedekah sebesar Rp14,5 miliar atau 40,38%.

Per 31 Desember 2021, Bank menggunakan dana kebajikan yang direalisasikan dalam bentuk penggunaan lainnya untuk kepentingan umum sebesar Rp59,5 miliar, melambat 22,50% dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp76,8 miliar.

Sementara itu, saldo awal dana kebajikan tahun 2021 sebesar Rp12,9 miliar. Dengan demikian, saldo akhir dana kebajikan Bank pada 2021 yaitu sebesar Rp26,0 miliar, naik sebesar 101,37% dari posisi tahun sebelumnya yaitu Rp12,9 miliar.

Perkembangan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Rp Juta)

No.	URAIAN	2021	2020	2019
1	**Saldo awal dana kebajikan**	**12.900**	**35.739**	**81.560**
2	Penerimaan dana kebajikan			
	Infak dan sedekah	50.280	35.816	18.505
	Denda	14.329	10.838	15.895
	Penerimaan non halal	7.898	6.798	2.420
	Lainnya	99	516	1.003
	Total Penerimaan	**72.606**	**53.968**	**37.823**
3	Penggunaan dana kebajikan			
	Dana kebajikan produktif	-	-	-
	Sumbangan	-	-	-
	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	59.529	76.807	83.644
	Total Penggunaan	**59.529**	**76.807**	**83.644**
4	**Kenaikan / penurunan dana kebajikan**	**13.077**	**(22.839)**	**(45.821)**
5	**Saldo akhir dana kebajikan**	**25.977**	**12.900**	**35.739**

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Bank Syariah Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman secara tepat waktu. Kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas.

Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas Bank.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, serta komitmen pembiayaan kepada debitur. Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (*Financing to Deposit Ratio*/FDR) Bank tahun 2021 mencapai 73,39%, mengalami penurunan 1,13% jika dibandingkan dengan rasio FDR tahun 2020 yang mencapai 74,52%. Rasio FDR Bank sedikit di bawah dari yang ditetapkan regulator, yaitu batas bawah target FDR Syariah sebesar 80% dan batas atas sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun likuiditas Bank tinggi, namun efektivitas penyaluran pembiayaan perlu ditingkatkan.

Tabel Likuiditas Bank

RASIO	2021	2020	2019
Financing to Deposit Ratio (FDR)	73,39%	74,52%	76,15%

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Bank mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank. Bank memastikan kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR).

Tabel Solvabilitas Bank

RASIO	2021	2020	2019
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,09%	18,24%	18,71%

Pada tahun 2021, rasio kecukupan modal Bank mencapai 22,09%, meningkat 3,85% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 18,24%. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014, rasio kecukupan modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,99%.

Dengan rasio kecukupan modal Bank berada pada tingkat 22,09%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK. Hal ini berarti bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek yang diterbitkan Bank, yaitu Sukuk Subordinated Mudharabah 2016. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkat guna mendukung kelayakan efek.

Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit dalam membayar efeknya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut. Sukuk Subordinated Mudharabah yang diterbitkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan Pefindo sebagai lembaga pemeringkat untuk tahun 2021.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

KETERANGAN	PERINGKAT		PEMERINGKAT	
	2021	2020	2021	2020
Sukuk Subordinated Mudharabah 2016	idAA (sy)	A(idn)	Pefindo	Fitch

Rentabilitas Bank

Rentabilitas Bank Syariah Indonesia diukur melalui rasio-rasio berikut:

Tabel Rasio Rentabilitas Bank

RASIO	2021	2020	2019
Return on Assets (ROA)	1,61%	1,38%	1,44%
Return on Equity (ROE)	13,71%	11,18%	11,28%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,46%	84,61%	85,27%

Pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia membukukan *return on asset* sebesar 1,61%, naik 0,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,38%. Rasio return on equity juga mengalami kenaikan sebesar 2,53% dari 11,18% di tahun 2020, menjadi 13,71% di tahun 2021. Sementara rasio BOPO mengalami perbaikan, yaitu turun sebesar 4,15% dari 84,61% di tahun 2020 menjadi sebesar 80,46% di tahun 2021.

Perkembangan Tingkat Kolektibilitas

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tahun 2021 dan 2020 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Tabel Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

RASIO	2021	2020	PERUBAHAN
NPF-Neto	0,87%	1,12%	-0,25%
NPF-Gross	2,93%	2,88%	0,05%

Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2021 sebesar 2,93%, meningkat 0,05% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,88%. Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara neto pada tahun 2021 sebesar 0,87%, mengalami perbaikan 0,25% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,12%. Kolektibilitas piutang dapat dilihat dari kelancaran pembayaran kredit yang disalurkan. Kredit yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya disajikan sebagai berikut.

Tabel Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2021

(Rp Juta)

2021						
URAIAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
RUPIAH						
Murabahah	97.075.510	1.859.833	934.838	516.328	1.167.905	101.554.413
Istishna	321	39	-	-	-	359
Ijarah	741.483	24.361	192.959	7.227	35.537	1.001.566
Qardh	7.605.772	33.932	20.848	252.583	37.981	7.951.116
VALAS						
Murabahah	-	131.146	-	-	-	131.146
Istishna	-	-	-	-	-	-
Ijarah	1.568	-	-	-	-	1.568
Qardh	1.468.114	-	-	-	-	1.468.114
Total Piutang	**106.892.768**	**2.049.312**	**1.148.644**	**776.138**	**1.241.422**	**112.108.284**
CKPN	(1.457.656)	(352.326)	(493.519)	(412.234)	(1.072.603)	(3.788.337)
Piutang Bersih	**105.435.112**	**1.696.986**	**655.125**	**363.904**	**168.820**	**118.873.458**

Tabel Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2020

(Rp Juta)

2020						
URAIAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
RUPIAH						
Murabahah	84.332.012	2.901.084	589.560	248.432	1.573.131	89.644.219
Istishna	388	228	-	-	21	637
Ijarah	1.302.638	101.940	7.785	26.033	86.690	1.525.086
Qardh	8.211.996	24.079	7.484	5.057	134.379	8.382.995
VALAS						
Murabahah	995	189.122	9.755	-	-	199.872
Istishna	-	-	-	-	-	-
Ijarah	23.542	-	-	-	-	23.542
Qardh	897.860	-	-	-	-	897.860
Total Piutang	**94.769.432**	**3.216.452**	**614.583**	**279.523**	**1.794.220**	**100.674.210**
CKPN	(1.444.789)	(565.920)	(300.391)	(123.690)	(1.086.398)	(3.521.188)
Piutang Bersih	**93.324.643**	**2.650.532**	**314.192**	**155.833**	**707.822**	**108.182.376**

Tabel Pertumbuhan Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas

PERTUMBUHAN						
URAIAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
RUPIAH						
Murabahah	15,11%	-35,89%	58,57%	107,83%	-25,76%	13,29%
Istishna	-17,33%	-83,10%	0,00%	0,00%	-100,00%	-43,61%
Ijarah	-43,08%	-76,10%	2.378,71%	-72,24%	-59,01%	-34,33%
Qardh	-7,38%	40,92%	178,58%	4.894,34%	-71,74%	-5,15%
VALAS						
Murabahah	-100,00%	-30,65%	-100,00%	0,00%	0,00%	-34,38%
Istishna	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ijarah	-93,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-93,34%
Qardh	63,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,51%
Total Piutang	12,79%	-36,29%	86,90%	177,67%	-30,81%	11,36%
CKPN	0,89%	-37,74%	64,29%	233,28%	-1,27%	7,59%
Piutang Bersih	12,98%	-35,98%	108,51%	133,52%	-76,15%	9,88%

Piutang bersih berdasarkan jenis, mata uang dan kolektabilitas pada tahun 2021 mencapai Rp118,9 triliun, meningkat 9,88% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp108,2 triliun. Kontribusi terbesar kolektabilitas tahun 2021 masih didominasi oleh murabahah rupiah, yakni sebesar Rp101,6 triliun, meningkat 13,29% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp89,6 triliun.

Secara komposisi, murabahah rupiah yang termasuk: kategori lancar sebesar Rp97,1 triliun, dalam perhatian khusus sebesar Rp1,9 triliun, kurang lancar sebesar Rp934,8 miliar, diragukan sebesar Rp516,3 miliar dan macet sebesat Rp1,2 triliun.

STRUKTUR MODAL

Kebijakan dan Alasan Pemilikan Kebijakan

Tujuan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Bank dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Rasio kecukupan modal – risiko kredit mencapai 22,11% di tahun 2021 atau turun sebesar 0,01% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 22,12%.

Sementara untuk rasio kecukupan modal – risiko kredit, operasional dan pasar mencapai 22,09% di tahun 2021 atau meningkat 3,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 18,24%. Rasio kecukupan modal Bank pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 9,99% sesuai dengan ketentuan dari peraturan No.21/POJK.03/2014 dengan Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank.

Tabel Struktur Modal

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

	URAIAN	2021	2020
I	KOMPONEN MODAL		
	A. Modal Inti *(Tier 1)*	23.173.019	20.420.394
	1.1 Modal disetor	20.423.407	3.142.019
	1.2 Cadangan Tambahan Modal:	4.379.632	18.547.128
	1.2.1 Faktor Penambah	11.690.223	18.547.128
	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuanganyang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	22.263	-
	Saldo surplus revaluasi aset tetap	444.530	395.725
	Agio saham biasa	943.815	-
	Cadangan Umum	779.036	597.804
	Laba ditahan awal tahun setelah pajak	6.401.751	5.215.524
	Laba tahun berjalan setelah pajak (100%)	3.028.205	2.187.649
	Dana setoran modal	-	10.150.426
	Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	70.623	-
	1.2.2 Faktor Pengurang	7.310.591	-
	Cadangan Tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)	7.310.591	-
	1.3 Cadangan Tambahan Modal:	-	-
	1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	1.630.020	1.268.753
	B. Modal Pelengkap (Tier 2)	1.949.750	2.076.847
	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	527.083	802.084
	Agio / Disagio	-	-

Tabel Struktur Modal

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

	URAIAN	2021	2020
	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1.25% ATMR Risiko Kredit)	1.422.667	1.274.763
	Cadangan tujuan	-	-
II	Jumlah Modal Inti. Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan	25.122.769	22.497.241
III	Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	113.643.146	101.719.501
IV	Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	-	20.569.561
V	Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar	103.913	1.035.985
VI	Jumlah Risiko - Aset Tertimbang	113.747.059	123.325.047
VII	Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit	22,11%	22,12%
VIII	Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit dan Pasar	22,09%	21,89%
IX	Rasio Kecukupan Modal Minimum	22,09%	18,24%

Rincian Struktur Modal

Persentase struktur modal yang didanai dengan Surat Berharga Subordinasi yang Diterbitkan (sukuk) tahun 2021 adalah sebesar 0,52%, turun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,57%.

Tabel Rincian Struktur Modal

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	KOMPOSISI	2020	KOMPOSISI
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Surat Berharga Subordinasi Yang Diterbitkan dan Ekuitas	265.289.081	100,00%	239.581.524	100,00%
Liabilitas	61.886.476	23,33%	66.040.361	27,56%
Dana Syirkah Temporer	177.013.671	66,72%	150.423.018	62,79%
Surat Berharga Subordinasi Yang Diterbitkan (Sukuk)	1.375.000	0,52%	1.375.000	0,57%
Ekuitas	25.013.934	9,43%	21.743.145	9,08%

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2021, BSI memiliki komitmen untuk investasi barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor cabang serta pengadaan perlengkapan komputer dan ATM sebesar Rp668,0 miliar, meningkat 406,88% dibandingkan komitmen di tahun sebelumnya yang sebesar Rp131,8 miliar.

INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2021, realisasi investasi barang modal Bank sebesar Rp787,5 miliar. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar Rp1,1 triliun, realisasi tersebut lebih rendah sebesar 27,97% Adapun rincian realisasi investasi barang modal tahun buku adalah sebagai berikut:

Realisasi Investasi Barang Modal

(Rp Juta)

JENIS INVESTASI	2021	2020
Tanah	-	582.947
Bangunan	17.577	108.687
Instalasi	23.883	6.046
Kendaraan Bermotor	2.799	4.886
Inventaris Kantor	334.699	212.872
Renovasi atas Aset Sewa	11.268	4.799
Aset dalam Penyelesaian	397.278	173.062
Total	**787.504**	**1.093.299**

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

BSI tidak memiliki informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank dan risiko usaha dimasa yang akan datang.

PROSPEK USAHA

Pandemi Covid-19 diproyeksikan masih berlangsung, seperti ditandai dengan munculnya varian Omicron pada awal tahun 2022. Situasi ini akan berdampak pada kinerja industri perbankan nasional. Kendati demikian, proses perbaikan dan pemulihan pada industri perbankan diprediksi masih tetap berlanjut. Penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan tahun 2022 diproyeksikan tumbuh masing-masing pada kisaran 5,5% ±1% *year on year* (yoy) dan 7,5% ±1% yoy.

BSI telah memiliki performa yang teruji di tahun 2021 dengan tercapainya berbagai *milestone*, diantaranya *operational merger* di bulan November 2021. Karena itu, Bank memiliki peluang untuk terus tumbuh dengan melihat berbagai peluang antara lain sebagai berikut:

1. Permodalan dan likuiditas Bank yang semakin baik menjadi peluang untuk melakukan kegiatan investasi untuk meningkatkan pendapatan Bank.
2. Bank memiliki infrastruktur yang memadai antara lain jaringan yang luas, sistem teknologi informasi (TI) dan digital yang mumpuni sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Memanfaatkan sinergi dengan Bank Induk dalam meningkatkan bisnis dan layanan Bank.
4. Jaringan syariah di pasar global sehingga terdapat peluang untuk menggarap pasar luar negeri.
5. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penetrasi *customer based* dan pengguna aktif *mobile banking*.
6. Peluang untuk melakukan *cross selling* antarproduk perbankan syariah (seperti pembiayaan konsumer, kartu kredit, investasi surat berharga, dan segmen korporasi)
7. Terdapat segmen kelas menengah muslim yang tengah bertumbuh sehingga memiliki potensi untuk masuk ke segmen nasabah prioritas.
8. Besarnya potensi ekosistem halal yang saat ini belum dioptimalkan dengan baik oleh bank syariah.

Berdasarkan asumsi tersebut disertai dan adanya berbagai peluang, Bank Syariah Indonesia optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Bank Syariah Indonesia memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia yaitu:

1. Memiliki struktur permodalan yang kokoh dengan biaya dana yang murah.
2. Memiliki likuiditas yang terjaga dengan baik.
3. Merupakan bank syariah terbesar baik dari sisi dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan serta merupakan bank syariah terbaik dari sisi keberlangsungan bisnis.
4. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam memperkuat Industri Keuangan Syariah.
5. Memiliki dukungan kuat dari pemegang saham dan sinergi dengan Bank Induk.
6. Memiliki jaringan di pasar global.
7. Memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima baik dari dalam dan luar negeri.
8. Mempunyai komitmen organisasi untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
9. Memiliki komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme seluruh pegawai.
10. Memiliki struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
11. Jaringan kantor dan unit kerja yang sangat luas dengan memiliki sekitar 1.300 jaringan sehingga mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi.
12. Berpengalaman/kokoh di segmen ritel, baik terkait *payroll*, Bank Operasional 2 (BO2), maupun di segmen korporasi.
13. Berpengalaman di bidang ekosistem halal antara lain haji, umroh, pesantren, pendidikan Islam, masjid, dan zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf).

Berdasarkan peluang-peluang tersebut, BSI telah menyusun target jangka pendek tahun 2022 dan target jangka menengah tahun 2023-2024, yang diurai sebagai berikut:

Target Jangka Pendek Tahun 2022

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia akan fokus pada:

1. Ekspansi pembiayaan pada segmen yang terbukti tahan di era pandemi.
2. Fokus pertumbuhan dana murah di antaranya melalui peningkatan kapabilitas transaksional dan intensifikasi kerja sama *payroll* dengan institusi.
3. Pengembangan *digital business* untuk meningkatkan layanan kepada nasabah baik nasabah institusi maupun nasabah ritel.

Target Jangka Menengah Tahun 2023-2024

Target target jangka menengah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah Indonesia akan berfokus pada:

1. Penguatan *wholesale & transactional banking* dengan fokus peningkatan *customer base* dan *deepening relationship*.
2. Penguatan *retail banking* dan turut menggerakkan ekonomi UMKM.
3. Meningkatkan ekspansi bisnis pada ekosistem halal dan pasar global.
4. Penataan jaringan kantor dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

Target dan Realisasi

Secara keseluruhan, kinerja Bank melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Total aset BSI pada tahun 2021 sebesar Rp265,3 triliun, atau sebesar 107,11% dari target sebesar Rp247,7 triliun.

Kemudian, realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2021 mencapai 107,78% dari target yang sebesar Rp216,4 triliun, atau sebesar Rp233,3 triliun. Begitu juga dengan pencapaian pembiayaan yang terealisasi 102,65% atau sebesar Rp171,3 triliun terhadap target sebesar 2021 yang sebesar Rp166,9 triliun.

BSI membukukan pendapatan operasional tahun 2021 sebesar Rp16,3 triliun, atau sebesar 104,80% terhadap target 2021 yang sebesar Rp15,5 triliun. Sedangkan laba usaha Bank pada tahun 2021 Rp3,0 triliun, atau sebesar 104,28% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun.

Untuk struktur modal, BSI menargetkan pada tahun 2021 sebesar Rp24,4 triliun. Adapun realisasinya Rp25,0 triliun atau 102,46% dari target.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	PENCAPAIAN (%)
Total Aset	247.669.044	265.289.081	107,11%
Dana Pihak Ketiga	216.406.536	233.251.358	107,78%
Pembiayaan	166.876.163	171.291.157	102,65%
Pendapatan	15.501.243	16.244.533	104,80%
Laba Usaha	2.904.055	3.028.205	104,28%
Struktur Modal	24.414.194	25.013.934	102,46%

Proyeksi Tahun Buku 2022

Mengacu pada realisasi kinerja tahun 2021 serta mempertimbangkan kondisi yang akan berkembang pada tahun 2022, Bank telah menetapkan target usaha, seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Proyeksi, Realisasi, dan Perubahan Proyeksi, Realisasi, dan Perubahan

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	PROYEKSI 2022	REALISASI 2021
NIM	5,5%-6,0%	6,04%
NPF Gross	2,75%-2,95%	2,93%
Cash Coverage	145%-150%	148,87
FDR	74%-77%	73,39%

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran Tahun 2021

Sebagai Bank Syariah hasil penggabungan (merger) dari tiga bank syariah terbesar di Tanah Air, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRIsyariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi sebuah brand baru yang relative belum dikenal luas karena tergolong kembali menjadi pemain baru di ranah perbankan nasional. Karena itu, dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat dan melakukan serangkaian aktivitas untuk menciptakan product awareness hingga top of mind di benak masyarakat Indonesia sebagai Bank Syariah terpercaya.

Dalam rangka meningkatkan awareness terhadap produk dan layanan Bank Syariah Indonesia, selama tahun 2021, BSI melakukan sejumlah strategi pemasaran dengan objective untuk mendukung pertumbuhan bisnis sebagai berikut:
1. Meningkatkan edukasi literasi perbankan syariah
2. Meningkatkan awareness terhadap produk BSI
3. Meningkatkan interest terhadap produk BSI

Untuk mencapai objective tersebut, maka dilakukan 4 fokus strategi di tahun 2021 yaitu:
1. Mapping Target Consumer

   Mapping Target Consumer dibagi menjadi dua yaitu Target Business dan Target Audience.
   - Target Business merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan contribution margin lebih tinggi seperti: ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM, dan Professional.
   - Target audience merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, yaitu Millennial. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia pada generasi millennial (usia 24 – 39 tahun) sekitar 68.9 Juta orang. Sementara generasi Z (8 – 23 tahun) mencapai 75,4 juta orang. Hal ini menjadikan generasi millennial sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan.

   Berdasarkan mapping consumer diatas maka perlu strategi konten dan channel komunikasi yang berbeda.

2. Mapping Product Champion

   Sebagai hasil gabungan dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia memiliki banyak sekali produk yang harus diperkenalkan kembali kepada masyarakat luas. Dari puluhan produk yang ada, salah satu strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan membuat mapping product champion, yaitu memilih beberapa produk yang dijadikan 'hero product'.

   Pemilihan 'hero product' menyesuaikan dengan target pertumbuhan bisnis. Di tahun pertama, Bank Syariah Indonesia memiliki target untuk peningkatan Fee Based Income (FBI) dan juga peningkatan pembiayaan Syariah. Berikut adalah 'hero product' yang menjadi bagian fokus strategi pemasaran di tahun 2021:
   - BSI Mobile
   - BSI Gadai Emas
   - BSI Griya
   - BSI OTO
   - BSI Mitraguna Berkah
   - BSI Hasanah Card

Hero Product













3. Integrated Marketing Communications Integrated Marketing Communications dilakukan berdasarkan strategi mapping consumer dan mapping product champion.

   Aktivitas campaign 'hero product' dilakukan sesuai dengan target audience maupun target business yang sudah ditetapkan.

   Sebagai contoh, untuk produk BSI Mobile dan BSI Griya Simuda dengan target audience millennials, dilakukan serangkaian aktivitas promosi mulai dari Above The Line (ATL) melalui media televisi, koran/ majalah, cinema/ bioskop, videotron/ OOH, kemudian Below The Line (BTL) melalui online event (webinar, IG Live) dan offline event (open booth di Mall dan Sponsorship Event), dan didukung dengan kegiatan digital marketing (digital ads, kerjasama dengan KOL dan Publisher).

   Sementara produk BSI Mitraguna Berkah, yang memiliki target business lebih ke ASN/ Pegawai BUMN melakukan aktivitas promosi dengan kunjungan langsung ke nasabah ataupun ke satuan kerja (satker) perusahaan terkait.

4. Tactical Program
   Selain meningkatkan awareness dan interest terhadap produk BSI, salah satu tujuan pemasaran adalah ikut meningkatkan literasi perbankan syariah. Karena itu, strategi pemasaran untuk meningkatkan literasi perbankan syariah yang dilakukan selama tahun 2021 adalah:

- Program talkshow "HarMoney Life"



HarMoney Life adalah sebuah program *Talkshow* ringan yang membawa topik-topik keuangan anak muda terkini berikut solusinya dipandu oleh host-host yang seru dan narasumber *certified financial planner* terpercaya, serta mendatangkan bintang tamu yang akan berbagi pengalaman mereka dan belajar bersama-sama penonton. Talkshow HarMoney Life sudah hadir dalam 2 *season* dan dapat ditonton di youtube official channel BSI.

- Event online Ramadhan Fest



Virtual festival terbesar di sepanjang bulan Ramadhan 1442 H dengan serangkaian acara mulai dari Kajian Islam & Talkshow dengan puluhan pembicara, music performance serta menghadirkan lebih dari 60 Exhibitor, serta dilengkapi promo special dari semua produk BSI.

- Special Campaign for Millenials: Gen-Sy (Generasi Syariah)



Gen-Sy [Gen-Si] adalah sebuah generasi baru yang percaya bahwa keseimbangan hidup yang sebenar-benarnya ada dalam keuangan syariah.

Melalui Gen-Sy, Bank Syariah Indonesia ingin mengajak milenial sekarang untuk mulai hidup seimbang. Seimbang antara waktu kerja dan keluarga, seimbang antara *self-reward* dan *investment*, hingga seimbang antara dunia dan akhirat.

Pangsa Pasar

Bank Syariah Indonesia dalam pertumbuhannya menghadapi persaingan dengan perbankan nasional, baik bank syariah maupun konvensional dalam menentukan penguasaan pasar.

Tabel Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Perbankan Syariah (Oktober 2021)

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

PANGSA PASAR PERBANKAN SYARIAH	URAIAN	OKTOBER 2020	OKTOBER 2021	PERTUMBUHAN
Aset	Bank Syariah Indonesia	231.756	250.236	7,97%
	Perbankan Syariah	585.337	650.006	11,05%
	Pangsa Pasar	**39,59%**	**38,50%**	
Pembiayaan	Bank Syariah Indonesia	153.864	164.639	7,00%
	Perbankan Syariah	387.939	418.441	7,86%
	Pangsa Pasar	**39,66%**	**39,35%**	
Pendanaan/DPK	Bank Syariah Indonesia	202.838	218.044	7,50%
	Perbankan Syariah	467.941	507.820	8,52%
	Pangsa Pasar	**43,35%**	**42,94%**	

Sumber: SPI dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Oktober 2021

Berdasarkan total aset, pangsa pasar Bank Syariah Indonesia Oktober 2021 sebesar 38,50% menurun 1,10% bps dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 yang mencapai 39,59%. Meskipun demikian, total aset BSI berhasil tumbuh sebesar Rp18,48 triliun. Dari sisi pembiayaan, pangsa pasar BSI Oktober 2021 mengalami penurunan dari 39,66% di Oktober 2021 menjadi 39,35%. Sedangkan untuk pangsa pasar pendanaan/dana pihak ketiga pada Oktober 2021 mencapai 42,94%, turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 42,94%.

Dari sisi pembiayaan, pangsa pasar BSI pada Oktober 2020 mengalami penurunan dari 39,66% menjadi 39,35% pada Oktober 2021. Sedangkan untuk pangsa pasar pendanaan/dana pihak ketiga pada Oktober 2021 mencapai 42,94%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 43,94%.

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2021

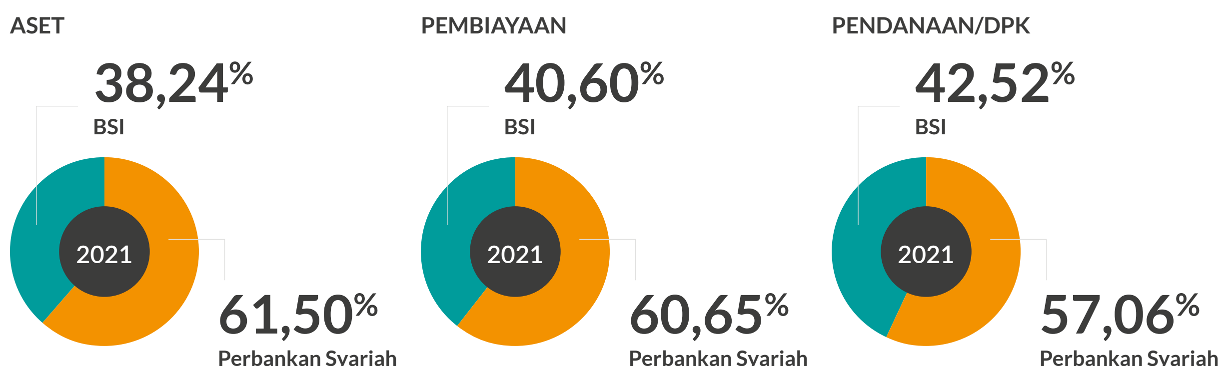
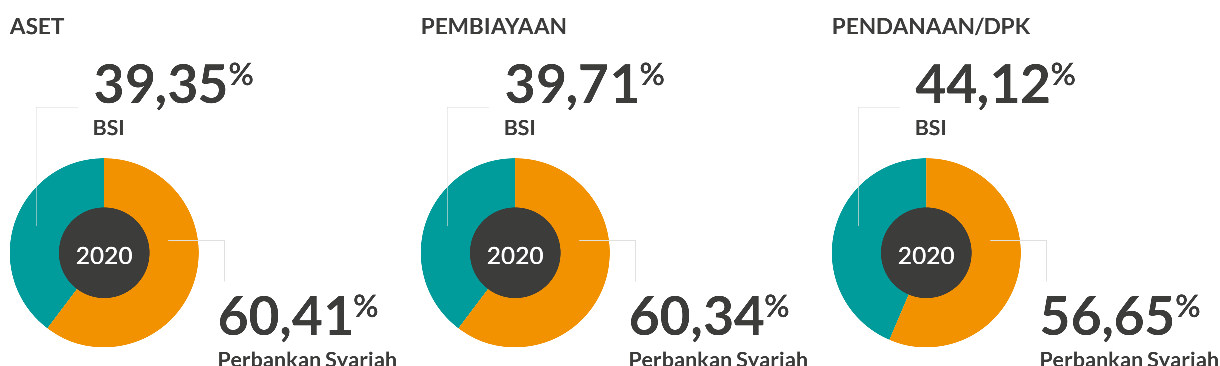


Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2020



Tabel Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Perbankan Nasional

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

PANGSA PASAR PERBANKAN SYARIAH	URAIAN	DESEMBER 2020	DESEMBER 2021	PERTUMBUHAN
Aset	Bank Syariah Indonesia	239,582	265,289	10.73%
	Industri Perbankan	608,898	693,795	13.94%
	Pangsa Pasar	**39.35%**	**38.24%**	
Pembiayaan	Bank Syariah Indonesia	156,694	171,291	9.32%
	Industri Perbankan	394,626	421,862	6.90%
	Pangsa Pasar	**39.71%**	**40.60%**	
Pendanaan/DPK	Bank Syariah Indonesia	209,906	233,251	11.12%
	Industri Perbankan	475,796	548,584	15.30%
	Pangsa Pasar	**44.12%**	**42.52%**	

Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan, Bank Syariah Indonesia juga menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan nasional di Indonesia. Berdasarkan total aset, pembiayaan, dan pendanaan/dana pihak ketiga pangsa pasar BSI pada Oktober 2021 masing-masing sebesar 2,50%, 2,85% dan 2,96%. Pembiayaan BSI tumbuh sebesar 2,85% YoY dibandingkan periode sebelumya.

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional Oktober 2021

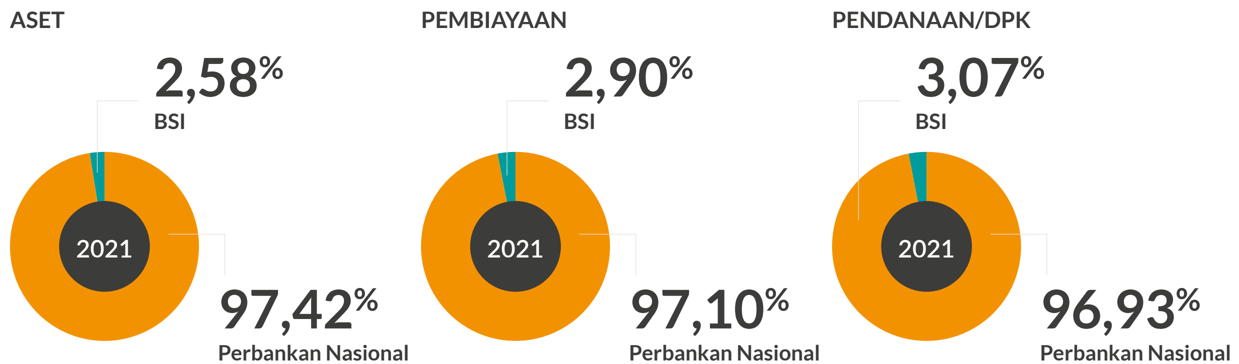
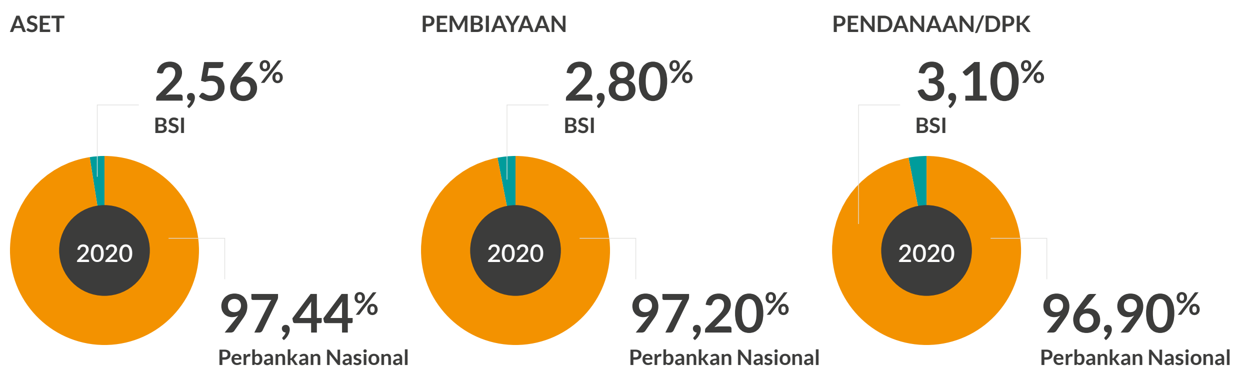
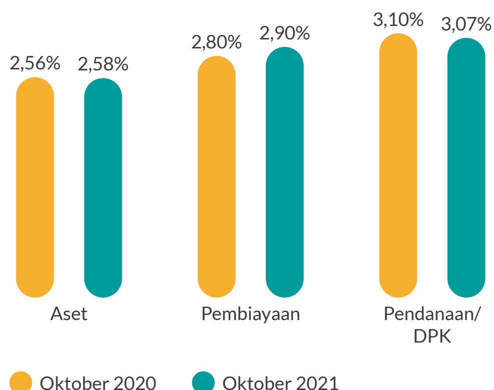


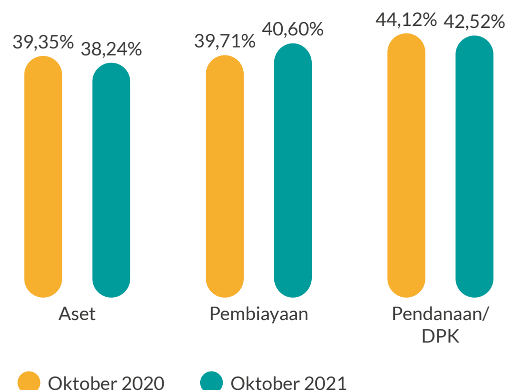
Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional Oktober 2020



Grafik Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional



Grafik Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah



KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Pada tahun 2021, BSI tidak membagikan dividen sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat disampaikan.

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bank Syariah Indonesia memiliki peran sebagai pemotong/pemungut pajak sebagai bentuk kontribusi kepada Negara. BSI berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek pajak. Pada tahun 2021 pembayaran pajak Bank mengalami kenaikan yang di antaranya bersumber dari angsuran PPh Badan.

Tabel berikut menyajikan rincian setoran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai satu wujud kontribusi kepada Negara:

Tabel Kepatuhan Pembayaran Pajak

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020
PPh Pasal 4 ayat 2	757.207	913.287
PPh Pasal 21	344.891	304.268
PPh Pasal 22	6.137	3.226
PPh Pasal 23	16.618	17.262
PPh Pasal 25	937.370	736.320
PPh Pasal 26	1.674	1.039
PPh Pasal 29	398.449	354.277
PPN	15.260	8.637
Jumlah	**2.477.606**	**2.338.316**

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

- *Employee Stock Allocation* (ESA) adalah program pemberian saham Bank kepada pegawai terpilih yang jumlahnya ditetapkan oleh Direksi dan pelaksanaan pendistribusian serta penerbitan saham akan dilakukan 1 (satu) kali pada tanggal alokasi ESA.
- Manajemen BSI telah menyetujui untuk melakukan pemberian *Employee Stock Allocation* (ESA) sebanyak 8.011.446 lembar saham kepada 13.734 pegawai sesuai dengan ketentuan internal.
- Harga *exercise*
  Harga saham = Rp 1.790 /lembar saham

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada 30 April 2018, Bank efektif melaksanakan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/* IPO) di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT Bank BRIsyariah Tbk. Dari aksi korporasi tersebut, Bank mendapatkan dana sebesar Rp1,3 triliun yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan, pengembangan sistem teknologi informasi dan pengembangan jaringan kantor. Seluruh rencana penggunaan dana hasil IPO tersebut telah direalisasikan seluruhnya pada tahun 2021 dan tidak ada perubahan.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

No.	NILAI (Rp Juta)	PERUNTUKAN
1	1.049.754	Penyaluran pembiayaan
2	164.024	Pengembangan sistem teknologi informasi berupa IT ready for IPO, IT for business enabler dan digital banking solution.
3	98.414	Pengembangan jaringan kantor dengan jumlah 11 KC, 45 KCP dan 10 KK yang telah mendapatkan izin OJK dan telah beroperasi.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

Investasi

Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) memiliki investasi pada surat berharga yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 . Nilai investasi pada surat berharga disajikan sebagai berikut.

Total Investasi pada Surat Berharga Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

URAIAN NILAI NOMINAL	2021		2020	
	NILAI TERCATAT	NILAI NOMINAL	NILAI TERCATAT	NILAI NOMINAL
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah (SBSN)	108,984	111,415	7,512	7,846
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	474,000	473,115	20,000	19,985
Sukuk Bank Indonesia	2,000,000	2,000,000	-	-
Reksadana	-	-	10,000	10,450
Total Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	**2,582,984**	**2,584,530**	**37,512**	**38,281**
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah (SBSN)	2,802,282	2,812,973	48,289	52,886
Reksadana	189,750	194,783	-	-
Total Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	**2,992,032**	**3,007,756**	**48,289**	**52,886**
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah (SBSN)	32,230,617	32,820,250	26,618,637	27,087,821
Sukuk Korporasi	1,271,600	1,271,600	2,783,600	2,783,600
Sukuk Bank Indonesia	26,935,010	26,935,010	18,481,917	18,481,917
Wesel Ekspor	204,786	204,786	89,219	89,219
	60,642,013	**61,231,646**	**47,973,373**	**48,442,557**
Mata Uang Asing				
Surat Berharga Syariah (SBSN)	753,245	771,899	592,828	596,771
Wesel Ekspor	1,314	1,314		
	754,559	**773,213**	**592,828**	**596,771**
Total Biaya Perolehan Diamortisasi	**61,396,572**	**62,004,859**	**48,566,201**	**49,039,328**
TOTAL INVESTASI PADA SURAT BERHARGA		**67,597,145**		**49,130,495**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		**(18,075)**		**(24,858)**
TOTAL INVESTASI PADA SURAT BERHARGA BERSIH		**67,579,070**		**49,105,637**

Ekspansi

Selama tahun 2021 BSI tidak melakukan kegiatan Ekspansi.

Divestasi

Selama tahun 2021 BSI tidak melakukan kegiatan Divestasi.

Akuisisi

Selama tahun 2021 BSI tidak melakukan kegiatan Akuisisi.

Restrukturisasi

Selama tahun 2021 Bank tidak melakukan transaksi atau hutang dan/atau restrukturisasi modal.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/ BERELASI

Transaksi material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009)

Transaksi Afiliasi

Bank mendefinisikan afiliasi, sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009). Sampai dengan akhir tahun 2021, Bank tidak memiliki transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009). Sampai dengan akhir tahun 2021, Bank Syariah Indonesia tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

a. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
b. Perusahaan asosiasi;
c. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
d. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam butir c di atas;
e. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
f. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Pihak Berelasi

PIHAK BERELASI	SIFAT DAN HUBUNGAN
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	Pemegang Saham Utama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang Saham Pengendali
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pemegang Saham Pengendali
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pemegang Saham Pengendali
PT BNI Life Insurance	Pemegang Saham
PT Mandiri Sekuritas	Pemegang Saham
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah	Pemegang Saham
Dana Pensiun Pusri Dapensri	Entitas dan Lembaga Pemerintah
KPPN Khusus Penerimaan	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Percetakan Negara Republik Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum BULOG	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum DAMRI	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum LPPNPI	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum Perhutani	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum Perumnas	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum Peruri	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum PNRI	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perum Produksi Film Negara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Adhi Commuter Properti	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Adhi Persada Beton	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Adhi Persada Gedung	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Adhi Persada Properti	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Aneka Tambang Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Angkasa Pura Hotel	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Angkasa Pura I (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Angkasa Pura Kargo	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Angkasa Pura Logistik	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Angkasa Pura Solusi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Angkasa Pura Supports	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Antam Resourcindo	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT ASABRI (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Asei Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

PIHAK BERELASI	SIFAT DAN HUBUNGAN
PT Asuransi Askrida Syariah	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi BRI Life	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Jasindo Syariah	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Jiwa Taspen	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Takaful Keluarga	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Tri Pakarta	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bahana Artha Ventura	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bahana TCW Investment Management	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Berdikari Logistik Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bio Farma (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Biro Klasifikasi Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT BNI Sekuritas	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT BRI Asuransi Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bringin Girgantara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bringin Rancang Sejahtera	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT BRIngin Sejahtera Makmur	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Bukit Asam Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Celebes Railway Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Citra Waspphutowa	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Cut Meutia Medika Nusantara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Danareksa (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Elnusa Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Fintek Karya Nusantara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Gapura Angkasa Cab Solo	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

PIHAK BERELASI	SIFAT DAN HUBUNGAN
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Graha Niaga Tata Utama	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Hakaaston	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Haleyora Powerindo	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT HK Realtindo	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Hutama Karya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Indonesia Comnets Plus	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Indonesia Kendaraan Terminal	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Indra Karya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT INKA (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Infrastruktur Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Inhutani IV	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Inhutani IV Distrik Aceh	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Inka Multi Solusi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Inti Bumi Perkasa	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Inti Konten Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Istaka Karya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jamsostek (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jasa Raharja Putera	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jasa Tirta Energi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Jiep (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kawasan Berikat Nusantara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT KBN Graha Medika	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kereta Api Logistik	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kimia Farma Apotek	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kimia Farma Trading & Distribution	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Kodja Terramarin	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Bandar Samudera	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Daya Listrik	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Industrial Estate	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Medika	Entitas dan Lembaga Pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

PIHAK BERELASI	SIFAT DAN HUBUNGAN
PT Krakatau National Resources	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Pipe Industries	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Sarana Infrastruktur	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Tirta Industri	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Krakatau Wajatama	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Laras Astra Kartika	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Len Industri (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT LRT Jakarta	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Maintenance Facility Aero asia Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Mandiri AXA General Insurance	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Mandiri Capital Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Mandiri Tunas Finance	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Mandiri Utama Finance	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Mega Eltra	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Mitra Transaksi Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Nusantara Medika Utama	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Nusantara Regas	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Nusantara Terminal Service	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PAL Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PAL Marine Service (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Patra Telekomunikasi Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pegadaian (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pelindo Husada Citra	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pemalang Batang Tol Road	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perkebunan Nusantara I	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perkebunan Nusantara III	Entitas dan Lembaga Pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

PIHAK BERELASI	SIFAT DAN HUBUNGAN
PT Perkebunan Nusantara IV	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perkebunan Nusantara VIII	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perkebunan Nusantara X	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perkebunan Nusantara XIII	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Persero Batam	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Bina Medika IHC	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina EP Cepu	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Gas	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Hulu Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina International Shipping	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Lubricants	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Power Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Retail	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertamina Trans Kontinental	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pertani (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Peruri Digital Security	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Peruri Properti	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pesonna Optima Jasa	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pindad (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PNM Investment Management	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PNM Venture Capital	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PP (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PP Presisi Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT PP Urban	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Prima Armada Raya	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Prima Indonesia Logistik	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pupuk Iskandar Muda	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pupuk Kujang Cikampek	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Entitas dan Lembaga Pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

PIHAK BERELASI	SIFAT DAN HUBUNGAN
PT Purna Sentana Baja	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Reasuransi Syariah Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Rekaindo Global Jasa	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Reska Multi Usaha	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Riset Perkebunan Nusantara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Rumah Sakit Pelabuhan	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Rumah Sakit Pelni	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sahung Brantas Energi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Semen Indonesia Beton	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Semen Padang (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sinergi Mitra Investama	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sinkona Indonesia Lestari	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sri Pamela Medika Nusantara	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sucofindo Advisory Utama	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Sucofindo Episi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Taspen (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Telekomunikasi Selular	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Terminal Petikemas Surabaya	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Terminal Teluk Lamong	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Timah Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT United Tractors Semen Gresik	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Varia Usaha Beton	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Wahana Sentana Baja	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas dan Lembaga Pemerintah
PT Wijaya Karya Realty	Entitas dan Lembaga Pemerintah
Karyawan Kunci	Pengendalian Kegiatan Perusahaan

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2021 dilakukan secara wajar (arm's length) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal dan sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Bank Syariah Indonesia dan bebas dari konflik kepentingan. Saldo aset, liabilitas, investasi tidak terikat, pendapatan usaha lainnya, beban administrasi, beban usaha lain, dan beban kepegawaian dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi

URAIAN	2021	2020
Aset	61.624.782	54.807.112
Prosentase terhadap jumlah aset	23,23%	22,88%
Liabilitas	1.633.482	2.848.434
Prosentase terhadap jumlah Liabilitas	2,64%	4,31%
Dana Syirkah Temporer	11.377.487	16.287.334
Prosentase terhadap jumlah Dana Syirkah Temporer	6,38%	10,73%

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi entitas pemerintah antara lain adalah giro pada bank lain, liabilitas segera, simpanan dari bank lain, investasi pada surat berharga, surat berharga subordinasi yang diterbitkan, penempatan pada bank lain, simpanan nasabah, surat berharga, serta piutang dan pembiayaan.

Kebijakan Mekanisme Review Atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Bank Syariah Indonesia memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen. Selama tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Dalam melakukan transaksi, khususnya dengan pihak berelasi, Bank telah memiliki prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh regulator. Dalam prosedur tersebut, Direksi menjadi bagian dari organisasi yang melakukan *review* terhadap rencana, realisasi dan evaluasi terhadap transaksi Bank. Dengan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai dan selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku umum, yang antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-lenght principle)

Salah satu tugas penting Komite Audit adalah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk publik atau pemangku kepentingan lain serta menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, transaksi dengan pihak berelasi menjadi bagian dari telaah dan pantauan Komite Audit.

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Karena itu, peran Komite Audit dan Dewan Komisaris menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2021, Bank Syariah Indonesia menghadapi sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Bank, yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
1	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	1. Penyesuaian sandi referensi dengan integrasi pelaporan – ANTASENA mencakup informasi sektor ekonomi, rincian informasi fasilitas, golongan pihak ketiga, negara, dan jenis valuta. 2. Tambahan referensi untuk mengakomodir kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus.
2	Peraturan Otoritas Jasa Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019	Pengaturan Kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dalam rangka menangani dan mengantisipasi dampak Covid19 antara lain: 1. Penetapan tata cara pelaksanaan kegiatan di pasar modal; 2. Penetapan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri di pasar modal; 3. Penetapan tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang pasar modal; 4. Penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan dokumen di bidang pasar modal; 5. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama pelaku industri di pasar; 6. Pemberian perintah kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan/atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menetapkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas pasar modal; dan/atau 7. Penetapan kebijakan lainnya. Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran Covid-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
3	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	1. Kewajiban mendaftarkan ARO user APOLO untuk menyampaikan Laporan Pengawasan RBB, laporan realisasi RBB dan laporan RBB dengan mempedomani POJK No. 63/POJK.03/2020 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan SEOJK No. 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Penyampaian Laporan Laporan Pengawasan RBB, laporan realisasi RBB dan laporan RBB melalui Sistem APOLO.
4	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	Penyesuaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai kriteria Asean Corporate Governance Scorecards (ACGS). Pencantuman Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.	1. Kewajiban penyesuaian komposisi portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan manajer investasi disesuaikan menjadi paling lambat 40 (empat puluh) hari bursa. 2. Kewajiban penyesuaian komposisi portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan manajer investasi isesuaikan menjadi paling lambat 20 (dua puluh) hari bursa. 3. Ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 130 (seratus tiga puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran reksa dana menjadi efektif. 4. Ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam angka waktu 160 (seratus enam puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran reksa dana menjadi efektif bagi reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks yang melakukan penawaran umum yang bersifat terbatas. 5. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi manajer investasi dan agen penjual efek reksa dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik. 6. Ketentuan mengenai manajer investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penyesuaian portofolio efek kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi penurunan peringkat atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum pada reksa dana. 7. Jangka waktu pemenuhan jaminan atas investasi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas pada efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. 8. Jangka waktu Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan dalam 180 (seratus delapan puluh) hari bursa, dalam hal permohonan manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana terkait stimulus dan relaksasi ketentuan pengelolaan investasi.
6	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.	1. Perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan. 2. Perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan yang dikeluarkan oleh penilai. 3. Pengaturan mengenai batas waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam rangka persetujuan pengunduran diri dan/atau pemberhentian sementara anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari setelah batas waktu berakhirnya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 4. Pengaturan mengenai kondisi tertentu Perusahaan Terbuka dalam melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
7	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/ POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.	1. Penyesuaian batas waktu stimulus penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berupa penilaian kualitas asset hingga 31 Maret 2023. 2. Penyesuaian batas waktu stimulus penyediaan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran SDM bagi BUK atau BUS tidak hanya berlaku untuk tahun 2020 dan 2021, tetapi juga untuk tahun 2022. 3. Penyesuaian batas waktu stimulus penetapan kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS yang diperoleh s.d. tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. 4. Penyesuaian batas waktu stimulus Capital Conservation Buffer (CCB) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
8	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.	1. Pengaturan tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. 2. Perubahan klasifikasi Bank dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). 3. Penyesuaian pembentukan capital conservation buffer sehubungan dengan pengelompokan bank menjadi KBMI.
9	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.	1. Penyesuaian mekanisme penerbitan produk baru dan/atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan Bank sendiri. 2. Pengaturan Produk Bank Dasar 3. Pengaturan Produk Bank Lanjutan.
10	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran	1. Klasifikasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terdiri atas PJP dan PIP. 2. Pengaturan kewajiban melakukan penilaian risiko secara self-asessment terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pembayaran berdasarkan kategori risiko untuk menentukan proses perizinan atau pelaporan.
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	1. Penyesuaian batasan rasio LTV/FTV untuk kredit properti (KP) / pembiayaan properti (PP) termasuk juga KP atau PP untuk pemilikan Properti Berwawasan Lingkungan atau KP atau PP konsumsi beragun properti berwawasan lingkungan. 2. Batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP dan batasan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) atau pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2021.
12	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 23/5/PADG/2021 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.	1. Penyesuaian pengaturan mengenai waktu implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), yaitu: a. Periode penyampaian LBUT terdiri atas: i. Parallel run penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021. ii. Implementasi penuh: penyampaian laporan dan/koreksi laporan sejak data Juli 2021. b. Pemberitahuan tertulis diberikan kepada bank yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Maret 2021 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021. c. Penyesuaian waktu implementasi LBUT tersebut berlaku surut sejak data bulan September 2020.
13	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 23/6/PADG/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.	1. Penyesuaian batasan rasio LTV/FTV untuk kredit properti (KP)/pembiayaan properti (PP) termasuk juga KP atau PP untuk pemilikan properti berwawasan lingkungan atau KP atau PP konsumsi beragun properti berwawasan lingkungan. 2. Batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP dan batasan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) atau pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2021.
14	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.	Perubahan batas nominal Transaksi QRIS yang sebelumnya dibatasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi diubah menjadi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per transaksi.
15	Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah	1. Penerapan SISMONTAVAR oleh Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara real time. 2. Kewajiban menyusun rencana tindak (action plan) terkait pemenuhan kewajiban koneksi atas transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dengan nasabah dan menyampaikannya ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 02 Juli 2021.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
16	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/7/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	1. Perluasan cakupan Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki/Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki yaitu dengan menambah komponen wesel ekspor dalam formula perhitungan RIM/RIM Syariah. 2. Pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap dengan memperhatikan Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF) dan KPMM. 3. Penambahan sumber data terkait wesel ekspor. 4. Penyesuaian Lampiran V yang memuat contoh perhitungan RIM/RIM Syariah dan PLM/PLM Syariah serta perhitungan sanksi kewajiban membayar.
17	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/11/PADG/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.	1. Penerapan SISMONTAVAR oleh Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara real time. 2. Kewajiban menyusun rencana tindak (action plan) terkait pemenuhan kewajiban koneksi atas transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dengan nasabah dan menyampaikannya ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 02 Juli 2021.
18	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/3/PADG/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.	1. Istilah "Modul PBK" diubah menjadi "Materi Pelatihan" agar selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020. 2. Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana yang tercantum dalam Lampiran 1 diubah agar sesuai dengan kebutuhan industri yaitu memisahkan Jenjang Kualifikasi SPPUR untuk penyelenggara transfer dana Bank dan penyelenggara transfer dana bukan Bank.
19	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 23/4/PADG/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia	1. Kewajiban memenuhi ketentuan persyaratan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; 2. Kewajiban melakukan konfirmasi atas: a. pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. pengajuan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
20	Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran	1. Perizinan pelaksanaan aktivitas penyedia jasa pembayaran. 2. Kewajiban melakukan edukasi dan pembinaan terhadap penyedia barang dan/atau jasa yang bekerja sama dengan BSI dalam rangka menjalankan aktivitas jasa sistem pembayaran. 3. Pengaturan kewajiban melakukan penilaian risiko secara self asessment terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pembayaran berdasarkan kategori risiko untuk menentukan proses perizinan atau pelaporan. 4. Dalam Pelaksanaan aktivitas PJP, wajib memenuhi standar penyelenggaraan akses ke sumber dana yang ditetapkan BI, termasuk standar nasional untuk interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran. 5. Pengaturan APMK. 6. Pengaturan uang elektronik.
21	Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran	Aktivitas penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran wajib terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari bank Indonesia dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang diatur dalam PBI ini.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
22	Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/8/PBI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	1. Penyesuaian pengaturan mengenai waktu implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). a. Periode parallel run penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Desember 2021. b. Periode implementasi penuh: penyampaian laporan dan/koreksi laporan sejak data Januari 2022. 2. Pemberitahuan tertulis diberikan kepada bank yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Maret 2021 sampai dengan data akhir bulan Desember 2021. 3. Semua istilah Laporan Harian Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum Syariah, Laporan Bulanan Bank Umum, Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang sudah ada dalam ketentuan Bank Indonesia sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai Laporan Bank Umum Terintegrasi sejak data bulan Januari 2022.
23	Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	1. Kewajiban melakukan pemenuhan RPIM dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. 2. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: a. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022; b. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023; dan c. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak posisi akhir bulan Juni 2024.
24	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/11/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran	Kewajiban pemenuhan kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
25	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/22/PADG/2021 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia	Pengaturan mengenai: 1. Nasabah yang dapat menjadi pemilik rekening giro meliputi pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia dan pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki rekening giro. 2. Jenis rekening giro meliputi rekening giro rupiah, rekening giro valas, dan rekening giro khusus. 3. Jenis status rekening giro yaitu aktif atau ditutup. 4. Pembukaan rekening giro. 5. Perubahan data dan rekening giro dilakukan apabila terdapat perubahan: nomor rekening giro atau nama rekening giro. 6. Perubahan status rekening giro. 7. Penutupan rekening giro. 8. Kewajiban pemilik rekening giro. 9. Tanggung jawab pemilik rekening giro. 10. Pembatasan rekening giro.
26	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/14/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Settlement Dana Seketika	1. Pengaturan mengenai kepesertaan antara lain pihak yang dapat menjadi Peserta dan persyaratan menjadi peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS; 2. Pengaturan mengenai pelaksanaan kliring dan penjaminan, kewajiban, pelaporan, dan sanksi dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
27	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 23/23/PADG/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System	1. Pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS serta fungsi dalam kepesertaan BI-SSSS; 2. Pemisahan kepesertaan dan perubahan status kepesertaan untuk pelaksana kliring dan penjaminan; 3. Kewajiban pelaksana kliring dan penjaminan, Sub-Registry yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dan Peserta BI-SSSS yang menerima data hasil kliring atas transaksi surat berharga; 4. Penatausahaan surat berharga milik nasabah yang dilakukan oleh Sub-Registry; 5. Pelaporan bagi pelaksana kliring dan penjaminan; 6. Penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat pada pelaksanaan kliring dan/atau penjaminan; dan 7. Pemantauan kepatuhan dan pengenaan sanksi administratif bagi pelaksana kliring dan penjaminan, Sub-Registry yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dan Peserta BI-SSSS yang menerima data hasil kliring atas transaksi surat berharga.
28	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	1. Kewajiban memberikan informasi kepada konsumen mengenai fitur produk dan/atau jasa yang paling sedikit memuat biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan, dan konsekuensi secara akurat, terkini, jujur, jelas, tidak menyesatkan, dan etis serta memastikan telah memberikan informasi kepada konsumen mengenai penolakan, penundaan, atau persetujuan atas permohonan produk dan/atau jasa. 2. Untuk menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan PADG ini. 3. Pedoman melakukan pemasaran dan iklan Produk dan/atau jasa yang diawasi BI. 4. Kewajiban melakukan edukasi guna meningkatkan literasi konsumen dan/atau masyarakat secara terencana, terukur dan berkelanjutan. 5. Kewajiban menyampaikan laporan rencana pelaksanaan edukasi dan laporan pelaksanaan edukasi secara tahunan. 6. Kewajiban Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
29	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment	1. Dalam hal Bank BSI akan menjadi peserta BI-FAST, maka BSI wajib memenuhi persyaratan sebagai Peserta BI-FAST sebagaimana diatur dalam PADG ini dan mengajukan permohonan tertulis disertai dengan dokumen pendukung untuk menjadi Peserta dengan terlebih dahulu meminta konsultasi kepada penyelenggara. 2. Memastikan tersedianya infrastruktur BI-FAST yang memperhatikan prinsip keamanan data dan sistem informasi. 3. Kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan berkala berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) BI-Fast kepada Bank Indonesia secara tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya 4. Kewajiban melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional BIFAST paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 5. Melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dengan mempedomani ketentuan PADG ini paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak menjadi peserta. 6. Kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil pengoperasian sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pengoperasian sistem cadangan selesai dilakukan.
30	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/16/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	Penyesuaian penghitungan GWM sehubungan dengan adanya BI-Fast.
31	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	Penyesuaian penghitungan RIM & PLM sehubungan dengan adanya BI-Fast.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
32	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/26/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	1. Pelonggaran ketentuan Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB, dengan batasan Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/6/PADG/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, diperpanjang menjadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 2. Tidak terdapat perubahan batasan rasio LTV untuk KP, rasio FTV untuk PP, dan uang muka untuk KKB atau PKB dalam PADG Perubahan Ketiga LTV/FTV dan Uang Muka.
33	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.	Penyesuaian ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PGB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
34	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021	Penerapan PPnBM terhadap pembiayaan kendaraan bermotor yang ditanggung oleh pemerintah.
35	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Berkoordinasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan Program PEN Penjaminan Korporasi khususnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dalam hal akan melaksanakan Program PEN Penjaminan.
36	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja.	1. Penyesuaian pengaturan kebijakan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. 2. Penyesuaian uang kompensasi PKWT, upah kerja lembur uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
37	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021	Penerapan insentif PPN dalam rangka meyesuaikan proses pembayaran PPN terhadap pembiayaan perumahan yang memenuhi persyaratan di tanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK No. 21/PMK.10/2021.
38	POJK No. 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	Penyesuaian terhadap cakupan, kriteria, tata cara, dan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKPU). 1. Penambahan LJK yaitu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 2. Pihak Utama yang tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi Bank sebagai berikut : a. PSP; b. anggota Direksi; c. anggota Dewan Komisaris; dan d. Pejabat Eksekutif. 3. Penambahan kriteria/cakupan Pejabat Eksekutif pada Bank. 4. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada LJK. 5. Penambahan cakupan penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat 6. Penambahan Tata Cara Penilaian Kembali 7. Konsekuensi hasil akhir penilaian kembali 8. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat 9. Kriteria Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus 10. Kriteria Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	KETENTUAN	DAMPAK
39	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.	Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Sistemik dan Bank selain Bank Sistemik tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan pokok pengaturan antara lain: 1. Penyusunan Rencana Resolusi; a. Rencana Resolusi (Resolution Plan) disusun oleh Bank dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh b. Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan c. Bank yang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (Resolution Plan) mencakup: i. Bank Sistemik; dan ii. Bank selain Bank SIstemik tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan mempertimbangkan ukuran Bank, kompleksitas kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan. d. Bank menyusun Rencana Resolusi (Resolution Plan) paling sedikit memuat: i. ringkasan eksekutif; ii. gambaran umum Bank; dan iii. strategi resolusi

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Akuisisi Terbalik

Efektif pada tanggal 1 Februari 2021, BRIS melakukan penggabungan usaha dengan Bank Syariah Mandiri ("BSM") dan BNI Syariah ("BNIS") dimana BRI Syariah ("BRIS") menjadi entitas yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS bubar demi hukum.

Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait kontrol atas Bank setelah penggabungan usaha, termasuk salah satunya yaitu pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank. Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- Pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank pada saat penyelesaian transaksi;
- Komposisi organ pengatur Bank didominasi oleh ex-legacy BSM;
- Komposisi manajemen senior Bank didominasi oleh ex-legacy BSM;
- Komposisi total aset, total pendapatan, dan laba pada saat penggabungan didominasi oleh ex-legacy BSM.

Dengan demikian, BSM dianggap sebagai pihak yang menerima bisnis dan BRIS (sebagai pihak yang mengakuisisi secara hukum) dianggap sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Laporan keuangan Bank merupakan keberlanjutan dari laporan keuangan BSM.

Pada 1 Februari 2021, BRIS menerbitkan 31.130.700.245 saham dengan nilai nominal Rp500 kepada pemegang saham BSM dan BNIS (setara dengan Rp15.565.350 juta). Saham baru yang diterbitkan tersebut menghasilkan 51,18% kepemilikan pemegang saham BSM, 25,03% kepemilikan pemegang saham BNIS di entitas setelah penggabungan. Jumlah saham BRIS yang beredar per 1 Februari 2021 sebanyak 41.031.208.943 saham atau setara dengan Rp20.515.604 juta.

Imbalan bersih yang dialihkan secara efektif yang timbul dari akuisisi terbalik sebesar Rp16.377.633 juta ditentukan dengan menggunakan nilai wajar saham BSM sebelum akuisisi, yaitu 599.437.496 saham dengan harga nilai wajar saham BSM sebesar Rp27.322 (rupiah penuh) per saham. Imbalan bersih dihitung berdasarkan jumlah saham yang harus dikeluarkan BSM kepada entitas induk yang sah untuk memberi pemilik entitas induk yang sah persentase kepemilikan yang sama dalam entitas gabungan (BSI).

Selisih antara imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dengan aset bersih yang diperoleh sebesar Rp11.003.573 juta dan sebesar Rp5.374.061 juta diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Penggabungan Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" di bagian ekuitas laporan posisi keuangan.

Sebagai akibat dari akuisisi terbalik, modal saham Bank disesuaikan untuk mencerminkan modal saham dari pihak yang melepas bisnis secara akuntansi sebesar Rp995.952 juta dengan penyesuaian terkait ke dalam akun "Tambahan modal disetor".

Total tambahan modal disetor yang timbul dari akuisisi terbalik senilai Rp6.370.013 juta merupakan penjumlahan antara selisih imbalan neto yang secara efektif dialihkan dengan nilai buku neto BNIS dan BRIS, ditambah dengan penyesuaian untuk mencerminkan modal Bank menurut hukum pada tanggal 1 Februari 2021.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Pada tahun 2021, kasus positif Covid-19 di Tanah Air yang mulai menurun mendorong peningkatan mobilitas masyarakat sehingga memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional. Membaiknya perekonomian tersebut ikut mendorong perbaikan kinerja perbankan nasional, yang ditandai dengan tumbuhnya penyaluran kredit.

Kendati demikian, pandemi Covid-19 masih terus harus diwaspadai sehubungan dengan munculnya varian baru, seperti Omicron. Sejak awal tahun 2022, virus tersebut mulai menjangkit banyak orang, sehingga kasus positif Covid-19 kembali meningkat.

Dalam menyusun strategi usaha, BSI telah mempertimbangkan beragam potensi risiko, termasuk kemungkinan masih adanya dampak Covid-19. Karena itu, Bank meyakini mampu menjaga kelangsungan usaha, mengingat Bank mampu melewati masa pandemi dengan sejumlah pencapaian kinerja yang sangat baik.

Pencapaian itu, antara lain ditunjukkan melalui peningkatan aset, dana pihak ketiga (DPK), tabungan, pembiayaan, laba dan lainnya. Dengan demikian, BSI tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha, karena mitigasinya telah disiapkan sejak awal.

Asesmen Manajemen atas Masalah tersebut

Manajemen BSI senantiasa melakukan evaluasi dan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Meskipun pada tahun 2021 secara umum semua kegiatan usaha dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 dan proses integrasi pasca merger, BSI berkeyakinan memiliki sumber daya dan menerapkan strategi yang tepat untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Optimisme tersebut juga didukung oleh kekuatan Bank di mana posisi BSI sebagai bank dengan aset terbesar ketujuh secara nasional, 1.365 jumlah jaringan *outlet*, lebih dari 19.000 pegawai dan jumlah nasabah di atas 15 juta serta fokus strategi yang telah dicanangkan untuk tahun 2022, yang mencakup:

1. Layanan keuangan terintegrasi
2. Digital: Superapps & Islamic Ecosystem
3. Penguatan Fundamental: IT & Digital, Risk Management, Human Capital
4. Peningkatan Kapabilitas Wholesale Transaction dan Kolaborasi dengan Retail

Asesmen dilakukan dengan mengacu pada berbagai faktor antara lain analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non-keuangan serta pencapaian kinerja dan histori kinerja Bank. Berdasarkan hasil asesmen, Manajemen BSI tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya, terlebih BSI merupakan gabungan dari 3 (tiga) bank *legacy* yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Asumsi yang Digunakan dalam Melakukan Asesmen

Asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha, antara lain:

1. Kondisi perekonomian global, nasional dan industri perbankan yang mulai beranjak pulih dari krisis akibat Covid-19.
2. Posisi Bank sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan layanan keuangan terintegrasi, sehingga peluang berkembangnya menjadi sangat besar.
3. Penerapan *Good Corporate Governace* (GCG).
4. Kekuatan permodalan BSI.
5. Evaluasi kinerja BSI yang dilakukan secara periodik.
6. *Stress test* yang dilakukan BSI secara periodik dalam menghadapi beberapa skenario.

PROSPEK USAHA

Pandemi Covid-19 diproyeksikan masih berlangsung, seperti ditandai dengan munculnya varian Omicron pada awal tahun 2022. Situasi ini akan berdampak pada kinerja industri perbankan nasional. Kendati demikian, proses perbaikan dan pemulihan pada industiri perbankan diprediksi masih tetap berlanjut. Penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan tahun 2022 diproyeksikan tumbuh masing-masing pada kisaran 5,5% ±1% *year on year* (yoy) dan 7,5% ±1% yoy.

BSI telah memiliki performa yang teruji di tahun 2021 dengan tercapainya berbagai *milestone*, seperti dengan selesainya *operational merger* di bulan November 2021. Karena itu, Bank memiliki peluang untuk terus tumbuh dengan melihat berbagai peluang antara lain sebagai berikut:

1. Permodalan dan likuiditas Bank yang semakin baik menjadi peluang untuk melakukan kegiatan investasi untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja Bank.
2. Bank memiliki infrastruktur yang memadai antara lain jaringan yang luas, sistem teknologi informasi (TI) dan digital yang mumpuni sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Memanfaatkan sinergi dengan Bank Induk dalam meningkatkan bisnis dan layanan Bank.
4. Jaringan syariah di pasar global sehingga terdapat peluang untuk menggarap pasar luar negeri.
5. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penetrasi *customer based* dan pengguna aktif *mobile banking*.
6. Peluang untuk melakukan *cross selling* antarproduk perbankan syariah (seperti pembiayaan konsumer, kartu kredit, investasi surat berharga, dan segmen korporasi)
7. Terdapat segmen kelas menengah muslim yang tengah bertumbuh sehingga memiliki potensi untuk masuk ke segmen nasabah prioritas.
8. Besarnya potensi ekosistem halal yang saat ini belum dioptimalkan dengan baik oleh bank syariah.

Berdasarkan asumsi tersebut disertai adanya berbagai peluang, Bank Syariah Indonesia optimistis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Bank Syariah Indonesia memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia yaitu:

1. Memiliki struktur permodalan yang kokoh dengan biaya dana yang murah.
2. Memiliki likuiditas yang terjaga dengan baik.
3. Merupakan bank syariah terbesar baik dari sisi dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan serta merupakan bank syariah terbaik dari sisi keberlangsungan bisnis.
4. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam memperkuat Industri Keuangan Syariah.
5. Memiliki dukungan kuat dari pemegang saham dan sinergi dengan Bank Induk.
6. Memiliki jaringan di pasar global.
7. Memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima baik dari dalam dan luar negeri.
8. Mempunyai komitmen organisasi untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
9. Memiliki komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme seluruh pegawai.
10. Memiliki struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
11. Jaringan kantor dan unit kerja yang sangat luas dengan memiliki lebih dari 1.300 jaringan sehingga mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi.
12. Berpengalaman/kokoh di segmen ritel, baik terkait *payroll*, Bank Operasional 2 (BO2), maupun di segmen korporasi.
13. Berpengalaman di bidang ekosistem halal antara lain haji, umroh, pesantren, pendidikan Islam, masjid, dan zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf).

Berdasarkan peluang-peluang tersebut, BSI telah menyusun target jangka pendek tahun 2022 dan target jangka menengah tahun 2023-2024, yang diurai sebagai berikut.

TARGET JANGKA PENDEK TAHUN 2022	TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2023-2024
Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia akan fokus pada: 1. Ekspansi pembiayaan pada segmen yang terbukti tahan di era pandemi. 2. Fokus pertumbuhan dana murah di antaranya melalui peningkatan kapabilitas transaksional dan intensifikasi kerja sama *payroll* dengan institusi. 3. Pengembangan digital *business* untuk meningkatkan layanan kepada nasabah baik nasabah institusi maupun nasabah ritail.	Target jangka menengah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah Indonesia akan berfokus pada: 1. Penguatan *wholesale* & *transactional banking* dengan fokus peningkatan *customer base* dan *deepening relationship.* 2. Penguatan *retail banking* dan turut menggerakkan ekonomi UMKM. 3. Meningkatkan ekspansi bisnis pada ekosistem halal dan pasar global. 4. Penataan jaringan kantor dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Setiap tahunnya Bank membayarkan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada Negara. Berikut adalah realisasinya.

Realisasi Pembayaran Pajak

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020
PPh Pasal 4 ayat 2	757.207	913.287
PPh Pasal 21	344.891	304.268
PPh Pasal 22	6.137	3.226
PPh Pasal 23	16.618	17.262
PPh Pasal 25	937.370	736.320
PPh Pasal 26	1.674	1.039
PPh Pasal 29	398.449	354.277
PPN	15.260	8.637
Jumlah	**2.477.606**	**2.338.316**

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Fungsi penunjang bisnis BSI memberikan dukungan penuh atas pencapaian kinerja usaha Bank pada tahun 2021.

18

Pengembangan dan inovasi TI yang dilakukan oleh Bank sepanjang tahun 2021.



Sumber Daya Manusia



Bank terus melakukan transformasi organisasi secara bertahap sejak *legal merger*. Pada tahun 2021, fokus BSI antara lain melakukan penyeragaman proses bisnis dan budaya kerja.

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank"), mengingat SDM yang berkualitas dan andal dapat memberikan kontribusi penting terhadap upaya pencapaian visi dan misi Bank. Terlebih lagi, Bank menargetkan "Menjadi Top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 (lima) tahun". Untuk mencapai target itu, SDM yang unggul menjadi salah satu keniscayaan yang harus dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, BSI memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM melalui beragam strategi yang komprehensif, serta melakukan evaluasi dan *monitoring* kinerja karyawan untuk memperoleh talenta (*talent pool*) SDM yang berkualitas. Bank juga senantiasa berupaya menciptakan *work life balance* dan suasana kerja yang kondusif, sehingga diharapkan para SDM mampu memberikan kinerja terbaiknya.

Organisasi Human Capital

Organisasi Human Capital memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Bank mulai dari strategi, kebijakan, implementasi dan layanan kepegawaian, termasuk pelatihan & pengembangan SDM, sejalan dengan strategi dan rencana korporasi Bank Syariah Indonesia.

Organisasi Human Capital memiliki tanggung jawab operasional meliputi:

1. Memimpin serta melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang di bidang *human capital* sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sistem perekrutan, penempatan, mutasi dan pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara komprehensif.
3. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan hubungan kerja yang produktif antara Bank dengan pegawai, termasuk pegawai secara individu serta hubungan antarpegawai (*employee relations*) dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
4. Menyusun dan memastikan pelaksanaan fungsi operasional unit kerja yang efektif dan responsif, serta Pengembangan sistem informasi *human capital* yang mutakhir, terintegrasi dan mudah digunakan oleh seluruh unit kerja.
5. Menyusun, mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi pelaksanaan *incentive system, benefits* dan *compensation* sesuai dengan *reward philosophy*, strategi serta kemampuan Bank.
6. Pengembangan Pegawai:
   a. Menyusun, mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi penyusunan strategi pengembangan *human capital* yang efektif melalui implementasi sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara efektif.
   b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank.
   c. Mengoordinasikan pengembangan strategi operasional yang mendukung akademi.
   d. Mengoordinasikan dan melakukan evaluasi atas implementasi strategi *learning and development*.
   e. Mengarahkan, mengoordinasikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank disajikan dengan produktivitas dan kualitas yang tinggi.

Sedangkan fungsi-fungsi di bawah Organisasi Human Capital mencakup:

a. Human Capital Strategy & Policy
   Mengelola dan mengarahkan penyusunan strategi dan produk kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia serta pengelolaan pengembangan pegawai dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi dan strategi perusahaan meliputi aktivitas *organization development, talent development & acquisition*, serta *performance & reward management*.
b. Human Capital Services
   Mengelola dan mengarahkan kegiatan administrasi operasional pengelolaan sumber daya manusia yang mengacu kepada peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berlaku dengan tujuan untuk memastikan proses administratif dan layanan berjalan efektif dan efisien searah dengan visi, misi dan strategi perusahaan, meliputi proses pengelolaan *payroll*, menjaga hubungan industrial yang harmonis, pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD), serta pengelolaan *human capital information system*.

c. Human Capital Business Partner
   Mengelola dan mengarahkan implementasi dari strategi, kebijakan dan program terkait pengelolaan SDM berjalan sesuai dengan visi, misi dan strategi Bank.
d. BSI Corporate University
   Menyediakan dan mengelola layanan pembelajaran dalam rangka pengembangan dan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas pegawai (offline atau online), pengelolaan *knowledge management* serta penyusunan kebijakan dan program internalisasi budaya yang berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis BSI.

Fokus 2021

Bank terus melakukan transformasi organisasi secara bertahap sejak *legal merger*. Pada tahun 2021, fokus BSI antara lain melakukan penyeragaman proses bisnis dan budaya kerja. Sebagai bentuk apresiasi, manajemen telah melakukan penyesuaian remunerasi, pemberian token bonus di tengah tahun, serta pemberian *employee stock allocation*.
Adapun transformansi organisasi & SDM pada tahun 2021 fokus pada:

- Integrasi kultur berlandaskan *core values* AKHLAK;.
- *Aligning* organisasi dan peningkatan produktivitas pegawai.
- Akselerasi kapabilitas SDM.

Pemenuhan Pegawai

Sistem pemenuhan kebutuhan pegawai yang andal merupakan salah satu proses kritikal, yang dimulai dengan proses identifikasi kebutuhan, kualifikasi yang dibutuhkan, mencari hingga menarik minat talenta terbaik di industri. Perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan bersamaan dengan rencana strategis tahunan. Untuk mengisi kebutuhan tersebut, dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal, dengan tetap mengutamakan sumber internal.

Adapun sumber pemenuhan pegawai melalui proses sebagai berikut:

1. **Seleksi Reguler**
   Jalur pemenuhan pegawai melalui kandidat dari:
   a. Baru lulus kuliah *(fresh graduate);* atau
   b. Memiliki pengalaman kerja maksimal 2 (dua) tahun untuk menempati jabatan pelaksana/staf di kantor pusat, regional office serta unit kerja di bawah koordinasinya.
2. ***Profesional Hire***
   Jalur pemenuhan pegawai melalui kandidat dengan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan kualifikasi seperti telah ditetapkan. Seleksi *professional hire* untuk menempati level jabatan *officer/manager/ middle manager/senior manager* disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
3. **Seleksi *Officer Development Program* (ODP)**
   Jalur pemenuhan pegawai kelompok jabatan *officer* dari kandidat eksternal dengan pendidikan minimal Strata Satu (S1) untuk dikembangkan menjadi pemimpin Bank di masa depan. Pada tahun 2021 BSI telah merekrut sebanyak 119 orang melalui jenis program ODP dengan rincian sebagai berikut:
   a. ODP General
   b. ODP Information Teknologi (IT)
   c. ODP Risk
   d. ODP Wholesale
   e. ODP Whealth Management

Pengembangan Karier

Salah satu misi BSI dalam rangka mewujudkan visinya sebagai "Top 10 Bank Syariah Global" adalah menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Upaya tersebut, antara lain direalisasikan melalui komitmen dalam pengembangan karier talenta terbaik di Bank.

BSI telah melakukan penyelarasan mekanisme dalam penerapan *talent development* dengan tujuan mengisi program pengembangan yang tepat dari setiap jenjang jabatan di Bank. Selain itu, BSI juga melakukan *talent identification* untuk menyaring pegawai berpotensi untuk disiapkan sebagai *successor* dalam menempati posisi-posisi kunci.

Pengembangan karier pegawai dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kelompok jabatan, mulai dari kelompok jabatan pelaksana sampai dengan kelompok jabatan senior manager. Pelaksanaannya melalui 2 (dua) jenjang, yaitu pengembangan karier jalur pelaksana dan jalur pimpinan.

Pengembangan karier pegawai pelaksana untuk menjadi pegawai pimpinan dilakukan melalui proses seleksi *Staff Development Program* (SDP). Sementara pengembangan karier pegawai pimpinan dilakukan melalui mutasi/rotasi/ promosi atau penugasan pegawai (*project assignment*), seperti penugasan ke Kementerian BUMN atau ke induk perusahaan.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, Bank membuat *talent management system* yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan data talenta serta sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, pada tahap awal, Divisi Human Capital Bank telah membuat kebijakan penempatan dan penugasan pegawai, yang salah satunya diatur mengenai panel kepegawaian yang mengatur terkait kewenangan pemutusan proses transaksi kepegawaian.

Budaya Kerja Perusahaan

Sebagai bagian dari konglomerasi BUMN, BSI menjadikan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai panduan dalam proses transformasi Sumber Daya Insani bagi Bank. Pedoman tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen, sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja Bank yang selaras dengan nilai-nilai utama (*core values*) yang telah ditetapkan.

Core values AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang diadopsi BSI diharapkan menciptakan *culture fit*, sehingga mampu mengakselerasi kinerja Bank. Ke depan, dengan budaya yang selaras di lingkungan BUMN dan afiliasinya, diharapkan memudahkan Insan BSI dalam proses *talent mobility* apabila dibutuhkan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam masa transformasi BSI, selain *roll-out* di jaringan kantor dan layanan harus berjalan dengan baik, BSI juga melaksanakan integrasi budaya (*culture integration*). Integrasi ini menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan komunikasi dan kerja sama yang lebih baik di antara pihak yang bergabung dan komitmen yang lebih besar untuk organisasi. Karena itu, proses internalisasi "BSI One Culture" menjadi sangat penting melalui program Culture Integration Activation (CIA).

Kegiatan internalisasi tersebut melibatkan seluruh jajaran manajemen/pengurus Bank, dari jajaran Direksi, Senior Executive Vice President, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah dan seluruh pegawai. Prosesnya berjalan secara intens (dilakukan secara harian, mingguan, maupun bulanan) berlandaskan *core values* AKHLAK seperti CIA Monthly Series, Taujih Pekanan Ber-AKHLAK dan Akhlak Is My Way.

BSI menyediakan sarana komunikasi non kedinasan 2 (dua) arah secara terbuka di antara seluruh jajaran Bank, yaitu melalui BSI Club serta BSI Muda, sebagai wadah bagi generesi milenial dalam membangun/membentuk/aktivasi komunitas di unit kerjanya. Hal ini diharapkan menjadi pemersatu Insan BSI dalam rangka mendukung visi misi Bank.

Bank telah melakukan survei internal terkait kegiatan internalisasi BSI One Culture di tahun 2021. Hasilnya, indeks internalisasi *core values* AKHLAK mencapai 97,7% (*High Implementation Index*). Sedangkan keselarasan *personal values* pegawai dan *current culture* terhadap "BSI One Culture" sebesar 96,9% (*High Alignment Index*).

Sistem Imbalan

Pengelolaan sistem imbalan adalah salah satu strategi Bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial yang kompetitif, namun tetap sesuai dengan kemampuan Bank. Tema utama kebijakan sistem imbalan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 adalah harmonisasi kebijakan dari bank *legacy* menjadi kebijakan Bank Syariah Indonesia sebagai dampak dari proses merger.

Reward diberikan oleh Bank dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* yang berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan *best practice* dalam industri perbankan. Untuk dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar, secara reguler, Bank berpartisipasi dalam Survei Gaji Tahunan (*Annual Salary Survey*) di industri perbankan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga survei independen yang kompeten.

Tujuan pemberian *reward* adalah untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, *retention* dan memotivasi pegawai terutama pegawai talenta. Selain itu, sebagai upaya menarik talenta terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga kesinambungan usaha.

Salah satu reward dalam bentuk finansial yang diberikan BSI kepada pegawai adalah bonus tahunan yang ditetapkan berdasarkan kinerja Bank, unit kerja dan pegawai. Bank juga memberikan penyesuaian gaji tahunan yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR), uang pelaksanaan cuti tahunan, dan uang cuti besar yang diberikan setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan.

Untuk terus dapat memotivasi pegawai dalam mencapai target bisnis, Bank juga dapat memberikan program insentif khusus. *Reward* tersebut mempertimbangkan nominal yang kompetitif serta menjaga internal *equity* dan risiko.

Reward yang bersifat non-finansial diberikan seperti distribusi program *Employee Stock Allocation* (ESA). BSI juga memberikan fasilitas bantuan yaitu beasiswa bagi anak pegawai yang meninggal dunia serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam dan kerusuhan.

Apresiasi lain yang berbentuk non-finansial juga diberikan kepada unit kerja dan individu berdasarkan inovasi terbaik yang berdampak kepada kinerja Bank. Termasuk di dalamnya, pencapaian khusus unit atau individu yang memberikan dampak signifikan terhadap bisnis, kinerja maupun reputasi BSI. Apresiasi tersebut diberikan pada acara "BSI Excellence Award" sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari Bank.

Selain *reward* finansial dan non-finansial, Bank juga memberikan benefit lain kepada pegawai, yaitu berupa fasilitas kesehatan, hari cuti, pembiayaan pegawai, dan fasilitas lainnya sesuai lokasi kerja dan jabatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa asuransi kesehatan dengan cakupan yang luas dan benefit yang terus ditingkatkan hingga kebutuhan layanan khusus, termasuk penyakit kritis dan tindakan yang memerlukan alat canggih.

Kesejahteraan

BSI memiliki beberapa program kesejahteraan sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap penciptaan SDM yang berkualitas dan produktif, sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya, di antaranya:

1. **Kesehatan**

   Kesehatan pegawai merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja pegawai sebagai individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank senantiasa berupaya menunjang kualitas kesehatan seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas *general medical checkup* dan fasilitas jaminan kesehatan kepada seluruh pegawai serta dengan mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan.

   Dalam masa pandemi, pegawai mendapatkan pembaharuan informasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dari pakar kesehatan dalam forum "Taujih Pekanan Ber-AKHLAK", sehingga pegawai dapat lebih termotivasi dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Selain terhadap pegawainya, Bank juga memberikan fasilitas kesehatan kepada keluarga pegawai. Setiap individu diharapkan dapat menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat sedini mungkin.

   Di samping itu, Bank Syariah Indonesia juga memiliki BSI Club, yang salah satu kegiatannya adalah olah raga yang diselenggarakan secara berkala. BSI Club juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan pegawai sekaligus media bagi pegawai untuk dapat bertukar pikiran guna meningkatkan kinerja Bank.
2. **Promosi**

   Bank memiliki sistem promosi baru yang mengacu kepada penilaian kinerja dan klasifikasi talent. BSI melakukan harmonisasi *grading* dan mekanisme promosi pada tahun pertama pasca merger. Dengan demikian, pelaksanaan promosi pada tahun 2021 bersifat selektif pada pegawai yang telah mendapatkan *probation* (Pj) sejak dari *legacy*.
3. **Pelatihan Pensiun**

   Bank telah menyusun kebijakan atas program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purnabakti agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan lebih terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai.

Penilaian Kinerja

BSI menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara transparan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pencapaian kinerja pegawai.
2. Mengembangkan budaya kerja perusahaan yang positif dan berorientasi kepada pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan *engagement* pegawai.

Proses pengelolaan kinerja dilakukan secara berkesinambungan dengan memastikan adanya keselarasan, yaitu dari penetapan *Corporate Goals* diturunkan menjadi target dan sasaran unit kerja hingga level individu. Dengan demikian, keselarasan strategi dari korporat ke individu terjaga serta ada keterkaitan antara kinerja individu terhadap kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja secara tahunan dimulai dari perencanaan kinerja (*performance planning*) untuk menyusun KPI (*key performance indicator*) pegawai, dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan pada pertengahan tahun (*mid year review*) untuk melihat progres pencapaian KPI pegawai di periode tersebut. Selanjutnya, diakhiri dengan evaluasi akhir tahun (*performance evaluation*) untuk menilai kinerja pegawai sejak awal hingga akhir tahun periode.

Dalam proses pengelolaan kinerja pegawai, Bank mengutamakan terciptanya komunikasi 2 (dua) arah antara pegawai dan manajer agar tercipta hubungan yang harmonis dengan pemberian saran perbaikan/umpan balik yang dapat diberikan oleh manajer untuk peningkatan kinerja pegawai, apabila diperlukan. Seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan secara *online* melalui sistem kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai/SIP) sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses maupun memudahkan penyimpanan seluruh informasi tentang kinerja pegawai. Umpan balik pada penilaian kinerja akhir tahun akan dijadikan rencana pengembangan pegawai di tahun berikutnya.

Remunerasi

Dalam pengelolaan remunerasi pegawai, Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:

1. *Pay for Performance*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya.
2. *Pay for Position*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya.
3. *Pay for Person*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

BSI senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar upah minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Bank senantiasa berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Tingkat *Turnover* Karyawan

Pada tahun 2021, jumlah karyawan yang tidak bekerja lagi di Bank sebanyak 604 orang atau 2,6% dari total karyawan yang berjumlah 19.449 orang . Penyebabnya beragam, dari pensiun alami, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Bank melakukan berbagai hal untuk membuat suasana kerja yang ideal.

PENYEBAB	2021
Pensiun Alami	60
Meninggal Dunia	35
Mengundurkan Diri	509
Jumlah	**604**

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

BSI secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Bank. Setiap pegawai dijamin oleh Bank memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Bank.

Rekapitulasi Program Pelatihan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
Program	Satuan penuh	1.079
Peserta Pelatihan	Orang	340.237
Rata-rata Hari Pelatihan	Hari	2,57
Mandays/Orang	Hari	7,11
Jumlah Jam Rata-rata	Jam	20,53
Man Hour	Jam	3.639
Man Day	Hari	455

Biaya Pengembangan SDM

Bank mengalokasikan anggaran pelatihan pada tahun 2021 sebesar Rp120 miliar dengan realisasi Rp82,646 miliar.

Demografi Karyawan

Informasi mengenai hal ini disajikan dalam bab "Profil Perusahaan".

Perencanaan Pengelolaan SDM Tahun 2022

Untuk tahun 2022, pada periode Januari sampai Juni, BSI akan membentuk susunan organisasi yang lebih ramping dengan melakukan *merger* atas organisasi-organisasi transisi. Kemudian pada periode Juli sampai Desember, Bank akan melakukan transformasi organisasi yang lebih *lean* dan *agile* agar membuat proses bisnis menjadi ringkas dan cepat, serta memperkuat pada segmen *wholesale*, investasi, dan kompetensi bisnis internasional dalam rangka mencapai visi BSI menjadi Top 10 Global Islamic Bank.

Teknologi Informasi



Seiring dengan perkembangan TI yang dilakukan secara berkesinambungan, Bank melakukan transformasi semua cabang tradisional perbankan menjadi *bionic banking* serta menginisiasi *digital banking*.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") menilai bahwa penerapan dan pengembangan teknologi informasi (TI) sangat penting, karena bertujuan untuk mendukung pencapaian visi Bank: "Menjadi Top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 (lima) tahun". Melalui TI, BSI dapat senantiasa meningkatkan layanan prima (*service excellent*) bagi nasabah.

Seiring dengan perkembangan TI yang dilakukan secara berkesinambungan, Bank melakukan transformasi semua cabang tradisional perbankan menjadi *bionic banking* serta menginisiasi *digital banking*. *Bionic Banking* dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi cabang yang didukung oleh TI.

Sementara *digital banking* ditujukan untuk melayani *existing customer* dan menambah *customer based* melalui digital *platform*. Upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap strategi Bank dalam menghadapi persaingan digitalisasi di industri keuangan, terutama perbankan.

Profil Kepala TI

Organisasi pengelolaan TI dipimpin oleh Direktur Teknologi Informasi dan Operasional, Achmad Syafii. Profil lengkapnya disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

Organisasi Pengelola

Organisasi pengelolaan TI di lingkungan BSI berada di bawah Direktorat IT & Operation, yang didukung oleh struktur di bawahnya: IT Operation Group (IOG), IT Strategic Planning Group (ISG), IT Development Group (IDG), dan CISO Office Group (CISO).

IOG menjalankan tugas operasional TI, sementara aktivitas perencanaan strategi dilakukan oleh ISG. Sedangkan pengembangan TI dilakukan oleh IDG dan pengamanan informasi dijalankan oleh CISO.

Unit Kerja Financing Operations, Cash & Trade Operations, Customer Care, Digital Banking & E-Channel Operations menjalankan penerapan operasional perbankan sehari-hari. Namun demikian, implementasi operasional TI yang dimulai dari perencanaan, pengembangan dan penanganan masalah, menjadi tanggung jawab dari unit kerja IT Strategic Planning & Development, IT Operations dan CISO.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab organisasi TI diurai dalam tabel berikut.

UNIT KERJA	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
IT Operation Group	1. Memastikan ketersediaan infrastruktur TI dan kelangsungan operasional. 2. Melaksanakan *business continuity management*. 3. Menjaga ketersediaan jaringan untuk mengelola operasional.
IT Strategic Planning Group	1. Memastikan perencanaan dan pelaksanaan proyek inisiatif strategis TI yang sesuai dengan rencana Bank. 2. *Monitoring* terhadap pelaksanaan *project* dan *budgeting*.
IT Development Group	1. Memastikan pelaksanaan aktivitas pengembangan TI sesuai dengan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis bank serta sesuai ketentuan Bank. 2. Memastikan pelaksanaan pengembangan TI mencakup mengelola spesifikasi fungsional dan teknis, mendefinisikan dan merancang solusi, mengelola *developers*, mengelola *development* dan *unit testing*, menyediakan *support* untuk *application deployment/ releases* sesuai dengan kebijakan dan prosedur TI 3. memastikan pelaksanaan perencanaan (*design*), pengembangan (*development*), system integration test dan perbaikan penyempurnaan *platform*.
CISO Office Group	1. Bertanggung jawab terhadap keamanan informasi TI, termasuk di dalamnya berperan dalam proses perencanaan dan pengembangan TI dari sisi keamanan informasi. 2. Menangani insiden keamanan informasi (proteksi, respons, dan *recovery cyber security*).
Financing Operation Group	Bertanggung jawab terhadap fungsi administrasi pembiayaan, termasuk di dalamnya berperan terkait *collateral valuation, compliance review, posting dan maintenance, dokumen safe keeping* dan *reporting*.
Cash & Trade Operation Group	1. Memastikan tersedianya serta terlaksananya operasional Bank, transaksi domestik & internasional, rekonsiliasi transaksi, serta rencana perbaikannya untuk mencapai operasional Bank yang *prudent* dan sesuai SLA. 2. Memastikan tersedianya kebijakan dan infrastruktur yang dibutuhkan terkait *business continuity management* operasional di Bank. 3. Menjadikan unit kerja *strategic patner* bagi unit lain untuk mendukung pencapaian target Bank.
Customer Care Group	1. Bertanggung jawab terhadap peran layanan yang prima kepada pelanggan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. 2. Memastikan segala informasi perbankan dapat diterima oleh pelanggan.
Digital Banking & E-Channel Operation Group	1. Memastikan pelaksanaan transaksi *digital banking* beserta rekonsiliasinya berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan. 2. Meningkatkan standar kualitas layanan operasional *digital banking*, baik dari sisi keandalan sistem dan *service* kepada nasabah. 3. Memastikan penyelenggaraan dukungan operasional *digital banking* untuk seluruh jaringan BSI.

Roadmap di Bidang TI

Perencanaan dan pengembangan TI di BSI berkenaan dengan teknologi dan infrastruktur dalam rangka mendukung strategi Bank periode 2021-2023. Di antara strategi tersebut, terkait dengan *core banking system* dan *digital bank*.

Dalam mendukung strategi tersebut , BSI menerapkan program yang tercantum dalam "7 IT Stars" (*Strategic Action* dan *Programs*) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Security, Risk and Fraud*
   Menetapkan dan meningkatkan perimeter keamanan, manajemen risiko, penipuan & AML untuk melindungi transaksi dan proses nasabah dan perbankan.
2. *Core system modernization*
   Pelaksanaan inisiatif modernisasi *core banking* untuk menyederhanakan sistem yang telah ada, meningkatkan fungsi *core*, serta memungkinkan *core banking* generasi berikutnya mendukung produk dan layanan perbankan yang kaya/beragam.
3. *Infrastructure & Connectivity*
   Pembentukan dan peningkatan infrastruktur dan alat konektivitas, aplikasi serta *hardware* yang menggabungkan berbagai teknologi untuk mendukung bisnis Bank.
4. *Integrated data management and monitoring*
   Pembentukan dan peningkatan *enterprise data warehouse* dan big data analisis untuk mengaktifkan *data-as-a-service* serta alat manajemen informasi yang digunakan karyawan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan secara mandiri.
5. *Organisation, Corporate Support & Internal Improvements*
   Pembentukan dan peningkatan fungsi inti perusahaan untuk mendukung operasional bank dan proses internal serta perbaikan organisasi.
6. *Unified Platform & Customer 360*
   Penggunaan satu *platform* utama untuk menampung seluruh kapabilitas alur kerja yang dibantu oleh peningkatan pusat data dan layanan nasabah terpadu (*customer relationship*) pada area *sales*, *marketing*, dan *campaign management* untuk meningkatkan *engagement* pada nasabah.
7. *Digital Expansion & Open Banking*
   Peningkatan, dan perluasan jaringan distribusi digital, *sales*, layanan *omni-channel* termasuk dengan peningkatan kapabilitas integrasi dengan berbagai metode dan strategi untuk memungkinkan *open banking* dengan konektivitas tanpa batas dan aman secara internal dan eksternal.

Pada tahu 2021, Bank telah mengimplementasikan "7 IT Stars", seperti diuraikan melalui tabel di bawah ini:

NO.	7 IT STARS	REALISASI PROYEK
1	*Security, Risk and Fraud*	1. *License Software* 2FA 2. *Activate Antivirus Firewall Fortigate* 3. Perangkat *Security* (*Next Generation Firewall*) DRC (2-set) 4. *Repeat Order* Perangkat WAF (*Web Application Firewall*) (Web DRC (2-set) 5. *Upgrade* ESET *Endpoint Antivirus*, ESET Proxy dan ESET *Management Server* (untuk kebutuhan Merger) 6. *Refreshment* DNS *Server* dan *Security* 7. Pengadaan Aplikasi *Sanction Screening* 8. Pengadaan HSM *Data Center* dan DRC 9. *Fraud Application & Mitigation System* (FAMS) 10. *Refreshment Firewall Application* DRC 11. *Threat Intelligence* 12. *Endpoint Detection and Response*
2	*Core system modernization*	1. *Core Banking T24* Konsolidasi 2. *Enhancement EXA* 3. Treasury Core System 4. Pengembangan Program Rekonsiliasi Citynet 5. *Digital Value Chain*
3	*Infrastructure & Connectivity*	1. Pengadaan Perangkat *Router* DC Kantor Cabang 2. Pengadaan Perangkat *Router* Replika DC DRC 3. Pengadaan *Repeat Order* Pengadaan Perangkat *Router* Internet (Perangkat Jaringan Komunikasi Internet DRC) 4. Pengadaan SAN Switch DC Sudirman 5. Pengadaan *Desktop Management* 6. *Replacement* dan *upgrade Server* 7. *Upgrade* lisensi virtualisasi server (Vmware) 8. *Upgrade storage* aplikasi digital banking dan aplikasi pendukung lainnya 9. Pengadaan Lisensi SQL Server dan *License* Windows Server 10. Pengadaan Perangkat Core Switch DC 1B & Core Switch DRC Fase II 11. Pengadaan Perangkat Jaringan Komunikasi Fase 1 berupa (Core Switch) DC Ragunan 12. Pengadaan Perangkat *Router* DC ATM 13. *Critical Server, Storage, Network, License & Security* 14. *Infrastructure Network* Kantor Pusat & Kantor BSI Tebet 15. *Refreshment* Perangkat *Network* Kantor Cabang 16. *License Elastic* ELK
4	*Integrated data management monitoring and monitoring*	*Real Time Data Replication*
5	*Organisation, Corporate Support & Internal Improvements*	1. Pengadaan *Upgrade License* SIP 2. Integrasi & *Enhancement* Aplikasi *Surrounding* 3. Qanun Aceh (bantuan sosial, dan BSI Smart)

NO.	7 IT STARS	REALISASI PROYEK
6	*Unified Platform & Customer 360*	1. *Swift Mandatory* 2. *Acquisition Tools* 3. Transaksi Reksa Dana *Online* 4. *Enhancement Originating System (NOS)*
7	*Digital Expansion & Open Banking*	1. *Enhancement BSI Mobile* 2. *Enhancement Switching* 3. *BI - Fast Payment* 4. *Customer Online Onboarding – Biometric* 5. Penambahan Mesin Perso Kartu 6. BSI *Smart VA*

Tata Kelola TI

Dalam hal ini, penerapan pengembangan TI dan *software* di lingkungan Bank untuk mendukung penyelesaian sebuah proyek dengan menggunakan metode *waterfall* yakni pembagian fase dalam pengerjaan proyek dimulai dari *requirement*, *design*, *development*, *testing*, *Release Control Board* (RCB), *deployment* ke *environment production*, hingga *post implementation Review* (PIR).

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dalam proyek, dari sebuah proyek, muncul metode manajemen proyek baru, yakni metode *agile*. Metode ini dijalankan dengan menggunakan pembagian *sprint* dengan target di setiap *sprint*.

Bank menerapkan metode *agile* pada produk *digital channel*, seperti BSI Mobile, BSI Netbanking, dan API. Alasan penggunaan metode tersebut karena produk digital dituntut untuk terus berinovasi dan lebih cepat dalam *time to market* agar *value* kepada nasabah meningkat. Pada metode *agile*, literasi dilakukan terus menerus selama *product development life cycle*. *Framework* yang digunakan oleh Bank dalam penerapan metode *agile* adalah *Scrum*.

Investasi di Bidang TI

Total investasi yang direalisasikan BSI pada tahun 2021 mencapai Rp. 229,4 Miliar. Anggaran tersebut untuk mendukung pemenuhan kapabilitas *Digital Banking*, *Enterprise & Surrounding Application*, Digitalisasi & *Office Automation*, *Enhancement* fitur pada aplikasi *existing* serta belanja infrastruktur TI dan perangkat *security* dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas TI.

Pengembangan dan Inovasi TI Tahun 2021

Pengembangan TI dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun, yang diselaraskan dengan visi dan misi Bank. Berikut adalah daftar pengembangan dan inovasi yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2021.

NO.	URAIAN	TUJUAN/MANFAAT	STATUS
1	Customer Online Onboarding - Biometric Verification (E-KYC)	Mempercepat *service level agreement* (SLA) dan meningkatkan *customer experience* dalam proses pembukaan rekening BSI secara *online* melalui BSI Mobile, sehingga mendorong akuisisi nasabah baru BSI melalui kanal digital.	*Live*
2	BSI Smart Virtual Account (VA)	Peningkatan transaksi dan *fee based income* melalui kerja sama pemanfaatan *virtual account* dengan institusi pemerintahan, perusahaan dan pihak ketiga lainnya.	*Live*
3	Treasury Core System	Peningkatan kapabilitas sistem terkait transaksi *treasury & global market*.	*Live*
4	Threat Intelligence	Sistem ini membantu tim keamanan TI untuk memahami motif, target, serta pola perilaku penjahat siber yang mencakup taktik atau teknik, dan prosedur yang digunakan.	*Live*
5	BI-Fast Payment	Penyediaan infrastruktur SP Ritel yang lebih aman, efisien, tersedia secara *realtime* 24/7 untuk melayani transaksi pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah serta aman dan andal.	*Live*
6	Fraud Application & Mitigation System (FAMS)	Sistem mempunyai *fuzzy match* dan *parameter based* juga digunakan dalam rangka membangun *database blacklist/fraud* yang terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas *screening* pada *incoming* aplikasi yang masuk baik untuk produk pembiayaan maupun produk tabungan.	*Live*
7	Penambahan License SIP	Penambahan *License Sunfish* untuk kebutuhan merger dan penambahan spesifikasi server, *back Up data employee*, data *warehouse* pegawai non aktif.	*Live*
8	Pengadaan Perangkat Router DC Kantor Cabang	Peningkatan kapabilitas *network* di kantor cabang BSI.	*Live*

NO.	URAIAN	TUJUAN/MANFAAT	STATUS
9	Pengadaan Perangkat Router Replika DC DRC	Peningkatan kapabilitas *network* DC DRC.	*Live*
10	Pengadaan Desktop Management	Pengadaan ini diperlukan untuk operasional yang memerlukan mobilitas tinggi.	*Live*
11	Pengadaan SAN Switch DC Sudirman	Pengadaan yang diperlukan untuk konektivitas server dan *storage*.	*Live*
12	Activate Antivirus Firewall Fortigate	Peningkatan kapabilitas keamanan sistem BSI yang mampu melindungi dari serangan *virus, malware, spam* dan serangan jenis lainnya.	*Live*
13	Replacement dan Upgrade Server	Mengoptimalkan transaksi bisnis dan operasional, mengantisipasi lambatnya memproses transaksi yang sifatnya massal.	*Live*
14	Upgrade lisensi virtualisasi server (Vmware)	Untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan *maintenance capacity* dengan teknologi *virtual server*.	*Live*
15	*Enhancement EXA*	Untuk mendukung digitalisasi bisnis proses BSI.	*Live*
16	License Software 2FA	Untuk keamanan dalam mengakses aplikasi.	*Live*
17	Pengadaan HSM Data Center dan DRC	Meningkatkan kapabilitas keamanan *hardware*.	*Live*
18	Perangkat Security (Next Generation Firewall) DRC (2-set)	Meningkatkan kapabilitas keamanan server.	*Live*
19	Repeat Order Perangkat WAF (Web Application Firewall) (Web DRC (2-set)	Meningkatkan kapasitas keamanan server .	*Live*
20	Upgrade ESET Endpoint Antivirus , ESET Proxy dan ESET Management Server (Keb. Merger)	Meningkatkan keamanan perangkat *user*.	*Live*
21	Refreshment DNS Server dan Security	Meningkatkan kapabilitas keamanan server .	*Live*
22	Pengadaan Aplikasi Sanction Screening	Untuk meningkatkan kemampuan proses *screening* atas nasabah serta pelaporan.	*Live*
23	Refreshment Firewall Application DRC	Meningkatkan kapabilitas keamanan *firewall*.	*Live*
24	Endpoint Detection and Response	Meningkatkan kemampuan keamanan perangkat *user*.	*Live*
25	Pengadaan Repeat Order Pengadaan Perangkat Router Internet (Perangkat Jaringan Komunikasi Internet DRC)	Meningkatkan kapabilitas infrastruktur *network* BSI.	*Live*
26	Pengadaan Perangkat Router DC ATM	Meningkatkan kapabilitas infrastruktur *network* BSI.	*Live*
27	*Core Banking T24* Konsolidasi	Mengimplementasikan *single system core banking* T24 atas konsolidasi 3 (tiga) Bank.	*Live*
28	*Enhancement EXA*	Single sistem untuk *branch delivery system*.	*Live*
29	Pengembangan Program Rekonsiliasi Citynet	Otomasi proses rekonsiliasi transaksi di BSI.	*Live*
30	Digital value chain	Sistem layanan transaksi *supply chain management* di BSI.	*Live*
31	Upgrade storage aplikasi digital banking dan aplikasi pendukung lainnya	Meningkatkan *performance* dan kapasitas layanan BSI.	*Live*
32	Pengadaan Lisensi SQL Server dan License Windows Server	Peningkatan kapabilitas infrastruktur BSI.	*Live*
33	Pengadaan Perangkat Core Switch DC 1B & Core Switch DRC Fase II	Peningkatan kapabilitas infrastruktur BSI.	*Live*
34	Pengadaan Perangkat Jaringan Komunikasi Fase 1 berupa (Core Switch) DC Ragunan	Meningkatkan kapabilitas infrastruktur jaringan BSI.	*Live*
35	Critical Server, Storage, Network, License & Security	Meningkatkan performa dan kapasitas layanan BSI.	*Live*

NO.	URAIAN	TUJUAN/MANFAAT	STATUS
36	Infrastructure Network The Tower & BSI Tebet	Meningkatkan kapabilitas infrastruktur BSI	*Live*
37	License elastic ELK	*Monitoring* terhadap informasi dan *event security*	*Live*
38	*Real Time Data Replication*	Memberikan solusi *realtime data replication* dan implementasi.	*Live*
39	*Integrasi & Enhancement Aplikasi Surrounding*	Untuk penambahan media konsolidasi atas aplikasi *surrounding system* 3 (tiga) bank syariah.	*Live*
40	Qanun Aceh (bansos, BSI Smart)	Digitalisasi layanan keagenan Laku Pandai melalui aplikasi berbasis *mobile* dan *web based*. Aplikasi ini membantu percepatan penyaluran program bantuan sosial di Aceh dari pemerintah.	*Live*
41	Swift Mandatory	Pemutakhiran kapabilitas SWIFT sesuai dengan ketentuan dari regulator.	*Live*
42	Acquisition Tools	Digitalisasi proses akuisisi nasabah pembiayaan sehingga mempercepat proses pembiayaan nasabah mulai dari akuisisi hingga *disbursement*.	*Live*
43	*Enhancement BSI Mobile*	Peningkatan *user* aktif dan *fee based* transaksi digital.	*Live*
44	*Enhancement Switching*	Peningkatan *user* aktif dan *fee based* transaksi digital.	*Live*
45	Penambahan Mesin Perso Kartu	Untuk peningkatan *income* atas perluasan cabang BSI.	*Live*
46	Transaksi Reksa Dana Online	Sistem yang berfungsi untuk menampilkan serta mengolah portfolio nasabah untuk melakukan pengelolaan keuangan.	*Live*
47	*Enhancement Originating System* (NOS)	Pengembangan Nos pada proses pembiayaan nasabah sehingga dapat mempercepat proses pembiayaan	*Live*

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman karyawan serta penyelarasan strategi Teknologi Informasi dalam mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan *IT Strategy* di BSI.

Selain itu, program pelatihan dan pengembangan SDM untuk dapat membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, loyalitas kerja. Dalam hal ini peningkatan personal TI yang dilakukan dengan melakukan pelatihan, sertifikasi, BSMR, webinar dan taujih.

Berikut adalah daftar pengembangan SDM TI yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2021.

NO.	NAMA PELATIHAN
1	Product Management
2	Training dan Certified - IASA IT Architecture Core (CITA-F)
3	ISTQB Testing Certification
4	Togaf Framework
5	Business IT Alignment
6	Aligning IT and Business Strategy
7	Bootcamp Product Management
8	Business Process Modeling Using BPMN
9	Agile Scrum Master
10	Comptia Project
11	Digital Transformation Program
12	Implementing Governance Of Enterpriza IT (IT Governance): Concepts, Strategies, Techniques and Tactick
13	IT Investment and IT Budgeting
14	Core Banking System
15	Design Thinking
16	Project Management Certification Preparation For PMP, CAPM, MPM and Project
17	Training API & Open Banking
18	Training Business Continuity Management Batch 1
19	IT Vendor Management
20	Sertifikasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko



Peringkat komposit profil risiko Bank tahun 2021 adalah “2 (dua)” dengan predikat risiko inheren “*Low to Moderate*”, dan predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah “*Satisfactory*”.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") memandang bahwa penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Kebijakan tersebut merupakan sangat penting untuk merespons dinamika eksternal, yaitu lingkungan usaha yang berkembang dengan pesat.

Bank mengelola risiko dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan ketentuan dari regulator serta best practice di industri. Penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Bank secara individu dan entitas afiliasi dari dampak perubahan di lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Bank.

Bank menerapkan manajemen risiko yang mencakup empat pilar, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern. Efektivitas penerapan manajemen risiko tersebut akan dikaji ulang secara berkala.

A. Landasan Penerapan Manajemen Risiko

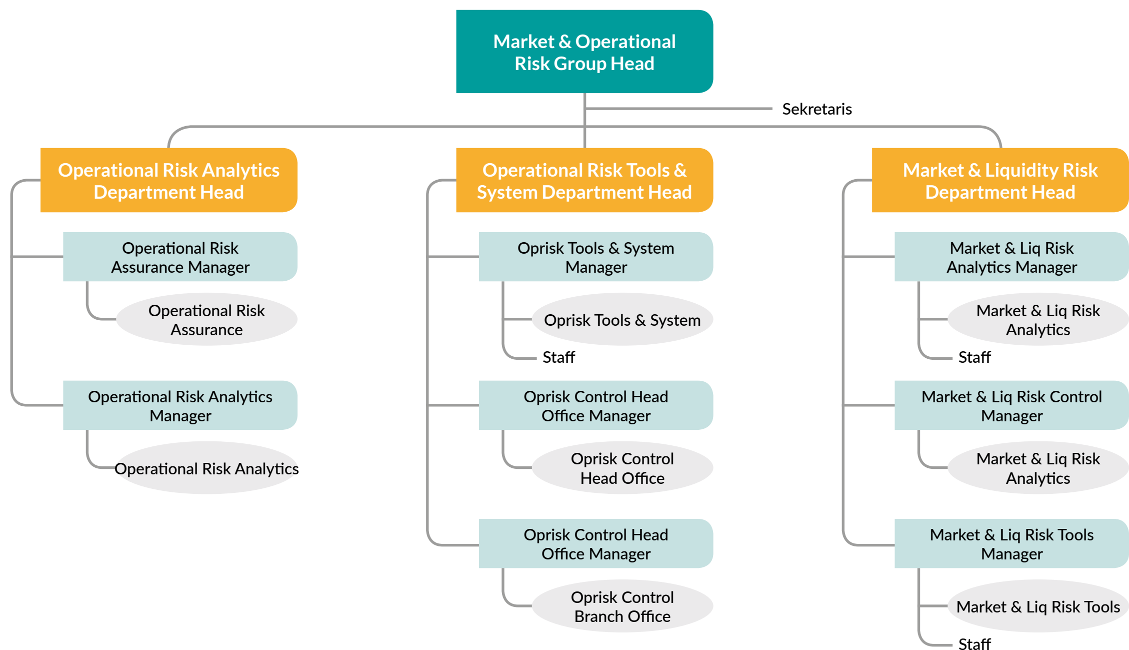
Landasan penerapan manajemen risiko di lingkungan BSI mengacu pada ketentuan regulator antara lain:

1. SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
2. SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB Bagi Bank Umum.
3. SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 / POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
6. POJK No.57/POJK/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.
7. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
8. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.
9. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
13. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
14. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
15. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

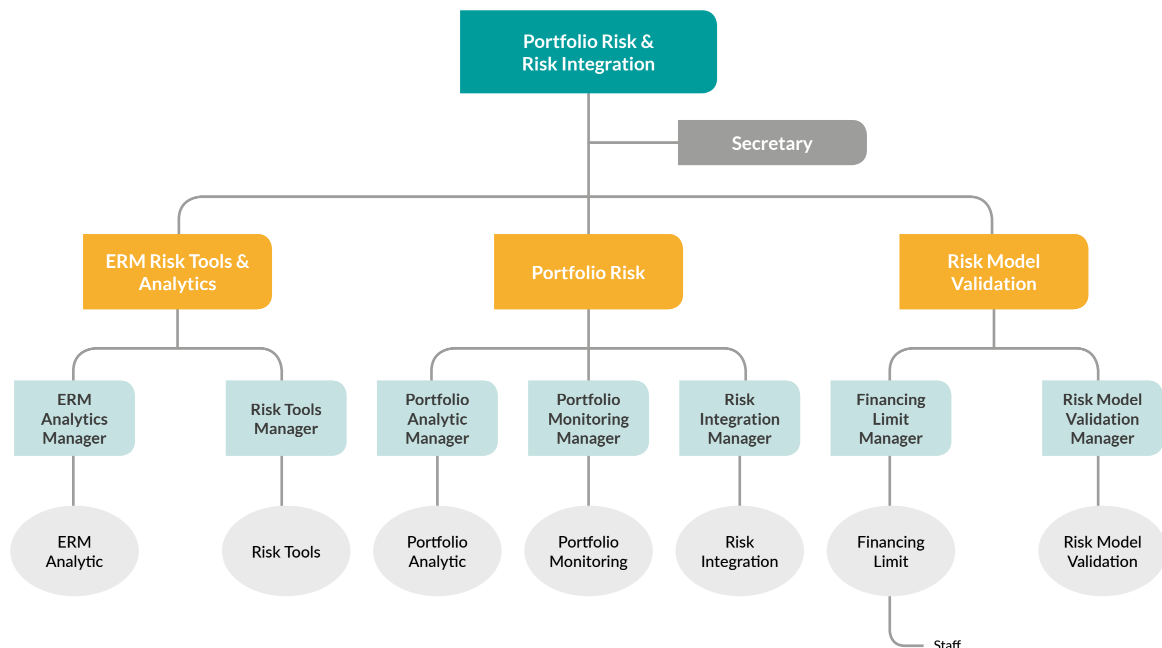
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko di BSI yang terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja, yaitu Market & Operational Risk Group serta Portfolio Risk & Risk Integration Group. Berikut adalah struktur organisasi dari masing-masing bagian tersebut.

1. **Struktur Organisasi Market & Operational Risk Group**



2. **Struktur Organisasi Portfolio Risk & Risk Integration**



3. Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

a. Ferry Ardiansyah
Group Head Market & Operational Risk Group

Warga Negara	Warga Negara Indonesia
Domisili	Banjarsari Rt 004/001 Banjarsari Ciawi Bogor
Usia	44 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 20 September 1977
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/5046-SK/HC-BSI 1 Februari 2021
Riwayat Pendidikan	• Pendidikan S3 Doktor Manajemen & Bisnis (Dr.) – Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (2020) • Pendidikan S2 Magister Manajemen (MM.) – Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (2002) • Pendidikan S1 Teknologi Industri Pertanian (S.TP) – Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1999)
Riwayat Pekerjaan	• *Market & Operational Risk Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – sekarang) • *Risk Management Division Head* PT Bank BRI Syariah, Tbk. (2019 – 2021) • *Corporate Planning & Strategic Division Head* PT Bank BRI Syariah, Tbk. (2018 – 2019)
Hubungan Afiliasi	-

b. M. Fanny Fansyuri
Group Head Portfolio Risk & Risk Integration

Warga Negara	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	54 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 14 April 1967
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/5046-SK/HC-BSI 1 Februari 2021
Riwayat Pendidikan	Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (1991)
Riwayat Pekerjaan	• *Portfolio Risk & Risk Integration Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 - sekarang) • *Enterprise Risk Management Group Head* PT Bank Syariah Mandiri (2015-2020) • *Strategic and Performance Management Group Head* PT Bank Syariah Mandiri (2014- 2015)
Hubungan Afiliasi	-

C. Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut sesuai Standar Prosedur Operasional *Human Capital* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko diuraikan secara rinci melalu penjelasan di bawah ini.

1. Market & Operational Risk Group Head
    a. Membuat, merekomendasikan, memutakhirkan, dan mensosialisasikan Kebijakan Manajemen Risiko pasar, operasional dan likuiditas dan ketentuan pelaksanaannya sesuai regulasi dan *best practices* dan sosialisasi atas kebijakan tersebut
    b. Mengimplementasi dan pengembangan manajemen risiko pasar, likuiditas dan operasional sesuai dengan regulasi dan *risk appetite* Bank, termasuk penerapan manajemen risiko di bidang teknologi informasi
    c. Memastikan ketersediaan limit manajemen risiko pasar, likuiditas dan operasional sesuai dengan regulasi dan *risk appetite* bank
    d. Memastikan ketersediaan kajian dan analisa risiko pasar, operasional dan likuiditas atas produk & aktivitas baru bank
    e. Melakukan pengukuran, pemantauan dan pelaporan risiko market, operasional dan likuiditas dalam penerapan manajemen risiko
    f. Memastikan pengembangan metodologi dan tools risiko market, operasional dan likuiditas sesuai dengan *best practices* dan regulasi yang berlaku serta kajian efektivitas implementasi *risk management tools*
    g. Memastikan kecukupan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka pelaksanaan proses manajemen risiko pasar, likuiditas dan operasional
    h. Memastikan pengembangan program *risk culture* dan *risk awareness*
    i. Memastikan terciptanya koordinasi yang erat dengan uker lainnya dalam rangka implementasi manajemen risiko di bidang risiko pasar, likuiditas dan operasional
    j. Memastikan ketersediaan materi dan tindak lanjut keputusan Komite Manajemen Risiko
2. Portfolio Risk & Risk Integration Group Head
    a. Membuat, merekomendasikan, memutakhiran dan mensosialisasikan Kebijakan Manajemen Risiko dan ketentuan pelaksanaannya sesuai regulasi dan *best practices*
    b. Mengimplementasikan dan mengembangkan portfolio risk sesuai dengan regulasi dan *risk appetite* Bank
    c. Memastikan ketersediaan kajian risiko atas produk & aktivitas baru bank
    d. Melakukan pengukuran, pemantauan risiko, ketersediaan limit risiko dalam penerapan manajemen risiko serta pengembangan program *risk culture*
    e. Membuat dan mengembangkan model, metodologi, analisa, serta validasi pengukuran risiko sesuai dengan *best practices* dan regulasi yang berlaku serta kajian efektivitas implementasi *risk management tools*
    f. Melakukan *stress* testing terhadap portfolio pembiayaan dan menyediakan rencana kontinjen yang menjadi acuan kondisi krisis
    g. Mengimplementasikan dan mengembangkan manajemen portofolio (portfolio *guideline*)
    h. Mengimplementasikan dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank
    i. Membuat, mengkaji, dan melaporkan profil risiko, Tingkat Kesehatan Bank dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
    j. Menyediakan materi dan tindak lanjut keputusan Komite Manajemen Risiko

E. Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko BSI diurai dalam tabel berikut.

1. Market & Operational Risk Group

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Group Head	1 Orang
2	Departement Head	3 Orang
3	Team Leader	6 Orang
4	Officer	10 Orang
5	Staff	3 Orang
	Total	**23 Orang**

2. Portfolio Risk & Risk Integration

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Group Head	1 Orang
2	Departement Head	3 Orang
3	Team Leader	5 Orang
4	Officer	8 Orang
5	Staff	2 Orang
	Total	**19 Orang**

F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank terus mendorong peningkatan sumber daya manusia agar optimal dalam mendukung implementasi manajemen risiko. Upaya peningkatan kualitas tersebut antara lain dilakukan melalui pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko yang sebagaimana tabel di bawah ini.

1. Market & Operational Risk Management

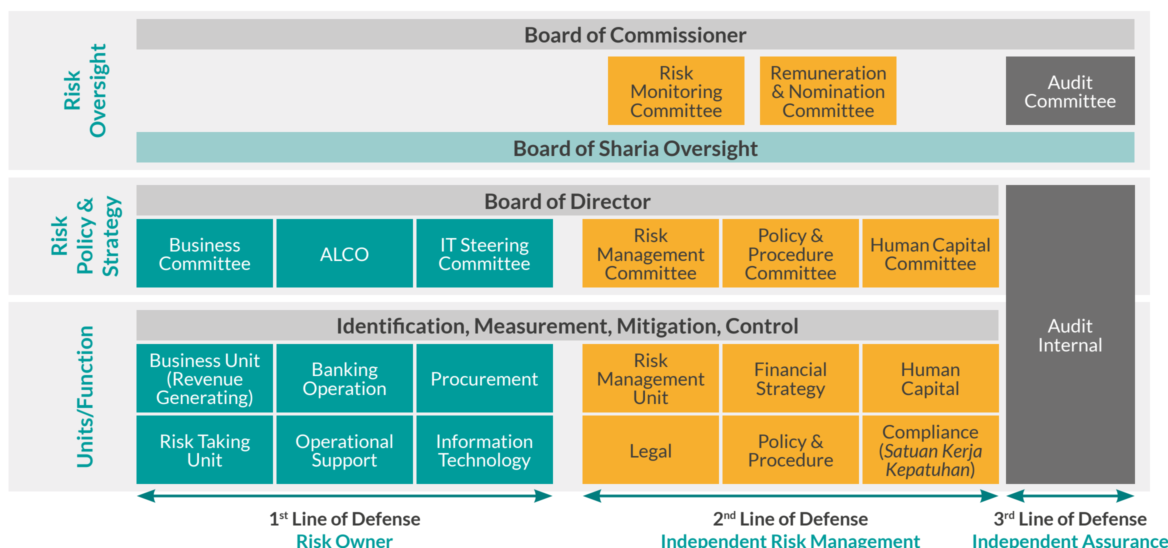
NO	JABATAN	JUMLAH	SERTIFIKASI	LEMBAGA SERTIFIKASI
1	Group Head	1 orang	Manajemen Risiko level 5	BNSP
2	Dept Head	3 orang	Manajemen Risiko level 3	BNSP
3	Team Leader	5 orang	• Manajemen Risiko level 3 (2 orang) • Manajemen Risiko level 2 (3 orang)	BNSP
4	Officer	9 orang	• Manajemen Risiko level 3 (1 orang) • Manajemen Risiko level 2 (2 orang) • Manajemen Risiko level 1 (6 orang)	BNSP

2. Portfolio Risk & Risk Integration

NO	JABATAN	JUMLAH	SERTIFIKASI	LEMBAGA SERTIFIKASI
1	Group Head	1 orang	Manajemen Risiko level 4	BNSP
2	Dept Head	3 orang	Manajemen Risiko level 3	BNSP
3	Team Leader	5 orang	• Manajemen Risiko level 3 (1 orang) • Manajemen Risiko level 2 (3 orang) • Manajemen Risiko level 1 (1 orang)	BNSP
4	Officer	8 orang	• Manajemen Risiko level 3 (4 orang) • Manajemen Risiko level 2 (1 orang) • Manajemen Risiko level 1 (3 orang)	BNSP

G. Risk Governance Structure

Bank merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), satuan kerja operasional (Risk-taking unit), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan satuan kerja pendukung lainnya. Satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan SKMR independen terhadap satuan kerja bisnis bank.



H. Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Bank menerapkan manajemen risiko yang mencakup 4 (empat) pilar seperti yang tergambar dalam bagan di bawah ini.



1. **Tata Kelola Risiko**

   Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BSI.

   Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan serta peninjauan berkala mengenai kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risio dan eksposur risik yang diambil oleh Bank.

   Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit, melalui forum rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Dewan Komisaris dengan jajaran Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Peran pengawasan aktif oleh Direksi dilakukan secara intensif melalui Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT Steering Committee, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite SDM, BCM Steering Committee, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Direksi (Rapat Dewan Direksi dan Rapat Direktur Bidang).

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah secara periodik dengan seluruh jajaran eksekutif Bank dan selalu menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

2. **Kerangka Manajemen Risiko**

   BSI memiliki struktur Kebijakan dan Prosedur secara hierarki, meliputi:
   a. Kebijakan
   b. Standar Prosedur (Bisnis dan Operasional)
   c. Manual Produk
   d. Petunjuk Teknis Operasional

   Bank memastikan seluruh kegiatan yang memiliki eksposur risiko memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai acuan segenap unit kerja dalam melakukan kegiatan operasional sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk penetapan limit risiko untuk melindungi Bank dari risiko yang berlebihan (*excessive*) dan melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Kebijakan dan prosedur tersebut antara lain:
   a. Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Sistem Pengendalian Internal, Kebijakan dan Prosedur Bidang Operasional dan Jasa, Kebijakan Anti *Fraud*, SPB Penghimpunan Dana dan Jasa, SPO Transaksi Jasa, SPB Operasional Cabang, SPO Perlindungan dan Pengaduan Nasabah, SPO Human Capital, SPO Pengadaan Barang dan Jasa, SPO APU-PPT, SPO Teknologi Informasi, SPO Business Continuos Management (BCM), SPP Manajemen Risiko Operasional.
   b. Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pengendalian Intern, Kebijakan dan Prosedur Bidang Pembiayaan & Treasury.
   c. SPB Pembiayaan Corporate, SPB Pembiayaan Commercial, SPB Pembiayaan SME, SPB Pembiayaan Micro, SPB Pembiayaan Consumer, SPB Portfolio Guideline, SPB Treasury and International Banking.

3. **Proses Manajemen Risiko**

   Bank menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang memadai. Bank mengelola sepuluh jenis risiko yang melekat dalam operasional dan bisnis Bank yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

   a. **Identifikasi Risiko**
      - Pelaksanaan identifikasi risiko atas produk dan aktivitas bank, termasuk penerapan manajemen risiko teknologi informasi
      - risiko atas produk dan aktivitas bank, termasuk penerapan Business Continuity Management
   b. **Pengukuran Risiko**
      - Penggunaan risk tools dalam pengukuran risiko antara lain scoring, financing riskrating, Value at Risk, Liquidity Gap dan Repricing Gap.
      - Pengukuran dan penetapan *risk appetite*
      - Pelaksanaan *stress test* risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas
   c. **Pemantauan Risiko**
      - Pemantauan limit risiko
      - Review atau pembuatan laporan risiko
   d. **Pengendalian Risiko**
      - Integrasi policy & risk tools ke dalam financing origination, customer on boarding, dan collection system
      - Pembentukan marketing asset & tracking asset jaminan
      - Penetapan limit risiko
      - Penerapan Business Continuity Management (BCM)
   e. **Sistem Informasi Manajemen Risiko**

      Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko. Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko yang dilakukan secara berkala oleh SKMR. Selain itu Bank juga mengembangkan beberapa system untuk memperkuat system informasi manajemen risiko:
      - Pengembangan & Implementasi Risk Management System
      - Pengembangan sistem Liquidity Coverage Ratio
      - Enhancement NPS & Pengembangan aplikasi *workflow policy*

4. **Kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai**
   Sistem pengendalian risiko mencakup kecukupan system pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun Satuan Kerja Audit Intern. Bank menetapkan sistem pengendalian risiko terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan operasional bank.

Sistem pengendalian risiko dilakukan melalui:

a. Penetapan struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit
b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, termasuk penetapan limit risiko
c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional denan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian Penyediaan prosedur yang lengkap untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku
d. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
e. Dokumentasi yang lengkap terhadap cakupan dan temuan audit serta dan tindaklanjutnya.

Untuk memastikan kecukupan sistem pengendalian risiko, Bank melaksanakan kaji ulang secara berkala yaitu:

a. Kaji ulang oleh SKMR terhadap metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko
b. Kaji ulang oleh SKAI terhadap keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung

   Dalam rangka menjaga efektifitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, BSI berupaya untuk melakukan pengendalian internal melalui pengawasan melekat yang menerapkan prinsip pengawasan ganda (dual control), pembagian tugas "check and balances"(segregation of duties), dan jejak audit (audit trail). Penerapan pada level organisasi antara lain melalui pemisahan fungsi unit front office, middle office dan back office serta penerapan 3 (tiga) pilar organisasi dalam proses pembiayaan, yaitu unit bisnis, unit risk assessment dan unit financing operation.

I. Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas system manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan system manajemen risiko Bank. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi, kebijakan manajemen risiko, kualitas penerapan manajeman risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

J. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

BSI senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik.

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efetivitas pelaksanaan manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung aktivitas Bank melalui internal maupun *eksternal training* serta melakukan magang di perusahaan induk.
   b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui e-learning dan refreshment ketentuan.
   c. Meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
   Memperkuat dan mengembangkan tools, model, serta metodologi pengelolaan seluruh risiko yang lebih baik melalui pengembangan model rating, scoring, stress test, dan model risiko lainnya serta pengembangan metodologi control testing.
3. *System*
   Meningkatkan pengamanan IT *system* operasional.

K. Budaya Risiko

Bank Syariah Indonesia juga senantiasa membangun budaya risiko yang kuat untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan perusahaan, antara lain melalui:

a. Sosialisasi *Risk Awareness* untuk meningkatkan *awareness* pegawai agar senantiasa mengelola risiko masing-masing, melalui *Podcast Risk Management*.
b. Penerapan nilai *Core Value* AKHLAK di lingkungan kerja BSI yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, melalui program rutin mingguan yang disampaikan oleh Jajaran Top Manajemen secara langsung kepada seluruh pegawai.

Bank mengikutsertakan pejabat-pejabat pada level tertentu dalam Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR). Sampai dengan Desember 2021, jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko adalah:

SERTIFIKASI	s.d. DESEMBER 2021
Tingkat 1	1.567
Tingkat 2	1.670
Tingkat 3	212
Tingkat 4	72
Tingkat 5	22
Total	**3.543**

L. Eksposur Permodalan dan Pengungkapan Risiko Permodalan

Bank Syariah Indonesia melakukan perhitungan dan pemantauan eksposur permodalan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. *Capital Adequacy Rasio* (CAR) Bank Syariah Indonesia pada Desember 2021 sebesar 22,09%. BSI telah menghitung kecukupan permodalan dengan unsur modal penyangga/*buffer*. Hal ini menunjukkan bahwa BSI memiliki permodalan yang cukup untuk mengantisipasi dan menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis operasional.

M. Profil Risiko Utama dan Pengelolaan

1. Risiko Kredit dan Risiko Investasi

Bank mengelola risiko kredit dan investasi secara menyeluruh, sejak pembiayaan dan investasi diberikan sampai dengan pembiayaan berakhir.

a. Organisasi

Bank memiliki perangkat organisasi manajemen risiko kredit dan investasi untuk menjaga aktifitas pembiayaan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank menetapkan 3 pilar organisasi dalam proses pembiayaan. Pilar pertama adalah unit bisnis yang melakukan inisiasi bisnis. Pilar kedua adalah unit *risk assessment* yang melakukan analisa risiko pembiayaan. Pilar ketiga adalah *unit financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen. Bank menetapkan unit *recovery* yang berfungsi menangani pembiayaan bermasalah. Unit tersebut independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank membuat kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Manual Produk dan Petunjuk Teknis Operasional untuk masing-masing segmen pembiayaan.

Bank menetapkan limit *inhouse* BMPD, *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada level transaksional, Bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan termasuk investasi surat berharga.

c. Proses Pengelolaan Risiko

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

1) Arah ekspansi pembiayaan mengacu pada *Portfolio Guideline*, yang mencakup:

   a) Industry Class

   Pengelolaan risiko pembiayaan Bank diawali dengan menetapkan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target *market*. Bank membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok, yaitu menarik, netral, selektif, dan waspada. Bank menetapkan *industry class* untuk 98 sektor industri. Pembiayaan diarahkan pada sektor/ bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.

   b) Industry Limit

   Dalam rangka mengelola risiko konsentrasi dari portfolio pembiayaan, Bank menetapkan limit portfolio pembiayaan untuk masing-masing industri. Limit sektor industri tersebut ditetapkan berdasarkan pada kriteria *industry class* masing-masing sektor.

   c) Industry Acceptance Criteria

   Bank menetapkan *Industry Acceptance Criteria* sebagai salah satu proses dalam menentukan *targeted customer* pada suatu sektor *industry* serta untuk menyaring calon nasabah. *Industry Acceptance Criteria* merupakan kriteria seleksi awal nasabah yang dirumuskan berdasarkan *critical factor* dari masing-masing sektor industri yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

2) Penetapan metode *acquisition* dan pengukuran risiko nasabah melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, *scoring* pembiayaan ritel dan *financing risk rating* pembiayaan *wholesale*.

3) Early warning system dengan menggunakan *watchlist tools* yang dapat memberikan indikasi/deteksi secara dini kondisi nasabah sehingga Bank dapat menetapkan *account strategy* yang antara lain mencakup aktivitas *collection*, *recovery* maupun restrukturisasi. Termasuk di dalam *early warning sistem* adalah *portfolio alert* yang bertujuan untuk memonitor kinerja portofolio pembiayaan dan kesesuaian terhadap limit risiko yang ditetapkan baik oleh internal Bank maupun regulator.

4) Pelaksanaan *stress test* terhadap kondisi ekstrim tetapi mungkin terjadi (*plausible*) baik secara berkala maupun insidentil yang bertujuan untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila terjadi perubahan kondisi eksternal seperti makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan Bank.

5) Penetapan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas dan potensi risiko.

6) Kajian/ Evaluasi kecukupan limit wewenang memutus pembiayaan.

7) Penetapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memiliki Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan data pengelolaan risiko kredit. Bank melaporkan eksposur risiko kredit secara rutin baik untuk pihak internal maupun eksternal.

e. Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Pembiayaan

Bank mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat agar dapat mengidentifikasi , mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit, termasuk risiko konsentrasi pembiayaan. Bank menetapkan limit untuk risiko penyediaan dana internal yang ditujukan untuk mengurangi risiko konsentrasi pembiayaan.

f. Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Tujuan pengukuran risiko kredit adalah untuk mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dana sehingga Bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan. Bank menggunakan metode statistik dan metode lainnya dalam pengukuran risiko kredit antara lain scoring, financing risk rating, stress test dan risk tools lainnya yang dikembangkan bank.

Bank melakukan pengendalian risiko kredit antara lain melalui pengelolaan portfolio, penetapan limit konsentrasi, dan penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana

g. **Definisi Tagihan Jatuh Tempo dan Tagihan Mengalami Penurunan Nilai**
Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan Ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

h. **Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan Kolektif**
Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (probability of default).

i. **Metode Statistik dalam Perhitungan CKPN**
Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung Probability of Default (PD) dan Loss of Given Default (LGD).

j. **Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar**
   1). Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh Lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai Surat Edaran OJK No.37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui OJK.
   2). Kategori portofolio yang menggunakan peringkat
   Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah sesuai dengan Surat Edaran OJK No 34 /SEOJK.03/2015, yaitu didasarkan pada debitur atau pihak lawan transaksi.
   3). Lembaga pemeringkat yang digunakan sesuai dengan Lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai Surat Edaran OJK No.37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui OJK.
   4). Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk), antara lain transaksi lindung nilai syariah over the counter (OTC) dan transaksi repo atau reverse repo, baik atas posisi Trading Book maupun Banking Book.
   Bank saat ini tidak memiliki eksposur counterparty credit risk.

k. **Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar**
Mitigasi risiko dengan menggunakan pendekatan standar dapat menggunakan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM sesuai SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah. Seluruh dokumen agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang digunakan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bank mempunyai kriteria untuk pemenuhan agunan, antara lain bersifat marketabilitas, bernilai ekonomis, dapat diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai legalitas sebagai barang jaminan

l. **Pengungkapan Sekuritisasi Aset**
Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

2. **Risiko Pasar**
Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank. Bank terekspose Risiko pasar dari aktivitas tresuri dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang, dan forex (*foreign exchange*) serta produk e-mas karena terdapat persediaan emas.

a. **Organisasi**
Bank menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan forex.

Unit bisnis atau unit tresuri menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi tresuri. *Front office* berfungsi sebagai *first line of defence* yang melakukan transaksi.

Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*, yang melakukan fungsi *review* limit risiko, penyediaan *tools* pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar. Unit kerja operasional yang menjalankan fungsi back office dengan melakukan *settlement* dan pembukuan transaksi.

b. **Kebijakan, Prosedur dan Limit**
Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Treasury dan Standar Prosedur Bisnis *Treasury* and *International Banking* serta ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar.

Bank menetapkan limit risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto (PDN), *Value at Risk* (VaR), Posisi Terbuka, *Stop Loss*, Transaksi Tresuri, dan *Cut Loss*.

c. **Proses Manajemen Risiko**
1) Risiko *Benchmark* Suku Bunga
Bank terekspose Risiko *Benchmark* Suku Bunga atas portofolio surat berharga. Bank mengelola Risiko Benchmark Suku Bunga melalui :
a. Identifikasi Risiko *Benchmark* Suku Bunga pada produk dan aktivitas bank.
b. Pengukuran risiko menggunakan tools Value at Risk (VaR). VaR menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan yield surat berharga dalam kondisi pasar yang normal. Bank melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis. Bank melakukan 5 (lima) kali *stress test* risiko pasar sepanjang tahun 2021, termasuk dampak penyebaran Covid-19 terhadap eksposur risiko pasar Bank. Pengukuran kecukupan modal untuk mengcover risiko dilakukan menggunakan *Standardized Model*.
c. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko setelah legal merger s.d. operational merger dilakukan pada masing-masing *system* yang digunakan *bank legacy*. Pemantauan eksposur risiko setelah operational merger telah dilakukan pada *treasury system* bank.
d. Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit Value at Risk, Posisi Terbuka dan Stop Loss surat berharga serta melalui penjualan atau cut loss surat berharga. Bank melakukan *mark to market* atas surat berharga *trading* secara harian menggunakan harga pasar dari sumber yang independen.

2) Risiko Nilai Tukar
Bank mengelola Risiko Nilai Tukar melalui :
a. Identifikasi Risiko Nilai Tukar pada produk dan aktivitas bank.
b. Pengukuran risiko menggunakan tools *Value at Risk* (VaR). Bank menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai limit yang telah ditetapkan. PDN Keseluruhan per 31 Desember 2021 sebesar 0,27% atau masih dalam batas limit internal bank maksimal 15%.

Bank melakukan stress test untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis terjadi. Bank melakukan 5 (lima) kali *stress test* risiko pasar sepanjang tahun 2021, termasuk dampak penyebaran Covid-19 terhadap eksposur risiko pasar Bank. Pengukuran kecukupan modal untuk mengcover risiko dilakukan menggunakan *Standardized Model*.
c. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko setelah *legal merger* s.d. *operational merger* dilakukan pada masing-masing *system bank legacy*. Pemantauan eksposur risiko setelah *operational merger* telah dilakukan menggunakan *treasury system* bank.
d. Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit Value at Risk, Posisi Terbuka dan Stop Loss valas serta melalui squaring posisi valas.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko
Bank memiliki *Treasury core system* yang dapat menyediakan data untuk pengukuran risiko pasar. Bank melaporkan eksposur manajemen risiko pasar secara rutin kepada pihak internal maupun eksternal.

e. Pengelolaan Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* serta Metodologi Valuasi
Risiko pasar trading book adalah potensi kerugian dari portofolio trading akibat perubahan indikator pasar yaitu *yield* surat berharga dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* antara unit *front office* (treasury), unit *middle office* (risk management) dan unit *back office* (treasury operation). Bank melakukan *mark to market* atas surat berharga *trading* secara harian menggunakan harga pasar dari sumber yang independen.

Risiko pasar *banking book* adalah risiko penurunan profitabilitas dan nilai ekonomis modal karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar banking book dilakukan melalui review *asset* dan *liabilities* sehingga mendapatkan imbal hasil yang maksimal.

3. Risiko Likuiditas
Bank mengelola risiko likuiditas untuk menjaga kecukupan atau ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban Bank. Bank terekspose Risiko Likuiditas dari aktivitas fungsional pembiayaan, tresuri dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat berharga.

a. Organisasi
Bank melakukan pemisahan fungsi antara unit tresuri sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit *operation* sebagai *back office*.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit
Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Treasury dan Standar Prosedur Bisnis *Tresury* dan *International Banking*. Bank menetapkan limit risiko likuiditas yang mencakup Giro Wajib Minimum (GWM), *Safety Level*, Deposan Inti, Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta *Liquidity Coverage Ratio* (LCR).

Bank memiliki kecukupan likuiditas yang memadai. Cadangan likuiditas Rupiah per 31 Desember 2021 mencapai Rp41,18 Triliun atau di atas safety level minimal Rp5,3 Triliun. Cadangan likuiditas valas per 31 Desember 2021 USD135,70 Juta atau di atas safety level minimal USD59,3 Juta.

Rasio kecukupan likuiditas atau LCR per 31 Desember 2021 mencapai 212,17% atau di atas limit minimal 130%. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR per 31 Desember 2021 mencapai 139,46% atau di atas limit minimal 110%.

c. **Proses Pengelolaan Risiko**

Dalam mengelola likuiditas, Bank:

1) Melakukan identifikasi risiko likuiditas pada produk dan aktivitas bank
2) Melakukan penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas
3) Melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas, proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
4) Memelihara akses ke pasar uang antar Bank Syariah
5) Melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala
6) Memantau rasio likuiditas secara rutin
7) Menetapkan *action plan* apabila terjadi kondisi krisis likuiditas
8) Memonitor pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/ IDR, *yield*, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) dan informasi pasar terkini.

d. **Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Bank memiliki Management Information System yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. Bank menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas secara berkala baik kepada pihak internal maupun eksternal.

e. **Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan dan Rencana Pendanaan Darurat**

Bank melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan:

1. Memelihara akses ke pasar uang antar bank syariah
2. Menetapkan limit likuiditas.
3. Melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal terhadap likuiditas.
4. Menyusun dan melakukan review berkala terhadap Liquidity Contigency Plan (LCP) antara lain melalui penggunaan instrumen *money market*, penjualan surat berharga, peningkatan nisbah imbal hasil dana dan penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia.

f. **Mekanisme Pengukuran dan *Stress Test* serta Pengendalian Risiko Likuiditas**

Bank melakukan pengukuran kecukupan likuiditas melalui proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, dan perhitungan *core dana*. Di samping itu bank melakukan penilaian profil risiko likuiditas dan pengukuran rasio-rasio likuiditas antara lain mencakup Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), rasio deposan terbesar, rasio aset likuid terhadap *non core deposit* (AL NCD), rasio aset likuid terhadap DPK (AL DPK).

Untuk mengukur kecukupan likuiditas saat terjadi kondisi krisis sesuai skenario yaitu kejadian eksternal yang ekstrim tetapi mungkin terjadi, Bank melakukan *stress test* likuiditas secara berkala dan menetapkan *contingency plan*.

4. **Risiko Operasional**

Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk meminimalisir eksposur risiko yang disebabkan faktor kesalahan manusia, ketidakcukupan prosedur internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal. Bank memiliki *framework* pengelolaan risiko operasional sebagaimana dijelaskan di bawah.

a. **Organisasi**

Bank mengelola risiko operasional di seluruh organisasi pada semua lini bisnis bank, baik di *firstline unit*, *secondline unit*, maupun *thirdline unit*. Bank menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, *approver*/ otorisator, dan mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi.

Bank memiliki fungsi pengelola manajemen risiko operasional yang terpisah dari satuan kerja operasional. Di samping itu, terdapat organ pengawasan yang bertugas untuk memastikan penerapan manajemen risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan cabang :

1) Regional Business Control (RBC)

a) RBC merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di *region office* untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan internal control di Kantor Wilayah, Area, dan Cabang.

b) Secara organisasi RBC bertanggungjawab kepada *Regional Head*, namun memiliki fungsi koordinasi (*dotted line*) kepada Unit Kerja Kantor Pusat, yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern

2) *Desentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR)

a) DCOR merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di setiap Direktorat Kantor Pusat untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan *internal control* di unit kerja Kantor Pusat.

b) Secara organisasi DCOR bertanggungjawab kepada Direktur Bidang, namun memiliki fungsi koordinasi (*dotted line*) kepada Unit Kerja Kantor Pusat, yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja, meliputi :

1) Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
2) Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional
3) Petunjuk Teknis Operasional mengenai *Operational Risk Management Tools*
4) Petunjuk Teknis Operasional Regional Business Control (RBC)
5) Petunjuk Teknis Operasional Decentralized Compliance and Operational Risk (DCOR)

Bank mengevaluasi Kebijakan, Standar Prosedur Manajemen Risiko Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank.

Bank menetapkan limit transaksi operasional dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat kelancaran aktivitas operasional Bank. Bank mengevaluasi limit risiko operasional secara berkala, meliputi:

1) Limit Transaksi Operasional Kantor Pusat, Region, Area dan *Branch*
2) Limit Transaksi *Electronic Channel* (*Internet Banking*, ATM, dan *Mobile Banking*)
3) Limit *Procurement*
4) Limit Kustodian

c. Business Continuity Management

Bank menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) untuk menjamin keberlangsungan operasional Bank pada saat terjadi *disaster*. Dalam rangka penguatan penerapan BCM, pada tahun 2021 Bank melakukan:

1) Revitalisasi Organisasi BCM
2) Pemutakhiran Standar Prosedur Operasional BCM
3) Pemutakhiran *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Risk Assessment* (RA).
4) Pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Pusat melalui *Business Recovery Center* (BRC)
5) Pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk *Information Technology* (IT) secara Periodik
6) Penanganan Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

d. Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan digitalisasi, Bank mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan memperhatikan identifikasi dan mitigasi risiko.

Bank menerapkan manajemen risiko teknologi informasi melalui:

1) Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Streering Committee*)
2) Penetapan rencana strategis IT yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
3) Pembentukan group CISO (*Chief Information Security Officer*) untuk memastikan keamanan penerapan teknologi informasi Bank, termasuk *Digital Banking*
4) Pendelegasian kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan operasional IT
5) Standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan *software*, pengelolaan kewenangan akses sistem, pengembangan layanan perbankan elektronik dari segi keamanan aksesibilitas dan DRP

6) Pelaksanaan *System Integration Test* (SIT) dan *User Acceptance Test* (UAT) atas setiap pembuatan atau pengembangan sistem aplikasi baru untuk meminimalisasi potensi kegagalan sistem aplikasi
7) Pelaksanaan *Penetration Test* (PenTest) untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dari potensi serangan *cyber crime*.
8) Pelaksanaan *Release Control Board* (RCB) untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan telah memenuhi standar pengembangan IT yang memadai baik dari aspek kecukupan infrastruktur IT, keamanan IT, proses bisnis maupun prosedur.

e. Tools Pengelolaan Risiko

Bank menerapkan *Operational Risk Management Tools*, yaitu:

1) Risk & Control Self Assessment

   Risk & Control Self Assessment (RCSA) merupakan *tools* untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi risiko operasional. RCSA dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan direview oleh DCOR/RBC.

   Bank menerapkan RCSA secara *end to end process* sehingga potensi risiko operasional dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan dapat dilakukan mitigasi secara dini untuk meminimalisir potensi risiko operasional. RCSA dilakukan secara berkala setiap bulan.
2) Key Risk Indicator

   Key Risk Indicator (KRI) merupakan *tools* untuk mengidentifikasi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan *treshold* tertentu. Pemantauan KRI dilakukan oleh unit kerja setiap bulan.
3) Loss Event Database

   Loss Event Database (LED) merupakan *tools* untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami oleh Bank. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat terjadi insiden dan dilaporkan setiap bulan.
4) Control Testing

   Control Testing (CT) merupakan *tools* untuk menguji kecukupan kontrol operasional, dan menetapkan langkah perbaikan kontrol secara berkelanjutan. Bank telah menerapkan CT dalam proses bisnis pembiayaan gadai, pembiayaan mikro, operasional cabang, pembiayaan konsumer kendaraan, pembiayaan komersial dan pembiayaan korporasi. CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui *onsite review* di unit kerja dan cabang secara berkala

f. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melaporkan hasil penerapan manajemen risiko operasional setiap bulan baik untuk pelaporan internal maupun eksternal kepada entitas utama dan kepada regulator.

1) Profil Risiko Operasional
2) Operational Risk Loss Control Metrics
3) Operational Risk Loss Incident
4) Laporan Penerapan Operational Risk tools unit Kerja meliputi:
   a. Laporan Profil Risiko Operasional Unit Kerja Kantor Pusat
   b. Laporan Profil Risiko Operasional Region office

5. Risiko Lainnya

Bank mengelola risiko lainnya yang mencakup risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil.

a. Organisasi

Bank memisahkan unit kerja yang berperan mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko stratejik dengan satuan kerja operasional lainnya.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko untuk mendukung pengelolaan risiko lainnya, antara lain Standar Prosedur Pengendalian Hukum, Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan, Standar Prosedur Prosedur Pengendalian *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengaduan Nasabah, Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary*, Standar Prosedur Operasional Rencana Korporasi (*Corporate Plan*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Standar Prosedur Operasional *Performance Management*.

c. **Proses Pengelolaan Risiko Lainnya**
Bank mengelola risiko-risiko lainnya melalui:
1) Penanganan dan pemantauan eksposur risiko hukum, baik perkara pidana maupun non pidana. Pengendalian risiko hukum dilakukan antara lain dengan membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi
2) Penyelesaian pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan pengukuran risiko reputasi melalui *Publicity Effectiveness Level* (PEL), serta pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media
3) Evaluasi kinerja dan efektivitas strategi melalui *performance review* secara berkala dan berjenjang
4) Penerapan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK)
5) Pelaksanaan fungsi *internal sharia advisory* untuk mengkaji dan menganalisas kesesuaian produk/aktivitas Bank dengan prinsip Syariah
6) Review imbal hasil pendanaan dan pembiayaan serta penerapan protokol penyesuaian nisbah spesial

6. **Risiko Hukum**
a. **Organisasi**
Bank memisahkan unit kerja dan menetapkan unit kerja yang berperan mengelola risiko hukum, termasuk memberikan advis hukum.
b. **Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum**
1) Penanganan dan pemantauan eksposur risiko hukum, baik perkara pidana maupun non pidana.
2) Membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.
3) Penerapan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
4) Pelaksanaan fungsi *internal sharia advisory* untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian produk/aktivitas Bank dengan prinsip Syariah.

7. **Risiko Reputasi**
a. **Organisasi**
Bank menetapkan unit kerja yang berperan mengelola risiko reputasi
b. **Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Reputasi**
1) Bank menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko risiko reputasi
2) Bank menetapkan mekanisme dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi. Pengendalian risiko reputasi dilakukan antara lain melalui:
3) Pencegahan kejadian yang dapat menimbulkan risiko reputasi, antara lain melalui:
a) tindak lanjut dan penyelesaian keluhan nasabah serta perkara hukum yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko
b) penguatan komunikasi eksternal dan internal untuk mengendalikan potensi eksposur risiko reputasi
c) komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dan pemangku kepentingan
4) Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respon Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan risiko reputasi
5) Penyelesaian pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan pengukuran risiko reputasi melalui *Publicity Effectiveness Level* (PEL), serta pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media.
c. **Pengelolaan Risiko Reputasi Saat Krisis**
1) Bank membentuk *Communication Command Center* sebagai sarana formal koordinasi antar-unit kerja yang terlibat dalam penjagaan risiko reputasi pada kondisi krisis. *Communication Command Center* di bawah koordinasi *Working Group* ALCO menyiapkan dan mengkomunikasikan langkah preventif atas seluruh informasi yang masuk, memitigasi agar peristiwa tersebut tidak menurunkan reputasi perusahaan di mata publik.

2) *Communication Command Center* bekerja sebagai unit aksi cepat tanggap atas informasi peristiwa baik di kantor pusat maupun cabang, khususnya yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi. Selain berfungsi sebagai Unit Reaksi Cepat, *Communication Command Center* juga membantu koordinasi lapangan.

8. **Risiko Stratejik**
   a. **Organisasi**
   Bank menetapkan unit kerja yang berperan mengelola risiko stratejik
   b. **Kebijakan Mengidentifikasi dan Merespons Perubahan Lingkungan Bisnis**
   1) Bank memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif dan ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
   2) Bank melakukan identifikasi risiko stratejik dengan menggunakan beberapa informasi antara lain data dari regulatior/media massa dan laporan relaisasi terhadap target bisnis/ kinerja unit kerja.
   c. **Mekanisme Mengukur Kemajuan dari Rencana Bisnis**
   1) Pengukuran risiko stratejik bertujuan untuk mengetahui potensi tidak terealisir atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak terhadap modal bank.
   2) Bank menggunakan indikator/parameter pengukuran risiko stratejik antara lain kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank.
   3) Bank melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi untuk mengukur dampak negatif suatu peristiwa terhadap kinerja bisnis bank, baik secara keuangan maupun non keuangan.

9. **Risiko Kepatuhan**
   a. **Organisasi**
   Bank membentuk unit kerja yang independen dari unit kerja lainnya untuk mengelola risiko kepatuhan
   b. **Strategi Pengelolaan dan Efektivitas Manajemen Risiko Kepatuhan**
   1) Penerapan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
   2) Pelaksanaan fungsi *internal sharia advisory* untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian produk/aktivitas Bank dengan prinsip Syariah.
   c. **Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan**
   1) Bank memantau, mencatat, dan menatausahakan setiap aktivitas yang terekspos risiko kepatuhan termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan aktivitas dimaksud. Pencatatan dan penatausahaan tersebut dapat digunakan untik mengantisipasi potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.
   2) Bank mengendalikan risiko kepatuhan antara lain melalui system *reminder* laporan.

10. **Risiko Imbal Hasil**
   Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
   a. **Organisasi**
   Unit Asset & Liabilities Management bersama unit kerja anggota Working Group ALCO termasuk Unit Market dan Operational Risk melakukan review tingkat imbal hasil pembiayaan dan pendanaan secara berkala.
   b. **Strategi Menjaga Tingkat Imbal Hasil**
   1) *Enhancement yield* melalui penanaman dana bank pada aset produktif yang memberikan yield optimal.
   2) Menjaga pertumbuhan pembiayaan tetap positif dengan risiko yang terukur.
   3) Menjaga kualitas portofolio aset produktif khususnya pembiayaan.
   4) Meningkatkan porsi dana murah yaitu tabungan dan giro terhadap total dana

c. **Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian**
Pemantauan risiko imbal hasil dilakukan melalui:
1) *Review* tingkat imbal hasil pendanaan dan pembiayaan secara berkala.
2) Evaluasi kinerja melalui *performance review* secara berkala.

Pengendalian risiko imbal hasil dilakukan melalui penetapan plafon nisbah spesial deposito dan price *spesial* pembiayaan. Besaran nisbah atau *price* spesial tersebut sejalan dengan pergerakan tingkat imbal hasil atau rate pasar.

11. Risiko Investasi

a. **Organisasi**
Bank memiliki perangkat organisasi manajemen investasi yang sejalan dengan pengelolan risiko kredit (lihat risiko kredit)

b. **Strategi Menjaga Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil**
Strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil sejalan dengan pengelolaan kualitas pembiayaan risiko kredit.

c. **Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko**
1) Bank melakukan pemantauan risiko investasi untuk mengetahui komposisi dan kondisi setiap nasabah atau *counterparty* pada seluruh portfolio bank. Bank menggunakan system/metodologi pemantauan risiko investasi angtara lain *watchlist* dan *portfolio alert.*
2) Bank melakukan pengendalian risiko investasi antara lain melalui pengelolaan portfolio, penetapan limit konsentrasi, penetapantingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana.

N. Pengungkapan Kuantitatif

a. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank

Tabel Struktur Permodalan Bank Syariah Indonesia Tahun 2019-2021

KOMPONEN MODAL	2021	2020	2019
MODAL:			
- Modal Inti	23.173.019	20.420.394	18.041.193
- Modal Pelengkap	1.949.750	2.076.847	2.109.432
Jumlah Modal Untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar	**25.122.769**	**22.497.241**	**20.150.625**
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	113.643.146	101.719.501	89.060.498
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	103.913	1.035.985	10.299.027
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	-	20.569.561	8.197.161
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	**113.747.059**	**123.325.047**	**107.556.686**

b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

1. Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	SUMATERA	JAKARTA	JAWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	87.229.391	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	363	14.835.867	1.455.431
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	7.512	2.200.469	73.187
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	4.819.589	2.851.064	15.607.986
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	4.821	5.316	3.368
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	10.626.880	722.560	5.782.799
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	15.983.679	4.600.695	18.942.176
9	Tagihan Kepada Korporasi	9.278.924	15.881.043	17.967.644
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	361.901	176.709	721.922
11	Aset Lainnya	89.367	7.887.906	883.543
	TOTAL	**41.173.036**	**136.391.020**	**61.438.056**

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	SUMATERA	JAKARTA	JAWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	68.196.312	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	680	17.730.763	2.083.466
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	12.273	9.180.886	200.962
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	5.614.791	3.372.435	18.118.704
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	34.740	29.714	367.638
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	11.079.647	649.364	4.766.331
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	10.891.330	3.853.790	12.338.475
9	Tagihan Kepada Korporasi	9.605.220	13.047.323	17.831.016
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	140.202	154.304	309.178
11	Aset Lainnya	132.241	6.190.577	1.100.081
	TOTAL	**37.511.124**	**122.405.468**	**57.115.851**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah:
1 Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposure yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk).
2 Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3 Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
4 Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.

(dalam jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 2021						
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	-	-	-	-	-	87.229.391
	-	-	-	-	-	16.291.661
	-	-	-	-	-	-
	9	8.929	-	-	-	2.290.106
	2.138.511	1.555.769	809.396	23.440	-	27.805.755
	1.670	18.580	1.492	-	-	35.247
	2.336.415	4.363.603	977.403	271.068	-	25.080.728
	2.189.482	2.955.375	2.078.908	132.909	-	46.883.224
	7.820.925	1.370.135	586.956	262.719	-	53.168.346
	76.581	97.879	29.966	1.449	-	1.466.407
	15.547	34.616	5.762	2.217	-	8.918.958
	14.579.140	**10.404.886**	**4.489.883**	**693.802**	**-**	**269.169.823**

31 DESEMBER 2020						
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	-	-	-	-	-	68.196.312
	280.032	26.690	-	-	-	20.121.631
	-	-	-	-	-	-
	16	16.243	-	-	-	9.410.380
	2.486.315	1.844.620	1.019.910	29.181	-	32.485.956
	18.828	39.220	5.912	-	-	496.052
	2.078.868	3.540.964	994.713	231.013	-	23.340.900
	1.415.349	1.997.371	1.365.747	119.009	-	31.981.071
	6.605.419	1.147.935	583.411	103.323	-	48.923.647
	34.371	36.838	11.090	3.232	-	689.215
	51.337	70.923	34.083	2.079	-	7.581.321
	12.970.535	**8.720.804**	**4.014.866**	**487.837**	**-**	**243.226.485**

c. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

2. Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021		
		TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH		
		< 1 TAHUN	> 1 TAHUN S.D. 3 TAHUN	> 3 TAHUN S.D. 5 TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	53.095.613	22.913.022	8.235.149
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7.292.916	1.160.309	1.452.584
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.190.383	45.114	43.060
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	170.640	1.486.011	2.605.810
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	34.347	900	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	100.942	977.321	2.321.392
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	6.311.049	10.940.868	8.816.359
9	Tagihan Kepada Korporasi	16.488.627	6.982.779	8.322.266
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	332.403	310.430	280.207
11	Aset Lainnya	2.641.803	-	-
	TOTAL	**88.658.723**	**44.816.754**	**32.076.827**

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2020		
		TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH		
		< 1 TAHUN	> 1 TAHUN S.D. 3 TAHUN	> 3 TAHUN S.D. 5 TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	46.856.581	11.518.324	8.522.815
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.419.203	3.966.094	596.827
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	9.167.085	116.742	92.157
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	206.949	2.011.686	3.615.962
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	174.831	127.311	33.473
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	118.265	1.063.512	2.191.822
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	7.374.066	9.981.032	6.885.601
9	Tagihan Kepada Korporasi	13.130.742	7.321.580	8.089.635
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	164.706	72.906	51.856
11	Aset Lainnya	1.423.735	-	-
	TOTAL	**88.036.163**	**36.179.187**	**30.080.148**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak:
1 Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposure yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk).
2 Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3 Pemetaan ke dalam skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos Neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual. Untuk pos Neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items) dimasukkan ke dalam kolom non-kontraktual.

(dalam jutaan Rupiah)

> 5 TAHUN	NON KONTRAKTUAL	TOTAL
(6)	(7)	(8)
2.985.607	-	87.229.391
6.385.852	-	16.291.661
-	-	-
11.549	-	2.290.106
23.543.294	-	27.805.755
-	-	35.247
21.681.073	-	25.080.728
19.840.831	974.117	46.883.224
21.374.674	-	53.168.346
543.367	-	1.466.407
-	6.277.155	8.918.958
96.366.247	**7.251.272**	**269.169.823**

> 5 TAHUN	NON KONTRAKTUAL	TOTAL
(6)	(7)	(8)
1.298.592	-	68.196.312
6.139.507	-	20.121.631
-	-	-
34.396	-	9.410.380
26.651.359	-	32.485.956
160.437	-	496.052
19.967.301	-	23.340.900
7.022.403	717.969	31.981.071
20.381.690	-	48.923.647
399.747	-	689.215
-	6.157.586	7.581.321
82.055.432	**6.875.555**	**243.226.485**

d. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

3. Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

NO.	SEKTOR EKONOMI	TAGIHAN KEPADA PEMERINTAH	TAGIHAN KEPADA ENTITAS SEKTOR PUBLIK	TAGIHAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	232.566	-	
2	Perikanan	-	522	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.176.341	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	2.526.030	-	
6	Konstruksi	-	7.198.478	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	341.088	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	40.862	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.075.401	-	
10	Perantara Keuangan	-	1.672.732	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	11.876	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	
20	Lainnya	87.229.391	1.015.765	-	
	Total	**87.229.391**	**16.291.661**	**-**	

(dalam jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 2021								
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI								
	TAGIHAN KEPADA BANK	PEMBIAYAAN BERAGUN RUMAH TINGGAL	PEMBIAYAAN BERAGUN PROPERTI KOMERSIAL	PEMBIAYAAN PEGAWAI / PENSIUNAN	TAGIHAN KEPADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN PORTOFOLIO RITEL	TAGIHAN KEPADA KORPORASI	TAGIHAN YANG TELAH JATUH TEMPO	ASET LAINNYA
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	29.367	2.334.046	6.200.695	88.162	-
	-	-	-	1.429	913.286	632.324	30.428	-
	-	-	-	84	30.896	2.373.441	7.745	-
	-	-	-	805	1.225.062	5.776.422	229.024	-
	-	-	-	189	22.856	1.196.885	34.859	-
	-	-	22.218	555	266.451	6.919.097	184.087	-
	-	-	-	9.172	7.868.778	5.790.696	259.250	-
	-	-	-	1.452	968.721	520.495	19.818	-
	-	-	-	592	316.138	2.643.362	8.696	-
	110.282	-	-	-	17.160	3.018.493	6.691	-
	-	-	11.537	952	408.686	2.677.971	16.176	-
	-	-	-	-	-	3.948	-	-
	-	-	-	100	145.722	3.468.476	4.616	-
	-	-	-	13	258.741	4.285.003	1.931	-
	-	-	-	3.773	2.106.318	777.010	45.082	-
	-	-	-	1.719	162.125	66.386	3.243	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	27.805.755	1.492	25.030.526	28.569.196	5.554.283	526.599	-
	2.179.824	-	-	-	1.269.042	1.263.359	-	8.918.958
	2.290.106	**27.805.755**	**35.247**	**25.080.728**	**46.883.224**	**53.168.346**	**1.466.407**	**8.918.958**

NO.	SEKTOR EKONOMI	TAGIHAN KEPADA PEMERINTAH	TAGIHAN KEPADA ENTITAS SEKTOR PUBLIK	TAGIHAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	514.569	-
2	Perikanan	-	791	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	2.143.447	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	2.145.444	-
6	Konstruksi	-	6.610.945	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	341.088	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	412.925	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.126.212	-
10	Perantara Keuangan	-	2.568.787	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	815.033	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	110.038	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	1.560	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	68.196.312	2.330.792	-
	Total	**68.196.312**	**20.121.631**	**-**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi:

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposure yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK), dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.

31 DESEMBER 2020								
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI								
	TAGIHAN KEPADA BANK	PEMBIAYAAN BERAGUN RUMAH TINGGAL	PEMBIAYAAN BERAGUN PROPERTI KOMERSIAL	PEMBIAYAAN PEGAWAI / PENSIUNAN	TAGIHAN KEPADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN PORTOFOLIO RITEL	TAGIHAN KEPADA KORPORASI	TAGIHAN YANG TELAH JATUH TEMPO	ASET LAINNYA
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	8.748	-	31.055	2.299.254	5.398.600	45.389	-
	-	81.096	-	6.974	629.732	478.096	1.686	-
	-	643	-	2.127	35.405	1.185.340	33.710	-
	-	29.525	2.399	1.787	1.334.656	5.199.115	141.588	-
	-	235	-	391	29.290	1.450.783	146.816	-
	-	6.830	223.765	241	433.846	7.272.937	7.445	-
	-	45.106	6.724	12.000	6.998.306	5.258.283	72.771	-
	-	10.784	-	2.334	754.500	463.970	4.102	-
	-	2.483	-	1.096	316.334	2.616.006	2.980	-
	245.490	3.665	-	306	64.314	3.022.922	16.178	-
	-	8.950	262.721	1.107	309.400	1.832.736	6.613	-
	-	1.241	-	10.274	3.453	813	-	-
	-	1.629	443	14.760	122.194	3.365.387	5.273	-
	-	4.698	-	2.061	166.299	3.313.402	811	-
	781	21.298	-	2.338	1.006.816	657.438	9.922	-
	-	899	-	2.101	131.467	23.808	1.073	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	32.258.126	-	23.249.948	16.697.826	6.219.938	192.858	-
	9.164.109	-	-	-	647.979	1.164.073	-	7.581.321
	9.410.380	**32.485.956**	**496.052**	**23.340.900**	**31.981.071**	**48.923.647**	**689.215**	**7.581.321**

e. Pengungkapan Tagihan Dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

4. Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	SUMATERA	JAKARTA	JAWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan	42.238.383	138.780.247	64.147.577
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	4.989.303	6.678.976	10.663.938
	a. Belum jatuh tempo	4.627.402	6.502.267	9.942.016
	b. Telah jatuh tempo	361.901	176.709	721.922
3	CKPN - Individual	126.501	196.793	736.376
4	CKPN - Kolektif	1.164.380	1.585.633	2.826.175
5	Tagihan yang dihapus buku	130.443	2.186.577	56.151

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	SUMATERA	JAKARTA	JAWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan	38.254.845	125.425.967	59.236.478
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	5.903.806	4.968.128	11.748.251
	a. Belum jatuh tempo	5.763.604	4.813.824	11.439.073
	b. Telah jatuh tempo	140.202	154.304	309.178
3	CKPN - Individual	136.013	197.587	815.359
4	CKPN - Kolektif	1.116.329	898.954	2.170.660
5	Tagihan yang dihapus buku	24.660	1.491.267	69.068

(dalam jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 2021						
TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	14.772.986	10.626.566	4.573.454	696.476	-	275.835.689
	1.573.610	1.225.078	1.008.594	31.541	-	26.171.040
	1.497.029	1.127.199	978.628	30.092	-	24.704.633
	76.581	97.879	29.966	1.449	-	1.466.407
	105.523	34.736	-	-	-	1.199.929
	308.314	274.361	134.260	36.843	-	6.329.966
	2.551	16.245	10.467	8.685	-	2.411.119

31 DESEMBER 2020						
TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	13.168.950	8.830.759	4.071.596	505.377	-	249.493.972
	3.338.515	1.325.956	1.183.747	39.710	-	28.508.113
	3.304.144	1.289.118	1.172.657	36.478	-	27.818.898
	34.371	36.838	11.090	3.232	-	689.215
	34.276	31.094	2.048	13.346	-	1.229.723
	350.344	217.586	169.055	9.226	-	4.932.154
	72.867	6.072	1.009	231	-	1.665.174

f. Pengungkapan Tagihan Dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

5. Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

NO.	SEKTOR EKONOMI	31 DESEMBER 2021		
		TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI		
		TAGIHAN	TAGIHAN YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI	
			BELUM JATUH TEMPO	TELAH JATUH TEMPO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	9.030.380	1.678.391	88.162
2	Perikanan	1.661.239	419.502	30.428
3	Pertambangan dan Penggalian	2.429.230	54.731	7.745
4	Industri Pengolahan	9.987.078	678.950	229.024
5	Listrik, Gas, dan Air	4.187.537	86.987	34.859
6	Konstruksi	14.953.293	4.058.521	184.087
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15.173.251	3.525.117	259.250
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	1.590.539	440.494	19.818
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.214.681	2.188.976	8.696
10	Perantara Keuangan	5.094.126	229.189	6.691
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.209.005	1.055.410	16.176
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.948	-	-
13	Jasa Pendidikan	3.648.374	987.910	4.616
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.642.567	623.970	1.931
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.026.999	807.847	45.082
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	241.303	98.332	3.243
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	88.314.260	7.770.306	526.599
20	Lainnya	103.427.879	-	-
	Total	**275.835.689**	**24.704.633**	**1.466.407**

(dalam jutaan Rupiah)

CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF	TAGIHAN YANG DIHAPUS BUKU
(6)	(7)	(8)
141.210	336.936	2.411.116
-	93.965	-
4.784	51.398	-
767.714	759.022	-
6.644	436.800	-
25.819	1.344.811	-
67.190	811.348	-
2.910	68.330	-
107.190	319.974	-
11.874	90.587	-
17.124	121.425	-
-	39	-
17.877	53.390	-
10.306	73.140	-
903	143.033	-
-	12.879	-
-	-	-
-	-	-
18.384	1.558.768	3
-	54.121	-
1.199.929	**6.329.966**	**2.411.119**

NO.	SEKTOR EKONOMI	31 DESEMBER 2020			
		TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI			
		TAGIHAN	TAGIHAN YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI		
			BELUM JATUH TEMPO	TELAH JATUH TEMPO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	8.534.323	3.384.350	45.389	
2	Perikanan	1.227.204	426.685	1.686	
3	Pertambangan dan Penggalian	1.288.548	89.383	33.710	
4	Industri Pengolahan	10.159.313	966.414	141.588	
5	Listrik, Gas, dan Air	4.044.214	143.113	146.816	
6	Konstruksi	14.682.969	1.445.873	7.445	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	13.183.184	3.992.057	72.771	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	1.669.077	558.014	4.102	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.237.029	2.489.066	2.980	
10	Perantara Keuangan	6.521.060	367.744	16.178	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.361.164	1.277.028	6.613	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	15.904	2.143	-	
13	Jasa Pendidikan	3.530.606	1.106.451	5.273	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.755.564	707.981	811	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	1.739.222	735.773	9.922	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	163.364	84.929	1.073	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	77.462.299	9.645.460	164.590	
20	Lainnya	92.918.928	396.434	28.268	
	Total	**249.493.972**	**27.818.898**	**689.215**	

g. Pengungkapan Rincian Mutasi CKPN

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

6. Rincian Mutasi CKPN

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	KETERANGAN	31 DESEMBER 2021	
		RINCIAN MUTASI CKPN	
		CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	1.229.723	4.932.154
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)		
	2.a Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan	461.685	3.186.438
	2.b Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan	(505.024)	(2.011.041)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan	13.545	222.415
	Saldo akhir CKPN	**1.199.929**	**6.329.966**

CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF	TAGIHAN YANG DIHAPUS BUKU
(6)	(7)	(8)
70.902	507.009	12
9.332	55.705	-
7.925	35.738	-
769.465	645.735	-
6.576	301.492	-
3.267	562.117	-
85.616	602.207	37
6.014	68.857	-
112.578	119.055	-
77.693	149.827	-
26.412	121.030	-
-	263	-
19.049	99.546	-
5.074	165.765	-
2.867	83.214	-
40	11.419	-
-	-	-
-	-	-
24.422	1.233.422	1.665.125
2.491	169.753	-
1.229.723	**4.932.154**	**1.665.174**

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	KETERANGAN	31 DESEMBER 2020	
		RINCIAN MUTASI CKPN	
		CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	907.750	2.981.148
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)		
	2.a Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan	123.651	3.440.975
	2.b Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan	(116.069)	(1.489.969)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan	314.391	-
	Saldo akhir CKPN	**1.229.723**	**4.932.154**

h. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

7. Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	LEMBAGA PEMERINGKAT	PERINGKAT JANGKA PANJANG			
		STANDARD AND POOR'S	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-
		FITCH RATING INTERNASIONAL	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-
		MOODY'S INVESTOR SERVICE	AAA	AA1 S.D AA3	A1 S.D A3	BAA1 S.D BAA3
		FITCH RATING INDONESIA	AAA (IDN)	AA+(IDN) S.D AA-(IDN)	A+(IDN) S.D A-(IDN)	BBB+(IDN) S.D BBB-(IDN)
		PEMERINGKAT EFEK INDONESIA	IDAAA	IDAA+ S.D IDAA-	IDA+ S.D IDA-	IDBBB+ S.D IDBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		90.000	-	-	37.599.151
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		4.458.796	2.040.000	3.285.725	1.875.693
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		888.750	15.165	36.911	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	2.242.465	4.340
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	TOTAL		**5.437.546**	**2.055.165**	**5.565.101**	**39.479.184**

(dalam jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 2021									
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT									
				PERINGKAT JANGKA PENDEK				TANPA PERINGKAT	TOTAL
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	A-1	A-2	A-3	KURANG DARI A-3		
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	F1+ S.D F1	F2	F3	KURANG DARI F3		
	BA1 S.D BA3	B1 S.D B3	KURANG DARI B3	P-1	P-2	P-3	KURANG DARI P-3		
	BB+(IDN) S.D BB-(IDN)	B+(IDN) S.D B-(IDN)	KURANG DARI B-(IDN)	F1+(IDN) S.D F1(IDN)	F2(IDN)	F3(IDN)	KURANG DARI F3(IDN)		
	ID BB+ S.D IDBB-	ID B+ S.D IDB-	KURANG DARI IDB-	IDA1	IDA2	IDA3 S.D IDA4	KURANG DARI IDA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	49.540.240	87.229.391
	-	-	-	-	-	-	-	4.631.447	16.291.661
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1.349.280	2.290.106
	-	-	-	-	-	-	-	50.921.541	53.168.346
	-	-	-	-	-	-	-	106.442.508	158.979.504

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	LEMBAGA PEMERINGKAT	PERINGKAT JANGKA PANJANG			
		STANDARD AND POOR'S	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-
		FITCH RATING INTERNASIONAL	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-
		MOODY'S INVESTOR SERVICE	AAA	AA1 S.D AA3	A1 S.D A3	BAA1 S.D BAA3
		FITCH RATING INDONESIA	AAA (IDN)	AA+(IDN) S.D AA-(IDN)	A+(IDN) S.D A-(IDN)	BBB+(IDN) S.D BBB-(IDN)
		PEMERINGKAT EFEK INDONESIA	IDAAA	IDAA+ S.D IDAA-	IDA+ S.D IDA-	IDBBB+ S.D IDBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		155.204	-	-	8.810.534
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		7.103.046	1.740.000	2.844.160	1.661.610
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		4.140.816	6.472	47.872	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		216.141	270.000	2.199.112	486.370
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	TOTAL		**11.615.207**	**2.016.472**	**5.091.144**	**10.958.514**

31 DESEMBER 2020										
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT										
				PERINGKAT JANGKA PENDEK					TANPA PERINGKAT	TOTAL
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	A-1	A-2	A-3	KURANG DARI A-3			
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	F1+ S.D F1	F2	F3	KURANG DARI F3			
	BA1 S.D BA3	B1 S.D B3	KURANG DARI B3	P-1	P-2	P-3	KURANG DARI P-3			
	BB+(IDN) S.D BB-(IDN)	B+(IDN) S.D B-(IDN)	KURANG DARI B-(IDN)	F1+(IDN) S.D F1(IDN)	F2(IDN)	F3(IDN)	KURANG DARI F3(IDN)			
	ID BB+ S.D IDBB-	ID B+ S.D IDB-	KURANG DARI IDB-	IDA1	IDA2	IDA3 S.D IDA4	KURANG DARI IDA4			
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	-	-	-	-	-	-	-	59.230.574	68.196.312	
	-	-	-	-	-	-	-	6.772.815	20.121.631	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	5.215.220	9.410.380	
	-	-	34.826	-	-	-	904	45.716.294	48.923.647	
	-	-	34.826	-	-	-	904	116.934.903	146.651.970	

i. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk): Transaksi Lindung Nilai Syariah Over The Counter

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

8. Risiko Kredit Pihak Lawan

a. Transaksi Linding Nilai Syariah Over the Counter

NO.	VARIABEL YANG MENDASARI	NILAI NOSIONAL			
		≤ 1 TAHUN	> 1 TAHUN - ≤ 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Shariah compliant profit rate swap	-	-	-	
2	Shariah compliant foreign currency swap	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	TOTAL	-	-	-	

NO.	VARIABEL YANG MENDASARI	NILAI NOSIONAL			
		≤ 1 TAHUN	> 1 TAHUN - ≤ 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Shariah compliant profit rate swap	-	-	-	
2	Shariah compliant foreign currency swap	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	TOTAL	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 2021					
TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH OTC					
	TAGIHAN LINDUNG NILAI SYARIAH	KEWAJIBAN LINDUNG NILAI SYARIAH	TAGIHAN BERSIH SEBELUM MRK	MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2020					
TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH OTC					
	TAGIHAN LINDUNG NILAI SYARIAH	KEWAJIBAN LINDUNG NILAI SYARIAH	TAGIHAN BERSIH SEBELUM MRK	MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

j. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk): Transaksi Repo

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

8. Risiko Kredit Pihak Lawan

b. Transaksi Repo

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021			
		TRANSAKSI REPO			
		NILAI WAJAR SSB REPO	KEWAJIBAN REPO	TAGIHAN BERSIH	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2020			
		TRANSAKSI REPO			
		NILAI WAJAR SSB REPO	KEWAJIBAN REPO	TAGIHAN BERSIH	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

k. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk): Transaksi Reverse Repo

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

8. Risiko Kredit Pihak Lawan

c. Transaksi Reverse Repo

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021			
		REVERSE REPO			
		TAGIHAN BERSIH	NILAI MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2020			
		REVERSE REPO			
		TAGIHAN BERSIH	NILAI MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

I. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

9. Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021									
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT									ATMR
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	EKSPOSUR LAPORAN POSISI KEUANGAN										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	87.229.391	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	605.620	6.205.905	-	-	9.480.135	-	-	-		5.981.249
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	8.138	2.139.454	-	-	115.718	-	-	-		485.750
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	620	7.677.574	7.385.463	12.742.096	-	-	-	-		7.841.614
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	35.247	-		35.247
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	391	-	-	-	25.080.338	-	-	-		12.540.169
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.752.368	-	-	-	298.431	40.563.382	-	-		30.571.752
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.912.176	-	-	-	2.232.432	-	47.198.271	-		48.314.487
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	156	-	-	-	-	-	1.466.252	-		1.466.252
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	4.799.055	-		4.799.055
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**95.508.860**	**16.022.933**	**7.385.463**	**12.742.096**	**37.207.054**	**40.563.382**	**53.498.825**	**-**		**112.035.575**

(dalam jutaan Rupiah)

	BEBAN MODAL	31 DESEMBER 2020									ATMR	BEBAN MODAL
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	-	68.196.312	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	478.500	711.024	8.550.155	-	-	10.860.452	-	-	-		7.140.257	571.221
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	38.860	48.966	9.080.865	-	-	280.550	-	-	-		1.956.448	156.516
	627.329	789	6.875.427	6.851.057	18.758.684	-	-	-	-		9.653.389	772.271
	2.820	15.290	-	-	-	-	-	480.762	-		480.762	38.461
	1.003.214	388	-	-	-	23.340.512	-	-	-		11.670.256	933.620
	2.445.740	4.230.715	-	-	-	236.894	26.147.513	-	-		19.729.082	1.578.327
	3.865.159	2.073.000	486.141	-	-	2.199.112	-	43.308.306	35.731		44.558.687	3.564.695
	117.300	338	-	-	-	-	-	688.876	-		688.876	55.110
	383.924	-	-	-	-	-	-	4.400.582	-		4.400.582	352.047
	8.962.846	**75.276.822**	**24.992.588**	**6.851.057**	**18.758.684**	**36.917.520**	**26.147.513**	**48.878.526**	**35.731**		**100.278.339**	**8.022.268**

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021									ATMR
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT									
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B	EKSPOSUR LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	-	429	-	-	26.367	-	-	-		13.269
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-		-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.615	-	-	-	-	1.266.427	-	-		949.820
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.780	-	-	-	10.033	-	809.654	-		814.671
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**8.395**	**429**	**-**	**-**	**36.400**	**1.266.427**	**809.654**	**-**		**1.777.760**

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021									ATMR
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT									
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*)										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**

	BEBAN MODAL	31 DESEMBER 2020									ATMR	BEBAN MODAL
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	1.062	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	75.986	145.230	-	-	-	-	1.220.719	-	-		915.539	73.243
	65.174	34.212	-	-	-	-	-	787.144	-		787.144	62.972
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	142.222	**179.442**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.220.719**	**787.144**	**-**		**1.702.683**	**136.215**

	BEBAN MODAL	31 DESEMBER 2020									ATMR	BEBAN MODAL
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

m. Pengungkapan Tagihan Bersih Dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

10. Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021			
		TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MRK			
		TAGIHAN BERSIH	BAGIAN YANG DIJAMIN DENGAN		
			AGUNAN	GARANSI	ASURANSI PEMBIAYAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**EKSPOSUR LAPORAN POSISI KEUANGAN**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	87.229.391	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.291.661	605.620	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.263.310	8.138	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	27.805.755	621	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	35.247	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	25.080.728	391	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	45.614.182	5.050.799	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	52.342.879	2.912.176	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.466.407	156	-	-
11	Aset Lainnya	8.918.958	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**267.048.518**	**8.577.901**	**-**	**-**
B	**EKSPOSUR LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	26.796	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.269.042	2.615	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	825.467	5.780	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**2.121.305**	**8.395**	**-**	**-**
C	**EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*)**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah)

			31 DESEMBER 2020					
			TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MRK					
		BAGIAN YANG TIDAK DIJAMIN	TAGIHAN BERSIH	BAGIAN YANG DIJAMIN DENGAN				BAGIAN YANG TIDAK DIJAMIN
	LAINNYA			AGUNAN	GARANSI	ASURANSI PEMBIAYAAN	LAINNYA	
	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)
		87.229.391	68.196.312	-	-	-		68.196.312
		15.686.041	20.121.631	711.024	-	-		19.410.607
		-	-	-	-	-		-
		2.255.172	9.410.380	48.966	-	-		9.361.414
		27.805.134	32.485.956	789	-	-		32.485.167
		35.247	496.052	15.290	-	-		480.762
		25.080.337	23.340.900	388	-	-		23.340.512
		40.563.383	30.615.123	4.467.609	-	-		26.147.514
		49.430.703	48.102.290	2.073.000	-	-		46.029.290
		1.466.251	689.215	338	-	-		688.877
		8.918.958	7.581.321	-	-	-		7.581.321
		258.470.617	**241.039.180**	**7.317.404**	**-**	**-**		**233.721.776**
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		26.796	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		1.266.427	1.365.948	145.230	-	-		1.220.718
		819.687	821.357	34.212	-	-		787.145
		-	-	-	-	-		-
		2.112.910	**2.187.305**	**179.442**	**-**	**-**		**2.007.863**

n. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

11. Transaksi Sekuritisasi Aset

NO.	EKSPOSUR SEKURITISASI	31 DESEMBER 2021			
		TRANSAKSI SEKURITISASI ASET			
		NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	NILAI ASET YANG DISEKURITISASI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI		
			TELAH JATUH TEMPO	BELUM JATUH TEMPO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung:	-	-	-	
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
6	Bank bertindak sebagai pemodal	-	-	-	
	a. *Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. *Junior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	

NO.	EKSPOSUR SEKURITISASI	31 DESEMBER 2020			
		TRANSAKSI SEKURITISASI ASET			
		NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	NILAI ASET YANG DISEKURITISASI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI		
			TELAH JATUH TEMPO	BELUM JATUH TEMPO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung:	-	-	-	
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
6	Bank bertindak sebagai pemodal	-	-	-	
	a. *Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. *Junior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

	LABA/RUGI DARI AKTIVITAS SEKURITISASI	ATMR	PENGURANG MODAL
	(6)	(7)	(8)
	-		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	
	-	-	
	-	-	-
	-	-	-
	-		-

	LABA/RUGI DARI AKTIVITAS SEKURITISASI	ATMR	PENGURANG MODAL
	(6)	(7)	(8)
	-		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	
	-	-	
	-	-	-
	-	-	-
	-		-

o. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset Bertindak sebagai Kreditur Awal

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

12. Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak Sebagai Kreditur Awal

NO.	UNDERLYING ASSET	31 DESEMBER 2021	
		TRANSAKSI SEKURITISASI ASET KREDITUR AWAL	
		NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	KEUNTUNGAN/ KERUGIAN PENJUALAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
10	Aset Lainnya	-	-
	TOTAL	**-**	**-**

p. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

a. Laporan Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021		
		EKSPOSUR ASET NERACA		
		TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	87.229.391	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.291.661	6.196.192	5.981.249
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.263.310	489.819	485.750
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	27.805.755	7.841.752	7.841.614
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	35.247	35.247	35.247
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	25.080.728	12.540.364	12.540.169
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	45.614.182	34.210.636	30.571.752
9	Tagihan Kepada Korporasi	52.342.879	51.226.663	48.314.487
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.466.407	1.466.408	1.466.252
11	Aset Lainnya	8.918.958	-	4.799.055
TOTAL		**267.048.518**	**114.007.081**	**112.035.575**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 2020	
	TRANSAKSI SEKURITISASI ASET KREDITUR AWAL	
	NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	KEUNTUNGAN/ KERUGIAN PENJUALAN
	(5)	(6)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 2020		
	EKSPOSUR ASET NERACA		
	TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)
	68.196.312	-	-
	20.121.631	7.407.902	7.140.257
	-	-	-
	9.410.380	1.980.931	1.956.448
	32.485.956	9.653.591	9.653.389
	496.052	496.052	480.762
	23.340.900	11.670.450	11.670.256
	30.615.123	22.961.342	19.729.082
	48.102.290	46.631.686	44.558.687
	689.215	689.214	688.876
	7.581.321	-	4.400.582
	241.039.180	**101.491.168**	**100.278.339**

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

b. Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021		
		EKSPOSUR KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
		TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	26.796	13.269	13.269
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.269.042	951.782	949.820
9	Tagihan Kepada Korporasi	825.467	820.450	814.671
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
TOTAL		2.121.305	1.785.501	1.777.760

c. Laporan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021		
		EKSPOSURE RISIKO KREDIT CCR		
		TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
TOTAL		-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 2020		
	EKSPOSUR KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
	TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	1.365.948	1.024.461	915.539
	821.357	821.357	787.144
	-	-	-
	2.187.305	**1.845.818**	**1.702.683**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 2020		
	EKSPOSURE RISIKO KREDIT CCR		
	TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

d. Laporan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021		
		EKSPOSUR RISIKO KREDIT *SETTLEMENT RISK*		
		NILAI EKSPOSUR	FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*Delivery versus payment*	-		-
	a. Beban modal 8% (5-15 hari)	-		-
	b. Beban modal 50% (16-30 hari)	-		-
	c. Beban modal 75% (31-45 hari)	-		-
	d. Beban modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-
2	*Non-delivery versus payment*	-	-	
TOTAL		-	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

e. Laporan Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	JENIS TRANSAKSI	31 DESEMBER 2021		31 DESEMBER 2020	
		EKSPOSUR SEKURITISASI		EKSPOSUR SEKURITISASI	
		FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK	FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan		-		-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum		-		-
TOTAL		-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 2020		
EKSPOSUR RISIKO KREDIT *SETTLEMENT RISK*		
NILAI EKSPOSUR	FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK
(6)	(7)	(8)
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-	-	
-	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

f. Laporan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	113.813.335	101.981.022
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

B. RISIKO PASAR

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	JENIS RISIKO	31 DESEMBER 2021		31 DESEMBER 2020	
		BANK		BANK	
		BEBAN MODAL	ATMR	BEBAN MODAL	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Benchmark Suku Bunga	2.985	37.312	2.574	32.173
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	2.985	37.312	2.574	32.173
2	Risiko Nilai Tukar	5.328	66.601	25.712	321.400
3	Risiko Ekuitas 1)				
4	Risiko Komoditas 1)				
TOTAL		8.313	103.913	28.286	353.573

Keterangan: 1) : Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

r. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

C. RISIKO LIKUIDITAS

1. LAPORAN PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH

NO.	POS-POS	SALDO	31 DESEMBER 2021 JATUH TEMPO *)		
			≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	LAPORAN POSISI KEUANGAN				
	A. Aset	257.921.977	6.719.780	3.798.257	2.620.957
	1. Kas	4.032.230	4.032.230	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	19.997.470	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	561.799	-	-	-
	4. Surat berharga yang dimiliki	66.958.932	-	-	-
	5. Piutang:	-			
	a. Piutang murabahah (*gross*)	101.050.824	393.279	269.410	604.968
	b. Piutang salam	-	-	-	-
	c. Piutang istishna'	359	-	-	-
	d. Piutang *qardh*	7.951.117	1.894.804	3.375.280	1.534.569
	6. Pembiayaan bagi hasil:	-			
	a. Pembiayaan *mudharabah*	1.628.437	32.298	149.239	405.855
	b. Pembiayaan musyarakah	54.377.076	-	-	44.363
	7. Pembiayaan sewa	1.001.567	5.003	4.328	31.202
	8. Aset lainnya	362.166	362.166	-	-
	B. Liabilitas	233.467.740	138.798.892	95.220	81.040
	1. Dana pihak ketiga				
	a. Giro wadiah	20.059.039	20.059.039	-	-
	b. Deposito *mudharabah*	94.363.263	360.403	89.793	79.919
	c. Tabungan wadiah	34.824.777	34.824.777	-	-
	d. Tabungan *mudharabah*	64.284.010	64.284.010	-	-
	e. Lainnya	12.942.306	12.942.306	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	1.195.887	693.183	4.530	499
	4. Surat berharga yang diterbitkan	1.375.000	1.375.000	-	-
	5. Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	4.423.458	4.260.174	897	622
II	LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI				
	1. Kewajiban komitmen	2.008.487	-	-	-
	2. Kewajiban kontinjensi	1.127.770	-	-	-
	Selisih (A-B)	24.454.237	(132.079.112)	3.703.037	2.539.917

(dalam jutaan Rupiah)

			SALDO	31 DESEMBER 2020				
				JATUH TEMPO *)				
	> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN		≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN	> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN
	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	33.917.801	**210.865.182**	**224.277.979**	**36.535.760**	**16.231.691**	**14.591.523**	**9.111.278**	**147.807.727**
	-	-	2.959.922	2.959.922	-	-	-	-
	19.997.470	-	16.195.526	9.537.087	1.978.516	3.179.923	1.500.000	-
	549.605	12.194	1.624.699	1.624.699	-	-	-	-
	10.526.635	56.432.297	48.613.723	15.837.167	3.573.079	6.752.839	548.000	21.902.638
	1.815.544	97.967.623	89.438.045	356.099	550.835	667.236	2.075.938	85.787.937
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	359	637	112	-	11	-	514
	144.797	1.001.667	9.270.400	2.335.938	4.334.564	1.408.318	277.688	913.892
	329.414	711.631	2.670.982	41.966	274.112	294.066	932.500	1.128.338
	528.055	53.804.658	51.319.335	3.181.452	5.515.226	2.283.956	3.742.754	36.595.947
	26.281	934.753	1.525.085	1.693	5.359	5.174	34.398	1.478.461
	-	-	659.625	659.625	-	-	-	-
	13.701.540	80.791.048	202.242.054	177.031.439	14.624.116	4.133.709	6.451.748	1.042
	-	-	21.242.916	21.242.916	-	-	-	-
	13.516.526	80.316.622	80.353.678	55.486.387	14.462.227	4.009.711	6.394.551	802
	-	-	29.458.369	29.458.369	-	-	-	-
	-	-	58.336.415	58.336.415	-	-	-	-
	-	-	4.953.829	4.953.829	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	182.955	314.720	1.222.342	1.114.323	29.058	21.764	57.197	-
	-	-	2.030.000	2.030.000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.059	159.706	4.644.505	4.409.200	132.831	102.234	-	240
	-	2.008.487	1.946.681	33.278	-	-	1.588	1.911.816
	24.954	1.102.816	1.715.516	427.469	333.416	179.834	272.978	501.819
	20.216.261	**130.074.134**	**22.035.925**	**(140.495.679)**	**1.607.575**	**10.457.814**	**2.659.530**	**147.806.685**

s. Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

C. RISIKO LIKUIDITAS

2. LAPORAN PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS VALUTA ASING

NO.	POS-POS	SALDO	31 DESEMBER 2021 JATUH TEMPO *)		
			≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**				
	A. Aset	**7.367.104**	**264.667**	**545.806**	**746.882**
	1. Kas	87.673	87.673	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	566.110	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	1.161.990	-	-	-
	4. Surat berharga yang dimiliki	773.213	-	-	-
	5. Piutang:				
	a. Piutang murabahah (*gross*)	131.076	-	-	-
	b. Piutang salam	-	-	-	-
	c. Piutang istishna'	-	-	-	-
	d. Piutang *qardh*	1.468.114	175.426	545.806	746.882
	6. Pembiayaan bagi hasil:				
	a. Pembiayaan *mudharabah*	-	-	-	-
	b. Pembiayaan musyarakah	3.177.360	-	-	-
	7. Pembiayaan sewa	1.568	1.568	-	-
	8. Aset lainnya	-	-	-	-
	B. Liabilitas	6.807.407	2.993.911	491	463
	1. Dana pihak ketiga				
	a. Giro wadiah	2.352.575	2.352.575	-	-
	b. Deposito *mudharabah*	3.820.519	7.023	491	463
	c. Tabungan wadiah	11.499	11.499	-	-
	d. Tabungan *mudharabah*	254.357	254.357	-	-
	e. Lainnya	339.013	339.013	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	-	-	-	-
	4. Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
	5. Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	29.444	29.444	-	-
II	**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**				
	1. Kewajiban komitmen	1.119.394	-	-	-
	2. Kewajiban kontinjensi	559.697	-	-	-
	Selisih (A-B)	**559.697**	**(2.729.244)**	**545.315**	**746.419**

(dalam jutaan Rupiah)

		SALDO	31 DESEMBER 2020				
			JATUH TEMPO *)				
> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN		≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN	> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN
(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.514.312	**4.295.437**	**15.303.545**	**12.644.915**	**93.842**	**166.219**	**3.732**	**2.394.837**
-	-	220.817	220.817	-	-	-	-
352.322	213.788	5.332.407	5.332.407	-	-	-	-
1.161.990	-	7.090.093	7.090.093	-	-	-	-
-	773.213	596.771	-	87.411	-	-	509.360
		-					
-	131.076	261	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.455	1.598	6.431	1.035	281	1.110
		-					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.177.360	2.029.198	-	-	165.184	-	1.864.014
-	-	23.543	-	-	-	3.451	20.092
-	-	-	-	-	-	-	-
225.886	3.586.656	15.596.325	14.877.155	502.012	91.230	125.928	-
-	-	9.579.697	9.579.697	-	-	-	-
225.886	3.586.656	5.315.618	4.596.448	502.012	91.230	125.928	-
-	-	122.601	122.601	-	-	-	-
-	-	148.979	148.979	-	-	-	-
-	-	394.055	394.055	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	35.375	35.375	-	-	-	-
-	3.926	8.736	8.039	697	-	-	-
-	532.659	297.737	20.098	-	148.931	50.418	78.291
1.288.426	**708.781**	**(292.780)**	**(2.232.240)**	**(408.170)**	**74.989**	**(122.196)**	**2.394.837**

t. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

D. RISIKO OPERASIONAL

NO.	PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN	31 DESEMBER 2021		
		"PENDAPATAN BRUTO (RATA-RATA 3 TAHUN TERAKHIR)"	BEBAN MODAL	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan indikator standar	-	-	-
TOTAL				

O. Profil Risiko

Profil risiko merupakan hasil penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan mananjemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi Bank di masa yang akan datang dalam periode tertentu. Penilaian risiko dilakukan secara mandiri (*self assessment*).

Peringkat komposit profil risiko Bank per 31 Desember 2021 adalah 2 dengan predikat risiko inheren *Low to Moderate*, dan predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *Satisfactory*.

NO.	RISIKO	INHERENT RISK	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	NET RISK
1.	Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2
2.	Risiko Pasar	Low	Satisfactory	1
3.	Risiko Likuiditas	Low	Satisfactory	1
4.	Risiko Operasional	Moderate	Satisfactory	2
5.	Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2
6.	Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2
7.	Risiko Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2
8.	Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2
9.	Risiko Investasi	Moderate	Satisfactory	2
10.	Risiko Imbal Hasil	Low to Moderate	Satisfactory	2
	Peringkat Komposit	**Low to Moderate**	**Satisfactory**	**2**

(dalam jutaan Rupiah)

31 DESEMBER 2020		
"PENDAPATAN BRUTO (RATA-RATA 3 TAHUN TERAKHIR)"	BEBAN MODAL	ATMR
(6)	(7)	(8)
10.970.433	1.645.565	20.569.561

Pada tahun 2021, Regulator menerbitkan beberapa peraturan yang berpengaruh terhadap aktivitas/ kegiatan Bank, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.03/2021 tentang Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/ POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/ POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 26/ POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
7. Peraturan Bank Indonesia No. 23 /10/PBI/2021 tentang Pasar Uang.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/16/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/ SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/ SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum
16. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.
17. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/11/ PADG/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

18. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast payment (BI-FAST)
20. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/26/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG Perubahan Ketiga LTV/FTV dan Uang Muka).
21. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/27/PADG/2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
22. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/28/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko
23. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/29/PADG/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
24. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/30/PADG/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
25. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/31/PADG/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
26. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.

Bank mengantisipasi terbitnya regulasi baru dengan: mengkinikan prosedur, kebijakan, dan limit Bank sesuai dengan regulasi terkini serta menyelaraskan mekanisme sistem pelaporan Bank dengan sistem pelaporan regulator.

Mengantisipasi pemberlakukan ketentuan mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), BSI mulai mengidentifikasi dan menetapkan strategi penyaluran pembiayaan Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Hal ini untuk memenuhi ketentuan rasio RPIM yang ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2022 oleh regulator

P. Rencana Pengembangan Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko diselaraskan dengan perkembangan bisnis Bank, kondisi internal dan eksternal termasuk adanya regulasi baru. Rencana pengembangan manajemen risiko yang akan dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

1. Organisasi
   Penguatan organisasi DCOR dan RBC melalui pembentukan organ Senior Operational Risk Head
2. Tools dan Metodologi
   Pengembangan dan penguatan risk tools dan metodologi melalui antara lain:
   a. Pengembangan metodologi portfolio guideline, CKPN, stress test.
   b. Implementasi portfolio & Risk Integration system
   c. Implementasi operational risk, market risk & Liquidity risk management system
   d. Implementasi rating system pembiayaan wholesale dan new Scoring Model
   e. Implementasi *Anti Fraud Management System*
   f. Pengembangan Pipeline Management System pada Wholesale Alliance Integrated System

Q. Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perusahaan Induk

Bank melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk yang menjadi entitas utama dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk (Bank Mandiri). Konsolidasi dan integrasi ditujukan untuk penguatan pengelolaan risiko secara internal dan memenuhi ketentuan regulator.

Konsolidasi dan integrasi penerapan manajemen risiko tersebut mencakup konsolidasi sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen risiko, sinkronisasi arsitektur kebijakan dan prosedur operasional bank serta *tools* dan metodologi manajemen risiko. Secara berkala Bank bersama perusahaan induk menyelenggarakan *Integrated Risk Management Forum* dan *Annual Integrated Risk and Governance Conference*, serta forum konsultasi/ *sharing* dan diskusi lainnya sesuai kebutuhan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan GCG mampu menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan.

Penerapan GCG di BSI menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan dapat terjalin dengan baik, sehingga menciptakan iklim bisnis yang kondusif,



Tata Kelola Perusahaan



Sebagai wujud dari komitmen penerapan GCG, BSI telah melaksanakan penilaian mandiri untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

DASAR PENERAPAN GCG

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkelanjutan di lingkungan Bank. BSI meyakini, melalui penerapan prinsip GCG, Bank akan menjalankan sistem perbankan yang sehat serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang syariah.

Penerapan GCG juga menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan terjalin dengan baik. Hal itu akan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, sehingga BSI mampu mencapai tujuan usaha yang ditargetkan secara berkesinambungan. Untuk itu, implementasi GCG harus dilakukan secara terarah dan terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan BSI mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

A. Dasar

1. Al-Qur'an dan Al – Hadits.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya.
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
4. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya.
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan berikut segala perubahanya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahanya
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut segala perubahanya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 / POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum berikut segala perubahanya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
16. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/9/DPbS tanggal 07 April 2009 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya.
17. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39 / SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahanya.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS berikut segala perubahanya.
21. Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN).
22. Anggaran Dasar.
23. Kebijakan Manajemen Risiko.
24. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern.
25. Pedoman Tata Kelola Teritegrasi Bank Mandiri dengan Perusahaan Anak.

B. **Prinsip / Asas**

1. **Keterbukaan** (***Transparency***)
    a. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
    b. Memiliki Kebijakan Perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
    c. Menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan rahasia jabatan.
2. **Akuntabilitas *(Accountability)***
    a. Sasaran usaha dan strategi dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
    b. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
    c. Masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
    d. *Check and balance system* dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan.
    e. Kinerja berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta *reward and punishment system*.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
    Dalam menjalankan operasionalnya, Bank wajib bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. **Profesional (*Professional*)**
    a. Menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan *(conflict of interest)*.
    b. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
    a. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran *(equal treatment)*.
    b. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank.
    c. Memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

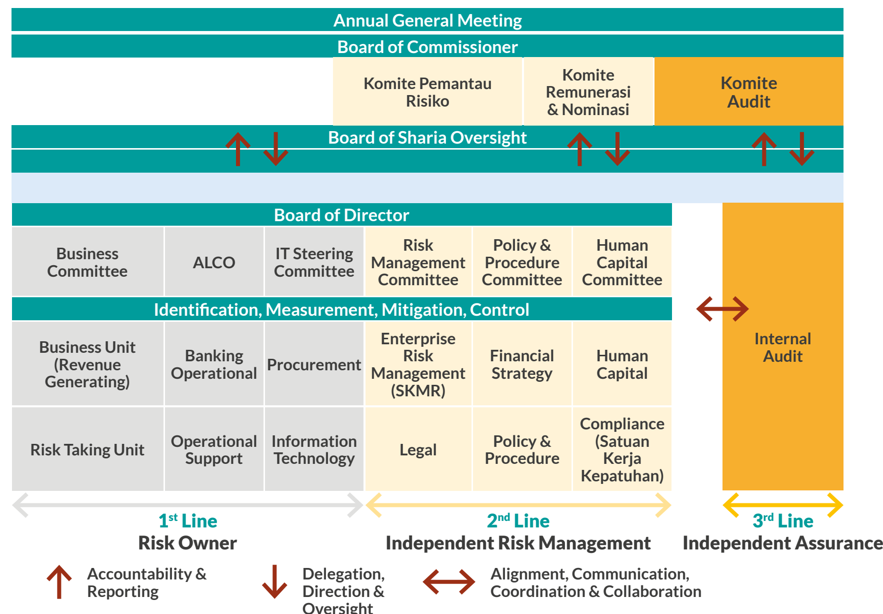
Kelima prinsip tersebut di atas disingkat dengan **TARProF**. Atas kelimat prinsip tersebut, Prinsip –prinsip Syariah diterapkan oleh Bank dijiwai oleh sifat-sifat luhur Rasulullah SAW dalam bermuamalah, yaitu kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarkat (*tabligh)*, kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah)*

STRUKTUR TATA KELOLA

Penetapan struktur tata kelola di BSI, antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Good Corporate Governance

"BSI menggunakan *Three Lines Model* dalam membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif untuk memungkinkan pencapaian tujuan, dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat."



Struktur GCG BSI secara garis besar terbagi atas Organ Utama dan Organ Pendukung, yang didukung dengan kebijakan dan prosedur. Struktur organisasi Tata Kelola Bank sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
b. Dewan Komisaris;
c. Dewan Pengawas Syariah;
d. Direksi;
e. Komite-Komite di bawah Koordinasi Dewan Komisaris; dan
f. Komite-Komite di bawah Koordinasi Direksi.

Organ Utama BSI adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan strategis dan penting, yang berkaitan dengan kepentingan usaha BSI dan didasarkan pada anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan Perseroan serta memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola.

Dewan Pengawas Syariah

Organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Direksi

Direksi adalah organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan, serta bertindak atas nama Perseroan dalam urusan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi yang baik antara lain diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank; dan
6. Penerapan fungsi manajemen risiko.

PEMEGANG SAHAM

Hak Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. BSI juga memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara umum, Pemegang Saham memiliki hak untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang.
4. Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

BSI merupakan salah satu entitas anak dari 3 (tiga) bank BUMN. Pemegang saham mayoritas Bank adalah PT Bank Mandiri Tbk (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), yang ketiganya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia membagi RUPS ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tahun Buku Bank ditutup/berakhir. RUPSLB diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Hak Pemegang Saham terkait RUPS

Mengacu pada Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, peraturan perundang-undangan serta best practice, hak Pemegang Saham memiliki hak sebagai berikut:

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut atau anggaran dasar. RUPS menjadi wadah bagi Pemegang Saham untuk menggunakan haknya, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta meminta informasi tentang pengambilan keputusan strategis ataupun pengelolaan Perseroan.

5. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
6. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat- lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.

8. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
9. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI
10. Menominasikan calon Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.
11. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
13. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Regulasi tersebut mengungkapkan, RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil.

Sesuai dengan regulasi tersebut, tata cara atau proses penyelenggaraan RUPS mencakup:

a. Pemberitahuan

   Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

b. Pengumuman

   Direksi menyampaikan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan. Penyampaian pengumuman sedikitnya memuat:
   1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
   3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
   4. tanggal pemanggilan RUPS.

c. Pemanggilan

   Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 21 hari sebelum tanggal penyelenggaraan. Pemanggilan sedikitnya memuat:
   1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
   2. Waktu penyelenggaraan RUPS;
   3. Tempat penyelenggaraan RUPS;
   4. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   5. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
   7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

d. Penyelenggaraan

   Pelaksanaan RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

e. Risalah Rapat
   1. Risalah RUPS disampaikan ke public paling lambat 2 (dua) hari keja setelah RUPS diselenggarakan.
   2. Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan. Informasi yang disampaikan, sedikitnya memuat:
      a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
      b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
      c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
      d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
      e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
      f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
      g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
      h) Keputusan RUPS; dan
      i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu, RUPS Tahunan pada tanggal 6 Mei 2021 dan dan RUPSLB pada 24 Agustus 2021.

RUPS Tahunan

Rangkaian Pelaksanaan RUPS

PROSES	TANGGAL REALISASI	KETERANGAN
Pemberitahuan	23 Maret 2021	Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 01/719-3/DIR-CSG tanggal 23 Maret 2021 perihal Penyampaian Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pengumuman	30 Maret 2021	• Pengumuman RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. • Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 01/148-3/CSG pada 30 Maret 2021.
Pemanggilan	14 April 2021	• Pemanggilan RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI.Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 01/183-3/CSG pada 14 April 2021 • Saat pemanggilan, BSI telah menyerahkan Laporan Tahunan 3 Bank Peserta Penggabunngan
Tanggal Pelaksanaan	6 Mei 2021	
Penyampaian Risalah		
Ringkasan Risalah	10 Mei 2021	Ringkasan risalah disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada 10 Mei 2021
Akta Risalah	03 Juni 2021	Akta risalah disampaikan melalui surat nomor 01/1251-3/DIR-CSG dan 01/1150-3/DIR-CSG ke OJK pada tanggal 03 Juni 2021

PENGUMUMAN	UNDANGAN	PELAKSANAAN	PENYAMPAIAN HASIL RUPS
30 Maret 2021	14 April 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021

Mata Acara/Agenda

Agenda bahasan pada RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRIsyariah, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Daftar Peserta RUPS

Pada RUPS Tahunan tanggal 6 Mei 2021, peserta yang hadir adalah:

Direksi:	
Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	: Ngatari
Wakil Direktur Utama II	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur *Compliance & Human Capital*	: Tribuana Tunggadewi
Direktur *Finance & Strategy*	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur *Wholesale & Transaction Banking*	: Kusman Yandi*
Direktur *Retail Banking*	: Kokok Alun Akbar*
Direktur *Sales & Distribution*	: Anton Sukarna*
Direktur *Information Technology*	: Achmad Syafii*
Direktur *Risk Management*	: Tiwul Widyastuti*
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	: Mulya Effendi Siregar
Komisaris Independen	: Bangun S. Kusmulyono
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Eko Suwardi
Komisaris Independen	: Muhammad Arief Rosyid Hasan
Komisaris	: Suyanto*
Komisaris	: Masduki Baidlowi*
Komisaris	: Imam Budi Sarjito*
Komisaris	: Sutanto*
Dewan Pengawas Syariah:	
Ketua	: Mohamad Hidayat
Anggota	: Didin Hafidhuddin
Anggota	: Oni Sahroni*

* hadir dalam Rapat melalui media video telekonferensi di ruang Rapat Direksi Wisma Mandiri I Lantai 3.

Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 39.711.464.410 saham. Hak suara yang sah untuk jumlah saham tersebut setara dengan 96,7835592% dari seluruh hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu 41.031.208.943 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 April 2021 pukul 16.15 WIB.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Untuk mata acara 1,2,3,4 dan 5 Rapat, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf a angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah kuorum keputusan yang lebih besar. Untuk mata acara 6 Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf b angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Kesempatan Mengajukan Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Dalam RUPS, para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dan/atau usulan keputusannya namun tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam rapat.

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1:
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRIsyariah, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terhadap:
   - PT Bank BRIsyariah Tbk.;
   - PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan; dan
   - PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Bank BRIsyariah Tbk., yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh:
   - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00019/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", untuk PT Bank BRIsyariah Tbk.
   - Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sebagaimana laporannya Nomor: 00012/2.1025/AU.4/07/0229-3/1/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" untuk PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektifnya penggabungan.
   - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00013/2.1032/AU.1/07/1681/1/1/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", untuk PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektifnya penggabungan.
4. Atas disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap:
   - Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk. yang telah diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BRIsyariah Tbk., tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRIsyariah Tbk., Nomor 92 tanggal 15 Desember 2020 yang dinyatakan kembali terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021, yang keseluruhannya dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya Nomor : AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BRIsyariah Tbk. yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BRIsyariah Tbk.;
   - Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank Syariah Mandiri yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri; dan

- Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BNI Syariah yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah.

5. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
   - Putu Rahwidhiyasa yang menjabat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
   - Bambang Widianto yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.
   - Toni Eko Boy Subari yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	2.300	=	0,0000058 %
Suara Setuju	:	39.711.462.110	=	99,9999942 %
Total Suara Setuju	:	39.711.464.410	=	100,0000000 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 2:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Keputusan:

1. Terhadap laba bersih BRIS tahun buku 2020 sebesar Rp248.054.169.851,- (dua ratus empat puluh delapan miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah), digunakan sebagai berikut:
   - Pembentukan Cadangan Wajib sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau sebesar Rp49.610.833.970,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
   - Setelah dikurangi Cadangan Wajib atau sebesar Rp198.443.335.881,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
2. Terhadap laba bersih BSM tahun buku 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), digunakan sebagai berikut:
   a. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih BSM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), yaitu sebagai berikut:
      - Sejumlah 2,13% dari Laba Bersih BSM atau sebesar Rp30.599.349.000,- (tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib BSM;
      - Sejumlah 97,87% dari Laba Bersih BSM atau sebesar Rp1.403.888.583.284,- (satu triliun empat ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan BSM.

   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih BSM tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   c. Terhadap laba bersih BNIS tahun buku 2020 sebesar Rp505.106.545.043,- (lima ratus lima miliar seratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah), diusulkan untuk digunakan sebagai berikut :
      - Pembentukan Cadangan Wajib sebesar Rp101.021.309.009,- (seratus satu miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan Rupiah) juta atau sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020. Dengan demikian total cadangan wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi Rp555.037.030.380,- (lima ratus lima puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh ibu tiga ratus delapan puluh Rupiah) atau setara dengan 19,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor BNIS per tanggal 31 Desember 2020.

- Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham yang tercatat sebelum pelaksanaan penggabungan efektif.
- Sisa Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak (*Earning After Tax*) Tahun Buku 2020 BNIS, sebesar Rp404.085.236.034,- (empat ratus empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan."

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	2.300	=	0,0000058 %
Suara Setuju	:	39.711.462.110	=	99,9999942 %
Total Suara Setuju	:	39.711.464.410	=	100,0000000 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 3:

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Keputusan:

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk:
    a. Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
    b. Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk:
    a. Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
    b. Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk:
    a. Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk. untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
    b. Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk., dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali Lainnya untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode sejak tanggal efektif penggabungan sampai dengan akhir tahun buku 2021.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	32.845.400	=	0,0827101 %
Suara Abstain	:	4.100	=	0,0000103 %
Suara Setuju	:	39.678.614.910	=	99,9172796 %
Total Suara Setuju	:	39.678.619.010	=	99,9172899 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 4:

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Keputusan:
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham Pengendali.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	17.269.300	=	0,0434869 %
Suara Abstain	:	3.000	=	0,0000076 %
Suara Setuju	:	39.694.192.110	=	99,9565055 %
Total Suara Setuju	:	39.694.195.110	=	99,9565131 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 5:

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.

Keputusan:
1. Memberhentikan dengan hormat Mohamad Hidayat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Hasanudin dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
   Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
   Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat
   Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, MA
   Anggota : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc
6. Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	163.961.800	=	0,4128828 %
Suara Abstain	:	3.400	=	0,0000086 %
Suara Setuju	:	39.547.499.210	=	99, 5871087 %
Total Suara Setuju	:	39.547.502.610	=	99, 5871172 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 6:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor Pusat Perseroan dari yang semula berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan dengan alamat Jalan Abdul Muis Nomor 2-4 menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Kavling 12, sebagai berikut :

   Semula :
   Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

   Menjadi :
   Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

2. Perubahan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sebelumnya telah memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ini, termasuk untuk:
   - Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah, dan
   - Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukannya kepada instansi berwenang.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	163.961.800	=	0,4128828 %
Suara Abstain	:	3.300	=	0,0000083 %
Suara Setuju	:	39.547.499.310	=	99,5871089 %
Total Suara Setuju	:	39.547.502.610	=	99,5871172 %

Realisasi: Telah direalisasikan

RUPS Luar Biasa

Rangkaian Pelaksanaan RUPS

PENGUMUMAN	UNDANGAN	PELAKSANAAN	PENYAMPAIAN HASIL RUPS
16 Juli 2021	2 Agustus 2021	24 Agustus 2021	24 Agustus 2021

Mata Acara/Agenda

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Daftar Peserta RUPS

Peserta yang menghadiri RUPS Luar Biasa yang digelar pada 24 Agustus adalah:

Direksi:

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	: Ngatari*
Wakil Direktur Utama II	: Abdullah Firman Wibowo*
Direktur *Compliance & Human Capital*	: Tribuana Tunggadewi
Direktur *Finance & Strategy*	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur *Wholesale & Transaction Banking*	: Kusman Yandi*
Direktur *Retail Banking*	: Kokok Alun Akbar*
Direktur *Sales & Distribution*	: Anton Sukarna*
Direktur *Information Technology*	: Achmad Syafii*
Direktur *Risk Management*	: Tiwul Widyastuti*

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	: Mulya Effendi Siregar*
Komisaris Independen	: Bangun S. Kusmulyono*
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat*
Komisaris Independen	: Eko Suwardi
Komisaris Independen	: Muhammad Arief Rosyid Hasan
Komisaris	: Suyanto*
Komisaris	: Masduki Baidlowi*
Komisaris	: Imam Budi Sarjito*
Komisaris	: Sutanto*

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag*
Anggota	: Dr. H. Mohamad Hidayat*
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA*
Anggota	: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc*

* hadir dalam Rapat melalui media video telekonferensi

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 38.945.927.134 saham atau merupakan 94,6924346% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 41.128.868.743 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf a angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah kuorum keputusan yang lebih besar.

Kesempatan Mengajukan Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat

Dalam RUPS, para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dan/atau usulan keputusannya. Setelah Notaris selesai melakukan validasi dalam mata acara, terdapat 1 (satu) pertanyaan dan 1 (satu) pendapat dari pemegang saham.

Pihak Independen

BSI menggunakan pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:
1. Memberhentikan dengan hormat Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat Adiwarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

   Adiwarman Azwar Karim baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
4. Mengangkat Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

   Muhammad Zainul Majdi baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan Rapat, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	: Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	: Muhammad Zainul Majdi
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Bangun S. Kusmulyono
Komisaris Independen	: Muhammad Arief Rosyid Hasan
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto

DIREKSI:

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	: Ngatari
Wakil Direktur Utama II	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur *Compliance & Human Capital*	: Tribuana Tunggadewi
Direktur *Finance & Strategy*	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur *Wholesale & Transaction Banking*	: Kusman Yandi
Direktur *Retail Banking*	: Kokok Alun Akbar
Direktur *Sales & Distribution*	: Anton Sukarna
Direktur *Information Technology*	: Achmad Syafii
Direktur *Risk Management*	: Tiwul Widyastuti

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	132.495.085	=	0,3402027 %
Suara Abstain	:	162.984.700	=	0,4184897 %
Suara Setuju	:	38.650.447.349	=	99,2413076 %
Total Suara Setuju	:	38.813.432.049	=	99,6597973 %

Realisasi:

Telah direalisasikan.

Rekapitulasi Kehadiran

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris, Direksi berserta Dewan Pengawas Syariah dalam RUPS yang dilaksanakan pada tahun 2021.

NO.	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama	100%
2	Muhammad Zainul Majdi	Wakil Komisaris Utama	100%
3	Suyanto	Komisaris	100%
4	Masduki Baidlowi	Komisaris	100%
5	Imam Budi Sardjito	Komisaris	100%
6	Sutanto	Komisaris	100%
7	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	100%
8	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	100%
9	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	100%
10	Hery Gunardi	Direktur Utama	100%
11	Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	100%
12	Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	100%
13	Kusman Yandi	Direktur	100%
14	Kokok Alun Akbar	Direktur	100%
15	Anton Sukarna	Direktur	100%
16	Achmad Syafii	Direktur	100%
17	Tiwul Widyastuti	Direktur	100%
18	Tribuana Tunggadewi	Direktur	100%
19	Ade Cahyo Nugroho	Direktur	100%
20	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	50%
21	Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota Dewan Pengawas Syariah	100%
22	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	100%
23	Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	100%

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2020, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali: RUPST pada 28 Februari 2020, RUPSLB pada 5 November 2020, dan RUPSLB pada 15 Desember 2020. Berikut adalah keputusan dan realisasinya.

RUPS Tahunan

28 Februari 2020

Pihak Independen

BRI Syariah menggunakan pihak independen yaitu Notaris Fathia Helmi, S.H dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1

Keputusan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana tertuang dalam laporannya tertanggal 3 Februari 2020 No. 00045/2.1032/AU.1/07/0240- 1/1/II/2020.
3. Menerima Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (Initial Public Offering/IPO).
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode tahun 2019 atas tindakan pengurusan dan pengawasan mereka yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Auditor Independen tersebut di atas, kecuali perbuatan tindak pidana.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	0	=	0 %
Suara Setuju	:	7.614.830.115	=	100 %
Total Suara Setuju	:	7.614.830.115	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 2

1. Menyetujui atas Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp74.015.918.727, dilakukan pembayaran Zakat sebesar 2,5% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 atau sebesar Rp1.850.397.968 yang dibebankan dalam Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp74.015.918.727, dengan pembagian sebagai berikut:
    a. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2019 atau sebesar Rp14.803.183.745.
    b. Sisanya sebesar 80% dari Laba Bersih Tahun Buku 2019 atau sebesar Rp59.212.734.982 ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	0	=	0 %
Suara Setuju	:	7.614.830.115	=	100 %
Total Suara Setuju	:	7.614.830.115	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 3

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali (Bank BRI) untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2019 serta menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan/atau benefit lainnya) bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	0	=	0 %
Suara Setuju	:	7.614.830.115	=	100 %
Total Suara Setuju	:	7.614.830.115	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 4

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2020 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku 2020 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	1.850.000	=	0,0242947 %
Suara Abstain	:	0	=	0 %
Suara Setuju	:	7.612.980.115	=	99.9757053 %
Total Suara Setuju	:	7.614.830.115	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

RUPS Luar Biasa

5 November 2020

Pihak Independen

BRI Syariah menggunakan pihak independen yaitu Notaris Fathia Helmi, S.H dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1

Keputusan:

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan, tertanggal 23-09-2020 disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Membatalkan keputusan pengangkatan Nyonya Ernie Tisnawati Sule sebagai Komisaris Independen Perseroan yang tertuang pada berita acara RUPS Tahunan Perseroan dengan akta nomor 64, tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pembatalan keputusan tersebut mulai efektif sejak tanggal 12 Agustus 2020.

3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama : -
   Komisaris Independen : Eko Suwandi
   Komisaris Independen : -
   Komisaris : Sutanto
   Direksi
   Direktur Utama : Ngatari
   Direktur Bisnis Komersil : Kokok Alun Akbar
   Direktur Bisnis Ritel : Fidri Arnaldy
   Direktur Operasional : Fahmi Subandi
   Dirketur Kepatuhan : Yana Soeprianan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	9.463.900	=	0,01114028 %
Suara Abstain	:	41.400	=	0,0004873 %
Suara Setuju	:	7.524.445.115	=	99,9944876 %
Total Suara Setuju	:	7.533.950.415	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan

RUPS Luar Biasa

15 Desember 2020

Pihak Independen

BRI Syariah menggunakan pihak independen yaitu Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1

Keputusan:
1. Menyetujui penggabungan PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dan PT Bank BNI Syariah ("BNIS") dengan Perseroan (dimana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan).
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penggabungan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan ("AD") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penggabungan dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	0	=	0 %
Suara Setuju	:	8.495.209.972	=	100 %
Total Suara Setuju	:	8.495.209.972	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan

Agenda 2

Keputusan:
1. Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan BNIS.
2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	9.463.900	=	0,1114028 %
Suara Abstain	:	41.400	=	0,0004873 %
Suara Setuju	:	8.485.704.672	=	99,8881099 %
Total Suara Setuju	:	8.495.209.972	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan

Agenda 3

Keputusan:
1. Menyetujui konsep Akta Penggabungan antara Perseroan dengan BSM dan BNIS, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan BNIS.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan Akta Penggabungan; serta untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan konsep Akta Penggabungan, termasuk untuk menghadap atau hadir di hadapan Notaris; mengajukan permohonan persetujuan dan/ atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK; memperoleh persetujuan dan/ atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"); menghadap kementerian, badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apa pun; membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apa pun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apa pun atas dokumen-dokumen tersebut; dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	9.463.900	=	0,1114028 %
Suara Abstain	:	41.400	=	0,0004873 %
Suara Setuju	:	8.485.704.672	=	99,8881099 %
Total Suara Setuju	:	8.495.209.972	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan

Agenda 4

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas.
   a. Mengubah Nama Perseroan menjadi PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
   b. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp500,00 (lima ratus Rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
   c. Meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan menjadi Rp20.515.604.471.500,00 (dua puluh triliun lima ratus lima belas miliar enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 41.031.208.943 (empat puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
   d. Mengubah dan menyesuaikan kembali seluruh pasal anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris; (iii) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat- kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; (iv) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada i instansi- instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Rapat; dan (v) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan- keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apa pun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apa pun, tanpa ada yang dikecualikan.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil pelaksanaan program opsi saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP) sebagaimana diputuskan dalam Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bank BRIsyariah tanggal 8 Januari 2018 Nomor 8, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	0	=	0 %
Suara Setuju	:	8.495.209.972	=	100 %
Total Suara Setuju	:	8.495.209.972	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan

Agenda 5

Keputusan:

1. Menyetujui pemberhentian seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal efektif penggabungan, yang mana *acquit et de charge* Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan, sebagai berikut:

   Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama 1	: Ngatari
Wakil Direktur Utama 2	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur Wholesale & Transaction Banking	: Kusman Yandi
Direktur Retail Banking	: Kokok Alun Akbar
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho

   Dewan Komisaris

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	: Mulya E. Siregar
Komisaris Independen	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito,
Komisaris	: Sutanto
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Eko Suwandi

   yang mana pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan dan setelah mendapat persetujuan / dinyatakan lulus dalam penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) yang dilakukan oleh OJK, serta akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2024, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

   Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Dr. H. Mohamad Hidayat
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc

3. Menyetujui dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan kemudian dinyatakan tidak disetujui/dinyatakan tidak lulus dalam penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) yang dilakukan oleh OJK, maka pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan dianggap tidak pernah berlaku efektif, dan karenanya Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk membatalkan pengangkatan yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya.
4. Menyetujui dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan kemudian tidak memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau tidak mendapatkan persetujuan atas hasil wawancara yang dilakukan oleh OJK, maka pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan dianggap tidak pernah berlaku efektif, dan karenanya Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk membatalkan pengangkatan yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya.
5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di

atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan- tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apa pun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apa pun, tanpa ada yang dikecualikan.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	:	9.463.900	=	0,1114028 %
Suara Abstain	:	41.500	=	0,0004885 %
Suara Setuju	:	8.485.704.572	=	99,8881087 %
Total Suara Setuju	:	8.495.209.972	=	100 %

Realisasi: Telah direalisasikan

Rekapitulasi Kehadiran

NO.	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	Parman Nataatmadja	Komisaris Utama	100%
2	Eko Suwardi	Komisaris Independen	100%
3	Ernie Tisnawati Sule	Komisaris Independen	100%
4	Sutanto	Komisaris	100%
5	Ngatari	Direktur Utama	100%
6	Kokok Alun Akbar	Direktur	100%
7	Fidri Arnaldy	Direktur	100%
8	Fahmi Subandi	Direktur	100%
9	Yana Soeprianan	Direktur	100%
10	Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Ketua Dewan Pengawas Syariah	100%
11	M. Gunawan Yasni	Anggota Dewan Pengawas Syariah	100%

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan Bank Syariah Indonesia menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti proses *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah jelas seperti diamanatkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban tersebut merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.
3. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar.
6. Memonitor perkembangan kegiatan Bank.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
8. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
9. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.
11. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
12. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi.
13. Wajib membentuk Komite-komite dan memastikan bahwa Komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku wajib memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Hak dan Wewenang

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
    a. Membeli, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
    b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau utang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini;
    c. Menggadaikan, menjaminkan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
    d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin *(borg* atau *avalist)* yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
    e. Mencatatkan saham-saham Perseroan di Pasar Modal;
    f. Tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapusbukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai pengaiihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (2), harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Bank.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu
9. Dalam waktu 30 hari setelah tangga! pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya
7. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Kebijakan dalam proses dan pemilihan Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Noor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta peraturan lain termasuk dari Bank Indonesia.

Dalam Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon anggota Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

Pedoman Tata Tertib Kerja (Board Charter) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan secara berkala. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nomor: KEP.KOM/001/2021.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencakup:
1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris
16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan.

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, susunan Dewan Komisaris BSI adalah:

Komposisi Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN	TANGGAL EFEKTIF	PERIODE JABATAN
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021	7 Februari 2021	2021-2024
Muhammad Zainul Majdi	Wakil Komisaris Utama	RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021	7 Februari 2021	2021-2024
Suyanto	Komisaris	RUPSLBRUPS LB tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Masduki Baidlowi	Komisaris	RUPSLB tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Imam Budi Sarjito	Komisaris	RUPSLB tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Sutanto	Komisaris	RUPSLB tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	RUPSLB tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	RUPSLB tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	RUPSLB tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024

Program Orientasi Dewan Komisaris Baru

Mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris beragam, BSI selalu mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Bank Syariah Indonesi secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pengenalan Korporasi terkait Corporate Strategy
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti sejak tanggal diminta tersebut di atas atau dengan lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
5. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
7. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Agar peran Dewan Komisaris berjalan secara efektif, Bank membagi tugas di antara anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas itu ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Dengan demikian, terdapat kejelasan peran, baik secara kolektif maupun individual.

Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE JABATAN	BIDANG TUGAS
Mulya Effendi Siregar*	Komisaris Utama/Komisaris Independen	2021	- Komite Audit - Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite Pemantau Risiko
Adiwarman Azwar Karim**	Komisaris Utama/Komisaris Independen	2021-2024	- Komite Audit - Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite Pemantau Risiko
Muhammad Zainul Majdi**	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2021-2024	- Komite Audit - Komite Remunerasi dan Nominasi
Suyanto	Komisaris	2021-2024	- Komite Audit - Komite Remunerasi dan Nominasi
Masduki Baidlowi	Komisaris	2021-2024	- Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite Pemantau Risiko
Imam Budi Sarjito	Komisaris	2021-2024	- Komite Audit - Komite Remunerasi dan Nominasi

NAMA	JABATAN	PERIODE JABATAN	BIDANG TUGAS
Sutanto	Komisaris	2021-2024	- Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite Pemantau Risiko
Eko Suwardi*	Komisaris Independen	2021	- Komite Audit - Komite Remunerasi dan Nominasi
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	2021-2024	- Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite Pemantau Risiko
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	2021-2024	- Komite Audit - Komite Remunerasi dan Nominasi
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	2021-2024	- Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite Pemantau Risiko

* Sudah tidak efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 24 Agustus 2021 Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN:			HUBUNGAN KELUARGA DENGAN:		
		DEWAN KOMISARIS	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI
Mulya Effendi Siregar*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	x	x	x	x	x	x
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	x	x	x	x	x	x
Muhammad Zainul Majdi	Wakil Komisaris Utama	x	x	x	x	x	x
Suyanto	Komisaris	x	x	x	x	x	x
Masduki Baidlowi	Komisaris	x	x	x	x	x	x
Imam Budi Sarjito	Komisaris	x	x	x	x	x	x
Sutanto	Komisaris	x	x	x	x	x	x
Eko Suwardi*	Komisaris Independen	x	x	x	x	x	x
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	x	x	x	x	x	x
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	x	x	x	x	x	x
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	x	x	x	x	x	x

√: Ya, x: Tidak

* Sudah tidak efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 24 Agustus 2021 Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Kebijakan

Bank telah memiliki ketentuan internal yang mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dalam pedoman tersebut, anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
2. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank;

4. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba; atau
5. Perangkapan jabatan Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN/ INSTANSI LAIN	NAMA INSTANSI
Mulya Effendi Siregar*	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Anggota Pleno	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Adiwarman Azwar Karim**	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Muhammad Zainul Majdi**	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rektor	Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi
Suyanto	Komisaris	Staf Khusus Kepala BIN	Badan Intelijen Negara
Masduki Baidlowi	Komisaris	Ketua Bidang Informasi & Komunikasi	Juru Bicara Wakil Presiden
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil
Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil
Eko Suwardi*	Komisaris Independen	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)	Universitas Gadjah Mada
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Komisaris	PT Merial Health
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Rektor	Universitas Islam Internasional Indonesia

* Sudah tidak efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 24 Agustus 2021 Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) adalah kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank :

a. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
b. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi
c. Dilarang menyalahgunakan corporate identity Bank. Corporate identity hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank

Bank wajib memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan, yang paling sedikit memuat :

a. identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;
b. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan
c. kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kebijakan Pelaporan

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM (LEMBAR)			
		BANK SYARIAH INDONESIA	BANK LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK	PERUSAHAAN LAIN
Mulya Effendi Siregar*	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-	-	-
Adiwarman Azwar Karim**	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-	-	-
Muhammad Zainul Majdi**	Wakil Komisaris Utama	-	-	-	-
Suyanto	Komisaris	-	-	-	-
Masduki Baidlowi	Komisaris	-	-	-	-
Imam Budi Sardjito	Komisaris	-	-	-	-
Sutanto	Komisaris	1.500.000	-	-	-
Eko Suwardi*	Komisaris Independen	-	-	-	-
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	-	-	-	-
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	-	-	-	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	-	-	-	-

* Sudah tidak efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 24 Agustus 2021 Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali. Selain itu tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Independen minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga berakhirnya tahun buku 2021, jumlah Komisaris Independen BSI ada 5 (lima) dari 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Bank adalah sebagai berikut:

KRITERIA	MULYA EFFENDI SIREGAR*	ADIWARMAN AZWAR KARIM	MUHAMMAD ZAINUL MAJDI	EKO SUWARDI*	BANGUN SARWITO KUSMULYONO	M. ARIEF ROSYID HASAN	KOMARUDDIN HIDAYAT
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab unt uk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√

KRITERIA	MULYA EFFENDI SIREGAR*	ADIWARMAN AZWAR KARIM	MUHAMMAD ZAINUL MAJDI	EKO SUWARDI*	BANGUN SARWITO KUSMULYONO	M. ARIEF ROSYID HASAN	KOMARUDDIN HIDAYAT
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupung tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	√	√	√	√	√	√	√

√: iya, x: tidak
* Sudah tidak efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 24 Agustus 2021 Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Pernyataan Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, kebijakan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf a adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Komisaris, dengan catatan risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang hadir dalam rapat dan yang menerima kuasa.
3. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
4. Kuasa tertulis Komisaris yang tidak hadir kepada Komisaris lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran
5. Seorang Komisaris hanya boleh menerima kuasa dari 1 (satu) orang Komisaris lainnya.
6. Ketidakhadiran secara fisik Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 sebanyak maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam setahun, kecuali telah terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai peran dan keterlibatannya dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk khusus oleh Komisaris Utama untuk maksud tersebut dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari para peserta yang hadir. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak *(voting)*.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rincian tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021, baik rapat internal maupun rapat gabungan serta kehadiran pada RUPS disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi			Kehadiran di RUPS		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	%
Mulya Effendi Siregar*	12	12	100	7	7	100	1	1	100	2	2	100
Adiwarman Azwar Karim	7	7	100	5	5	100	1	1	0	0	0	0
Muhammad Zainul Majdi	7	7	100	5	5	100	1	1	0	0	0	0
Suyanto	21	21	100	10	10	100	2	2	100	2	2	100

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi			Kehadiran di RUPS		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	%
Masduki Baidlowi	21	20	95	10	10	100	2	2	100	2	2	100
Imam Budi Sarjito	21	21	100	10	10	100	2	2	100	2	2	100
Sutanto	21	21	100	10	10	100	2	2	100	2	2	100
Eko Suwardi*	12	12	100	7	7	100	1	1	100	2	2	100
Bangun Sarwito Kusmulyono	21	21	100	10	10	100	2	2	100	2	2	100
M. Arief Rosyid Hasan	21	21	100	10	10	100	2	2	100	2	2	100
Komaruddin Hidayat	21	21	100	10	10	100	2	2	100	2	2	100

* Sudah tidak efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 24 Agustus 2021 Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Agenda Rapat Dewan Komisaris

TANGGAL	AGENDA
4 Februari 2021	Penetapan Susunan Anggota Komite
4 Februari 2021	a. Struktur Organisasi BSI b. Pemenuhan SDM di KP dan Jaringan BSI
18 Februari 2021	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Januari 2021
22 Februari 2021	Update Anggota RUPS Tahunan dan Usulan Anggota Komite Audit BSI
24 Februari 2021	Annual Audit Plan 2021
24 Februari 2021	Hasil Audit PWC tahun 2020
10 Maret 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Stream Information Technologi & Operation
10 Maret 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Stream Human Capital & Culture
25 Maret 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 28 Februari 2021
22 April 2021	Penunjukkan Ketua RUPS
22 April 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 31 Maret 2021
27 Mei 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 30 April 2021
18 Juni 2021	Evaluasi Kinerja BSI Per 31 Mei 2021
22 Juli 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 30 Juni 2021
2 Agustus 2021	Persiapan RUPSLB 24 Agustus 2021
26 Agustus 2021	a. Pembahasan Susunan Anggota Komite b. Evaluasi Kinerja BSI 30 Juli 2021
23 September 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 31 Agustus 2021
28 Oktober 2021	Evaluasi Kinerja 30 September 2021 PT BSI Tbk
10 November 2021	Usulan RBB tahun 2022-2024
25 November 2021	Evaluasi Kinerja BSI Oktober 2021
23 Desember 2021	Evaluasi Kinerja BSI November 2021

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

TANGGAL	AGENDA
18 Februari 2021	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah (BSI) periode 31 Januari 2021
25 Maret 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 28 Februari 2021
22 April 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 31 Maret 2021
27 Mei 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 30 April 2021
22 Juli 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 30 Juni 2021
26 Agustus 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 30 Juli 2021
23 September 2021	Evaluasi Kinerja BSI periode 31 Agustus 2021
28 Oktober 2021	Evaluasi Kinerja 30 September 2021 PT BSI Tbk
10 November 2021	Usulan RBB tahun 2022-2024
25 November 2021	Evaluasi Kinerja BSI Oktober 2021
23 Desember 2021	Evaluasi Kinerja BSI November 2021

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal. Rapat dimaksud dalam mekanisme pemberian nasihat tersebut, yakni:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang terdiri atas:
   a. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
   b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.
   c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian nasihat kepada Direksi juga dilakukan melalui surat disposisi ke Direksi, melakukan evaluasi dan pemberian arahan kepada Direksi baik triwulan maupun tahunan atas Laporan Kepatuhan dan hasil *assessment* GCG. Sedangkan untuk pengawasan, Dewan Komisaris dapat secara rutin melakukan kunjungan ke cabang.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

NO	TEMA	SARAN/MASUKAN DEWAN KOMISARIS	
1	**Kinerja**	Dewan Komisaris mengapresiasi atas pencapaian kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia per 30 November 2021, antara lain pencapaian yang signifikan pada:	
		a	Kinerja keuangan bottom line yakni perolehan Laba Bersih Setelah Pajak sebesar sebesar Rp2.780 M (104,21% dari target November 2021)
		b	Cash Coverage tumbuh (delta growth) YoY tumbuh Rp845 M (43,64%).
		c	Kualitas pembiayaan terkendali dengan baik walaupun dalam masa pandemic Covid, dengan NPF Gross sebesar 3,00% tumbuh negatif namun telah mencapai 100,29% target 30 November 2021 sebesar 3,01%
		d	Pembiayaan yang tumbuh (YoY) 6,34% sebesar Rp9.931 M menjadi Rp165.642 M (100,95% dari target November 2021)
		e	Pendapatan Margin/Bagi Hasil dari aktivitas Non Pembiayaan (Penempatan pada Surat Berharga) yang tumbuh 10,56% (YoY) sebesar Rp265 Miliar menjadi sebesar Rp2.719 M per 30 November 2021
		f	Fee Based Income (FBI) yang tumbuh negatif (YoY) sebesar Rp159 M (- 5,70%) menjadi Rp2.634 M (104,42% dari target November 2021)
		Diharapkan pertumbuhan positif ini dapat berlanjut pada bulan berikutnya.	
2	**Pembiayaan**	Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP agar sebagai berikut:	
		a	Pembiayaan Bankwide tumbuh positif secara YtD maupun MtM, Untuk pertumbuhan secara segmen Wholesale secara YtD masih negatif, diharapkan pada akhir Desember 2021 minimal bisa zero growth dengan pipeline yang tersedia, artinya posisi pembiayaan Wholesale sama dengan posisi per Desember 2020.
		b	Percepatan recovery pembiayaan SME melalui pembenahan bisnis proses, peningkatan kompetensi, dan penyesuaian RAC
		c	Untuk pembiayaan kendaraan/OTO, perlu dipastikan keselarasan RAC antara BSI dengan MUF dan MTF agar mendapatkan calon nasabah yang berkualitas bagi kedua belah pihak
		d	Pencapaian Rasio dan RPIM setiap bulan agar disampaikan dalam laporan kinerja bulanan
3	**DPK**	Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:	
		a	Kinerja pencapaian DPK agar tetap dapat dijaga jangan sampai menurun menjelang tutup tahun 2021.
		b	Agar dievaluasi penurunan Dana Wadiah dalam tiga bulan terakhir terutama penurunan Giro Wadiah, sementara Tabungan Wadiah terus meningkat secara sustain.
		c	Menjelang akhir tahun agar diantisipasi banyak penarikan dana dari nasabah-nasabah besar antara lain untuk menurunkan eksposur pembiayaan ditempat lain.

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

NO	TEMA	SARAN/MASUKAN DEWAN KOMISARIS	
4	**NPF**	Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:	
		a	Untuk mencapai penurunan FaR (excl / include Covid), agar dilakukan: 1) Monitoring khusus terhadap kol 2 segmen retail karena sebagian besar nasabah merupakan nasabah program restru Covid-19, meskipun dalam tiga bulan terakhir Kol 2 segmen Retail terus membaik. 2) Untuk segmen Wholesale, walaupun NPF per November 2021 sudah turun menjadi 4,85% (di bawah 5 %), efektifitas monitoring kuallitas pembiayaan dengan penggunaan Watchlist Tools terus dioptimalkan terutama kepada nasabah-nasabah terdampak COVID dan Nasabah Non Sektor Unggulan.
5	**Peningkatan Kinerja *Mobile Banking***	Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:	
		a	Optimalisasi penggunaan mobile banking nasabah.
		b	Perlu adanya edukasi dan pemberian insentif ke nasabah untuk meningkatkan volume dan FBI dari transaksi mobile banking
		c	Meningkatkan kemitraan dengan pelaku utama ekosistem ekonomi/keuangan khususnya yang memiliki traction tinggi untuk mengembangkan fiturfitur transaksi yang menjadi preferensi nasabah.
		d	Ekosistem Islam (pesantren, masjid, ziswaf, dll) tidak hanya menarik bagi lembaga jasa keuangan syariah, tetapi juga non syariah, sehingga BSI perlu mempercepat penetrasi layanan terhadap ekosistem Islam kepada seluruh nasabahnya
		e	Menyiapkan strategi untuk mengantisipasi penurunan FBI dari penurunan tarif transfer antar Bank dan/atau adanya tarif yang murah dari fintech
6	***Write Off***	Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:	
		a	Pembentukan Cadangan dilakukan terutama untuk mengantisipasi turunnya kualitas pembiayaan ex restru Covid, disarankan agar terus menjadi perhatian kecukupannya sejalan dengan perkembangan kualitasnya dari waktu ke waktu.
		b	Upaya recovery ex WO agar terus diupayakan seoptimal mungkin terutama dari segmen Wholesale yang s/d November 2021 baru mencapai sebesar Rp210 M atau 63,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp329 M
		c	Sesuai dengan rekomendasi KAP, agar dalam pembentukan CKPN, manajemen memperhatikan pemenuhan prosedur dan kelengkapan dokumentasi.
		d	Perolehan FBI agar terus dioptimalkan khususnya dari Collection Ex WO segmen Wholesale yang masih tumbuh negatif secara YoY.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan

Pendidikan Berkelanjutan sesuai dengan tata tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah:

1. Rencana pendidikan berkelanjutan untuk seluruh Komisaris dan anggota Komite-Komite penunjang tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris;
2. Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya agar disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat;
3. Komisaris dan anggota Komite Penunjang yang telah melakukan pendidikan berkelanjutan harus menyampaikan laporan hasil pendidikannya di dalam Rapat Dewan Komisaris atau di dalam rapat Komite penunjang.
4. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi/fasilitas dan protokoler selama pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Disampaikan secara rinci pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

A. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment.* Hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam dalam RUPS.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2021 secara mandiri (*self assessment*).

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

NO.	INDIKATOR	BOBOT PENILAIAN	PENCAPAIAN
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berjala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2	Dewan Komlsarls menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	10%	100%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
8	Dewan Komisaris mereview, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan	10%	100%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi	10%	100%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dna fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite. • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Review kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%	100%

B. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ini merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Metode penilaian dilakukan secara mandiri (*self assessment*) secara periodik, yaitu setiap semester dan hasilnya dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Komisaris termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria *self assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* ada 17 indikator sedangkan *governance outcome* mencapai 6 (enam) indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan *self assessment* GCG (di dalamnya termasuk penilaia Dewan Komisaris) adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2021 adalah peringkat 2 (“Baik”).

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite sebagai penunjang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Kriteria dan Hasil Penilaian

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (Internal Control System), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi
   pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2020.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain :

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Intenal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi antara lain:
    a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
    b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
    c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
    d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan

Pada tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah BSI berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN	TANGGAL EFEKTIF	PERIODE JABATAN
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	1 Februari 2021	2021-2024
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	1 Februari 2021	2021-2024

Mekanisme Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah Paragraf 1 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Pasal 45 (1) disebutkan "Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi."

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan

1. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah Paragraf 1 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Pasal 44 yang berbunyi "Jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait."

   Paragraf 4 Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah, Pasal 50 yang berbunyi "Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini."
2. SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bagian E. Dewan Pengawas Syariah point 13 yang berbunyi "Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

   Yang dimaksud dengan "konsultan" adalah meliputi konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS.

   Dalam hal konsultan berbentuk perusahaan maka pegawai/perorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak bertugas sebagai konsultan bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategorikan sebagai konsultan.

   Yang dimaksud dengan "jasa konsultasi" adalah terbatas pada jasa konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah. "

Rekapitulasi Rangkap Jabatan

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN/ INSTANSI LAIN	NAMA INSTANSI
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Trimegah Asset Management
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Perssero)
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT BNP Paribas Investment Partners
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) BPRSyariah
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	BPRS Amanah Ummah Bogor
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	TINGKAT KEHADIRAN (%)
Hasanudin	Ketua	32	32	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	32	32	100%
Oni Sahroni	Anggota	32	32	100%
Didin Hafidhuddin	Anggota	32	32	100%

Agenda Rapat

TANGGAL	AGENDA
10 Februari 2021	1. Rapat Perdana DPS BSI dengan CSG
12 Februari 2021	1. Annual Audit Plan, PAB Paylater, Direct Debit dan Deposito Mobile Banking
18 Februari 2021	1. Rapat DPS terkait Penyampaian Daftar Inventaris Masalah dengan DPS
23 Februari 2021	1. Master Ammendment Agreement (MAA) dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Group
2 Maret 2021	1. Asuransi Kesehatan Pegawai 2. Taujih DPS terkait Komitment Melaksanakan Kewajiban Ibadah
18 Maret 2021	1. Pembahasan Lanjutan mengenai Asuransi Kesehatan Pegawai
25 Maret 2021	1. Mitraguna Online
8 April 2021	1. Layanan Syariah Point
22 April 2021	1. Hasanah Card Contactless 2. Wakalah Bil Istitsmar 3. Smart Virtual Account (VA) (VA Debit)
5 Mei 2021	1. Laporan Keuangan BSI Periode Maret 2021
19 Mei 2021	1. Hasanah Card Contactless 2. Hasanah Corporate Card
3 Juni 2021	1. Forfaiting 2. Wakalah Bil Istitsmar 3. Smart Virtual Account (VA) (VA Debit)
7 Juni 2021	1. Tindak Lanjut Pembahasan PT. SHA Solo
10 Juni 2021	1. Cicil Emas Melalui BSI Mobile 2. Pengalihan Aset Pembiayaan Penisun Bank Mantap dalam rangka Qanun LKS Aceh
16 Juni 2021	1. Produk Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)
30 Juni 2021	1. Pengajuan Alternatif Pengalihan Nasabah Bank Mantap 2. Top Up Gadai Melalui BSI Mobile
7 Juli 2021	Harmonisasi Akad MMQ
28 Juli 2021	1. Pengaduan Nasabah KC Bengkulu S Parman 1 dan KC Bukittinggi Guru Hamzah 2. Permohonan Skema Ijarah Bil Ijarah (Ijarah Muwazi)
4 Agustus 2021	1. DIM Akad Murabahah
18 Agustus 2021	• Pembahasan Atas Rencana Pengajuan Izin Layanan EDC Merchant Azquirer
1 September 2021	1. Penggunaan Working Space BMRI dan BNI dalam Rangka Collection 2. Taujih DPS mengenai Nama Masjid BSI
22 September 2021	1. Bagi Hasil Fasilitas Pembiayaan Musyarakah PT. Intan Baruprana Finance 2. Skema Pembiayaan Sindikasi a.n PT. Adhi Jalintim Riau 3. Sinergi 3 PSP 4. Teknologi Virtual Private cloud dan Mandiri Cloud oleh BSI
29 September 2021	1. Multifinance PT. Bima Multifinance dan PT. Intan Baruprana Finance 2. Taujih DPS terkait Busana Pegawai
13 Oktober 2021	1. Digital Value Chain (DGV) 2. Layanan QRIS CPM, Cross Border dan TTS (Tarik, Transfer, Setor)
27 Oktober 2021	1. Penyusunan Draft Master Template Akad 2. Bank Garansi Rokok 3. Potensi Bancassurance 4. Revitalisasi MP BSI Mitra Kopkar
3 November 2021	1. Layanan BSI Prioritas 2. Rekening Dana Investor (RDI) 3. Pembatalan Transaksi Pembiayaan BSI Paylater (Hawalah dan Kafalah)

Agenda Rapat

TANGGAL	AGENDA
10 November 2021	1. Setoran Awal Haji Reguler Melalui BSI Mobile dan BSI NET 2. Pembatalan Transaksi Paylater 3. Layanan BI Fast
17 November 2021	1. Layanan BI Fast 2. Respon & Follow Up DPS Atas Combined Sharia Assurance
24 November 2021	1. Dana Tanazul BPJS Kesehatan 2. Pengaduan Nasabah Region IX Surabaya 3. Issue Dukungan PT Zurich Insurance Selaku Takaful perihal : Induk dari Asuransi PT ZGTI Terhadap LGBT
10 Desember 2021	1. Layanan Capital Market Services di BSI 2. Kepemilikan Aset yang Dijadikan Objek Pembiayaan Refinancing (Yayasan Alma Ata) 3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan DPS
20 Desember 2021	1. Permohonan Masukan dan Ekspektasi (DPS *Concern*) Terhadap Penyusunan Annual Audit Plan (AAP) BSI Tahun 2022 2. Perjanjian Kerja Sama BSI dengan Kementerian Sosial Bantuan Sembako dan Bansos PKH dan E-Warong
29 Desember 2021	1. Rapat DPS terkait Pembahasan Issue-Issue pada Draft Template Harmonisasi Akad 2. Silaturahmi dengan PT Zurich General Takaful Indonesia (ZGTI)

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dalam bentuk:
    a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
    b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
        1) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
        2) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
    c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
    d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
    a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
    b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
    c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
        1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
        2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
    d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
    e. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
    f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
    g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

NO.	JUDUL	NO. REGISTER	TANGGAL OPINI DPS
1	Opini DPS tentang Produk Paylater dengan Akad Hawalah Bil Ujrah	01/BSI/DPS/OPINI/II/2021	03-March-2021
2	Opini DPS tentang Produk Paylater dengan Akad Kafalah Bil Ujrah	02/BSI/DPS/OPINI/II/2021	12-February-2021
3	Opini DPS tentang Bank Syariah Indonesia Debit Online	03/BSI/DPS/OPINI/III/2021	02-March-2021
4	Opini DPS tentang Pembukaan Deposito BSI Mobile	04/BSI/DPS/OPINI/II/2021	12-February-2021
5	Opini DPS tentang Konsep Master Amendment Agreement (MAA) dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Group	05/BSI/DPS/OPINI/II/2021	24-February-2021
6	Opini DPS tentang Pengesahan Template Akad Al-Ba'I, IMBT, dan Hibah PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)	06/BSI/DPS/OPINI/II/2021	03-March-2021
7	Opini DPS tentang Pembiayaan Mitraguna Berkah Melalui Media Digital Mobile Banking (Mitraguna Online)	07/OPINI/DPS-BSI/IV/2021	15-April-2021
8	Opini DPS tentang Syariah Point	08/OPINI/DPS-BSI/IV/2021	08-April-2021
9	Opini DPS terkait Laporan Keuangan BSI Periode Maret 2021	09/OPINI/DPS-BSI/V/2021	05-May-2021
10	Opini DPS tentang Hasanah Card Contactles	10/BSI/DPS/OPINI/V/2021	24-May-2021
11	Opini DPS tentang BSI Hasanah Corporate Card	11/BSI/DPS/OPINI/V/2021	24-May-2021
12	Opini DPS tentang Pengesahan Template Line Facility dan Simplifikasi Template Akad Musyarakah	12/BSI/DPS/OPINI/V/2021	28-May-2021
13	Opini DPS tentang Cicil Emas Melalui BSI Mobile	13/BSI/DPS/OPINI/VI/2021	11-June-2021
14	Opini DPS tentang BSI Smart Virtual Account - VA Debit	14/BSI/DPS/OPINI/VI/2021	11-June-2021
15	Opini DPS tentang BSI Investment Wakalah Bil Istitsmar (WBI)	15/BSI/DPS/OPINI/VI/2021	11-June-2021
16	Opini DPS tentang Pengalihan Aset Pembiayaan Pensiun Bank Mantap dalam Rangka Qanun LKS Aceh	16/BSI/DPS/OPINI/VI/2021	16-June-2021
17	Opini DPS tentang Kesesuaian Syariah pada Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah antar Bank (SiPA)	17/BSI/DPS/OPINI/VI/2021	23-June-2021
18	Opini DPS tentang Top Up Gadai Emas Melalui BSI Mobile	18/BSI/DPS/OPINI/VII/2021	07-June-2021
19	Opini DPS tentang Tindak Lanjut Rencana Pengalihan Aset Pembiayaan Pensiun Bank Mantap dalam Rangka Qanun LKS Aceh	19/BSI/DPS/OPINI/VII/2021	13-July-2021
20	Opini DPS terkait BSI Islamic Forfaiting	20/OPINI/DPS-BSI/VII/2021	16-July-2021
21	Opini DPS terkait Dukungan Teknis BSI Kepada BMRI dan BNI Dalam Rangka Penyelesaian Portofolio Bisnis terkait Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Provinsi Aceh	21/BSI/DPS/OPINI/IX/2021	09-September-2021
22	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah pada Layanan EDC Merchant BSI	22/DPS/BSI/OPINI/IX/2021	09-September-2021
23	Opini DPS terkait Pengesahan Template Akad Qardh dengan Jaminan Gadai (Rahn) Emas Melalui Sistem Elektronik	23/BSI/DPS/OPINI/IX/2021	14-September-2021
24	Opini DPS terkait Penggunaan Teknologi Virtual Private Cloud - Mandiri Cloud oleh Bank Syariah Indonesia	24/BSI/DPS/OPINI/IX/2021	22-September-2021
25	Opini DPS terkait Sindikasi Pembiayaan Preservasi Jalan Non Tol Jalur Lintas Timur (Jalintim) Riau Menggunakan Skema Refinancing dengan Akad al-ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik	25/DPS/BSI/OPINI/IX/2021	22-September-2021
26	Opini DPS terkait Sinergi Bank Syariah Indonesia dengan Pemegang Saham Pengendali	26/BSI/DPS/OPINI/IX/2021	22-September-2021
27	Opini DPS terkait Kegiatan Partnership Bancassurance	27/BSI/DPS/OPINI/X/2021	27-October-2021
28	Opini DPS terkait Layanan QRIS CPM, Cross Border dan TTS (Tarik, Transfer, Setor)	28/BSI/DPS/OPINI/X/2021	13-October-2021
29	Opini DPS terkait Pembatalan Transaksi Pembiayaan BSI Paylater (Akad Kafalah dan Akad Hawalah) pada BSI Mobile	29/BSI/DPS/OPINI/IX/2021	13-October-2021
30	Opini DPS terkait Layanan BSI Prioritas untuk Nasabah dengan Akad Wadiah	30/BSI/DPS/OPINI/X/2021	13-October-2021
31	Opini DPS terkait Rekening Dana Investor	31/BSI/DPS/OPINI/X/2021	13-October-2021

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

NO.	JUDUL	NO. REGISTER	TANGGAL OPINI DPS
32	Opini DPS terkait Harmonisasi Template Akad Segment Retail dan Wholesale PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	32/BSI/DPS/OPINI/X/2021	01-October-2021
33	Opini DPS terkait Sistem Digital Value Chain	33/DPS/BSI/OPINI/XI/2021	Nov-21
34	Opini DPS terkait Pembayaran Setoran Awal Haji Melalui BSI Mobile & BSI NET	34/BSI/DPS/OPINI/XI/2021	Nov-21
35	Opini DPS terkait Layanan Transaksi BI Fast (Individual Transfer)	35/DPS/BSI/OPINI/XI/2021	24-November-2021
36	Opini DPS terkait Issue Dukungan PT Zurich Insurace (ZI) Selaku Induk dari PT Zurich General Takaful Indonesia (ZGTI) terhadap LGBT (Lesbian, Gay,Biseksual dan Transgender)	36/BSI/DPS/OPINI/XI/2021	24/11/21
37	Opini DPS terkait Pengesahan Template Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) Refinancing PT. Adhi Jalintim Riau	37/BSI/DPS/OPINI/XII/2021	13 Desember 2021

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kinerja DPS BSI sepanjang tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan luar biasa manajemen BSI dan semua pihak terkait sehingga DPS BSI dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan Opini DPS dan pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui Self Assesment GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan Self Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Serta pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DIREKSI

Direksi adalah organ utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Bank Syariah Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi dapat mewakili BSI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS. Pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan pada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Pembidangan Tugas

NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
Hery Gunardi	Direktur Utama	-
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	-
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	-
Kusman Yandi	Direktur	Wholesale & Transaction Banking
Kokok Alun Akbar	Direktur	Retail Banking
Anton Sukarna	Direktur	Sales & Distribution
Achmad Syafii	Direktur	IT & Operations
Tiwul Widyastuti	Direktur	Risk Management
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Compliance & Human Capital
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Finance & Strategy

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris,
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan.
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujrah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Namun, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya.

Pemberhentian seperti itu berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, namun RUPS dapat menetapkan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan.

Kriteria Direksi

Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan:

1. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
        ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

Tata Tertib Kerja (Charter) Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun isi dari Tata Tertib Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. Senior Executive Vice President
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank.

Untuk memenuhi persyaratan kompetensi, anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Komposisi Direksi

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN	TANGGAL EFEKTIF	PERIODE JABATAN
Hery Gunardi	Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Kusman Yandi	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Kokok Alun Akbar	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Anton Sukarna	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Achmad Syafii	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tiwul Widyastuti	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB no. 92 tgl 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank (tata kelola perusahaan, strategi dan kinerja bank, manajemen risiko dan materi lainnya) yang dikoordinasikan oleh Corporate Secretary.

Program orientasi Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah dilaksanakan pada 28 Juli tahun 2021.

Hubungan Afiliasi Direksi

Kriteria hubungan afiliasi anggota Direksi meliputi:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

NAMA	JABATAN	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN:			HUBUNGAN KELUARGA DENGAN:		
		DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI
Hery Gunardi	Direktur Utama	x	x	x	x	x	x
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	x	x	x	x	x	x
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	x	x	x	x	x	x
Kusman Yandi	Direktur	x	x	x	x	x	x
Kokok Alun Akbar	Direktur	x	x	x	x	x	x
Anton Sukarna	Direktur	x	x	x	x	x	x
Achmad Syafii	Direktur	x	x	x	x	x	x
Tiwul Widyastuti	Direktur	x	x	x	x	x	x
Tribuana Tunggadewi	Direktur	x	x	x	x	x	x
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	x	x	x	x	x	x

√: Ya, x: Tidak

Rangkap Jabatan Direksi

Kebijakan

Kebijakan rangkap jabatan Direksi telah diatur dalam pedoman Direksi. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:
1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba; dan/atau
3. Perangkapan jabatan Direksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Selama tahun 2021 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN/INSTANSI LAIN	NAMA INSTANSI
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	Nihil	Nihil
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	Nihil	Nihil
Kusman Yandi	Direktur	Nihil	Nihil
Kokok Alun Akbar	Direktur	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur	Nihil	Nihil
Achmad Syafii	Direktur	Nihil	Nihil
Tiwul Widyastuti	Direktur	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Nihil	Nihil

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangan 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; atau
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

Rapat Direksi

Kebijakan

Rapat Direksi merupakan forum untuk membahas, mengoordinasikan dan menyelesaikan agenda-agenda Bank. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau setiap waktu bilamana diperlukan oleh seorang atau atau lebih anggota

Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh peserta lainnya sesuai kebutuhan Bank.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

NAMA	JABATAN	RAPAT INTERNAL DIREKSI			RAPAT GABUNGAN DENGAN DEWAN KOMISARIS			KEHADIRAN DI RUPS		
		JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%
Hery Gunardi	Direktur Utama	43	42	97	10	9	90	2	2	100
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	43	41	95	10	10	100	2	2	100
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	43	42	97	10	10	100	2	2	100
Kusman Yandi	Direktur	43	42	97	10	10	100	2	2	100
Kokok Alun Akbar	Direktur	43	42	97	10	10	100	2	2	100
Anton Sukarna	Direktur	43	41	95	10	10	100	2	2	100
Achmad Syafii	Direktur	43	42	97	10	9	90	2	2	100
Tiwul Widyastuti	Direktur	43	43	100	10	10	100	2	2	100
Tribuana Tunggadewi	Direktur	43	43	100	10	10	100	2	2	100
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	43	37	86	10	10	100	2	2	100

Agenda Rapat Internal Direksi

Rincian agenda dan keputusan/rekomendasi rapat internal Direksi disampaikan dalam tabel di bawah ini:

TANGGAL	AGENDA	KEPUTUSAN/REKOMENDASI
9 Februari 2021	1. *Update Progress Roll Out* 2. *Corporate Plan* & Rencana Bisnis Bank (RBB_ 2021-2023 dan Persiapan Rapat Kerja BSI 2021 3. *Update Culture Integration Program*	1. Pastikan agar dalam menjalankan fungsinya sebagai tim dengan surat keputusan penugasan kepada masing-masing anggota. 2. Rapat Direksi menyepakati pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas). 3. Program agar dijalankan sesuai dengan strategi dan *timeline* yang direncanakan.
16 Februari 2021	1. Rencana Persiapan RUPS Tahunan 2. *Update* Kinerja Januari 2021 3. *Update* Portofolio *Quality Review* Pembiayaan BSI 4. *Update* Organisasi Roll-out	1. RUPS Tahunan serta seluruh agenda disetujui oleh Direksi untuk dapat dilaksanakan. 2. Unit kerja agar mencari strategi untuk bisa terus menurunkan *Cost of Fund* (CoF). 3. Program agar dijalankan sesuai dengan strategi dan *timeline* yang direncanakan. 4. Pastikan tugas dan SOP dari tim sudah jelas dan mereka memahami pekerjaannya.
24 Februari 2021	1. *Clearance Meeting* Audit BSM 31 Januari 2021 2. Usulan Rakerwil BSI 2021, Direktur Supervisi, *Update* Penataan Jaringan (Region, Area dan Branch) 3. *Update Monitoring* Penurunan Nisbah Spesial Deposito Rupiah 4. Usulan Migrasi Nasabah Cabang Model A Via Digital dan *Auto Migration*	1. Radir menerima laporan hasil audit dari PwC dan meminta kepada unit terkait untuk menindak lanjuti sesuai dengan masukan yang disampaikan. 2. Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik. 3. kewenangan *Group Head*, Regional Head dan Area Manager, kewenangan tersebut dialihkan/menjadi kewenangan Direktur Sales & Distribution 4. Proses migrasi digital disetujui untuk diimplementasi.

TANGGAL	AGENDA	KEPUTUSAN/REKOMENDASI
2 Maret 2021	1. Strategi Pertumbuhan CASA 2021	1. Target Instansi pemerintah agar dapat difokuskan pada kementerian.
9 Maret 2021	1. Progres Proyek *Overseas* 2. Kinerja BSI: *Update Profit and Loss* 3. Kajian Kerjas ama dan *Business Model* Kartu Hasanah 4. Usulan Pembentukan Struktur Organisasi CISO (*Chief Information Security Officer*)	1. Tim Proyect Overseas dan Tim Legal agar memperhatikan proses dan komunikasinya. 2. Carikan jalan agar ekses likuiditas bisa dialirkan ke pembiayaan. 3. agar membuat program optimalisasi aktifasi Hasanah Card. 4. Direksi menerima usulan terkait pembentukan CISO office
16 Maret 2021	1. Strategi Promosi Produk BSI 2. Strategi Bisnis Pembiayaan, Pendanaan, dan *Fee Based Income*	1. BSI agar memiliki standar pelaksanaan event dengan standar yang sangat baik. 2. agar terus dipantau dan dilaporkan business plan dan strateginya.
23 Maret 2021	1. Hasil Audit Laporan Keuangan BNIS Dan BRIS Per Januari 2021 2. Proyeksi *Quality* BSI 2021 3. Agenda Pembahasan Laznas BSI	1. Direksi menerima laporan hasil audit dan meminta kepada unit terkait untuk menindak lanjuti sesuai dengan masukan yang disampaikan. 2. Perbaikan qualitas pembiayaan agar menjadi perhatian semua pihak di BSI. 3. Direksi menyetujui usulan.
30 Maret 2021	1. Rencana Kegiatan Ramadhan 1442 H 2. Rencana *Corporate Action: Right Issue* dan *Bancassurance* 3. Sinergi BSI dengan Pemegang Saham Pengendali	1. Direksi menyetujui pelaksanaan Kegiatan Ramadhan 1442H. 2. agar ditindaklanjuti proses kajiannya dan melanjutkan dengan proses penunjukkan *underwriter*. 3. *Review* & perpanjangan untuk segera diproses dan ditindak lanjuti.
6 April 2021	1. *Update Roll-out* Makassar 2. *Update* Rencana Pendirian *Bullion Bank* Indonesia	1. Tetapkan solusi jika ada kendala. 2. segera bentuk *working group*.
13 April 2021	1. Laporan Kinerja Maret 2021 2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 3. *Overseas Branch Update* 4. Usulan Struktur Organisasi Bansos 5. *Linkage Target Update*	1. Pertajam fokus strategi BSI 2021. 2. Dalam agenda Mata Acara Ke 1 agar dilaksanakan secara *online*. 3. Agar tim memastikan kewenangan persetujuan pendirian *Representative Office & Securities Company*. 4. Organisasi Government Project kedepan diharapkan mengerjakan berbagai proyek dalam rangka mendukung program pemerintah lainnya. 5. Menyetujui penyesuaian target.
20 April 2021	1. *Update* Ekosistem Pesantren dan Strategi Dana Murah (CASA) 2. *Pipeline* Pembiayaan Corporate & Commercial Banking 3. Usulan Program Peningkatan *Registered User & Active User* BSI *Mobile*	1. Proses realisasi terhadap target, agar dapat dibuat tim *task force* khusus. 2. Pertumbuhan pembiayaan agar terus dapat ditingkatkan setiap bulannya. 3. Rapat Direksi menyetujui usulan program yang disampaikan.
27 April 2021	1. Penataan Jaringan Kantor Regional Office I Aceh 2. Pembelian Aset BRI di Aceh dan Permohonan Nama Masjid di The Tower	1. Diperhatikan proses migrasi data. 2. Agar *review* kembali jika diperlukan dapat dilakukan perjanjian.
11 Mei 2021	1. *Update* Persiapan Operasional Idul Fitri	1. Atas pemaparan tersebut, Rapat Direksi menerima laporan untuk operasional dan meminta untuk menjaga keamanan baik dari sisi fisik gedung maupun kelancaran transaksi.
24 Mei 2021	1. Laporan Kinerja April 2021 2. Update *Right Issue* dan *Bancassurance*	1. agar memantau *week by week* terhadap pertumbuhan. 2. kajian agar dilakukan lebih komprehensif dan lebih mendalam.
2 Juni 2021	1. Penataan Jaringan kantor RO I Aceh dan Layanan Syariah Bank (LSB)	1. Terhadap cabang agar dilakukan analisa terhadap potensi daerah kantor cabang tersebut.
9 Juni 2021	1. Penyaluran Program Bantuan Sosial (Bansos) 2. Laporan Kinerja Mei 2021	1. Proses penyaluran agar dapat memenuhi kebutuhan petugas pendamping sesuai usulan. 2. agar diperhatikan SDM dan penggunaan IT terhadap proses implementasinya.
15 Juni 2021	1. Update Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1. agar dipastikan penyalurannya tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan segmentasi yang telah ditentukan.
22 Juni 2021	1. Revisi Rencana Bisnis Bank 2021-2023 2. *Retail Collection Strategy & Organization*	1. Direksi menyutujui usulan perubahan. 2. agar dilakukan review kembali terhadap organisasi tersebut.

TANGGAL	AGENDA	KEPUTUSAN/REKOMENDASI
29 Juni 2021	1. Pembayaran dan Tugas Pembantuan Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat Perusahaan 2. Usulan Program Qurban 1442 H/2021 M	1. BSI diharapkan memiliki icon program sosial. 2. Tema program untuk disesuaikan, gunakan tone yang lebih *soft* dan menyesuaikan kondisi prihatin pandemi saat ini.
6 Juli 2021	1. Pengalihan Portofolio Bank Mantap ke BSI RO I Aceh 2. Usulan Operasional Kantor BSI Selama Pandemi Covid-19	1. Unit kerja agar memastikan bahwa portfolio yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 2. Penyediaan makan siang untuk pegawai WFO sesuai.
13 Juli 2021	1. Linkage Target Update Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 2. Update Ekonomi Makro dan Antisipasi Dampak PPKM Darurat 3. Laporan Kinerja BSI per Juni 2021 4. Update Availability ATM dan BSI Mobile 5. Pemenuhan RCEO RO Aceh	1. Direksi menyetujui penyelenggaraan RUPSLB. 2. agar ditambahkan perkembangan konsumsi penjualan/ pembelian. 3. agar dapat dijaga sehingga tidak lebih besar. 4. Mobile Banking ditargetkan tidak ada gangguan masal. 5. Keputusan penugasan tersebut berlaku efektif sesuai Sertijab.
21 Juli 2021	1. Pemenuhan RCEO RO Makassar 2. *Review* Pejabat N3 di Regional Aceh 3. Tingkat Kesehatan BSI per Juni 2021 4. Penanganan *Open Item* Pasca *Rollout* 5. *Update* Tindak Lanjut Qanun Aceh	1. Rapat Direksi meminta untuk melakukan seleksi dari kandidat untuk diwawancara. 2. Keputusan penugasan tersebut berlaku efektif sesuai sertijab. 3. agar memperhatikan celah dan hal yang dapat meningkatkan rentabilitas. 4. Lakukan pelaporan terhadap progress penyelesaian dalam rapat Direksi. 5. Agar tetap menyampaikan informasi kepada OJK terkait proses peralihan portofolio.
27 Juli 2021	1. Perluasan Ruang Lingkup Audit Keuangan 31 Desember 2021 (Pemeriksaan Atas Proses Migrasi Data) 2. Portofolio Guideline per Juni 2021	1. Agar menjadi bagian dari *scope of work audit*. 2. Portofolio pembiayaan sebaiknya mayoritas tersalurkan pada industri menarik.
3 Agustus 2021	1. Pemenuhan RCEO 11 Makassar 2. Perubahan Struktur Organisasi *Bankwide*	1. Berdasarkan hasil wawancara, diputuskan RCEO 11 Makassar setelah dilakukan BAST. 2. Direksi menyetujui surat keputusan struktur organisasi.
10 Agustus 2021	1. Strategi Peningkatan Giro 2. Strategi Peningkatan Fee Based Income (FBI) 3. Partisipasi BSI di Expo Dubai 2020	1. Fokus nasabah giro agar fokus pada optimalisasi potensi ekosistem. 2. Seluruh unit kerja terkait agar memperhatikan pencapaian dari masing-masing segmen usahakan seluruhnya dapat mencapai target. 3. Rapat Direksi menyetujui keikutsertaan BSI.
18 Agustus 2021	1. Laporan Kinerja BSI Per Juli 2021 2. Pengadaan Kalender & Agenda BSI 2022	1. Segmen pembiayaan agar dapat fokus peningkatan booking pembiayaan baru. 2. agar berkoordinasi dengan Tim terkait dengan jumlah kalender dan buku agenda yang dibutuhkan oleh nasabah.
1 September 2021	1. Macroeconomic Update & Industry Outlook 2. Update Financing Factory 3. Update Vaksin Pegawai dan Keluarga 4. Usulan Penggunaan Dana Talangan Rupa-Rupa: Case Al-Baraqah	1. Kajian ekonomi agar dibuat lebih mendalam dan detail. 2. untuk masuk lagi ke Radir untuk update. 3. untuk menyusun aturan dan kebijakan terkait pegawai. 4. untuk segera menjalankan fungsi legal.
7 September 2021	1. Update Masjid Bakauheni 2. Update Kualitas Pembiayaan Agustus 2021 3. Update Persiapan Operation Day One	1. Desain Masjid agar didiskusikan bersama dengan arsiteknya. 2. KPI pembiayaan agar ditargetkan untuk positif tumbuh. 3. untuk membuat check list atas progress yang belum selesai.
14 September 2021	1. Laporan Kinerja BSI per Agustus 2021	1. agar mengambil langkah-langkah strategis dengan melakukan Working Group bersama Unit terkait untuk memonitor dan menjaga pertumbuhan pembiayaan.
21 September 2021	1. Pembahasan Strategi Layanan Syariah Bank (LSB) BSI	1. Strategi agar disusun kembali.
5 Oktober 2021	1. Tindak Lanjut Muhasabah BSI 2. Draft RKAP 2022 dan Prognosis RBB 2021 3. Audit Planning Meeting PwC	1. *Sub Stream* agar dipindahkan ke *Stream*. 2. Agar disusun strategi untuk menjaga kualitas pembiayaan. 3. Radir menerima laporan hasil audit dan meminta kepada unit kerja terkait untuk menindak lanjuti sesuai dengan masukan yang disampaikan.

TANGGAL	AGENDA	KEPUTUSAN/REKOMENDASI
12 Oktober 2021	1. *Update* PMO *Operational Day* 1 2. Laporan Kinerja BSI September 2021 & RBB 2022-2024	1. Agar tim membuat surat kepada ketiga Bank Induk (PSP). 2. Proyeksi agar dibuat lebih challenging, karena kinerja BSI menjadi perhatian banyak pihak.
19 Oktober 2021	1. *Action Plan* Hasanah Card 2. *Action Plan* OTO 3. *Action Plan* SME 4. *Update Operational Day One* 5. NLE Bea Cukai 6. Laporan CGPI 2020	1. Potensi Hasanah Card di Aceh agar dilakukan benchmark dengan bisnis kartu yang dimiliki oleh Bank Induk. 2. Fokus program referral hanya pada Kantor Cabang yang besar dan potensial. 3. agar mengawal pipeline dan rutin menyampaikan laporan pada Regional. 4. Terkait konsolidasi sinergi, agar dapat dipantau progressnya sehingga penyelesaiannya dapat 100%. 5. PKS untuk dapat dipastikan proses dan waktunya. 6. Story line materi perlu diperhatikan sesuai dengan tema penilaian.
26 Oktober 2021	1. *Update Operational Day One* 2. Laporan CGPI 2020	1. agar mengkoordinasikan media cover, placement, KOL dan lainnya. 2. Roadmap agar sejalan dengan corporate plan.
2 November 2021	1. *Action Plan Fee Based Income*	1. agar mulai melakukan penjajakan terkait dengan potensi mata uang.
9 November 2021	1. Update RBB 2022-2024 2. *Update Action Plan* OTO 3. BSI Excellence Award	1. *Guidance* pertumbuhan kinerja BSI 2022 dapat disesuaikan dengan data dari OJK dan Bank Indonesia. 2. Action plan cabang tumbuh agar fokus di cabang-cabang yang memiliki kinerja tinggi. 3. Penyerahan penghargaan atau awarding disampaikan pada Milad BSI.
16 November 2021	1. Laporan Kinerja BSI per Oktober 2021 2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2022 3. *Update* Implementasi BSI One Culture	1. Pembukaan Tabungan online agar didorong pertumbuhannya secara optimal. 2. agar menyesuaikan Program yang disusun dalam RAKB 2022. 3. Dalam Hasil survey perlu sejalan dengan pencapaian kinerja.
23 November 2021	1. *Update* Implementasi BSI One Culture 2. *Update Service Excellence*	1. agar membuat *guidance* terkait penanganan area. 2. Service standar BSI perlu dibangun mulai dari peningkatan product knowledge, SLA, kebersihan banking hall dan lainnya.
30 November 2021	1. Strategi Tabungan dan Giro serta Proyeksi Akhir Tahun 2. *Update Collection* dan Proyeksi Akhir Tahun 3. Proyeksi Kolektibititas Akhir Tahun 4. Kecukupan CKPN (*Retail & Wholesale*) 5. Strategi Wholesale & Proyeksi Akhir Tahun (Pembiayaan dan *Transaction Banking Wholesale*) 6. Strategi *Fee Based Income* Akhir Tahun	1. agar menyampaikan presentasi dengan data analisis yang tajam dan komprehensif dengan penjelasan pencapaian pertumbuhan bisnis secara detail. 2. Terhadap nasabah yang telah dilakukan recovery, agar dapat segera dibukukan penyelesaiannya. 3. agar memperhatikan pergerakan Nasabah high risk,. 4. Terhadap CKPN/Coverage Hasanah Card agar ditambahkan. 5. Helpdesk call center Cash Management System agar dapat segera di finalisasi prosesnya. 6. agar memperhatikan strategi pencapaian *gap* realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.
7 Desember 2021	1. Update BSI Excellence Award 2. Penyelesaian Tagihan Rupa-Rupa yang Dibuku Pra-Merger 3. Update Program Bansos	1. Masing-masing kriteria agar dapat diperjelas rinciannya. 2. Beban kedepannya agar dipertimbangan untuk menjadi beban cabang. 3. Seluruh komunikasi dan berbagai keputusan agar dipastikan berdasarkan surat resmi.
14 Desember 2021	1. Laporan Kinerja BSI per November 2021 2. *Update Virtual Account* 3. Persiapan Operasional Akhir Tahun 4. *Update Cash Management System*	1. agar menyusun strategi atau action plan terhadap segmen-segmen pembiayaan yang belum mencapai target yang ditetapkan. 2. Dorong kembali ekosistem halal. 3. agar diperhatikan agar end of day nya tidak mundur. 4. Perlu dilakukan benchmark dengan Bank Pesaing, agar dibuat list requirement yang perlu dimiliki.

TANGGAL	AGENDA	KEPUTUSAN/REKOMENDASI
21 Desember 2021	1. *Review* Program Kartu Debit & kartu Hasanah 2. *Update Operational Excellence* 3. *Update Project* BI FAST 4. Target RKAP BSI 2022	1. Dalam rangka peningkatan volume, agar dapat ditingkatkan kembali himbauan penggunaan hasanah card kepada pegawai BSI. 2. agar membuat dashboard dalam rangka memantau progress indikator sehingga dapat berjalan dengan pencapaian yang terukur sesuai target. 3. perlu mengkaji dan menggali potensi lainnya agar tidak kehilangan jumlah nominal. 4. Target bisnis dapat dijalankan dengan infrastruktur yang baik
28 Desember 2021	1. Prognosa Kinerja BSI Akhir tahun 2021 2. *Review* Sanksi Hasil Audit 3. *Update Virtual Account*	1. Prognosa kinerja tabungan untuk menjadi perhatian agar tidak menjadi turun. 2. perlu melakukan *setting rule* dan mendefinisikan dengan jelas sanksi. 3. Terhadap penyelesaian kendala agar disampaikan *update*-nya.

Agenda rapat Direksi bersama Dewan Komisaris disajikan pada bagian "Rapat Gabungan Dewan Komisaris" dalam Laporan Tahunan ini.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Kebijakan

Direksi melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan dapat menyampaikan dimateri hasil pendidikannya didalam rapat dan/atau sarana penyampaian lain. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi atau fasilitas dan protokoler selama pendidikan berjalan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Direksi disajikan secara lengkap pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas dan Keputusan Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

1. Menyusun dan mengimplementasikan Corporate Plan
2. Menggelar Rapat Direksi
3. Menggelar Rapat persetujuan Komite Pembiayaan, menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyusun RAKP Bisnis Perseroan Tahun 2022.
5. Menyusun RAKP Sustainability Perseroan Tahun Buku 2022.
6. Menggelar Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Melakukan hapus buku piutang pokok yang macet, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Mewakili Bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis dan support.
9. Melaksanakan kegiatan edukasi, literasi dan inklusi dalam rangka peningkatan produk dan layanan Bank Syariah (Literasi Keuangan Syariah).
10. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatuhan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lainnya.
11. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
12. Melakukan kegiatan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada penjelasan diatas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2021, antara lain :

1. Struktur Organisasi BSI
2. Tata Tertib Direksi
3. Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi & SEVP.
4. Alternate Direksi dan SEVP.
5. Komite Manajemen Risiko
6. Komite Bisnis
7. Komite Aset & Liabilitias
8. Komite Pengarah Teknologi & Informasi
9. Komite Sumber Daya Manusia
10. Komite Policy & Procedure
11. Penempatan dan Penetapan Pegawai
12. Penetapan Tim Roll Out
13. Struktur Organisasi Project Darussalam (Qonun).
    dan lainnya.

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

A. Penilaian Berdasarkan KPI

Prosedur Penilaian

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance ndicator* (KPI), yaitu:

1. PBV (*Price to Book Value*)
2. Laba Bersih BSI
3. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank
4. Aset
5. Jumlah *Customer* Digital
6. Pelaksanaan Inisiatif Strategis Proses Merger
7. *Employee Productivity*

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2021 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi BSI tahun 2021 sebesar 110,04 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PERSPEKTIF	BOBOT (%)	KPI	BOBOT (%)	TARGET	KETERANGAN	SIFAT	DESEMBER 2021	
								PENCAPAIAN (%)	SKOR
1	Financial	60,00	PBV (Price Book to Value)	20	Minimal 12,5	Mendukung road map menjadi Top 10 Global Sharia Bank in Market Cap	Max	121,40	24,28
2			Laba Bersih BSI	20	Rp2.904 miliar	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	104,27	20,85
3			Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	10	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	100,00	10,00
4			Aset	10	Rp247,67 triliun	Aset BSI Desember 2021	Max	107,11	10,71
5	Customer	10,00	Jumlah Customer Digital	10	3 juta	User register BSI Mobile Desember 2021	Max	115,19	10,00
6	Internal Process	20,00	Pelaksanaan Inisiatif Strategi Proses Merger	20	Oktober 2021	Selesainya project roll out jaringan dan rekening pada 31 Oktober 2021	Max	153,40	24,00
7	People Development	10,00	Employee Productivity	10	Rp153 juta	Laba bersih/ pegawai	Max	101,95	10,20
TOTAL				**100**					**110,04**

B. Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian Direksi terkait dengan GCG mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penilaian penerapan GCG Bank.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan assessment kinerja Dewan Komisaris termasuk dalam pelaksanaan self assessment GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome. Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 25 indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 14 indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committeee
3. Komite *Policy and Procedure*
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite *Human Capital*
7. Komite Asset dan Liabilities/*Asset and Liability Committee* (ALCO)

Prosedur Penilaian

Selama tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Kriteria dan Hasil Penilaian

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

IT Steering Committeee

IT Steering Committee (ISC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT *strategic plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2021, IT *Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya dengan baik

Komite *Policy and Procedure*

Komite *Policy and Procedure* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/ menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutakhirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2021, Komite *Policy and Procedure* telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas penyusunan Kebijakan Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya dengan baik

Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk *marketing, relationship management* berdasarkan target market/target *customer* yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta pemutusan. Selama tahun 2021, telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite *Human Capital*

Human Capital Committee merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Selama tahun 2021, Human Capital Committee telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite *Asset* dan *Liabilities/Asset and Liability Committee* (ALCO)

Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2021, *Asset and Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Dan Direksi

Keberagaman Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Mulya Effendi Siregar*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	2021	65 Tahun	L	• Program Doctor Consumer Economics – Human Ecology, The Ohio State University • Pasca Sarjana Agricultural Economics, The Ohio State University • Sarjana Fakultas Pertanian Bidang Keahlian Sosial Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor	• Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2010-sekarang) • Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (2017-2021) • Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (2014-2017) • Asisstant Gubernur Bank Indonesia (2013) • Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013)
Adiwarman Azwar Karim**	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	2021-2024	58 tahun	L	• Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	• Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Veritra Sentosa Internasional • Founder, KARIM Consulting Indonesia • Founder, KARIM Business Consulting • Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna
Muhammad Zainul Majdi**	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	2021-2024	49 tahun	L	• Doktoral Tafsir & Ilmu Al-Quran • Magister Tafsir & Ilmu Al-Quran • Sarjana Tafsir & Ilmu Al-Quran	• Rektor Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi • Gubernur Nusa Tenggara Barat (2008-2018)

Keberagaman Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Suyanto	Komisaris	2021-2024	59 tahun	L	• Magister Strategi Perang Semesta • Sarjana Ekonomi Pembangunan	• Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara • Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara • Staf Ahli Kepala BIN bidang SDA-LH • Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara • Pejabat Pembuat Komitmen bidang Teknologi Badan Intelijen Negara • Kepala Biro Umum Badan Intelijen Negara • Kasubdit Eropa II, Sub Direktorat Eropa II Direktorat Amerop pada Deputi Intelijen Luar Negri Badan Intelijen Negara • Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara
Masduki Baidlowi	Komisaris	2021-2024	63 tahun	L	• Sarjana Tarbiyah • Sarjana Sastra Arab	• Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden) • Komisaris PT Bank Syariah Mandiri • Anggota DPR RI anggota Komisi IV bidang pertanian dan Kelautan • Anggota Komisi I Bidang politik Luar Negeri • Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan
Imam Budi Sarjito	Komisaris	2021-2024	62 tahun	L	• Doktor Ekonomi • Master Ekonomi • Sarjana Ekonomi	• Komisaris PT Bank BNI Syariah • Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI • Komisaris PT Bank BNI Syariah • Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI • Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI
Sutanto	Komisaris	2021-2024	58 tahun	L	• Sarjana Administrasi Niaga Universitas Diponegoro	• Komisaris PT Bank BRI Syariah • Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung • Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang • Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh • Wakil Inspektur, Bidang Audit KP , KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat

Keberagaman Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Eko Suwardi*	Komisaris Independen	2021	58 Tahun	L	• Program Doctor Bussiness in Acounting, Queensland University of Technology (2005) • Pasca Sarjana Accounting, California State University (1994) • Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (1987)	• Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (2016-sekarang) • Komisaris Independen PT Bank BRISyariah (2017-2021) • Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi FEB UGM (2012-2016) • Wakil Dekan Bidang Keuangan Aset dan SDM FEB UGM (2008-2012) • Ketua Satuan Audit Internal UGM (2005-2008)
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	2021-2024	78 thun	L	• Doktor Manajemen Lingkungan • Master Business Administration • Sarjana Teknik Kimia	• Komisaris Independen, PT Bank Syariah Mandiri • Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro (PKMI) • Komisaris Independen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Komisaris Independen, PT Bank Negara Indonesia Tbk • Komisaris Independen, PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	2021-2024	35 tahun	L	• Magister Kebijakan Kesehatan • Kedokteran Gigi	• Komisaris PT Merial Health • Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 • Chairman/Co-founder MilenialFest • Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	2021-2024	68 tahun	L	• Post-Doctorate Research Program • Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Ushuluddin	• Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta • Pengawas Yayasan Pendidikan Madania • Anggota Timsel dan Calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI • Komisaris Independen BNI Syariah

* Sudah tidak efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 24 Agustus 2021 Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Keberagaman Dewan Pengawas Syariah

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	2021-2024	60 tahun	L	• Doktor Syariah • Magister Syariah • Sarjana Syariah	• Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Perssero) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services • Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia • Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Danamon
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	2021-2024	54 tahun	L	• Doktor Islamic Economics and Finance • Magister Ilmu Hukum • Magister Bussiness Administration IPWI Jakarta (1999) • Sarjana Syariah	• Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia • Ketua Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT BRI Life • Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	2021-2024	46 tahun	L	• Doktor bidang Fiqh Muqaran • Magister bidang Fiqh Muqaran • Sarjana bidang Syariah Islamiyah	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Keberagaman Dewan Pengawas Syariah

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	2021-2024	70 tahun	L	• Doktor Ilmu Agama/ Pengkajian Islam (Zakat) • Diploma Bidang Bahasa Arab • Magister Penyuluhan Pembangunan • Sarjana Syariah	• Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) • Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk • Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor

Keberagaman Direksi

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Hery Gunardi	Direktur Utama	2021-2024	59 tahun	L	• Doktor Manajemen Bisnis • Master Finance and Accounting • Sarjana Administrasi Niaga	• Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri • Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	2021-2024	56 tahun	L	• Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/ Pengolahan Hasil Pertanian	• Direktur Utama PT Bank BRIsyariah, Tbk periode • Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin

Keberagaman Direksi

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	2021-2024	57 tahun	L	• Magister Manajemen, Ilmu – Ilmu Sosial (Banking Management) • Sarjana Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian/ Ekonomi Pertanian	• Direktur Utama, PT Bank BNI Syariah • Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak, PT Bank Negara Indonesia Tbk • Senior Executive Vice President (SEVP) Business Risk, PT Bank Negara Indonesia Tbk • Pemimpin Divisi International, PT Bank Negara Indonesia Tbk • Pemimpin Divisi Treasury, PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kusman Yandi	Direktur	2021-2024	56	L	• Master of Business Administration • Sarjana Ekonomi Akuntansi	• Direktur Wholesale Banking, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) • Senior Executive Vice President of Wholesale Banking Directorate (Pejabat Eksekutif), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), • Senior Executive Vice President of Wholesale, Treasury & International Banking Directorate (Pejabat Eksekutif), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), • Executive Business Officer of Commercial and Business Banking Directorate (Pejabat Eksekutif), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kokok Alun Akbar	Direktur	2021-2024	55	L	• Sarjana Pertanian Perlindungan Tanaman	• Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRIsyariah Tbk • Kepala Divisi Bisnis BUMN PT Bank Rakyat Indonesia • Wakil Kepala Divisi Bidang BUMN 2, Divisi Bisnis BUMN 2 PT Bank Rakyat Indonesia • Group Head Divisi Agribisnis PT Bank Rakyat Indonesia
Anton Sukarna	Direktur	2021-2024	51 tahun	L	• Sarjana Teknologi Produksi Ternak	• Direktur Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri • SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020) • Regional Head – Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri • Regional Head – Region VII/Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri • Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri

Keberagaman Direksi

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KEAHLIAN	PENGALAMAN
Achmad Syafii	Direktur	2021-2024	54 tahun	L	• Magister Manajemen Informatika • Sarjana Teknik Informatika & Komputer	• Direktur IT, Operation & Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri • Direktur IT & Operation PT Bank Syariah Mandiri (2017-2020) • Group Head IT Application Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • E4 -Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • DH Integration Hub & Common Application Services PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tiwul Widyastuti	Direktur	2021-2024	55 tahun	P	• Magister Manajemen International • Sarjana Pertanian	• Direktur Risk Management PT Bank Syariah Mandiri • Group Head Commercial Risk 2 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Komisaris PT Usaha Gedung Mandiri • Group Head Corporate Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Departement Head Multi Industri I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tribuana Tunggadewi	Direktur	2021-2024	54 tahun	P	• Magister Ilmu Hukum • Spesialis Kenotariatan • Sarjana Hukum	• Direktur Kepatuhan & Risiko PT Bank BNI Syariah • Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi PT Bank BNI Syariah • Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Vice President (VP) Wakil Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2011) • VP Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	2021-2024	43 tahun	L	• Magister Bisnis Administrasi • Sarjana Akuntansi	• Direktur Finance, Strategy & Treasury PT Bank Syariah Mandiri • Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri • SEVP Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri • Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance PT Mandiri Tunas Finance • SEVP/Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia menerapkan prosedur dan kebijakan yang mengacu pada:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.

Prosedur Nominasi

Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru.

Direksi

Pengangkatan Direksi Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Kebijakan

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris mengacu/berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prosedur Penetapan

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Remunerasi dan Nominasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.



Struktur Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*ene t*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
   - Tunjangan Hari Raya
   - Tunjangan Purna Jabatan
   - Tunjangan Perumahan dan Utilities

- Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Club Membership dan Anggota Perkumpulan Profesi
- Fasilitas Biaya Komunikasi
- Fasilitas Kantor Non Inventaris
- Fasilitas Perjalanan Dinas
- Fasilitas Bantuan Humum
- Izin Cuti

3. fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
   - Tunjangan Hari Raya
   - Tunjangan Purna Jabatan
   - Fasilitas Kesehatan
   - Fasilitas Perjalanan Dinas

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah

Dalam penetapan *remuneration package* tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Jumlah nominal remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi selama tahun 2021, adalah sebagai berikut.

Rincian Remunerasi

JENIS REMUNERASI	JUMLAH PENERIMA DALAM 1 (SATU) TAHUN					
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		DPS	
	ORANG	NOMINAL (RpJUTA)	ORANG	NOMINAL (Rp JUTA)	ORANG	NOMINAL (Rp JUTA)
Honorarium	9	9.959.125.000	10	25.712.500.000	4	2.046.000.000
Tunjangan Perumahan	-	-	10	1.874.400.000	-	-
Tunjangan Transportasi	9	1.991.825.000	-	-	-	-
Tunjangan Hari Raya	-	-	-	-	-	-
Tantiem	9	6.749.204.778	10	20.862.401.902	4	1.165.760.059
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura						
Transportasi	-	-	10	3.558.833.333	-	-
Asuransi Purna Jabatan	9	2.489.781.250	10	2.489.781.250	4	511.500.000
Kesehatan	9	396.615.418	10	1.863.852.526	4	77.620.390

Kelompok Jumlah Remunerasi

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH DEWAN KOMISARIS	JUMLAH DPS	JUMLAH DIREKSI
Di atas Rp2 miliar	9	-	10
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar	-	1	-
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar	-	3	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-

Keterangan: Diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas mengelola kesekretariatan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan undangan rapat kepada seluruh peserta untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rapat;
3. Mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh peserta rapat;
4. Mencatat dan mengadministrasikan keputusan rapat;
5. Menyimpan konsep risalah rapat;
6. Menjaga kerahasian keputusan rapat sampai dengan keputusan diumumkan;
7. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota rapat dan pejabat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris;
8. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut perkembangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat serta melaporkan tindak lanjutnya kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris. Pembentukannya bertujuan membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Di antaranya adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Audit.
4. Peraturan perundang–undangan dan regulasi terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
    a. Menentukan rencana kerja tahunan.
    b. Menentukan jadwal rapat tahunan. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
    c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
    d. Membuat Self Assesment mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.
    e. Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.

2. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
   a. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
   b. Efektifitas kinerja internal dan eksternal auditor.
   c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   d. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
   f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   g. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
   h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, yang meliputi:
   a. Laporan Keuangan
      i. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Tbk., seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
      ii. Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
      iii. Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
      iv. Mempelajari secara mendalam perubahan angka/nilai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/laba.
      v. Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
      vi. Mempelajari secara mendalam laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
      vii. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
      viii. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
   b. Internal Control
      Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern atas penerapan sistem pengendalian intern (*Internal control system*).
      i. Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah memiliki sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku.
      ii. Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. guna memastikan bahwa pengendalian intern (*internal control*) sudah dilaksanakan dengan benar.
      iii. Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern (*internal control system*) dan pelaksanaannya.
      iv. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Ekstern.
      v. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
   c. Internal Audit.
      Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
      i. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
      ii. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.

iii. Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
iv. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit intern untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
v. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
vi. Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
vii. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

d. External Audit
   i. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal auditor serta institusi pemeriksa lainnya.
   ii. Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diundang untuk mengikuti tender.
   iii. Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang meliputi:
      (1) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
      (2) Hubungan sebagai pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. dalam jumlah material/menentukan.
      (3) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
      (4) Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
      (5) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah mantan pejabat/ auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
   iv. Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik.
   v. Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku.
   vi. Mempelajari *Request for Proposal dan Terms of Reference* yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon eksternal auditor PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   vii. Mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
   viii. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   ix. Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
      (1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
      (2) Temuan-temuan penting.
      (3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
      (4) Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
      (5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
   x. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris

Wewenang

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.

3. Meminta laporan hasil pemeriksaan internal auditor dan eksternal auditor serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya,
4. Meminta internal auditor dan atau eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Piagam Komite Audit

Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Audit yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI Nomor 01/003-SKB/Dirkom tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia.

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Isi Piagam Komite Audit, secara umum meliputi:
1. Visi, Misi dan Fungsi
2. Kedudukan & Ruang Lingkup
3. Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab dan Komunikasi serta hubungan internal audit dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
4. Persyaratan Internal Auditor
5. Kode Etik Auditor
6. Aktivitas Internal Audit
7. Risiko Audit dan Perlindungan Hukum

Komposisi Komite Audit

Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/178-KEP/DIR tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang efektif per 30 Agustus 2021. Rinciannya adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
Eko Suwardi*	Ketua merangkap anggota Komisaris Independen	2021
Muhammad Zainul Majdi**	Ketua merangkap anggota Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	2021-selesai
Mulya Effendi Siregar* Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Anggota	2021
Adiwarman Azwar Karim** Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Anggota	2021-selesai
Imam Budi Sarjito Komisaris	Anggota	2021-selesai
Suyanto Komisaris	Anggota	2021-selesai
M. Arief Rosyid Hasan Komisaris Independen	Anggota	2021-selesai
Widuri Meintari Kusumawati Pihak Independen	Anggota	2021-selesai
Djoko Seno Adji Pihak Independen	Anggota	2021-selesai
M. Zacky Thayib Pihak Independen	Anggota	2021-selesai

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Profil Komite Audit

Eko Suwardi
Ketua merangkap anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Zainul Majdi
Ketua merangkap anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mulya Effendi Siregar
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman Azwar Karim
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Imam Budi Sarjito
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Suyanto
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Widuri Meintari Kusumawati
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	44 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Klaten, 11 Mei 1977
Dasar Penunjukan	Keputusan Direksi No. 01/178-KEP/DIR
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2016) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (2000) • Diploma (D3) Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1998)
Sertifikasi	• Cyber Risk Management Fundamentals (2021), CRMS Indonesia 2021 • Sertifikasi Halal Supervisor oleh LSP LP POM MUI, 2019 • Certification in Audit Committee Practices, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) 2019 • Certified on Enterprise Risk & Governance (CERG-3120163), 2016-2021
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (2020– 2021) • Anggota Komite Audit di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (2015 – 2019) • Anggota Komite Audit di PT Sarana Multigriya Finansial (2017-2020) • Capital Expenditure Analyst di Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko PT Telkom Indonesia Tbk (2004-Sekarang) • Anggota Tim Kerja Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko di PT Telkom Indonesia Tbk (2014 -2019) • Anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko di PT Telkom Indonesia Tbk (2004 - 2013) • Compliance Officer di PT Bank Syariah Mandiri (2003 – 2004) • Asisten Staf Ahli Pasar Modal di Departemen Keuangan Bank Indonesia (2000-2002)
Rangkap Jabatan	Merangkap sebagai: Capital Expenditure Analyst di Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko PT Telkom Indonesia Tbk
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Djoko Seno Adji
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bogor
Usia	62 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Bogor, 27 Mei 1959
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No. 01/178-KEP/DIR tanggal efektif 30 Agustus 2021
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2001) • Akademi Akuntansi Indonesia Jakarta (1985)
Sertifikasi	• Qualified Internal Auditor (QIA) • Sertifikasi Kompetensi Level I pada Bidang Manajemen Risiko Perbankan • Sertifikasi Kompetensi Auditor (Level Senior Auditor)
Riwayat Pekerjaan	• Internal Auditor Bank Mandiri (2000-2015) • Internal Auditor Bank Exim (1989-1999) • Pegawai Bank Exim 1981-1988)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

M. Zacky Thayib
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bogor
Usia	58 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 31 Oktober 1963
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No. 01/178-KEP/DIR tanggal efektif 30 Agustus 2021
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1998) • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1986)
Sertifikasi	• Sertifikasi Kompetensi Auditor Level Manager (LSPP) • Sertifikasi Kepatuhan & AML Level II (LSPP) Divisi Kepatuhan • Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFA) • Sertifikasi Kompetensi Manahemen Risiko
Riwayat Pekerjaan	• Learning Consultant (LC) Mandiri University Group (2018-2019) • Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 4 Jakarta Thamrin (2017-2018) • Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 1 Medan (2015-2017) • Department Head Internal Audit Bank Mandiri (2010-2015) • Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 9 Banjarmasin (2008-2010) • Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 3 Jakarta Kota (2006-2008) • Investigator Bank Mandiri (1998-2006) • Pegawai Pimpinan Biro Pengawasan (1996-1998) • Pegawai Pimpinan Cabang Bank Exim Imam Bonjol (1994-1996) • Pegawai Pimpinan Bank Exim di Biro Kredit Jangka Pendek & Menengah (1990-1993)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN
Eko Suwardi*	Ketua	• Doctor Bussiness in Acounting • Sarjana Accounting • Sarjana Ekonomi	Bidang pendidikan, dan audit perbankan.
Muhammad Zainul Majdi**	Ketua merangkap anggota	• Doktor bidang Usuludin • Magister bidang Usuludin • Licence (Lc) bidang Usuludin	Bidang pemerintahan, dan perbankan.
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	• Doctor Consumer Economics • Pasca Sarjana Agricultural Economics • Sarjana Fakultas Pertanian Bidang Keahlian Sosial Ekonomi Pertanian	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	• Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Imam Budi Sarjito	Anggota	• Doktor bidang Ekonomi • Magister bidang Ekonomi • Sarjana bidang Ekonomi	Bidang kepatuhan, manajemen risiko, perencanaan strategis di perbankan.
Suyanto	Anggota	• Magister bidang Strategi Perang Semesta • Sarjana Ekonomi Pembangunan	Bidang intelijen dan birokrasi
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Magister bidang Kebijakan Kesehatan • Kedokteran Gigi	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Widuri Meintari Kusumawati	Anggota	• Magister bidang Akuntans • Sarjana Akuntansi	Bidang audit dan manajemen risiko.
Djoko Seno Adji	Anggota	• Sarjana bidang Manajemen • Sarjana bidang Hukum • Diploma bidang Akuntansi	Bidang audit perbankan.
M. Zacky Thayib	Anggota	• Magister bidang Manajemen • Sarjana bidang Akuntansi	Bidang pengawasan, audit dan investigasi di perbankan.

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Independensi Komite Audit

ASPEK INDEPENDENSI	EKO SUWARDI*	MUHAMMAD ZAINUL MAJDI**	MULYA EFFENDI SIREGAR*	ADIWARMAN AZWAR KARIM**	IMAM BUDI SARJITO	SUYANTO	M. ARIEF ROSYID HASAN	WIDURI MEINTARI KUSUMAWATI	DJOKO SENO ADJI	M. ZACKY THAYIB
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

ASPEK INDEPENDENSI	EKO SUWARDI*	MUHAMMAD ZAINUL MAJDI**	MULYA EFFENDI SIREGAR*	ADIWARMAN AZWAR KARIM**	IMAM BUDI SARJITO	SUYANTO	M. ARIEF ROSYID HASAN	WIDURI MEINTARI KUSUMAWATI	DJOKO SENO ADJI	M. ZACKY THAYIB
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

√: Iya, x: Tidak
* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN	RANGKAP JABATAN DI:	
		BANK SYARIAH INDONESIA	PERUSAHAAN/LEMBAGA LAIN
Eko Suwardi*	Ketua	• Komisaris Independen	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada
Muhammad Zainul Majdi**	Ketua merangkap anggota	• Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Rektor IAIH Pancor
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Pemantau Risiko	-
Imam Budi Sarjito	Anggota	• Komisaris • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	-
Suyanto	Anggota	• Komisaris • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	• Staf Khusus Kepala BIN
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Komisaris Independen • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	• Ketua Ekonomi Masjid PP DMI • Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN • Ketua Komite Pemuda PP MES • Ketua Dewan Pembina ISYEF • Wakil Sekjen DPP HIPMI
Widuri Meintari Kusumawati	Anggota	-	Capital Expenditure Analyst di Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko PT Telkom Indonesia Tbk
Djoko Seno Adji	Anggota	-	-
M. Zacky Thayib	Anggota	-	-

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit menyelenggarakan 26 kali rapat. Riinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
1	18 Maret 2021	Strategi & Program Kerja Digital Banking	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
2	26 Maret 2021	Pembahasan Terkait Pembentukan Laznas BSI	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
3	29 Maret 2021	Rapat mengenai Hasil Laporan Keuangan Audited BNIS dan BRIS per Januari 2021	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
4	31 Maret 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Stream Accounting & Finance	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
5	31 Maret 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Stream Treasury	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
6	29 April 2021	Pembahasan Terkait RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
7	5 Mei 2021	Pembahasan Materi Rilis Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2021	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
8	20 Mei 2021	Laporan Realisasi Audit bulan Jan-April 2021	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
9	17 Juni 2021	Progres Pengembangan Informasi Teknologi BSI (Termasuk Digital Banking) s.d 31 Mei 2021	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
10	18 Juni 2021	Update Step Up Price Pembiayaan	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
11	8 Juli 2021	Complaint Handling Management oleh: 1) Customer Care Group 2) Penanggungjawab War Room	Komite Audit Ketua: Eko Suwardi, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
12	15 Juli 2021	Sustainable Finance (SF): Sustainability Report 2020 dan Progress Implementasi Strategi SF (RAKB) S1 2021	Komite Audit Ketua: - 1) Imam Budi Sarjito, Komisaris 2) Suyanto, Komisaris 3) M. Arief Rosyid Hasan, komisaris Independen 4) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 5) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 6) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
13	28 Juli 2021	Laporan Publikasi Triwulan II 2021	Komite Audit Ketua: - 1) Imam Budi Sarjito, Komisaris 2) Suyanto, Komisaris 3) M. Arief Rosyid Hasan, komisaris Independen 4) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 5) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 6) M. Zacky Thayib, Pihak Independen

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
14	12 Agustus 2021	Laporan Realisasi Audit bulan Mei-Juni 2021	Komite Audit Ketua: - 1) Imam Budi Sarjito, Komisaris 2) Suyanto, Komisaris 3) M. Arief Rosyid Hasan, komisaris Independen 4) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 5) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 6) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
15	30 Agustus 2021	Penyesuaian Honorarium KAP	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
16	16-September 2021	Update Daftar Keterlambatan Laporan BSI Kepada Pihak Ketiga per Feb - Agustus 2021 (Termasuk Koreksi/ Perbaikan Laporan) Penyebab dan Mitigasinya	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
17	16 September 2021	Laporan Penanganan Open Items Pasca Merger	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
18	14 Oktober 2021	Audit Plan BSI	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
19	14 Oktober 2021	Laporan Kesiapan menjelang Efektif Integrasi Operasi mulai 1 November 2021, serta Kendala/Main Issues dan Solusinya paska Roll Out di Wilayah	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
20	27 Oktober 2021	Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2021	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
21	4 November 2021	Laporan Audit Triwulan III Tahun 2021	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
22	17 November 2021	Usulan RAKB	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
23	2 Desember 2021	Permohonan Masukan dan Ekspektasi Dewan Komisaris terkait Penyusunan Annual Audit Plan 2022	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
24	2-Des-2021	Progres Implementasi Penanganan Agunan Terintegrasi dari Seluruh Unit Operation PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen
25	23 Desember 2021	PwC : Hard Close Meet 1. Update status audit 2021 s.d pertengahan Desember 2021 2. Update status reviu pembiayaan menggunakan Balance November 2021 3. Update status Provisi dan Cadangan menggunakan Balance November 2021	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
26	23 Desember 2021	Burning Issues Region Aceh	Komite Audit Ketua: M. Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Imam Budi Sarjito, Komisaris 3) Suyanto, Komisaris 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	TINGKAT KEHADIRAN (%)
Eko Suwardi*	Ketua	14	14	100
Muhammad Zainul Majdi**	Ketua merangkap anggota	12	12	100
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	14	14	100
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	12	12	100
Imam Budi Sarjito	Anggota	26	26	100
Suyanto	Anggota	26	26	100
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	26	26	100
Widuri Meintari Kusumawati	Anggota	26	26	100
Djoko Seno Adji	Anggota	26	26	100
M. Zacky Thayib	Anggota	26	26	100

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

NO.	REALISASI KEGIATAN (TUGAS)
1	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2020.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite tersebut berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris, terutama yang berkenaan dengan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunersi merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Di antaranya adalah:

1. Peratuan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. serta peraturan perundang – undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi;
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
      ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
      iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
   f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
7. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
8. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.
9. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
   a. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
   b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
   c. Menghadiri rapat;
   d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
   e. Membuat risalah rapat (sekretaris).

Wewenang

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki wewenang:

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melakukan *survey* sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memiliki piagam yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 01/001-SKB/Dirkom tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia.

Piagam Komite Nominsi dan Remunerasi mengatur sejumlah hal yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Definisi
3. Tujuan
4. Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab
5. Keanggotaan dan Tata Tertib
6. Sistem Remunerasi dan Nominasi
7. Penutup

Komposisi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/179-KEP/DIR tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 30 Agustus 2021. Komposisinya adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	KETERANGAN
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	2021-selesai	Komisaris Independen
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	2021-selesai	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Muhammad Zainul Majdi**	Anggota	2021-selesai	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
B.S. Kusmulyono	Anggota	2021-selesai	Komisaris Independen
Suyanto	Anggota	2021-selesai	Komisaris
Masduki Baidlowi	Anggota	2021-selesai	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Anggota	2021-selesai	Komisaris
Sutanto	Anggota	2021-selesai	Komisaris
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	2021-selesai	Komisaris Independen
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	2021	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Eko Suwardi*	Anggota	2021	Komisaris Independen
Andrianto Daru Kurniawan	Sekretaris	2021-selesai	Group Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting.

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Komaruddin Hidayat
Ketua merangkap anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman Azwar Karim
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Zainul Majdi
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

B.S. Kusmulyono
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Suyanto
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Masduki Baidlowi
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Andrianto Daru Kurniawan
Sekretaris

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bogor
Usia	50 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	31 Maret 1970
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No. 01/179-KEP/DIR yang berlaku efektif pada 30 Agustus 2021.
Riwayat Pendidikan	• Magister bidang Aktuaria Universitas Indonesia (2000) • Sarjana Matematika Universitas Gadjah Mada (1993)
Riwayat Pekerjaan	• Human Capital Division Head PT Bank BNI Syariah (2017-2021) • Treasury & International Division Head PT Bank BNI Syariah (2017) • Operation Division Head PT Bank BNI Syariah (2012-2017) • Enterprise Risk & Policy Management Division Head PT Bank BNI Syariah (2011- 2012)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN/KEAHLIAN
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	• Doktor Filsafat Ankara Turki (1990) • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Adiwarman Azwar Karim	Anggota	• Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Muhammad Zainul Majdi	Anggota	• Doktor bidang Usuludin • Magister bidang Usuludin • Licence (Lc) bidang Usuludin	Bidang legislatif, pemerintahan dan pendidikan.
B.S. Kusmulyono	Anggota	• Doktor Manajemen Lingkungan • Master Business Administration • Sarjana Teknik Kimia	Bidang manajemen dan pengelolaan perbankan.
Suyanto	Anggota	• Magister bidang Strategi Perang Semesta • Sarjana Ekonomi Pembangunan	Bidang intelijen dan birokrasi.
Masduki Baidlowi	Anggota	• Sarjana Riwayat Pendidikan • Sarjana Muda Sastra Arab • Studi Islam Klasik	Bidang organisasi, birokrasi dan legislatif.
Imam Budi Sarjito	Anggota	• Doktor bidang Ekonomi • Magister bidang Ekonomi • Sarjana bidang Ekonomi	Bidang kepatuhan, manajemen risiko, perencanaan strategis di perbankan.
Sutanto	Anggota	Sarjana Administrasi	Bidang audit perbankan.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Magister bidang Kebijakan Kesehatan • Kedokteran Gigi	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	• Doktor bidang Usuludin • Magister bidang Usuludin • Licence (Lc) bidang Usuludin	Bidang pemerintahan, dan perbankan.
Eko Suwardi*	Anggota	• Doctor Bussiness in Acounting • Sarjana Accounting • Sarjana Ekonomi	Bidang pendidikan, dan audit perbankan.
Andrianto Daru Kurniawan	Anggota	• Magister bidang Aktuaria • Sarjana bidang Matematika	Bidang Matematika Bidang Aktuaria

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

ASPEK INDEPENDENSI	KOMARUDDIN HIDAYAT	ADIWARMAN AZWAR KARIM**	MUHAMMAD ZAINUL MAJDI**	B.S. KUSMULYONO	SUYANTO	MASDUKI BAIDLOWI	IMAM BUDI SARJITO	SUTANTO	M. ARIEF ROSYID HASAN	MULYA EFFENDI SIREGAR*	EKO SUWARDI*	ANDRIANTO DARU KURNIAWAN
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

√: Iya, x: Tidak
* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Rangkap Jabatan Anggota Komite

NAMA	JABATAN	RANGKAP JABATAN DI:	
		BANK SYARIAH INDONESIA	PERUSAHAAN/LEMBAGA LAIN
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	• Anggota Komite Pemantau Risiko	• Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko	-
Muhammad Zainul Majdi**	Anggota	• Ketua merangkap Anggota Komite Audit	• Rektor IAIH Pancor (2010-sekarang)
B.S. Kusmulyono	Anggota		-
Suyanto	Anggota		-
Masduki Baidlowi	Anggota	• Anggota Komite Pemantau Risiko	• Staf khusus Wakil Presiden sekaligus Juru Bicara Wakil Presiden • Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) • Ketua Majelis Ulama Indonesia • Ketua Yayasan MMD Initiative
Imam Budi Sarjito	Anggota	• Anggota Komite Audit	-
Sutanto	Anggota	• Anggota Komite Pemantau Risiko	-

NAMA	JABATAN	RANGKAP JABATAN DI:	
		BANK SYARIAH INDONESIA	PERUSAHAAN/LEMBAGA LAIN
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Anggota Komite Audit	• Ketua Ekonomi Masjid PP DMI • Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN • Ketua Komite Pemuda PP MES • Ketua Dewan Pembina ISYEF • Wakil Sekjen DPP HIPMI
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	• Anggota Komite Audit	Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Eko Suwardi*	Anggota	• Ketua Komite Audit	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada
Andrianto Daru Kurniawan	Sekretaris	Group Head Human Capital Strategy & Policy Group	-

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	15 Maret 2021	Pembahasan Remunerasi Management Pasca Merger	Ketua: Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Eko Suwardi, Komisaris Independen 3) B.S. Kusmulyono, Komisaris Independen 4) Suyanto, Komisaris 5) Masduki Baidlowi, Komisaris 6) Sutanto, Komisaris 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris 8) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 9) Andrianto Daru Kurniawan, Grup Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting
2	12 April 2021	Pembahasan Usulan Direksi pada Surat No. 01/765-3/DIR-HCP, Tanggal 12 April 2021 Perihal Usulan Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Ketua: Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen Anggota: 1) Mulya E. Siregar, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Eko Suwardi, Komisaris Independen 3) B.S. Kusmulyono, Komisaris Independen 4) Suyanto, Komisaris 5) Masduki Baidlowi, Komisaris 6) Sutanto, Komisaris 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris 8) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 9) Andrianto Daru Kurniawan, Grup Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting
3	9 Agustus 2021	Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris	Ketua: Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen Anggota: 1) B.S. Kusmulyono, Komisaris Independen 2) Suyanto, Komisaris 3) Masduki Baidlowi, Komisaris 4) Sutanto, Komisaris 5) Imam Budi Sarjito, Komisaris 6) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 7) Andrianto Daru Kurniawan, Grup Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting
4	23 Agustus 2021	Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris	Ketua: Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen Anggota: 1) B.S. Kusmulyono, Komisaris Independen 2) Suyanto, Komisaris 3) Masduki Baidlowi, Komisaris 4) Sutanto, Komisaris 5) Imam Budi Sarjito, Komisaris 6) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 7) Andrianto Daru Kurniawan, Grup Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
5	29 November 2021	Usulan Ketentuan Tambahan Mengenai Tunjangan, Fasilitas dan Benefit Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Ketua: Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen Anggota: 1) Adiwarman Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Zainul Majdi, Wakomut/Komisaris Independen 3) B.S. Kusmulyono, Komisaris Independen 4) Suyanto, Komisaris 5) Masduki Baidlowi, Komisaris 6) Sutanto, Komisaris 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris 8) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen 9) Andrianto Daru Kurniawan, Grup Head yang membawahi Human Capital (ex. Officio) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	TINGKAT KEHADIRAN (%)
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	5	5	100
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	1	1	100
Muhammad Zainul Majdi**	Anggota	1	1	100
B.S. Kusmulyono	Anggota	5	5	100
Suyanto	Anggota	5	5	100
Masduki Baidlowi	Anggota	5	5	100
Imam Budi Sarjito	Anggota	5	5	100
Sutanto	Anggota	5	5	100
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	5	5	100
Mulya E. Siregar*	Anggota	3	3	100
Eko Suwardi*	Anggota	3	3	100
Andrianto Daru Kurniawan	Anggota	5	5	100

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Kebijakan Suksesi Direksi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari kebijakan GCG dari Bank serta akan menjadi pedoman Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan Pengajuan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah.
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur Seleksi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyapaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2021, antara lain :

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2. Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Di antaranya adalah:

- Peratuan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
2. Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
   a. Menyelenggarakan rapat secara teratur.
   b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
   c. Menghadiri rapat
   d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
3. Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
   b. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya periu atau sedang dibahas.
   c. Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   d. Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
   e. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifkan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   f. Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   g. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
   h. Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   i. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   j. Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

Wewenang

Wewenang yang dimiliki oleh Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Ketua dan Anggota Komite dapat menghadiri Rapat *Risk Management Committee* sebagai undangan.
2. Ketua dan Anggota Komite dapat meminta laporan-laporan internal yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan *'asset & liability'*, pembiayaan, *treasury* dan operasional, antara lain menyangkut:
   a. *Exposure* risiko.
   b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit-limit.
   c. Realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
   d. Laporan berkala profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Bekerja sama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang eksposur risikonya memburuk.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan telah memiliki piagam yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 01/002-SKB/Dirkom tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia.

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi & Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite
8. Perubahan
9. Penutup

Komposisi

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.01/180-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia yang berlaku efektif per 30 Agustus 2021. Komposisinya adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	KETERANGAN
Bangun S. Kusmulyono	Ketua merangkap anggota	2021-selesai	Komisaris Independen
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	2021-selesai	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2021-selesai	Komisaris Independen
Sutanto	Anggota	2021-selesai	Komisaris
Masduki Baidlowi	Anggota	2021-selesai	Komisaris
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	2021	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Kayim Hanuri	Anggota	2021-selesai	Pihak Independen
Saifuddin Latief	Anggota	2021-selesai	Pihak Independen
Bowo Setiyono	Anggota	2021-selesai	Pihak Independen
Delyuzar Syamsi	Anggota	2021-selesai	Pihak Independen

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Profil Komite Pemantau Risiko

Bangun S. Kusmulyono
Ketua merangkap anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman Azwar Karim
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komaruddin Hidayat
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Sutanto
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Masduki Baidlowi
Anggota
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Kayim Hanuri
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	63 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Cirebon. 7 Desember 1958
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No.01/180-KEP/DIR
Riwayat Pendidikan	• Master of Science in Agricultural Economics dari Texas A&M University at College Station, Texas USA, (1992) • Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1982)
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri (2016-2020) • Department Head of Business Process & System Reengineering di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014) • Department Head of Credit Policy and Procedure di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2013) • Regional Risk Manager Regional Area I Medan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2007) • Department Head of Syndication and Structured Finance di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001-2005) • Division Head of Corporate Banking-Structured Finance, Trade Service & Cash Management di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000-2001) • Division Head of Structured Finance di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2000) • Team Merger Corporate Banking di PT Bank Mandiri (Persero) 1998-1999 • Department Head of Syndication Loan di PT Bank Bumi Daya (Persero) (1997-1999) • Senior Account Manager in Corporate Banking Unit di PT Bank Bumi Daya (Persero) (1992-1997) • the Job Training di Bank Bumi Daya New York Agency (1992) • Section Head of Export and Import (Branch) di PT Bank Bumi Daya (Persero) (1986-1988) • Section Head of Credit (Branch) di PT Bank Bumi Daya (Persero) (1986-1988) • Section Head of Accounting (Branch) di PT Bank Bumi Daya (Persero) (1985-1986) • Credit Analyst (Branch) di PT Bank Bumi Daya (Persero) (1983-1984)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Saifuddin Latief
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bekasi, Jawa Barat
Usia	63 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Kudus, 17 Maret 1958
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No.01/180-KEP/DIR
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen dari STIE – IPWI, Jakarta (1997) • Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (1981).

Riwayat Pekerjaan	• Mediator Tetap di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), (2021 - Sekarang) • Pengawas di Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, (2021 - Sekarang) • Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020) • Komisaris PT Estika Yasakelola (2015- 2021) • Sekretaris Perusahaan dan Mediator di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (2015-2019) • Konsultan PT Primakelola Agrobisnis Agroindustri, Bogor (2014) • *Senior Relationship Manager* Urusan Kredit Perkebunan dan Kehutanan di Bank Bumi Daya, (1983-1990). • Biro Pemasaran di PT Inhutani I (Persero), (1982-1983). • Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) di Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian (1981-1982) • *Department Head of Wholesale & Treasury Banking School, Learning Center Group, Directorate Compliance & Human Capital* di PT Bank Mandiri (Persero), (2009-2014) • *Department Head of Relationship Management, Corporate Banking Directorate* di PT Bank Mandiri (Persero), (2003-2009) • *Senior Manager of Management & Administration Department, Corporate Banking Directorate* di PT Bank Mandiri (Persero) (1999-2003) • *Team Merger Corporate Banking* di PT Bank Mandiri (Persero) (1999) • Pemimpin Bagian Kredit, Urusan Kredit Korporasi, Bank Bumi Daya (1996-1999) • *On the Job Training*, Bank Bumi Daya New York Agency (1992) • Kepala Bagian Kredit, Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran Falatehan (1991-1995)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Bowo Setiyono
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Yogyakarta
Usia	46 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Purworejo, 5 November 1975
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No.01/180-KEP/DIR
Riwayat Pendidikan	• Doktor bidang Ekonomi Perbankan dari Université de Limoges, France (2015) • Magister bidang Keuangan dari University of New South Wales (2004) • Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1999)
Riwayat Pekerjaan	• Komite Pemantau Risiko di PT BRI Syariah Tbk (2019 - 2021) • Deputi Direktur di MM FEB UGM Kampus Jakarta (2016 - sekarang) • Dosen Tetap di FEM UGM (Financial Management, Portfolio Management, Risk Management, Bank/ Financial Institution Management) (2001 - sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Delyuzar Syamsi
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	57 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 3 Juni 1964
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No.01/180-KEP/DIR
Riwayat Pendidikan	• Master of Administration Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2009) • Sarjana Manaejmen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (1990)

Riwayat Pekerjaan	• Direktur di PT Induk Harta Insan Karimah (holding company 11 BPRS) (2019 - sekarang) • Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pamulang (2016 - sekarang) • Asesor LSP Keuangan Syariah (2016 - sekarang) • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BNI Syariah (Juli 2017-Januari 2021) • Executive Director di Muamalat Institute (September 2015-Maret 2016) • Head of Enterprise Asset Management Division Project Manager pengadaan Muamalat Tower (20 lantai plus 4 basement) di PT Bank Muamalat Indonesia (Januari 2015-Agustus 2015) • Head of Network and General Service Division di PT Bank Muamalat Indonesia (2012-2014) • General Manager of Kuala Lumpur Branch di PT Bank Muamalat (2011-2012) • Corporate Secretary dan Head of Corporate Secretary Division di PT Bank Muamalat Indonesia (2009-2011) • Asisten Direktur Funding dan Layanan di PT Bank Muamalat Indonesia (2006-2009) • Assistant Vice President, Branch Manager PT Bank BNI Syariah Prima di Wisma Kyoei Prince, Jakarta (2004 - 2006) • Branch Manager PT Bank BNI Syariah Banjarmasin (2003-2004) • Operational Manager di PT Bank BNI Syariah Malang (2001-2003) • Senior Credit Policy Manager Divisi Pengembangan Bisnis Kartu (BNI Card Center) di BNI (1999-2001) • Trainee International Banking Officer (IBO) • Angkatan 6 untuk BNI Cabang Hong Kong (1997- 1998) • Analis Kredit - Divisi Korporasi Satu di PT Bank BNI Kantor Besar, Jakarta (1995-1997) • Pengelola Nasabah Kecil di PT Bank BNI Kantor Cabang Jalan Sutomo Medan, 199 • Analis Kredit Middle – PT Bank Bank BNI Kantor Wilayah 01 Medan (1993)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN/KEAHLIAN
Bangun S. Kusmulyono	Ketua merangkap anggota	• Doktor Manajemen Lingkungan • Master Business Administration • Sarjana Teknik Kimia	Bidang manajemen dan pengelolaan perbankan.
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	• Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Doktor Filsafat Ankara Turki • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Sutanto	Anggota	Sarjana Administrasi	Bidang audit perbankan.
Masduki Baidlowi	Anggota	• Sarjana Riwayat Pendidikan • Sarjana Muda Sastra Arab • Studi Islam Klasik	Bidang organisasi, birokrasi dan legislatif.
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	• Doktor bidang Usuludin • Magister bidang Usuludin • Licence (Lc) bidang Usuludin	Bidang pemerintahan, dan perbankan.
Kayim Hanuri	Anggota	• Master of Science in Agricultural Economics • Sarjana Pertanian	Bidang manajemen risiko dan kredit perbankan.
Saifuddin Latief	Anggota	• Magister Manajemen • Sarjana Kehutanan	Bidang keuangan dan manajemen risiko perbankan.
Bowo Setiyono		• Doktor bidang Science Economiques • Magister bidang Commerce in Finance • Sarjana bidang Ekonomi	Bidang manajemen dan ekonomi.
Delyuzar Syamsi	Anggota	• Master of Administration • Sarjana Manajemen	Bidang manajemen risiko perbankan.

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Independensi Komite Pemantau Risiko

ASPEK INDEPENDENSI	BANGUN S. KUSMULYONO	ADIWARMAN AZWAR KARIM**	KOMARUDDIN HIDAYAT	SUTANTO	MASDUKI BAIDLOWI	MULYA EFFENDI SIREGAR*	KAYIM HANURI	SAIFUDDIN LATIEF	BOWO SETIYONO	DELYUZAR SYAMSI
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

√: Ya, x: Tidak
* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Rangkap Jabatan anggota Komite

NAMA	JABATAN	RANGKAP JABATAN DI:	
		BANK SYARIAH INDONESIA	PERUSAHAAN/LEMBAGA LAIN
Bangun S. Kusmulyono	Ketua merangkap anggota	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	-
Adiwarman Azwar Karim**	Anggota	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	-
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	• Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Sutanto	Anggota	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	-
Masduki Baidlowi	Anggota	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	• Staf khusus Wakil Presiden sekaligus Juru Bicara Wakil Presiden • Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) • Ketua Majelis Ulama Indonesia • Ketua Yayasan MMD Initiative
Mulya Effendi Siregar*	Anggota	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Kayim Hanuri	Anggota	-	-
Saifuddin Latief	Anggota	-	• Mediator Tetap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) • Pengawas Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya

NAMA	JABATAN	RANGKAP JABATAN DI:	
		BANK SYARIAH INDONESIA	PERUSAHAAN/LEMBAGA LAIN
Bowo Setiyono	Anggota	-	Deputi Direktur MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta
Delyuzar Syamsi	Anggota	-	• Direktur PT Induk Harta Insan Karimah • Asesor LSP Keuangan Syariah

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 47 kali rapat. Rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
1	11 Februari 2021	a. Laporan Kepatuhan dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2020 b. Program atau Rencana Kerja Kepatuhan 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
2	11 Februari 2021	a. Laporan APU PPT & Progress MER (Mutual Evaluation Review) b. Program atau Rencana Kerja APU PPT 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
3	11 Februari 2021	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2020: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Capital.	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
4	11 Februari 2021	Program atau Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
5	4 Maret 2021	Rencana Bisnis Bank (RBB) BSI 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
6	4 Maret 2021	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
7	4 Maret 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Stream Risk and Financing	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
8	9 Maret 2022	Roadmap Perbankan Syariah OJK dengan Strategi BSI	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
9	9 Maret 2023	Kerjasama BSI dengan BPKH	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
10	18 Maret 2021	Strategi dan Program Kerja Pembiayaan SME and Micro (UMKM)	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
11	18 Maret 2021	Pengajuan Struktur Organisasi CISO Office	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
12	18 Maret 2021	Update Project Overseas	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
13	8 April 2021	Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Retail	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
14	8 April 2021	Pemenuhan dan Pengembangan SDM 3 Pilar Segmen Retail	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setyono - Delyuzar Syamsi
15	8 April 2021	Perkembangan Kulitas Pembiayaan dan Recovery Segmen Retail	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setyono - Delyuzar Syamsi
16	15 April 2021	Progress Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Wholesale	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
17	22 April 2021	Permohonan Persetujuan Securities Company - Subsidiary BSI di Dubai	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
18	29 April 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Stream Product	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
19	29 April 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Stream Distribution (termasuk progres ROLL OUT)	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
20	5 Mei 2021	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK Triw I/2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
21	5 Mei 2021	Laporan APU PPT & Progress MER (Mutual Evaluation Review) Triw I/2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
22	20 Mei 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Compliance & Legal	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
23	20 Mei 2021	Laporan Progres Integrasi Operasional (IMO) Brand & Communication	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
24	20 Mei 2021	Update progress pemindahan Kantor Pusat di The Tower	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
25	20 Mei 2022	Update Valuasi Capital Market Saham BSI	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
26	27 Mei 2021	Progress Qonun Aceh PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
27	3 Juni 2021	Laporan Progress Roll Out di Wilayah - Wilayah dan Solusinya	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
28	10 Juni 2021	Laporan Progres Implementasi dan Pengembangan operational Risk Tools (RSCA, LED, KRI & Control Testing) Termasuk Progress Pengembangan IT Security dan Digital Risk	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
29	10 Juni 2021	Pembiayaan BSI Griya Kepada Pihak Terkait A.N. Khoerul Wajid	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
30	1 Juli 2021	Progress Implementasi Strategi Marketing Communication (Marcomm)	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
31	8 Juli 2021	Progres Implementasi Human Capital Strategy per Juni 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
32	28 Juli 2021	Revisi Kebijakan Pembiayaan	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
33	29 Juli 2021	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2021 (Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Capital)	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
34	29 Juli 2021	Laporan Produk dan Aktivitas Baru Bank Semester I 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
35	5 Agustus 2021	Laporan APU PPT & Progress MER (Mutual Evaluation Review) Triw II/2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
36	5 Agustus 2021	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK Triw II/2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
37	12 Agustus 2021	Pembahasan Kinerja RO I (Aceh), RO IV (Jakarta 1), RO V(Jakarta 2), dan RO VIII(Semarang) dengan Agenda : - Kinerja Region (RO I, IV, V, VIII) dan permasalahan dalam pencapaian Kinerja - Permasalahan pelaksanaan operasional selama masa transisi/Roll Out	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
38	19 Agustus 2021	Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Retail: 1. Perkembangan Portfolio Pembiayaan 2. Perkembangan Kualitas Pembiayaan (Kualitas Pembiayaan Ex Restru COVID ditampilkan tersendiri). 3. Rasio pembiayaan UMKM 4. Perkembangan Pembentukan CKPN dan Cash Coverage 5. Perkembangan Recovery Ex WO 6. Pemenuhan SDM Tiga Pilar	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
39	19 Agustus 2021	Rapat Komite Pemantau Risiko Topic: Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Wholesale: 1. Perkembangan Portfolio Pembiayaan 2. Perkembangan Kualitas Pembiayaan (Kualitas Pembiayaan Ex Restru COVID ditampilkan tersendiri). 3. Perkembangan nasabah kategori Watchlist 4. Perkembangan Pembentukan CKPN dan Cash Coverage 5. Perkembangan Recovery Ex WO 6. Pemenuhan SDM Tiga Pilar	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Mulya E. Siregar - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
40	8 September 2021	Corporate Strategy PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
41	9 September 2021	Update Ketentuan Regulator terbaru: Kewajiban dan Dampaknya terhadap Bank	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
42	9 September 2021	Portfolio Guideline Pembiayaan BSI 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
43	22 September 2021	Portfolio Quality Review	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
44	7 Oktober 2021	Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan III/2020	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
45	15 Oktober 2021	Pembahasan Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris untuk Pemberian Pembiayaan kepada Pihak terkait atas nama PT Mitra Transaksi Indonesia	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
46	21 Oktober 2021	Laporan AML-CFT Triwulan III Tahun 2021 & Update Persiapan MER	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
47	21 Oktober 2021	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2021	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Agenda Rapat

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA
48	18 November 2021	Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Wholesale Triw III/21 dan Prognosa Desember 21: 1. Perkembangan Portfolio Pembiayaan 2. Perkembangan Kualitas Pembiayaan (Kualitas Pembiayaan Ex Restru COVID ditampilkan tersendiri). 3. Perkembangan nasabah kategori Watchlist 4. Perkembangan Pembentukan CKPN dan Cash Coverage 5. Perkembangan Recovery Ex WO	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi
49	18 November 2021	Rapat Komite Pemantau Risiko Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Retail Triwulan III/21 dan Prognosa Desember 21: 1. Perkembangan Portfolio Pembiayaan 2. Perkembangan Kualitas Pembiayaan (Kualitas Pembiayaan Ex Restru COVID ditampilkan tersendiri). 3. Perkembangan nasabah kategori Watchlist 4. Perkembangan Pembentukan CKPN dan Cash Coverage 5. Perkembangan Recovery Ex WO	Peserta Rapat: - Bangun S. Kusmulyono - Adiwarman A Karim - Sutanto - Komaruddin Hidayat - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief - Bowo Setiyono - Delyuzar Syamsi

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	TINGKAT KEHADIRAN (%)
Bangun S. Kusmulyono	Komisaris Independen	49	49	100
Adiwarman A Karim*	Komisaris Utama / Komisaris Independen	10	10	100
Sutanto	Komasaris	49	49	100
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	49	49	100
Masduki Baidlowi	Komisaris	49	49	100
Mulya Effendi Siregar*	Komisaris Utama / Komisaris Independen	39	39	100
Kayim Hanuri	Pihak Independen	49	49	100
Saifuddin Latief	Pihak Independen	49	49	100
Bowo Setiyono	Pihak independen	49	49	100
Delyuzar Syamsi	Pihak Independen	49	49	100

* Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
** Efektif menjabat sejak tanggal 7 Februari 2022

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Manajemen Risiko untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab “Profil Perusahaan”.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

NO.	REALISASI KEGIATAN (TUGAS)
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Peran tersebut terutama bertujuan menciptakan komunikasi yang baik, serta menjaga persepsi terhadap citra BSI.

Karena itu, Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang merupakan mandat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, fungsi utamanya antara lain memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal serta menjadi penghubung Bank dengan pemangku kepentingan.

Empat Pilar Tata Kelola

Bank telah memiliki 4 (empat) pilar tata kelola yang menjadi landasan Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, terutama di bidang komunikasi:

Pilar 1: Tata Kelola Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola kepatuhan (*compliance*) berhubungan dengan regulasi, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, publikasi laporan keuangan Bank dalam rangka transparansi, penyusunan materi internal (rapat Direksi, Komisaris) dan eksternal.

Pilar 2: Tata Kelola Komunikasi

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai pintu gerbang informasi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakekolders*), baik internal, nasabah, pemegang saham, regulator, media, serta lainnya. Tata kelola komunikasi dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif *stakeholders* terhadap citra dan reputasi positif perusahaan, termasuk menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi bank syariah kepada publik.

Pilar 3: Tata Kelola Kesekretariatan

Tata kelola kesekretariatan dimulai dari penciptaan, pencatatan, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan dokumentasi. Selain itu Tata kelola kesekretariatan juga mencakup fungsi kerumahtanggaan dan protokoler.

Pilar 4: Tata Kelola Manajemen

Dalam hal tata kelola manajemen, Sekretaris Perusahaan memantau (*monitoring*) dan mengatur proyek strategis pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar berjalan sesuai dengan harapan. Fungsi tata kelola manajemen menitikberatkan pada dukungan terhadap implementasi pelaksanaan GCG dan asistensi terhadap seluruh kegiatan pengurus dan DPS.

Profil Sekretaris Perusahaan

Gunawan Arif Hartoyo
Sekretaris Perusahaan

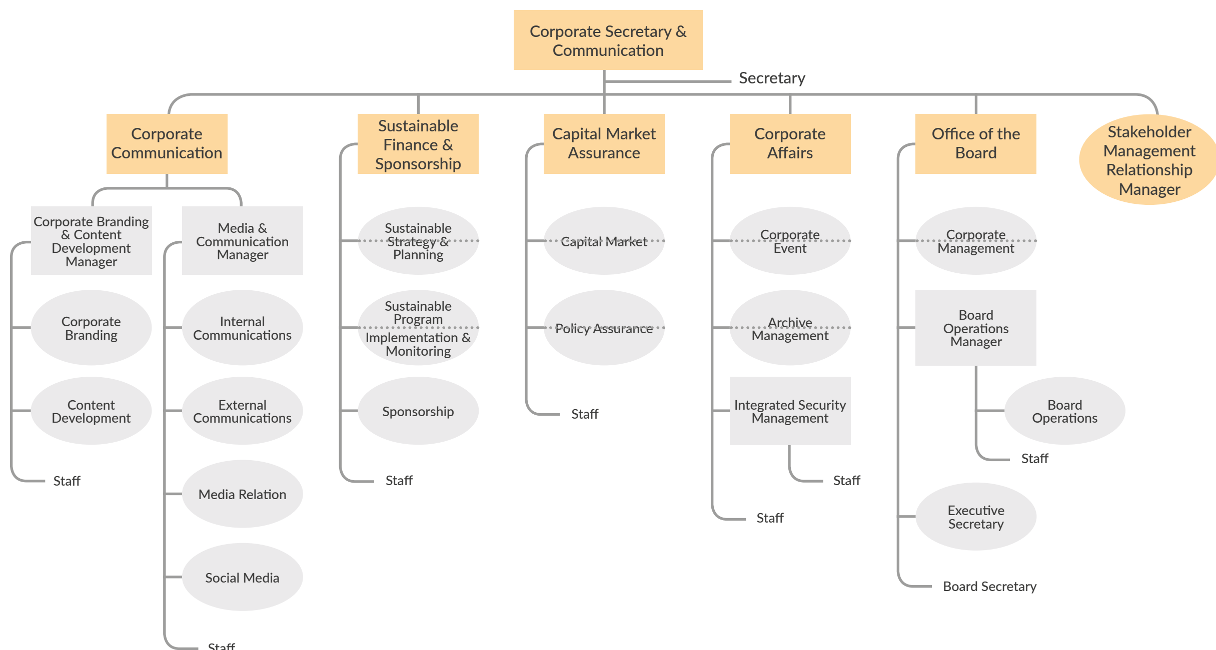
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Tangerang
Usia	50 Tahun pada akhir Tahun Buku 2021
Tempat, Tanggal Lahir	Sukoharjo, 26 Maret 1971
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi Nomor 01/185-KEP/DIR tanggal 31 Agustus 2021
Riwayat Pendidikan	• Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (2018) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (1995)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan, sejalan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014.
Riwayat Pekerjaan	· Group Head Corporate Secretary & Communication PT Bank Syariah Indonesia (2021-sekarang) · Project Leader Roll Out Branch PT Bank Syariah Indonesia (2021-sekarang) · Region Head RO VI / Jakarta 1 PT Bank Syariah Indonesia (2021) · Region Head RO V / Jawa 2 PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021) · Group Head Distribution Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016 2018) · Kepala Divisi Network PT Bank Syariah Mandiri (2015 – 2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Struktur Organisasi

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Compliance & Human Capital. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, organisasi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam 6 (enam) bidang aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.

Untuk menjalankan aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen.



Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary. Tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Bank adalah:

FUNGSI	RINCIAN TUGAS
Tata Kelola Kepatuhan	1. Menjadi *host* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya. 3. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*stakeholders management*). 4. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, obligasi, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. 6. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan. a. Mengawal korespondensi Bank dengan cara: Memberikan *advice* kebahasaan/*review* terhadap dokumen korporat Bank. b. Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip. c. Menjaga dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, *regional office*, *area/branch office* ataupun *outlet* lainnya serta memberikan *advice* terkait pengelolaan dokumen dimaksud.

FUNGSI	RINCIAN TUGAS
Tata Kelola Komunikasi Korporat	1. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank. 2. Membuat strategi penyebaran informasi kepada *stakeholders* internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan. 3. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat. 4. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum. 5. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media *marketing* yang efektif dan tepat sasaran. 6. Mengelola *stakeholdesr* dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik. 7. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif. 8. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.
Corporate Branding dan *Sustainable Finance*	1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi dalam implementasi *Corporate Identity* Bank. 2. Menyusun dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan. 3. Mengomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank. 4. Menyusun *monitoring* dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi. 5. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan *awareness* dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dll. 6. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program *Corporate Planning* Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 7. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis. 8. Mengelola proses dan kinerja *corporate branding* dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif *stakeholders* dan *shareholders* untuk peningkatan *brand equity*, serta berkontribusi terhadap peningkatan *awareness* dan bisnis Bank.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, yang rinciannya berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi serta rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Perusahaan, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, tanda domisili perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
8. Menyelenggarakan *corporate event* dan atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).

Pengembangan Kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Tujuan dari kegiatan ini, antara lain untuk meningkatkan pemahaman serta pemutakhiran terhadap perkembangan di bidang industri maupun regulasi yang relevan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab “Profil Perusahaan”.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Strategi tersebut harus sejalan dengan visi, misi, strategi, *risk appetite* Bank, dan *contigency plan*.

Komite ini juga serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil akibat perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Anggota komite adalah Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dlam rangka menetapkan risk appetite, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi *stress* dalam pengukuran risiko dan *contigency plan.*
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Struktur Keanggotaan

FUNGSI	PEJABAT
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris 1	Group Head Portfolio Risk & Risk Integration
Sekretaris 2	Group Head Market & Operational Risk

FUNGSI	PEJABAT
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 2. Finance & Strategy Director 3. Wholesale & Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director 6. Information Technology & Operation Director 7. Treasury SEVP 8. Consumer Business SEVP 9. Operation SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/Pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri
Contributing Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara lain yang terkait
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director
Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale & Transaction Banking Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology & Operation Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Treasury SEVP
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Senior Executive Vice President" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Consumer Business SEVP
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Senior Executive Vice President" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Operations SEVP
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Senior Executive Vice President" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Portfolio Risk & Risk Integration
Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko" yang terdapat dalam bab "Pendukung Bisnis Manajemen Risiko" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Market & Operational Risk
Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko" yang terdapat dalam bab "Pendukung Bisnis Manajemen Risiko" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan mengenai evaluasi portfolio *guideline*, *control testing*, tingkat kesehatan Bank serta profil risiko Bank.

IT STEERING COMMITTEE

IT *Streering Committee* dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasiatau *information technology* (IT), penganggaran IT, penetapan proyek strategis IT dan pengamanan IT. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

IT *Steering Committee* adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT *Strategic Plan*) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola sumber daya IT.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT, anggaran IT dan *delivery project* IT.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional di bidang IT.

Struktur Keanggotaan

FUNGSI	PEJABAT
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2 2. Information Technology & Operations Director
Sekretaris 1	Group Head Strategic Planning
Sekretaris 2	Group Head IT Development

FUNGSI	PEJABAT
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 2 3. Information Technology & Operation Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contribution Non Voting Member	Group Head Pemateri dan/atau Group Head/Pejabat setara lain terkait materi
Invitee	SEVP/ Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Pesident Director
Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice Pesident Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology & Operation Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini

Group Head Strategic Planning
Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head IT Development
Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2021, IT Steering Committee telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan membahas progress inisiatif IT strategis serta memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.

KOMITE POLICY & PROCEDURE

Komite *Policy* & *Procedure* beranggotakan Direksi/SEVP. Komite ini berwenang merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup komite di bawah Direksi lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite *Policy* & *Procedure* adalah:
1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur human capital dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

Struktur Keanggotaan

FUNGSI	PEJABAT
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris 2	Group Head Portfolio Risk & Risk Integration

FUNGSI	PEJABAT
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 2. Compliance & Human Capital Director 3. Sales & Distribution Director
Permanent Non Voting Member	Group Head Compliance
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contribution Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/ Pejabat Setara terkait Pemateri
Invitee	1. Director terkait materi yang dibahas 2. SEVP/ Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director
Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director
Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanet Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Policy & Procedure
Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Portfolio Risk & Risk Integration
Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2021, Komite *Policy & Procedure* telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan pembuatan, penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan serta standar prosedur yang berlaku di Bank.

KOMITE BISNIS

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Bank.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit eksposure risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Bank, antara lain melalui *anchor client* Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Bank dan aliansi dengan perusahaan induk serta *sister company*.
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis opersional.
7. Mengomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

Struktur Keanggotaan

FUNGSI	PEJABAT
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director 1
Sekretaris 1	Group Corporate Finance Solution
Sekretaris 2	Group Head Consumer Business 1

FUNGSI	PEJABAT
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 1 3. Wholesale & Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. SEVP Consumer Banking 6. Sales & Distribution Director 7. Risk Management Director 8. SEVP Financing Risk
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/Pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/ Pejabat Setara lain yang terkait
Invitee	SEVP/ Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director 1
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale & Transaction Banking Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

SEVP Consumer Banking
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Senior Executive Vice President" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

SEVP Financing Risk
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Senior Executive Vice President" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Corporate Finance Solution
Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Consumer Business 1
Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2021, Komite Bisnis telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan membahas antara lain pengembangan bisnis secara terintegrasi, permasalahan bisnis yang bersifat strategis, kebijakan strategi bisnis, serta mengevaluasi implementasi atas strategi bisnis yang telah ditetapkan.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite SDM bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun strategi dan kebijakan *human capital* termasuk budaya perusahaan, kompensasi dan benefit.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan *human capital*.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan sistem operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis pengembangan sistem informasi *human capital*.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan individual *performance management & rewards*, *talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.

Struktur Keanggotaan

FUNGSI	PEJABAT
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Human Capital & Strategy Policy
Sekretaris 2	Group Head Human Capital Business Partner

FUNGSI	PEJABAT
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 1 3. Vice President Director 2 4. Compliance & Human Capital Director 5. Finance and Strategy Director 6. Sales & Distribution Director 7. Risk Management Director 8. Human Capital SEVP
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri Group Head/ Pejabat Setara terkait Pemateri
Invitee	SEVP/ Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director 1
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director 2
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance and Strategy Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Human Capital SEVP
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Senior Executif President" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital & Strategy Policy
Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Business Partnet
Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2021, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan. Di antaranya berkenaan dengan rotasi dan mutasi pejabat eksekutif Bank, promosi pejabat eksekutif Bank dan pegawai secara umum.

Keputusan lainnya: rekomendasi kandidat SEVP Bank, penetapan supervise wilayah bagi Direksi dan SEVP, penyempurnaan framework pengembangan pegawai ODP serta fasilitasnya, penetapan talent classification pejabat Eksekusif Bank, pelaksanaan *project Total Reward*, peninjauan penetapan jabatan pejabat eksekutif Bank yang baru dipromosi, penyusunan strategi pencegahan *fraud*, pembaharuan ketentuan DPLK dan BPJS.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab

Asset & Liabilities Commitee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *asstes & liabilities* Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Melakukan evalusi posisi Bank dan strategi *Assets & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana binis Bank.
6. Melakukan batasan *liquidity management*, *gap management*, *pricing management*, *FX management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Bank.

Struktur Keanggotaan

FUNGSI	PEJABAT
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris 1	Group Head Asset & Liabilies Management
Sekretaris 2	Group Head Strategic Planning & Performance Management

FUNGSI	PEJABAT
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Finance & Strategy Director 3. Risk Management Director 4. Wholesale & Transaction Banking Director 5. Retail Banking Director 6. Sales & Distribution Director
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/Pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/ Pejabat Setara lain yang terkait
Invitee	SEVP/ Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale & Transaction Banking Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Banking Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Asset & Liabilies Management
Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Strategic Planning & Performance Management
Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Sepanjang tahun 2021, ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan terkait Kebijakan Nisbah Deposito dan Tabungan Rupiah, Kebijakan Special Rate Pembiayaan *Consumer* dan Retail Banking, Kebijakan pengelolaan investasi Bank (Surat Berharga dan Penempatan BI), Kebijakan terkait Pengelolaan Dana BPKH, Kebijakan Pendanaan tengah tahun dan menjelang akhir tahun, serta kebijakan lainnya.

KOMITE STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Tugas dan tanggung jawab Komite Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana termasuk pandemik Covid-19 di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana termasuk pandemik Covid-19, antara lain aktivasi BCM, penetapan unit kerja critical, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam kondisi kondisi darurat bencana termasuk pandemik Covid-19.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Bank.
4. Membahas dan menetapkan benefit dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana termasuk pandemik Covid-19.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana termasuk Covid-19.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui Steering Commiitee.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan penanganan Crisis Management Team (CMT).

Struktur Keanggotaan

FUNGSI	PEJABAT
Ketua	Vice President 2
Wakil Ketua	Information Technology & Operations Director
Sekretaris 1	Group Head Cash & Trade Operations
Sekretaris 2	Group Head IT Strategic Plan

FUNGSI	PEJABAT
Permanent Voting Member	1. Vice President 2 2. Information Technology & Operations Director 3. Distribution & Sales Director 4. Compliance & Human Capital Director 5. Risk Management Director 6. Finance & Strategy Director 7. Operation SEVP 8. Human Capital SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/Pejabat Compliance Group
Contribution Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara lain yang terkait

Profil Anggota Komite

Vice President 2
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology & Operations Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Cash & Trade Operations
Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head IT Strategic Plan
Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

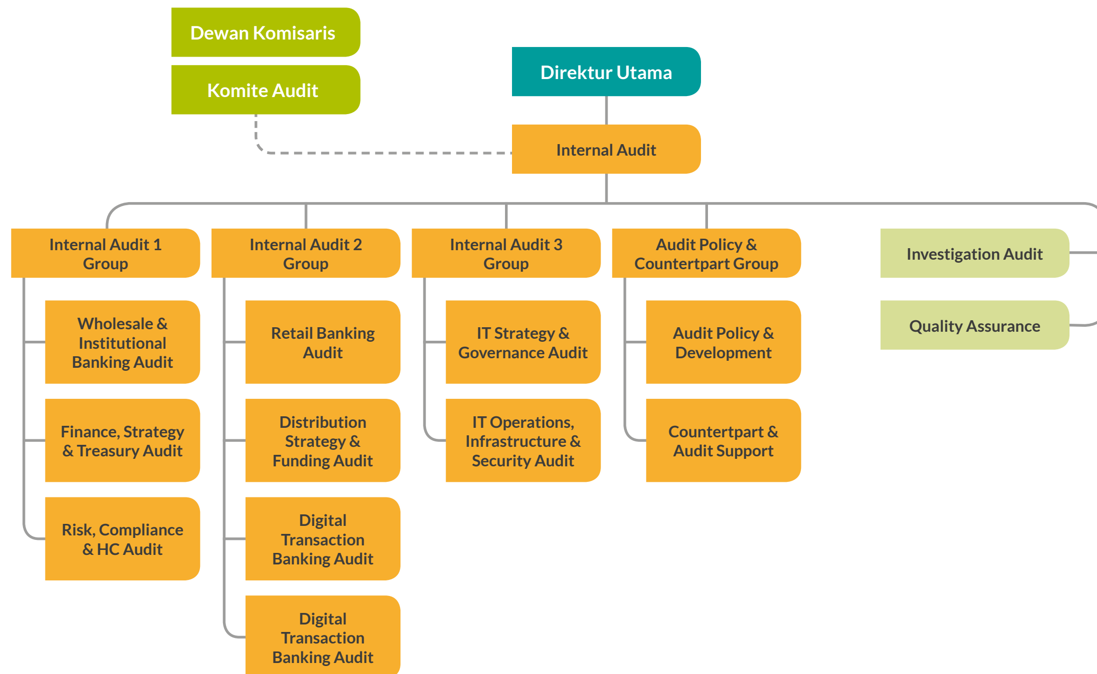
INTERNAL AUDIT

Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Syariah Indonesia yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Tanggung jawab utama Unit Kerja Internal Audit adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit dalam Organisasi

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Internal Audit yang membawahi 4 (empat) Group dan 2 (dua) Department, yaitu *Investigation Audit* (IVA) dan *Quality Assurance* (QA) dengan spesialisasi tugas pada:

- Internal Audit Group 1 (IA 1)
  1. Wholesale & Institutional Banking Audit
  2. Finance, Strategy & Treasury Audit
  3. Risk, Compliance & HC Audit
- Internal Audit Group 2 (IA 2)
  1. Retail Banking Audit
  2. Distribution Strategy & Funding Audit
  3. Digital Transaction Banking Audit
  4. MIS & Data Analytic
- Internal Audit Group 3 (IA 3)
  1. IT Strategy & Governance Audit
  2. IT Operations, Infrastructure & Security Audit
- Audit Policy and Counterpart Group (APG)
  1. Audit Policy & Development
  2. Counterpart & Audit Support
- Investigation Audit Department (IVA)
- Quality Assurance Department (QAA)



Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.

Profil Kepala Internal Audit

Movianto
Pjs. Kepala SKAI merangkap sebagai Internal Audit 1 Group Head

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	50 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Semarang, 19 Juni 1971
Diangkat Berdasarkan	1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor : 01/118-KEP/DIR tanggal 28 Juni 2021 2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor : 01/312-KEP/DIR tanggal 28 Oktober 2021
Riwayat Pendidikan	• Magister Management, Strategic Management, Universitas Gadjah Mada (2005) • Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti (1995)
Riwayat Pekerjaan	• Pjs. Kepala SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk (15 Juli 2021-16 Januari 2022) • Internal Audit Division Head PT Bank BNI Syariah (Maret 2019-Januari 2021) • Financing Audit Head PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Februasi 2018-Jananuari 2019) • Financing Risk Management Head PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (November 2016-Januari 2018) • SME Risk Underwriting Head PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Juni 2016-Oktober 2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan

Kepala Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 1 Februari 2021. Selain sebagai pedoman kerja, *Internal Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi SKAI. Adapun isi dari *Internal Audit Charter* adalah sebagai berikut:

Bab I	Visi, Misi dan Fungsi
Bab II	Kedudukan dan Ruang Lingkup
Bab III	Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab dan Komunikasi serta Hubungan Internal Audit dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian
Bab IV	Persyaratan Internal Auditor
Bab V	Kode Etik Auditor
Bab VI	Aktivitas Internal Audit
Bab VII	Pengawasan dan *Quality Assurance*
Bab VIII	Definisi Internal Audit
Bab IX	Risiko Audit dan Perlindungan Hukum
Bab X	Lain-Lain

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan beserta alokasi anggarannya, berdasarkan hasil penilaian risiko yang komprehensif, dan wajib disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.
7. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang atau aktivitas yang mempunyai risiko tinggi (*risk based*) serta mengevaluasi prosedur atau *control system* yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
8. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan mengusulkan sanksi atas *fraud* kepada Manajemen.
9. Memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur agar dapat dipastikan bahwa dalam kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru tersebut telah tercakup dalam aspek-aspek pengendalian intern. Adanya keterlibatan Internal Audit dalam memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit.
10. Melakukan pengembangan audit (*audit development*) sesuai arah kebijakan Bank.
11. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
12. Memberikan konsultasi kepada pihak intern PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan.
13. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi Auditor.
14. Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Internal Audit.

15. Melakukan koordinasi kegiatan Internal Audit dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
16. Melaporkan hasil audit yang signifikan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris, salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Kewenangan

Internal Audit memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan Aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua Unit Kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area. Maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank. Termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan atau catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus atau masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan Aktivitas Internal Audit.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak eksternal atau non-Internal Audit, baik dalam lingkup Bank maupun di luar Bank, dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan Aktivitas Internal Audit sesuai Kode Etik Auditor.
10. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

Komposisi Pegawai

JABATAN	JUMLAH
SEVP Internal Audit	-
Group Head	4
Department Head	12
Team Leader	51
Officer	60
Staff	7
Total	**134**

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Manajemen Risiko (SRM)

JABATAN	JUMLAH	SERTIFIKASI	LEMBAGA SERTIFIKASI
Group Head	3	Level 4	LSPP
	1	Level 5	LSPP
Department Head	3	Level 2	LSPP
	8	Level 3	LSPP
	1	Level 4	LSPP
Team Leader	7	Level 1	LSPP
	36	Level 2	LSPP
	6	Level 3	LSPP
Officer	15	Level 1	LSPP
	35	Level 2	LSPP
Staff	2	Level 1	LSPP

Certified Fraud Examiner (CFE)

JABATAN	JUMLAH	SERTIFIKASI	LEMBAGA SERTIFIKASI
Group Head	1	CFE	ACFE
Department Head	2	CFE	ACFE

Ceritified Qualified Internal Auditor (QIA)

JABATAN	JUMLAH	SERTIFIKASI	LEMBAGA SERTIFIKASI
Group Head	1	QIA Level Manajerial	YPIA
Department Head	1	QIA Level Manajerial	YPIA
Team Leader	1	QIA Level Dasar	YPIA

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor

JABATAN	JUMLAH	SERTIFIKASI	LEMBAGA SERTIFIKASI
Group Head	1	CBIA Level Supervisor	LSPP
Department Head	11	CBIA Level Supervisor	LSPP
Team Leader	49	CBIA Level Supervisor	LSPP

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor

JABATAN	JUMLAH	SERTIFIKASI	LEMBAGA SERTIFIKASI
Group Head	1	CBIA Level Auditor	LSPP
Department Head	12	CBIA Level Auditor	LSPP
Team Leader	51	CBIA Level Auditor	LSPP
Officer	59	CBIA Level Auditor	LSPP

Kode Etik

1. Integritas (*Integrity*)
   Internal Audit memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan:
   a. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya.
   b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
   c. Menghindari benturan kepentingan.
   d. Mengimplementasikan Kode Etik Internal Audit.
   e. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan, dan sesuai dengan profesinya.
2. Objektivitas (*Objectivity*)
   Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan Internal Auditor dapat melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga hasil kerja mereka dapat dipercaya, dan tanpa kompromi dalam hal mutu. Objektivitas mengharuskan Internal Auditor tidak mendasarkan pendapatnya terkait permasalahan audit kepada pihak lain.
3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)
   Internal Auditor menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapatkan dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.
4. Kompetensi (*Competency*)
   Kompetensi adalah kemampuan Internal Auditor yang ditunjukkan melalui gabungan antara pengetahuan, kecakapan, pengalaman dan pembelajaran teori yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal.

Pengembangan Kompetensi

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Unit Audit Internal, baik pimpinan maupun anggota, diuraikan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	TEMA/TOPIK	PENYELENGGARA
1	17-19 dan 24, 25 Maret 2021	Online	Menyusun Laporan Efektif	Tempo Institute
2	30-31 Maret 2021	Online	KSF Audit Investigasi	BSU dan Mandiri
3	30-31 Maret dan 1, 8, 9 April 2021	Online	Menyusun Laporan Efektif	Tempo Institute
4	18 Maret 2021	Online	Webinar Digital Disruption	BSU
5	27 Maret 2021	Online	Webinar Tantangan, Risiko, dan Peran Internal Audit dalam Penerapan *Digital Banking*	IAIB
6	8-10 Maret 2021	Online	Produk SME *Roll Out* Cabang Tipe D	BSU
7	15, 17, 19, 22 Maret 2021	Offline	SQL	Binus
8	8, 9, 10, 12, 15 Maret 2021	Online	Produk Mikro *Roll Out* KC Type D (Area Makassar)	BSU
9	13 Maret 2021	Online	Workshop Membangun Strategi Anti *Fraud* yang Terintegrasi	ACFE
10	14-16 dan 21, 22 April 2021	Online	Menyusun Laporan Efektif	Tempo Institute
11	24 April 2021	Online	Webinar *Quality Assurance Improvement* Program	Innovassurance
12	17 April 2021	Online	Webinar *Data Analytics 101 cases*	Innovassurance
13	14 April 2021	Online	Webinar Peran Audit Internal dalam Mengawal Organisasi menuju Transformasi Digital di Era Kenormalan Baru	PPIAYPIA
14	6-7 April 2021	Online	Pelatihan *Digital Banking, The Basic, Environment and Challenges*	IAIB
15	8 Mei 2021	Online	Webinar *Overview* dan Studi Kasus *Fraud Event* di Industri Perbankan Indonesia	IAIB
16	2 Mei 2021	Online	Webinar *Analyzing Financial Report*	Innovassurance
17	27-28 Mei 2021	Online	Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit	LPFA
18	8-11 Juni 2021	Online	Pelatihan *Fraud Auditing* 1	LPFA
19	21-22 Juni 2021	Online	AML-CFT: *Regulation Update and How To Audit*	IAIB
20	5-6 Juli 2021	Online	IT Audit Fundamental	IIA
21	5-12 Juli 2021	Online	Pelatihan *Sharia Basic Audit*	BSU
22	16 Juli 2021	Online	Webinar Treasury Auditing	Innovassurance
23	23 Juli 2021	Online	Webinar Risk Management: Value at Risk	Innovassurance
24	4-5 Agustus 2021	Online	*Financing Auditing for Internal Auditors*	IIA
25	11-12 Agustus 2021	Online	*Smart Power Point*	Presenta
26	18 Agustus 2021	Online	KSF *Treasury Global Market*	BSU
27	7-9 September 2021	Online	*Quality Assurance For Internal Audit Department*	LPAI
28	13-16 September 2021	Online	*Tools & Techniques I: New Internal Auditor*	IIA
29	13-17 September 2021	Online	*Mobile Security Application & Penetration Testing*	Systech
30	27-28 September 2021	Online	*Cybersecurity Auditing In An Unsecure World*	IIA
31	11-12 Oktober 2021	Online	*Policies and Procedures to Prevent Fraud*	LPAI

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	TEMA/TOPIK	PENYELENGGARA
32	11-15 Oktober 2021	Online	*Network Infrastructure & Penetration Testing*	Systech
33	18-19 Oktober 2021	Online	*Remote Auditing: How to Make an Effective Audit*	IIA
34	25-26 Oktober 2021	Online	*Root Cause Analysis*	IIA
35	25-27 Oktober 2021	Online	Bank Mandiri Audit Course (BMAC)	Bank Mandiri
36	27-29 Oktober 2021	Online	*GRC Forum and Conference*	IIA
37	26-27 Oktober 2021	Offline	*Powerful Investigative Interview*: Cara Tepat Deteksi *Fraud* dan Kebohongan	Narapatih
38	4 November 2021	Online	*State of The Art In Cybersecurity*	Innovassurance
39	3-5 November 2021	Online	*Auditing Business Processes*	LPAI
40	6 November 2021	Online	*Trade Finance Fraud & Precaution*	Innovassurance
41	8-9 November 2021	Online	*Fraud Detection & Investigation For Internal Auditors*	IIA
42	16-19 November 2021	Online	*Effective Business Communication*	PPM
43	23-25 November 2021	Online	*Creative Thinking Techniques*	PPM
44	25-26 November 2021	Online	*Implementing Combined Assurance in Covid 19 Era*	YPAI
45	26-27 November 2021	Online	*Embracing Post Pandemic and Digital Era an Everchanging Fraud Landscape*	ACFE
46	21-22 Desember 2021	Online	*Fraud in Digital Banking*	Mahaka

Rapat Unit Audit Internal

Kebijakan

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

a. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
b. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Frekuensi Rapat

- Rapat Internal Audit dengan Audit Eksternal (Regulator dan KAP) sebanyak 31 kali dengan melibatkan peserta rapat dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan DPS.
- Rapat Internal Audit dengan Direksi Bidang sebanyak 27 kali.
- Rapat Internal Audit dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 6 kali.
- Rapat Internal Audit dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 kali.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Berdasarkan *Annual Audit Plan* dan Strategi Audit Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2021 ditetapkan sebanyak **40** penugasan.

Realisasi pelaksanaan kegiatan audit tahun 2021 hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS AUDIT	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1.	Audit Umum	29	46	158,62%
2.	Audit IT	11	15	136,36%
	Total	**40**	**61**	**152,5%**

Aktivitas audit dilaksanakan melalui audit umum *(general audit)* dan audit teknologi informasi dengan total pelaksanaan audit selama tahun 2021 sebanyak 61 penugasan atau mencapai 152,5% dari target 40 penugasan audit. Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) atas penyampaian opini kecukupan *internal control* yang mencakup opini/masukkan terhadap Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Petunjuk Teknis, dan atau Memorandum Petunjuk Operasional sebanyak 156 opini mencapai 100,18% dari target 95%.

Adapun pengembangan inisiatif strategis meliputi Implementasi Pengembangan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (DMTL *On Line*) dan *Benchmarking*.

Tindak Lanjut Hasil Audit

Progress tindak lanjut hasil pemeriksaan Unit Kerja Internal Audit dan Audit Eksternal (OJK, BPK, dan lain-lain) periode tanggal 1 Februari-31 Desember 2021, sebagai berikut:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL DMTL	PENYELESAIAN DMTL	DMTL *ON PROGRESSS* POSISI 31/11/2021	*STATUS ON PROGRESS* POSISI 31 DESEMBER 2021	
					SUDAH JATUH TEMPO	BELUM JATUH TEMPO
1	**Audit Internal**	1.876	1.763	113	-	113
2	**Audit Eksternal**	1.075	918	157	-	157
	Total	**2.951**	**2.681**	**270**	**-**	**270**

1. Progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Internal dari total DMTL sebanyak 1.876 item dan telah diselesaikan sebanyak 1.763 item atau 94% dari total DMTL Audit Internal.
2. Progress tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Eksternal (OJK, BPK, dll) dari total DMTL sebanyak 515 item dan telah diselesaikan sebanyak 358 item atau 69,5% dari total DMTL Audit Eksternal.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*). Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan diselenggarakannya pengendalian internal

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efisiensi organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Penjelasan Singkat tentang Sistem Pengendalian Internal:

Bidang Keuangan

Sistem Pengendalian Internal dalam bidang keuangan dapat mengurangi dampak keuangan/kerugian melalui ketersediaan informasi keuangan yang handal kepada Manajemen secara benar, lengkap dan tepat waktu, relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang Operasional

Sistem Pengendalian Internal dalam bidang operasional memiliki tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumberdaya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Sistem Pengendalian Internal dalam bidang kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.

Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank. Berdasarkan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Bank Syariah Indonesia, tanggung jawab terselenggaranya SPI dilaksanakan oleh:

1. Dewan Komisaris.
2. Direksi/SEVP (*Senior Executive Vice President*).
3. Dewan Pengawas Syariah.
4. Unit kerja terkait (termasuk Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI).
5. Pejabat dan pegawai Bank.
6. Pihak-pihak ekstern.

Penjabaran dari tanggung jawab para pihak tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

NO.	ORGANISASI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Bank bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional Bank termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
2	Direksi/SEVP	Direksi/SEVP Bank bertanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern(SPI) yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut telah berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Adapun Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip syariah.
3	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah Bank bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
4	Unit Kerja Terkait	
	Satuan Kerja Internal Audit (SKAI)	SKAI mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional BSI yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen BSI.
	Satuan Kerja Kepatuhan	Berfungsi melakukan proses monitoring kepatuhan setiap Unit Kerja terhadap ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk kebijakan intern Bank.
	Satuan Kerja Manajemen Risiko	Berfungsi melakukan pemantauan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan risiko dalam rangka penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern.
	Unit Kerja Lainnya	Bertanggungjawab memelihara dan melaksanakan sistem pengendalian yang efektif di unit kerja masing-masing serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan Sistem Pengendalian Intern yang ditetapkan Bank.
5	Pejabat dan Pegawai Bank	Setiap pejabat dan pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai, mendorong budaya risiko (*risk culture*) yang memadai dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
6	Pihak Eksternal	Pihak-pihak ekstern antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Auditor Ekstern, dan Nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

Budaya Pengendalian

Budaya Organisasi

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank kepada seluruh pegawai.

Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-langkah yang menjadi perhatian dan dilakukan oleh Bank, antara lain:

1. Direksi dan Dewan Komisaris sebagai panutan (*role model*) bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.
2. Direksi dan Dewan Komisaris mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku.
3. Direksi dan Dewan Komisaris meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing dan selanjutnya pegawai mengkomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.

Ketentuan Internal Bank sebagai Pendukung Budaya Pengendalian

Untuk mendukung budaya pengendalian, seluruh kebijakan, standar prosedur, manual produk, dan/atau petunjuk teknis operasional, telah didokumentasikan secara tertulis dan tersedia atau dapat diakses bagi setiap pegawai yang terkait. Berikut ini adalah ketentuan internal yang terkait dengan sistem pengendalian intern, antara lain:

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berlaku tanggal 01 Februari 2021.
2. Kebijakan Internal Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berlaku tanggal 27 Agustus 2021.
3. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berlaku tanggal 01 Februari 2021.
4. Kebijakan Anti *Fraud* PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berlaku tanggal 01 Februari 2021.
5. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, berlaku tanggal 27 Agustus 2021.
6. Petunjuk Teknis Operasional DMTL *Online* (D-ONE), berlaku tanggal 01 Februari 2021.
7. Petunjuk Teknis Operasional Continuous Monitoring, berlaku tanggal 01 Februari 2021.

Penguatan Nilai-nilai Etika

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai etika, Bank menghindari kebijakan dan praktik yang dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran, seperti penekanan pada pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan dampak risiko yang bersifat jangka panjang, sistem kompensasi yang hanya menitikberatkan pada kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif, dan pengenaan sanksi yang terlalu ringan atau terlalu berlebihan atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diatur melalui Kebijakan *Human Capital*, Standar Prosedur Operasional (SPO) *Human Capital*, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.

Identifikasi dan Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi oleh Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.

Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain:
1. Perubahan kegiatan operasional Bank;
2. Perubahan susunan personalia;
3. Perubahan sistem informasi;
4. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
5. Perkembangan teknologi;
6. Pengembangan jasa, produk atau aktivitas baru;
7. Terjadinya penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan, dan restrukturisasi Bank;
8. Perubahan dalam sistem akuntansi;
9. Ekspansi usaha;
10. Perubahan hukum dan peraturan; dan,
11. Perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.

Bank berpandangan bahwa SPI yang efektif mengharuskan Bank secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko dilakukan oleh Internal Auditor, sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Penilaian risiko mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko. Metodologi penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data yang dapat diperbarui secara berkala. Penilaian Risiko juga meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

Penilaian Risiko mencakup semua risiko yang dihadapi, baik risiko individual maupun secara keseluruhan *aggregate*, yang meliputi: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Pengendalian intern dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi, serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional maupun organisasi Bank.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi dan telah direncanakan dan diterapkan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi, sehingga berjalan efektif. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut akan dapat membantu Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank, yang paling sedikit meliputi:

1. Kaji Ulang Manajemen (Top Level Management)
   Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.
2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review)
   Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam kaji ulang kinerja operasional, SKAI melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   c. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
      - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
      - Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*)
3. Pengendalian Sistem Informasi
   Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal Bank. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:
   a. Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
   b. Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
   a. Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjmin terselenggarnya pengamanan fisik terhadap aset Bank.
   b. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.
5. Dokumentasi
   a. Bank telah memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi, serta proses audit secara memadai, antara lain Kebijakan Akuntansi tahun 2021, Standar Prosedur Operasional (SPO) Akuntansi tahun 2021, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Rekonsiliasi dan Monitoring Akuntansi Kantor Pusat dan Outlet Bank tahun 2021.
   b. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.
   c. Berdasarkan permintaan, dokumen tersebut harus senantiasa tersedia untuk kepentingan Internal Auditor, Akuntan Publik, dan Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   d. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh Internal Auditor ketika melakukan audit secara rutin maupun non-rutin.

Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank mematuhi prinsip pemisahan fungsi tersebut, yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*".

Dalam hal diperlukan karena perubahan karakteristik kegiatan usaha dan transaksi serta organisasi Bank, Direksi Bank telah menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*confliict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut telah diidentifikasi, diminimalisasi dan dipantau secara hati-hatioleh pihak lain yang independen, seperti Akuntan Publik.

Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank telah melakukan langkah-langkah, antara lain:

1. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu yang memisahkan atau mengalokasikan beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank.
2. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
    a. Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
    b. Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
    c. Transaksi dalam pembukuan Bank.
    d. Pemberian informasi kepada nasabah Bank.
    e. Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi pembiayaan dan pemantauan debitur setelah pencairan pembiayaan.
    f. Kegiatan usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
    g. Independensi fungsi Manajemen Risiko Bank.

Sistem Akuntansi dan Informasi

Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai bertujuan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

1. Sistem Akuntansi
    a. Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam ranagka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
    b. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala atau paling sedikit setiap bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi telah diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga telah didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan.
2. Sistem Informasi
    a. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan Manajemen Risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
    b. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif paling sedikit menyediakan data atau informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, informasi pasar (kondisi eksternal), dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
    c. SPI telah menyediakan sistem informasi yang dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi Risiko tinggi. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (Internal Auditor), dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai.
    d. Bank telah mengorganisasikan suatu rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) serta sistem rekam cadang (*back-up*) telah bekerja secara efektif, pelaksanaan prosedur, proses, dan sistem rekam cadang (*back-up*) telah didokumentasikan dan diuji efektivitasnya secara berkala. Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian secara berkala dan Direksi telah memberikan perhatian yang penuh terhadap temuan kelemahan pada prosedur, proses, dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian, serta selanjutnya mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.
    e. Bank memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, Bank telah mengendalikan secara efektif untuk menghindari adanya gangguan usaha dan kemngkinan timbulkerugian yang signifikan.
    f. Dalam rangka pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, Bank telah memperhatikan hal-hal berikut ini:
        - Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit. Proses jejak audit dilaksanakan secara efektif dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa proses otomasi telah bekerja secara efektif dan akurat. SKAI melakukan penilaian terhadap efektivitas dan akurasi proses jejak audit ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern Bank.
        - Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya (*general controls*) maupun pengendalian terhadap aplikasi perangkat lunak dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
        - Antisipasi terjadinya risiko gangguan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor yang berada di luar jangkauan pengendalian rutin

Bank sehingga Bank menyelenggarakan sistem pemulihan (*recovery*) dan rencana kontinjensi serta pengecekan secara berkala atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang sulit diprediksi sebelumnya (*disaster and recovery plan*).
- Sistem informasi menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan disajikan dalam format yang konsisten.
- Sebagai bagian dari proses pencatatan atau pembukuan, sistem informasi Bank didukung oleh sistem akuntansi yang baik termasuk penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.

3. Sistem Komunikasi
   a. Sistem komunikasi mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eksternal Auditor, Pemegang Saham, dan Nasabah Bank.
   b. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bank telah memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan pegawai Bank sepenuhnya memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
   c. Direksi Bank menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko, dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.
   d. Struktur organisasi Bank memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah, dan lintas satuan kerja atau unit kerja, sebagai berikut:
      - Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif Bank mengetahui Risiko dan kinerja operasional Bank. Saluran informasi dapat merespon dengan baik sehingga menghasilkan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
      - Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi, dan ekspektasi Bank serta kebijakan dan prosedur telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
      - Informasi lintas satuan kerja atau unit kerja untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Dalam pelaksanaannya, yang direalisasikan adalah:
1. Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*) maupun oleh SKAI.
2. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, meliputi:
   a. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank.
   b. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
   c. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
   d. mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, management review, dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
   e. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
   f. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Bank menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.
2. Sebagai bagian dari SPI, SKAI melaporkan hasil temuan secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit, Direktur Utama, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. SKAI melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas SKAI, maka Bank berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan standar pelaksanaan fungsi audit intern.

Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penumpangan

1. Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), SKAI, maupun pihak lainnya, dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:
    a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank telah ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif terkait.
    b. SKAI melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti.
    c. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan telah ditindaklanjuti, maka Direksi menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan.
    d. Direksi dan Dewan Komisaris menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.

Kesesuaian dengan COSO

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Bank Syariah Indonesia dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan dari 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri dari:

1. *Internal Environment*
2. *Objective Setting*
3. *Event Identification*
4. *Risk Assessment*
5. *Risk Response*
6. *Control Activities*
7. *Information & Communication*
8. *Monitoring*

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern. Kelemahan dalam pengendalian intern baik yang dididentifikasi oleh satuan unit kerja operasional (*risk taking unit*), Unit Kerja Internal Audit maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitoring pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2021, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern di PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara umum telah memadai.

MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan tentang manajemen risiko disampaikan pada bab tersendiri yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit terhadap Laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2021 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Pihk Bank secara melakukan pertemuan secara rutin dengan auditor eksternal untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Hal itu dilakukan agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit laporan keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Bank serta menguji pengendalian internal, termasuk pengujian kembali item yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Pertimbangan perlunya Audit Eksternal bagi sebuah Bank antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai.
2. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank;
3. Praktek internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal;

Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Auditing Indonesia). Standar tersebut mengharuskan Pihak Kedua mematuhi ketentuan etika dan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pihak Pertama untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Pihak Pertama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 3 menegaskan bahwa Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan: c. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Sementara Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 6: Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1): Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Auntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Penunjukan Akuntan Publik

1. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
2. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku.

Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
c. Akuntan Publik yang menjadi Signing Partner terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
d. Berafiliasi sebagai member (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala Internasional.
e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang breast lebih dari Rp 10 Triliun
f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

Kantor Akuntan Publik

TAHUN	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PERIODE KAP	NAMA AKUNTAN	PERIODE AKUNTAN	BIAYA JASA AUDIT
2021	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan	1 tahun penugasan	M. Jusuf WIbisana	1 tahun penugasan	Rp5.100.000.000 (termasuk: PPN & OPE)

Jasa Lain yang Diberikan

Tidak ada jasa lain yang diberikan KAP pada tahun buku kepada Bank.

Opini Audit Tahun Buku

Hasil audit memberikan opini "Wajar", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

FUNGSI KEPATUHAN

Bank Syariah Indonesia berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat *ex-ante* yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Struktur Organisasi

BSI telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan POJK No.46 POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan dikepalai oleh *Compliance Group Head* yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Hingga 31 Desember 2021, jumlah personil Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebanyak 39 orang.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

BSI telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang membawahi jajaran kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Tribuana Tunggadewi. Direktur Kepatuhan telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK, hal ini membuktikan bahwa independensi telah terpenuhi. Direktur Kepatuhan telah

memenuhi persyaratan independensi serta criteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Satuan Kerja Kepatuhan

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Direktur Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan,ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2021, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
   a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo, email atau aplikasi GRC Compas. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan melalui *compliance news* ke seluruh karyawan BSI.
   b. Melakukan analisis dan menyusun resume atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta *Group Head* terkait.
   c. Melakukan sosialisasi regulasi secara online/virtual terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ ketentuan yang baru.
   d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
2. Produk dan Aktivitas Baru Bank
   Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RBB.
3. *Compliance Testing*
   Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan reviu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
4. *Compliance Monitoring*
   a. Melaksanakan pengkinian sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
   b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan monitoring terhadap *prudential banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
   c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.
5. *Good Corporate Governance (GCG)*
   a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/ kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang terdapat pada Peraturan OJK, Peraturan BI dan Surat Edaran BI tentang Penerapan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS).
   b. Pemenuhan *Governance Structure* dan GCG *policy* sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Penerapan GCG di BUS dan UUS.
   c. GCG *Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009, POJK No. 8/ POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
   d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI

6. *Syariah Compliance*
    a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
    b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
    c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
    d. Melakukan pemastian terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
    e. Pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan *ex-post* (kerjasama dengan SKAI)
    f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara sampling untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.
7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktifitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    a. Pembiayaan
        (1) Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
        (2) Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
    b. Jaringan Kantor Bank
        (1) Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan compliance checklist yang ditetapkan regulator
        (2) Memonitoring pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
    c. Pengendalian Biaya
        (1) Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
        (2) Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien
        (3) Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji sampling
    d. Aktifitas Operasional Lain
        (1) Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasinal
        (2) Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK.

        Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.
        6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
        6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
        6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (APU & PPT)

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan transaksi pencucian uang sebagai aktivitas yang berkenaan dengan menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran berupa sejumlah uang. Termasuk di dalamnya adalah hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Sedangkan pendanaan terorisme seperti ditegaskan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan bagi kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Kebijakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") terkait dengan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), antara lain mengacu pada regulasi tersebut. Hingga saat ini, kebijakan terkait dengan APU & PPT telah berjalan di Bank dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan, khususnya yang terjadi di industri keuangan dan perbankan.

Dasar Hukum Pelaksanaan

Dalam menerapkan kebijakan mengenai APU & PPT, BSI mengacu pada sejumlah peraturan, baik eksternal maupun internal yang mencakup sebagai berikut.

Regulasi Eksternal

1. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Undang-Undang RI No. 3 tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal Transfer Dana, berikut segala perubahannya.
5. Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
6. POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
7. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
8. SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah d Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, berikut segala perubahannya.
9. SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Seojk.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
10. SEOJK No. 31/SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
11. Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012, perihal Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, berikut segala perubahannya.
13. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
14. Peraturan Kepala PPATK No. PER-12/1.02/PPATK/06/13, perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
15. Peraturan Kepala PPATK No. PER-21/1.02/PPATK/11/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
16. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014, perihal Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
17. Peraturan Kepala PPATK No. Per-02/1.02/PPATK/02/15, perihal Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala perubahannya.
18. Peraturan Kepala PPATK No. 18 tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan.
19. Peraturan Kepala PPATK No. 11 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*.
20. Peraturan Kepala PPATK No. 1 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
21. Peraturan Kepala PPATK No. 11 tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.
22. Surat Edaran PPATK No. SE-01/1.02/PPATK/02/14 perihal Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai, berikut segala perubahannya.
23. Surat Edaran PPATK No. SE-02/1.02/PPATK/03/14 perihal Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
24. Surat Edaran PPATK No. 1 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah.
25. Surat Edaran PPATK No. 08 tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.

Regulasi Internal

1. Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan APU PPT PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Standar Prosedur Pengendalian Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Petunjuk Teknis Operasional Individual Risk Assessment.
4. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BISA (BSI *Integrated System of AML* CFT).

Pengelola APU PPT

Kebijakan penerapan program APU dan PPT di PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris, yang juga ikut mengawasi pelaksanaannya secara aktif. Dalam pelaksanaan tersebut, BSI memiliki Unit Kerja *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing* (AML CFT) Group yang disebut AMG.

Kepala AMG bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. AMG berfungsi mengoordinasikan penerapan program APU dan PPT Bank, baik di kantor pusat maupun di seluruh *outlet* agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembentukan AMG tersebut telah memerhatikan beragam ketentuan, yang di antaranya adalah:

1. AMG paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana.
2. Pimpinan dan pelaksana pada AMG tidak boleh merangkap fungsi lain.
3. Dalam hal Bank menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap atau melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

Selain itu, setiap anggota AMG wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penerapan program APU dan PPT, *risk assessment*, *risk mitigation* dan peraturan lainnya yang terkait dengan pendanaan dan produk perbankan.
2. Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
3. Memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU PPT

Pelaksanaan kebijakan APU dan PPT di lingkungan Bank dilaksanakan secara berjenjang yang melibatkan Dewan Komisaris hingga unit kerja khusus. Rincian tugas dan tanggung jawabnya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

PELAKSANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dewan Komisaris	1. Menyetujui kebijakan APU dan PPT. 2. Mengawasi pelaksanaan atas tanggung jawab Direksi/SEVP melalui Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern Bank terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator. 3. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Memberikan pengarahan/saran-saran kepada Direksi/SEVP mengenai penerapan program APU dan PPT.
Direksi/SEVP	1. Memastikan Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT. 2. Mengusulkan kebijakan tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. 3. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. 4. Membentuk Unit Kerja khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU dan PPT. 5. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan Unit Kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT. 6. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme. 7. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.
Direktur Kepatuhan	1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan regulator tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan berlaku. 2. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator, antara lain komitmen dalam *action plan*, laporan rencana kegiatan pemutakhiran data, dan hasil pengawasan regulator yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT. 4. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT. 5. Memberikan persetujuan terhadap pelaporan kepada regulator terkait: a. Laporan transaksi keuangan mencurigakan. b. Laporan rencana dan realisasi pemutakhiran data kepada regulator. c. Penundaan dan penghentian sementara transaksi. d. Penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi. e. Transaksi keuangan tunai yang dikecualikan. f. Penutupan hubungan usaha dengan pengembalian dana melalui instansi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. g. Penetapan petugas pendaftar, pelapor administrator, dan penghubung dalam rangka pelaporan kepada PPATK.

PELAKSANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Unit Kerja Khusus APU dan PPT	Unit Kerja Khusus (UKK) terkait dengan APU dan PPT dilaksanakan oleh 3 (tiga) fungsi: A. AMG bertugas: 1. Menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. 2. Memastikan adanya sistem yang mendukung Program APU dan PPT, yaitu sistem yang antara lain dapat mengidentifikasi nasabah, transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan lainnya yang diwajibkan dalam undang-undang. 3. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*). Penilaian risiko tersebut wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). 4. Melakukan *review* dan *monitoring* tugas dan tanggung jawab unit kerja dalam melakukan pemutakhiran profil nasabah dan profil transaksi nasabah. 5. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah. 6. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan perkembangan Program APU dan PPT yang terkini, perubahan dan perkembangan yang meliputi, antara lain produk, jasa, dan teknologi di Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi Bank, dan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. 7. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PTT. 8. Melakukan analisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil nasabah, khususnya nasabah dan transaksi berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai. 9. Menerima laporan indikasi transaksi keuangan mencurigakan dari unit kerja terkait dan melakukan analisis atas laporan tersebut. 10. Mengidentifikasikan transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan berdasarkan laporan hasil analisis transaksi keuangan dari Unit Kerja terkait dan/atau hasil pemantauan yang dilakukan. 11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai. 12. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan luar negeri. 13. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/ketentuan regulator untuk disampaikan kepada PPATK/regulator terkait lainnya berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. 14. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi. 15. Memastikan bahwa: · Terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap satuan kerja terkait kepada UKK atau kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; dan · Satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan/laporan lainnya terkait APU dan PPT sebelum menyampaikannya kepada UKK atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU dan PPT. 16. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT. 17. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris secara langsung kepada PPATK. 18. Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT bagi pegawai Bank termasuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud. 19. Menjaga kerahasiaan informasi dengan memperhatikan ketentuan *Anti Tipping Off*. 20. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan APU dan PPT (antara lain Lembaga Pengawas dan Pengatur, Bank Indonesia, PPATK, dan Penegak Hukum) B. Petugas APU dan PPT Kustodi bertugas: 1. Memantau transaksi nasabah kustodi. 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan. 3. Memastikan pemutakhiran data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah. 4. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait. 5. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur). 6. Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU dan PPT.

PELAKSANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	C. AML *Officer Region* bertugas: 1. Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah. 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan ke AMG Kantor Pusat. 3. Memastikan pemutakhiran data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah. 4. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyedia jasa keuangan (PJK). 5. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait. 6. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur). 7. Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU dan PPT. 8. Memberikan masukan terkait penerapan APU dan PPT kepada pegawai di *outlet*/AMG di kantor pusat. AMG kantor pusat dapat mempertimbangkan jumlah pegawai AML Officer di masing-masing *region* berdasarkan *risk-based*. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat risiko secara regional tersebut antara lain: a. Penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan memerlukan persetujuan Bank Indonesia/regulator terkait lainnya dan/atau lembaga pengatur dan pengawas. b. Jumlah nasabah berisiko tinggi yang dimiliki. c. Volume usaha *outlet*. d. Aktivitas transaksi dengan luar negeri. e. Lokasi *outlet* berada pada wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai *cash society*.

Implementasi APU PPT Tahun 2021

Penetapan program APU dan PPT pada tahun buku 2021 mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010.
2. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 tahun 2013.
3. Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
4. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Mengacu pada regulasi tersebut, BSI telah mengimplementasikan kebijakan APU dan PPT di lingkungan Bank, yang rinciannya diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk menciptakan penerapan Program APU dan PPT yang efektif. Bentuk pengawasan aktif yang telah direalisasikan tersebut, di antaranya:

1. Pemenuhan laporan bulanan *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing* (AML CFT) kepada Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC).
2. Terdapat kewenangan Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC) dalam menyetujui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilakukan secara independen.
3. Pembahasan materi AML CFT dalam komite di bawah Direksi.
4. Pemenuhan laporan secara triwulan kepada Dewan Komisaris.
5. *Tone From the Top* dipahami dan diintegrasikan di seluruh lini bisnis serta konsistensi dalam penerapan AML CFT.
6. *Engagement leadership* terkait urgensi penerapan AML CFT dalam rangka peran Direksi dalam menunjang efektivitas penerapan AML CFT.
7. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dalam menjaga kepatuhan Bank dalam menuju era pengaturan *principle based*.

B. Kebijakan dan Prosedur

Bank selalu melakukan *review/updating* secara berkala terhadap kebijakan serta prosedur penerapan program AML CFT yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang diatur dalam prosedur tersebut, antara lain:

1. Identifikasi profil pengguna jasa Bank.
2. Kategori pengguna jasa bank berisiko tinggi (*high risk customer*).
3. Penutupan, penghentian dan penolakan transaksi.
4. Sistem informasi manajemen, pemantauan dan pemutakhiran data.
5. Penatausahaan dokumen, kerahasiaan data nasabah dan pelaporan.
6. Sistem pengendalian intern, sumber daya manusia dan sanksi.

Selain prosedur, Bank juga telah menyusun kebijakan lain, yaitu: *individual self-assesment* dalam rangka menghadapi *mutual evaluation review* (MER) dan pelaksanaan *screening database* nasabah terhadap *sanction list*, *terrorist list* dan *proliferasi list*.

C. Pengendalian Intern

Dalam rangka memastikan implementasi program APU dan PPT telah berjalan dengan baik, Bank melakukan uji petik. Hal itu dilakukan dengan cara datang langsung (*on the spot*) dan *online* untuk melihat dokumen transaksi maupun dokumen pembukaan rekening.

Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari pemenuhan implementasi program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan eksternal, baik dari regulasi OJK maupun peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan internal. Selain itu, Bank juga melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program APU dan PPT oleh Internal Audit telah berjalan secara efektif. Setelah proses uji petik selesai, dilanjutkan dengan sosialisasi implementasi program APU dan PPT di *outlet*/cabang.

Pelaksanaan uji petik tahun 2021 dilakukan oleh AMG dan AML Officer di *region*. Rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

PELAKSANA	REALISASI KEGIATAN UJI PETIK	
	ONLINE	ONSITE
AMG	• Region Semarang (2 cabang) • Region Jakarta 1 (1 cabang) • Region Jakarta 2 (1cabang) • Region Jakarta 3 (1 cabang)	• Region Bandung (1 cabang) • Region Surabaya (4 cabang)
AML Officer	• Region Aceh (5 cabang) • Region Palembang (7 cabang) • Region Semarang (10 cabang) • Region Makassar (9 cabang) • Region Banjarmasin (1 cabang)	• Region Aceh (22 cabang) • Region Palembang (11 cabang) • Region Jakarta 1 (15 cabang) • Region Jakarta 2 (11 cabang) • Region Jakarta 3 (6 cabang) • Region Bandung (26 cabang) • Region Semarang (20 cabang) • Region Surabaya (46 cabang) • Region Makassar (21 cabang) • Region Banjarmasin (10 cabang)

D. Sistem Informasi Manajemen

Peningkatan kualitas penerapan program APU & PPT di lingkungan BSI didasarkan pada pendekatan berbasis risiko atau *risk based approach* (RBA). Inisiatif ini sejalan dengan kian berkembangnya kompleksitas produk dan jasa serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi (TI). Karena itu, Bank wajib memiliki sistem informasi untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.

Untuk maksud tersebut, Bank telah memiliki BSI *Integrated System of* AML CFT (BISA) yang merupakan aplikasi perangkat lunak berbasis *web*. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan *screening* terhadap calon nasabah, penetapan/pengukuran tingkat risiko calon nasabah/nasabah, mendeteksi transaksi tidak wajar, menganalisis dan menghasilkan laporan transaksi yang mencurigakan. Aplikasi juga telah memiliki modul terintegrasi yang diperlukan untuk penerapan AML-CFT yang dioperasikan oleh petugas di kantor cabang dan kantor pusat.

Petugas di kantor cabang wajib memanfaatkan aplikasi BISA dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Hal itu merupakan bagian dari upaya memitigasi risiko terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme.

Kewenangan petugas cabang dalam mengakses aplikasi BISA sebagai alat bantu melaksanakan penerapan program APU dan PPT, antara lain:

1. Menu *Onboarding Customer* Individu dan Non Individu
2. Menu Pemantauan Alert
3. Menu *Link Analysis*
4. Menu Identifikasi Dokumen Kadaluarsa
5. Menu Penolakan/Pemutusan Hubungan Usaha
6. Menu *Safe Deposit Box*
7. Menu Detil Nasabah

E. SDM dan Pelatihan

Upaya yang dilakukan AML CFT *Group* (AMG) sejak *legal merger* 3 (tiga) bank: Bank BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah pada 1 Februari 2021 hingga saat ini adalah meletakan fondasi pemahaman APU dan PPT untuk seluruh pegawai BSI. Rincian realisasi kegiatannya, antara lain untuk kegiatan level manajemen, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

NO.	LEVEL ORGANISASI	KEGIATAN
1	Dewan Komisaris	Penguatan pemahaman, dengan tema: "Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank Dalam Menuju Era Pengaturan *Principle Based*" yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) pada 25 Maret 2021.
2	Direksi dan SEVP	*Leadership Engagement* APU & PPT dengan tema: "Urgensi Peran Direksi Dalam Menunjang Efektivitas Penerapan APU & PPT" bekerja sama dengan LPPI pada 31 Maret 2021.
3	Middle Management: Group Head, Regional CEO, Executive Business Officer, Executive Risk & Recovery Officer, Department Head, Deputy Regional, Project Leader, Project Head	Penguatan pemahaman, dengan tema: "Penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" yang dilaksanakan pada 25 Maret 2021.

Bank juga melaksanakan pelatihan kelas terstruktur, bekerja sama dengan BSI University. Kelas terstruktur dibagi menjadi 3 (tiga) jenis dengan waktu pelaksanaan dari Juni hingga November 2021, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kelas *Basic* dengan peserta Frontliner (CS dan Teller).
2. Kelas *Intermediate* dengan peserta CS Supervisor, Branch Operation & Service Manager (BOSM) serta Area Operation & Service Manager (AOSM).
3. Kelas *Advance* dengan peserta Branch Manager.

KELAS	JUNI		JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER				NOVEMBER		TOTAL KELAS	TOTAL PESERTA
	1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2		
Basic	15		6	8	12	14	22	4	11	12	19		6	9	13	16	20	4	6	11	13	8		20	738
Intermediate	17		7		13		19	5		18		23	8		14		23	5		12				12	446
Advance				15		21			9		16			15		22		14	18		21	9	11	11	407
Total Peserta																									**1.591**

Upaya penguatan *awareness* penerapan program APU dan PPT juga dilakukan melalui pembentukan video dan komik yang dapat diakses melalui aplikasi internal BSI serta korespondensi, yang rinciannya diuraikan sebagai berikut:

NO.	METODE	TEMA/MATERI KONTEN
1	Pembuatan video tentang APU dan PPT	1. Pemblokiran rekening, penghentian sementara transaksi, dan penundaan transaksi 2. Penerapan AML CFT 3. *Enhanced Due Diligence* (EDD) 4. Sosialisasi tindak pidana pencucian uang (tindak pidana asal dan tahapan pencucian uang)
2	Komik APU PPT	1. *Screening* Calon Nasabah 2. *Enhanced Due Diligence* (EDD)
3	Korespondensi	1. Pemblokiran rekening, penghentian sementara transaksi dan penundaan transaksi 2. Pencegahan pendanaan proliferasi Senjata pemusnah massal 3. Penyampaian daftar negara risiko tinggi 4. Video *awareness* implementasi AML CFT untuk *walk in customer* pada sistem EXA BSI 5. Pemutakhiran data nasabah 6. Modus penipuan oleh perusahaan di Indonesia yang menggunakan singkatan "PTE, LTD, SDN BHD, dan INC" 7. Pelaksanaan sertifikasi APU dan PPT menggunakan aplikasi siMANTAP PPATK 8. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah 9. *Screening* calon nasabah 10. Imbauan PPATK untuk mewaspadai transaksi penarikan tunai 11. Pemisahan fungsi AML Officer (AMLO) *di regional office* 12. Publikasi daftar negara berisiko tinggi dan yurisdiksi lain yang dipantau oleh *Financial Action Task Force* (FATF) 13. Pembukaan rekening partai politik

F. Realisasi Pelaporan

1. Kepada PPATK
   Bank telah merealisasikan penerapan program APU PPT yang berkenaan dengan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) dan pemenuhan permintaan data/informasi dari regulator/aparat penegak hukum tahun 2021.

Realisasi Pelaporan ke PPATK periode 2 Januari-31 Desember 2021

NO.	JENIS LAPORAN	JUMLAH
1	Transaksi Keuangan Tunai (TKT)	65.162
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)	435
3	Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (TKL)-*Incoming*	13.674
4	LTKL-Outgoing	9.536
5	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)*	2.629.666
6	Penundaan Transaksi	3
7	Penghentian sementara transaksi	6

2. Permintaan Data dari Regulator/Aparat Penegak Hukum
   Sepanjang tahun 2021, penyerahan data atas permintaan dari regulator/aparat penegak hukum disampaikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, yang mencapai 3.033 data. Selanjutnya adalah PPATK. Rincian seluruh realisasi pemenuhan data disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Realisasi Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum periode 2 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021

NO.	JENIS LAPORAN	JUMLAH
1	Dirjen Pajak, Kementerian keuangan	3.018
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	262
3	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	35
4	Bea Cukai, Kementerian Keuangan	15
5	Detasemen Khusus (Densus) 88 Kepolisian RI	10
6	Badan Narkotika Nasional (BNN)	6
7	Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI	6
8	Kepolisian RI	6
9	Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (DITTPIDEKSUS), Bareskrim Kepolisian RI	4
10	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	2
11	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	2
12	Kejaksaan Agung RI	2

Corporate Governance and Compliance Support

Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, di antaranya:

1. Laporan Fungsi Kepatuhan triwulanan kepada Direktur Utama.
2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK.
3. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4. Laporan *self assessment* pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada OJK.
5. Laporan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6. Laporan Pelaksanaan GCG tahunan kepada *stakeholders*.

Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:

1. Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara *continue* kepada jajaran Bank melalui:
   a. *Email blast* kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG.
   b. Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas kelas *training*.
2. Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC.
3. Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG.
4. Mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
5. Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2021 dan pemenuhan Daftar *Monitoring* Tindak lanjut Kepatuhan.
6. Melakukan pengawalan terhadap proses *fit and proper test* Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, penyelenggaraan RUPS dan penyusunan *Annual Report*.
7. Melakukan *monitoring* terhadap denda Bank Syariah Indonesia agar jumlah denda dapat diminimalisir tiap tahunnya.
8. *Review* pelaksanaan RUPS.

Pengendalian Gratifikasi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholders.* Kerja sama tersebut didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.

Pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi melalui Petinjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Dengan demikian, kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholders.*

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bank berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat OJK No. S-11/PB.3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Implementasi Standar Nasional Indonesia (ISO) 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Bank. Kebijakan itu menginstruksikan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi melalui penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk menjadi penanggung jawab dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang *Anti-Bribery Management System* untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan Swasta.

Pada tahun 2021 BSI telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Bank juga telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, seluruh jajaran pegawai diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity.*
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Anti Bribery.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Anti Bribery adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank Syariah Indonesia dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi

Compliance Risk Management

Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta *Group Head*.
2. Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung kepada BSI, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan.
3. Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan *advise*/opini kepatuhan terkait *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
4. Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal dalam *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
5. Melaksanakan pengkinikan sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
6. Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
7. Menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan dan kepada manajemen BBank serta laporan *support* lainnya ke unit kerja terkait.
8. Memastikan terlaksananya proses pengelolaan (identifikasi, pengukuran monitoring dan pengendalian) risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan OJK mengenai penerapan manajemen risiko.
9. Melaksanakan rapat koordinasi (*prudential meeting*) dengan unit kerja yang mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan *monitoring*nya.
10. Menyampaikan dan *monitoring action plan* atas sanksi dari regulator yang terkena denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
11. Menyusun dan memantau *action plan* atas ketentuan ekternal untuk disampaikan kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Entitas Induk terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
12. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta koordinasi (*doted line*) atas *Regional Business Control* (RBC) dan *Descentralize Compiance & Operation Risk (DCOR).*
14. Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta *liaison officer* ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa Keuangan.

Syariah Compliance

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:

1. Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja.
2. Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja.
3. Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal.
4. Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester).
5. Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan level Direksi.
6. Memastikan terlaksananya *People Development* khususnya aspek syariah.
7. Memastikan pelaksanaan uji petik DPS berjalan dengan baik dan Compliance Group (CPG) melakukan pendampingan kepada DPS dalam pelaksanaan uji petik, yang telah dilaksanakan kepada area/cabang sebagai berikut:

Uji Petik DPS Tahun 2021

NO.	TANGGAL	NAMA PENYELENGGARA
1	9 – 23 April 2021	KC Medan Ahmad Yani
2	15 April – 4 Mei 2021	KC Medan S. Parman
3	3- 6 Mei 2021	KC Malang Suprapto
		KC Malang Sutoyo
		KC Jombang / Pasuruan
4	5 Juli – 23 Agustus 2021	KC Manado Mantos / KC Manado Tendean
5	3 Juli – 16 Agustus 2021	KC Mamuju
6	3 Juli – 16 Agustus 2021	KC Palu M. Yamin
7	11 – 13 Oktober 2021	KC Yogyakarta Sudirman
		KC Yogyakarta Kusumanegara
		KC Yogyakarta Kolonel Sugiono
8	7 – 9 November 2021	KC Bandung Asia Afrika
		KC Banung Ahmad Yani
9	14 – 20 November 2021	KC Lhokseumawe Syekh Syamsuddin
		KC Banda Aceh Diponegoro

8. Memastikan terlaksananya *sharia clinic* bagi unit bisnis Kantor Pusat.
9. *Sharing session* aspek syariah dengan RO/Area/*Branch* seluruh Indonesia.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah.
    a. Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2021 antara CPG dengan Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali.
    b. Cakupan pengawasan aspek syariah: Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain:
        - Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS diantaranya pembiayaan dan pendanaan dengan basis akad:
            (a) Murabahah
            (b) Mudharabah
            (c) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah
            (d) Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
            (e) Pembiayaan Take Over, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah
            (f) Pembiayaan dengan tujuan refinancing
            (g) Pembiayaan kepada koperasi
            (h) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro, dan Deposito
        - Metode pemeriksaan dilakukan secara *on desk* dan *on site* dengan pemeriksaan melalui dokumen serta wawancara kepada Unit Kerja (Area/Cabang) terkait.
        - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.

Business Compliance

Pelaksanaan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi. Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan *tools Compliance Note Independent* (CNI) yang dilakukan oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.
2. Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator.
3. Melaksanakan *Compliance on Visit* (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2021, untuk memastikan proses penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.

4. Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.
5. Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan internal Bank berupa *draft* Kebijakan, Surat Edaran, SOP telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
6. Melakukan *review* penyaluran dana sosial dalam rangka kegitan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Sosiobisnis yang dilaksanakan oleh BSI bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawalan kepatuhan unit kerja/ pengembangan manajemen:

1. Menyelenggarakan Forum Evaluasi *Review* Pembiayaan yang melibatkan *business unit*, *risk assessment unit* dan *support unit* dalam melakukan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir/mencegah *non compliance procedure* dalam proses pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.
2. Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Melakukan koordinasi dengan *Decentralize Compliance and Operational Risk* (DCOR) dalam melaksanakan efektivitas pengawalan kepatuhan sesuai peran dan tugas masing-masing.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ ATAU POLITIK

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2021 Bank Syariah Indonesia tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2021, Bank Syariah Indonesia menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini. Berikut rinciannya:

Perkara Penting Tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH		
		PERDATA	PIDANA	HUBUNGAN INDUSTRIAL
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	220	38	3
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau *inkracht*	95	6	2
	Jumlah	315	44	5
	TOTAL	**364**		

Informasi terkait kasus – kasus di pengadilan dengan nilai gugatan materiil atau putusan ≥ Rp 5 Milyar dan sanksi yang diterima serta pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Bank:

NO.	POKOK PERKARA / GUGATAN DAN PARA PIHAK	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN	UPAYA MANAJEMEN	SANKSI
1	Perkara gugatan No. 404/ Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSI (dahulu BSM) selalu Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan arbitase yang telah dimenangkan oleh Penggugat. Nilai Gugatan: · Materiil sebesar Rp9.441.701.946,- · Immateril sebesar Rp300.000.000.000,-	· PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak dapat menerima dengan alasan ba hwa putusan tersebut telah dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga diminta menunggu pelaksanaanya. · Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggil/ *aanmaning* kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri panggilan sidang *annmaning*, namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima *relaas* panggilan/*aanmaning* kembali.	Membayar ganti rugi
2	Perkara gugatan nomor 647/ Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp 10 Milyar rupiah kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut. Nilai Gugatan: · Materiil sebesar Rp13.916.000.000,- · Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,-	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.	Risiko ganti rugi	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Tidak ada
3	Perkara gugatan nomor 383/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst antara Hasan Basri, SE selaku Penggugat dengan BSI (dahulu BRIS) selaku Tergugat terkait putusan Pidana Kelalaian Karyawan BSI (dahulu BRIS) dalam pemindah bukuan rekening. Nilai Gugatan: · Materiil sebesar Rp500.000.000.000,- · Immaterill sebesar Rp1.400.000.000.000,-	· Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara tersebut yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,-. · Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara Banding yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. · Mahkamah Agung RI telah memutus upaya hukum Kasasi yang pada intinya menolak permohonan Kasasi BRIS. · Selanjutnya, BRIS mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan berdasarkan website Mahkamah Agung RI bahwa permohonan Peninjauan Kembali BRIS dikabulkan, namun seluruh dokumen persidangan dan salinan putusan belum didelegasikan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Risiko ganti rugi	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Tidak ada

NO.	POKOK PERKARA / GUGATAN DAN PARA PIHAK	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN	UPAYA MANAJEMEN	SANKSI
4	Perkara gugatan nomor 334/ Pdt.G/2021/PN.Bdg antara H. Yana Sunaryana selaku Penggugat dengan BSI (dahulu BRIS) selaku Tergugat I terkait dengan terjualnya jaminan Penggugat terhadap lelang yang dilakukan oleh PT Bank Jasa Arta sebelum diakuisisi oleh ex legacy BRIS. Nilai Gugatan: · Materiil sebesar Rp500.000.000.000,- · Immaterill sebesar Rp1.400.000.000.000,-	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung. (belum ada putusan pengadilan).	Risiko ganti rugi	BSI telah menghadiri proses persidangan dimaksud dan sampai saat ini dalam proses jawab menjawab.	Tidak ada
5	Perkara gugatan nomor 360/ Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih. Nilai Gugatan: · Materiil sebesar Rp31.645.822.960,- · Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,-	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (belum ada putusan pengadilan).	Risiko ganti rugi	BSI telah menghadiri proses persidangan dimaksud dan sampai saat ini dalam proses jawab menjawab.	Membayar ganti rugi

Selain perkara hukum di atas, BSI juga menghadapi perkara hubungan industrial yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

NO.	POKOK PERKARA / GUGATAN	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN	UPAYA MANAJEMEN	SANKSI
1	Perkara Hubungan Industrial No.268/ Pdt.Sus-PHI/2020 / PN.Jkt.Pst antara (Sdr. Alam Sani dkk) para pensiunan karyawan BSI (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) selaku Para Penggugat dengan BSI (dahulu (PT Bank Syariah Mandiri) selaku Tergugat. Nilai Gugatan: Materiil sebesar Rp833.357.637,-	Pada tanggal 02 Agustus 2021, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut: <u>MENGADILI:</u> Dalam Konpensi Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard;* 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI sebesar Rp 1.646.000 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan saat ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI.	Risiko reputasi	BSI telah melakukan upaya maksimal dengan menunjuk pengacara eksternal (Dewansyam & Partner) untuk membela kepentingan hukum BSI. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenangkan BSI. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan saat ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI	Tidak ada

NO.	POKOK PERKARA / GUGATAN	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN	UPAYA MANAJEMEN	SANKSI
2	Perkara Hubungan Industrial No.62/ Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Jkt.Pst antara (Sdr. Muhamad Yazid) ex pegawai PT BRI Syariah selaku Penggugat dengan PT BRI Syariah selaku Tergugat. Nilai gugatan: Materiil sebesar: Rp193.948.163,-	Pada tanggal 08 Juli 2021, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI DALAM PROVISI - Menolak tuntutan Provisi Penggugat; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, NOKEP : R.018-PPPF/03-2019 adalah batal demi hukum; 3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 5 Maret 2019; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, DPLK dan JHT Jamsostek secara tunai dan sekaligus yang keseluruhannya sebesar Rp80.885.525,88 (delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen); 5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Terhadap putusan tersebut, BSI telah mengajukan upaya hukum Kasasi. Pada tanggal 11 Februari 2021, Mahkamah Agung RI telah memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI: - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank BRIsyariah Tbk, tersebut; - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	BSI akan melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.	Membayar ganti rugi

NO.	POKOK PERKARA / GUGATAN	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN	UPAYA MANAJEMEN	SANKSI
3	Perkara Hubungan Industrial No.105/ Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Jkt.Pst antara Sdr. Adhi Murmansyah (ex pegawai BSI / dahulu BRI Syariah) selaku Penggugat dengan BSI (dahulu BRI Syariah) selaku Tergugat. Nilai gugatan: · Materiil sebesar Rp219.238.764,- · Immateriil sebesar Rp300.000.000,-	Pada tanggal 20 Juli 2021, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan NOKEP: 187-HCD/HCOS/07/2019 adalah batal demi hukum; 3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 22 Juli 2019; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak, dan DPLK secara tunai dan sekaligus yang keseluruhannya sebesar Rp93.708.041,62 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh satu rupiah koma enam puluh dua sen); 5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Terhadap putusan tersebut, BSI telah mengajukan upaya hukum Kasasi. Pada tanggal 12 November 2020, Mahkamah Agung RI telah memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut MENGADILI: - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank BRIsyariah Tbk, tersebut; - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	BSI akan melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.	Membayar ganti rugi

Sanksi Administratif dan Lainnya dari Regulator

Rincian sanksi administratif yang diterima sepanjang tahun 2021 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

BANK LEGACY	PERIODE		REGULATOR	REFERENSI	JENIS PELANGGARAN	NOMINAL (RP)	UNIT KERJA (GIC)	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
	LAPORAN	PEMBEBANAN						
BSM	Jan-21	Jan-21	OJK	Surat OJK S-1/ PB.3401/2021 Tgl. 6 Januari 2021	Lap. Pemindahan Lokasi Divisi	1.000.000	ISG	Terlambat Menyampaikan Laporan Pemindahan Lokasi Divisi selama 1 (satu) hari
BRIS	Mei-Aug 2020	Jan-21	BI	Message Type BI Tgl. 19 Januari 2021	LSMK	1.402.600.000	AFD	Terlambat menyampaikan Koreksi Laporan LSMK untuk Data Bulan Mei s/d Agustus tahun 2020
BRIS	Aug-20	Jan-21	OJK	Surat OJK S-3/ PB.03401/2021 Tgl. 26 Januari 2021	LSMK	96.200.000	AFD & FSD	Hasil Audit OJK untuk Laporan LSMK dan SLIK Pemeriksaan Posisi Data 31 Agustus 2020 karena Kesalahan data kolektibilitas nasabah restrukturisasi pada laporan LSMK dan SLIK karena banyak data tidak terisi
BSM	Oct-20	Feb-21	BI	Surat BI 23/38/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tgl. 8 Februari 2021	LHBU	50.000	GMG	Keterlambatan Penyampaian Koreksi LHBU Form 201 (sandi non Bank Pembeli) untuk tanggal laporan 16 Oktober 2020
BSM	Jan-21	Feb-21	BI	Surat BI 23/28/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tgl. 8 Februari 2021	LHBU	1.000.000	ALM	Tidak menyampaikan laporan LHBU Form Header 407 untuk tanggal laporan 6 Januari 2021
BSM	2000 - 2019	Feb-21	Dirjen Pajak	Hasil Pemeriksaan Dirjen Pajak	Pajak	25.326.480	CFA	Pembayaran Tunggakan Pajak Cabang untuk 102 Cabang ex BSM (Pemberitahuan dari Dirjen Pajak atas pengajuan Surat Keterangan Fiskal BSI)
BRIS	Jan-21	Feb-21	Kemenkeu	Instruksi Dirjen Perbendaharaan - Pengelolaan Kas Negara	SBSN	22.629.637	AFD	Keterlambatan Pendebetan Dana SBSN Tanggal 8 Januari 2021

BANK LEGACY	PERIODE		REGULATOR	REFERENSI	JENIS PELANGGARAN	NOMINAL (RP)	UNIT KERJA (GIC)	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
	LAPORAN	PEMBEBANAN						
BNIS	Mar & Juni 2020	Mar-21	OJK	Surat OJK S-5/ PB.3401/2021 Tgl. 8 Februari 2021	SLIK	21.900.000	ELO BNIS & FOG	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK untuk bulan lapor - Maret 2020 (utk 2 debitur selama 19 HK) - Juni 2020 (utk 40 debitur selama 35 HK)
BSM	Mar-21	Mar-21	Dirjen Pajak	Hasil Pemeriksaan Dirjen Pajak	Pajak	2.711.896	CFA	Pembayaran Tunggakan Pajak Cabang untuk 13 Cabang ex BSM (Pemberitahuan dari Dirjen Pajak atas pengajuan Surat Keterangan Fiskal BSI)
BSM	Apr-21	Apr-21	Dirjen Pajak	Hasil Pemeriksaan Dirjen Pajak	Pajak	131.884	CFA	Pembayaran Tunggakan Pajak Cabang untuk 1 (satu) cabang ex BSM (Pemberitahuan dari Dirjen Pajak atas pengajuan Surat Keterangan Fiskal BSI)
BSM	Feb-20	Jun-21	OJK	Surat OJK S-13/ PB.3401/2021 Tgl. 25 Mei 2021	SLIK	50.000	FOG	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan SLIK untuk periode Laporan Bulan Februari 2020 sebanyak 1 Debitur
BSM	Jun-21	Jun-21	Dirjen Pajak	Hasil Pemeriksaan Dirjen Pajak	Pajak	200.000	CFA	Keterlambatan Pembayaran/ Pelaporan Pajak PPh 21 Untuk Cabang ex-BSM (Pemberitahuan dari Dirjen Pajak atas pengajuan Surat Keterangan Fiskal BSI)
BSM	Jun-21	Jun-21	Dirjen Pajak	Hasil Pemeriksaan Dirjen Pajak	Pajak	641.595	CFA	Keterlambatan Pembayaran/ Pelaporan Pajak PPh 21 Untuk Cabang ex-BSM (Pemberitahuan dari Dirjen Pajak atas pengajuan Surat Keterangan Fiskal BSI)

BANK LEGACY	PERIODE		REGULATOR	REFERENSI	JENIS PELANGGARAN	NOMINAL (RP)	UNIT KERJA (GIC)	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
	LAPORAN	PEMBEBANAN						
BNIS	Feb-21	Jun-21	BI	Surat BI No.23/98H/ DPKL-GPLB/Srt/ Rhs Tgl. 31 Mei 2021	LSMK	200,000,000	DSG, ELO BNIS	Tidak menyampaikan Laporan LSMK periode data bulan Februari 2021 untuk 4 cabang ex BNIS (KC BNIS Sigli, KC BNIS Langsa, KC BNIS Meulaboh dan KC BNIS Bireun).
BSM	Jan-Des 2020	Aug-21	BI	Surat BI No.23/3/DUPK/ Srt/Rhs Tgl. 29 Juli 2021	UMKM	-	ex BSM	Rasio Penyaluran Pembiayaan UMKM Posisi Desember 2020 tidak mencapai 20% (tercatat sebesar 14,16%) untuk ex legacy BSM
BNIS	Jan-Des 2020	Aug-21	BI	Surat BI No.23/3/DUPK/ Srt/Rhs Tgl. 29 Juli 2021	UMKM	-	ex BNIS	Rasio Penyaluran Pembiayaan UMKM Posisi Desember 2020 tidak mencapai 20% (tercatat sebesar 19,97%) untuk ex legacy BNIS
BSM	Jan-21	Aug-21	BI	Surat BI No.23/216/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tgl. 19 Agustus 2021	LHBU	750.000	ALM	Keterlambatan penyampaian Laporan LHBU Form 407 sebanyak 3 (tiga) data untuk tanggal lapor 6 Januari 2021
BSM	Nov-20	Aug-21	OJK	Surat OJK No.S-372/ EP.121/2021 Tgl. 12 Agustus 2021	Pengaduan Nasabah	3.100.000	CCG, KCP Cikini	Keterlambatan penyampaian tanggapan atas permintaan dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa selama 31 (tiga puluh satu) hari. (seharusnya disampaikan tgl. 13 Nov'20 tapi baru dipenuhi tgl. 14 Des'20)
BSM	Dec-18	Aug-21	Kementerian PUPR	Surat Kementerian PUPR No.KU 0604-Pg.2/1971 Tgl. 14 Juli 2021	FLPP	437.922	CF1	Keterlambatan Pembayaran Pengembalian Pokok Dana FLPP untuk periode Desember 2018
BSM	Jun-21	Aug-21	BI	Surat BI No.23/51/DPSP-GOSP-KIM/Srt/B Tgl. 23 Juli 2021	SKNBI	101.000	CTG, KCP Sabang Aceh	Kesalahan Penggunaan Kode Sandi Transaksi TSA 51-52 di KCP Sabang Aceh

BANK LEGACY	PERIODE		REGULATOR	REFERENSI	JENIS PELANGGARAN	NOMINAL (RP)	UNIT KERJA (GIC)	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
	LAPORAN	PEMBEBANAN						
BSI	4-Dec-21	24-Dec-21	OJK	S-882/ PM.112/2021	Transaksi Efek Pasar Modal	10.000	CSG, TGM	Keterlambatan penyampaian laporan data transaksi Efek untuk periode laporan September 2021 dengan total keterlambatan L1 (BSI sebagai Partisipan Seller) sebanyak 1 Jam
Total Sanksi Denda Regulator 2021						**1.778.840.414**		

HUBUNGAN INVESTOR

Bank Syariah Indonesia telah membentuk suatu unit kerja bernama Hubungan Investor atau *Investor Relations*. Melalui unit kerja ini, Bank diharapkan mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta menjadi media penghubung antara Bank dengan entitas pasar modal.

Melalui penyediaan data yang tepat dan akurat, Bank berupaya membantu para pelaku pasar modal dalam proses pengambilan keputusan investasi di Bank. Informasi terkait strategi, kinerja operasional, dan kinerja keuangan yang disajikan akan bermanfaat sebagai bahan membentuk persepsi dan ekspektasi investor maupun calon investor

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab *Investor Relations* dalam organisasi BSI meliputi:

1. Memperkenalkan BSI sebagai bank hasil merger kepada pelaku pasar modal.
2. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerja sama dengan konstituen dari pasar modal Indonesia, antara lain *fund managers*, *buy-side* & *sell-side analysts*, *stock broker*, *investments bankers*, dan *rating agencies*.
3. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham BSI. Informasi tersebut meliputi: *Quarterly Earnings Call*, *Investor Conference*, *Teleconference*, *Web-Casts*, IR *Website*, *Broker Sponsorship*, *Road Show* & *Non-Deal Road Show* baik Lokal maupun internasional.
4. Mewakili manajemen dalam pertemuan dengan para analis dan investor, baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
5. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
6. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Saluran Komunikasi

BSI telah menyediakan saluran komunikasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berhubungan dengan *Investor Relations* terkait dengan informasi Bank. Rincian saluran informasi tersebut adalah:

Investor Relations Group

Gd. The Tower Jl. Gatot Subroto No 27 Kel Karet Kuningan
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12190 INDONESIA

Website Hubungan Investor: www.ir.bankbsi.co.id
Email: investor-relations@bankbsi.co.id

Realisasi Kegiatan Tahu Buku

Sepanjang tahun buku 2021, *Investor Relations* telah merealisasikan sejumlah aktivitas, yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Kegiatan Investor Relation Tahun 2021

NO.	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	JUMLAH	TANGGAL	TOPIK PEMBAHASAN	LOKASI
1	*Public Expose*	Pemaparan umum dari Perusahaan Tercatat kepada publik untuk menjelaskan kinerja serta informasi lainnya mengenai Perusahaan Tercatat, dengan tujuan agar informasi tersebut tersebar secara merata kepada publik.	1	9 September 2021	· Indonesia Macroeconomic & Banking Industry · BSI Business Strategy · Financial Highlight · Digital Update · Aknowledgments & Target Guidance	Jakarta (Zoom Meeting)
2	*Adhoc Investor Meeting/ Teleconference*	Pemutakhiran informasi kinerja Bank.	27	· 5 Februari 2021 · 5 Februari 2021 · 5 Februari 2021 · 5 Februari 2021 · 19 Februari 2021 · 24 Maret 2021	Post Merger Corporate Update	Jakarta
				· 11 Mei 2021 · 21 Mei 2021 · 4 Juni 2021 · 10 Juni 2021 · 16 Juni 2021 · 24 Juni 2021 · 30 Juni 2021 · 8 Juli 2021 · 12 Juli 2021	Q1'2021 Corporate Update	Jakarta
				· 5 Agustus 2021 · 9 Agustus 2021 · 19 Agustus 2021 · 30 Agustus 2021 · 21 September 2021	1H'2021 Corporate Update	Jakarta
				· 10 November 2021 · 16 November 2021 · 18 November 2021 · 7 Desember 2021 · 14 Desember 2021 · 21 Desember 2021 · 28 Desember 2021	9M'2021 Corporate Update	Jakarta
3	*Virtual investor Conference*	Konferensi virtual terkait pemutakhiran kinerja Bank.	2	12 Agustus 2021	1H'2021 Corporate Update	Jakarta dan Hong Kong
4	*Corporate Update*	Pertemuan di lokasi kantor calon pemegang saham untuk pemutakhiran kinerja Bank.	2	4 November 2021	Courtesy Meeeting	Dubai

Kegiatan Investor Relation Tahun 2021

NO.	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	JUMLAH	TANGGAL	TOPIK PEMBAHASAN	LOKASI
5	*Earning Call/ Analyst Meeting*	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan kepada investor dan analis.	3	10 Mei 2021	• Macroeconomic & Industry • Q1-2021 Financial Highlight • Digital & Social Updates • Company 2021: Strategy & Guidance	Jakarta (Zoom Meeting)
				30 Juli 2021	• Indonesia Macroeconomic & Banking Industry • BSI Business Strategy • 1H-2021 Financial Highlight • Digital Update • Aknowledgments & Target Guidance	Jakarta (Zoom Meeting)
				29 Oktober 2021	• Macroeconomic & Banking Industry • What We Have Done Since Legal Merger • Financial Highlight Building • Sustainable Business • Aknowledgments & Target Guidance	Jakarta (Zoom Meeting)
6	*Review Meeting* dengan *Rating Agencies*	Pertemuan Bank dengan *rating agencies* untuk pemutakhiran peringkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk setiap tahun.	4	12 Oktober 2021	Annual Rating Review - Site Visit	Jakarta
				26 Oktober 2021	Annual Rating Review - Management Meeting	Jakarta
				2 Desember 2021	Annual Rating Review	Jakarta
				7 Desember 2021	Annual Rating Review	Jakarta
7	*Factory Visit*	Pertemuan dengan analis di lokasi Bank.	1	11 November 2021	Courtesy Meeting	Jakarta
8	*Investor Gathering*	Pertemuan antara Bank dengan Investor / Analis dalam proses pertukaran informasi dan Pemutakhiran kinerja Perusahaan	1	4 Maret 2021	Post merger Corporate Update	Jakarta (Zoom Meeting)

Kegiatan Investor Relation Tahun 2021

NO.	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	JUMLAH	TANGGAL	TOPIK PEMBAHASAN	LOKASI
9	RUPST	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	1	6 Mei 2021	1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan yaitu BSM, BNIS, dan BRIS, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. 5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI. 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Jakarta
10	RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	1	24 Agustus 2021	Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	Jakarta

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Syariah Indonesia senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti regulasi di pasar modal tentang keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan oleh Bank berupa posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan yang tersedia laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim hingga siaran pers dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan seluruh materi informasi tersebut untuk menganalisis kinerja Bank.

Seluruh informasi diperbarui secara berkala untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Pemegang Saham dan otoritas pasar modal melalui beragam saluran komunikasi. Penyampaian informasi berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan merata antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan.

Siaran Pers

Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh BSI sepanjang tahun 2021.

NO.	TANGGAL	JUDUL SIARAN PERS
1	7 Februari 2021	Migrasi Bank Syariah Indonesia
2	13 Februari 2021	Pembiayaan Griya BSI
3	10 Februari 2021	Pembukaan KCP Rembang
4	11 Februari 2021	Rating Pefindo Bank BSI
5	15 Februari 2021	Kapitalisasi Pasar BRIS
6	17 Februari 2021	Kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia
7	17 Februari 2021	Dewan Masjid Indonesia
8	22 Februari 2021	Pembiayaan Sindikasi Proyek Preservasi Jalintim Sumatera
9	22 Februari 2021	Bantuan Warga Banjir
10	24 Februari 2021	*Launching Modest Fashion Faounders Fund* 2021
11	25 Februari 2021	BSI Masuk Emiten Berkapitalisasi Pasar Terbesar
12	25 Februari 2021	Penghargaan dari Rumah Zakat
13	1 Maret 2021	Kerja Sama dengan UNHCR
14	3 Maret 2021	Kerja Sama dengan Dubai Islamic Bank
15	7 Maret 2021	Promo BSI Griya Hasanah
16	8 Maret 2021	Promo BSI Oto
17	14 Maret 2021	Kerja Sama Lembaga Riset Perguruan Tinggi Ekraf
18	16 Maret 2021	Kerja Sama BSI Kemenparekraf Terkait Pembiayaan UMKM Pariwisata dan Ekraf
19	16 Maret 2021	Penerbitan Sukuk SR014
20	18 Maret 2021	BSI Dorong Digitalisasi Transaksi di Rest Area Tol Cipali
21	23 Maret 2021	BSI Gandeng Kemenko Perekonomian Tingkatkan Literasi ke Pemuda Muhammadiyah

NO.	TANGGAL	JUDUL SIARAN PERS
22	23 Maret 2021	BSI Jalin Sinergi Jamkrindo Syariah untuk Penjaminan Pembiayaan Kepemilikan Emas
23	25 Maret 2021	Bank Syariah Indonesia Cetak Pewirausaha Milenial Lewat Beasiswa Inkubator Bisnis
24	26 Maret 2021	Bank Syariah Indonesia Implementasikan Digitalisasi Keuangan di Lingkungan Masjid
25	26 Maret 2021	Sarasehan Ekonomi Syariah Jawa Timur
26	26 Maret 2021	Penandatanganan Akad Pembiayaan Yayasan Nizamia Andalusia
27	26 Maret 2021	Dukungan BSI terhadap Qanun LKS
28	31 Maret 2021	*Roll Out* Makassar BSI
29	4 April 2021	Nota Kesepahaman MUI PBNU
30	9 April 2021	penghargaan dari iNews dalam acara iNews Maker Awards 2021
31	9 April 2021	BSI Hasanah Card Gandeng Bukalapak
32	13 April 2021	BSI Gelar Akad Massal 1.500 Nasabah Program KPR Sejahtera
33	14 April 2021	BSI Salurkan Pembiayaan KPR Rp38 triliun
34	15 April 2021	BAZNAS dan Bank Syariah Indonesia Sinergi Kelola Zakat
35	16 April 2021	IIMS 2021 Digelar, BSI Gencarkan Pembiayaan Oto
36	17 April 2021	Bank Syariah Indonesia Gelar *Virtual Exhibition*
37	20 April 2021	BSI Lanjutkan Penyatuan Operasional Sistem Layanan di Area Manado
38	21 April 2021	BSI Perkuat Peran Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah
39	25 April 2021	BSI Catat Volume Transaksi Digital Tembus Rp40,85 Triliun, BSI Mobile Naik 82%
40	27 April 2021	BSI Dorong Pelaku Usaha Mikro Untuk Go Digital
41	29 April 2021	BSI Ambil Peran Penting dalam Optimalisasi ZISWAF di Indonesia
42	30 April 2021	BSI Sediakan Layanan Perbankan Bagi Mahkamah Konstitusi
43	2 Mei 2021	BSI dan BPH Migas Berikan Pembiayaan Pertashop
44	3 Mei 2021	Tingkatkan Kerja Sama Bisnis, BSI Gandeng PT KAI dan Anak Usaha Jasa Marga
45	4 Mei 2021	Persiapan Roll-Out di Provinsi Aceh, BSI Lakukan Konsolidasi Internal dan Eksternal
46	5 Mei 2021	BSI dan Kemenparekraf Bersinergi Dorong UMKM Sektor Pariwisata Naik Kelas
47	6 Mei 2021	Bank BSI Catat Laba Rp742 miliar Naik 12,85% di Triwulan I-2021
48	7 Mei 2021	Sasar Nasabah Milenial, BSI Luncurkan Griya Simuda
49	10 Mei 2021	Dukung *Green Campus*, Bank Syariah Indonesia Fasilitasi *Water Station* di IPB
50	10 Mei 2021	Sinergi BSI dan Sinarmas Land Dorong Pertumbuhan Sektor Properti
51	21 Mei 2021	Siaran Pers Sambut Lebaran Idul Fitri 1442 H, BSI Siapkan Dana Rp6,37 Triliun
52	20 Mei 2021	Siaran Pers Optimalkan Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah, Bank Syariah Indonesia Resmikan UPZ
53	25 Mei 2021	BSI Migrasikan 1,18 Juta Rekening, Perluas Layanan di Semarang Raya, Solo, Yogyakarta dan Purwokerto
54	26 Mei 2021	Forbes Nobatkan BSI Sebagai *The World's Best Banks* 2021
55	27 Mei 2021	Bank Syariah Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II–2021 Dekati 5%
56	31 Mei 2021	Perkuat Inklusi Keuangan Syariah, BSI Fasilitasi Layanan Perbankan Syariah Untuk PLN
57	3 Juni 2021	BSI Salurkan Pembiayaan Sindikasi Rp693,83 Miliar Untuk Bangun Rel Kereta Api Makassar-Parepare
58	4 Juni 2021	BSI Berkolaborasi dengan MES dan Pertamina Salurkan Pembiayaan Pertashop Untuk Pesantren
59	5 Juni 2021	BSI Gandeng BPRS Kembangkan Ekosistem Digital Syariah
60	11 Juni 2021	Bank Syariah Indonesia Buka Program ODP dan Literasi Keuangan Syariah
61	15 Juni 2021	Bank Syariah Indonesia: Aceh Sokong 8% Pangsa Pasar Syariah Nasional
62	17 Juni 2021	Bank Syariah Indonesia: Prospek Perbankan Syariah Tumbuh di 2021

NO.	TANGGAL	JUDUL SIARAN PERS
63	18 Juni 2021	Bank Syariah Indonesia Bersama Peruri Berkolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia
64	19 Juni 2021	BSI Pimpin Pembiayaan Sindikasi Syariah Senilai Rp 1,8 Triliun di Proyek KPBU Tol Serang Panimbang
65	20 Juni 2021	BSI dan UGM Perkuat Literasi Keuangan Syariah
66	21 Juni 2021	BSI Siap Kelola Rekening Anggota POLDA Banten
67	22 Juni 2021	Bank Syariah Indonesia Fasilitasi Produk dan Layanan Perbankan Syariah untuk MUI
68	24 Juni 2021	Fitur Terbaru Biometrik, Buka Rekening di BSIMobile Kini Kurang dari 5 Menit
69	25 Juni 2021	Hari UMKM Internasional, BSI & Shopee Gelar Pelatihan *Go Digital*
70	29 Juni 2021	Press Relese BSI Boyong 5 Penghargaan dari InfoBank *Banking Service Excellence Award* 2021
71	6 Juli 2021	Dukung Penerapan PPKM Darurat, BSI Ubah Skema Migrasi Nasabah
72	7 Juli 2021	*Resilience* Saat Pandemi, Performa Bank Syariah Tetap Stabil dan Positif
73	9 Juli 2021	Gerakan Ekonomi Hijau, BSI dan Plasticpay Luncurkan *Vending* Mesin Sampah Plastik
74	10 Juli 2021	BSI Muda gandeng Warnas.id Bagikan 200 Paket Isoman di Tanah Abang Jakarta
75	12 Juli 2021	Berita Foto Sedekah Virtual untuk Negeri
76	13 Juli 2021	BSI Dukung Literasi Keuangan Syariah untuk *Baitul Maal Wat Tamwil*
77	14 Juli 2021	Cukup Pakai BSI Mobile, Tarik Tunai Kini Kian Mudah
78	15 Juli 2021	Jadi Bank Penerima Setoran,BSI Tingkatkan Layanan & Dorong Generasi Muda Berhaji
79	21 Juli 2021	Idul Adha 1442H: BSI Salurkan Lebih Dari 3.000 Hewan Kurban
80	21 Juli 2021	BSI Lakukan Auto Migrasi Untuk Nasabah ex-BRIS
81	23 Juli 2021	BSI Siap Salurkan Bantuan Sosial Nontunai Tahun 2021 di Provinsi Aceh
82	24 Juli 2021	Percepat Target Herd Immunity, BSI Gelar Vaksinasi Masjid ke Masjid
83	29 Juli 2021	Dirut BSI Raih Gelar Doktor Ungkap 3 Variabel Penting yang Pengaruhi Kinerja *Private Wealth Management*
84	2 Agustus 2021	BSI Gandeng Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
85	5 Agustus 2021	BSI Fasilitasi Kementerian Desa Terkait Produk dan Layanan Perbankan
86	9 Agustus 2021	Gandeng BMT Nusantara, BSI Terus Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah
87	9 Agustus 2021	BSI Lakukan Auto Migrasi Untuk Nasabah ex-BNIS
88	11 Agustus 2021	Permudah Pengiriman Uang Antar Negara, BSI Gandeng Western Union
89	12 Agustus 2021	BSI: Nasabah ex-BNIS Dapat Mengaktifkan BSI Mobile Untuk Transaksi
90	13 Agustus 2021	BSI Berkomitmen Dukung UMKM Lewat Program ISDP 2020
91	18 Agustus 2021	Perkuat Penetrasi, BSI Buka Kantor Layanan di Kementerian PUPR
92	19 Agustus 2021	BSI Fasilitasi Layanan Perbankan Syariah DJKN Kementerian Keuangan
93	20 Agustus 2021	Sinergi dan Kolaborasi Sebagai Strategi BSI Berkomitmen Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
94	23 Agustus 2021	*E-Commerce* dan *E-Wallet* Dorong Peningkatan Transaksi *BSI Mobile*
95	24 Agustus 2021	RUPSLB BSI, Sepakati Perubahan Susunan Dewan Komisaris
96	25 Agustus 2021	Gelar Akad Massal KPR Sejahtera, BSI Targetkan Penyaluran Rp1,1 Triliun
97	1 September 2021	BSI, Bank Hasil Merger Untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah
98	2 September 2021	Kemensos dan BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh
99	3 September 2021	Kemensos dan BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh
100	4 September 2021	Peringati Hari Pelanggan, Bank Syariah Indonesia Perkuat *Ultimate Service* melalui Transformasi Digital
101	4 September 2021	Perkuat Literasi, BSI Kenalkan Perbankan Syariah ke Mahasiswa UNPAD
102	10 September 2021	BSI Fasilitasi Layanan Perbankan Syariah UNS
103	14 September 2021	Bank Syariah Indonesia Operasikan Kantor Cabang The Tower

NO.	TANGGAL	JUDUL SIARAN PERS
104	16 September 2021	Bank Syariah Indonesia Raih Penghargaan Bisnis Indonesia *Award*
105	23 September 2021	BSI dan 5 Perguruan Tinggi Sepakat Kerjasama Tingkatkan Literasi Perbankan Syariah
106	23 September 2021	Penandatangan Kerja Sama Produk dan Layanan BSI dan PT PNM (Persero) Tbk
107	29 September 2021	Perkuat Literasi Syariah di NTB, Bank Syariah Indonesia Gelar BOD Teaching di Universitas Mataram
108	30 September 2021	BSI dan DMI Jalin Kerjasama Untuk Optimalkan Peran Masjid di Indonesia
109	1 Oktober 2021	BSI Jadikan Mobile Banking Sebagai Lokomotif Pengembangan Ekonomi Syariah
110	7 Oktober 2021	Bank Syariah Indonesia Dukung PT Pupuk Iskandar Muda Dalam Pembiayaan Sindikasi Senilai Total Rp1,1 Triliun
111	13 Oktober 2021	BSI Luncurkan Cobranding Debit *Member Card* Untuk Santripreneur Indonesia
112	13 Oktober 2021	Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah,1123 Mahasiswa 5 Kampus Ternama Ikuti SSBM BSI
113	18 Oktober 2021	Bank Syariah Indonesia Gandeng BPD Perluas Penetrasi Syariah di Daerah
114	19 Oktober 2021	Bank Syariah Indonesia dan Kemenag Salurkan Insentif Untuk Guru non PNS di Aceh
115	22 Oktober 2021	4.700 Agen BSI *Smart* Siap Layani Masyarakat Aceh
116	22 Oktober 2021	BSI Buktikan Kinerja Perbankan Syariah Cemerlang di Masa Pandemi
117	25 Oktober 2021	BSI Siap jadi Pendorong Utama Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia
118	26 Oktober 2021	BSI dan LAZNAS BSMU Bersinergi Tingkatkan SDM Pesantren Untuk Pacu Ekosistem Halal
119	29 Oktober 2021	Sokong Pembangunan Infrastruktur Daerah, BSI Salurkan Pembiayaan Sindikasi Jalin Sumatera
120	29 Oktober 2021	Fokus Pada Digitalisasi, Kinerja BSI Pasca Merger Makin Solid
121	29 Oktober 2021	BSI Gandeng BPM Istiqlal Optimalkan Fungsi Masjid Untuk Penguatan Ekonomi Umat
122	1 November 2021	Tasyakuran BSI Pecahkan Rekor MURI, Pemotongan 1300 Tumpeng Kue Tradisional se-Indonesia
123	1 November 2021	BSI Terus Berinovasi, Nasabah Bisa Ajukan Pembiayaan Mitraguna via *Online*
124	1 November 2021	Pasca *Single System*, BSI Yakin Kinerja dan Aset Perusahaan Semakin Besar
125	5 November 2021	BSI Dapatkan Izin Prisip Operasional di Dubai
126	12 November 2021	BSI Diadulat Sebagai *The Strongest Islamic Bank* 2021
127	18November 2021	Akses Pendaftaran Haji Lebih Cepat via BSI *Mobile*
128	18 November 2021	Gencarkan Literasi Perbankan Syariah, BSI Kerja Sama dengan POLRI
129	22 November 2021	Bidik Pangsa Pasar Otomotif Melalui BSI Otoshow
130	25 November 2021	Sinergi BSI dengan BPJS Kesehatan Tingkatkan Fasilitas Kesehatan
131	26 November 2021	LinkAja dan BSI Berkolaborasi, Hadirkan Kemudahan Digital Pacu Literasi Keuangan
132	29 November 2021	BSI Hasanah Card Perkuat Ekosistem Halal di Sektor Kuliner
133	2 Desember 2021	Bersinergi dengan Kimia Farma, BSI Luncurkan Penggunaan di Aceh
134	3 Desember 2021	BSI bersama BSMU Luncurkan Program BSI *Scholarship*
135	6 Desember 2021	BSI Kirimkan Relawan Medis ke Lokasi Terdampak Erupsi Semeru
136	6 Desember 2021	Ekspansif di Segmen Konsumer, BSI Pacu Pembiayaan Rumah Lewat *Platform* Digital
137	8 Desember 2021	Masuk Peringkat 5 Besar di Perbankan Nasional, BSI Catat Pertumbuhan tabungan 11,57%
138	9 Desember 2021	Torehkan Kinerja Cemerlang, BSI Raih 3 Penghargaan di Penghujung 2021
139	9 Desember 2021	Pacu Potensi Halal, BSI Harap Sinergi Perbankan Syariah Dengan Industri Kian Kuat

Analyst Meeting

NO.	NAMA KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	TOPIK PEMBAHASAN
1	*Earning Call/ Analyst Meeting*	Senin, 10 Mei 2021	*Zoom Meeting*	- *Macroeconomic & Industry* - *1-2021 Financial Highlight* - *Digital & Social Updates* - *Company 2021 Strategy & Guidance*
		Jumat, 30 Juli 2021	*Zoom Meeting*	- *Indonesia Macroeconomic & Banking Industry* - *BSI Business Strategy* - *1H-2021 Financial Highlight* - *Digital Update* - *Aknowledgments & Target Guidance*
		Jumat, 29 Oktober 2021	*Zoom Meeting*	- *Macroeconomic & Banking Industry* - *What We Have Done Since Legal Merger* - *Financial Highlight* - *Building Sustainable Business* - *Aknowledgments & Target Guidance*

Transparansi Penyampaian Laporan

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
1	6 Januari 21	23/011-3/TIG	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai Asset Under Custody PT Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2020
2	6 Januari 21	23/010-3/TIG	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2020
3	13 Januari 2021	23/080-3/DIR-TIG	OJK Departemen pengawasan pasar modal 2B	Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2020 PT Bank Syariah Mandiri Sebagai Bank Kustodian
4	2 Februari 2021	02/001-BSI/2021	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha BSM dan BNIS ke BRIS dan Perubahan Nama Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
5	3 Februari 2021	01/098-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Perubahan *Corporate Secretary*
6	3 Februari 2021	02/002-BSI/2021	OJK pasar modal dan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha BSM Dan BNIS Ke Dalam BRIS Serta Perubahan Nama BRIS Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
7	3 Februari 2021	02/003-BSI/2021	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
8	3 Februari 2021	02/004-BSI/2021	OJK pasar modal	Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi (hanya ke OJK Pengawas Pasar Modal)
9	5 Februari 2021	02/005-BSI/2021	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
10	5 Februari 2021	01/0005-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan Januari 2021
11	5 Februari 2021	01/037-3/CFS	OJK DLPM	Informasi Penggabungan dan Perubahan Nama Perusahaan
12	5 Februari 21	01/040-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Informasi Penggabungan dan Perubahan Nama Perusahaan

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
13	5 Februari 21	01/042-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode Januari 2021
14	5 Februari 21	01/043-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Januari 2021
15	5 Februari 21	01/044-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Penyampaian Administrator Responsible Officer (ARO) Aplo Bank Kustodi
16	10 Februari 2021	01/070-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Januari 2021
17	10 Februari 2021	01/069-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2021
18	11 Februari 2021	01/0008-3/DBG	ASPI	Penyampaian Informasi Penggunaan Sistem QRIS PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
19	11 Februari 2021	01/0008A-3/DBG	PTEN	Penyampaian Informasi Penggunaan Sistem QRIS PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
20	16 Februari 2021	01/417-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Perubahan Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik
21	23 Februari 2021	01/00020-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Data terkait Penerapan Open API PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
22	2 Maret 2021	01/0021-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian License Agreement PT Visa Worldwide Indonesia.
23	4 Maret 21	01/182-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode Februari 2021
24	4 Maret 21	01/183-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Februari 2021
25	9 Maret 2021	01/616.1-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pemeringkatan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016
26	9 Maret 2021	01/010-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Februari 2021
27	10 Maret 2021	01/124-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 28 Februari 2021
28	10 Maret 2021	01/125-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 28 Februari 2021
29	10 Maret 2021	01/0035-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode Februari 2021
30	10 Maret 2021	01/0036-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode Februari 2021
31	10 Maret 2021	01/0037-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (28 Februari 2021)
32	12 Maret 2021	01/129-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa terkait rencana Right Issue (permintaan penjelasan dari BEI)
33	15 Maret 2021	01/657-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 28 Februari 2021
34	17 Maret 2021	01/231-3/CFS	OJK DLPM	Penyampaian Tindak Lanjut Kedua Atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Kustodian
35	17 Maret 2021	01/232-3/CFS	OJK DLPM	Pengembalian Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank Syariah Mandiri
36	17 Maret 2021	01/234-3/CFS	OJK DLPM	Laporan Pengalihan

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
37	17 Maret 2021	01/235-3/CFS	OJK DLPM	Pengembalian Surat Tanda Terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat Atas Nama PT Bank Syariah Mandiri
38	17 Maret 2021	01/236-3/CFS	OJK DLPM	Laporan Mengenai Penyelesaian Hak dan Kewajiban Wali Amanat
39	19 Maret 2021	01/670-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Perubahan Komite Audit
40	22 Maret 2021	01/0024-3/DBG	Bank Indonesia	Laporan Tahunan Terkait Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) PT Bank Syariah Indoesia, Tbk
41	23 Maret 2021	01/719-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Pemberitahuan Rencana RUPST ke OJK Pasar Modal
42	29 Maret 2021	01/327-3/CFS	OJK DLPM	Dokumen Hasil Pendapatan Usaha Atas Kegiatan Bank Kustodian PT Bank Syariah Mandiri
43	29 Maret 2021	01/338-3/CFS	OJK DLPM	Pendapatan Usaha Atas Kegiatan Wali Amanat PT Bank Brisyariah Tbk
44	30 Maret 2021	01/148-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (pengumuman RUPST)
45	31 Maret 2021	01/099-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Informasi Perubahan Pengurus
46	31 Maret 2021	01/152-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan Tahunan
47	31 Maret 2021	01/148-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian bukti publikasi pengumuman RUPST ke OJK Pasar Modal
48	5 April 2021	01/0042-3/DBG	Bank Indonesia	Pelaporan Transaksi QRIS bulanan periode 01 Maret sd 31 Maret 2021
49	6 April 21	01/388-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai Asset Under Custody PT Bank Syariah Indonesia Periode Maret 2021
50	6 April 21	01/389-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Maret 2021
51	8 April 2021	01/168-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Maret 2021
52	8 April 2021	01/174-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Permintaan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik mengenai Tanggapan Surat OJK
53	9 April 2021	01/176-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Maret 2021
54	9 April 2021	01/022-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (Single Customer View) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Maret 2021
55	12 April 2021	01/818-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 31 Maret 2021
56	12 April 2021	01/0044-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode Maret 2021
57	12 April 2021	01/0045-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode Maret 2021
58	12 April 2021	01/0046-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (31 Maret 2021)
59	13 April 2021	01/0044-3/DBG	ASPI	Penyampaian laporan implementasi standar nasional teknologi chip domestik dan penerbitan logo nasional TW 1/2021
60	14 April 2021	01/182-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
61	14 April 2021	01/184-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Penyampaian Laporan Tahunan

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
62	15 April 2021	01/183-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Penyampaian bukti publikasi panggilan RUPST ke OJK Pasar Modal
63	21 April 2021	01/0048-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Desember 2020
64	21 April 2021	01/027-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode Tahun 2020
65	22 April 2021	01/876-3/DIR-CPG	OJK	Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG PT BSI Tbk tahun 2020 Konsolidasi
66	22 April 2021	01/877-3/DIR-CPG	Bank Mandiri	Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG PT BSI Tbk tahun 2020 Konsolidasi
67	28 April 2021	01/951-3/DIR-CPG	Bank Mandiri	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DymFK Periode Periode Triwulan I tahun 2021
68	4 Mei 21	01/522-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode April 2021
69	4 Mei 21	01/523-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode April 2021
70	5 Mei 2021	01/0061-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian laporan laporan kewajban kegiatan transaksi QRIS posisi bulan April 2021
71	6 Mei 2021	01/035-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode April 2021
72	7 Mei 2021	01/251-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2021
73	7 Mei 2021	01/253-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 30 April 2021
74	7 Mei 2021	01/256-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 31 Maret 2021
75	7 Mei 2021	01/1002-3/DIR-CFA	OJK	Penyampaian Bukti Guntingan Surat Kabar yang Memuat Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Periode 31 Maret 2021
76	7 Mei 2021	01/1003-3/DIR-CFA	OJK	Penyampaian Laporan Transaksi Antara Bank Dengan Pihak-Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Periode 31 Maret 2021
77	7 Mei 2021	01/0058-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode April 2021
78	7 Mei 2021	01/0059-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode April 2021
79	7 Mei 2021	01/0060-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (30 April 2021)
80	10 Mei 2021	01/1010-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Pengumuman ringkasan Risalah RUPST
81	10 Mei 2021	01/301-3/DIR-AMG	OJK	Tembusan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta
82	10 Mei 2021	01/1008-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 30 April 2021
83	11 Mei 2021	01/260-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
84	11 Mei 2021	01/1023-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi)
85	20 Mei 2021	01/1038-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi)
86	21 Mei 2021	01/607-3/CFS	Polri Tembusan OJK	Laporan Nihil Pemblokiran Serta Merta

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
87	31 Mei 2021	01/016-3/KOM	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris)
88	3 Juni 2021	01/017-3/KOM	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris)
89	3 Juni 2021	01/018-3/KOM	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris)
90	4 Juni 2021	01/1251-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
91	4 Juni 21	01/656-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode Mei 2021
92	4 Juni 21	01/657-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Mei 2021
93	7 Juni 2021	01/311-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Mei 2021
94	7 Juni 2021	01/309-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Mei 2021
95	7 Juni 2021	01/0106-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan Mei 2021
96	7 Juni 2021	01/040-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Mei 2021
97	7 Juni 2021	01/0067-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode Mei 2021
98	7 Juni 2021	01/0068-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode Mei 2021
99	7 Juni 2021	01/0069-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (31 Mei 2021)
100	10 Juni 2021	01/1184-3/DIR-RBD	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi)
101	11 Juni 2021	01/1198-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 31 Mei 2021
102	23 Juni 2021	01/021-3/KOM	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris)
103	30 Juni 2021	01/349-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dalam Rangka Program MESOP Tahap I Tahun 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
104	1 Juli 2021	01/368-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi (Permintaan penjelasan dari BEI)
105	5 Juli 2021	01/0173-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan Juni 2021
106	5 Juli 21	01/846-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode Juni 2021
107	5 Juli 21	01/845-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Juni 2021
108	5 Juli 21	01/850-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Tengah Tahunan Wali Amanat PT Bank Syariah Indonesia

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
109	7 Juli 2021	01/1284-3/DIR-CTO	OJK pasar modal dan BEI	Rencana Pemenuhan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa No.I-A
110	7 Juli 2021	01/024-3/KOM	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris)
111	7 Juli 2021	01/377-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 Juni 2021
112	8 Juli 2021	01/0182-3/DBG	ASPI	Penyampaian Laporan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip, Pemrosesan Transaksi Debet Domestik Dan Penerbitan Logo Nasional Triwulan-2/2021
113	8 Juli 2021	01/041-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Juni 2021
114	9 Juli 2021	01/378-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 30 Juni 2021
115	9 Juli 2021	01/1399-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Agenda RUPSLB tentang perubahan Susunan Dewan Komisaris ke OJK
116	9 Juli 2021	01/1405-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 30 Juni 2021
117	9 Juli 2021	01/0111-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode Juni 2021
118	9 Juli 2021	01/0112-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode Juni 2021
119	9 Juli 2021	01/0113-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (30 Juni 2021)
120	14 Juli 2021	01/0119-3/CFA	LPS	Penyampaian Perhitungan Premi Penjaminan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Semester II 2021
121	15 Juli 2021	01/1430-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2021
122	16 Juli 2021	01/025-3/KOM	OJK pasar modal dan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris)
123	16 Juli 2021	01/462-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Pemberitahuan Rencana RUPSLB (Pengumuman RUPSLB)
124	18 Juli 2021	01/462-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
125	28 Juli 2021	01/984-3/CFS	OJK	Laporan Nihil
126	30 Juli 2021	01/1494-3/DIR-CPG	OJK	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DymFK Periode Periode Semester I tahun 2021
127	30 Juli 2021	01/1490-3/DIR-PRI	OJK	Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Semester I tahun 2021 PT BSI Tbk
128	30 Juli 2021	01/1493/3-DIR-CPG	Bank Mandiri	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DymFK Periode Periode Triwulan II tahun 2021
129	30 Juli 2021	01/1495-3/DIR-CFA	OJK	Penyampaian Bukti Guntingan Surat Kabar yang Memuat Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Periode 30 Juni 2021
130	30 Juli 2021	01/1501-3/DIR-CFA	OJK	Penyampaian Laporan Transaksi Antara Bank Dengan Pihak-Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Periode 30 Juni 2021

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
131	2 Agustus 2021	01/514-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
132	2 Agustus 2021	01/506-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 30 Juni 2021
133	4 Agustus 2021	01/516-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Penyampaian bukti publikasi panggilan RUPSLB ke OJK Pasar Modal
134	4 Agustus 2021	01/0209-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan Juli 2021
135	4 Agustus 2021	01/1018-3/CFS	Polri Tembusan OJK	Laporan Nihil Pemblokiran Serta Merta
136	4 Agustus 21	01/1023-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode Juli 2021
137	4 Agustus 21	01/1024-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Juli 2021
138	6 Agustus 2021	01/531-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Transaksi Afiliasi
139	6 Agustus 2021	01/533-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Juli 2021
140	6 Agustus 2021	01/526-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Juli 2021
141	6 Agustus 2021	01/532-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
142	6 Agustus 2021	01/043-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Juli 2021
143	10 Agustus 2021	01/1577-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 31 Juli 2021
144	10 Agustus 2021	01/0128-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode Juli 2021
145	10 Agustus 2021	01/0129-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode Juli 2021
146	10 Agustus 2021	01/0130-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (31 Juli 2021)
147	10 Agustus 2021	01/0127-3/CFA	BI	Penyampaian Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) PT Bank Syariah Indonesia Tbk Secara Offline Bulan Laporan Juli 2021
148	12 Agustus 2021	01/0214-3/DBG	Bank Indonesia	Permohonan keikutsertaan Sandbox QR Code Pembayaran Antar Negara Indonesia – Thailand
149	16 Agustus 2021	01/0131-3/CFA	BI	Penyampaian Perbaikan Data Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Secara Offline Bulan Laporan Januari 2021 Bank Syariah Mandiri
150	20 Agustus 2021	01/1131-3/CFS	Polri Tembusan OJK	Laporan Nihil Pemblokiran Serta Merta
151	26 Agustus 2021	01/571-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Rencana Penyelenggaraan *Public Expose* Tahunan
153	26 Agustus 2021	01/573-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Pengumuman ringkasan Risalah RUPSLB
154	26 Agustus 2021	01/1652-3/DIR-CPG	OJK	Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Semester I tahun 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
155	30 Agustus 2021	01/582-3/CSG	OJK Pasar Modal dan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
156	1 September 2021	01/1685-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Perubahan Komite Audit
157	1 September 2021	01/1685-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Perubahan Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik
158	6 September 2021	01/605-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Penyampaian Materi *Public Expose* Tahunan
159	6 September 2021	01/601-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Agustus 2021
160	6 September 2021	01/599-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Perubahan *Corporate Secretary*
161	6 September 2021	01/0239-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan Agustus 2021
162	7 September 2021	01/602-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Agustus 2021
163	7 September 21	01/1277-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode Agustus 2021
164	7 September 21	01/1278-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Agustus 2021
165	7 September 2021	01/044-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Agustus 2021
166	7 September 2021	01/0138-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode Agustus 2021
167	7 September 2021	01/0139-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode Agustus 2021
168	7 September 2021	01/0140-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (31 Agustus 2021)
169	09 September 2021	01/1726-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 31 Agustus 2021
170	10 September 2021	01/620-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Perubahan Anggaran Dasar
171	13 September 2021	01/1723-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Permintaan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik mengenai Informasi Pengendali Perusahaan (permintaan dari OJK Pengawas Pasar Modal)
172	14 September 2021	01/628-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pemindahan Alamat Kantor Pusat PT Bank Syariah Indonesia Tbk
173	14 September 2021	01/629-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Hasil *Public Expose* Tahunan
174	14 September 2021	01/628-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Perubahan Alamat/Nomor Telepon/Fax/E-Mail/ Website/NPWP/NPKP (update alamat baru KP)
175	20 September 2021	01/678-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
176	5 Oktober 2021	01/0266-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan September 2021
177	5 Oktober 2021	01/0267-3/DBG	Bank Indonesia	Pelaporan Uji Coba Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran Sandbox QR Code Pembayaran Antar Negara Indonesia – Thailand.

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
178	5 Oktober 21	01/1472-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode September 2021
179	5 Oktober 21	01/1473-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode September 2021
180	6 Oktober 2021	01/045-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode September 2021
181	7 Oktober 2021	01/732-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 30 September 2021
182	8 Oktober 2021	01/0268-3/DBG	ASPI	Penyampaian Laporan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip, Pemrosesan Transaksi Debet Domestik Dan Penerbitan Logo Nasional Triwulan-3/2021
183	8 Oktober 2021	01/0269-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Tindak Lanjut Terhadap Komitmen dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
184	9 Oktober 2021	01/727-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 September 2021
185	11 Oktober 2021	01/2030-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 30 September 2021
186	13 Oktober 2021	01/0156-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (30 September 2021)
187	13 Oktober 2021	01/0157-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode September 2021
188	13 Oktober 2021	01/0158-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode September 2021
189	29 Oktober 2021	01/850-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 30 September 2021
190	29 Oktober 2021	01/2171-3/DIR-CPG	Bank Mandiri	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DymFK Periode Periode Triwulan III tahun 2021
191	29 Oktober 2021	01/2162-3/DIR-CFA	OJK	Penyampaian Bukti Guntingan Surat Kabar yang Memuat Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Periode 30 September 2021
192	29 Oktober 2021	01/2163-3/DIR-CFA	OJK	Penyampaian Laporan Transaksi Antara Bank Dengan Pihak-Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Periode 30 September 2021
193	1 November 2021	01/849-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material *Single System Operational* Bank
194	4 November 2021	01/862-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pemeringkatan Tahunan Sukuk Mudharabah Subordinasi 2016 (BSM)
195	4 November 21	01/1671-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode Oktober 2021
196	4 November 21	01/1672-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode Oktober 2021
197	5 November 2021	01/863-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Oktober 2021

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
198	5 November 2021	01/864-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Oktober 2021
199	5 November 2021	01/0307-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan Oktober 2021
200	5 November 2021	01/0308-3/DBG	Bank Indonesia	Pelaporan Uji Coba Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran Sandbox QR Code Pembayaran Antar Negara Indonesia – Thailand posisi Bulan Oktober 2021
201	8 November 21	01/1704-3/CFS	Polri Tembusan OJK	Laporan Nihil Pemblokiran Serta Merta
202	8 November 2021	01/060-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode Oktober 2021
203	8 November 2021	01/0172-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (31 Oktober 2021)
204	8 November 2021	01/0173-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode Oktober 2021
205	8 November 2021	01/0174-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode Oktober 2021
206	10 November 2021	01/2219-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 31 Oktober 2021
207	15 November 2021	01/2220-3/DIR-CSG	OJK pasar modal dan BEI	Permohonan Perubahan Kode Saham
208	23 November 2021	01/0360-3/DBG	OJK	Permohonan Audiensi Layanan Sinergi Pembukaan Rekening Oleh Bank Mandiri, BRI dan BNI
209	29 November 2021	01/2329-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tahun 2022
210	3 Desember 2021	01/0372-3/DBG	Bank Indonesia	Laporan Tahunan Terkait Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) *Payment Gateway*, Dompet Elektronik, *Switching, Property Channel*
211	6 Desember 2021	01/996-3/CSG	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 November 2021
212	6 Desember 2021	01/0376-3/DBG	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Kewajiban Kegiatan Transaksi QRIS posisi Bulan November 2021
213	6 Desember 2021	01/0377-3/DBG	Bank Indonesia	Pelaporan Uji Coba Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran Sandbox QR Code Pembayaran Antar Negara
214	6 Desember 21	01/1912-3/CFS	OJK Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Laporan Aktivitas dan Nilai *Asset Under Custody* PT Bank Syariah Indonesia Periode November 2021
215	6 Desember 21	01/1913-3/CFS	OJK Direktorat IKNB Syariah	Laporan Aktivitas Dana Jaminan PT Bank Syariah Indonesia Periode November 2021
216	6 Desember 2021	01/063-PER/DIR	LPS	Penyampaian Laporan SCV (*Single Customer View*) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode November 2021
217	7 Desember 2021	01/1922-3/CFS	Polri Tembusan OJK	Laporan Nihil Pemblokiran Serta Merta
218	7 Desember 2021	01/0228-3/CFA	LPS	Laporan Simpanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dengan Nominal Sampai Dengan Rp100 Juta Periode November 2021

NO.	TANGGAL MEMO/SURAT	NOMOR MEMO/SURAT	TUJUAN MEMO/SURAT	PERIHAL
219	7 Desember 2021	01/0226-3/CFA	LPS	Laporan Keuangan Bulanan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (30 November 2021)
220	7 Desember 2021	01/0227-3/CFA	LPS	Penyampaian Data Konsolidasi Rekening Per Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Periode November 2021
221	8 Desember 2021	01/997-3/CSG	OJK pasar modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 November 2021
222	8 Desember 2021	01/2441-3/DIR-CFA	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Periode 30 November 2021
223	9 Desember 2021	01/0381-3/DBG	Bank Indonesia	Laporan Tahunan Terkait Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) *Payment Gateway*, Dompet Elektronik, *Switching*, *Property Channel*
224	10 Desember 2021	01/2442-3/DIR-CFA	OJK pasar modal dan BEI	Penyampaian penjelasan mengenai Tanggapan Penelaahan Atas Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tengah Tahunan 2021 kepada OJK Pengawas Pasar Modal (memenuhi permintaan penjelasan dari OJK Pengawas Pasar Modal)
225	10 Desember 2021	01/2453-3/DIR-CFS	OJK Departemen pengawasan pasar modal 2B	Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian
226	13 Desember 2021	01/0382-3/DBG	Bank Indonesia	Penyamaian Dokumen Perjanjian Kerjasama Penggunaan Bank Indonesia Fast Payment Antara Bank Indonesia Dan Pt Bank Syariah Indonesia, Tbk
227	14 Desember 2021	01/1025-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dalam Rangka Program MESOP Tahap II Tahun 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
228	21 Desember 2021	01/943-3/DIR-AMG	OJK	Pengkinian Data Tahun 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
229	31 Desember 2021	01/1140-3/CSG	OJK pasar modal dan BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Sesuai ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memiliki kebijakan yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Gratifikasi merupakan salah satu tindakan terlarang yang dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *fraud* dan korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, BSI telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
b. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
c. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja *Compliance*

Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, *fraud* suap dan/atau gratifikasi

1. Jajaran Bank wajib melakukan penolakan atas gratifikasi pada kesempatan pertama yang terkait dengan jabatan penerima atau benturan kepentingan.
2. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan.
3. Pengembalian tersebut di atas wajib disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/*transfer* jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Pelapor wajib mengisi formulir gratifikasi secara lengkap dan benar, serta melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi disertai formulir yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung melalui *email* dengan alamat antibribery@bankbsi.co.id dan subjek "Pelaporan Gratifikasi" atau melalui aplikasi GRC Compas.
5. Penyampaian pelaporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
6. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reviu atas pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pelapor dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan penerimaan gratifikasi dan dokumen pendukung lengkap diterima.
7. Pelapor wajib mengambalikan barang/uang yang menjadi milik Bank kepada UPG paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keluarnya Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.

Program Pelatihan/Sosialisasi

Pelaksanaan program sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap pengendalian gratifikasi, sehingga tercipta budaya *awareness Anti Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2021, program yang telah direalisasikan adalah:

1. Program *Risk Awareness* dan *Anti Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui *email blast*, *desktop* komputer, poster, info grafis, video dan media lain. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
   a. Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary Group (CSG) melalui *email blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	MEDIA
1	Sosialisasi "*Say No to* Gratifikasi"	20 April 2021	*Website* perusahaan
2	Sosialisasi "*Say No to* Gratifikasi"	13 April 2021 07 Mei 2021	Instagram BSI
3	Sosialisasi "Larangan Penerimaan Hadiah untuk Seluruh Insan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk"	19 April 2021 07 Mei 2021	*Whatsapp blast*
4	Sosialisasi "Apa itu Gratifikasi"	30 Juni 2021	*Whatsapp blast*
5	Sosialisasi "Perbedaan Gratifikasi, Suap dan Pemerasan"	30 Juli 2021	*Whatsapp blast*
6	Sosialisasi "Gratifikasi yang Boleh Diterima"	30 September 2021	*Whatsapp blast*
7	Sosialisasi "Prinsip Pengendalian Gratifikasi	4 November 2021	*Whatsapp blast*

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	MEDIA
8	Sosialisasi "Komitmen Anti Penyuapan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk."	12 November 2021	*Website* perusahaan & *Email Blast – Employee Care*
9	Sosialisasi "Gratifikasi yang Dianggap Suap"	7 Desember 2021	*Email Blast – Employee Care*

2. Sosialisasi Anti Gratifikasi *(Laa Risywah)* kepada seluruh pegawai Bank untuk mengimplementasikan *Code of Conduct* dan komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Taujih Pekanan pada 19 Maret 2021 dengan narasumber K.H. Dr. Mohamad Hidayat, MBA, MH dan penyampaian *opening speech* oleh Tribuana Tunggadewi, Direktur Compliance & Human Capital.
   b. *Webinar* bekerja sama dengan BSI Corporate University dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi narasumber Sosialisasi Anti Gratifikasi yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
      - Batch I Knowledge Sharing Forum (KSF) dengan tema "Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi" pada 21 Juli 2021.

        Kegiatan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), *Senior Executive Vice President* (SEVP), Group Head/ setingkat dan Regional CEO (RCEO). *Opening speech* disampaikan oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi, sementara materi oleh Syarief Hidayat, Plt. Direktur Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK.
      - Batch II KSF Pengendalian Gratifikasi bersama KPK dengan tema "Peran *Leader* dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi" pada 18 Agustus 2021.

        Kegiatan dihadiri oleh peserta dari seluruh *Departement Head* (DH), *Area Manager* (AM), *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR), *Regional Business Control* (RBC), *Regional Business Control Manager* (RBCM), *Branch Manager* (BM)dan setingkat. *Opening speech* disampaikan oleh Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, sementara materi oleh Sugiarto, Group Head 5 Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
      - Batch III KSF Pengendalian Gratifikasi bersama KPK dengan tema "Bisnis Lancar, Hidup Berkah Tanpa Gratifikasi" pada 25 Agustus 2021.

        Kegiatan dihadiri oleh seluruh karyawan BSI. *Opening speech* oleh Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, sementara materi oleh Yulianto Sapto Prasetyo, Group Head 4 Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.

Realisasi Kegiatan Tahun 2021

Sepanjang tahu 2021, BSI telah melaksanakan sejumlah kegiatan berkenaan dengan penerapan kebijakan anti korupsi di lingkungan Bank. Rincian program/kegiatan serta realisasinya disajikan melalui tabel di bawah ini:

PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI/HASIL
Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh pegawai organik PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. bekerja sama dengan *Distribution Strategy Group* (DSG), *Human Capital Services* (HCS), *Human Capital Business Patner* (HCBP) 1 dan 2.	Berdasarkan data per tanggal 08 Desember 2021, pegawai organik yang telah menandatangani Pakta Integritas sebanyak 18.603 orang. Sebanyak 892 orang belum menandatangani Pakta Integritas yang terdiri dari 557 orang pegawai Kantor Pusat dan 335 orang pegawai non Kantor Pusat.
Sosialisasi dan pemasangan Poster Komitmen GCG di setiap Unit Kerja bekerja sama dengan *Corporate Secretary Group* (CSG) dan *Distribution Strategy Group* (DSG).	Saat ini poster digital telah didistribusikan ke seluruh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, sedangkan untuk pemasangan poster digital di seluruh unit kerja Kantor Pusat akan dipasang setelah proses relokasi Kantor Pusat selesai.
Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Standar ISO 37001:2016 telah diimplementasikan pada ruang lingkup proses pengadaan barang atau jasa di Procurement Group

KODE ETIK

Kode etik atau *Code of Conduct* merupakan pedoman internal perusahaan yang berisi tentang sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Kode etik menjadi standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta saat hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.

Sasaran umum pedoman perilaku adalah menyusun suatu petunjuk agar setiap pelanggaran *Code of Conduct* dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi. Industri perbankan merupakan bisnis yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan publik serta dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab.

Perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama jajaran Bank. Ketentuan mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank.

Code *of Conduct* (Pedoman Perilaku)

a. Tujuan

Penyusunan *Code of Conduct* bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/ calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.

b. Fundamental BSI

Dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*, jajaran Bank harus berlandaskan kepada fundamental Bank. Saat ini, fundamental dimaksud adalah *The 7 (Seven) Fundamentals of* BSI yang terdiri atas: *Spiritual Foundation*, *Vision*, *Mission*, *Shared Value*, *Employee Value Proposition*, *Leadership Characteristic, and Tagline* yang diatur dalam ketentuan internal BSI.

c. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terwujudnya visi, misi, dan fondasi spiritual perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dapat diartikan sebagai *shared values*, sedangkan perilaku dan tindakan adalah aktivitas dan interaksi dengan *stakeholders* yang sesuai dengan *shared values* tersebut.

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

   Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

   a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
   b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus lainnya untuk:
      i) dirinya sendiri;
      ii) keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
      iii) perusahaan dimana yang bersangkutan dan/ atau keluarganya mempunyai kepentingan.
   c. Hubungan keluarga/kerabat dengan Jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
   d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
   e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/ atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
   f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
   g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri diluar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Larangan *Risywah*

   Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.
3. Kerahasiaan

   Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyalahgunaan Jabatan
   Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya darikegiatan bisnis Bank.
5. Perilaku *Insiders*
   Insiders yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
   Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
7. Integritas Sistem Perbankan
   Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat menggangu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
   Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama Jajaran Bank pada Bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja Human Capital memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
9. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
   Berkaitan dengan pelaksanaan Code of Conduct Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai formulir yang telah ditentukan (lampiran).
10. Pengawasan, Pelaksanaan dan Pemutakhiran
    Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Code of Conduct tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.
11. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
    Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pokok-pokok Kode Etik

Kode etik yang diberlakukan di lingkungan BSI, antara lain mengatur tentang:

1. Benturan Kepentingan
2. Larangan *Risywah*
3. Kerahasiaan
4. Penyalahgunaan Jabatan
5. Perilaku Insiders
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
7. Integritas Sistem Perbankan
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
9. Pernyataan Tahunan
10. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
11. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik Bank telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal Bank, seperti Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Tahun 2021-2023 (PP BSI) serta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet (sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas dan dukungan atas program *sustainable finance*).

Penyebarluasan atau sosialisasi kode etik bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Program sosialisasi yang telah berjalan secara berkala adalah "Taujih Pekanan". Program tersebut menjadi sarana bagi manajemen Bank dalam menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yakni AKHLAK sebagai *core values* bagi pegawai BSI. Melalui kegiatan ini, pegawai BSI diharapkan selalu berada di koridor yang benar, sejalan dengan kode etik Bank. Kode etik juga disebarkan dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Komitmen penerapan kode etik, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pembinaan disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, antara lain melalui sanksi yang berjenjang:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
   a. Surat Teguran Satu (ST 1)
   b. Surat Teguran Dua (ST 2)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
   a. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
   b. Surat Peringatan Dua (SP 2)
   c. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
   a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
   b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Bank selalu menindaklanjuti peristiwa yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank, seperti pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tindak lanjut ditetapkan dari hasil

investigasi yang merupakan peristiwa yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menindak pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank melakukannya secara tegas dan obyektif. Adapun jenis kasus atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai terdiri dari 2 (dua) jenis kasus, yaitu kasus audit dan kasus non-audit.

Adapun data pelanggaran kode etik baik dalam ketentuan internal Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS SANKSI	KATEGORI SANKSI	JUMLAH SANKSI
1	SPNS	Ringan	3
2	ST 1		7
3	ST 2	Sedang	29
4	SP 1		44
5	SP 2		25
6	SP 3		12
7	SPT	Berat	0
8	PHK		46
Total			**166**

PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

BSI menyadari bahwa *fraud* dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank dan memengaruhi reputasi Bank. Selain itu, *fraud* dapat berdampak terhadap produktivitas kerja jajaran Bank maupun kelangsungan usaha Bank secara keseluruhan. Karena itu, pegawai harus berpartisipasi aktif sebagai penyampai informasi awal melalui *whistleblowing system* atas indikasi *fraud* yang terjadi.

Prinsip Pelaporan

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
    a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
    b. Pihak-pihak yang terlibat;
    c. Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
    d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
    e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
    f. Kronologis penyimpangan
2. Untuk mempercepat proses audit, pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
    a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notarial.
    b. Keterangan tertulis saksi.
    c. Keterangan tertulis pelaku.
    d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll

    Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu :
    a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
    b. Nomor telepon atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
4. Kewajiban Pelaporan
    a. Setiap pihak internal Bank wajib untuk melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi dilingkungan atau menggunakan sarana Bank.
    b. Setiap pihak internal Bank yang mengetahui dugaan tindakan penyimpangan, namun tidak melaporkan atau melindungi Pelaku, maka dapat dikenakan pelanggaran kedisiplinan pegawai.
5. Saluran Pelaporan

    Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:
    a. Whatsapp/telepon/SMS: 08119146146
    b. Email: pengaduan@bankbsi.co.id
    c. Surat

Perlindungan bagi Pelapor

Bank telah menetapkan mekanisme perlindungan bagi pelapor seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Pelapor:
    a. Melaporkan dugaan tindakan penyimpangan atau *fraud* yang diketahui melalui sarana pelaporan yang disediakan.
    b. Memberikan informasi atau dokumen-dokumen tanpa tekanan.
    c. Mendapat jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi.
    d. Memberikan kesaksian tanpa harus bertatap muka dengan Terlapor pada saat pemeriksaan perkara.
    e. Memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya melalui aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.
2. Kewajiban Pelapor:
    a. Menyampaikan informasi sesuai fakta.
    b. Beritikad baik.
    c. Kooperatif.
    d. Bertanggung jawab atas laporan yang tidak sesuai fakta atau bersifat fitnah.
3. Bank memberikan perlindungan pelapor meliputi:
    a. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan materi laporan.
    b. Mendapatkan perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan, yaitu:
        1) Pemecatan yang tidak adil;
        2) Penurunan jabatan/pangkat;
        3) Pelecehan/diskriminasi dalam segala bentuk; dan
        4) Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (*personal record*).

Perlindungan Bank tidak berlaku bila laporan Pelapor berdasarkan audit terbukti tidak benar atau memfitnah atau Pelapor merupakan pihak yang terlibat dalam tindakan penyimpangan dan/atau *fraud* untuk permasalahan yang sama atau berbeda.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *whistleblowing system* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
    a. Kecurangan
    b. Penipuan
    c. Penggelapan aset
    d. Pembocoran informasi
    e. Tindak Pidana Perbankan
    f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
    a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
    b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
    c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencairan yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
    a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: penggunaan narkotika/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
    b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dll.
    c. Pelanggaran *code of conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku insiders).
    d. Pelanggaran norma sosial.
    e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
    f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi.

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *whistleblowing system* dilakukan melalui *training/* pelatihan pegawai, *Change Agent* BSI, *Desktop* komputer pegawai, *website* BSI.

Pihak yang mengelola Pengaduan

Whistleblowing System di Bank Syariah Indonesia dikelola oleh Unit Internal Audit.

Penanganan Pengaduan

Jumlah Pengaduan

NO.	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	Pembiayaan	15
2	Operasional	7
3	*Code Of Conduct*	7
	Total	**29**

Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan

JUMLAH PENGADUAN	STATUS			
	SUDAH DITINDAKLANJUTI	SEDANG DITINDAKLANJUTI	BELUM DITINDAKLANJUTI	TIDAK LAYAK DITINDAKLANJUTI
29	5	6	4	14

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaiannya

Internal *fraud* adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank Syariah Indonesia maupun pegawai tidak tetap (*outsourcing*) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Sepanjang tahun 2021, jumlah internal *fraud* yang terjadi sebanyak 7 (tujuh) kasus.

Perkembangan penanganan internal *fraud* yang terjadi pada tahun 2021 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

INTERNAL *FRAUD*	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH:		
	DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
Total *fraud*	-	6	1
Telah diselesaikan	-	5	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	1	
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	1	-

Upaya penyelesaian kejadian *fraud* dilakukan oleh Bank dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*.

Untuk menimbulkan efek jera, Bank juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian *fraud* adalah dengan perbaikan *design control* dan penguatan internal control agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP. DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Bank Syariah Indonesia mengirimkan Perwakilan Komite TKT yaitu Bapak M. Arief Rosyid Hasan dan Bapak KH. DR. Mohammad Hidayat sebagai sebagai anggota Komite TKT sesuai dengan SK Nomor: 01/053-KEP/DIR tanggal 19 Maret 2021.

Adapun hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
   IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC
   Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:
   - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
   - Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   - Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
b. Rapat IRC
   Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

2. Board Forum
   Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai *board forum* yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

NO.	ASPEK	HASIL	
		SEMESTER I	SEMESTER II
1	Direksi	1,33	1,33
2	Dewan Komisaris	1,00	1,60 ▲
3	Dewan Pengawas Syariah	1,33	1,00 ▼
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1,29	1,00 ▼
5	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	1,50	1,25 ▼
6	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)	1,17	1,17
7	Penerapan Manajemen Risko Terintegrasi	1,40	1,40
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1,33	1,33
9	Benturan Kepentingan	1,00	1,00
10	Kebijakan Remunerasi	1,25	1,00
	Nilai Akhir	**1,26**	**1,21**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintergasi Semester 1 tahun 2021

PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
1 (1,26)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

FAKTOR POSITIF	AREA PENGEMBANGAN
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
1. Seluruh anggota Direksi berjumlah 10 (sepuluh) orang telah lulus fit and proper test dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 3. Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan) orang dan telah lulus fit and proper test dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 4. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsinya independen terhadap satuan kerja operasional. Selama periode Semester I 2021 Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah memberikan Opini Kepatuhan yang terdiri dari : Compliance Opinian sebanyak 81, *Compliance Note Independen* (CNI) sebanyak 63, *Compliance ChekList* (CCL) sebanyak 20, Rapat Komite Pembiayaan (RKP) sebanyak 30 kali rapat dan Rapat Teknis sebanyak 67 kali rapat, *Working Group Policy and Procedure* sebanyak 34 kali.	1. Peningkatan kompetensi pegawai SKK 2. Penyempurnaan kebijakan Remunerasi
Kriteria: Proses Tata Kelola	
1. Pada periode Semester I 2021 telah dilaksanakan 19 (sembilan belas) kali Radir. Hasil rapat Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir). Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik dan disimpan dengan rapi. 2. Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif kepada Direksi secara profesional dan *independent*. 3. Satuan Kerja Audit Internal telah menginformasikan rencana audit kepada Induk dan telah melakukan evaluasi terhadap hasilaudit Internaldan eksternalbeserta tindaklanjutnya secara rutin setiap bulan.	Penyempurnaan penerapan manajemen risiko dengan penyelasaran dan pengesahan *Risk Appetite Statement* (RAS).
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
1. Dewan Komisaris melaksanakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali. Pada semester I 2021 Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 54 kali, dengan rincian sebagai berikut: · Rapat Komite, 13 kali · Rapat Komisaris dan Direksi, 4 kali · Rapat Komite, 36 kali · Rapat gabungan, 1 kali 2. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu. 3. Bank telah menyempurnakan ketentuan internal Bank (kebijakan, prosedur, manual produk dan petunjuk teknis) untuk meminimalisasi adanya intervensi pihak terkait/pihak lainnya terhadap operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 4. SKAI telah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan dalam audit *finding* sebagai acuan perbaikan oleh Unit Kerja terkait yang mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal Bank, POJK, dan *best practice* yang berlaku.	Memitigasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya denda. Pada periode Semester I 2021 terjadi denda sebesar **Rp1.774.549.897** (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Semester 2 tahun 2021

PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
1 (1,21)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

FAKTOR POSITIF	AREA PENGEMBANGAN
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
1. Jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota DPS; dan 2. Jumlah, komposisi dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.	Terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses *Fit & Proper Test* di OJK.
Kriteria: Proses Tata Kelola	
1. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu 2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip syariah. 3. Satuan Kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.	Penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko dengan penyelasaran dan pengesahan Risk *Appetite Statement* (RAS).
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
1. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu 2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah 3. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik	Masih terdapat kejadian *fraud* dan temuan yang perlu ditindaklanjuti

PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebajikan Bank Syariah Indonesia tahun 2021.

Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(Rp Juta)

URAIAN	2021	2020	PERUBAHAN	
			RP	(%)
Sumber dana kebajikan	72.606	53.968	18.638	34,54
Infak dan sedekah	50.280	35.816	14.464	40,38
Denda	14.329	10.838	3.491	32,21
Pendapatan non-halal	7.898	6.798	1.100	16,18
Sumbangan/hibah	99	516	-417	-80,81
Penggunaan dana kebajikan				
Sumbangan	(59.529)	(76.807)	17.278	-22,50
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	13.077	(22.839)	35.916	-157,26
Saldo awal dana kebajikan	12.900	35.739	-22.839	-63,90
Saldo akhir dana kebajikan	25.977	12.900	13.077	101,37

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG KEPADA KARYAWAN DAN/ ATAU MANAJEMEN

BSI tidak memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang kepada karyawan dan atau manajemen.

BUYBACK SAHAM DAN *BUYBACK* OBLIGASI

Merujuk pada SE BI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank Syariah Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

TRANSAKSI MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI yang menimbulkan kerugian pada Bank. Sementara upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya benturang kepentingan, antara lain melalui:

A. *e-Poster*
   Berikut beberapa *e-poster* yang di-*blast* ke segenap Karyawan Bank untuk sosialisasi terkait benturan kepentingan.
B. Pakta Integritas
   Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan pegawai maka seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank wajib mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait bentuan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pakta yang dinyatakan setiap tahun itu berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian. Saat ini, penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja *Human Capital* dan *annual disclosure* tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian Bank.
C. *E-mail Blast*
   Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, Bank melakukan sosialisasi melalui email blast guna mengingatkan kepada seluruh Karyawan Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap Surat Edaran OJK No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator.

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. *Hasil self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5.

Pelaksana Penilaian

Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh Compliance Group.

Kriteria Penilaian

Pelaksanaan *self assessment* terhaap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek governance tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal.

Hasil Penilaian

Secara keseluruhan, hasil penilaian GCG untuk semester 1 tahun 2021 mendapatkan skor 2 ("Baik"). Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

FAKTOR POSITIF	AREA PENGEMBANGAN
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
1. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 3. Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan orang) dengan jumlah Komisaris Independen sebanyak 5 (lima) orang (lebih dari 50%) dari total jumlah Dewan Komisaris.	1. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Pelaksanaan *update* dan pengkinian atas kebijakan, *system* dan prosedur.
Kriteria: Proses Tata Kelola	
1. Direksi telah melaksanakan rapat selama semester I 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) kali Radir, seluruh Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir). 2. Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif Direksi secara profesional dan independen. 3. Realisasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui Rapat DPS sebanyak 38 kali, Penerbitan opini syariah sebanyak 16 opini.	1. Peningkatan pemahaman atas prinsip-prinsip syariah dan pelaksanaan reviu atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank dalam rangka memastikan telah sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang berlaku. 2. Monitoring tindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dan mitigasi agar tidak terjadi temuan berulang.
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
1. Dewan Komisaris selama semester I tahun 2021, secara rutin telah melakukan rapat (Rakom, Rakomdir,dan Rapat Komite-Komite) sebanyak 57 kali dengan agenda membahas mengenai evaluasi kinerja, *up date* isu-isu terkini Bank, dan *action plan* ke depan, dengan rincian sebagai berikut: a. Rakom, 13 kali b. Rakomdir, 4 kali c. Ragab, 1 kali d. Rapat Komite 39 kali 2. Laporan GCG dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu dan tidak terkena sanksi atas keterlambatan laporan.	Memitigasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan denda berulang.

Sementara itu, hasil penilaian GCG untuk semester 2 tahun 2021 mendapatkan skor 2 ("Baik"). Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

FAKTOR POSITIF	AREA PENGEMBANGAN

Kriteria: Struktur Tata Kelola

Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

1. Dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021 masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu :
   a) Adiwarman Azwar Karim (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
   b) Muhammad Zainul Majdi (Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen).
2. Kedua anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas merupakan Komisaris Independen, sehingga mengakibatkan Komposisi Komisaris Independen yang efektif belum sesuai dengan ketentuan (masih berada <50%).
3. Selain itu, sebagai dampak dari belum diperolehnya persetujuan OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas, Komposisi Komisaris Independen pada keanggotaan komite menjadi belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria: Proses Tata Kelola

Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.

Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, meski seluruh produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan harmonisasi akad-akad, baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana, review terhadap SOP terkait dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.

Kriteria: Hasil Tata Kelola

Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank, baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2021 pada tabel berikut:

(Rp miliar)

Pos	Desember 2021	Growth YoY Desember 2021	
		Nominal	%
Laba Perusahaan	3.028	841	38,42
Jumlah Asset	265.289	25.656	10,71
OHC	8.485	717	9,23
Pembiayaan	171.291	14.596	9,32
Dana Pihak Ketiga	233.251	23.364	11,13
a. Giro	35.693	(474)	-1,31
b. Tabungan	99.375	11.323	12,86
c. Deposito	98.184	12.514	14,61
CASA	135.068	10.849	8,73

Sementara secara non finansial Bank telah medapat berbagai penghargaan, salah satunya terkait dengan penilaian implementasi GCG Bank melalui *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Award, dimana Bank berhasil menyandang predikat "*Most Trusted Company*". Bank juga telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 (Anti Penyuapan) pada tanggal 17 Desember 2021

Terdapat pelampauan portofolio BMPD Pihak Terkait yang disebabkan peralihan kepemilikan 99,99% saham pada PT Pegadaian dan 99,99% saham pada PNM dari Pemerintah Republik Indonesia ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank. Bank telah mengirimkan dan melaksanakan *action plan* terkait hal tersebut kepada regulator

Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

Pada tahun 2021, BSI mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas corporate governance suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (*emiten*), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Adapun keikutsertaan Bank dalam program CGPI bertujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secarap independen dalam rangka mencapai pelaksanaan GCG yang optimal.
2. Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen BSI kepada stakeholder atas pelaksanaan GCG.
3. Menilai tindaklanjut perbaikan dan meningkatkan strategi dan kebijakan dalam mengelola tata kelola sesuai dengan visi dan misi.
4. Menilai implementasi strategis dan kebijakan dalam mengelola bisnis Bank.
5. Sarana dalam menyusun *database* dan melakukan pemetaan implementasi GCG.

Sementara itu, manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah:

1. Memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
2. Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan dalam mengimplementasikan GCG.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
5. Menetapkan indikator atau standar kualiatas penerapan GCG yang ingin dicapai oleh Bank.
6. Mendorong kapabilitas organisasi dan anggota perusahaan dalam menerapkan GCG.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian



Kriteria yang Digunakan

Dalam melakukan penilaian CGPI 2020 dengan tema transformasi model bisnis dalam kerangka GCG digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Stuktur Governansi (*Governance Structure*)
   Aspek struktur governansi merupakan penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek struktur governansi meliputi:
   a. Pemegang Saham
   b. Dewan Komisaris
   c. Direksi
   d. Penanggung jawab manajemen fungsional
2. Proses Governansi (*Governance Process*)
   Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:

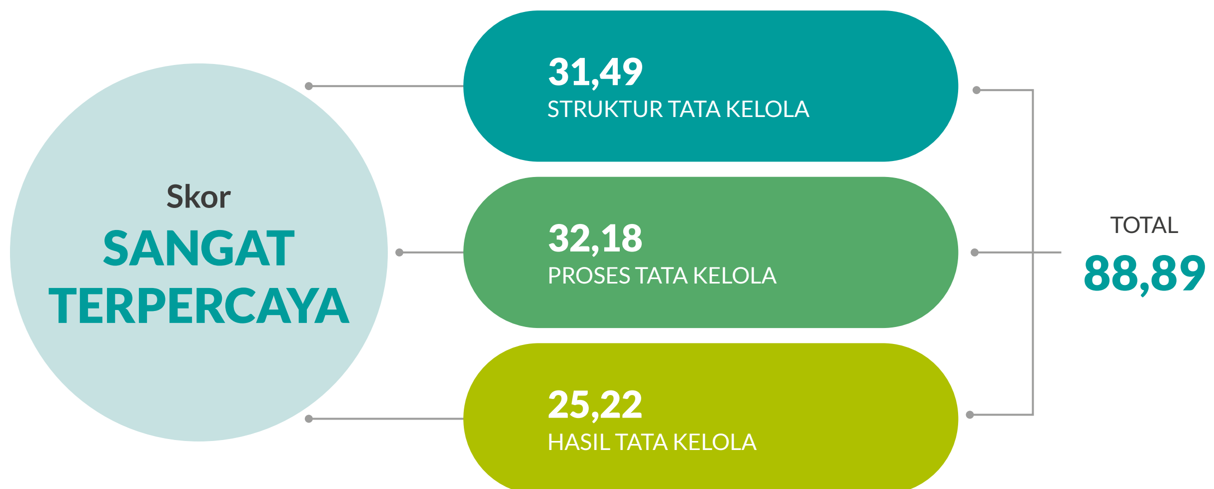
a. Governansi pemenuhan hak Pemegang Saham dan RUPS
b. Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
c. Governansi Korporasi
d. Governansi pengungkapan dan keterbukaan informasi
e. Governansi pengawasan internal dan eksternal
f. Governansi pengelolaan risiko dan kepatuhan
g. Governansi modal insani (*human capital*)
h. Governansi tanggung jawab sosial dan lingkungan
i. Governansi pengadaan barang/jasa
j. Governansi teknologi informasi
k. Governansi perencanaan stratejik
l. Governansi inovasi bisnis

3. Hasil Governansi (*Governance Outcome*)
   Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek hasil governansi meliputi:
   a. Kinerja Keuangan
   b. Kinerja Non Keuangan

Pihak yang Melakukan Penilaian

IICG – The Indonesian Institute for Corporate Governance

Hasil Penilaian



PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PRINSIP	REKOMENDASI	PELAKSANAAN DI BANK	REALISASI
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pada RUPS Tahunan Tahun 2021 yang lalu, Mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan. Pada RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tahun 2021 dilakukan secara elektronik sehingga pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (e-voting) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan bersamaan saat Pemanggilan RUPS hingga pelaksanaan RUPS, tersedia pula bagi Pemegang saham saat RUPS melalui QR *code* yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.	Terpenuhi *(comply)*
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Pada RUPS Tahunan 2021 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir.	Terpenuhi *(comply)*
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2021, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS telah diunggah pada Situs *Web* BSI, Web BEI, dan eASY KSEI.	Terpenuhi *(comply)*

PRINSIP	REKOMENDASI	PELAKSANAAN DI BANK	REALISASI
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication* pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (*Public Expose*), Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada web tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat *email*, akses media sosial serta *contact center* sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.	Terpenuhi *(comply)*
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI.	Terpenuhi *(comply)*
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2021 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Terpenuhi *(comply)*
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada web perseroan.	Terpenuhi *(comply)*
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.	Terpenuhi *(comply)*
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi *(comply)*
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi *(comply)*

PRINSIP	REKOMENDASI	PELAKSANAAN DI BANK	REALISASI
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI.	Terpenuhi *(comply)*
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI.	Terpenuhi *(comply)*
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.	Terpenuhi *(comply)*
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan.	Terpenuhi *(comply)*
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme self-assessment untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi *(comply)*
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi *(comply)*
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi *(comply)*
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Untuk mencegah terjadinya *insider trading*, BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication*.	Terpenuhi *(comply)*

PRINSIP	REKOMENDASI	PELAKSANAAN DI BANK	REALISASI
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	BSI telah memiliki kebijakan *anti fraud*. Kebijakan anti *fraud* BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi *anti fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu: 1. Pencegahan *Fraud*; 2. Deteksi *Fraud*; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi *Fraud*; dan 4.Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*. Kebijakan *Anti Fraud* BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.	Terpenuhi *(comply)*
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO *Procurement* dan PTO *Procurement* pengadaan barang dan jasa.	Terpenuhi *(comply)*
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk Bank Syariah Indonesia, dengan pokok-pokok sebagai berikut: Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada Nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam setiap pemasaran produk dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah menjadi perhatian penting yang meliputi: 1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank. 2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.	Terpenuhi *(comply)*
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	BSI telah memiliki kebijakan *whistleblowing system* yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI (www.bankbsi.co.id)	Terpenuhi *(comply)*
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan.	Terpenuhi *(comply)*

PRINSIP	REKOMENDASI	PELAKSANAAN DI BANK	REALISASI
Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS *Banking* dan *Mobile Banking*. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi.	Terpenuhi *(comply)*
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi *(comply)*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

"BSI memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan keuangan berkelanjutan yang diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) serta *Maqashid Asy Syariah*."

127,61 Miliar

Penyaluran Zakat BSI sepanjang Tahun 2021.



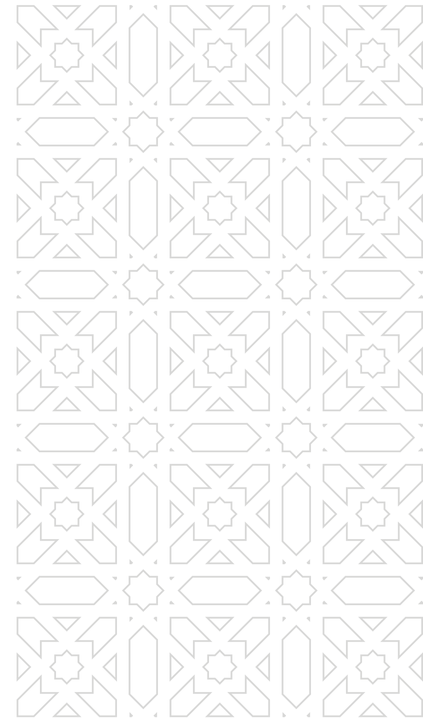
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan



Kegiatan CSR Bank selalu melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaannya dapat optimal.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan pada buku terpisah. Laporan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16.SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu mengacu Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.





Komitmen

PT Bank Syariah Indonesia ("BSI", "Bank") memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan keuangan berkelanjutan. Hal ini telah tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank menyelaraskan pengelolaan CSR dan keuangan berkelanjutan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta *Maqashid Asy Syariah*. *Maqashid Asy Syariah* sendiri memiliki makna tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Abu Ishaq asy' Syatibi, penulis kitab Maqashid Asy Syariah (wafat tahun 790 H di Granada, Andalusia, Spanyol), merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam berdasarkan konsep hierarki kebutuhan dari Imam Al Ghazali, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Unit Kerja *Corporate Secretary & Communication Group* bertanggung jawab atas pengelolaan CSR dan keuangan berkelanjutan secara *bank-wide*. Bank juga telah membentuk *Sustainable Finance Department* di bawah supervisi Direktur Compliance & Human Capital. BSI juga telah memiliki kebijakan, terutama terkait dengan pengelolaan CSR yang tercantum dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary* Tahun 2021.

Dasar Pelaksanaan

BSI mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan CSR, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan Terbatas
4. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik
5. POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)*
6. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik
7. Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Metode dan Lingkup *Due Diligent* terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan bisnis keberlanjutan BSI yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada setiap kegiatan yang dijalankan. Bank telah memiliki metode *due diligence* untuk setiap *core subject* CSR, yang meliputi:

1. Survei kepuasan pegawai dan nasabah.
2. Peningkatan kompetensi pegawai terkait CSR dan keuangan berkelanjutan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BSI Corporate University bekerja sama dengan lembaga mitra yang ahli di bidang CSR dan keuangan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan pedoman Bank dalam penyaluran pembiayaan dalam pemenuhan aspek Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), komersial serta korporasi.

Pemangku Kepentingan yang Terdampak

Dari kegiatan *due diligence* tersebut, Bank telah memetakan siapa saja Pemangku Kepentingan yang terdampak dari kegiatan bisnis Bank, yaitu individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas dan layanan jasa perbankan serta kinerja Bank. Adapun pemangku kepentingan yang signifikan terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut:

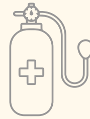
PEMANGKU KEPENTINGAN	BASIS IDENTIFIKASI	TOPIK UTAMA
Pemegang Saham dan Investor	Tanggung jawab, Pengaruh	• Mempertahankan dan meningkatkan nilai usaha sesuai harapan pemegang saham. • Menghormati hak-hak dan tanggung jawab pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Nasabah	Ketergantungan	• Memberikan layanan dengan kualitas yang melebihi harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. • Kerahasiaan data. • Memperluas jaringan dan jenis layanan.
Pegawai	Ketergantungan	• Kesetaraan dan perlakuan yang adil. • Tidak berlaku diskriminasi. • Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. • Memberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan	Pengaruh	• Menjaga hubungan yang harmonis dengan regulator. • Seluruh insan Bank Syariah Indonesia tunduk dan mematuhi hukum, • Perundangan, dan peraturan bisnis yang berlaku. Bank Syariah Indonesia melaporkan secara rutin kepada Pemerintah sebagai regulator.
Mitra Kerja	Ketergantungan	• Mekanisme pengadaan secara adil dan transparan. • Sistem seleksi dan evaluasi secara objektif dalam pemilihan mitra. • Tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses pengadaan.
Industri Sejenis (Bank Syariah Lainnya)	Pengaruh	• Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. • Kerja sama di antara sesama industri keuangan syariah. • Pertemuan rutin di antara sesama pelaku bisnis.
Masyarakat	Pengaruh, Tanggung Jawab	• Menjalin hubungan yang serasi dan harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. • Pemberdayaan potensi masyarakat dengan memberi *sustainable value*.
Lingkungan	Tanggung Jawab	• Berperan aktif dalam mengurangi dampak operasional perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. • Berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

Isu-isu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Penting

BSI membentuk forum diskusi sebagai upaya menentukan isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang berpengaruh signifikan bagi Bank. Proses penentuan isu-isu penting yang menjadi perhatian pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan prinsip *stakeholders inclusiveness* (keterlibatan pemangku kepentingan) dengan melibatkan karyawan melalui forum diskusi dan penyebaran kuesioner.

Penentuan isu penting juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom-up* dan melakukan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan lain, sehingga program dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal.





Program Bantuan Tabung Oksigen

Isolasi mandiri:
42 orang sejumlah **70** tabung

RS dan lembaga:
15 lembaga sejumlah **196** tabung

Berikut, isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dianggap penting oleh BSI:

ISU	RINCIAN
Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan Bank.	Pendapatan, biaya operasional, upah, tunjangan karyawan, dan sebagainya.
Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak karyawan.	Rekrutmen, *turnover*, tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, kesetaraan peluang, kesamaan remunerasi pria dan wanita, tidak ada diskriminasi, ada kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama.
Pemberantasan korupsi	Antikorupsi dan tindakan yang diambil jika terdapat korupsi..
Transparansi dan kepuasan konsumen	Informasi produk, tanggung jawab kualitas produk, perlindungan konsumen, pengaduan konsumen, dan survei kepuasan konsumen.
Keterlibatan masyarakat dalam proses usaha	Dampak usaha terhadap masyarakat, program pemberdayaan masyarakat.
Dampak ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat	CSR, PKBL, pembangunan infrastruktur, perbandingan pembelian dari pemasok lokal dibanding pemasok nasional/internasional, dan sebagainya.
Kepatuhan terhadap regulasi terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan	Mematuhi aturan terkait tersedianya sarana pengaduan jika ada masalah lingkungan.
Pengelolaan limbah	Limbah air dan pengelolaannya, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Penanggulangan gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca, emisi udara, perusak ozon, dan upaya penanggulangannya.
Assessment pemasok	Mencakup: kerja paksa, melibatkan pekerja anak, dan ketidakpedulian lingkungan.

Lingkup dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank yang Kewajiban maupun Melebihi Kewajiban

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank mengacu pada ISO 26000 dengan lingkup tanggung jawab mencakup:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Asasi Manusia
3. Ketenagakerjaan
4. Lingkungan Hidup
5. Operasi Yang Adil
6. Pemenuhan Kepentingan Pelanggan
7. Kemasyarakatan

Selain lingkup tanggung jawab sosial berdasarkan *core subject* di atas, pelaksanaan tanggung jawab sosial juga meliputi lingkup kantor pusat dan seluruh kantor cabang, baik internal maupun eksternal kantor.

Strategi dan Program Kerja dalam Menangani Isu-isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Bank menyadari keberhasilan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberikan *mutual benefit* dengan para pemangku kepentingan. Interaksi positif dimaksud, diwujudkan dengan dipenuhinya harapan pemangku kepentingan melalui pengelolaan seluruh sumber daya secara optimal dan efisien.

Selanjutnya, BSI menyusun kerangka hubungan dan pelibatan terbatas para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan Bank. Berdasarkan kepentingan timbal balik dengan para pemangku kepentingan tersebut, Bank menetapkan 4 (empat) jenis kegiatan pelibatan terbatas, yakni: pemberdayaan, kerja sama, konsultasi dan komunikasi.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

BSI senantiasa berupaya memberikan manfaat lebih bagi pemangku kepentingan. Salah satunya ialah pelibatan Pemangku Kepentingan dalam kegiatan CSR Bank. Beberapa Pemangku Kepentingan terlibat aktif dalam pelaksanaan CSR dengan melakukan sinergi dan kolaborasi program, misalnya program vaksinasi COVID-19 antara BSI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagainya.

Dukungan Perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BSI memberikan dukungan aktif terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs melalui aktivitas operasional perusahaan, pengembangan produk dan/atau jasa perusahaan serta aktivitas Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).

Anggaran Program CSR

Pada tahun 2021, BSI menyalurkan Rp187,14 miliar untuk CSR sosial kemasyarkatan, hal ini lebih tinggi 2,95% dari penyaluran tahun sebelumnya sebesar Rp181,77 miliar. Adapun sumber dana CSR sosial kemasyarakatan Bank berasal dari dana zakat (zakat perusahaan, zakat pegawai, zakat nasabah dan zakat umum) dan dana kebajikan (infaq/shodaqoh, denda, pendapatan non halal, sumbangan/hibah).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Komitmen dan Kebijakan

Bank memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen diwujudkan dengan menyusun kebijakan/pedoman yang terkait, di antaranya adalah Kebijakan Pembiayaan, *Code of Conduct*, Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Perjanjian Kerja Bersama, dan Standar Prosedur Operasional Standardisasi Pengamanan Kantor.

Bank senantiasa memastikan bahwa pedoman-pedoman tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan pedoman senantiasa dimonitor dan dievaluasi, antara lain melalui kegiatan audit internal sampai dengan tindak lanjut rekomendasi hasil audit, serta melakukan survei-survei yang diperlukan di antaranya survei "*Engagement* Karyawan" dan survei "*Bank Service Excellence Monitor*."

Rumusan Lingkup Tanggung Jawab

Bank menargetkan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik. Dengan demikian, hubungan antara Bank dan para Pemangku Kepentingan dapat tercipta, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

Perumusan tanggung jawab sosial di bidang HAM melekat pada bidang-bidang yang terkait, yaitu menghindari keterlibatan pada kegiatan yang melanggar HAM, melakukan penanganan keluhan *stakeholder*s dengan baik, tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, melakukan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, serta menjalankan prinsip fundamental dan hak dalam lingkungan kerja.

Perencanaan dan Realisasi Kegiatan

PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN
Menghindari keterlibatan pada kegiatan yang melanggar HAM	Bank konsisten untuk menghindari keterlibatan pada kegiatan-kegiatan yang melanggar HAM, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan petugas keamanan (Satpam) dengan memasukkan unsur-unsur menghormati HAM. Secara tidak langsung, kegiatan menghindari keterlibatan dilakukan dengan masukkan kriteria tidak adanya pelanggaran HAM dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan pemilihan pemasok.
Melakukan penanganan keluhan *Stakeholders* dengan baik	Hak-hak para pemangku kepentingan merupakan hak azasi yang harus dihormati. Hak nasabah, masyarakat lokal, dan karyawan serta pihak lainnya yang terkait dengan Bank yang termasuk dalam hak azasi manusia selalu diupayakan untuk bisa terpenuhi. Oleh karena itu Bank telah memiliki mekanisme pengaduan keluhan stakeholders, yang dikembangkan dalam rangka untuk bisa menangani hal-hal yang menjadi keluhan para stakeholders. Saluran pengaduan baik untuk nasabah, karyawan, maupun masyarakat telah disediakan oleh Bank dan pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Bank.
Tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminatif	Bank memerhatikan keamanan produk dan layanan bagi nasabah, serta memastikan layanan yang setara tanpa membedakan latar belakang, baik gender, ras, suku, maupun keyakinannya sebagai bentuk penghormatan kepada hak asasi manusia.
Melakukan pemenuhan hak-hak sipil dan politik	Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait HAM adalah melaksanakan pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Terkait dengan hal ini, Bank telah melaksanakan kegiatan CSR sosial kemasyarakatan yang di antaranya melalu Program Laznas yang dilaksanakan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terkait hak politik, Bank secara terbuka menampung masukan dari para pemangku kepentingan melalui saluran-saluran yang telah ditetapkan, khususnya bagi nasabah, masyarakat dan karyawan.
Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya	Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya secara baik telah dilakukan baik di internal Bank maupun untuk masyarakat. Secara internal, Bank berupaya memberikan remunerasi pegawai yang kompetitif di industri dengan mempertimbangkan kinerja pegawai. Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya juga dilaksanakan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai bank syariah, Bank memiliki kegiatan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pemenuhan prinsip fundamental dan hak dalam lingkungan kerja	Bank berkomitmen untuk melakukan pemenuhan prinsip fundamental dan hak dalam lingkungan kerja. Kegiatan tanggung jawab sosial yang diterapkan di lingkungan kerja adalah terkait waktu kerja, cuti, izin menjalankan ibadah, izin melahirkan/keguguran dan sakit karena haid, dan izin laktasi/ mengeluarkan Air Susu Ibu (ASI)

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HAM

BSI memiliki fasilitas penanganan keluhan HAM sebagai salah satu bentuk komitmen Bank terhadap pelaksanaan CSR di bidang HAM. Human Capital Services Bank menyediakan layanan e-Care sebagai sarana pengaduan atas keluhan dan/atau pertanyaan seputar kepegawaian. Bank juga telah menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah dengan berbagai media seperti *call centre*, *social* media dan sebagainya.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Kebijakan dan Komitmen

Bank Syariah Indonesia menetapkan ketentuan pengadaan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Procurement* yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2021. Panduan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan proses pengadaan (*procurement*).

Kebijakan dan realisasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di lingkungan Bank merujuk pada sejumlah regulasi, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya
3. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Peraturan Bank Indonesia No.11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya
6. POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
7. POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (POJK Rencana Bisnis Bank) berikut segala perubahannya
8. POJK No. 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain
9. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya

10. SEOJK No.14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan Unit Usaha Syariah
11. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk berikut segala perubahannya
12. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk
13. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
14. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk
15. Kebijakan Operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk
16. Standar Prosedur Operasional Pembuatan Kebijakan dan Prosedur PT Bank Syariah Indonesia Tbk
17. Standar Prosedur Operasional (SPO) Akuntansi
18. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan-Persyaratan

Mengacu pada peraturan perundangan tersebut, komitmen BSI dalam pelaksanaan CSR di bidang operasi yang adil ditunjukkan dengan telah dimilikinya kebijakan yang mengatur hal tersebut, di antaranya adalah *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, Kebijakan Gratifikasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk memastikan bahwa kebijakan/pedoman telah dijalankan secara konsisten, setiap tahun Bank melaksanakan GCG *assessment* yang bertujuan untuk memastikan penerapan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta mengikuti CGPI Award 2021.

Rumusan Tanggung Jawab

Dalam merumuskan CSR di bidang operasi yang adil, Bank menentukan lingkup kegiatannya, antara lain meliputi larangan benturan kepentingan (*conflict of interest*), larangan *risywah* (suap), larangan perilaku *insider*, integritas sistem perbankan dan pencegahan korupsi. Di samping itu, Bank juga berkomitmen untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan menghargai *property right* yang dimiliki seseorang atau organisasi.

Target Kegiatan

Bank Syariah Indonesia menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip syariah, efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel, tanggung jawab, independen. Tak kalah pentingnya adalah penggunaan produk dalam negeri.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik. Hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel

Bank menargetkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip syariah, efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel, tanggung jawab, independen serta penggunaan produk dalam negeri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.

Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bank telah memiliki organisasi pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen yaitu Unit Pelaksana Procurement, sehingga unit tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengadaan. Adapun tugas Unit Pelaksana Pengadaan antara lain:

a. Menyusun dokumen pengadaan;
b. Menetapkan rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan;
c. Menyelenggarakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
d. Membuat dan menetapkan HPS;
e. Menyelenggarakan proses pemasukan penawaran;
f. Melakukan proses evaluasi administrasi dan penawaran biaya;
g. Melakukan proses negosiasi harga;
h. Membuat usulan hasil proses pengadaan kepada Pejabat Pemutus;
i. Membuat dokumen Ikatan Kerja; dan
j. Melaksanakan proses administrasi tagihan pembayaran atas hasil pekerjaan.

Pembagian Tugas/Wewenang Pengadaan

KEGIATAN	PELAKSANA	URAIAN TUGAS/WEWENANG
Pelaksana *Procurement* di Kantor Pusat	Unit Kerja *Procurement*	1. Pengadaan barang dan jasa. 2. Pengadaan jasa *outsourcing* tenaga alih daya termasuk jasa *outsourcing* borongan untuk jenis pekerjaan *security service*, *cleaning service* atau jenis pekerjaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pengadaan asuransi terkait tenaga kerja. 4. Khusus untuk jasa *outsourcing* tenaga alih daya termasuk jasa *outsourcing* borongan, penerbitan kontrak, operasional dan pembayaran tetap dilakukan oleh Unit Human Capital.
	Unit Kerja Bisnis dan Unit *Corporate Secretary*	Pengadaan Barang promosi yang bersifat mendesak (maksimal 5 hari kerja), atas beban biaya promosi.
	Unit Kerja Lainnya di Kantor Pusat sesuai bidang unit kerja	khusus untuk pengadaan jasa konsultan dan pihak ketiga lainya.
	Unit pelaksana *procurement* kantor pusat	Jasa konsultan hukum, *training*/pelatihan/pembelajaran dan riset.
Pelaksanaan *Procurement* di Kantor Regional	Pelaksana Procurement di Kantor Regional	
Pelaksanaan Procurement di Unit Kerja Terkait	Unit Kerja lain yang berfungsi sebagai *counterpart*.	Pendamping bagi *user*. 1. Unit Kerja IT untuk pengadaan barang/ bidang IT yang bersama dengan *user* melakukan tugas dan fungsinya. 2. Unit Kerja Legal untuk kajian aspek legal dalam proses pengadaan. 3. Unit Kerja Compliance berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan internal.
	Unit Kerja IT	Pengadaan barang/bidang IT, bersama dengan *user* melakukan tugas dan fungsinya.
	Unit Kerja Legal	Kajian aspek legal dalam proses pengadaan
	Unit Kerja *Compliance*	Berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan internal.

Rencana Kegiatan

Metode Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa

BSI memiliki beberapa metode pemilihan pengadaan barang dan jasa yang mencakup:

1. Metode Pelelangan Umum/Terbatas
   Metode Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan/atau *website* perusahaan, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

   Sementara Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa ketika jumlah penyedia barang dan jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks. Pelelangan Umum/Terbatas minimal diikuti oleh 3 (tiga) peserta penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran harga.
2. Metode Pemilihan Langsung
   Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Dokumen Pengadaan. Metode ini dilaksanakan untuk pengadaan dengan nilai HPS lebih dari Rp100 juta sampai dengan setinggi-tingginya Rp10 miliar atau memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan SPO.
3. Metode Penunjukan Langsung
   Penunjukan Langsung adalah metode pengadaan barang/jasa dengan menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Metode ini digunakan untuk pengadaan dengan nilai HPS setinggi tingginya Rp100 juta, atau pengadaan yang ada tarif resminya dari Pemerintah, atau memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
4. Metode Pembelian Langsung
   Pembelian Langsung yaitu pembelian terhadap barang dan jasa yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar sesuai pembelian. Unit Kerja User dapat melakukan pembelian langsung untuk kategori barang dan jasa dengan nilai per transaksi pembelian (termasuk pajak) maksimal Rp25 juta.

5. Metode Pembelian secara *Online*/ Melalui Internet *Website*

   Pembelian secara *online* adalah pembelian barang yang hanya dapat dilakukan melalui transaksi secara *online* di internet *website*. Untuk pengadaan barang secara *online*, keputusan pembelian barang dilakukan oleh Pejabat Pemutus Pengadaan sesuai dengan limit kewenangannya.

   Proses pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan melalui pengadaan bersama dalam rangka sinergi bisnis antara bank dengan perusahaan induk, institusi/ instansi lainnya. Jika dilakukan bersama perusahaan induk, parameter yang digunakan adalah:
   1. Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan harga sesuai hasil pengadaan di Perusahaan Induk.
   2. Pengadaan kepada penyedia barang/jasa yang telah mengimplementasikan aplikasi/solusi di Perusahaan Induk untuk produk/jasa aktivitas sejenis.
   3. Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan Perusahaan Induk yang mempunyai lisensi korporat dan dapat digunakan oleh Bank.

Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Bank Syariah Indonesia senantiasa melaksanakan *review* terhadap proses pengadaan barang dan jasa, pengadaan sewa properti dan pembelian tanah/ tanah dan bangunan setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan. Adapun unit kerja yang melakukan audit pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Unit Pelaksana *Procurement*

   Melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas hasil kerja, kooperatif, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk diinformasikan secara tertulis kepada Unit Vendor Management sebagai masukan untuk penilaian kinerja rekanan.
2. Unit Kerja Kepatuhan - Decentralized Compliance dan Operational Risk (DCOR)

   Melakukan *review* terhadap prosedur dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengadaan sewa properti dan pembelian tanah/tanah dan bangunan yang telah selesai dilaksanakan.
   a. Menindaklanjuti dan melaksanakan *monitoring* terhadap tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal yang masih *outstanding*.
   b. Melakukan *monitoring Risk Profile* Unit Kerja setiap 3 (tiga) bulan.
   c. Melakukan *compliance review* terhadap dokumen unit kerja lain yang perlu dimintakan *review* dan perjanjian/kontrak/Nota sebelum ditandatangani sesuai kewenangan.
3. Unit Kerja Legal

   Membantu unit kerja dalam menyelesaikan permasalahan *procurement* yang menyangkut aspek legal.
4. Unit Kerja Pengguna/*User*, terdiri dari:
   a. *User* wajib meyakini kesesuaian barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/SPK/Surat Perjanjian/ Kontrak, meliputi:
      1. Kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diserahkan.
      2. Ketepatan waktu/efektivitas penyerahan barang dan jasa.
   b. Menandatangani BAST barang atau pekerjaan (oleh pejabat yang berwenang).
   c. *User* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Procurement, apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/ SPK/Surat Perjanjian/Kontrak.
5. *Vendor Management*
   a. *Monitoring* Data Rekanan.

      Pembaharuan/*update* data rekanan dilakukan terhadap perubahan-perubahan baik pada Akta Perusahaan, masa laku Ijin Usaha, penambahan/ pengurangan usaha, maupun perubahan lain jika ada.
   b. *Monitoring* Kinerja Rekanan.

      Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap performa/kinerja penyedia barang dan jasa (*vendor*) berdasarkan masukan/laporan tertulis *user*.

Pelaksanaan Kegiatan

PROGRAM	PELAKSANAAN
Metode Pelelangan Umum/Terbatas	10 Kontrak
Metode Pemilihan Langsung	406 Kontrak
Metode Penunjukan Langsung	442 Kontrak
Metode Pembelian Langsung	70 Kontrak
Metode Pembelian secara *Online*/Melalui Internet *Website*	6 Pengadaan
Pengadaan Bersama	1 Kontrak
Audit Pengadaan Barang dan Jasa	31 Kontrak

Survei Kepuasan Pemasok

Hingga akhir tahun buku 2021, jumlah rekanan/pemasok BSI sekitar 1.188 rekanan/pemasok. BSI telah menggelar survei tingkat kepuasan pemasok pada Agustus 2021 untuk mengetahui persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pengadaan di lingkungan Bank. Terdapat 60 pemasok dalam survei tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam survei adalah melalui penilaian skala likert. Pedoman penilaiannya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

NILAI SKALA LIKERT	KATEGORI
< 1,00	Tidak Memuaskan
1,01 - 2,00	Kurang Memuaskan
2,01 - 3,00	Cukup Memuaskan
3,01 - 4,00	Memuaskan
4,01 - > 5	Sangat Memuaskan

Mengacu pada pedoman skala tersebut, hasil survei kepuasan pemasok terkait dengan proses *procurement* pada tahu 2021, yaitu periode awal merger BSI, memiliki nilai 5,00. Pencapaian ini mencerminkan tingkat kepuasan rekanan Bank dalam proses *procurement* masuk ke dalam kategori "**Sangat Memuaskan**".

INDIKATOR PENILAIAN	SKOR	KRITERIA
Mekanisme Seleksi Rekanan	5	Sangat Puas
Pelaksanaan Tahapan Proses Pengadaan	5	Sangat Puas
Proses penyelesaian pembayaran pekerjaan	5	Sangat Puas
Lain-lain : 1. Procurment Group (PRG)telah bertindak secara fair (tidak memihak salah satu vendor) pada proses pengadaan barang dan jasa. 2. Pelayanan PRG dalam menyediakan fasilitas fisik kantor secara keseluruhan (penyediaan ruang tunggu, ruang rapat, counter informasi, kebersihan, mushola, toilet, dan lainnya). 3. Keamanan dan pelayanan secara umum dilingkungan PRG.	5	Sangat Puas

Selain itu, Bank juga melaksanakan survei kepada pemasok untuk mengetahui persepsi mereka, sejalan dengan penerapan sertifikasi ISO 37001; Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Seluruh atau 100% responden menyatakan: pegawai *procurement* tidak pernah meminta/menerima hadiah/imbalan dalam bentuk apa pun dari pemasok/rekanan. Sebaliknya, rekanan/pemasok juga tidak pernah memberikan hadiah/imbalan bentuk apa pun ke pegawai *procurement*.

Praktik Adil dalam Berbisnis

BSI memiliki beberapa kebijakan untuk memastikan praktik adil dalam berbisnis, yaitu:

Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Benturan kepentingan merupakan kondisi di saat menjalankan tugas dan kewajiban, pelaksana kegiatan dari Bank memiliki kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota jajaran Bank tersebut kehilangan objektivitasnya. Terkait pencegahan benturan kepentingan, BSI telah melaksanakan kegiatan untuk memastikan bahwa bahwa jajaran Bank:

1. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
3. Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank, di luar kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.

Larangan Risywah (Suap)

Larangan *risywah* (suap) dilaksanakan dengan memastikan bahwa jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/ menerima *risywah* kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan mendorong tercapainya kinerja perusahaan sesuai yang diharapkan.

Larangan Perilaku *Insiders*

Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia, dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Semua transaksi dilaksanakan secara transparan serta kebijakan diumumkan secara terbuka dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Integritas Sistem Perbankan

Jajaran Bank harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia, memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya, dan menghindarkan keterlibatan Bank serta Individu dalam kegiatan pencucian uang, narkoba, atau terorisme.

Pencegahan Korupsi

Bank menyadari bahwa proses pengelolaan bisnis perbankan melibatkan sejumlah transaksi keuangan dengan jumlah dana yang besar dan data yang sangat banyak. Untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* dan korupsi dari transaksi tersebut, Bank telah mengembangkan sistem transaksi dan pengelolaan keuangan yang mampu mencegah dan mendeteksi setiap penyimpangan keuangan.

Pencapaian di Bidang Operasi yang Adil

Bank Syariah Indonesia telah mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016. Sertifikasi tersebut berkenaan dengan sistem manajemen anti penyuapan dalam bidang pengadaan barang/jasa dan *vendor management* yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeteksi dan mencegah terjadinya penyuapan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Komitmen

Komitmen Bank dalam CSR di bidang lingkungan diwujudkan dengan penerapan budaya ramah lingkungan untuk menciptakan green office dan mengimplementasikan keuangan berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan berawasan lingkungan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi, air, penghematan kertas, serta mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Secara bertahap, Bank terus meningkatkan kesadaran perilaku yang ramah lingkungan, baik kepada pegawai maupun nasabah.

Target dan Rencana Program

Untuk menciptakan budaya yang ramah lingkungan, Bank melaksanakan serangkaian kegiatan green campaign, melalui imbauan hemat air, listrik, serta mengurangi pemakaian kemasan plastik. Secara tidak langsung, budaya ramah lingkungan akan mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di internal Bank. BSI melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan budaya ramah lingkungan ini.

Pelaksanaan Kegiatan dan Dampak Kuantitatifnya

Berikut adalah pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Bank di bidang lingkungan.

a. **Efisiensi Energi**

Upaya penghematan energi yang dilakukan selama tahun 2021, antara lain:

1. Penerapan solar panel dan water treatment di gedung/kantor BSI.
2. Menggunakan material ramah lingkungan berupa lampu LED.
3. Menggunakan teknologi inverter dan refrigerant volume pada pendingin ruangan.
4. Pengaturan pendingin ruangan sesuai kebutuhan.
5. Adanya kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan jumlah pegwai di lingkungan kantor sesuai aturan pemerintah.

Dampak kuantitatif dari kegiatan tersebut dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Konsumsi Energi di Dalam dan di Luar Bank

URAIAN	SUMBER KONSUMSI ENERGI	2021
Di Dalam Perusahaan		
Penggunaan energi listrik BSI di Kantor Pusat	Operasional gedung	**1.947.119** kWh
Di Luar Perusahaan		
Penggunaan BBM mobil operasional di Kantor Pusat	Transportasi	**96.625 Liter**

Intensitas Penggunaan Energi

URAIAN	2021
Jumlah Pemakaian listrik dan BBM yang dikonversi dalam satuan GigaJoule (GJ)	**10.392,47**
Keluaran (m^2) (luas Gedung per lantai diakumulasi)	**469.183**
Intensitas Penggunaan Energi (kWh/m^2/tahun)	**4,15**

b. **Efisiensi Penggunaan Kertas**

Kegiatan penurunan penggunaan kertas pada setiap kegiatan operasional Bank, antara lain dilakukan melalui penggunaan kertas bekas (*duplex printing*) yang masih kosong, digitalisasi permintaan barang cetakan (*online*) dan proses pengadaan yang dilakukan secara digital melalui *Procurement Management System.*

Kegiatan lanjutan dari penghematan kertas tersebut, yakni mendukung prinsip *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) dalam memanfaatkan sisa material menjadi bentuk barang baru dan mengurangi limbah padat. Pengelolaan limbah kertas tersebut diterapkan melalui penggunaan kertas daur ulang dalam percetakan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Dampak kuatitatif dari kegiatan tersebut membuat BSI dapat menghemat kertas sebesar 4.228 rim pada tahun 2021, dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Efisiensi Penggunaan Air

Pada tahun 2021, upaya efisiensi dilakukan melalui penggunaan *water treatment* di gedung kantor BSI, serta mendaur ulang air bekas pakai gedung untuk air *flush* toilet pada gedung baru. Kemudian, menggunakan air wudhu di Masjid BSI Cipali secukupnya dan tidak berlebihan serta air bekas wudhu tersebut dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, mengurangi konsumsi dan penggunaan botol/gelas air minum dengan mengadakan rapat internal maupun eksternal secara *online* (Webex, Microsoft Teams, Whatsapp, dan lainnya).

Dampak kuantitatif dari kegiatan tersebut, pada tahun 2021 BSI mampu menghemat air sebanyak 800,25 m3 dibandingkan tahun sebelumnya.

d. Pengurangan Emisi

Upaya pengurangan emisi dilakukan dengan penataan ruang kerja di kantor pusat sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan untuk koordinasi antargroup, menerapkan pembatasan kerja melalui WFH dan WFO, mengadakan rapat internal maupun eksternal secara *online* untuk mengurangi penggunaan kendaraan operasional, melakukan servis kendaraan secara rutin dan menggunakan bahan bakar sesuai dengan sistem pembakaran kendaraan.

Kendati demikian, BSI masih menggunakan kendaraan shuttle untuk antar jemput pegawai, sehingga mengeluarkan emisi sebesar 96.625 ton CO_2.

e. **Kenakeragaman Hayati**
BSI mengupayakan kelestarian keanekaragaman hayati di sekitar wilayah operasional Bank. BSI juga ikut andil berkontribusi dalam gerakan konservasi lingkungan. Kegiatan tersebut, antara lain direalisasikan dengan melakukan kegiatan menanam berbagai jenis pohon di kawasan Masjid BSI Bakauheni dan Bromo.

f. **Penggunaan Material Ramah Lingkungan**
BSI menggunakan material ramah lingkungan, seperti penggunaan AC dengan freon R-32, penggantian lampu biasa dengan lampu hemat energi seperti LED, menggunakan teknologi terbarukan seperti solar panel dan water treatment, serta penggunaan kertas yang diproses secara daur ulang.

g. **Pengelolaan Limbah**
Kegiatan operasional BSI tidak menghasilkan limbah berbahaya, namun tetap menjankan program pengelolaan limbah. Upaya yang dilakukan BSI dalam mengolah limbah yaitu dengan memastikan tidak ada tumpahan dan membuang bahan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan seperti oli bekas kendaraan operasional, tinta bekas, ataupun bahan kimia pembersih lantai. Bank juga melakukan program zero stock pada barang alat tulis kantor sehingga pengadaan sesuai dengan kebutuhan serta selalu mencatat jenis limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya.

Jenis Limbah Dihasilkan dan Metode Pengolahannya

JENIS LIMBAH	SUMBER	PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN
Limbah padat bukan bahan berbahaya dan beracun (B3)		
Kertas bekas pakai	Berasal dari kegiatan administrasidan dokumentasi	Didaur ulang dan dimanfaatkankembali dengan melibatkan pihak ketiga
Limbah cair bukan bahan berbahaya dan beracun (B3)		
Air bekas pakai	Dari kegiatan internal	Didaur ulang dan diolah kembali melalui fasilitas instalasipengolahan air limbah (IPAL) yang dikelola manajemen Gedung Wisma Mandiri 1 dan 2sehingga tidak ada yang langsung dibuang ke badan air.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan
Sesuai dengan jenis industri Bank yang tidak berhubungan langsung dengan alam, BSI tidak menerima pengaduan terkait lingkungan hidup. Namun demikian, Bank menyadari bahwa dukungan pada kelestarian lingkungan sangat penting dilakukan melalui aktivitas pembiayaan. Oleh karenanya, Bank perlu melakukan evaluasi atas dampak lingkungan pada seluruh debiturnya. Sepanjang tahun 2021, BSI tidak menerima informasi atas pengaduan lingkungan hidup yang terjadi pada debitur Bank.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Komitmen
Bank Syariah Indonesia senantiasa patuh pada peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Bagi Bank, komitmen tersebut sangat penting bagi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, Bank berkomitmen tinggi untuk memberikan perhatian dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pegawai tanpa adanya diskriminasi.

Menyadari bahwa K3 pegawai merupakan hal utama yang perlu diperhatikan agar profesionalisme kerja dapat terlaksana, maka dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Bank mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021, Standar Prosedur Operasional Human Capital dan Peraturan Perusahaan Bank Syariah Indonesia yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isu dan Risiko Ketenagakerjaan dan K3 yang Relevan dengan Perusahaan
Isu dan risiko bidang ketenagakerjaan meliputi kesetaraan gender dan kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, kebebasan berserikat, remunerasi, pelatihan dan pensiun. Sedangkan terkait K3 ialah kegiatan pemberian fasilitas kesehatan dan bidang keselamatan kerja meliputi penyediaan sarana keselamatan kerja dan meningkatkan kesadaran keselamatan kerja.



Target dan Rencana Program

Terkait dengan praktik ketenagakerjaan, dan K3 bagi pegawai, sepanjang tahun 2021 BSI telah menetapkan beberapa target pencapaian antara lain:

1. Terjaminnya kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tertuang dalam peraturan perusahaan;
2. Terjaminnya kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, maupun kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh pegawai;
3. Penyempurnaan skema fasilitas kesehatan bagi pegawai serta mewujudkan tempat kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai Bank;
4. Terwujudnya kegiatan operasional Bank yang berjalan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

Pelaksanaan Kegiatan

1. **Kesetaraan Gender dalam Kesempatan Kerja**

   BSI senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal kesempatan bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, Bank tidak melakukan diskriminasi atas alasan apa pun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

   Bank melaksanakan proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional. Selain memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, Bank juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

2. **Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan**

   BSI secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Bank. Setiap pegawai dijamin memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Bank.

   Realisasi program pelatihan dan pendidikan yang telah dilaksanakan sepanjang 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

3. **Remunerasi**

   Dalam penerapan remunerasi, Bank mengacu pada semua aturan yang berlaku. Bak menjamin bahwa remunerasi yang diterima pegawai berada di atas standar upah minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Bank melakukan kajian secara berkala agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi dengan pasar melalui penerapan 3P, yaitu:

   a. *Pay for Performance*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya.
   b. *Pay for Position*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya.
   c. *Pay for Person*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

BSI senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar upah minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Terkait dengan remunerasi, Bank senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

4. **Promosi dan Jenjang Karier**
   Bank memiliki sistem promosi baru yang mengacu kepada penilaian kinerja dan klasifikasi talenta. BSI melakukan harmonisasi *grading* dan mekanisme promosi pada tahun pertama pasca merger. Dengan demikian, pelaksanaan promosi pada tahun 2021 bersifat selektif pada pegawai yang telah mendapatkan *probation* (Pj) sejak dari *legacy*.

   Dalam program jenjang karier, Bank menjamin adanya kesetaraan, yaitu kesempatan yang sama antara pegawai laki-laki dan wanita. Sistem jenjang karier didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja dan klasifikasi talenta. Sistem pengembangan karier merupakan hal penting yang dapat memacu produktivitas setiap pegawai, meningkatkan sikap kerja, menciptakan kepuasan kerja guna mencapai tujuan Bank.

5. **Pelatihan Pensiun**
   Bank telah menyusun kebijakan atas program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purna bakti agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan lebih terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai.

6. **Internalisasi *Culture Core Values* AKHLAK pada Kegiatan Ketenagakerjaan**
   Sebagai bank hasil penggabungan (*merger*), BSI menaruh perhatian yang tinggi terhadap integrasi *culture* dan internalisasi *core values* AKHLAK. Aneka inisiatif telah dilakukan, seperti :
   a. Perumusan 18 perilaku kunci & 101 perilaku spesifik yang mengacu kepada *core values* AKHLAK.
   b. Pembentukan *Culture Squad* (*change leader*, *change champion*, *change agent*, dan tim internalisasi budaya) & *Employee Communication Channel* yang bersifat non-kedinasan (BSI Club dan BSI Muda) yang menjadi motor penggerak integrasi dan internalisasi *culture*.
   c. Kegiatan-kegiatan rutin internalisasi *culture* rutin (taujih pekanan, PHBI, *event* korporat, dan program internalisasi *culture* lainnya yang dilakukan di masing-masing unit kerja).

7. **Kegiatan Kesehatan**
   Kesehatan pegawai merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pegawai sebagai individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, Bank berupaya menunjang kualitas kesehatan seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas *general medical checkup* dan fasilitas jaminan kesehatan kepada seluruh pegawai serta dengan mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan.

   Dalam masa pandemi, pegawai mendapatkan pembaruan informasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dari pakar kesehatan dalam forum "Taujih Pekanan Ber-AKHLAK", sehingga pegawai lebih termotivasi dalam menjaga kesehatannya. Selain terhadap pegawainya, Bank juga memberikan fasilitas kesehatan kepada keluarga pegawai. Setiap individu diharapkan dapat menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat sedini mungkin.

   Bank juga memiliki BSI Club, yang salah satu kegiatannya adalah olah raga yang diselenggarakan secara berkala. BSI Club juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan pegawai sekaligus media bagi pegawai untuk dapat bertukar pikiran guna meningkatkan kinerja Bank.

8. **Keselamatan Kerja**
   Selain kesehatan, keselamatan kerja juga menjadi salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian besar dari manajemen. Bank selalu berupaya untuk meminimalisir seluruh risiko kecelakaan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman demi mengoptimalkan produktivitas kinerja Bank.

   Sebagai wujud komitmen Bank dalam menjaga keselamatan kerja seluruh karyawannya, Bank juga sudah melakukan pengelolaan risiko kecelakaan kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas, yaitu antara lain:
   a. Mengadakan pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala, mengadakan pelatihan dasar terhadap penggunaan alat pemadam kebakaran, melengkapi seluruh kantor operasional dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk alat pemadam kebakaran dan kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
   b. Untuk meningkatkan kinerja tim *security* dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh pegawai selama bekerja, BSI melakukan pelatihan K3 bagi petugas *security*.
   c. Untuk latihan kesiapan prosedur tanggap darurat gedung, dilakukan juga pengecekan peralatan dan sarana keselamatan gedung. Pengecekan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengecekan internal dilakukan oleh tim *security* secara berkala, sedangkan pengecekan eksternal dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Bank terus berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi setiap pegawai, dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut untuk memastikan terjaminnya kebutuhan operasional Bank dan terjaminnya keselamatan kerja bagi pegawai.

Bank juga mengikutsertakan seluruh pegawainya sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program BPJS Ketenagakerjaan yang dikuti antara lain Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JK). Sedangkan untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan kawal angkut uang dan barang berharga dilakukan asuransi jiwa.

Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BSI menerapkan praktik kerja dengan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencapai *"Zero Accident"*. Bank juga telah mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan keselamatan kerja, di antaranya:

1. Kegiatan evakuasi pegawai di dalam gedung dalam rangka mitigasi apabila terjadi bencana kebakaran/gempa bumi. Pelatihan ini dilakukan bersama dengan pihak pengelola gedung (PT UG Mandiri dan PT Alfa Goldland Realty).
2. Kegiatan penanganan kebakaran yang dilakukan bersama dengan pihak pengelola gedung (PT UG Mandiri dan PT Alfa Goldland Realty) dan juga dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran setempat.

Rincian pelaksanaan kegiatan terkait keselamatan pegawai disajikan dalam tabel berikut:

JENIS KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	PESERTA
Sosialisasi Keadaan Darurat	Wisma Mandiri 1 dan 2	Seluruh Karyawan dan Karyawati BSI
	The Tower	
Pelatihan *Emergency Response*	Wisma Mandiri 1 dan 2	HSE, Teknisi, Security
	The Tower	
Simulasi Evakuasi Kebakaran	Wisma Mandiri 1 dan 2	Seluruh Karyawan dan Karyawati BSI
	The Tower	

Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan dan K3

NO.	KEGIATAN	DAMPAK KUANTITATIF
1	Kesetaraan Gender Dalam Kesempatan Kerja	Kebijakan Bank yang mendukung terhadap adanya perlakuan adil dan kesetaraan gender terhadap pegawai, antara lain: 1) Implementasi Human Capital Strategy; 2) Pemberian *reward* pegawai antara lain seperti insentif dan bonus; 3) Penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembinaan, peringatan (SP1, SP2, SP3) dan PHK bagi pegawai bermasalah (*fraud*); 4) Mutasi, promosi/ rotasi/demosi pegawai dan pejabat unit kerja; 5) Pemberian apresiasi berupa penghargaan hadiah/bagi pegawai/cabang yang berprestasi; 6) Pelaksanaan program *screening* pegawai baru, terutama terkait hubungan keluarga; 7) Program *Assessment Center* Pegawai.
2	Program Pendidikan dan Pelatihan	Sepanjang tahun 2021, sebanyak 340.237 peserta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan realisasi anggaran sebesar Rp82,6 miliar.
3	Remunerasi	Rasio gaji tertinggi dan terendah BSI tahun 2021 sebagaimana diurai dalam tabel berikut.

KETERANGAN	RASIO
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	**1,1:1**
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	**1,25:1**
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	**3,1: 1**
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	**41,9:1**

NO.	KEGIATAN	DAMPAK KUANTITATIF
4	Promosi	Pada tahun 2021, terdapat 190 pegawai yang mendapatkan promosi kenaikan *grade*.

PEGAWAI	2021
N3 ke N2	4
N4 ke N3	19
N5 ke N4	73
N6 ke N5	94

NO.	KEGIATAN	DAMPAK KUANTITATIF
5	Pelatihan Pensiun	Pelatihan yang diselenggarakan secara *online* pada 2021 tersebut diikuti oleh 53 pegawai yang akan memasuki masa pensiun, dengan realisasi biaya program sebesar Rp 190.866.000,-
6	Internalisasi *Culture Core Values* AKHLAK	Partisipasi kepesertaan pegawai dalam kegiatan internalisasi BSI *One Culture* adalah sebanyak 19.364 pegawai.
7	Kegiatan Kesehatan	Pada tahun 2021, pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp74,3 miliar dengan kepesertaan sebanyak 42.476 peserta.
8	Keselamatan Kerja	Tahun 2021, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan iuran Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun sebesar Rp151,6 miliar dengan 19.380 peserta.

Mekanisme Penanganan Keadaan Darurat

BSI secara rutin melaksanakan sosialisasi keadaan darurat gedung, baik di kantor pusat maupun di kantor region, area dan cabang. Selain itu, Bank juga melaksanakan kegiatan pelatihan tim *emergency response* yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan Pelatihan Tim *Emergency Response*

JENIS PELATIHAN	LOKASI/ GEDUNG	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA
Hydrant Test Wisma Mandiri dan The Tower	Wisma Mandiri 1 dan 2 dan The Tower	Juli, September	HSE, Teknisi, Security
Monitoring Tata Letak dan Kebersihan Gedung	Wisma Mandiri 1 dan 2 dan The Tower	Juni, Agustus, Oktober, Desember	HSE, Teknisi, Security
Penggantian Apar	Wisma Mandiri 1 dan 2 dan The Tower	November	HSE, Teknisi, Security

Pelaksanaan simulasi evakuasi darurat kebakaran gedung terhadap penghuni gedung untuk mengukur kesiapan tim tanggap darurat dan mengukur lama waktu evakuasi dari lokasi gedung ke titik berkumpul. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang juga dihadiri oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK DAN PELANGGAN

Komitmen

Kepuasan nasabah merupakan prioritas BSI dalam menjalankan kegiatan usaha. Upaya tersebut dipenuhi tidak hanya dengan menyediakan produk yang dibutuhkan, tetapi juga layanan terbaik.

Selain itu, Bank juga memberikan perlindungan optimal kepada nasabah, termasuk berkenaan dengan kerahasiaan data nasabah. Untuk itu, BSI berkomitmen:

1. Setiap nasabah memiliki hak terhadap kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
2. Unit kerja BSI terkait berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan memelihara data nasabah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku

Sedangkan terkait dengan pengaduan nasabah, BSI berkomitmen:

1. Setiap nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
2. Nasabah dapat melakukan pengaduan melalui kantor cabang, *call center* BSI, *email*, media sosial, BSI Mobile ataupun surat.
3. Unit Kerja BSI terkait berkewajiban menyelesaikan pengaduan yang masuk baik pengaduan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Dalam menentukan komitmen dan kebijakan CSR terkait dengan produk dan pelanggan, BSI mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan dengan dengan berpedoman pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yang mencakup:

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah
2. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
5. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
6. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 perihal Bank Umum Syariah
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
9. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 perihal Konsumen Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2015 perihal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2015 perihal Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
12. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2015 perihal Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan
13. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 perihal Bank Umum Syariah
14. SE Operasi No. 12/026/OPS tanggal 31 Mei 2010 perihal Penetapan Penanggung Jawab Beban Kerugian Akibat Terjadi Risiko Operasional
15. SE Operasi No. 16/124/OPS tanggal 27 Juni 2015 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Penanganan Pengaduan Nasabah Terkait Indikasi Penipuan
16. SE Operasi No. 16/039/OPS tanggal 22 September 2014 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah Bank Syariah Mandiri

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, Bank menurunkannya menjadi peraturan internal, yaitu:

1. PTO Service Quality Cabang PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2021.
2. SPO Perlindungan dan Pengaduan Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2021.
3. SPB Penghimpunan Dana PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2021.
4. SPP Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2021.

Isu-isu Konsumen yang Terkait dengan Perusahaan

BSI memetakan beberapa isu konsumen yang terkait dengan aktivitas Bank yaitu sistem pengamanan data dan privasi nasabah menjadi tanggung jawab insan Bank yang berdampak pada kepercayaan nasabah. Semua nasabah memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan produk dan layanan yang telah dipastikan keamanannya melalui prosedur sesuai dengan kebijakan dan peraturan. Semua proses dilakukan untuk menjamin keamanan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan Bank.

Selain privasi, isu lainnya yang relevan ialah kejelasan informasi atas produk dan jasa yang dikeluarkan, seperti informasi produk simpanan, pinjaman, dan jasa perbankan. Layanan keuangan syariah juga menyediakan fitur transparan terkait produk yang tersedia, biaya, manfaat, dan risikonya.

Cakupan dan Lingkup Tanggung Jawab terhadap Konsumen

BSI mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kerahasiaan data nasabah melalui melalui pengelolaan Bank yang prudent dan profesional. Terjaminnya kerahasiaan data nasabah mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank. Bank menyadari bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah merupakan bersifat rahasia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

Internalisasi komitmen kerahasiaan data nasabah di lingkungan organisasi Bank, antara lain melalui penetapan kebijakan, pemberian opini oleh unit kerja kepatuhan, sosialisasi internal pada pelatihan pegawai, workshop internal maupun eksternal yang diikuti pegawai Bank.

Selain menjaga kerahasiaan data, Bank juga selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*).

Merespons hal tersebut, kebijakan yang diambil oleh BSI berupa Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah. Bentuk jaminan perlindungan simpanan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan aktiva produktif.

Target dan Rencana Program

Sesuai dengan semangat Bank untuk memberikan dampak positif kepada seluruh nasabah, berikut adalah target dan rencana program sebagai bentuk tanggung jawab Bank kepada nasabah:

1. Memberikan jaminan layanan yang tertuang dalam bentuk *Standard Level Agreement* (SLA) pengaduan yang terus dikaji dan diperbaharui merujuk pada ekspektasi nasabah. Selain itu, penentuan besarnya SLA pengaduan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Melakukan edukasi perbankan kepada seluruh elemen masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab Bank atas semangat Spirit Memakmurkan Negeri.
3. Melakukan survei kepuasan nasabah sebagai bagian dari perbaikan kualitas atas produk dan layanan yang diberikan Bank kepada nasabah.
4. Menyediakan layanan pengaduan nasabah melalui layanan *contact centre* 24/7, baik layanan *voice* (BSI *call* 14040) maupun n*onvoice* (BSI media sosial & *chatbot*).

Pelaksanaan Kegiatan

A. Kegiatan Pengaduan Nasabah

BSI telah membentuk pusat informasi produk dan layanan serta sekaligus sebagai sarana pengaduan bagi konsumen atas layanan perbankan. Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perbankan telah disediakan oleh Bank antara lain:

1. Melalui Situs Internet dengan alamat laman web: www. bankbsi.co.id;
2. Jejaring sosial: facebook, twitter;
3. BSI Call 14040;
4. *Chatbot* AISYAH (Asisten Interaktif BSI); dan
5. Kemudahaan fasilitas *mobile banking* dan internet *banking* serta keberadaan kantor cabang dan ATM Bank.

Saat ini pengaduan nasabah yang diterima oleh BSI dikelola oleh Unit Kerja Customer Care Management yang berada di Culture dan Customer Care Group. Sedangkan Pusat pengaduan konsumen dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain:

1. BSI *Call Center* yang beroperasi 24 jam melalui panggilan 14040 atau (021) 80639999.
2. *E-mail*: contactus@bankbsi.co.id
3. *Customer service* yang berada di cabang-cabang BSI terdekat.

Melalui pusat layanan informasi produk dan pengaduan tersebut, BSI memberikan respons yang cepat atas permintaan informasi produk dan layanan perbankan serta pengaduan yang masuk. Lebih lanjut, Bank dapat memberikan penyelesaian atas aduan secara lebih cepat dan bijak.

B. BSI *Call* 14040

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, BSI membentuk unit layanan yaitu BSI *Call* 14040 yang dapat diakses selama 24 jam dalam 7 (tujuh) hari.

Fungsi unit layanan tersebut adalah untuk melayani kebutuhan nasabah terhadap informasi terkait produk, fasilitas dan layanan Bank serta pengaduan nasabah yang dapat disampaikan melalui media komunikasi antara lain: telepon, *handphone*, dan *e-mail*.

Kategori layanan BSI *Call* meliputi:

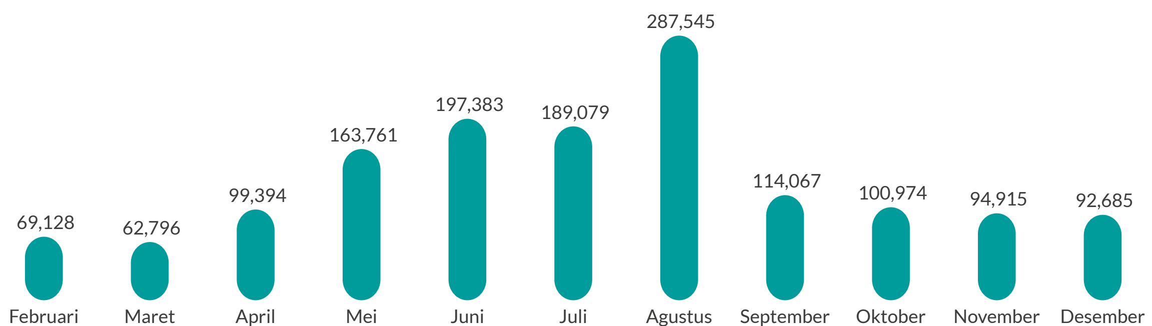
1. Informasi, terdiri dari:
    - Informasi Saldo
    - Informasi Mutasi
    - Informasi Produk BSI
2. Pemblokiran
    - Blokir kartu BSI
    - Blokir/penutupan BSI Mobile
3. Penerimaan pengaduan nasabah
4. Permintaan
    - Permintaan kode aktifasi
    - Permintaan reset pin ATM

BSI Call 14040 memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:
1. Menerima panggilan masuk dari nasabah BSI.
2. Memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk setiap pertanyaan yang diajukan nasabah BSI.
3. Mendengarkan dengan baik keluhan yang dialami nasabah BSI.
4. Menangani pelanggan dengan ramah dan tepat.
5. Menjaga target SCR yang ditetapkan pada BSI Call.
6. Menjaga *performance agent call centre*.
7. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan produk kepada *agent call centre*.

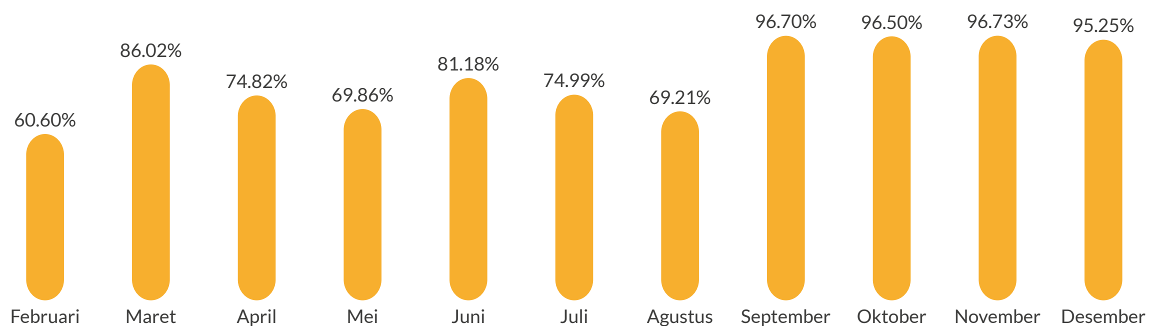
Selain BSI call 14040, Bank juga memiliki akun resmi media sosial BSI sebagai sarana pengaduan nasabah, antara lain:
1. Email: contactus@bankbsi.co.id
2. Facebook: Bank Syariah Indonesia
3. Twitter: @bankbsi_id; @bsihelp
4. Telegram: @BankSyariahIndonesiaBot
5. Instagram: Bank Syariah Indonesia
6. Whatsapp Business: 081584114040
7. Website: https://www.bankbsi.co.id
8. LiveChat Aisyah: https://www.bankbsi.co.id & Aplikasi BSI Mobile

Pencapaian Layanan Bank Syariah Indonesia Call 14040, Media Sosial dan *Chatbot*

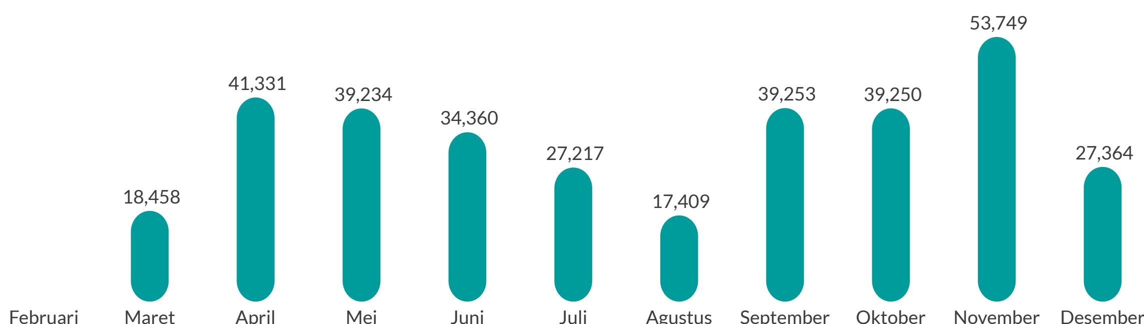
BSI Call 14040 (Layanan Banking & Hasanah)



Succes Rate (SCR) BSI Call 14040



Incoming Chat (Layanan Medsos & Chatbot)



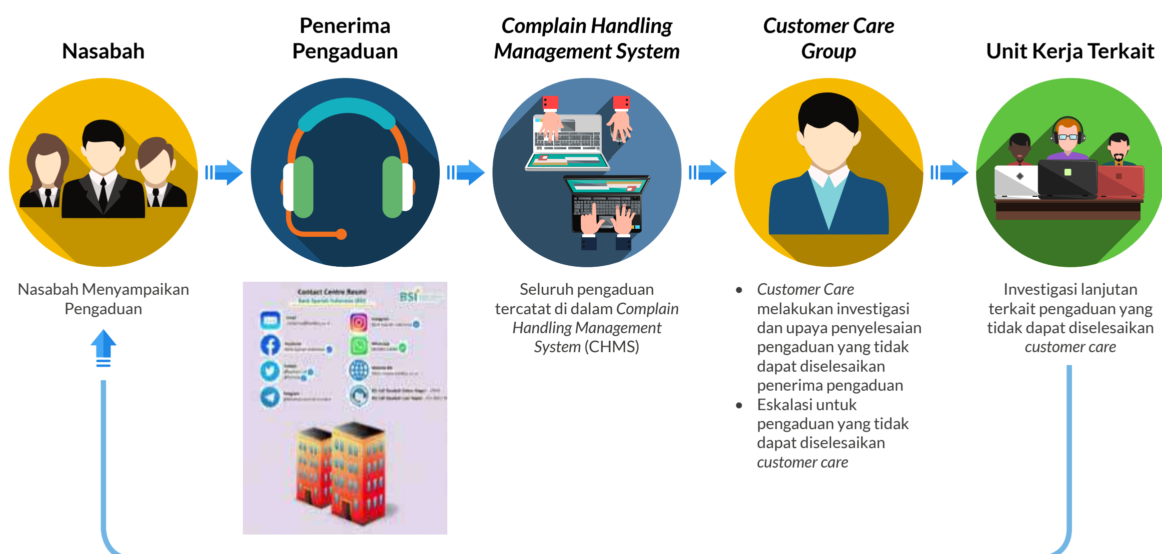
Alur Penanganan Pengaduan Nasabah

Melalui pusat pengaduan, BSI memberikan respons yang cepat atas pengaduan yang masuk dan menyelesaikannya secara bijak. Bank telah membentuk bagian *Customer Handling* yang berada di bawah *Culture dan Customer Care Group*, yang fokus melakukan *monitoring* pengaduan nasabah. Pencatatan pengaduan nasabah di lingkungan BSI sudah menggunakan aplikasi yang bernama *Complaint Handling Management System* (CHMS).

Pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui seluruh cabang dengan melakukan pengisian formulir permintaan/ pengaduan nasabah yang diatur tersendiri dalam peraturan internal Bank atau nasabah dapat juga menyampaikan pengaduannya melalui BSI *Call* maupun BSI *Mobile*. Selanjutnya Bank akan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan keluhan dari nasabah. Secara singkat, mekanisme tindak lanjut pengaduan nasabah sebagai berikut:

- Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui cabang atau BSI *Call*;
- Petugas cabang atau petugas BSI Call meng-input pengaduan yang disampaikan nasabah ke dalam *Complaint Handling Management System* (CHMS);
- Data yang tercatat di CHMS akan dimonitor dan ditindaklanjuti oleh Unit *Customer Handling*;
- Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan Kantor Cabang atau BSI *Call* akan di tindaklanjuti oleh *Customer Handling* dan unit kerja terkait;
- Hasil tindaklanjut dan informasi penyelesaian dari unit kerja terkait akan diteruskan kepada penerima pengaduan (cabang atau BSI *Call*);
- Penerima pengaduan akan meneruskan informasi/ jawaban atas pengaduan yang diterima kepada nasabah.

Adapun alur penanganan pengaduan nasabah tergambar dalam ilustrasi berikut ini.



C. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Sebagai upaya memberikan yang terbaik kepada nasabah, BSI melakukan transformasi layanan melalui *customer engagement*, *shifting transaction to digital* dan simplifikasi *service process*. Sejalan dengan visi BSI untuk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank", dalam meningkatkan layanan, BSI memiliki konsep *Ultimate Service as Business Acceleration*, yaitu berupaya melakukan peningkatan dari sisi *physical* (*premises*), *people* (pegawai), *service process* dan *business contribution*.

Service yang diberikan harus *ultimate*, dengan *strong point*:

1. Layanan semakin baik dan cepat.
2. Penuh energi dan kehangatan dalam melayani.
3. Memberikan alternatif solusi digital.
4. Meningkatkan fungsi *frontliner* menjadi *financial advisor.*

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, Bank Syariah Indonesia melaksanakan program-program antara lain:

1. Pemutakhiran panduan layanan dan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan dari regulator.
2. Peningkatan sistem pembukaan rekening antara lain yaitu digitalisasi pembukaan rekening serta *sales kit* produk.
3. Pemutakhiran fitur dan layanan BSI Mobile yang semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan nasabah.
4. Chatbot AISYAH (Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia) yang merupakan chatbot bank syariah pertama di Indonesia.
5. Peningkatan kompetensi untuk pegawai, melalui sertifikasi *customer service* dan teller, pelatihan layanan prima, pelatihan *service leadership* dan *guest speaker* layanan.
6. *Multiskill agent contact centre.*
7. Penambahan layanan *site call centre* di Tendean dan Bumi Serpong Damai, sehingga pelayanan nasabah tetap terjaga.
8. Dibukanya layanan *call centre corporate* 1500789.

Tidak hanya itu, BSI melalui tim layanan cabang melakukan program peningkatan layanan konsumen di antaranya:

1. Simplifikasi transaksi atau digitalisasi transaksi nasabah, berupa pengembangan *webform*, pembukaan rekening, pembiayaan, dan pengaduan nasabah melalui BSI Mobile, mesin antrean digital, tablet layanan pada segenap jaringan cabang, dan pengembangan lainnya.
2. Pengukuran kepuasan nasabah melalui berbagai *channel* dan *website* yang terintegrasi *realtime* melalui *Customer Satisfaction Survey* pada segenap jaringan cabang.
3. Pendampingan dan pemantauan kualitas layanan cabang melalui pengukuran pemahaman pegawai dan program *service recognition* pegawai berupa pelatihan, supervisi, dan apresiasi guna menjaga konsistensi pegawai dalam melayani nasabah

Program peningkatan layanan nasabah sejalan dengan hasil kinerja layanan cabang tahun 2021 yang mencapai poin 86,41 dari target 85.

Dampak Kegiatan

Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah merupakan tantangan bagi BSI. Mengingat Bank merupakan entitas hasil merger 3 (tiga) bank syariah, maka budaya *legacy* masih melekat di awal penggabungan. Karena itu, Bank menanamkan *Service Culture BSI* lebih dalam dengan hasil diperolehnya "Peringkat Pertama" pada Bank Service Excellence Monitor oleh Marketing Research Indonesia 2021 (BSEM - MRI), survei independen eksternal yang mengukur standar layanan perbankan dalam skala nasional.

Jumlah Pengaduan 2021

Bank membagi pengaduan yang disampaikan oleh nasabah ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Pengaduan secara lisan
   - Pengaduan wajib ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja *Customer Handling* dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima.
   - Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, maka Unit Kerja Penerima Pengaduan wajib meminta nasabah untuk menyampaikan pengaduannya secara tertulis.

b. Pengaduan secara tertulis
   - Pengaduan wajib diselesaikan oleh Unit kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja *Customer Handling* dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak pengaduan diterima.
   - Apabila pengaduan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja, maka penerima pengaduan wajib menyampaikan informasi perpanjangan waktu kepada nasabah secara tertulis.
   - Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan 20 hari kerja berikutnya (jika perlu).

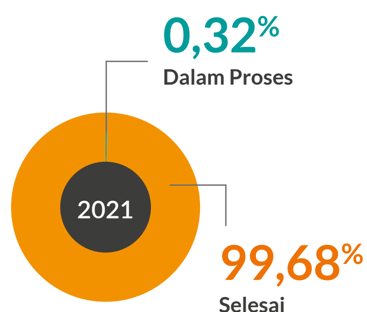
Terkait dengan pengaduan tersebut, Bank senantiasa menyelesaikan pengaduan dengan baik sebagai wujud pelayanan prima yang diberikan oleh BSI kepada nasabah. Data terkait penyelesaian pengaduan dan keluhan nasabah yang sudah dilakukan oleh BSI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Data Pengaduan Tahun 2021

	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL
Total Pengaduan	33.402	69.460	61.986	66.694	231.542
Dalam Proses	0	0	0	733	733
Selesai	33.402	69.460	61.986	65.961	230.809

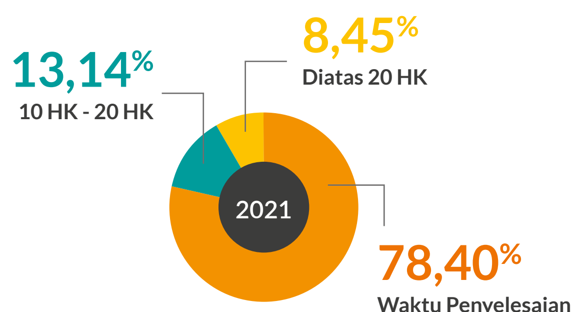
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL
Maksimal 10 HK	29.870	54.979	38.526	57.595	180.970
Maksimal 20 HK	2.857	11.089	10.234	6.156	30.336
Maksimal >20 HK	675	53.392	13.226	2.210	19.503
Total	**33.402**	**69.460**	**61.986**	**65.961**	**230.809**

KATEGORI	TOTAL
Proses/Transaksi dan Fasilitas	218.609
Kejahatan Perbankan	6.762
Produk	3.352
Pelayanan	2.819



Pengaduan:

Total	231.542 Pengaduan
Selesai	230.809 Pengaduan
Dalam Proses	733 Pengaduan



Waktu Penyelesaian:

Dibawah 10 HK	78,40%
10 HK - 20 HK	30.336
Diatas 20 HK	180.970

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP SOSIAL KEMASYARAKATAN

Komitmen

Bank Syariah Indonesia senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Pelaksanaan program CSR di Bank Syariah Indonesia dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk, (UPZ Baznas BSI) dengan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat) dan Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik (YHT), dengan PKS No.UPZ BAZNAS BSI:01/543/PKS/DIR, No.YBSM Umat:20/004/PKS/YBSMU, No.YHT:YHT/PK/2021/001 tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pembantuan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Lingkungan PT Bank Syariah Indonesia Tbk,

Laznas BSMU adalah mitra utama BSI dalam kegiatan sosial. Adapun pendirian Yayasan BSM Umat (yang menaungi LAZNAS BSMU) dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 406 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat sebagai Lembaga Amil Zakat, yang kemudian diberikan pembaruan Izin LAZNAS dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 1010 Tahun 2021, tanggal 06 Oktober 2021.

Pada 1 Oktober 2021, Yayasan Insan Hasanah Mulia (Hasanah Titik) resmi melakukan penandatanganan akad penggabungan kepada Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSMU). Penggabungan ini bertujuan untuk memaksimalkan peran sebagai sebagai lembaga pengelola Ziswaf dan Dana Sosial serta meningkatkan kualitas layanan kepada mustahik dan penerima manfaat.

Sedangkan penyaluran Dana Infaq dan Dana Sosial/Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dilakukan kerja sama 2 (dua) pihak antara BSI dan Laznas BSMU. Penyaluran Dana Sosial/ TBDSP mengacu kepada Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSNMUI/ XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah serta dana sosial dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSMU).

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Bank Syariah Indonesia melakukan kordinasi dengan mitra penyalur ZIS dalam kegiatan program CSR dibidang sosial kemasyarakatan setiap tahun

Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pengembangan Produk Keuangan Berkelanjutan**

   Salah satu program prioritas BSI dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah pengembangan produk keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan. Dalam menentukan produk yang sesuai keuangan berkelanjutan, BSI mengacu Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 POJK 60/POJK.04/2017 tentang Green Bond dan Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No.51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu:

   a. Peningkatan Portfolio Pembiayaan UMKM
   b. Peningkatan Portfolio Hijau / Green Financing segmen NonUMKM

   Sepanjang periode 2021, BSI berhasil mencatat kinerja ekonomi secara optimal. Bank membukukan aset sebesar Rp265.289 miliar, pembiayaan Rp171,290 miliar, dana pihak ketiga (DPK) Rp233.250 miliar, serta laba bersih Rp3.028 miliar. BSI berhasil menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp46.158 miliar, yang terdiri dari Portfolio UMKM sebesar Rp39.461 miliar dan Portfolio Green Financing (NonUMKM) sebesar Rp6.696 miliar. Adapun rasio pembiayaan berkelanjutan terhadap total pembiayaan adalah 27%.

   Pembiayaan UMKM tersebut terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelajutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu: Tujuan 1: Tanpa kemiskinan; Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; dan Tujuan 10: Berkurangnya kesenjangan.

   Adapun penyaluran *green financing* (Non UMKM) yang sesuai dengan 11 kegiatan usaha berwawasan lingkungan, yang dominan tercatat di sektor berikut:

   1. Sektor Listrik, Gas, Air (Renewable Energy/ PLT Panas Bumi, PLT MicroHidro)
   2. Sektor Pertanian, Perburuan, Kehutanan (Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan / Perkebunan Kelapa Sawit Bersertifikat ISPO)

3. Sektor Kontruksi (Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar /Green Building)
4. Sektor Industri (Menghasilkan produk yang dapat mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi)

Berikut pencapaian kinerja pembiayaan berkelanjutan

Realisasi Keuangan Berkelanjutan

URAIAN	SATUAN	2021
Penyaluran Dana : 1. Portfolio UMKM 2. Portfolio Hijau / Green Financing (NonUMKM)	Rp Miliar	39.461,23 6.696,74
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
Total Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Rp Miliar	46.157,97
Total Pembiayaan Non Kegiatan Usaha Berkelanjutan.		125.133,19
Total Pembiayaan		171.291,16
Persentase Total Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap Total Pembiayaan Bank	%	27%
Pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan berkelanjutan :		
a. Energi Terbarukan	Rp Miliar	906
b. Efisiensi Energi		-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi		-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan		1.193
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air		-
f. Transportasi Ramah Lingkungan		20
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan		101
h. Adaptasi Perubahan Iklim		-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi		3.744
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional		225
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya		508
l. Kegiatan UMKM		39.461

2. **Green Campaign and Efficiency**

   a. **Kampanye Sustainable Finance (SF)**

   Landasan pelaksanaan program kampanye *Sustainable Finance* (SF) atau keuangan berkelanjutan, yaitu POJK No.51/ POJK.03/2017, yang bertujuan untuk mendukung gerakan *green campaign*. Kegiatan ini dimulai dari lingkungan terdekat seperti kantor, rumah maupun tempat umum. SF disebar melalui *flyer* maupun video di media sosial BSI (instagram dan youtube), sehingga tersampaikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Secara internal, informasi disebarkan melalui *whatsapp group*.

   Video kampanye SF berupa video animasi dengan konsep edukasi yang meliputi pengertian keuangan berkelanjutan, contoh penerapannya, tips kesehatan di era pandemi COVID-19 dan jenis sampah yang sulit untuk dimusnahkan. Penyabaran video tersebut diharapkan pemangku kepentingan dan masyarakat memahami keuangan berkelanjutan dan contoh penerapannya.

   BSI juga mengajak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan mengurangi sampah dengan cara membawa kantung belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri serta mengganti penggunaan sedotan plastik dengan sedotan *stainless*. Dari hal yang kecil, akan membawa dampak besar untuk kita, perusahaan, juga lingkungan sekitar.

Program *Green Campaign*:
Kegiatan tersebut dlakukan melalui:
1. Penggunaan Teknologi Terbarukan (Solar Panel, Water Treatment, Penggunaan Material Hemat Energi).
2. Pemanfaatan kertas bekas
3. Digitalisasi (Permintaan barang cetakan secara online).
4. Penggunaan *pending machine* untuk daur ulang sampah plastic/botol minuman.
5. Pembangunan gedung kantor dengan konsep green building.

b. Program *Financial Inclusion*

BSI juga telah menerapkan beberapa program inklusi keuangan dengan tujuan mengembangkan keuangan syariah kepada masyarakat luas terhadap layanan keuangan yang tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah. Program tersebut merujuk pada visi nasional keuangan inklusif dari Bank Indonesia, yakni mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Melalui program inklusi keuangan tersebut, BSI berkomitmen untuk memberikan dampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang menabung maupun berinvestasi pada setiap layanan keuangan syariah. Adapun program kegiatan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan oleh BSI dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Program Kegiatan *Financial Inclusion* Tahun 2021

No.	TANGGAL	KEGIATAN	PESERTA	LOKASI
1	11 Februari 2021	Paparan program & strategi pembiayaan Bank Syariah Indonesia bersama Bekraf	UMKM	online
2	23 Februari 2021	Launching Modest Fashion Founder Fund (MFFF) bersama Kemenparekraf	UMKM	online
3	24 Februari 2021	Edukasi keuangan syariah bagi UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat bersama OJK	UMKM	online
4	11 Maret 2021	Temu bisnis dengan UMKM binaan Kemenparekraf di Palembang	UMKM	online dan offline
5	17,18,19 Maret 2021	Penjurian 120 peserta Modest Fashion Founder Fund (MFFF) bersama Kemenparekraf	UMKM	online dan offline
6	22 Maret 2021	Edukasi dan iklusi keuangan syariah bagi anggota PP Muhammadiyah bersama Kemenko	UMKM	online dan offline
7	5 April 2021	Pemaparan produk dalam acara persiapan kerja sama dengan Indostation	Pesantren	offline
8	20 April 2021	Go Digital Jakarta 1	UMKM	on line
9	22 April 2021	Literasi keuangan PP Muhammadiyah	UMKM	online dan offline
10	22 April 2021	Literasi keuangan podok pesantren	Pesantren	offline
11	22 April 2021	Mentoring peserta MFFF	UMKM	online
12	26 April 2021	Pelatihan UMKM bersama Shopee	UMKM	online
13	30 April 2021	Webinar UMKM bersama Universitas Semarang	UMKM dan Mahasiswa	online
14	30 April 2021	Pesantren Habib Lutfi Pekalongan terkait Pertashop	pesantren	offline
15	3 Mei 2021	Memorandum of Understanding (MOU) dengan Jasa Marga		offline
16	3 Mei 2021	Pelatihan UMKM bersama Shopee	UMKM	on line
17	5 Mei 2021	MOU Kemenparekraf		offline
18	8 Mei 2021	Go Digital Medan, Palembang, Surabaya, dan Aceh	UMKM	on line
19	3 Juni 2021	Silaturahmi dan temu petani binaan Pemalang AgroWangi	Petani	offline
20	4 Juni 2021	Webinar perkembangan industri halal bersama Kementerian Perindustrian	UMKM	online
21	8 Juni 2021	Webinar kiat sukses budidaya porang bersama KOPITU	Petani	online

Program Kegiatan *Financial Inclusion* Tahun 2021

No.	TANGGAL	KEGIATAN	PESERTA	LOKASI
22	9 Juni 2021	Webinar cerdas mengelola keuangan usaha bersama Baznas	UMKM	online
23	9 Juni 2021	Peresmian dan inklusi keuangan program mikrosite bersama Indo Mobil dan pesantren	Pesantren	offline
24	22 Juni 2021	Literasi keuangan dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Petani dan Nelayan	on line
25	23 Juni 2021	Literasi keuangan degan KOPITU	Petani	on line
26	26 Juni 2021	Italk show bersama ISYEF	UMKM	online
27	29 Juni 2021	Literasi keuangan dengan amphuri	Petani	online
28	5 Juli 2021	Temu bisnis dengan UMKM binaan Kemenparekraf di Aceh	UMKM	online
29	5 Juli 2021	Inklusi keuangan DPP Petani	Petani	online
30	3 Juli 2021	Pelatihan UMKM bersama Shopee	UMKM Laznas	online
31	3 Agustus 2021	Pelatihan UMKM bersama Shopee	UMKM Laznas	online
32	19 Agustus 2021	Webinar financial planing serta business matching UMKM bersama Bank Indonesia	UMKM	online
33	7 September 2021	Webinar financial planing serta business matching UMKM bersama Bank Indonesia	UMKM	online
34	13 September 2021	Webinar business meeting bersama Bank Indonesia dan ISYWF	UMKM	online
35	14 September 2021	Webinar pembekalan tim program kedai reka bersama UNMUL	UMKM	online
36	13 Oktober 2021	Webinar penyaluran KUR dan Go Digital di Desa Batik Kauman	UMKM	offline
37	15 Oktober 2021	Webinar permodalan bersama HIPMI	UMKM	online
38	20 Oktober 2021	ISYEFpreneur	Entrepeneur	online
39	22 Oktober 2021	Pelatihan digital UMKM halal bersama Bank Indonesia dan IDEA	UMKM	onine
40	28 Oktober 2021	Webinar dengan PPUMI (pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia)	UMKM	onine
41	29 Oktober 2021	Doremi preneur festival	UMKM	online
42	30 Oktober 2021	Webinar bersama Ikatan Saudagar Muslim Indonesia	UMKM	offline
43	10 November 2021	Sosialisasi dengan FOKAL	Anggota Fokal	onlne
44	12 November 2021	Pelatihan UMKM bersama PP Muhammadiyah di Padang	UMKM	offline
45	19 November 2021	Pelatihan UMKM Pelataran Korea bersama KADIN	UMKM	Offline
46	25 November 2021	Inklusi keuangan bersama Kemenko dan pesantren di Tasik	Pesantren	offline
47	26 November 2021	Inklusi keuangan bersama Kemenko dan pesantren di Garut	Pesantren	offline
48	2 Desember 2021	Inklusi keuangan pesantren bersama Kemenko di Kepulauan Seribu	Pesantren	offline
49	7 Desember 2021	Pelatiham UMKM bersama PP Muhammadiyah di Gresik	UMKM	offline
50	9 Desember 2021	Inklusi keuangan pesantren bersama Kemenko di pesantren Ashofa Tangerang (HSN)	Pesantren	offline
51	10 Desember 2021	Webinar bersama MUI di jakarta	Pesantren & UMKM	offline
52	17 Desember 2021	Pelatihan UMKM bersama PP Muhammadiyah di Pontianak	UMKM	offline
53	18 Desember 2021	Workshop ekosistem kendaraan listrik dan konversi bersama Depnaker DKI Jakarta	UMKM	online

3. **Kegiatan Sosial dan Spiritual Bersama BSMU**
   Dalam implementasi fungsi sosial dan spiritual, BSI menjalin kerja sama dengan BSMU (Bangun Sejahtera Mitra Umat) dalam melaksanakan program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*), sosial dan pemberdayaan. Ada 3 (tiga) pilar yang menjadi dasar implementasi, yatu "Didik Umat" yang fokus pada pendidikan, "Mitra Umat" yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan "Simpati Umat" yang berfokus pada dukungan kemanusiaan dan sosial termasuk didalamnya kebencanaan dan kesehatan.

   Program "Didik Umat" terdiri dari:
   1. Sahabat Pelajar Indonesia
      Program dukungan pembiayaan pendidikan dan pembinaan keislaman serta pengembangan konsep diri untuk anak dhuafa di tingkat sekolah menengah pertama dan atas (SMP dan SMA) guna mempersiapkan dan akselerasi pendidikan dasar dan menengah generasi selanjutnya yang diharapkan dapat memberikan dampak untuk mengubah kondisi keluarga, rencana masa depan dalam memutus rantai kemiskinan, dan minimnya keterampilan hidup dasar.

      Program ini juga sejalan dengan pendidikan dasar 12 tahun untuk memperkecil angka putus sekolah. Adapun tujuan program ini untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter, akhlak dan kecakapan dalam membangun prestasi ke tingkat perguruan tinggi. Sasaran program Sahabat Pelajar Indonesia adalah 5.000 pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu.
   2. BSI *Scholarship*
      Program beasiswa jenjang sarjana (S1) yang bertujuan untuk membentuk para pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah dan dapat menjadi teladan yang mampu berkontribusi khususnya dalam bidang industri ekonomi syariah. BSI Scholarship terdiri atas 2 (dua) program yaitu BSI Prestasi dan BSI Inspirasi yang didesain khusus jenjang Pendidikan sarjana selama 2 (dua) tahun ajaran, dimulai dari semester 3 (tiga). BSI Inspirasi bertujuan untuk memberikan pemerataan pendidikan jenjang sarjana dan BSI Prestasi bertujuan untuk membentuk para pemimpin muda yang siap terjun di industri ekonomi syariah.
   3. ISDP (*Islamic Sociopreneur Development Program*)
      Program beasiswa ISDP merupakan program yang dijalankan dalam bentuk program pembinaan dan pelatihan usaha bagi mahasiswa untuk menjadi wirausahawan muda yang memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat. Tujuan program untuk membentuk pemuda Islam yang memiliki wawasan, pemahaman keislaman, melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai *sociopreneur*, mencetak alumni program yang mandiri dan peduli dengan masalah sosial sekaligus menjadi agen mitra dalam pemberdayaan masyarakat.
   4. Program Rumah Tahfidz
      Program ini berbasis *life skill* yang melahirkan Hafidz Qur'an, dimana program ini bertujuan mencetak generasi yang hafal Al-Qur'an, memiliki akhlak mulia dan memberikan pembekalan *life skill* . Adapun sasaran penerima manfaat lulusan SMP sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu.
   5. Program LIKES
      Kegiatan edukasi sekaligus sosialisasi yang berkaitan dengan literasi keuangan dan ekonomi syariah. Bentuk kegiatan adalah penyampaian literasi keuangan dan ekonomi syariah melalui media social, layanan tanya jawab serta layanan konsultasi bagi masyarakat. Target peserta adalah semua kalangan yang ingin memahami lebih jauh terkait muamalah, waris, zakat, dan lainnya.
   6. Program Wakaf Qur'an *Braille*
      Program yang menghimpun dan menyalurkan Mushaf al Quran *braille* bagi tunanetra muslimin dan muslimah seluruh Indonesia yang bertujuan memberikan kemudahan dalam mendapatkan Al-Qur'an bagi tunanetra muslim/ah di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Qur'an bagi tunanetra. Adapun sasaran tunanetra muslimin dan muslimah yang rutin dalam belajar Al-Qur'an.
   7. Program Wakaf Qur'an
      Program menghimpun dan menyalurkan mushaf Al-Qur'an kepada masyarakat umum, Masjid, Mushalla, komunitas, lembaga dan Yayasan yang memiliki program mengajar Al-Qur'an. Adapun jenis Al-Qur'an yang disalurkan terdiri dari dua jenis yaitu Al-Qur'an hafalan dan Al-Qur'an terjemah. Adapun tujuan program penyaluran wakaf Al-Quran ini adalah menebar manfaat melalui Al-Qur'an ke seluruh daerah yang membutuhkan Al-Qur'an, mendukung pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, membantu mencetak generasi Al-Qur'an dan membiasakan masyarakat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an.

   Untuk program "Mitra Umat" terdiri dari:
   1. Pemberdayaan Ekonomi
      Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga diinisiasikanlah Program Desa BSM (Berdaya Sejahtera Mandiri) merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian BSI atas kontribusi seluruh nasabah yang telah mempercayakan investasi serta zakat Infaq shodaqoh yang selama ini dititipkan dalam setiap transaksi. Program Desa BSM merupakan program pengembangan ekonomi

desa melalui penguatan sumberdaya lokal untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana ZISWAF.

Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan *cluster* usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pendekatan program dilakukan dengan pendampingan intensif, baik teknis maupun dakwah islam. Saat ini terdapat 4 (empat) desa existing yang masih didampingi yaitu Desa Rejo Asri-Lampung Tengah (*Cluster* Pertanian), Desa Kedarpan-Purbalingga (*Cluster* Peternakan Domba/ Kambing), Desa Jati-Trenggalek (*Cluster* Peternakan Sapi Potong) dan Desa Candibinangun-Sleman (*Cluster* Mina Padi).

2. Program Ketahanan Pangan
   Bantuan sosial sebagai kepedulian sebagai respon dari kondisi bangsa khususnya Pesantren, masyarakat sekitar Masjid dan kelompok disabilitas yang saat ini menghadapi kesulitan sebagai dampak dari wabah COVID-19. Bentuk program ketahanan pangan adalah bantuan *charity* berupa bahan pokok serta pengembangan usaha ekonomi bagi kemandirian Pesantren.
3. Program Warteg *Mobile*
   Salah satu kegiatan pendayagunaan dana ZIS BSM Umat. Warteg *Mobile* adalah konsep penyaluran makanan siap saji (siap konsumsi) untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan pangan, dengan target sasaran pemetik manfaat seperti masyarakat di pemukiman padat/ kumuh, komunitas disabilitas, komunitas pengemudi angkot/taksi/ojek, serta masyarakat yang terdampak bencana (kebakaran, kebanjiran dan lainnya).

Untuk program "Simpati Umat" terdiri dari:

1. Bantuan Kemanusiaan
   Program pemberian bantuan untuk berbagai *asnaf*: fakir, miskin, *fii sabilillaah*, dan *gharimin*. Beberapa aspek yang dibantu melalui bantuan ini antara lain: bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Sepanjang 2021, telah tersalurkan bantuan untuk 7405 orang penerima manfaat senilai Rp 4.611.112.300.
2. *Disaster Emergency and Recovery Center*
   Program menguatkan fungsi pengelolaan respons kebencanaan serta pemulihan (*recovery*) bagi masyarakat yang terdampak dengan tujuan mengurangi resiko korban jiwa serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Sepanjang tahun 2021, BSM Umat setidaknya telah ikut membantu di 9 (sembilan) lokasi seluruh Indonesia.

   Disaster Emergency and Recovery Center memiliki 3 (tiga) aktivitas utama yang fokus di aspek kebencanaan yaitu: program pengurangan risiko bencana (PRB), respons tanggap bencana, dan pemulihan pascabencana.

   Program pengurangan risiko bencana bertujuan membentuk kesiap-siagaan masyarakat di wilayah rawan bencana melalui pendampingan intensif di bidang kebencanaan, pengelolaan keuangan, dan termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan respons tanggap bencana fokus pada kegiatan kemanusiaan untuk memenuhi darurat kebutuhan penyintas pada dua pekan pertama, dan sepanjang 2021 sudah melakukan aktivitasnya setidaknya di 10 lokasi bencana yang cukup besar, dengan total penerima manfaat sebanyak 42 ribu orang. Untuk kegiatan pemulihan pascabencana, sudah disalurkan bantuan di 11 titik seperti masjid, sekolah/madrasah, dan pesantren sepanjang tahun 2021 lalu.



3. Healthy & Mobile Care (HMC)
   Program layanan Kesehatan, łayanan kebutuhan ambulance medis, serta bantuan pelayanan jenazah bagi masyarakat dhuafa. Berkaitan dengan pandemi, program ini juga melakukan aktivitas pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui beberapa kegiatan antara lain: pembagian paket isolasi mandiri yang berisi sembako, masker, dan hand sanitizer untuk 222 penerima manfaat; vaksinasi massal yang dilakukan di 27 lokasi dengan 3745 orang penerima manfaat; bantuan tabung oksigen dan isinya bagi 43 orang individu serta 16 lembaga dengan total bantuan 270 tabung oksigen ukuran 6 m3; bantuan alat Kesehatan ke RS rujukan covid dengan nilai Rp 240 juta; 200 porsi makanan siap saji dengan konsep penerima manfaat *3 in 1* (UMKM, warga yang isoman, serta rider ojol); bantuan ambulance medis dan mobil jenazah covid; serta bantuan penguatan ekonomi dan kewirausahaan bagi warga yang kepala keluarganya meninggal karena terdampak covid. Di luar kondisi pandemi, HMC tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat terkait kebutuhan ambuance, pemulasaraan jenazah, dan pemeriksaan kesehatan.

Program Penanggulangan Pandemi COVID 2021

Pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya perubahan dan pembatasan dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari, di segala aspek dan strata masyarakat. Angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 pun sangat tinggi, untuk itu BSMU melakukan beberapa kegiatan untuk membantu masyarakat dalam mencegah dan mengurangi dampak dari virus tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan BSMU antara lain:

a. Bantuan Tabung oksigen
   Merupakan kegiatan penyediaan tabung oksigen berukuran 6mm beserta isinya, untuk masyarakat yang menderita COVID dan menjalani isolasi mandiri di rumah, maupun bantuan untuk RS yang melakukan perawatan pasien COVID. Untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah, relawan mengantarkan tabung oksigen serta memasangkan perlengkapannya, dalam 3 hari, tabung oksigen akan diambil kembali untuk dilakukan pengisian dan penyaluran ke masyarakat lain.

   Jumlah Penerima Manfaat :
   - Isolasi mandiri: 42 orang sejumlah 70 tabung
   - RS dan lembaga: 15 lembaga sejumlah 196 tabung

b. Vaksinasi
   Kegiatan mendukung pemerintah dalam menurunkan angka kasus covid dengan cara memberikan bantuan dalam kegiatan vaksinasi masal di Jakarta dan Aceh.

   Jumlah Penerima Manfaat : 7.159 orang dan 31 lembaga
c. Bantuan Paket Isolasi
   Kegiatan memberikan paket bantuan hidup berupa bahan makanan pokok, vitamin, dan penambah imunitas lain kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah.
   - Jumlah Penerima Manfaat: 222 orang
   - Dari 3 kegiatan tersebut, Total Jumlah penyalurannya: Rp1.816.980.971
   - Sumber dana: Zakat dan infaq kebencanaan
d. Bantuan Alat kesehatan ke RS
   Bantuan dalam bentuk pembelian alat kesehatan di satu RS untuk melayani pasien Covid-19 sebesar Rp240.000.000.
e. Program Pendampingan keluarga terdampak Covid-19
   Program bantuan kepada keluarga terdampak covid, dimana kepala keluarga meninggal dikarenakan covid. Bantuan berupa bantuan dana dan pendampingan usaha kepada ibu, bantuan biaya hidup sehari - hari dan biaya pendidikan untuk anak selama 1 tahun.
   - Jumlah Penerima Manfaat: 20 kepala keluarga
   - Jumlah penyalurannya: Rp1.070.000.000
   - Sumber dana: Zakat

Capaian dan Dampak Kegiatan

Selama tahun 2021, jenis program yang telah dilaksanakan pada kegiatan bersama BSMU terdiri dari 2 (dua) bagian antara lain:

1. Pendistribusian, merupakan kegiatan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup penerima manfaat (konsumtif) serta penyaluran/bantuan sosial untuk kebutuhan individu/ masyarakat yang sifatnya darurat.
2. Pendayagunaan, merupakan kegiatan dalam memaksimalkan dana untuk pemberdayaan dan kemaslahatan umat serta memaksimalkan dana untuk kegiatan produktif atau penambahan *income generating* yang berkelanjutan.

Dalam setiap jenis program yang dilakukan, BSI telah memberikan dampak bagi masyarakat luas. Penjelasan dampak pada kegiatan Laznas BSM dapat diurakan pada tabel di bawah ini:

Program dan Dampak Kegiatan Laznas BSM pada tahun 2021

NO.	NAMA PROGRAM	JENIS PROGRAM	DAMPAK KEGIATAN
Mitra Umat			
1	Desa Berdaya Sejahtera Indonesia (Desa BSI)	Pendayagunaan	Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak dhuafa dengan indikator meningkatnya pendapatan 0,5-1 kali dari pendapatan sebelumnya
2	UMKM Maslahah	Pendayagunaan	Membantu pemulihan usaha pelaku UMKM (ultra mikro) yang terdampak pandemi
3	Klaster Peternakan Berbasis Pondok Pesantren	Pendayagunaan	Membantu pengembangan ekonomi pesantren serta mningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar ponpes
Didik Umat			
1	Sahabat Pelajar Indonesia	Pendayagunaan	Keberlanjutan pendidikan tingkat SLTP - SLTA di masa pandemi
2	Islamic Sociopreneur Development Program	Pendayagunaan	Melahirkan wirausaha muda muslim yang memiliki kemandirian ekonomi dan dengan bisnis yang dibangun mampu melakukan pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat serta membuka lapangan kerja yang dapat membantu perekonomian orang-orang di sekitarnya.
3	BSI *Scholarship*	Pendayagunaan	Keberlanjutan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di masa pandemi
4	Program Rumah Tahfidz	Pendayagunaan	Mencetak santri penghafal Al Quran yang bisa memakmurkan masjid menjadi Imam dan mengajarkan Al-Qur'an sehingga mengurangi buta huruf Al-Qur'an
5	LIKES (Literasi Keuangan & Ekonomi Syariah)	Pendayagunaan	Meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan milenial
Simpati Umat			
1	Ketahanan Pangan (Santri, Masyarakat Dhuafa dan Disabilitas)	Pendistribusian	Meringankan beban kelompok masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi dengan memberikan bantuan pangan (beras dan bahan pangan lainnya) pada santri yatim/dhuafa, masyarakat dhuafa serta kelompok disabilitas
2	ATM Beras	Pendistribusian	Meringankan beban masyarakat dhuafa dengan memberikan bantuan pangan yang disalurkan melalui Mesin ATM Beras yang ditempatkan di Masjid sekitar lokasi masyarakat tersebut
3	Respon & *Recovery* Kebencanaan	Pendistribusian	Meringankan beban penyintas melalui respons bencana, bantuan logistik langsung serta program pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana. Termasuk menjaga kelestarian lingkungan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana.
4	Bantuan Kemanusian dan Santunan	Pendistribusian	Meringankan beban masyarakat dhuafa untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidup yang bersifat darurat
5	Program Pusara	Pendistribusian	Meringankan beban masyarakat dhuafa yang tertimpa musibah melalui layanan pemulasaraan jenazah sampai pemakaman
6	Bantuan Kesehatan & *Mobile Care (Ambulance)*	Pendistribusian	Meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan serta ambulance
8	Bantuan Sarana Prasarana Umum	Pendistribusian	Meningkatkan kualitas sarana dan prasana umum dilingkungan masyarakat miskin
9	Bantuan Keislaman	Pendistribusian	Membantu kelancaran dalam penyelenggaran kegiatan hari-hari besar islam
10	Bantuan Sarana Prasarana Ibadah	Pendistribusian	Membantu masyarakat khususnya kaum muslimin mendapatkan sararan ibadaha yang layak dan nyaman
11	Kafalah Da'I dan Marbot	Pendistribusian	Membantu kegiatan operasional para da'i dan marbot masjid dalam peningkatan kualitas layanan masjid serta dalam melakukan dakwah, termasuk di wilayah minoritas

Program dan Dampak Kegiatan Laznas BSM pada tahun 2021

NO.	NAMA PROGRAM	JENIS PROGRAM	DAMPAK KEGIATAN
12	Masjid BSM Cipularang	Pendistribusian	Membantu kemudahan ibadah serta tempat istirahat bagi para pengendara
13	Masjid Cipali	Pendistribusian	Membantu kemudahan ibadah serta istirahat bagi para pengendara di lintas jawa
14	Mushola Bromo	Pendistribusian	Membantu kemudahan ibadah sholat dan istirahat bagi para pengujung Kawasan wisata Bromo (TNGTS)
15	Masjid Bakauheni	Pendistribusian	Membantu kemudahan ibadah sholat dan istirahat bagi para pengendara dan masyarakat pengguna pelabuhan menuju Pulau Sumatera
16	Mobil Mushola	Pendistribusian	Membantu kemudahan ibadah masyarakat pada lokasi-lokasi keramaian yang memiliki keterbatasan sarana ibadah
17	Program Ramadhan	Pendistribusian	Membantu kemudahan dalam layanan berzakat serta memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dhuafa melalui penyaluran dana zakat
18	Program Kurban	Pendistribusian	Membantu kemudahan masyarakat dalam berkurban, membantu peternak, serta mendistribusikan bagi masyarakat yang membutuhkan
19	Kegiatan Sosial	Pendistribusian	Meringankan beban masyarakat khususnya masyaraktan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak (berobat, membayar kontrak rumah, transpor pulang, dll)

Saluran Pengaduan

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, BSI senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan social kemasyarakatan, dapat mengirimkan email ke divisi Corporate Secretary Group pada alamat email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Realisasi Dana Pengembangan Kemasyarakatan

Pada tahun 2021, BSI menyalurkan dana pengembangan sosial kemasyarakatan sebesar Rp187.140 juta, naik 2,95% dari realisasi penyaluran tahun sebelumnya sebesar Rp181.769 juta. Sumber dana pengembangan sosial kemasyarakatan Bank berasal dari dana zakat (zakat perusahaan, zakat pegawai, zakat nasabah dan zakat umum) dan dana kebajikan (infaq/shodaqoh, denda, pendapatan non halal, sumbangan/hibah).

Berikut rincian sumber dan penyaluran dana Zakat dan dana Kebajikan tahun 2021.

Sumber dan Penyaluran Dana Zakat (Rp Juta)

URAIAN	2021	2020
Sumber Dana Zakat		
Internal	101.684	74.202
Eksternal		
Pegawai	32.594	29.659
Nasabah/Umum	24.624	6.832
Jumlah	**158.902**	**110.693**
Penyaluran Dana Zakat		
Disalurkan ke lembaga lain	(127.611)	(104.962)
Kenaikan/(Penurunan) Dana Zakat	31.291	5.731
Saldo Awal Dana Zakat	**72.911**	**67.180**
Saldo Akhir Dana Zakat	**104.292**	**72.911**

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan (Rp Juta)

URAIAN	2021	2020
Sumber Dana Kebajikan		
Infaq dan Shadaqah	50.280	35.816
Denda	14.329	10.838
Pendapatan Non Halal	7.898	6.798
Sumbangan /Hibah	99	516
Jumlah	72.606	53.968
Penggunaan Dana Kebajikan		
Sumbangan	(59.529)	(76.807)
Kenaikan/(Penurunan) Dana Kebajikan	13.077	5.731
Saldo Awal Dana Kebajikan	**12.900**	**35.739**
Saldo Akhir Dana Kebajikan	**25.977**	**12.900**

Penyaluran BSMU sebagai Mitra BSI

BSMU sebagai mitra BSI, telah menyalurkan Zakat, Infak & Dana Sosial sebesar Rp140.019 juta (sudah termasuk hak amil) untuk periode tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Penyaluran Berdasarkan Sumber Dana

Laznas BSMU Tahun 2021 (Rp Juta)

SUMBER DANA	REALISASI 2021
Dana Zakat	42.309
UPZ BSI	38.712
Dana Infaq	44.835
Dana Sosial	14.163
Jumlah	**140,019**

*) sudah termasuk hak amil

Penyaluran Berdasarkan Program

Laznas BSMU Tahun 2021 (Rp Juta)

SUMBER DANA	MITRA UMAT	DIDIK UMAT	SIMPATI UMAT	TOTAL
Dana Zakat	4.234	10.671	24.989	39.894
Dana Infaq	1.035	5.178	28.451	34.664
Dana Sosial		1.986	11.708	13.694
Dana UPZ BSI	15.834	15.177	1.514	32.525
TOTAL	**21.103**	**33.012**	**66.662**	**120.777**

Penyaluran Berdasarkan Jenis Kegiatan

Laznas BSMU Tahun 2021

(Rp)

JENIS KEGIATAN		REALISASI			TOTAL KEGIATAN
		UPZ BSI	ZAKAT	INFAK	
Mitra Umat					
M1	Ketahanan Pangan	5.701.800.000	697.711.000	-	6.399.511.000
M2	Desa Berdaya Sejahtera Mandiri	9.139.229.200	741.186.000	475.000.000	10.355.415.200
M3	UKM Berdaya	2.510.967	-	251.275.000	253.785.967
M4	Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	2.258.543.597	202.864.000	2.461.407.597
M5	Klaster Peternakan	990.515.100	482.639.000	-	1.473.154.100
M6	Modal Usaha	500.000	53.685.000	105.500.000	159.685.000
	Jumlah Mitra Umat	15.834.555.267	4.233.764.597	1.034.639.000	21.102.958.864
Didik Umat					
D1	Sahabat Pelajar Indonesia	14.780.063.539	5.359.327.000	3.300.000	20.142.690.539
D2	Sarana & Prasarana Pendidikan	-	1.314.546.334	2.623.247.801	3.937.794.135
D3	Bantuan Beasiswa	22.200.000	3.522.946.075	404.359.400	3.949.505.475
D4	Gerakan Tetap Bisa Sekolah	-	36.299.400	-	36.299.400
D5	Beasiswa Tahfidz	374.664.669	78.454.040	766.194.613	1.219.313.322
D6	Islamic Sociopreneur Development Program	-	323.492.342	-	323.492.342
D7	Waqaf Quran	-	-	141.680.000	141.680.000
D8	Pelatihan. Worksop & Seminar	-	-	74.000.000	74.000.000
D9	Kafalah Guru	-	35.850.000	124.941.096	160.791.096
D10	BSI Scholarship	-	-	1.040.540.578	1.040.540.578
	Jumlah Didik Umat	15.176.928.208	10.670.915.191	5.178.263.488	31.026.106.887
Simpati Umat					
S1	Bantuan Kemanusian dan Santunan	52.400.000	10.568.645.988	3.412.317.579	4.205.903.579
S2	Kebencanaan dan Lingkungan Hidup	1.435.674.207	1.203.003.162	5.326.066.751	17.330.386.946
S3	Masjid BSM Cipularang	-	-	63.250.000	1.266.253.162
S4	Bantuan Sarana Prasarana Ibadah	25.000.000	1.743.010.550	3.677.416.559	3.702.416.559
S5	Bantuan Kesehatan	1.000.000	2.915.761.585	1.237.118.474	1.979.304.474
S6	Kurban	-	-	4.818.416.000	6.561.426.550
S7	Bantuan Keislaman	-	3.742.804.828	1.664.817.788	4.580.579.373
S8	Program Pusara	-	2.470.000	325.132.631	325.132.631
S9	Bantuan Ambulance	-	-	83.275.003	3.826.079.831
S10	Bantuan Sarana Prasarana Umum	-	190.445.000	171.520.000	73.990.000
S11	Program Sehat Sentral Terpadu	-	1.370.709	71.510.466	71.510.466
S12	Kafalah	-	1.124.964.485	874.377.578	1.064.822.578
S13	Mobil Mushola	-	3.697.067	8.559.026	9.929.735
S14	Masjid Cipali	-	-	3.385.000	1.128.349.485
S15	Ramadhan	-	3.435.325.000	2.613.802.732	2.617.499.799
S16	Mushola Bromo	-	-	3.487.825.000	3.487.825.000

Laznas BSMU Tahun 2021 (Rp)

JENIS KEGIATAN		REALISASI			TOTAL KEGIATAN
		UPZ BSI	ZAKAT	INFAK	
S17	LIKES	-	-	399.749.045	3.835.074.045
S18	ATM Beras	-	44.000.000	168.000.000	168.000.000
S19	Masjid Bakauheni	-		44.197.600	44.197.600
S20	Kegiatan Sosial	-	13.500.000	-	44.000.000
	Jumlah Simpati Umat	1.514.074.207	24.988.998.374	28.450.737.232	56.422.681.813
	Jumlah	**32.525.557.682**	**39.893.678.162**	**34.663.639.720**	**107.082.875.564**

Penyaluran Dana Sosial

Laznas BSMU Tahun 2021 (Rp Juta)

NO.	JENIS KEGIATAN	Jumlah
1	Ambulance/Kejenazahan	1.381
2	Beasiswa siswa berprestasi dan/atau kurang mampu	480
3	Fakir miskin	632
4	Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah	7.059
5	Kegiatan Keislaman & Dakwah	124
6	Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial	1.314
7	Pembangunan Masjid/Musholla	11.579
8	Penanggulangan Korban Bencana	179
9	Penunjang Masjid/Musholla (di luar pembangunan)	652
10	Sarana penunjang pendidikan Islam	2.568
11	Sosialisasi, edukasi & literasi ekonomi syariah	446
	Total	**26.414**

LAPORAN KEUANGAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(d/h/*previously* PT Bank BRIsyariah Tbk)

Laporan Keuangan
31 Desember 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/*previously* PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

Daftar Isi / ***Table of Contents***

****

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ngatari
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No.27
   Alamat rumah : Tebet Barat Dalam V No. 12 Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021 – 3040 5999
   Jabatan : Wakil Direktur Utama I

2. Nama : Ade Cahyo Nugroho
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No.27
   Alamat rumah : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021 – 3040 5999
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Strategi

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

We, the undersigned:

Name : Ngatari
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No.27
Domiciled address : Tebet Barat Dalam V No. 12 Jakarta Selatan
Telephone number : 021 – 3040 5999
Title : *Vice President Director I*

Name : Ade Cahyo Nugroho
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No.27
Domiciled address : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
Telephone number : 021 – 3040 5999
Title : *Finance and Strategy Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed;*
   b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. *We are responsible for the Bank's internal control systems.*

The statement has been made truthfully.

Jakarta, 19 Januari/*January* 2022

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of Board of Directors;*



Ngatari
Wakil Direktur Utama I/
Vice President Director I

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Keuangan dan Strategi/
Finance and Stratey Director



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2021, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and distributions of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00014/2.1025/AU.1/07/0222-1/1/I/2022



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as at 31 December 2021, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and distributions of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Acounting Standards.

JAKARTA,
19 Januari/*January* 2022

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0222

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2020*)	1 Januari/ *January* 2020*)	
ASET					***ASSETS***
KAS	4	4,119,903	3,180,739	2,210,290	***CASH***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	20,563,580	21,527,933	23,840,556	***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	6,42				***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga		1,389,347	6,543,680	3,297,805	*Third parties*
Pihak berelasi		469,442	2,220,518	366,763	*Related parties*
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		1,858,789	8,764,198	3,664,568	*Total current accounts and placement with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(17,238)	(68,393)	(4,407)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		1,841,551	8,695,805	3,660,161	*Net*
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	7,42				***INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES***
Pihak ketiga		29,166,103	18,856,741	14,978,925	*Third parties*
Pihak berelasi		38,431,042	30,273,754	23,822,085	*Related parties*
Jumlah investasi pada surat berharga		67,597,145	49,130,495	38,801,010	*Total investment in marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18,075)	(24,858)	(41,033)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		67,579,070	49,105,637	38,759,977	*Net*
TAGIHAN AKSEPTASI	8,42				***ACCEPTANCE RECEIVABLES***
Pihak ketiga		53,823	60,654	112,978	*Third parties*
Pihak berelasi		107,672	234,683	124,276	*Related parties*
Jumlah tagihan akseptasi		161,495	295,337	237,254	*Total acceptance receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,615)	(2,548)	(2,359)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		159,880	292,789	234,895	*Net*
PIUTANG	9,42				***RECEIVABLES***
Murabahah					*Murabahah*
Pihak ketiga		101,184,932	88,945,718	71,694,051	*Third parties*
Pihak berelasi		500,628	898,372	1,306,080	*Related parties*
Jumlah *murabahah*		101,685,560	89,844,090	73,000,131	*Total murabahah*
Istishna					*Istishna*
Pihak ketiga		359	637	2,970	*Third parties*
Ijarah					*Ijarah*
Pihak ketiga		101,570	39,167	21,422	*Third parties*
Jumlah piutang		101,787,489	89,883,894	73,024,523	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,450,506)	(3,294,706)	(1,939,242)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		98,336,983	86,589,188	71,085,281	*Net*
PINJAMAN *QARDH*	10,42				***FUNDS OF QARDH***
Pihak ketiga		8,133,403	6,963,070	7,221,898	*Third parties*
Pihak berelasi		1,285,828	2,317,785	1,343,328	*Related parties*
Jumlah pinjaman *qardh*		9,419,231	9,280,855	8,565,226	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(337,831)	(226,482)	(94,930)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		9,081,400	9,054,373	8,470,296	*Net*
Dipindahkan		201,682,367	178,446,464	148,261,456	*Carry forward*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2020*)	1 Januari/ *January* 2020*)	
ASET (lanjutan)					***ASSETS*** *(continued)*
Pindahan		201,682,367	178,446,464	148,261,456	*Carry forward*
PEMBIAYAAN					***FINANCING***
Mudharabah	11,42				*Mudharabah*
Pihak ketiga		1,154,595	1,460,923	2,625,499	*Third parties*
Pihak berelasi		473,842	1,210,059	1,112,121	*Related parties*
Jumlah *mudharabah*		1,628,437	2,670,982	3,737,620	*Total mudharabah*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(36,123)	(72,195)	(63,224)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		1,592,314	2,598,787	3,674,396	*Net*
Musyarakah	12,42				*Musyarakah*
Pihak ketiga		37,198,108	35,725,705	31,917,719	*Third parties*
Pihak berelasi		20,356,328	17,622,828	16,154,888	*Related parties*
Jumlah *musyarakah*		57,554,436	53,348,533	48,072,607	*Total musyarakah*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,651,313)	(2,452,358)	(1,678,832)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		53,903,123	50,896,175	46,393,775	*Net*
Jumlah pembiayaan		59,182,873	56,019,515	51,810,227	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,687,436)	(2,524,553)	(1,742,056)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		55,495,437	53,494,962	50,068,171	*Net*
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH	13	901,565	1,509,461	2,251,266	***ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET***
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	14	4,055,953	3,397,075	1,876,250	***FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET***
ASET PAJAK TANGGUHAN	21d	1,445,324	1,109,281	808,511	***DEFERRED TAX ASSETS***
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	15,42	1,708,435	1,624,281	2,031,373	***OTHER ASSETS - NET***
JUMLAH ASET		265,289,081	239,581,524	205,297,027	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN / ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
31 DESEMBER 2021 / ***31 DECEMBER 2021***
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2020*)	1 Januari/ *January* 2020*)	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS					***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	16,42				***OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY***
Pihak ketiga		539,143	777,017	998,793	*Third parties*
Pihak berelasi		69,411	212,345	143,250	*Related parties*
		608,554	989,362	1,142,043	
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	17	158,478	170,010	200,900	***UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING***
SIMPANAN *WADIAH*					***WADIAH DEPOSITS***
Giro *wadiah*	18,42				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		21,076,310	28,428,916	14,980,040	*Third parties*
Pihak berelasi		1,335,304	2,393,697	1,448,200	*Related parties*
		22,411,614	30,822,613	16,428,240	
Tabungan *wadiah*	19,42				*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		34,826,660	29,561,910	21,118,457	*Third parties*
Pihak berelasi		9,616	19,060	17,171	*Related parties*
		34,836,276	29,580,970	21,135,628	
Jumlah simpanan *wadiah*		57,247,890	60,403,583	37,563,868	*Total wadiah deposits*
SIMPANAN DARI BANK LAIN	20,42				***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Giro *wadiah*					*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		109,121	124,919	103,241	*Third parties*
Pihak berelasi		1,737	3,407	2,391	*Related parties*
		110,858	128,326	105,632	
Tabungan *wadiah*					*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		5,080	23,234	1,263	*Third parties*
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (SIMA)		-	655,000	-	*Interbank mudharabah investment certificate (SIMA)*
Jumlah simpanan dari bank lain		115,938	806,560	106,895	*Total deposits from other banks*
LIABILITAS AKSEPTASI	8,42				***ACCEPTANCE LIABILITIES***
Pihak ketiga		76,027	186,737	237,254	*Third parties*
Pihak berelasi		85,468	108,600	-	*Related parties*
Jumlah liabilitas akseptasi		161,495	295,337	237,254	*Total acceptance liabilities*
UTANG PAJAK	21	504,078	537,514	378,752	***TAXES PAYABLE***
LIABILITAS IMBALAN KERJA	40	836,491	908,751	727,861	***EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	39d	17,194	20,323	19,452	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
LIABILITAS LAIN-LAIN	22	2,236,358	1,908,921	3,629,818	***OTHER LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		61,886,476	66,040,361	44,006,843	***TOTAL LIABILITIES***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN / ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
31 DESEMBER 2021 / ***31 DECEMBER 2021***
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2020*)	1 Januari/ *January* 2020*)	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)					***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY*** *(continued)*
DANA *SYIRKAH* TEMPORER					***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	23,42				*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga		9,126,027	2,182,566	1,421,988	*Third parties*
Pihak berelasi		4,192,600	3,187,886	10,458,216	*Related parties*
		13,318,627	5,370,452	11,880,204	
Tabungan *mudharabah*	24,42				*Mudharabah savings deposits*
Pihak ketiga		64,810,191	58,845,800	47,838,696	*Third parties*
Pihak berelasi		292,300	163,134	225,650	*Related parties*
		65,102,491	59,008,934	48,064,346	
Deposito *mudharabah*	25,42				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		91,699,966	73,107,318	75,384,992	*Third parties*
Pihak berelasi		6,892,587	12,936,314	5,612,697	*Related parties*
		98,592,553	86,043,632	80,997,689	
SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI	26	1,375,000	1,375,000	1,279,000	***SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH***
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER		178,388,671	151,798,018	142,221,239	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham					*Share capital - Rp500 (full amount) par value per share*
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham (31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020: 15.000.000.000)					*Authorized share capital - 80,000,000,000 shares (31 December 2020 and 1 January 2020: 15,000,000,000)*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41.129.307.343 saham (31 Desember 2020: 9.900.508.698) (1 Januari 2020: 9.716.113.498)	27	20,564,654	3,142,019	2,989,022	*Issued and fully paid-up capital – 41,129,307,343 shares (31 December 2020: 9,900,508,698) (1 January 2020: 9,716,113,498)*
Tambahan Modal Disetor	27	(6,366,776)	-	-	*Additional Paid In Capital*
Ekuitas *Merging Entities*		-	10,903,586	9,823,110	*Merging Entities Equity*
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak		444,530	395,725	395,725	*Gain on revaluation of fixed assets - net of tax*
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak		140,271	53,998	47,049	*Remeasurement of defined benefit plan - net of tax*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		22,263	-	710	*Unrealized gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Saldo laba					*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		779,036	597,804	597,804	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		9,429,956	6,650,013	5,215,525	*Unappropriated*
EKUITAS		25,013,934	21,743,145	19,068,945	***EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		265,289,081	239,581,524	205,297,027	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR THEN ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI *MUDHARIB*				***REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	28	10,184,236	9,126,423	*Income from sales and purchases*
Pendapatan bagi hasil	29	4,455,685	4,653,087	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	30	75,219	204,443	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	31	3,093,292	2,945,639	*Other main operating income*
		17,808,432	16,929,592	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	32	(4,378,807)	(5,004,254)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		13,429,625	11,925,338	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	33			***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan imbalan jasa perbankan		2,249,710	2,236,528	*Fee based income from banking services*
Pendapatan lainnya		762,536	540,173	*Other income*
Jumlah pendapatan usaha lainnya		3,012,246	2,776,701	*Total other operating income*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	34	(4,491,775)	(4,091,033)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	35	(3,970,211)	(3,463,591)	*General and administrative*
Bonus *wadiah*		(120,238)	(178,321)	*Wadiah bonus*
Lain-lain		(200,549)	(222,282)	*Others*
		(8,782,773)	(7,955,227)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih	36	(3,551,249)	(3,620,446)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA		4,107,849	3,126,366	***INCOME FROM OPERATION***
BEBAN NON-USAHA - BERSIH	37	(45,641)	(46,967)	***NON-OPERATING EXPENSE - NET***
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		4,062,208	3,079,399	***INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE***
ZAKAT		(101,684)	(74,202)	***ZAKAT***
BEBAN PAJAK	21b	(932,319)	(817,548)	***TAX EXPENSE***
LABA BERSIH		3,028,205	2,187,649	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan revaluasi aset tetap		119,719	-	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	40	64,695	(44,561)	*Remeasurement of employee benefit liability*
Pajak penghasilan terkait		(14,233)	10,378	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		19,410	(2,774)	*Unrealized gain/(loss) on securities measured at fair value through other comprehensif income*
Pajak penghasilan terkait		-	454	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		189,591	(36,503)	*Total other comprehensive income net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		3,217,796	2,151,146	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	38	73.69	53.52	***BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)***
LABA PER SAHAM DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	38	73.66	53.51	***DILUTED EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/*previously* PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR THEN ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid-Up Share Capital*	*Tambahan Modal* Disetor/ *Additional Paid In Capital*	Keuntungan revaluasi aset tetap/ *Gain on revaluation of fixed assets*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ *Remeasurement of employee benefit liabilities*	Ekuitas *merging entities*/ *Merging entities equity*	Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/*Unrealized gains/(losses) on marketable securities at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Saldo Laba: Sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo Laba: Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Ekuitas/ *Equity*	
Saldo per 1 Januari 2020 (sebelum disajikan kembali)		4,858,057	517	-	(2,180)	13,989,588	-	63,667	159,296	19,068,945	***Balance as at 1 January 2020 (before restated)***
Dampak dari bisnis kombinasi entitas sepengendali		(1,869,035)	(517)	395,725	49,229	(4,166,478)	710	534,137	5,056,229	-	*Impact on common control business combination*
Saldo per 1 Januari 2020 (disajikan kembali)		2,989,022	-	395,725	47,049	9,823,110	710	597,804	5,215,525	19,068,945	***Balance as at 1 January 2020 (restated)***
Penambahan modal saham		152,997	-	-	-	526,479	-	-	-	679,476	*Additional capital*
Laba bersih		-	-	-	-	753,161	-	-	1,434,488	2,187,649	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	6,949	(42,743)	(710)	-	-	(36,504)	*Other comprehensive income*
Opsi saham		-	-	-	-	(5,633)	-	-	-	(5,633)	*Stock option*
Pembagian dividen		-	-	-	-	(150,788)	-	-	-	(150,788)	*Dividend payment*
Saldo per 31 Desember 2020*)		3,142,019	-	395,725	53,998	10,903,586	-	597,804	6,650,013	21,743,145	***Balance as at 31 December 2020*)***
Penambahan modal saham	27	49,049	3,237	-	-	-	-	-	-	52,286	*Additional capital*
Penambahan cadangan umum		-	-	-	-	-	-	181,232	(181,232)	-	*Additional to general reserve*
Laba bersih		-	-	-	-	67,030	-	-	2,961,175	3,028,205	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	48,805	86,273	32,250	22,263	-	-	189,591	*Other comprehensive income*
Opsi saham		-	-	-	-	707	-	-	-	707	*Stock option*
Restrukturisasi entitas sepengendali	52	17,373,586	(6,370,013)	-	-	(11,003,573)	-	-	-	-	*Restructuring of entities under common control*
Saldo 31 Desember 2021		20,564,654	(6,366,776)	444,530	140,271	-	22,263	779,036	9,429,956	25,013,934	***Balance as at 31 December 2021***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR THEN ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bagi hasil, jual beli, pendapatan *ijarah* dan pendapatan usaha utama lainnya		17,729,782	16,842,565	*Receipt of profit sharing, margin, ijarah income and other main operating income*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer		(4,390,339)	(5,035,144)	*Payment of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9,10,11, 12,33	998,496	854,564	*Receipts from recovery of financing and receivable written off*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		2,249,710	2,236,528	*Receipt of other operating income*
Pembayaran tantiem		(51,660)	(33,726)	*Payment tantiem*
Pembayaran beban usaha		(10,190,968)	(7,910,953)	*Payment operating expenses*
Penerimaan/(pembayaran) atas pendapatan/(beban) non-usaha-bersih		65,766	(54,177)	*Receipt/(payment) non-operational income/(expense) - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,344,080)	(943,242)	*Payment of corporate income tax*
Pembayaran zakat		(127,611)	(104,962)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan		(59,529)	(76,807)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		4,879,567	5,774,646	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				*Decrease/(increase) in operating assets:*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia		6,958,439	(3,458,439)	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Surat berharga				*Marketable securities*
- diukur pada nilai wajar		(566,235)	290,580	*- measured at fair value*
Surat berharga jangka pendek lainnya		(116,881)	41,747	*Other short-term securities*
Piutang		(11,903,595)	(16,859,371)	*Receivables*
Pinjaman *qardh*		(138,376)	(715,629)	*Funds of qardh*
Pembiayaan syariah		(3,163,358)	(4,209,288)	*Sharia financing*
Tagihan akseptasi		133,842	(58,083)	*Acceptance receivables*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*		607,896	741,805	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain		(708,204)	(613,367)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		(354,881)	(121,921)	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah		(3,155,693)	22,839,715	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain		(690,622)	699,665	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		(133,842)	58,083	*Acceptance liabilities*
Utang pajak		28,050	(5,397)	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		410,048	(1,698,113)	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer		26,590,653	9,480,779	*Increase in temporary syirkah funds*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		18,676,808	12,187,412	*Net cash provided by operating activities*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR THEN ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan investasi pada surat berharga		466,832,322	160,377,208	*Receipt from investment in marketable securities*
Perolehan surat berharga		(484,615,856)	(171,039,020)	*Acquisition of marketable securities*
Hasil penjualan aset tetap	14	-	7,210	*Proceeds from disposal of fixed assets*
Perolehan aset tetap	14	(787,504)	(1,093,299)	*Acquisition of fixed assets*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(18,571,038)	(11,747,901)	*Net cash used in investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa		(130,215)	(241,327)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen		-	(254,808)	*Payments of dividend*
Penambahan modal saham		52,286	259,641	*Proceeds from issuing stocks*
Surat berharga yang diterbitkan	26	-	96,000	*Securities Issued*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(77,929)	(140,494)	*Net cash used in financing activities*
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		27,841	299,017	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		26,514,431	26,215,414	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		26,542,272	26,514,431	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD***
Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at end of the period consist of:*
Kas	4	4,119,903	3,180,739	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	20,563,580	14,569,494	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	6	1,858,789	8,764,198	*Current accounts and placements with other banks*
JUMLAH		26,542,272	26,514,431	***TOTAL***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEAR THEN ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *Mudharib*	28,29,30,31	17,808,432	16,929,592	*Revenue from fund management as Mudharib*
Pengurangan				*Deduction*
Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima:				*Current year income, in which cash and cash equivalents have not been received:*
Pendapatan *margin murabahah* dan *istishna*		(493,885)	(394,311)	*Murabahah and istishna margin income*
Hak bagi hasil pembiayaan		(16,043)	(56,298)	*Profit sharing share*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(242,077)	(90,339)	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan *rahn*		(90,064)	(81,151)	*Rahn income*
Pendapatan sewa *ijarah*		(11,806)	(22,455)	*Ijarah income*
Pendapatan usaha utama lainnya		(665,978)	(559,009)	*Other main operating income*
		(1,519,853)	(1,203,563)	
Penambahan				*Addition*
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:				*Previous period income in which cash were received during current period:*
Pendapatan *margin murabahah* dan *istishna*		394,311	334,530	*Murabahah and istishna margin income*
Hak bagi hasil pembiayaan		56,298	54,036	*Profit sharing share*
Pendapatan/(beban) amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		90,339	(53,825)	*Income/(expenses) from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan *rahn*		81,151	63,932	*Rahn income*
Pendapatan sewa *ijarah*		22,455	32,543	*Ijarah income*
Pendapatan usaha utama lainnya		559,009	469,312	*Other main operating income*
		1,203,563	900,528	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		17,492,142	16,626,557	*Available income for profit sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		(13,113,335)	(11,622,303)	*Bank's share from profit sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	32	4,378,807	5,004,254	*Third parties' share on return*
Dirinci atas:				*Details to:*
Hak pemilik dan atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		4,220,329	4,834,244	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	158,478	170,010	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
Jumlah		4,378,807	5,004,254	***Total***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEAR THEN ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Internal bank		101,684	74,202	*Internal bank*
Eksternal bank				*External bank*
Pegawai		32,594	29,659	*Employees*
Nasabah dan umum		24,624	6,832	*Customers and public*
		158,902	110,693	
Penyaluran dana zakat				***Distribution of zakat funds***
Disalurkan ke lembaga lain		(127,611)	(104,962)	*Distributed to other institutions*
Kenaikan dana zakat		31,291	5,731	*Increase in zakat funds*
Saldo awal dana zakat	16	72,911	67,180	***Beginning balance of zakat funds***
Saldo akhir dana zakat	16	104,202	72,911	***Ending balance of zakat funds***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR THEN ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
Sumber dana kebajikan				*Sources of qardhul hasan funds*
Infaq dan *shadaqah*		50,280	35,816	*Infaq and shadaqah*
Denda		14,329	10,838	*Penalty*
Pendapatan non-halal		7,898	6,798	*Non-halal income*
Sumbangan/hibah		99	516	*Donation/grant*
		72,606	53,968	
Penggunaan dana kebajikan				*Uses of qardhul hasan funds*
Sumbangan		(59,529)	(76,807)	*Donation*
Kenaikan/(penurunan) dana kebajikan		13,077	(22,839)	*Increase/(decrease) qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan		12,900	35,739	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Saldo akhir dana kebajikan	22	25,977	12,900	***Ending balance of qardhul hasan funds***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 5*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank BRISyariah Tbk ("Bank") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta (BJA) berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

BJA memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.1-4-40 tanggal 3 Juli 1969. Sejak tanggal 16 Oktober 2008, BJA telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang selanjutnya diubah dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

1. GENERAL

a. Bank establishment and general information

PT Bank BRISyariah Tbk (the "Bank") is located in Jakarta, Indonesia, and initially established under the name of PT Bank Jasa Arta (BJA) based on the Deed of Establishment No. 4 dated 3 April 1969 of Liem Toeng Kie, S.H., Notary in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. J.A.5/70/4 dated 28 May 1970 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 43, dated 28 May 1971, Supplement No. 242/1971.

The changes in name and business activity based on sharia principles from BJA to PT Bank Syariah BRI (BSBRI) was based on BJA Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated 22 April 2008 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

BJA obtained its business license to operate as a commercial bank from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. D.15.1-4-40 dated 3 July 1969. Since 16 October 2008, BJA has obtained license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional Bank into a commercial bank based on sharia principles.

In 2009, PT Bank Syariah BRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on PT Bank Syariah BRI Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated 14 April 2009 of Notary Fathiah Helmi, S.H., it was subsequently amended by PT Bank Syariah BRI Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 20 dated 17 September 2009 of Notary Fathiah Helmi, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.AHU-53631.AH.01.02.TH2009 dated 5 November 2009. It was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 dated 1 December 2009, Supplement No. 27908 and Decision Letter from the Governor of Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 dated 15 December 2009.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 28 tanggal 14 September 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham memutuskan untuk menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Bank dari sejumlah 966.750.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp483.375 menjadi 958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp479.000, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33517.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 26 Juli 2011, Tambahan No. 21333.

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 15 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp479.000 menjadi 1.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp979.000, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20012 tanggal 5 Agustus 2010 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 1521/L.

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 113 tanggal 26 September 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 1.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp979.000 menjadi 2.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp1.479.000, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40622.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013, Tambahan No. 113984.

Pada tanggal 27 Desember 2013, Bank mendapatkan izin sebagai bank devisa berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/139/KEP.GBI/DpG/2013.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

The Bank's Articles of Association have been amended several times. According to PT Bank BRISyariah Shareholders Decision Statement, Deed No. 28 dated 14 September 2010 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, shareholders decided to approve the reduction of issued and fully paid-up share capital of the Bank from 966,750,000 shares (full amount) or Rp483,375 to 958,000,000 shares (full amount) or Rp479,000, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-33517.AH.01.02. Year 2010 dated 2 July 2010 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 59 dated 26 July 2011, Supplement No. 21333.

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah Shareholders Resolution Statement, Deed No. 15 dated 19 July 2010 of Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta, in which shareholders decided to increase the issued and fully paid-up share capital of the Bank from 958,000,000 shares (full amount) or Rp479,000 to 1,958,000,000 shares (full amount) or Rp979,000, which was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.10-20012 dated 5 August 2010, and which has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated 17 July 2012, Supplement No. 1521/L.

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah's Annual General Meeting of Shareholders Statement, Deed No. 113 dated 26 September 2013 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, in which shareholders decided to increase the issued and fully paid-up share capital of the Bank from 1,958,000,000 shares (full amount) or Rp979,000 to 2,958,000,000 shares (full amount) or Rp1,479,000, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-40622.AH.01.02. Year 2013 dated 25 July 2013, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 76 dated 20 September 2013, Supplement No. 113984.

On 27 December 2013, the Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 15/139/KEP.GBI/DpG/2013.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 1 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 2.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp1.479.000 menjadi 3.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp1.979.000, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0954202 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015.

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 52 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0076528 tanggal 1 September 2016.

Selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, memutuskan perubahan modal dasar Bank dari Rp5.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi 10.000.000.000 saham menjadi Rp7.500.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 15.000.000.000 saham, dan menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang serta perubahan menyeluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Bank dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0009224 dan No.AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018.

1. GENERAL *(continued)*

a. Bank establishment and general information *(continued)*

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah's Annual General Meeting of Shareholders Statement, Deed No. 1 dated 4 August 2015 of Notary Fathiah Helmi, S.H., in which shareholders decided to increase the issued and fully paid-up share capital of the Bank from 2,958,000,000 shares (full amount) or Rp1,479,000 to 3,958,000,000 shares (full amount) or Rp1,979,000, which was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0954202 Year 2015 dated 4 August 2015.

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah's Annual General Meeting of Shareholders Statements as stated in notarial Deed No. 52 dated 31 August 2016 of Notary Fathiah Helmi, SH., notary in Jakarta, regarding the change in the term of service of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board. The amendment was accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0076528 dated 1 September 2016.

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah's Extraordinary General Meeting of Shareholders Statement, Deed No. 8 dated 8 January 2018 notarized by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, in which shareholders decided to increase the authorized capital of the Bank from Rp5,000,000,000,000 (full amount) or 10,000,000,000 shares to Rp7,500,000,000,000 (full amount) or 15,000,000,000 shares to approve the Bank's plan to do Initial Public Offering (IPO) to amend the Bank's Articles of Association to become a Public Company in accordance with the laws and regulations of the capital market, and to change the Bank's name from PT Bank BRISyariah to PT Bank BRISyariah Tbk. The amendments were accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia.No. AHU-0000386.AH.01.02 year 2018 dated 10 January 2018 and by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0009224 and No. AHU-AH.01.03-0009250 dated 10 January 2018.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran PT Bank BRISyariah Tbk atas penawaran umum perdana saham sesuai dengan surat yang disampaikan ke OJK No. S.B.082-PDR/02-2018 tanggal 22 Februari 2018 serta surat terakhir yang disampaikan ke OJK No.S.B.147-PDR/04-2018 tanggal 24 April 2018, OJK tidak mengisyaratkan adanya informasi tambahan dan tanggapan lebih lanjut sehingga pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Penawaran umum perdana saham PT Bank BRISyariah Tbk (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (Rupiah penuh) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018.

Selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah Tbk No.92 tanggal 31 Mei 2018 mengenai peningkatan modal disetor dan ditempatkan hasil penawaran umum perdana saham Bank dari 7.092.762.898 lembar saham atau sebesar Rp3.546.381.449.000 (nilai penuh) menjadi 9.716.113.498 lembar saham atau sebesar Rp4.858.056.749.000 (nilai penuh). Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0211334 tanggal 31 Mei 2018.

Selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah Tbk No. 27 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan ketentuan masa jabatan Pengurus Perseroan dan beberapa penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang relevan dengan kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

Based on the Financial Services Authority (FSA) No. S.37/D.04/2018 dated 30 April 2018 concerning the notification of the effectiveness of PT Bank BRISyariah Tbk's registration statement on the initial public offering of shares according to the letter submitted to FSA No. S.B.082-PDR/02-2018 dated 22 February 2018 and the letter most recently submitted to FSA No.S.B.147-PDR/04-2018 on 24 April 2018, FSA did not require additional information and further response those the registration statement was effective.

The initial public offering of PT Bank BRISyariah Tbk (including ESA) shares included 2,623,350,600 new shares with a nominal value of Rp500 (full Rupiah) per share at a selling price of Rp510 (full Rupiah) per share. The offered shares began to be listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on 9 May 2018.

An amendment of the Bank's Article of Association was documented in PT Bank BRISyariah Tbk's Extraordinary General Meeting of Shareholders Statements No. 92 dated 31 May 2018 regarding the change of issued and fully paid-up capital as the result of initial public offering of the Bank's stocks from 7,092,762,898 shares or Rp3,546,381,449,000 (full amount) to 9,716,113,498 shares or Rp4,858,056,749,000 (full amount).This change has been received and recorded by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0211334 dated 31 May 2018.

An amendment of the Bank's Articles of Association set forth in PT Bank BRISyariah's Annual General Meeting of Shareholders No. 27 dated 17 July 2019, made before the Notary Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, among others, the amendment included the changes to the terms of office of the Company's Management and several other adjustments to the Articles of Association of the Company that were relevant to the Company's activities. These changes have been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0302291 on 23 July 2019.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRISyariah Tbk No. 101 Tanggal 16 Desember 2020 mengenai perubahan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0424917 tanggal 29 Desember 2020.

Perubahan Anggaran Dasar Bank dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn notaris di Jakarta mengenai persetujuan perubahan dan penyesuaian seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan sehubungan persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk diantaranya mengubah nama Bank yang sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, meningkatkan Modal Dasar Perseroan, meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021 dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0006268.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021.

Selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 54 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Modal Ditempatkan dan Disetor Bank 97.659.800 saham dengan nominal Rp48.829.900.000 sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Bank menjadi 41.128.868.743 saham dengan nominal seluruhnya Rp20.564.434. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0434796 tanggal 5 Agustus 2021.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

An amendment of the Bank's Articles of Association of the Bank are set forth in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendments to Articles of Association of PT Bank BRISyariah Tbk No. 101 Dated 16 December 2020 regarding changes in the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Company. This change has been received and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0424917 dated 29 December 2020.

The amendments to the Bank's Articles of Association are set forth in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendments to Articles of Association Change of Name of PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Dated 14 January 2021 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, a notary in Jakarta regarding the approval of amendments and adjustments to all articles of the Company's Articles of Association in connection with the merger agreement between PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah with PT Bank BRISyariah Tbk, including amending the name of the Bank, previously PT Bank BRISyariah Tbk to become PT Bank Syariah Indonesia Tbk, increases the Company's Authorized Capital, increases the Company's Paid-in and Issued Capital. This amendment has been accepted and noted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061498 dated 1 February 2021 and has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0006268.AH.01.02.Tahun 2021 dated 1 February 2021.

Subsequently this was again amended by the Deed of Statement of Decisions thereout the Meeting of the Board of Commissioners of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 54 Dated 27 July 2021 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta regarding changes in the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Bank to 97,659,800 with a nominal share of Rp48,829,900,000 so that the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Bank becomes 41,128,868,743 shares with a total nominal value of Rp20,564,434. This amendment has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0434796 dated 5 August 2021.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

.

Selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 25 Tanggal 8 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Kedudukan Kantor Pusat Bank sehubungan pemindahan alamat Kantor Pusat Bank yang sebelumnya di Jalan Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160 menjadi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0445911 tanggal 8 September 2021 dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0048485.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021.

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 82 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Modal Ditempatkan dan Disetor Bank 438.600 saham dengan nominal Rp219.300.000 sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Bank menjadi 41.129.307.343 saham dengan nominal seluruhnya Rp20.564.654 Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0494300 tanggal 30 Desember 2021.

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

The latest amendment to the Bank's Articles of Association is stated in the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 25 Dated 8 September 2021 drawn up of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta regarding the change in the Position of the Bank's Head Office in connection with the change of the address of the Bank's Head Office which was previously at Jalan Abdul Muis No. 2-4 Central Jakarta 10160 to become at The Tower Building, Jalan Gatot Subroto No. 27 Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Jakarta 12930. This amendment has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0445911 dated 8 September 2021 and has obtained the Approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0048485.AH.01.02.Tahun 2021 dated 8 September 2021.

The latest amendment to the Bank's Articles of Association is stated in the Deed of Statement of Decisions thereout the Meeting of the Board of Commissioners of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 82 On 30 December 2021 made before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta regarding changes in the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Bank to 438,600 shares with a nominal value of Rp219,300,000 so that the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Bank becomes 41,129,307,343 shares with a total nominal value Rp20,564,654. This amendment has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0494300 dated 30 December 2021.

The merger of PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah with PT Bank BRISyariah Tbk has received approval from the OJK Board of Commissioners Number 4 / KDK.03 / 2021 dated 27 January 2021 concerning the Granting of Permit to Merge PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRISyariah Tbk and a Name Change Permit Using a Business License from PT Bank BRISyariah Tbk to become a Business License on behalf of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Merged Bank.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

a. Bank establishment and general information (continued)

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

According to Article 3 of the Bank's latest Articles of Association, the Bank's scope of business is to conduct banking activities based on Sharia principles.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Currently, the Bank's head office is located in The Tower Building, Jalan Gatot Subroto No. 27 Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Jakarta 12930.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

As of 31 December 2021 and 2020, the Bank has network business unit with details as follows (unaudited):

	2021	2020	
Kantor Cabang	272	268	*Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu	972	961	*Sub-Branch Offices*
Kantor Kas	74	61	*Cash Offices*
Kantor Layanan Syariah	-	2,652	*Sharia Service Offices*

b. Struktur dan manajemen

b. Structure and management

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 26 Tanggal 8 September 2021 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank No. 38 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2021 is determined based on the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia, Tbk No. 26 Dated 8 September 2021 and Deed of Minutes of the bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 38 dated 24 August 2021 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn notary in Jakarta, is as follows:

	2021	
Komisaris		***Board of Commissioner***
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim*	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Muhammad Zainul Majdi*	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito	*Commissioner*
Komisaris	Sutanto	*Commissioner*
Komisaris Independen	Bangun Sarwito Kusmulyono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*

* Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

**Effective after obtaining approval from Financial Services Authority (FSA) for a fit and proper test.*

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL*** *(continued)*

b. Struktur dan manajemen (lanjutan) / ***b. Structure and management*** *(continued)*

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 5 November 2020 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank No. 64 tanggal 29 April 2019, yang akta tersebut dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2020 was determined based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2 dated 5 November 2020 and Deed of Minutes of the Bank's Annual General Meeting of Shareholders No. 64 dated 29 April 2019 which were made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The following:

	2020	
Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Eko Suwardi	*President Commissioner*
Komisaris	Sutanto	*Commissioner*

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Bank as of 31 December 2021 is determined based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendment to Articles of Association Change of Name of PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Dated 14 January 2021 which was made before the Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn notary in Jakarta is as follows:

	2021	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama 1	Ngatari	*Vice President Director 1*
Wakil Direktur Utama 2	Abdullah Firman Wibowo	*Vice President Director 2*
Direktur	Kusman Yandi	*Director*
Direktur	Kokok Alun Akbar	*Director*
Direktur	Anton Sukarna	*Director*
Direktur	Achmad Syafii	*Director*
Direktur	Tiwul Widyastuti	*Director*
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi	*Compliance Director*
Direktur	Ade Cahyo Nugroho	*Director*

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 5 November 2020 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank No.64 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di jakarta adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Bank as of 31 December 2020 is determined based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2 dated 5 November 2020 and Deed of Minutes of the Bank's Annual General Meeting of Shareholders No. 64 dated 29 April 2019 which were made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta is as follows:

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL*** *(continued)*

b. Struktur dan manajemen (lanjutan) / ***b. Structure and management*** *(continued)*

	2020	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Ngatari	*President Director*
Direktur	Kokok Alun Akbar	*Director*
Direktur	Fahmi Subandi	*Director*
Direktur	Fidri Arnaldy	*Director*
Direktur	Yana Soeprianan	*Director*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of 31 Desember 2021 is determined based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendment to Articles of Association Change of Name of PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Dated 14 January 2021 which was made before the Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn notary in Jakarta is as follows:

	2021	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanudin	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat	*Member*
Anggota	Oni Sahroni	*Member*
Anggota	Didin Hafidhuddin	*Member*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Bank No. 32 dan 33 tanggal 18 April 2017 yang seluruh akta tersebut dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagai adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of 31 December 2020 is determined based on Shareholders Decision Statement Deed No. 32 and 33 dated 18 April 2017, notarized by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta as follows:

	2020	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Didin Hafidhuddin	*Chairman*
Anggota	Muhammad Gunawan Yasni	*Member*

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.Kep: 01/047-KEP/DIR tanggal 17 Maret 2021 dan Surat Dewan Komisaris No.01/001-3/KOM tanggal 4 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as of 31 December 2021 is determined based on the Decree of the Board of Directors No.Kep: 01/047-KEP/DIR dated 17 March 2021 and the Letter of the Board of Commissioners No. 01/001-3/KOM dated 4 February 2021 as follows:

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL*** *(continued)*

b. Struktur dan manajemen (lanjutan) / ***b. Structure and management*** *(continued)*

	2021	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Muhammad Zainul Majdi	*Chairman*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	Imam Budi Sarjito	*Member*
Anggota	Suyanto	*Member*
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan	*Member*
Anggota	Widuri Meintari Kusumawati	*Member*
Anggota	Djoko Seno Adji	*Member*
Anggota	M. Zacky Thayib	*Member*

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.Kep:B.001-MDC/06-2020 tanggal 5 Juni 2020 dan Surat Dewan Komisaris No.S.B.24-KOM/05-2020 tanggal 12 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as of 31 December 2020 is determined based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: B.001-MDC/06-2020 dated 5 June 2020 and Letter of the Board of Commissioners No. S.B.24-KOM/05-2020 dated 12 May 2020 as follows:

	2020	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Eko Suwardi	*Chairman*
Anggota	Saiful Anwar	*Member*
Anggota	Hari Gursida	*Member*
Anggota	Harijanto	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2021, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Gunawan Arief Hartoyo sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.01/185-KEP/DIR tanggal 31 Agustus 2021.

On 31 December 2021, the Corporate Secretary of the Bank is Gunawan Arief Hartoyo based on Decision letter of Directors No.01/185-KEP/DIR dated 31 August 2021.

Berdasarkan kebijakan Bank, manajemen kunci Bank mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Based on the Bank's policies, key management of the Bank consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Salaries and other compensation paid to the Boards of Commissioners and Directors are as follows:

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memberikan kompensasi masing-masing sebesar Rp58.829 dan Rp76.729 kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

For the period ended 31 December 2021 and 2020, the Bank provided compensation of Rp58,829 and Rp76,729 to the Board of Directors and Board of Commissioners, respectively.

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, masing-masing adalah sebesar 17.462 dan 16.746 orang (tidak diaudit).

As of 31 December 2021 and 2020 and, the Bank has 17,462 and 16,746 employees, respectively (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

c. Penggabungan usaha

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS, dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan secara hukum atau *surviving legal entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Berdasarkan Akta Penggabungan yang dimuat dalam akta No. 103 yang dibuat oleh NotarIs Jose Dima Satria S.H, M.Kn tanggal 16 Desember 2020 disetujui bahwa :

- Semua operasi, usaha, kegiatan, aktivitas, izin fasilitas, lisensi, persetujuan, pemanfaatan serta aktiva dan pasiva dari masing-masing BSM dan BNIS beralih karena hukum kepada BRIS.
- Jika BRIS tidak dapat atau belum memiliki izin-izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan tanda terima pendaftaran yang telah disebutkan, sementara BRIS seharusnya sudah melakukan operasi, usaha dan aktivitas yang dulunya dijalankan masing-masing BNIS dan BSM maka BRIS akan mencari alternatif terbaik hingga operasi, usaha dan aktivitas dari masing-masing BSM dan BNIS yang beralih keada BRIS tidak mengalami pengakhiran atau penundaan.
- Semua biaya yang secara langsung atau tidak langsung timbul karena pengalihan operasi usaha dan aktivitas, maupun izin, persetujuan dan lainnya dari masing-masing BNIS dan BSM akan dianggap sebagai kewajiban BRIS.
- Status badan hukum BSM dan BNIS akan berakhir tanpa memerlukan tindak likuidasi.
- Pada tanggal efektif penggabungan, hubungan kerja karyawan BNIS dan BSM yang bergabung dengan BRIS akan beralih demi hukum kepada BRIS.

***1. GENERAL** (continued)*

c. Merger

On 12 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), and PT Bank BNI Syariah (BNIS) signed a Conditional Merger Agreement (CMA) for the merger of BSM, BRIS, and BNIS (Merger Participating Banks).

According to the CMA, after the effective date of the merger, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) will become the surviving legal entity and all shareholders of PT Bank BNI Syariah (BNIS) and PT Bank Syariah Mandiri (BSM) will become shareholders of the surviving entity based on the merger ratio.

Based on the Deed of Merger contained in deed No. 103 made by Notary Jose Dima Satria S.H, M.Kn on 16 December 2020, it was agreed that:

- *All operations, businesses, activities, activities, facility permits, licenses, approvals, utilization as well as assets and liabilities of each BSM and BNIS are transferred due to the law to BRIS.*
- *If BRIS cannot or does not have the mentioned permits, facilities, licenses, approvals and registration receipts, while BRIS should have carried out the operations, businesses and activities that were previously carried out by BNIS and BSM respectively, then BRIS will look for the best alternative until the operations, business and activities of each BSM and BNIS that shifted to BRIS did not experience any terminations or delays.*
- *All costs that are directly or indirectly incurred due to the transfer of business operations and activities, as well as permits, approvals and others from BNIS and BSM respectively will be deemed as BRIS obligations.*
- *The legal status of BSM and BNIS will end without requiring liquidation.*
- *On the effective date of the merger, the employment relationship between BNIS and BSM employees who joined BRIS will be transferred by law to BRIS.*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penggabungan usaha (lanjutan)

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) ("Merger"), telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan OJK Perbankan melalui Surat Keputusan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk dan perubahan izin usaha PT Bank BRISyariah menjadi izin usaha dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") sebagai bank hasil merger. Selanjutnya telah diperoleh surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021 perihal penerimaan pemberitahuan penggabungan BNIS dan BSM menjadi BRIS terkait dengan pengumuman penggabungan BNIS dan BSM menjadi BRIS. Penggabungan efektif pada 1 Februari 2021.

Pada tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2021, komposisi pemegang saham BSI adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Merger** (continued)*

The merger of PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BNI Syariah (BNIS), and PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) ("Merger"), it has been approved by Financial Services Authority (FSA) of Capital Market through its letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and FSA of Banking through its Decision Letter No. 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 regarding the Granting Permit for merger of PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRISyariah Tbk and change of PT Bank BRISyariah's business license into business license of PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") as the merged bank. Furthermore, the letter from Ministry of Law and Human Rights Letter No. AHU-AH.01.10-0011384 dated 28 January 2021 has been obtained regarding acceptance for notification of merger of BNIS and BSM into BRIS which related to the merger announcement of BNIS and BSM into BRIS. The merger is effective on 1 February 2021.

On the effective date of the merger, which is 1 February 2021, the shareholders composition of BSI are as follows:

	Jumlah Saham (lembar)/ *Number of Shares*	Nilai Nominal *(Rupiah Penuh)/ Nominal Value (full amount)*	Persentasi/ *Percentage*	
Modal Dasar	80,000,000,000	40,000,000,000,000		***Authorized Capital***
PT Bank Mandiri (Persero)	20,905,219,379	10,452,609,689,500	50.95%	*PT Bank Mandiri (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,220,230,418	5,110,115,209,000	24.91%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	7,092,761,655	3,546,380,827,500	17.29%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)*
DPLK BRI - Saham Syariah	751,340,000	375,670,000,000	1.83%	*DPLK BRI - Saham Syariah*
PT BNI Life Insurance	5,250,415	2,625,207,500	0.01%	*PT BNI Life Insurance*
PT Mandiri Sekuritas	33	16,500	0.00%	*PT Mandiri Sekuritas*
Publik	2,056,407,043	1,028,203,521,500	5.01%	*Public*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41,031,208,943	20,515,604,471,500	100.00%	***Issued and Fully Paid Capital***
Saham dalam Portofolio	38,968,791,057	19,484,395,528,500		***Shares in Portfolio***

1. UMUM (lanjutan)

c. Penggabungan usaha (lanjutan)

Akuisisi tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis di antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK No. 38 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", sehingga akuisisi bisnis tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Jumlah selisih yang timbul antara biaya perolehan dan bagian proporsional atas nilai tercatat aset bersih seluruhnya diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian "Tambahan Modal Disetor" di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Merger** (continued)*

The above acquisitions fulfill the category of business combination among entities under common control entities described in SFAS No. 38 on "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore such acquisitions were accounted for using the pooling of interest method. The amount of the difference between the cost of acquisition and the proportionate portion of the carrying amount of the net assets entirely recognised as "Difference in Value of Transactions of Business Combinations of Entities under Common Control" and recognised as part of "Additional Paid-in Capital" and presented in the equity section of the statement of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Bank diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 19 Januari 2022.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2021) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank were completed and authorized for issuance by the Board of Directors on 19 January 2022.

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS No. 101 (Revised 2019) "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 107 (Revised 2021) "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk", Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013) and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK")'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entitiy, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of financial statements** (continued)*

Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in shareholders' equity;
(iv) Statement of cash flows;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statement of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

The statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021.

- Penyesuaian tahunan PSAK 1: “Penyajian laporan keuangan”;
- Penyesuaian tahunan PSAK 13: “Properti Investasi”;
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: “Penurunan nilai aset”;
- PSAK 112: “Akuntansi wakaf”;
- Amendemen PSAK 22: “Kombinasi bisnis”;
- Amendemen PSAK 71: “Instrumen keuangan”;
- Amendemen PSAK 55: “Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran”;
- PSAK 62: “Kontrak asuransi”;
- Amendemen PSAK 60: “Instrumen keuangan: Pengungkapan”;
- Amandemen PSAK 16: “Aset tetap”;
- Amandemen PSAK 57: “Provisi, liabilitas kontijensi, dan asset kontijensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak”;
- Amendemen PSAK 73: “Sewa”.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

The statement of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

The statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp) which also the Bank’s functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2021.

- *Annual improvement SFAS 1: “Presentation of financial statements”;*
- *Annual improvement SFAS 13: “Investment properties”;*
- *Annual improvement PSAK 48: “Asset impairment”;*
- *SFAS 112: “Accounting for endowments”;*
- *Amendment of SFAS 22: “Business combination”;*
- *Amendment of SFAS 71: “Financial instrument”;*
- *Amendment of SFAS 55: “Financial instrument: Recognition and measurement”;*
- *SFAS 62: “Insurance contract”;*
- *Amendment of SFAS 60: “Financial instrument: Disclosure”;*
- *Amandment of SFAS 16: “Fixed Assets”;*
- *Amandment of SFAS 57: “Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts”;*
- *Amendment of SFAS 73: “Lease”.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali

Dalam PSAK No. 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

d. Akuisisi terbalik

Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 22: "Kombinasi bisnis", akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak yang menerima bisnis secara hukum) diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh (pihak yang diakuisisi secara hukum) harus menjadi pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dalam transaksi yang merupakan akuisisi terbalik.

Kondisi berikut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk:

1) Bagian hak suara dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis;
2) Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil penggabungan jika tidak ada pemilik lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan;
3) Komposisi organ pengatur entitas hasil penggabungan;
4) Komposisi manajemen senior entitas hasil penggabungan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Changes to statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial periods.

c. *Restructuring transaction of entities under common control*

Under PSAK No. 38, transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of the business being transferred and would not result in a gain or loss to the group or to the individual entity within the group. Since the transfer of business of entities under common control does not result in a change of the economic substance, the business being exchanged is recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interests method.

In applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements when the business combination occurred and for othe periods which presented for comparison purposes, are presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the period during which the entities were under common control. The difference between the carrying amounts of the business combination transaction and the consideration transferred is recognised under the account "Additional Paid-in Capital".

d. Reverse acquisition

As described in SFAS No. 22: "Accounting for endowments", reverse acquisition occur when the entity that issues securities (the legal acquirer) is identified as the acquiree for accounting purpose. The entity whose equity interests are acquired (the legal acquiree) must be the acquirer for accounting purposes for the transaction to be considered a reverse acquisition.

The following circumstances were considered in identifying the acquirer in a business combination, including:

1) The relative voting rights in the combined entity after the business combination;
2) The existence of a large minority voting interest in the combined entity if no other owner has a significant voting interest;
3) The composition of the governing body of the combined entity;
4) The composition of the senior management of the combined entity;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Akuisisi terbalik (lanjutan)

Kondisi berikut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk: (lanjutan)

5) Ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas.

6) Ukuran relatif (contoh aset, penghasilan atau laba) secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang bergabung lainnya.

Laporan keuangan yang disusun setelah akuisisi terbalik diterbitkan dengan menggunakan nama entitas hukum (pihak yang diakuisisi secara akuntansi), tetapi dideskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai keberlanjutan laporan keuangan pihak pengakuisisi secara akuntansi, dengan satu penyesuaian untuk menyesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum dari pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk mencerminkan modal menurut hukum dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk mencerminkan modal dari entitas pengakusisi secara hukum (pihak yang diakuisisi secara akuntansi). Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut juga disesuaikan secara retroaktif untuk mencerminkan modal menurut hukum dari entitas pengakusisi secara hukum (pihak yang diakuisisi secara akuntansi). Dengan demikian, modal saham disesuaikan untuk mencerminkan modal saham dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi dengan penyesuaian terkait ke dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

Terkait dengan penerapan akuisisi terbalik dan penerapan PSAK No. 38, laporan keuangan Bank disusun dengan basis sebagai berikut:

(a) aset dan liabilitas dari pihak pengakuisisi secara akuntansi yang diakui dan diukur dalam laporan posisi keuangan pada nilai tercatatnya sebelum akuisisi;

(b) aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi secara akuntansi yang diakui dan diukur dalam laporan posisi keuangan Bank menggunakan nilai tercatat pada tanggal akuisisi;

(c) saldo laba dan komponen ekuitas lainnya diakui dalam laporan keuangan adalah laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya atas pihak pengakuisisi secara akuntansi sesaat sebelum akuisisi terbalik;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Reverse acquisition *(continued)*

The following circumstances were considered in identifying the acquirer in a business combination, including: (continued)

5) The terms of the exchange of equity interests.

6) The relative size (i.e total asset, revenue, or profit) is significantly bigger than the size of ther combined entity.

Financial statements prepared following a reverse acquisition shall be issued under the name of the legal parent (the accounting acquiree) but is described in the notes to the financial statements as an accounting continuity of the acquirer's financial statements, with one adjustment to retroactively adjust the acquirer's statutory accounting capital to reflect the acquiree's statutory accounting capital. That adjustment is required to reflect the capital of the legal parent (the accounting acquiree). Comparative information presented in the financial statements is retroactively adjusted to reflect the legal capital of the legal parent (the accounting acquiree). Accordingly, the capital stock is adjusted to reflect the share capital of the accounting acquiree with corresponding adjustment to "Additional Paid-in Capital" account.

In relation to reverse acquisition and the application of SFAS No. 38, the financial statements are prepared on the following basis:

(a) the assets and liabilities of the accounting acquirer are recognised and measured in the statement of financial position of the Bank at their pre-acquisition carrying amounts;

(b) the assets and liabilities of the accounting acquiree are recognised and measured in the statement of financial position of the Bank at carrying value at the acquisition date;

(c) the retained earnings and other equity balances recognised in the financial statements are the retained earnings and other equity balances of the accounting acquirer immediately before the reverse acquisition;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Akuisisi terbalik (lanjutan)

Laporan keuangan disusun dengan basis sebagai berikut: (lanjutan)

(d) jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan yang ditentukan dengan menambahkan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas anak secara hukum sesaat sebelum akusisi terbalik ke nilai wajar dari imbalan yang secara efektif dialihkan. Namun, struktur ekuitas yang muncul dalam laporan keuangan (yaitu jumlah dan jenis kepentingan ekuitas yang diterbitkan) menggambarkan struktur ekuitas dari pihak pengakuisisi secara hukum;

(e) laporan laba rugi dan penghasilan/(rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir merupakan hasil laba rugi setahun penuh pihak pengakuisisi secara akuntansi dan hasil laba rugi pihak yang diakuisisi secara akuntansi dari tanggal akuisisi sampai dengan tanggal pelaporan.

Jumlah selisih yang timbul antara biaya perolehan dan bagian proporsional atas nilai tercatat aset neto seluruhnya pada transaksi kombinasi bisnis di antara entitas sepengendali diakui sebagai “Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian "Tambahan Modal Disetor" di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Reverse acquisition** (continued)*

The financial statements are prepared on the following basis: (continued)

(d) the amount recognised as issued equity interests in the financial statements is determined by adding the equity interests issued of the legal subsidiary immediately before the reverse acquisition to the fair value of the consideration effectively transferred. However, the equity structure appearing in the financial statements (i.e., the number and type of equity interests issued) reflects the equity structure of the legal entity, including the equity interests issued by the legal entity to effect the acquistion;

(e) the statement of profit or loss and other comprehensive income/(loss) for the year comprises of the full year profit or loss of the accounting acquirer and profit or loss of the accounting acquiree from the date of acquisition until the reporting date.

The amount of the difference between the cost of acquisition and the proportionate portion of the carrying amount of the net assets in the business combination among entities under common control entities entirely recognised as "Difference in Value of Transactions of Business Combinations of Entities under Common Control" and recognised as part of “Additional Paid-in Capital” and presented in the equity section of the statement of financial position.

e. Transactions with related parties

The Bank entered into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015) regarding “Related Party Disclosure”.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

(1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;

(2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;

(3) suatu pihak adalah ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;

(4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;

(5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);

(6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5);

(7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

A party is considered as a related party of the Bank if:

(1) directly or indirectly through one or more intermediaries, is party (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank, or (iii) has joint control over the Bank;

(2) it is a member of the same group as the Bank;

(3) it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;

(4) it is a member of the key management personnel of the Bank;

(5) it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);

(6) it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5);

(7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 42 of the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan rekening penampungan.

Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*”.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

(2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau *margin*;

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank’s assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed collaterals and suspense accounts.

In accordance with SFAS 102 “Accounting for Murabahah” and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS 102 “Impairment of Murabahah Receivables”.

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

(1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;

(2) a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payment in margin or principal payments;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

(3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

(4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

(5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;

(6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;

(7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

(8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets** (continued)*

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows: (continued)

(3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;

(4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;

(5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;

(6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;

(7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and

(8) national or local conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual diatas sama dengan Rp10.000;

2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang diatas Rp10.000.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;

(2) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;

(3) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. Murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful, and loss and have an individual receivables balance of above or equal to Rp10,000;

2. Murabahah receivables that are restructured or have been restructured and which individually have a balance of receivables above or equal Rp10,000.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

(1) Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;

(2) Murabahah receivables which individually have insignificant value;

(3) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default (PD) and Loss of Given Default (LGD).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat *margin* efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain *margin*.

Aset produktif atas piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 20 September 2018.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

Impairment losses on financial assets recorded at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operational income other than margin income.

Earning assets such as istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees, the Bank implemented Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 19/POJK.03/2018 dated 20 September 2018 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as of 20 September 2018.

The minimum allowance to be provided in accordance with Financial Services Authority (FSA) Regulation is as follows:

1) General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:

a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Rekening perantara dan *temporary account*.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih:

a) Pada saat pengambilalihan agunan, dan
b) Pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000 (lima milyar Rupiah) atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000 (lima milyar Rupiah) dapat menggunakan penilai internal Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

2) Special reserves, shall be at least:

a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Financial Services Authority (FSA) Regulations.

Non-earning assets represent the Bank's assets other than earning assets which have potential loss such as foreclosed assets (AYDA), inter-branches account, and temporary account.

Foreclosed asset is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting their liabilities to the Bank.

The Bank is required to settle its foreclosed assets and prepare documentation of its effort to settle the assets. The Bank is required to re-evaluate the foreclosed assets to determine net realisable value:

a) At the time the asset is foreclosed, and
b) In the subsequent period after the acquisition of foreclosed asset.

The determination of net realisable value is required to be carried out by an independent appraiser for foreclosed assets in the amount equivalent or more than Rp5,000 (five billion Rupiah). Internal appraiser of the Bank may be used for asset below Rp5,000 (five billion Rupiah).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.

b) Macet, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *temporary account* ditetapkan sebagai berikut:

1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets** (continued)*

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

The quality of foreclosed assets is determined as:

a) Current, if the foreclosed asset is acquired within 1 (one) year.

b) Loss, if the foreclosed asset is acquired more than 1 (one) year.

Foreclosed assets acquired in relation to settlement of financing (presented in other assets account) are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, foreclosed assets are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

Inter-branches account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and temporary account are determined as:

1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

g. Giro dan penempatan pada bank indonesia

g. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah and jualah principles, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

h. Giro dan penempatan pada bank lain

h. Current accounts and placements with other banks

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah dikategorikan sebagai dana Non-Halal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

The received current account service funds that come from non-sharia Bank are categorized as Non-Halal funds, so Sharia Bank then distributed as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities.

i. Investasi pada surat berharga

i. Investments in marketable securities

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk).

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk).

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Sejak 1 Januari 2018 Bank mencatat transaksi repo surat berharga syariah mengacu ke PSAK 111 ”Akuntansi Wa’d” yang berlaku secara prospektif.

Effective 1 January 2018, the Bank records repo sharia marketable securities transaction in accordance with SFAS 111 “Accounting for Wa’d” which is implemented prospectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi komprehensif;
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Investments in marketable securities** (continued)*

Sukuk classifications are as follows:

a. Measured at amortized cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognised in comprehensive income;*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, the accumulated gain or loss which was been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

j. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

k. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan piutang *ijarah.*

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Investments in marketable securities *(continued)*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost;*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.*

j. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable represent Letters of Credit (L/C) and Domestic Documentary Letters of Credit transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated at net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable are classified as financing and receivables. Acceptances payable are classified as financial liabilities at amortized cost.

k. Receivables

Receivables consist of murabahah receivables, istishna receivables and ijarah receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

k. Piutang (lanjutan)

***k. Receivables** (continued)*

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. *Margin istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefits) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself.

Piutang *ijarah* adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *ijarah*.

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on Ijarah receivables is presented as a contra account of Ijarah receivables.

l. Pinjaman *qardh*

l. Funds of qardh

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh contract.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn.* Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain a fee (ujrah) from this transaction, which is recognised as income when received.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (benefits) in return which are recognised on an accrual basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Pinjaman *qardh* *(lanjutan)*

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

m. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah *(pre-determined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

n. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Funds of qardh *(continued)*

Funds of qardh are recognised at the same amount of funds lent when these occur. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognised as revenue when these are incurred. On the statement of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

m. Financing

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

n. Assets acquired for ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* *(lanjutan)*

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah;
(ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

o. Aset tetap dan aset hak guna

Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Assets acquired for ijarah *(continued)*

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant;
(ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and
(iv) installment sales at a specific price as agreed in the contract.

o. Fixed assets and right of use

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset. The land is stated at fair value, based on the assessment performed by external independent appraisers which are registered with OJK. Valuation are performed regularly to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Fixed assets and right of use *(continued)*

Fixed assets *(continued)*

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Instalasi, kendaraan bermotor, inventaris kantor dan renovasi atas aset sewa	5	*Installations, vehicles, office equipments and leasehold improvement*

Tanah tidak disusutkan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada “pendapatan dan beban non-usaha” dalam laporan laba rugi. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

Land is not depreciated.

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the profit or loss.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in “non-operating income and expenses” in the income statement. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Aset Tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset hak guna

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Fixed assets and right of use *(continued)*

Right-of-use assets

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the identified asset. The Bank has the right when it has a relevant decision-making right on how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset; and*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

p. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

q. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Fixed assets and right of use *(continued)*

Right-of-use assets *(continued)*

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

p. Other assets

Other assets among other consist of prepaid expenses, income receivables and foreclosed collaterals.

Prepaid expenses are amortized over the useful life using the straight-line method. Foreclosed assets acquired in relation to settlement of financing are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, foreclosed assets are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

q. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

s. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah, muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah* dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

r. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments, available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

s. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. An example of temporary syirkah funds is the receipt of funds from a mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytaroka and other similar accounts. For example: mudharabah demand deposits, mudharabah savingsdeposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

s. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

t. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna,* pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (*margin* efektif). *Margin* efektif adalah *margin* yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***s. Temporary syirkah funds** (continued)*

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realize gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

t. Revenue from fund management by the Bank as mudharib

Revenue from fund management by the Bank as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, istishna receivables, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* *(lanjutan)*

Pada saat menghitung *margin* efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *margin* efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari SBIS, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

u. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Revenue from fund management by the Bank as mudharib *(continued)*

When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from istishna is recognised at the date of transfer of assets.

Income from Ijarah is recognised proportionately over the contract period.

Musyarakah revenue which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah revenue which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Revenue from mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, SBIS, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

u. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

u. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Jumlah pendapatan *margin* dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan *margin* dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan *margin* dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

v. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima.

w. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***u. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds** (continued)*

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

v. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services are generally recognised when cash is received.

w. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

w. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

x. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

w. Employee benefits *(continued)*

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law (UU) No. 11 of 2020 dated 2 November 2021.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognised as other comprehensive income consist of:

(i) Actuarial gain and losses.
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets), and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

x. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

x. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Taxation *(continued)*

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

y. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

y. Transaction and balance in foreign currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statement of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	2021	2020	
1 Dolar Amerika Serikat	14,252.50	14,050.00	*1 United States Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	3,796.00	3,744.50	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Euro Europa	16,112.46	17,234.00	*1 Euro Europe*
1 Dolar Singapura	10,554.67	10,606.00	*1 Singapore Dollar*
1 Dolar Australia	10,346.61	10,752.00	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Hong Kong	1,828.03	1,812.00	*1 Hong Kong Dollar*
1 Dolar Kanada	11,192.92	10,981.00	*1 Canadian Dollar*
1 Poundsterling Inggris	19,250.86	19,012.00	*1 Great Britain Pound*
1 Franc Swiss	15,585.02	15,901.00	*1 Swiss Franc*
1 Yuan China	2,235.72	2,150.00	*1 Chinese Yuan*
1 Yen Jepang	123.77	136.00	*1 Japan Yen*

z. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar biaya perolehan.

z. Fund borrowing

Fund borrowing are funds received from other party with payment based on borrowings agreement.

Fund borrowing is initially recognised at acquisition cost.

aa. Sukuk *mudharabah* subordinasi

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi.

aa. Subordinated sukuk mudharabah

Subordinated Sukuk Mudharabah I is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortized cost using straight line method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

ab. Laba per saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Efek dilutif yang mempengaruhi laba per saham dasar Perseroan sebagai akibat dari *Management Employee Stock Option Program* pada Catatan 27 atas laporan keuangan Bank. Perhitungan laba per saham dilusian telah diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan pada Catatan 37 atas laporan keuangan Bank.

ac. Program saham bonus dan opsi saham

Program Saham Bonus dan Opsi Saham diukur berdasarkan nilai wajar jasa karyawan yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Pemberian saham bonus dan opsi saham kepada karyawan bergantung pada pemenuhan kondisi *vesting* tertentu, diantaranya mensyaratkan karyawan tetap bekerja di Bank sampai dengan jangka waktu tertentu. Setelah mengakui barang dan jasa yang diterima dan kenaikan terkait di ekuitas, Bank tidak membuat penyesuaian terhadap total ekuitas setelah tanggal *vesting*. Terhadap ekuitas yang kemudian menjadi hangus (*forfeit*) atau dalam hal opsi saham tidak dieksekusi diakui sebagai agio saham sesuai ketentuan yang berlaku.

ad. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ab. Earning per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

The dilutive effect that affect Company earnings per share was the impact of Management Employee Stock Option Program in Note 27 of the Bank's financial statements. The calculation of dilutive earnings per share has been disclosed at statement of profit and loss and other comprehensive income and in Note 37 of the Bank's financial statements.

ac. Bonus share plan and stock options

Bonus Share Plan and Stock Options are measured at fair value of received employees service according to fair value of equity instrument that is given. Distribution bonus share and stock options to employees depends on certain vesting condition, such as permanent employees are required to work in the Bank until certain time. After recognising the acquired good and service and the increase on equity, the Bank did not make any adjustment related to total equity after vesting date. For forfeited equity or non-executed stock options are recognised as premium stock (agio share) in accordance with applied term and condition.

ad. Provisions

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

ae. Sumber dana kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) apabila berasal dari:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

af. Segmen operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok *Wholesale*, SME, konsumer, mikro dan lainnya.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ae. Source of qardhul hasan funds

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, source of Qardhul Hasan Funds is acquired from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), if the funds come from:

1. *The transaction that is not accordance with sharia principle and can not be avoided include interest revenue (riba).*
2. *The sharia transaction does not fulfilling the term and condition (principle and/or requirement.*
3. *Penalty funds (punishment) because of not fulfilling the obligation on initial contract.*
4. *Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.*

af. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents operating segment based on Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the Chief Operating Decision Maker (CODM).

The Bank has identified and disclosed financial information based on main business (business segment) classified into Wholesale, SME, consumer, micro and others.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah*, dan penyisihan kerugian aset produktif

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang *murabahah* dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on murabahah receivables and the allowance for losses on earning assets

The Bank examines the quality of assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses of murabahah receivables is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah*, dan penyisihan kerugian aset produktif (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang *murabahah* dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2f,9,10,11,12,43a).

b. Kewajiban Imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***a. Allowance for impairment losses on murabahah receivables and the allowance for losses on earning assets** (continued)*

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances (See Note 2f,9,10,11,12,43a).

b. Employee benefit liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

d. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

e. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai *lessee*

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

d. Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

e. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

f. Penyisihan kerugian aset non-produktif

Bank menelaah potensi kerugian aset non-produktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset non-produktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda (Catatan 15).

f. Allowance for impairment losses on non-earning assets

The Bank evaluates the potential loss of non-earning assets at each reporting date to assess whether provision for impairment losses should be recognised in the statement profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised, Bank makes estimate on whether there is any indication of impairment of non-earning assets. These estimates are based on consideration of a number of factors and the end results may be different (see Note 15).

4. KAS / ***4. CASH***

	2021	2020*)	
Rupiah	4,032,230	2,959,922	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	43,267	79,978	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	42,783	136,182	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	1,391	4,010	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	142	556	*Europe Euro*
Dolar Australia	89	90	*Australia Dollar*
Yen Jepang	1	1	*Japanese Yen*
	4,119,903	3,180,739	

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp756.987 dan Rp700.587.

As of 31 December 2021 and 2020, the Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp756,987 and Rp700,587 respectively.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

a. Berdasarkan mata uang / ***a. By currencies***

	2021	2020*)	
Rupiah	19,997,471	16,195,527	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	566,109	5,332,406	*United States Dollar*
	20,563,580	21,527,933	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(continued)*

b. Berdasarkan jenis / ***b. By type***

	2021	2020*)	
Rupiah			*Rupiah*
Giro pada Bank Indonesia	11,547,471	5,602,088	*Current accounts with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	8,450,000	3,635,000	*Bank Indonesia Sharia Certificates Facilities (FASBIS)*
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	-	6,958,439	*Bank Indonesia Sharia Deposit (SBIS)*
	19,997,471	16,195,527	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	498,837	5,198,500	*Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
Giro pada Bank Indonesia	67,272	133,906	*Current accounts with Bank Indonesia*
	20,563,580	21,527,933	

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By time period***

	2021	2020*)	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	19,997,471	9,237,088	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	6,958,439	*> 3 - ≤ 12 months*
	19,997,471	16,195,527	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	423,584	3,505,906	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	1,826,500	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	142,525	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	20,563,580	21,527,933	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2021	2020*)	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	19,997,471	9,287,088	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	1,565,181	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	5,343,258	*> 3 - ≤ 12 months*
	19,997,471	16,195,527	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	423,584	5,191,906	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	142,525	140,500	*> 1 - ≤ 3 months*
	20,563,580	21,527,933	

e. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

e. By collectibility

As of 31 December 2021 and 2020, all current accounts and placements with Bank Indonesia is classified as "Current".

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

***5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA** (continued)*

f. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM)

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM)

	2021	2020*)	
Rasio GWM			*GWM Ratio*
Rupiah	5.05%	3.12%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1.03%	1.16%	*United States Dollar*

Rasio GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 yang mana mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% dan 1% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

The GWM ratio as of 31 December 2021 and 2020 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 22/10/PADG/2020 dated 30 April 2020 concerning "Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" came into force on 1 May 2020, and regulates that each Bank is required to maintain a Statutory Reserves (GWM) in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 3.5% and 1% of third party funds (DPK) in Rupiah and foreign exchange.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5%.

Based on regulation of Members of the Board of Governors No. 22/4/PADG/2020 Regarding the Implementation of Bank Indonesia Regulation No 22/4/PBI/2020 Regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak. The amount of allowance incentives for the fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah which must be fulfilled daily is set at 0.5%.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target BI sebesar 94%.

In addition, based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 23/07/PADG/2021 which is effective from 1 May 2021, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios (FDR) to the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Banks must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the BI target of 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) of Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

As of 31 December 2021 and 2020, the Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) with Bank Indonesia.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan) / *5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)*

g. Rata-rata tingkat bonus tahunan / *g. The average annual bonus rate*

	2021	2020*)	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	2.75% - 3.25%	3.25% - 4.25%	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	3.34% - 4.57%	3.85% - 5.95%	*Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS)*
Term Deposit Valas Syariah Bank Indonesia	0.24% - 1.58%	0.38% - 1.58%	*Bank Indonesia Sharia Foreign Currency Term Deposit*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	2021	2020*)	
Rupiah	696,799	1,675,591	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	833,687	6,726,974	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	299,355	301,203	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	11,436	41,203	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	6,747	5,016	*Great Britain Pound Sterling*
Euro Eropa	5,961	8,692	*Europe Euro*
Dolar Hong Kong	2,977	1,066	*Hong Kong Dollar*
Dolar Australia	933	1,666	*Australian Dollar*
Yen Jepang	894	1,782	*Japanese Yen*
Franc Swiss	-	554	*Swiss Franc*
Dolar Kanada	-	233	*Canadian Dollar*
Yuan China	-	218	*Chinese Yuan*
	1,161,990	7,088,607	
Total	1,858,789	8,764,198	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,238)	(68,393)	*Allowance for impairment losses*
	1,841,551	8,695,805	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2021	2020*)	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	405,629	937,078	*Rupiah*
Mata uang asing	63,813	1,283,440	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	469,442	2,220,518	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	291,170	738,513	*Rupiah*
Mata uang asing	1,098,177	5,805,167	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	1,389,347	6,543,680	*Total third parties*
Total	1,858,789	8,764,198	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,238)	(68,393)	*Allowance for impairment losses*
	1,841,551	8,695,805	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diklasifikasikan lancar.

c. By Bank Indonesia collectibility

All current accounts with other banks as of 31 December 2021 and 2020 are classified as current.

d. Berdasarkan jatuh tempo

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

d. By maturity

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro dan penempatan pada bank lain

e. The movements of allowance for losses on current accounts and placements with other banks

	2021	2020*)	
Saldo awal	68,393	4,407	*Beginning balance*
(Pembalikan)/Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(52,029)	63,954	*(Reversal)/Provision during the year (Note 36)*
Selisih kurs	874	32	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	17,238	68,393	*Ending balance*

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro dan penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diklasifikasikan "Lancar". Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Based on management's review and evaluation, all current accounts and placements with other banks as at 31 December 2021 and 2020 were classified as "Current". Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover impairment losses from uncollectible current accounts with other banks.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As of 31 December 2021 and 2020, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

Seluruh jasa giro yang diterima dari giro pada bank non-syariah dicatat sebagai dana kebajikan (Catatan 22).

All income received from current accounts with non-sharia banks are recorded as qardhul hasan funds (Note 22).

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	2021		2020*)		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	108,984	111,415	7,512	7,846	*Government Islamic Securities (SBSN)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	474,000	473,115	20,000	19,985	*Sharia State Treasury Certificate (SPNS)*
Sukuk Bank Indonesia	2,000,000	2,000,000	-	-	*Sukuk Bank Indonesia*
Reksadana	-	-	10,000	10,450	*Mutual funds*
Total nilai wajar melalui laba rugi	2,582,984	2,584,530	37,512	38,281	***Total fair value through profit or loss***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

	2021		2020*)		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2,802,282	2,812,973	48,289	52,886	*Government Islamic Securities (SBSN)*
Reksadana	189,750	194,783	-	-	*Mutual funds*
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,992,032	3,007,756	48,289	52,886	***Total fair value through other comprehensive income***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortized cost***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	32,230,617	32,820,250	26,618,637	27,087,821	*Government Islamic Securities (SBSN)*
Sukuk korporasi	1,271,600	1,271,600	2,783,600	2,783,600	*Corporate sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	26,935,010	26,935,010	18,481,917	18,481,917	*Sukuk Bank Indonesia*
Wesel ekspor	204,786	204,786	89,219	89,219	*Export bills*
	60,642,013	61,231,646	47,973,373	48,442,557	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	753,245	771,899	592,828	596,771	*Government Islamic Securities (SBSN)*
Wesel ekspor	1,314	1,314	-	-	*Export bills*
	754,559	773,213	592,828	596,771	
Total biaya perolehan diamortisasi	61,396,572	62,004,859	48,566,201	49,039,328	***Total amortized cost***
Total investasi pada surat berharga		67,597,145		49,130,495	***Total investments in marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18,075)		(24,858)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		67,579,070		49,105,637	***Net***

b. Berdasarkan penerbit / *b. By issuer*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun (%)/ *Annual Revenue Sharing Rate (%)*	Peringkat/*Rating* 2021	Peringkat/*Rating* 2020*)	Nilai wajar/ *Fair value* 2021	Nilai wajar/ *Fair value* 2020*)
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit and loss*					
Rupiah					
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN SR011	8.05	-	-	2,644	6,762
Seri SBSN SR012	6.30	-	-	2,855	64
Seri SBSN SR010	5.90	-	-	-	829
Seri SBSN SR013	6.05	-	-	4,897	191
Seri SBSN SR014	4.50	-	-	7,806	-
Seri SBSN SR015	4.55	-	-	11,567	-
Seri PBS 004	6.10	-	-	1,948	-
Seri PBS 005	6.13	-	-	19,033	-
Seri PBS 027	6.50	-	-	51,778	-
Seri PBS 030	5.88	-	-	350	-
Seri PBS 029	6.13	-	-	8,537	-
SPN-S 08012021	-	-	-	-	19,985
SPN-S 08032022	-	-	-	34,954	-
SPN-S 12022022	-	-	-	88,559	-
SPN-S 14012022	-	-	-	349,602	-
Sukuk Bank Indonesia	-	-	-	2,000,000	-
PNM Pasar Uang Syariah	8.05	-	-	-	10,450
				2,584,530	38,281

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan) / *b. By issuer (continued)*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun (%)/ *Annual Revenue Sharing Rate* (%)	Peringkat/*Rating*		Nilai wajar/ *Fair value*	
		2021	2020*)	2021	2020*)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Measured at fair value through other comprehensive income*					
Rupiah					
Pemerintah/*Government*					
Seri PBS 003	6.00	-	-	30,766	-
Seri PBS 011	8.05	-	-	-	20,155
Seri PBS 017	6.13	-	-	78,201	-
Seri PBS 019	8.25	-	-	-	32,731
Seri PBS 026	6.25	-	-	55,847	-
Seri PBS 030	5.88	-	-	25,109	-
Seri PBS 031	4.00	-	-	1,434,262	-
Seri PBS 032	4.88	-	-	1,188,788	-
Reksadana BNI-AM Proteksi Syariah	5.77	-	-	194,783	-
				3,007,756	52,886
Diukur pada biaya perolehan/ *Measured at acquisition cost*					
Rupiah					
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN PBS019	8.25	-	-	3,579,881	3,191,288
Seri SBSN PBS011	8.75	-	-	2,666,067	2,614,809
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	7,890,707	5,282,467
Seri SBSN PBS027	6.50	-	-	4,712,716	2,455,450
Seri SBSN PBS002	5.45	-	-	1,966,663	1,966,048
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	1,330,510	62,931
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	706,990	892,729
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	156,190	155,983
Seri SBSN PBS014	6.50	-	-	-	6,263,239
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	6,359,691	3,129,895
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	390,080	-
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	546,416	-
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	324,652	-
Seri SBSN IFR0006	10.25	-	-	52,150	53,145
Seri SBSN IFR0010	10.00	-	-	102,559	104,158
Seri SR011	8.05	-	-	637,354	652,281
Seri SR010	5.90	-	-	-	253,445
Seri SR012	6.30	-	-	5,485	3,435
Seri SR013	6.05	-	-	368,619	6,518
Seri SR014	5.47	-	-	514,998	-
Seri SR015	5.10	-	-	508,522	-
PT Pegadaian (Persero) MTN I Tahun 2018	7.00	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	450,000
PT Angkasa Pura I (Persero) Tbk -Tahun 2016 Seri A	8.10	idAA+(sy)	idAAA(sy)	-	100,000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan Tahap III Tahun 2019 Seri B	8.40	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	90,000
PT Global Mediacom Tbk - Global Mediacom Tahun 2017 Seri A	11.0	idA(sy)	idA+(sy)	25,000	25,000
PT Bio Farma (Persero) MTN *Mudharabah* I Tahun 2018	8.75	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	325,000
PT Bank Nagari - Sukuk *Mudharabah* II Tahun 2015	10.99	idA(sy)	idA(sy)	-	52,000
PT Kimia Farma - MTN *Mudharabah* I Tahun 2019	8.75	idAA-(sy)	idAA-(sy)	240,000	240,000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Th 2019 Seri B	8.50	idAAA(sy)	idAAA(sy)	315,000	315,000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Th 2018 Seri B	8.50	idAAA(sy)	idAAA(sy)	200,000	200,000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Th 2018 Seri A	7.55	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	350,000
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri A	9.10	idAA+(sy)	idAAA(sy)	-	18,000
Sukuk *Mudharabah* II BPD Sulselbar	8.25	idA+(sy)	idA+(sy)	-	5,000
Sukuk *Wakalah* Medco Power Indonesia II Tahun 2019 Seri A		idA(sy)	idAAA(sy)	140,600	140,600
Sukuk *Mudharabah* CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B	7.50	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	100,000
Sukuk *Mudharabah* Wijaya Karya I 2020 Seri A	7.50	idA(sy)	idAAA(sy)	99,000	99,000
Sukuk *Mudharabah* Eximbank Tahap I Tahun 2018 Seri B	7.50	idAAA(sy)	idAAA(sy)	90,000	112,000
MTN Syariah Ijarah PTPN III Tahun 2018	7.00	idBBB(sy)	idAAA(sy)	85,000	85,000
MTN Syariah *Mudharabah* 1 Inka Tahun 2020	7.00	idBBB+(sy)	idAA-(sy)	75,000	75,000
Sukuk *Mudharabah* CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 Seri B	7.50	idAAA(sy)	idAAA(sy)	2,000	2,000
Sukuk Bank Indonesia	3.75	-	-	26,935,010	18,481,917
Wesel Ekspor	8.50	-	-	204,786	89,219
				61,231,646	48,442,557

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan) / *By issuer (continued)*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun (%)/ *Annual Revenue Sharing Rate* (%)	Peringkat/*Rating* 2021	Peringkat/*Rating* 2020*)	Nilai wajar/ *Fair value* 2021	Nilai wajar/ *Fair value* 2020*)
Diukur pada biaya perolehan/ *Measured at acquisition cost*					
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*					
Pemerintah/*Government*					
Seri INDOIS22	3.30	-	-	246,647	243,236
Seri INDOIS22	3.40	-	-	207,214	162,790
Seri INDOIS21	3.40	-	-	-	87,412
Seri INDOIS23	3.30	-	-	32,786	32,926
Seri INDOIS25	3.30	-	-	130,794	70,407
Seri INDOIS24	3.30	-	-	154,458	-
Wesel Ekspor	3.29	-	-	1,314	-
				773,213	596,771
				62,004,859	49,039,328
				67,597,145	49,130,495
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*				(18,075)	(24,858)
				67,579,070	49,105,637

Jumlah nosional atas INDOIS22, INDOIS23, INDOIS24 dan INDOIS25 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD54.158.840 (nilai penuh).

The notional amount of INDOIS22, INDOIS23, INDOIS24 and INDOIS25 which is denominated in United States Dollar as of 31 December 2021 amounted to USD54,158,840 (full amount).

Jumlah nosional atas INDOIS21, INDOIS22, INDOIS23 dan INDOIS25 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD42.474.805 (nilai penuh).

The notional amount of INDOIS21, INDOIS22, INDOIS23 and INDOIS25 which is denominated in United States Dollar as of 31 December 2020 amounted to USD42,474,805 (full amount).

Bank mengakui keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi - bersih dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan “Diukur pada nilai wajar” masing-masing sebesar Rp22.262 dan Rpnihil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan di laporan laba rugi.

The Bank recognised unrealized gain (loss) - net on changes in the value of “Measured at fair value” securities amounting to Rp22,262 and Rpnil respectively, for the year ended 31 December 2021 and 2020 which are recorded in the statements of profit or loss.

c. Berdasarkan jangka waktu / *By period*

	2021	2020*)	
≤ 1 tahun	29,285,495	19,860,240	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 3 tahun	6,629,022	4,969,528	*> 1 - ≤ 3 years*
> 3 - ≤ 5 tahun	20,687,176	18,116,533	*> 3 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	10,995,452	6,184,194	*> 5 years*
	67,597,145	49,130,495	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18,075)	(24,858)	*Allowance for impairment losses*
	67,579,070	49,105,637	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2021	2020*)	
≤ 1 bulan	24,935,573	14,939,583	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	6,611,482	4,475,972	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,296,562	7,302,941	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 tahun	33,753,528	22,411,999	*> 1 year*
	67,597,145	49,130,495	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18,075)	(24,858)	*Allowance for impairment losses*
	67,579,070	49,105,637	

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Rupiah	29,164,789	18,856,741	*Rupiah*
Mata uang asing	1,314	-	*Foreign Currency*
	29,166,103	18,856,741	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			*Related Parties (Note 42)*
Rupiah	37,659,143	29,676,983	*Rupiah*
Mata uang asing	771,899	596,771	*Foreign Currency*
	38,431,042	30,273,754	
	67,597,145	49,130,495	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18,075)	(24,858)	*Allowance for impairment losses*
	67,579,070	49,105,637	

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 seluruh investasi pada surat berharga diklasifikasikan “Lancar”.

As of 31 December 2021 and 2020, all investments in marketable securities are classified as “Current”.

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

The Bank assessed the impairment on investments in marketable securities individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat surat berharga yang dijadikan jaminan.

As of 31 December 2021 and 2020, no marketable securities are pledged as collaterals.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for losses on investments in marketable securities are as follows:

	2021	2020*)	
Saldo awal	24,858	41,033	*Beginning balance*
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(6,783)	(16,175)	*Reversal during the year (Note 36)*
Saldo akhir	18,075	24,858	***Ending balance***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI / *8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currencies*

	2021	2020*)	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	52,545	43,693	*Import L/C and Local Letter of Credit (SKBDN)*
L/C Eskpor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	1,278	16,961	*Export L/C and Local Letter of Credit (SKBDN)*
	53,823	60,654	
Pihak Berelasi			*Related Parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	22,811	75,755	*Import L/C and Local Letter of Credit (SKBDN)*
L/C Eskpor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	84,861	158,928	*Export L/C and Local Letter of Credit (SKBDN)*
	107,672	234,683	
	161,495	295,337	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,615)	(2,548)	*Allowance for impairment losses*
	159,880	292,789	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua tagihan akseptasi pada surat berharga diklasifikasikan “Lancar”.

As of 31 December 2021 and 2020, all acceptance receivables are classified as “Current”.

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity*

	2021	2020*)	
≤ 1 bulan	13,265	27,413	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	74,396	149,581	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	73,834	118,343	*> 3 - ≤ 12 months*
	161,495	295,337	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,615)	(2,548)	*Allowance for impairment losses*
	159,880	292,789	

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover impairment losses from uncollectible acceptance receivables.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / ***8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES*** *(continued)*

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan dan liabilitas akseptasi / ***d. The movements of allowance for losses on acceptance receivables and liabilities***

	2021	2020*)	
Saldo awal	2,548	2,359	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(933)	179	*(Reversal)/provision during the year (Note 36)*
Selisih kurs	-	10	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	1,615	2,548	*Ending balance*

9. PIUTANG / ***9. RECEIVABLES***

a. Berdasarkan jenis, kolektibilitas dan mata uang / ***a. By type, collectibility and currency***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	97,075,510	84,332,014	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,859,833	2,901,083	*Special mention*
Kurang lancar	934,838	589,559	*Substandard*
Diragukan	516,328	248,431	*Doubtful*
Macet	1,167,904	1,573,131	*Loss*
	101,554,413	89,644,218	
Mata Uang Asing			***Foreign Currencies***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	-	995	*Current*
Dalam perhatian khusus	131,147	189,122	*Special mention*
Kurang lancar	-	9,755	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	*Loss*
	131,147	199,872	
	101,685,560	89,844,090	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,351,703)	(3,279,426)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	98,333,857	86,564,664	*Net*
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *istishna*			*Istishna receivables*
Lancar	321	388	*Current*
Dalam perhatian khusus	38	228	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	21	*Loss*
	359	637	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3)	(30)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	356	607	*Net*
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *Ijarah*			*Ijarah receivables*
Lancar	-	-	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,221	3,331	*Special mention*
Kurang lancar	85,193	422	*Substandard*
Diragukan	920	3,430	*Doubtful*
Macet	14,236	31,984	*Loss*
	101,570	39,167	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(98,800)	(15,250)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,770	23,917	*Net*
	98,336,983	86,589,188	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

9. PIUTANG (lanjutan) / *9. RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang, dan kolektibilitas / *b. By economic sector, currency, collectibility*

	2021						
	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	1,423,265	42,463	204,202	32,393	498,729	2,201,052	*Manufacturing*
Jasa usaha	4,457,631	118,175	48,768	30,342	44,177	4,699,093	*Business services*
Konstruksi	276,330	11,564	4,908	5,829	5,498	304,129	*Construction*
Konsumer	73,635,857	1,164,230	408,390	287,674	417,645	75,913,796	*Consumer*
Listrik, gas dan air	68,757	4,941	257	222	8,342	82,519	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	962,241	57,182	7,571	5,037	6,044	1,038,075	*Transportation*
Perdagangan	9,039,330	337,834	232,158	119,612	149,804	9,878,738	*Trading*
Pertambangan	91,092	5,249	2,476	3,267	1,856	103,940	*Mining*
Pertanian	5,410,257	118,939	110,062	31,692	47,930	5,718,880	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	28,871	515	237	115	127	29,865	*Social/public*
Lainnya	1,682,200	-	1,002	1,065	1,988	1,686,255	*Others*
	97,075,831	1,861,092	1,020,031	517,248	1,182,140	101,656,342	
Mata Uang Asing							***Foreign Currencies***
Pengangkutan	-	128,722	-	-	-	128,722	*Transportation*
Pertambangan	-	2,425	-	-	-	2,425	*Mining*
	-	131,147	-	-	-	131,147	
Jumlah piutang	97,075,831	1,992,239	1,020,031	517,248	1,182,140	101,787,489	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,276,171)	(351,173)	(490,466)	(284,455)	(1,048,241)	(3,450,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	95,799,660	1,641,066	529,565	232,793	133,899	98,336,983	***Net***

	2020*)						
	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	1,581,763	106,641	102,469	9,524	568,707	2,369,104	*Manufacturing*
Jasa usaha	4,190,998	146,103	33,273	14,452	88,925	4,473,751	*Business services*
Konstruksi	1,202,940	12,872	2,311	533	16,598	1,235,254	*Construction*
Konsumer	63,281,464	1,687,778	251,477	144,722	645,981	66,011,422	*Consumer*
Listrik, gas dan air	82,670	9,417	340	450	1,131	94,008	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	1,351,629	22,276	16,633	14,696	5,198	1,410,432	*Transportation*
Perdagangan	7,161,765	315,873	70,403	58,165	227,085	7,833,291	*Trading*
Pertambangan	168,720	5,826	17,971	356	1,747	194,620	*Mining*
Pertanian	3,797,330	509,439	23,852	6,426	48,878	4,385,925	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	21,857	292	2	-	155	22,306	*Social/public*
Lainnya	1,491,266	88,125	71,250	2,537	731	1,653,909	*Others*
	84,332,402	2,904,642	589,981	251,861	1,605,136	89,684,022	
Mata Uang Asing							***Foreign Currency***
Listrik, gas dan air	995	-	-	-	-	995	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	-	189,122	-	-	-	189,122	*Transportation*
Pertambangan	-	-	3,313	-	-	3,313	*Mining*
Lainnya	-	-	6,442	-	-	6,442	*Others*
	995	189,122	9,755	-	-	199,872	
Jumlah piutang	84,333,397	3,093,764	599,736	251,861	1,605,136	89,883,894	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,358,680)	(564,931)	(297,914)	(121,161)	(952,020)	(3,294,706)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	82,974,717	2,528,833	301,822	130,700	653,116	86,589,188	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai dengan perjanjian) / *c. By period (based on agreement)*

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	450,174	391,608	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	1,404,091	2,365,900	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	17,039,524	16,484,232	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	82,762,553	70,442,282	*> 5 years*
	101,656,342	89,684,022	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
≤ 1 tahun	-	-	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	-	4,308	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	131,147	189,122	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	6,442	*> 5 years*
	131,147	199,872	
Jumlah	101,787,489	89,883,894	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,450,506)	(3,294,706)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	98,336,983	86,589,188	***Net***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

9. PIUTANG (lanjutan) / *9. RECEIVABLES (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	364,903	267,511	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	259,978	487,628	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,386,389	2,817,560	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	30,039,571	28,513,932	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	68,605,501	57,597,391	*> 5 years*
	101,656,342	89,684,022	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
≤ 1 bulan	-	-	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	4,308	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	131,147	189,122	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	6,442	*> 5 years*
	131,147	199,872	
Jumlah	101,787,489	89,883,894	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,450,506)	(3,294,706)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	98,336,983	86,589,188	***Net***

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	101,155,714	88,785,650	*Rupiah*
Mata uang asing	131,147	199,872	*Foreign Currency*
	101,286,861	88,985,522	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Rupiah	500,628	898,372	*Rupiah*
Jumlah	101,787,489	89,883,894	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,450,506)	(3,294,706)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	98,336,983	86,589,188	***Net***

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

	2021		2020*)		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	97,075,831	1,276,171	84,333,397	1,358,680	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,992,239	351,173	3,093,764	564,931	*Special mention*
Kurang lancar	1,020,031	490,466	599,736	297,914	*Substandard*
Diragukan	517,248	284,455	251,861	121,161	*Doubtful*
Macet	1,182,140	1,048,241	1,605,136	952,020	*Loss*
	101,787,489	3,450,506	89,883,894	3,294,706	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

9. PIUTANG (lanjutan) / ***9. RECEIVABLES** (continued)*

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

1) Employee loans that used murabahah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 15 (fifteen) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Efektif *yield* marjin piutang *murabahah* untuk Rupiah berkisar antara 9,51% sampai dengan 13,77% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 10,09% sampai dengan 14,94% per tahun untuk tahun 2020 dan untuk mata uang asing berkisar antara 1,56% sampai dengan 2,62% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 1,63% sampai dengan 6,81% per tahun untuk tahun 2020.

2) Effective margin yield murabahah receivables for Rupiah ranges from 9.51% to 13.77% per annum for 2021 and ranges from 10.09% to 14.94% per annum for 2020 and for foreign currencies ranging from 1.56% to 2.62% per annum for 2021 and ranges from 1.63% to 6.81% per annum for 2020.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

3) The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2021	2020*)	
Saldo awal	3,294,706	1,939,242	*Beginning balance*
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	1,397,845	1,995,809	*Provision during the year (Note 36)*
Penerimaan kembali hapus buku	180,655	205,323	*Recoveries of write-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,423,484)	(845,766)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	784	98	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	3,450,506	3,294,706	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *murabahah* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah financing is adequate and in compliance with Financial Services Authority's regulation.

4) Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

4) Receivables are collateralized by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

5) Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.404.822 (2020: Rp16.691.924), termasuk piutang restrukturisasi terkait Covid-19 sebesar Rp11.130.173 (2020: Rp12.982.698). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.

5) Total restructured receivables as at 31 December 2021 amounting to Rp14,404,822 (2020: Rp16,691,924), including restructured receivables related to Covid-19 amounting to Rp11,130,173 (2020: Rp12,982,698). Receivables were being restructured by extending the period, rescheduling and additional receivable facility for debtors.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

9. PIUTANG (lanjutan) / ***9. RECEIVABLES** (continued)*

g. Informasi penting lainnya *(lanjutan)* / ***g. Other significant information** (continued)*

6) Rasio *Non-Performing Financing* (*NPF*) bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

6) The ratio of total Non-Performing Financing (NPF) gross and net on receivables are as follows:

	2021	2020*)	
Jumlah piutang**)	101,787,248	89,882,783	*Total receivables**)*
NPF - Bruto**)	2,719,419	2,456,733	*NPF - Gross**)*
Persentase NPF - Bruto	2.67%	2.73%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF- Neto**)	896,257	1,085,638	*NPF - Net**)*
Persentase NPF - Neto	0.88%	1.21%	*Percentage of NPF - Net*

) Diluar piutang kepada bank lain / *) Exclude receivables to other banks*

10. PINJAMAN *QARDH* / ***10. FUNDS OF QARDH***

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / ***a. By type and currency***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
Rahn	3,737,737	3,215,951	*Rahn*
Kartu Hasanah	392,593	352,779	*Hasanah Card*
Qardh	3,820,787	4,814,265	*Qardh*
	7,951,117	8,382,995	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
Qardh	1,468,114	897,860	*Qardh*
	1,468,114	897,860	
Jumlah	9,419,231	9,280,855	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(337,831)	(226,482)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	9,081,400	9,054,373	***Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang, dan kolektibilitas / ***b. By economic sector, currency and collectibility***

	2021						
	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/*Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	11,934	-	-	89	1,836	13,859	*Manufacturing*
Jasa usaha	609,180	-	-	403	6,043	615,626	*Business services*
Konstruksi	2,134,367	-	-	241,943	19,883	2,396,193	*Construction*
Konsumer	4,458,025	30,429	5,868	7,207	9,510	4,511,039	*Consumer*
Pengangkutan	-	3,500	6,013	-	-	9,513	*Transportation*
Perdagangan	235,623	4	-	-	708	236,335	*Trading*
Pertambangan	-	-	8,967	-	-	8,967	*Mining*
Pertanian	26,108	-	-	-	-	26,108	*Agriculture*
Lainnya	130,536	-	-	2,941	-	133,477	*Others*
	7,605,773	33,933	20,848	252,583	37,980	7,951,117	
Mata Uang Asing							***Foreign Currency***
Industri	1,424,924	-	-	-	-	1,424,924	*Manufacturing*
Pengangkutan	37,740	-	-	-	-	37,740	*Transportation*
Perdagangan	2,714	-	-	-	-	2,714	*Trading*
Sosial/masyarakat	2,736	-	-	-	-	2,736	*Social/public*
	1,468,114	-	-	-	-	1,468,114	
Jumlah pinjaman *qardh*	9,073,887	33,933	20,848	252,583	37,980	9,419,231	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(181,484)	(1,152)	(3,054)	(127,779)	(24,362)	(337,831)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,892,403	32,781	17,794	124,804	13,618	9,081,400	***Net***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang, dan kolektibilitas *(lanjutan)* / *b. By economic sector, currency and collectibility (continued)*

	2020*)						
	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	68,803	-	-	-	120,421	189,224	*Manufacturing*
Jasa usaha	165,933	253	2,319	-	-	168,505	*Business services*
Konstruksi	3,597,588	-	-	-	-	3,597,588	*Construction*
Konsumer	4,125,717	23,826	3,329	5,057	13,258	4,171,187	*Consumer*
Listrik, gas dan air	1,565	-	-	-	-	1,565	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	24,165	-	-	-	-	24,165	*Transportation*
Perdagangan	70,829	-	1,836	-	700	73,365	*Trading*
Pertambangan	1,062	-	-	-	-	1,062	*Mining*
Pertanian	7,966	-	-	-	-	7,966	*Agriculture*
Lainnya	148,368	-	-	-	-	148,368	*Others*
	8,211,996	24,079	7,484	5,057	134,379	8,382,995	
Mata Uang Asing							***Foreign Currency***
Industri	836,490	-	-	-	-	836,490	*Manufacturing*
Pengangkutan	47,264	-	-	-	-	47,264	*Transportation*
Perdagangan	14,106	-	-	-	-	14,106	*Trading*
	897,860	-	-	-	-	897,860	
Jumlah pinjaman *qardh*	9,109,856	24,079	7,484	5,057	134,379	9,280,855	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(86,108)	(989)	(2,477)	(2,529)	(134,379)	(226,482)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	9,023,748	23,090	5,007	2,528	-	9,054,373	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai dengan perjanjian) / *c. By period (based on agreement)*

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤1 tahun	6,711,559	7,034,181	*≤1 year*
>1 - ≤2 tahun	227,289	284,705	*>1 - ≤2 years*
>2 - ≤5 tahun	53,954	124,729	*>2 - ≤5 years*
>5 tahun	958,315	939,380	*>5 years*
	7,951,117	8,382,995	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
≤1 tahun	1,429,234	853,069	*≤1 year*
>1 - ≤2 tahun	38,880	44,791	*>1 - ≤2 years*
>2 - ≤5 tahun	-	-	*>2 - ≤5 years*
>5 tahun	-	-	*>5 years*
	1,468,114	897,860	
Jumlah	9,419,231	9,280,855	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(337,831)	(226,482)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	9,081,400	9,054,373	***Net***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***10. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1,460,225	1,601,795	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	2,712,592	3,539,750	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,774,938	2,150,367	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	453,078	512,102	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	550,284	578,981	*> 5 years*
	7,951,117	8,382,995	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
≤ 1 bulan	136,707	12,603	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	522,108	837,124	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	809,299	48,133	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	-	-	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	1,468,114	897,860	
Jumlah	9,419,231	9,280,855	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(337,831)	(226,482)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	9,081,400	9,054,373	***Net***

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	6,665,289	6,065,210	*Rupiah*
Mata uang asing	1,468,114	897,860	*Foreign Currency*
	8,133,403	6,963,070	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Rupiah	1,285,828	2,317,785	*Rupiah*
Jumlah	9,419,231	9,280,855	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(337,831)	(226,482)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	9,081,400	9,054,373	***Net***

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

	2021		2020*)		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	9,073,887	181,484	9,109,856	86,108	*Current*
Dalam perhatian khusus	33,933	1,152	24,079	989	*Special mention*
Kurang lancar	20,848	3,054	7,484	2,477	*Substandard*
Diragukan	252,583	127,779	5,057	2,529	*Doubtful*
Macet	37,980	24,362	134,379	134,379	*Loss*
	9,419,231	337,831	9,280,855	226,482	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***10. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

1) The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	2021	2020*)	
Saldo awal	226,482	94,930	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	251,313	189,065	*Provisions during the year (Note 36)*
Penerimaan kembali hapus buku	1,515	13,283	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(141,608)	(71,057)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	129	261	*Exchange rate differences*
Saldo akhir	337,831	226,482	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of qardh is adequate and in compliance with Financial Services Authority Regulations.

2) Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

2) Funds of qardh are collateralized by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, or by other guarantees generally accepted by the Bank.

3) Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.101.870 (2020: Rp638.358), termasuk piutang restrukturisasi terkait Covid-19 sebesar Rp780.487 (2020: Rp169.628). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pinjaman *qardh* bagi debitur.

3) Total restructured funds of qardh as at 31 December 2021 amounting to Rp1,101,870 (2020: Rp638,358), including restructured receivables related to Covid-19 amounting to Rp780,487 (2020: Rp169,628). Receivables were being restructured by extending the period, rescheduling and additional funds of qardh facility for debtors.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***10. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

g. Informasi penting lainnya (lanjutan) / ***g. Other significant information*** *(continued)*

4) Rasio *Non-Performing Financing* (*NPF*) bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

4) The ratio of total Non-Performing Financing (NPF) gross and net on funds of qardh are as follows:

	2021	2020*)	
Jumlah pinjaman *qardh***)	9,419,231	9,280,855	*Total funds of qardh***)
NPF - Bruto**)	311,411	146,920	*NPF - Gross***)
Persentase NPF - Bruto	3.31%	1.58%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto**)	156,216	7,535	*NPF - Net***)
Persentase NPF - Neto	1.66%	0.08%	*Percentage of NPF - Net*

) Diluar pinjaman *qardh* kepada bank lain / *) Exclude funds of qardh to other banks*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / ***11. MUDHARABAH FINANCING***

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / ***a. By type and currency***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	1,616,063	2,642,785	*Working capital*
Investasi	12,374	27,810	*Investment*
Konsumsi	-	387	*Consumption*
Jumlah	1,628,437	2,670,982	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(36,123)	(72,195)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**1,592,314**	**2,598,787**	***Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang, dan kolektibilitas / ***b. By economic sector, currency, and collectibility***

2021

	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	4,916	-	-	-	-	4,916	*Manufacturing*
Jasa usaha	36,449	-	-	-	221	36,670	*Business services*
Konstruksi	3,129	-	-	-	-	3,129	*Construction*
Perdagangan	366,073	-	-	-	-	366,073	*Trading*
Pertanian	3,588	-	-	-	-	3,588	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	-	-	-	-	215	215	*Social/public*
Lainnya	1,192,713	234	3,864	71	16,964	1,213,846	*Others*
Jumlah pembiayaan	1,606,868	234	3,864	71	17,400	1,628,437	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,683)	(34)	(970)	(36)	(17,400)	(36,123)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,589,185	200	2,894	35	-	1,592,314	

2020*)

	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	4,489	-	-	-	397	4,886	*Manufacturing*
Jasa usaha	26,204	-	-	-	57	26,261	*Business services*
Konstruksi	130	-	-	-	-	130	*Construction*
Konsumer	387	-	-	-	-	387	*Consumer*
Listrik, gas dan air	3,158	634	-	-	-	3,792	*Electricity, gas and water*
Perdagangan	524,448	-	-	-	334	524,782	*Trading*
Pertanian	36,428	-	-	197	9,934	46,559	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	281	-	-	-	-	281	*Social/public*
Lainnya	2,036,119	4,105	373	4,072	19,235	2,063,904	*Others*
Jumlah pembiayaan	2,631,644	4,739	373	4,269	29,957	2,670,982	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39,887)	(362)	(373)	(1,661)	(29,912)	(72,195)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,591,757	4,377	-	2,608	45	2,598,787	***Net***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / ***11. MUDHARABAH FINANCING** (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	511,224	487,633	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	310,855	754,306	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	332,152	797,874	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	474,206	631,169	*> 5 years*
Jumlah	1,628,437	2,670,982	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(36,123)	(72,195)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,592,314	2,598,787	***Net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	12,173	41,501	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	113,569	185,294	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	778,672	1,310,475	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	504,210	893,035	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	219,813	240,677	*> 5 years*
Jumlah	1,628,437	2,670,982	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(36,123)	(72,195)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,592,314	2,598,787	***Net***

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	1,154,595	1,460,923	*Rupiah*
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Rupiah	473,842	1,210,059	*Rupiah*
Jumlah	1,628,437	2,670,982	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(36,123)	(72,195)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,592,314	2,598,787	***Net***

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

	2021		2020*)		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	1,606,868	17,683	2,631,644	39,887	*Current*
Dalam perhatian khusus	234	34	4,739	362	*Special mention*
Kurang lancar	3,864	970	373	373	*Substandard*
Diragukan	71	36	4,269	1,661	*Doubtful*
Macet	17,400	17,400	29,957	29,912	*Loss*
	1,628,437	36,123	2,670,982	72,195	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya

1) Efektif *yield* marjin pembiayaan *mudharabah* untuk Rupiah berkisar antara 7,09% sampai dengan 18,82% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 7,96% sampai dengan 11,72% per tahun untuk tahun 2020.

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	2021	2020*)	
Saldo awal	72,195	63,224	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(1,954)	38,496	*(Reversals)/provisions during the year (Note 36)*
Penerimaan kembali hapus buku	131	14,064	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(34,249)	(43,589)	*Write-off during the year*
Saldo akhir	36,123	72,195	*Ending balance*

3) Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

4) Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp121.192 (2020: Rp297.905), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait Covid-19 sebesar Rp107.082 (2020: Rp263.927). Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

5) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	2021	2020*)	
Jumlah pembiayaan *mudharabah***)	1,519,729	2,412,906	*Total mudharabah financing**)*
NPF - Bruto**)	21,335	34,599	*NPF - Gross**)*
Persentase NPF - Bruto	1.40%	1.43%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto**)	2,929	2,652	*NPF - Net**)*
Persentase NPF - Neto	0.19%	0.11%	*Percentage of NPF - Net*

**) Diluar pembiayaan *mudharabah* kepada bank lain

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

***11. MUDHARABAH FINANCING** (continued)*

g. Other significant information

1) Effective margin yield mudharabah financing for Rupiah ranges from 7.09% to 18.82% per annum for 2021 and ranges from 7.96% to 11.72% per annum for 2020.

2) The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

3) Mudharabah financing are collateralized by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) Total restructured mudharabah financing of qardh as at 31 December 2021 amounting to Rp121,192 (2020: Rp297,905), including restructured mudharabah financing related to Covid-19 amounting to Rp107,082 (2020: Rp263,927). Mudharabah financing were being restructured by extending the period, rescheduling and additional facility for debtors.

5) The ratio of total Non-Performing Financing (NPF) gross and net on mudharabah financing are as follows:

***) Exclude mudharabah financing to other banks*

Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is adequate and in compliance with Financial Service Authority (FSA) Regulations.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *12. MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	25,899,951	24,607,443	*Working capital*
Investasi	21,174,154	20,232,247	*Investment*
Konsumsi	7,302,971	6,479,646	*Consumption*
	54,377,076	51,319,336	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
Modal kerja	1,794,235	301,551	*Working capital*
Investasi	1,383,125	1,727,646	*Investment*
	3,177,360	2,029,197	
Jumlah	57,554,436	53,348,533	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,651,313)	(2,452,358)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	53,903,123	50,896,175	***Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	2021						
	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/*Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	5,194,504	73,601	263,039	8,953	533,903	6,074,000	*Manufacturing*
Jasa usaha	8,843,528	93,821	19,381	15,167	20,409	8,992,306	*Business services*
Konstruksi	11,645,298	417,713	37,902	43,338	20,779	12,165,030	*Construction*
Konsumer	7,199,046	49,896	21,232	12,218	20,579	7,302,971	*Consumer*
Listrik, gas dan air	2,984,992	1,777	677	-	391	2,987,837	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	3,843,288	6,949	2,399	6,064	984	3,859,684	*Transportation*
Perdagangan	5,251,649	324,176	119,246	59,755	109,868	5,864,694	*Trading*
Pertambangan	280,941	2,515	4,898	1,207	4,661	294,222	*Mining*
Pertanian	4,732,136	29,124	45,857	29,475	27,912	4,864,504	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	150,673	-	-	-	-	150,673	*Social/public*
Lainnya	1,812,890	-	-	-	8,265	1,821,155	*Others*
	51,938,945	999,572	514,631	176,177	747,751	54,377,076	
Mata Uang Asing							***Foreign Currency***
Industri	13,591	-	-	-	-	13,591	*Manufacturing*
Listrik, gas dan air	685,894	-	164,192	231,307	-	1,081,393	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	65,707	-	-	-	-	65,707	*Transportation*
Pertambangan	2,016,669	-	-	-	-	2,016,669	*Mining*
	2,781,861	-	164,192	231,307	-	3,177,360	
Jumlah pembiayaan	54,720,806	999,572	678,823	407,484	747,751	57,554,436	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,877,190)	(235,041)	(455,229)	(336,102)	(747,751)	(3,651,313)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	52,843,616	764,531	223,594	71,382	-	53,903,123	***Net***

	2020*)						
	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/*Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	5,671,885	90,255	411,988	29,453	159,692	6,363,273	*Manufacturing*
Jasa usaha	8,315,317	42,447	119,470	2,197	33,343	8,512,774	*Business services*
Konstruksi	9,690,352	20,354	11,606	2,575	83,303	9,808,190	*Construction*
Konsumer	6,377,303	61,542	21,144	5,656	11,001	6,479,646	*Consumer*
Listrik, gas dan air	2,895,298	1,597	-	-	329	2,897,224	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	3,343,513	9,365	363	13,638	12,952	3,379,831	*Transportation*
Perdagangan	5,650,696	191,015	154,610	32,465	69,006	6,097,792	*Trading*
Pertambangan	131,866	5,210	36,350	-	983	174,409	*Mining*
Pertanian	5,043,985	86,535	29,765	64,167	19,649	5,244,101	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	173,574	-	-	-	-	173,574	*Social/public*
Lainnya	2,145,995	478	307	24,616	17,126	2,188,522	*Others*
	49,439,784	508,798	788,603	174,767	407,384	51,319,336	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / 12. *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) / *b. By economic sector (continued)*

	2020*)						
	Lancar/ *Current*	Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Mata Uang Asing							***Foreign Currency***
Industri	15,981	-	-	-	-	15,981	*Manufacturing*
Jasa usaha	24,684	-	-	-	-	24,684	*Business services*
Listrik, gas dan air	588,410	-	164,466	243,494	-	996,370	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	101,797	-	-	-	-	101,797	*Transportation*
Pertambangan	890,365	-	-	-	-	890,365	*Mining*
	1,621,237	-	164,466	243,494	-	2,029,197	
Jumlah pembiayaan	51,061,021	508,798	953,069	418,261	407,384	53,348,533	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,145,918)	(99,936)	(567,680)	(287,959)	(350,865)	(2,452,358)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	49,915,103	408,862	385,389	130,302	56,519	50,896,175	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	6,258,719	6,084,082	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	7,488,362	7,784,362	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	8,181,089	8,081,097	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	32,448,906	29,369,795	*> 5 years*
	54,377,076	51,319,336	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
≤ 1 tahun	1,500,421	140,500	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	-	24,683	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	177,913	5,594	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,499,026	1,858,420	*> 5 years*
	3,177,360	2,029,197	
Jumlah	57,554,436	53,348,533	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,651,313)	(2,452,358)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	53,903,123	50,896,175	***Net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	2,270,215	2,885,346	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	4,111,033	5,480,182	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	8,668,811	5,990,427	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	12,201,420	13,107,413	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	27,125,597	23,855,968	*> 5 years*
	54,377,076	51,319,336	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
≤ 1 bulan	1,027,459	-	*≤1 month*
>1 - ≤3 bulan	267,483	-	*>1 - ≤3 months*
>3 - ≤12 bulan	206,661	165,183	*>3 - ≤12 months*
>1 - ≤5 tahun	988,811	851,662	*>1 - ≤5 years*
>5 tahun	686,946	1,012,352	*>5 years*
	3,177,360	2,029,197	
Jumlah	57,554,436	53,348,533	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,651,313)	(2,452,358)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	53,903,123	50,896,175	***Net***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) / *12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	35,351,739	33,752,872	*Rupiah*
Mata uang asing	1,846,369	1,972,833	*Foreign Currency*
	37,198,108	35,725,705	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Rupiah	19,025,337	17,566,464	*Rupiah*
Mata uang asing	1,330,991	56,364	*Foreign Currency*
	20,356,328	17,622,828	
Jumlah	57,554,436	53,348,533	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,651,313)	(2,452,358)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	53,903,123	50,896,175	***Net***

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

	2021		2020*)		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	54,720,806	1,877,190	51,061,021	1,145,918	*Current*
Dalam perhatian khusus	999,572	235,041	508,798	99,936	*Special mention*
Kurang lancar	678,823	455,229	953,069	567,680	*Substandard*
Diragukan	407,484	336,102	418,261	287,959	*Doubtful*
Macet	747,751	747,751	407,384	350,865	*Loss*
	57,554,436	3,651,313	53,348,533	2,452,358	

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

1) Efektif *yield* marjin pembiayaan *musyarakah* untuk Rupiah berkisar antara 7,66% sampai dengan 10,55% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 7,20% sampai dengan 11,94% per tahun untuk tahun 2020 dan untuk mata uang asing berkisar antara 2,34% sampai dengan 8,95% per tahun untuk tahun 2021 dan berkisar antara 2,18% sampai dengan 8,68% per tahun untuk tahun 2020.

1) Effective margin yield musyarakah financing for Rupiah ranges from 7.66% to 10.55% per annum for 2021 and ranges from 7.20% to 11.94% per annum for 2020 and for foreign currencies ranging from 2.34% to 8.95% per annum for 2021 and ranges from 2.18% to 8.68% per annum for 2020.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) / ***12. MUSYARAKAH FINANCING*** *(continued)*

g. Informasi penting lainnya (lanjutan) / ***g. Other significant information*** *(continued)*

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

2) The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:

	2021	2020*)	
Saldo awal	2,452,358	1,678,832	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	2,057,965	1,333,737	*Provisions during the year (Note 36)*
Penerimaan kembali hapus buku	53,659	81,721	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(916,723)	(645,627)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	4,054	3,695	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	3,651,313	2,452,358	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate and in compliance with Financial Service Authority (FSA) regulations.

3) Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

3) Musyarakah financing are collateralized by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

4) Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.116.295 (2020: Rp12.080.073), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait Covid-19 sebesar Rp5.717.217 (2020: Rp9.459.078). Restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

4) Total restructured musyarakah financing of qardh as at 31 December 2021 amounting to Rp12,116,295 (2020: Rp12,080,073), including restructured musyarakah financing related to Covid-19 amounting to Rp5,717,217 (2020: Rp9,459,078). Musyarakah financing were being restructured by extending the period, rescheduling and additional facility for debtors.

5) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

5) The ratio of total Non-Performing Financing (NPF) gross and net on musyarakah financing are as follows:

	2021	2020*)	
Jumlah pembiayaan *musyarakah***)	57,553,103	53,345,648	*Total musyarakah financing***)
NPF - Bruto**)	1,834,058	1,778,714	*NPF - Gross***)
Persentase NPF - Bruto	3.19%	3.33%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto**)	294,976	572,211	*NPF - Net***)
Persentase NPF - Neto	0.51%	1.07%	*Percentage of NPF - Net*

) Diluar pembiayaan *musyarakah* kepada bank lain / *) Exclude musyarakah financing to other banks*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH*

13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan rincian sebagai berikut:

This account represents lease object transactions from ijarah muntahiyah bittamlik with details are as follows:

	2021	2020*)	
Properti	1,440,580	1,441,186	*Property*
Mesin dan instalasi	539,692	740,688	*Machinery and installations*
Multijasa	151,477	123,754	*Multi-services*
Lainnya	197,722	382,494	*Others*
Jumlah	2,329,471	2,688,122	*Total*
Akumulasi penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai	(1,427,906)	(1,178,661)	*Accumulated depreciation, amortisation, maintenance and impairment*
Bersih	901,565	1,509,461	***Net***

Penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp556.345 dan Rp777.681 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 30).

Depreciation, amortisation, maintenance and impairment charged to the statements of profit or loss amounting to Rp556,345 and Rp777,681, respectively, for the years ended 31 December 2021 and 2020 (Note 30).

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET

Aset tetap dan aset hak guna - bersih terdiri dari:

Fixed assets and right of use - net consist of:

	2021	2020*)	
Aset tetap - bersih	3,340,648	2,735,392	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - bersih	715,305	661,683	*Right-of-use asset - net*
	4,055,953	3,397,075	

Aset tetap

Fixed assets

	2021						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian Kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Tetap							***Fixed Assets***
Nilai revaluasi							***Revaluation cost***
Tanah	1,578,336	-	-	67,617	-	1,645,953	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	424,885	17,577	-	-	61,221	503,683	*Buildings*
Instalasi	203,701	23,883	-	-	18,589	246,173	*Installation*
Kendaraan bermotor	65,912	2,799	-	-	-	68,711	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,626,625	334,699	-	-	39,140	3,000,464	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	42,787	11,268	-	-	52,573	106,628	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	207,098	397,278	-	-	(171,523)	432,853	*Construction in progress*
	5,149,344	787,504	-	67,617	-	6,004,465	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(88,588)	(25,745)	-	-	-	(114,333)	*Buildings*
Instalasi	(187,680)	(19,101)	-	-	-	(206,781)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(59,692)	(1,909)	-	-	-	(61,601)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,071,524)	(188,791)	-	-	-	(2,260,315)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(6,468)	(14,319)	-	-	-	(20,787)	*Leasehold improvement*
	(2,413,952)	(249,865)	-	-	-	(2,663,817)	
Nilai buku	2,735,392					3,340,648	***Book value***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET (continued)

Aset tetap (lanjutan)

***Fixed assets** (continued)*

	2020*)						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian Kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Tetap							*Fixed Assets*
Nilai revaluasi							***Revaluation cost***
Tanah	995,389	582,947	-	-	-	1,578,336	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	299,815	108,687	-	-	16,383	424,885	*Buildings*
Instalasi	196,249	6,046	(120)	-	1,526	203,701	*Installation*
Kendaraan bermotor	76,838	4,886	(15,812)	-	-	65,912	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,329,484	212,872	(8,543)	-	92,812	2,626,625	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	12,511	4,799	-	-	25,477	42,787	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	170,234	173,062	-	-	(136,198)	207,098	*Construction in progress*
	4,080,520	1,093,299	(24,475)	-	-	5,149,344	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(67,387)	(21,201)	-	-	-	(88,588)	*Buildings*
Instalasi	(184,104)	(3,696)	120	-	-	(187,680)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(71,536)	(2,577)	14,421	-	-	(59,692)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(1,879,969)	(199,522)	8,316	-	(349)	(2,071,524)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(1,274)	(5,543)	-	-	349	(6,468)	*Leasehold improvement*
	(2,204,270)	(232,539)	22,857	-	-	(2,413,952)	
Nilai buku	1,876,250					2,735,392	***Book value***

Jumlah penyusutan aset tetap dan aset hak guna yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp610.595 dan Rp563.132 untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 35).

Depreciation expenses of fixed assets and right of use charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp610,595 and Rp563,132 for the period ended 31 December 2021 and 2020, respectively (Note 35).

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya pada pihak berelasi dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.862.745 dan Rp2.320.404, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 pada PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, PT Asuransi Wahana Tata, PT Mandiri AXA General Insurance Unit Syariah, PT Asuransi Staco Mandiri Cabang Syariah, PT Asuransi Tripakarta, Asuransi Sinarmas Syariah, Asuransi Takaful Umum, dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur.

The Bank has insured the fixed assets (except landrights) to cover for losses against fire, theft and other risks torelated parties with total insurance coverage amounting to Rp3,862,745 and Rp2,320,404, as of 31 December 2021 and 2020 respectively to PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, PT Asuransi Wahana Tata, PT Mandiri AXA General Insurance Unit Syariah, PT Asuransi Staco Mandiri Cabang Syariah, PT Asuransi Tripakarta, Asuransi Sinarmas Syariah, Asuransi Takaful Umum, dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang diasuransikan.

Management believes the amount is adequate to cover possible losses which may arise from insured assets.

Rincian penjualan aset tetap Bank adalah sebagai berikut:

The detail of the sale of Bank's fixed assets are as follows:

	2021	2020*)	
Biaya perolehan	-	24,475	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	-	(22,857)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	-	1,618	*Net book value*
Harga jual	-	8,828	*Selling price*
Laba penjualan aset tetap	-	7,210	*Gain on sales of fixed assets*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

***14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET** (continued)*

Aset tetap (lanjutan)

***Fixed assets** (continued)*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp2.099.998 dan Rp1.613.372.

As of 31 December 2021 and 2020, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp2,099,998 and Rp1,613,372 respectively.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Taxable value of landrights and buildings owned by Bank as of 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020*)	
Tanah	963,799	635,450	*Landrights*
Bangunan	165,093	157,673	*Buildings*
	1,128,892	793,123	

Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan nilai tercatatnya.

Other than land and building, there is no significant difference between the fair value of the asset and its carrying value.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Management believes that there is no impairment of fixed assets, and the insurance coverage to cover the possibility of losses on fixed assets is adequate as of 31 December 2021 and 2020.

Revaluasi aset tetap

Revaluation of fixed assets

Penilaian atas aset tetap dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti,
b) Kondisi pasar,
c) Lokasi,
d) Karakteristik fisik,
e) Karakteristik tanah.

The valuations of fixed assets are performed based on Indonesian Valuation Standards, based on reference to recent market transactions done on arm's length terms. The valuation method used are market data approach and cost approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

a) Type and right on property,
b) Market condition,
c) Location,
d) Physical characteristic,
e) Land characteristic.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset non-keuangan:
- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

Fair value was determined by hierarchy and input used on technical valuation of non financial assets:
- *Level 1: Input quoted (unadjusted) prices in active market for identical assets;*
- *Level 2: Input other than quoted market price in level 1 that are observable either directly or indirectly;*
- *Level 3: Input that are not observable.*

Pengukuran nilai wajar tanah dikategorikan sebagai nilai wajar level 2 berdasarkan input dari teknik penilaian yang digunakan.

The fair value measurement for the land is categorized as level 2 fair value based on the inputs of the valuation technique used.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

***14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET** (continued)*

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank Syariah Mandiri (”BSM”)

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. CSC.CRE/508/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan persetujuan OJK melalui surat No. S-159/PB.31/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penambahan penyertaan modal melalui *inbreng* Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp152.997 yang terdiri dari tanah senilai Rp127.750 dan bangunan senilai Rp25.247 (tidak termasuk pajak). Revaluasi atas ATTB dengan nilai pasar pada saat revaluasi sebesar Rp152.997 dilakukan oleh KJPP Rizki Djunaedy & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Maret 2020. Penambahan ATTB selama tahun 2020 sejumlah Rp175.876 terdiri dari tanah senilai Rp144.527 (termasuk pajak sejumlah Rp16.777) dan bangunan senilai Rp31.349 (termasuk pajak senilai Rp6.102) yang berasal dari *inbreng* ATTB terkait penambahan modal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)

Based on the Letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 dated 26 August 2020 and approval OJK by the letter No. S-159/PB.31/2020 dated 9 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has obtain additional share by inbreng Non-movable Fixed Assets (ATTB) of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Syariah Mandiri amounting Rp152,997 which consists of land amounting Rp127,750 and buindings amounting Rp25,247 (exclude tax). Revaluation of ATTB with market value on revaluation amounting Rp152,997 was performed by KJPP Rizki Djunaedy & Partners, external independent appraisal registered in OJK, based on their report dated 2 March 2020. Addition of ATTB in 2020 amounting Rp175,876 was consists of land amounting Rp144,527 (include tax amounting Rp16,777) and building amounting Rp31,349 (include tax amounting Rp6,102) from inbreng ATTB related to additional capital from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BRISyariah Tbk (”BRIS”)

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BRIS melakukan penyesuaian kebijakan revaluasi aset tetap sesuai ketentuan dengan BSI atas pencatatan tanah dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi menggunakan model revaluasi. Secara total pada tahun 2021, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai “Pendapatan Komprehensif Lain” adalah sebesar Rp80.276 dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.892. Penilaian atas tanah dilakukan oleh independen eksternal yaitu KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BRISyariah Tbk (“BRIS”)

On 31 January 2021, the ex-legacy BRIS made a policy adjustment to be in line with BSI of land from cost model to revaluation model. In total in 2021, the increases in the carrying amount of land revaluation are recorded as “Other Comprehensive Income” amounting to Rp80,276 and the decrease of carrying amount from revaluation is recorded as expenses in 2021 amounting to Rp12,892. The valuations of land was performed by KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan, an external independent appraisal.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BNI Syariah (”BNIS”)

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BNIS melakukan penyesuaian kebijakan dengan BSI atas pencatatan tanah dari sebelumnya menggunakan model revaluasi menjadi menggunakan model biaya. Atas hal ini, Bank melakukan pembalikan atas penilaian kembali bangunan yang sebelumnya sudah dicatat di “Penghasilan Komprehensif Lain” sebesar Rp9.361.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BNI Syariah (“BNIS”)

On 31 January 2021, ex-legacy BNIS made a policy adjustment to be in line with BSI of land from revaluation model to cost model. In this regard, the Bank reversed the revaluation of the building which had previously been recorded in “Other Comprehensive Income” amounting to Rp9,361.

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

***14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET** (continued)*

Revaluasi aset tetap - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluasi atas tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp67.617, dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Abdullah Fitriantoro & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 25 November 2021. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2021 sebesar Rp119.719 dicatat sebagai "surplus revaluasi aset tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp45.979 diakui dalam laba rugi tahun 2021 sebagai beban usaha lainnya.

Fixed asset revaluation - PT Bank Syariah Indonesia

Revaluation on land with carrying amount on revaluation amounting Rp67,617, performed by Public Appraisal Service Office ("KJPP") Abdullah Fitriantoro & Rekan, an external independent appraisal registered on OJK, on their report dated 25 November 2021. Difference on land revaluation on 2021 amounting Rp119,719 was recorded as "surplus on revaluation of fixed asset" and expressed on other comprehensive income. Impaiment of carrying value amounting Rp45,979 was recognised in the profit or loss of the year 2021 as other operating expense.

Aset hak guna / ***Right-of-use assets***

	2021					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Nilai perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan kantor	860,417	448,554	(204,861)	-	1,104,110	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	110,492	136,847	(59,278)	-	188,061	*Vehicles and technology*
	970,909	585,401	(264,139)	-	1,292,171	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(257,040)	(321,153)	71,283	-	(506,910)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(52,186)	(39,577)	21,807	-	(69,956)	*Vehicles and technology*
	(309,226)	(360,730)	93,090	-	(576,866)	
Nilai buku	661,683				715,305	***Book value***

	2020*)					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Nilai perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan kantor	563,041	316,866	(19,490)	-	860,417	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	93,312	19,057	(1,877)	-	110,492	*Vehicles and technology*
	656,353	335,923	(21,367)	-	970,909	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	-	(276,530)	19,490	-	(257,040)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	-	(54,063)	1,877	-	(52,186)	*Vehicles and technology*
	-	(330,593)	21,367	-	(309,226)	
Nilai buku	656,353				661,683	***Book value***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Bank juga telah mengadopsi PSAK No. 73: Sewa mulai 1 Januari 2020. Identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tahun berjalan dan Bank tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Bank mengakui Aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu, dibayar bulanan atau periodik. Terdapat pengecualian untuk sewa dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan serta tidak ada opsi beli dan memiliki aset pendasar bernilai rendah, yaitu lebih kecil atau sama dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah).

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET (continued)

***Right-of-use assets** (continued)*

The Bank has also adopted SFAS No. 73: Rent from 1 January 2020. Identification and measurement of the asset's rights and lease liabilities are applied on a retrospective basis with the cumulative impact at initial implementation is recognised during the year and the Bank does not restate the comparative information.

The Bank recognises the right-of-use assets and lease liabilities for all leases with time contracts, payable monthly or periodically. There are exceptions to the lease with a short term, which is less or equal to 12 months and there is no call option and has a low value underlying asset, which is less than or equal to Rp70,000,000 (seventy million Rupiah).

15. ASET LAIN-LAIN / *15. OTHER ASSETS*

Aset lain-lain terdiri dari: / *Other assets consist of:*

	2021	2020*)	
Pihak ketiga			***Third parties***
Agunan yang diambil alih	875,376	986,833	*Foreclosed collaterals*
Piutang pendapatan surat berharga	655,070	549,932	*Income receivables from securities*
Biaya dibayar dimuka	483,399	506,357	*Prepaid expense*
Tagihan ATM	138,254	156,003	*ATM receivables*
Pendapatan pembiayaan yang akan diterima	128,837	168,914	*Income receivables from financing*
Persediaan alat tulis kantor dan materai	116,654	61,157	*Office supplies and stamps*
Tagihan SKBDN kepada nasabah	81,253	43,956	*SKBDN to customers receivables*
Setoran jaminan	45,624	25,844	*Guarantee deposit*
Uang muka pajak	-	12,308	*Advance tax*
Lain-lain	335,918	338,471	*Others*
	2,860,385	2,849,775	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Tagihan transaksi non ATM	-	29,113	*Non-ATM receivables transaction*
Jumlah	2,860,385	2,878,888	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,151,950)	(1,254,607)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,708,435	1,624,281	*Net*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Movement of foreclosed collaterals as of of 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020*)	
Saldo awal	986,833	1,046,112	*Beginning balance*
Pengambilalihan agunan selama periode berjalan	-	(1,082)	*Collateral take over during the period*
Penjualan	(111,457)	(58,197)	*Sales*
Saldo akhir	875,376	986,833	*Ending balance*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

16. LIABILITAS SEGERA

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Liabilitas ATM Jalin	224,901	142,843	*Liabilities to ATM Jalin*
Zakat Bank	101,555	72,351	*Zakat on the Bank*
Titipan tagihan pembayaran	47,958	8,946	*Remittance of bills payment*
Liabilitas ATM Prima	25,075	60,553	*Liabilities to ATM Prima*
Titipan dana nasabah	22,452	20,029	*Deposit of customer funds*
Liabilitas ATM Bersama	14,980	198,410	*Liabilities to ATM Bersama*
Liabilitas pihak ketiga	8,377	8,092	*Liabilities to third parties*
Liabilitas terkait pembiayaan	8,852	35,055	*Liabilities related financing*
Titipan ATM	2,175	2,514	*ATM remittance*
Zakat pegawai, nasabah dan umum	2,647	560	*Zakat of employees, customers and public*
Titipan lainnya	80,171	227,664	*Other remittances*
	539,143	777,017	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Titipan ATM	69,411	212,345	*Remittance on ATM*
	608,554	989,362	

Liabilitas ATM Prima, ATM Bersama, dan ATM Jalin merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* (ATM) Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Prima, jaringan ATM Bersama, dan jaringan ATM Jalin.

Liabilities to ATM Prima, ATM Bersama, and ATM Jalin represent liabilities arising from using the Bank's network of Automated Teller Machine (ATM) by customers of using ATM Prima, ATM Bersama and ATM Jalin network.

Titipan lainnya merupakan titipan cadangan kupon sukuk subordinasi, titipan biaya administrasi kliring, titipan pembayaran gaji pensiun, dan lain-lain.

Other remittances are remittances of subordinated sukuk mudharabah coupon, remittances from clearance administration fees, remittances of salary payments for retirees, and others.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah *(shahibul maal)* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.*

This account represents the undistributed share of the customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Bank's undistributed profit sharing as of 31 December 2021 and 2020, are as follows:

	2021	2020*)	
Bukan Bank			***Non Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	113,806	157,922	*Time deposits*
Giro	29,005	4,551	*Current accounts*
Subnotes	15,029	-	*Subnotes*
Tabungan	1	6,008	*Savings deposits*
	157,841	168,481	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
Deposito	278	1,092	*Time deposits*
	158,119	169,573	
Bank			***Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	354	318	*Time deposits*
Giro	5	5	*Current accounts*
SIMA	-	114	*SIMA*
	359	437	
	158,478	170,010	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

18. GIRO *WADIAH* / *18. WADIAH DEMAND DEPOSITS*

Giro *wadiah* terdiri dari: / *Wadiah demand deposits consist of:*

	2021	2020*)	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	18,757,585	18,869,461	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2,295,669	9,275,418	*United States Dollar*
Dolar Singapura	12,719	7,728	*Singapore Dollar*
Euro Europa	6,170	3,333	*Euro Europe*
Riyal Arab Saudi	4,167	272,976	*Saudi Arabian Riyal*
	21,076,310	28,428,916	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	1,301,454	2,373,455	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	33,850	20,242	*United States Dollar*
	1,335,304	2,393,697	
	22,411,614	30,822,613	

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which the third party funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2021	2020*)	
Rupiah	0.28% - 4.85%	0.36% - 0.40%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00% - 0.29%	0.09% - 0.25%	*Foreign currency*

19. TABUNGAN *WADIAH* / *19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS*

Tabungan *wadiah* terdiri dari: / *Wadiah savings deposits consist of:*

	2021	2020*)	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	34,815,161	29,440,007	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	11,499	121,903	*United States Dollar*
	34,826,660	29,561,910	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	9,616	18,362	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	698	*United States Dollar*
	9,616	19,060	
	34,836,276	29,580,970	

Kisaran bonus tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:

	2021	2020*)	
Rupiah	1.36% - 2.92%	1.39% - 2.58%	*Rupiah*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
Giro *wadiah*	110,858	128,326	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	5,080	23,234	*Wadiah savings deposits*
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (SIMA)	-	655,000	*Interbank mudharabah investment certificate (SIMA)*
	115,938	806,560	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2021	2020*)	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro *wadiah*	109,121	124,919	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	5,080	23,234	*Wadiah savings deposits*
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (SIMA)	-	655,000	*Interbank mudharabah investment certificate (SIMA)*
	114,201	803,153	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro *wadiah*	1,737	3,407	*Wadiah demand deposits*
	115,938	806,560	

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2021	2020*)	
Rupiah	0.75% - 0.79%%	0.72% - 0.79%	*Rupiah*

21. PERPAJAKAN / *21. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

	2021	2020*)	
Utang pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 25	-	22,072	*Article 25*
Pasal 29	327,121	366,534	*Article 29*
	327,121	388,606	
Utang pajak lainnya			*Other tax payables*
Pasal 4 (2)	51,628	56,718	*Article 4 (2)*
Pasal 21	80,872	82,642	*Article 21*
Pasal 22	1,927	352	*Article 22*
Pasal 23	3,543	2,328	*Article 23*
Pasal 26	408	287	*Article 26*
PPN dan PPh Lainnya	38,579	6,581	*Value added tax and others*
	176,957	148,908	
	504,078	537,514	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

***21. TAXATION** (continued)*

b. Beban pajak

b. Tax expense

Sehubungan dengan penggabungan BRIS, BSM, dan BNIS, dimana BRIS adalah badan hukum yang menerima penggabungan, kewajiban perpajakan BSI merupakan kelanjutan dari kewajiban perpajakan BRIS. Sebagai entitas yang dibubarkan, kewajiban perpajakan BSM dan BNIS per 31 Januari 2021 telah dipenuhi pada bulan Mei 2021. BSM dan BNIS telah mengajukan permohonan pencabutan NPWP, dan efektif pada 1 Februari 2021 NPWP BSM dan BNIS tidak lagi digunakan.

In connection with the merger of BRIS, BSM, and BNIS, where BRIS is the legal surviving entity, BSI's tax obligations are a continuation of BRIS's tax obligations. As dissolving entity, the tax liability of BSM and BNIS as of 31 January 2021 have been fulfilled in May 2021. BSM and BNIS has submitted request for tax ID number revocation, and effective on 1 February 2021, the tax ID number of BSM and BNIS are no longer used.

Dasar penghitungan PPh Badan atas laba BSI tahun pajak 2021 adalah total laba BSI sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang merupakan gabungan laba ketiga bank tersebut dikurangi laba BSM dan BNIS untuk periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2021.

The basis for calculating the corporate income tax for BSI's profit of fiscal year 2021 is BSI's total profit from 1 January 2021 to 31 December 2021, which represents combined profit of the three banks) minus BSM and BNIS profits for one month period ended 31 January 2021.

	2021	2020*)	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			***PT Bank Syariah Indonesia Tbk***
Beban pajak kini	1,252,975	-	*Current tax expense*
Manfaat pajak tangguhan	(388,205)	-	*Deferred tax benefit*
Dampak atas perubahan tarif pajak	(41,622)	-	*Impact on tax rate adjusment*
	823,148	-	
Bank *ex-legacy* (Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, Bank BNI Syariah)			***Bank ex-legacy (Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, Bank BNI Syariah)***
Beban pajak kini	29,620	1,101,730	*Current tax expense*
Penyesuaian Pajak Penghasilan badan yang berasal dari tahun sebelumnya	-	5,670	*Adjustment of corporate income tax that comes from the previous year*
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	79,551	(413,177)	*Deferred tax expense/(benefit)*
Dampak atas perubahan tarif pajak	-	123,325	*Impact on tax rate adjusment*
	109,171	817,548	
	932,319	817,548	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

21. PERPAJAKAN / *21. TAXATION*

b. Beban pajak / *b. Tax expense*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

	2021	2020*)	
Laba sebelum pajak BSI (1 Januari - 31 Desember 2021)	3,960,524	3,005,197	*Income before tax BSI (1 January - 31 December 2021)*
Laba sebelum pajak bank ex-legacy (BNIS dan BSM) (1 Januari - 31 Januari 2021)	(298,816)	-	*Income before tax ex-legacy bank (BNIS and BSM) (1 Januari - 31 Januari 2021)*
Laba sebelum pajak penghasilan BSI	3,661,708	3,005,197	*Income before tax BSI*
Beda temporer			*Temporary differences*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penyisihan kerugian atas aset produktif	955,579	1,575,485	*Provision for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	(9,767)	39,155	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	(2,991)	698	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	(33,229)	(9,448)	*Provision for impairment losses on operational risk*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	9,199	136,331	*Provision for employee benefit liabilities*
Depresiasi aset tetap	95,833	41,409	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan bonus	675,634	88,636	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	98,072	51,178	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Lainnya	(482)	(4,776)	*Others*
Total beda temporer	1,787,848	1,918,668	*Total temporary differences*
Beda tetap			*Permanent differences*
Natura karyawan	30,568	11,149	*Benefit-in-kind*
Representasi dan sumbangan	13,178	20,300	*Representation and donation*
Sewa dan pemeliharaan rumah dinas	35,126	29,498	*Housing rent and maintenance*
Membership	3,937	-	*Membership*
Revaluasi aset tetap	45,979	-	*Revaluation of fixed assets*
Biaya lain-lain	116,996	23,054	*Others*
Total beda tetap	245,784	84,001	*Total permanent differences*
Total koreksi fiskal	2,033,632	2,002,669	*Total fiscal corrections*
Penghasilan kena pajak	5,695,340	5,007,866	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan badan	1,252,975	1,101,730	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(925,361)	(735,167)	*Prepaid tax - article 25*
Pajak yang dipotong pihak lain - pasal 22	(493)	(29)	*Tax withheld by other party - article 22*
Utang pajak penghasilan - pasal 29	327,121	366,534	***Income tax payable - article 29***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2021.

The calculation of income tax for the period ended 31 December 2021 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2021.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***21. TAXATION*** *(continued)*

b. Beban pajak (lanjutan) / ***b. Tax expense*** *(continued)*

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense by multiplying income before income tax to the applicable tax rate are as follows:

	2021	2020*)	
Laba sebelum pajak BSI (1 Januari - 31 Desember 2021)	3,960,524	3,005,197	*Income before tax BSI (1 January - 31 December 2021)*
Laba sebelum pajak bank legacy (BNIS dan BSM) (1 Januari - 31 Januari 2021)	(298,816)	-	*Income before tax ex-legacy bank (BNIS and BSM) (1 Januari - 31 Januari 2021)*
Laba sebelum pajak penghasilan BSI	3,661,708	3,005,197	*Income before tax BSI*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	805,576	661,144	*Income tax expense calculated from income before tax*
Pengaruh pajak atas beda permanen	54,072	18,480	*Tax impact of permanent differences*
Dampak atas perubahan tarif pajak	(41,623)	123,325	*Impact on tax rate adjustment*
Lainnya	5,123	14,599	*Others*
Beban pajak	823,148	817,548	***Tax expense***

c. Aset pajak tangguhan - bersih / ***c. Deferred tax assets - net***

	2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak perubahan tarif pajak yang ditangguhkan/ *Effect of changes in tax rate - deferred*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi / *Credited/ (charged) to statement of profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to OCI*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan pernyisihan kerugian atas aset produktif	516,126	15,264	225,257	-	756,647	*Provision for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	229,632	17,081	(16,005)	-	230,708	*Allowance for impairment losses on non-productive assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	4,087	-	(304)	-	3,783	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	31,971	-	(6,312)	-	25,659	*Provision for losses on operatoinal risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	191,440	9,278	(2,457)	(14,233)	184,028	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	108,713	-	67,305	-	176,018	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	25,263	-	20,307	-	45,570	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	2,995	-	20,662	-	23,657	*Depreciation expenses of fixed assets and right of uses*
Lainnya	(946)	-	199	-	(747)	*Others*
	1,109,281	41,623	308,652	(14,233)	1,445,323	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***21. TAXATION*** *(continued)*

c. Aset pajak tangguhan - bersih *(lanjutan)* / ***c. Deferred tax assets - net*** *(continued)*

	2020*)					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak perubahan tarif pajak yang ditangguhkan/ *Effect of changes in tax rate - deferred*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi / *Credited/ (charged) to statement of profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to OCI*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan pernyisihan kerugian atas aset produktif	219,445	(43,962)	340,643	-	516,126	*Provision for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	277,623	(52,418)	4,427	-	229,632	*Allowance for impairment losses on non-productive assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	4,469	(379)	(3)	-	4,087	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	20,590	10,778	603	-	31,971	*Provision for losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	181,966	(29,679)	28,690	10,463	191,440	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	101,378	(12,165)	19,500	-	108,713	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	10,914	3,090	11,259	-	25,263	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	(7,476)	1,361	9,110	-	2,995	*Depreciation expenses of fixed assets and right of uses*
Lainnya	(398)	49	(597)	-	(946)	*Others*
	808,511	(123,325)	413,632	10,463	1,109,281	

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary difference which creates deferred tax assets.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, and stipulates Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Reduction of Income Tax Rates for Domestic Corporate Taxpayers in the Form of a Public Company and effective as of 19 June 2020. The regulation stipulates a reduction in the income tax rate of domestic corporate taxpayers from 25% to 22% for the fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards.

Pada 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya menetapkan tarif PPh Badan untuk tahun 2022 adalah sebesar 22%, dimana pemerintah membatalkan peraturan sebelumnya yaitu UU No. 2 tahun 2020 yang menyebutkan tarif PPh Badan sebesar 20%.

On 29 October 2021, the Government has ratified Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates that the corporate income tax rate for 2022 is 22%, wherein the government canceled the previous regulation, Law No. 2 of 2020 which stated that the corporate income tax rate was 20%.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat ketetapan pajak

Pemeriksaan tahun pajak 2021 - *ex-legacy* BSM

Terkait dengan penutupan NPWP *ex-legacy* BSM, pada bulan Agustus 2021 Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar 31 Januari 2021 kepada PT Bank Syariah Mandiri. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlanjut.

Pemeriksaan tahun pajak 2018 - *ex-legacy* BRIS

Pada bulan Mei 2019, BRIS menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Tahun Pajak 2018.

Pada April 2020, BRIS menerima Surat Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") dari Kantor Pajak yang menyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp63.205.

Pada bulan Juni 2020, BRIS telah menerima keputusan Kantor Pelayanan Pajak yang memutuskan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. BRIS telah menerima sebagian pengembalian pajak sebesar Rp53.324 pada bulan Juni 2020 dan membebankan sisa jumlah tak tertagih sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp9.851.

e. Informasi lain

Sehubungan dengan penggabungan BSM, BNIS, dan BRIS pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi BSI, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Bank yang mengabungkan diri dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada bulan Agustus 2021, Bank menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-145/WPJ.10/2021 tentang persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

***21. TAXATION** (continued)*

d. Tax assessment letters

Assessment for fiscal year 2021 - ex-legacy BSM

Regarding the revocation of the tax ID number of ex-legacy BSM, on August 2021, the Bank received an Inspection Order for the Overpayment Tax Return period 31 January 2021 addressed to PT Bank Syariah Mandiri. Until the date of this financial statements, the tax audit is still in progress.

Assessment for fiscal year 2018 - ex-legacy BRIS

In May 2019, BRIS received an Inspection Order for Overpayment Tax Return fiscal year 2018.

In April 2020, BRIS received Tax Decree on tax assessment letter of tax overrpayment ("SKPLB") from the Tax Office which stated the tax underpayment of corporate income tax amounted to Rp63,205.

In June 2020, BRIS has received the Tax Office decision which decided to refund the tax overpayment. BRIS has received the partial tax refund amounted to Rp53,324 on June 2020 and charged the uncollectible as Rp9,851 expense for the year.

e. Other informatipn

In connection with the merger of BSM, BNIS, and BRIS on 1 February 2021 into BSI, based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, the merging Banks may use the book value of the transfer of assets in the context of a business merger after obtaining approval from the Directorate General of Taxes.

In August 2021, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes number Kep-145/WPJ.10/2021 concerning the approval of the use of book value for the transfer of assets in the context of merger.

22. LIABILITAS LAIN-LAIN / *22. OTHER LIABILITIES*

	2021	2020*)	
Cadangan bonus dan tantiem	920,080	809,636	*Provision of bonus and tantiem*
Rekening sementara	366,335	244,735	*Temporary accounts*
Liabilitas sewa	289,101	180,927	*Lease liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar	220,275	113,152	*Accrued expenses*
Biaya notaris	189,498	140,117	*Notary fees*
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	91,858	100,906	*Provision of THR and other employee expenses*
Pendapatan diterima dimuka	27,899	79,226	*Deferred income*
Rekening angsuran pinjaman	25,471	23,529	*Receivable installment accounts*
Setoran jaminan	22,672	43,317	*Guarantee deposits*
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	22,057	35,646	*Deferred financing administration income*
Dana kebajikan	25,977	12,900	*Qardhul hasan funds*
Premi asuransi pembiayaan	10,635	9,170	*Loan insurance premium*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	24,500	115,660	*Others (each under Rp1,000)*
	2,236,358	1,908,921	

Rekening sementara terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, rekening pendamping, dan rekening titipan pembayaran asuransi karyawan.

Temporary account represents account for financing installment, companion accounts, and deposit accounts for employee's insurance payments.

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk sewa gedung dan jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on building and network leases, ATM maintenance fees and Financial Services Authority's fee.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari *ujrah* diterima dimuka atas *supply chain financing* dan *buyer chain financing*.

Deferred Income consists of deferred ujrah income of supply chain financing and buyer chain financing.

Lain-lain terdiri dari rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of administrative accounts, clearance intermediaries and others.

23. GIRO *MUDHARABAH* / *23. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga - Bukan Bank			***Third Parties - Non Bank***
Rupiah	8,749,993	1,767,608	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	338,726	392,390	*United States Dollar*
	9,088,719	2,159,998	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Rupiah	4,192,313	3,186,221	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	287	1,665	*United States Dollar*
	4,192,600	3,187,886	
Pihak Ketiga - Bank			***Third Parties - Bank***
Rupiah	37,308	22,568	*Rupiah*
	13,318,627	5,370,452	

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat di lakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Mudharabah demand deposits is a current account product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee, or other payment instruction method according to the agreement.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

23. GIRO *MUDHARABAH* (lanjutan)

23. *MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS (continued)*

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	2021	2020*)	
Rupiah	0.28% - 4.85%	0.09% - 4.75%	*Rupiah*

24. TABUNGAN *MUDHARABAH*

24. *MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

	2021	2020*)	
Pihak Ketiga - Bukan Bank			***Third Parties - Non Bank***
Rupiah	63,991,710	58,173,327	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	254,357	148,933	*United States Dollar*
	64,246,067	58,322,260	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Rupiah	292,300	163,088	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	46	*United States Dollar*
	292,300	163,134	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	564,124	523,540	*Rupiah*
	65,102,491	59,008,934	

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits are as follows:

	2021	2020*)	
Rupiah	0.09% - 4.23%	0.05% - 4.75%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 0.28%	0.03% - 0.05%	*United States Dollar*

25. DEPOSITO *MUDHARABAH*

25. *MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. **Berdasarkan mata uang:**

*a. **By currency:***

	2021	2020*)	
Bukan Bank			***Non Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	87,492,358	67,428,415	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,506,335	5,284,386	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	292,475	20,181	*Saudi Arabian Riyal*
	91,291,168	72,732,982	
Pihak Berelasi (Catatan 42)			***Related Parties (Note 42)***
Rupiah	6,870,878	12,925,263	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	21,709	11,051	*United States Dollar*
	6,892,587	12,936,314	
Bank			***Bank***
Pihak Ketiga			***Third parties***
Rupiah	408,798	374,336	Rupiah
	98,592,553	86,043,632	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

25. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *25. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu: / ***b. By period:***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	53,388,394	35,771,217	*1 month*
3 bulan	22,390,615	14,840,382	*3 months*
6 bulan	6,811,178	11,310,124	*6 months*
12 bulan	12,181,847	18,806,291	*12 months*
	94,772,034	80,728,014	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	2,952,617	4,308,295	*1 month*
3 bulan	246,225	477,598	*3 months*
6 bulan	119,010	123,421	*6 months*
12 bulan	210,192	386,123	*12 months*
	3,528,044	5,295,437	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
1 bulan	292,475	17	*1 month*
12 bulan	-	20,164	*12 months*
	98,592,553	86,043,632	

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / ***c. By remaining period to maturity:***

	2021	2020*)	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	58,385,322	53,131,613	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	23,301,648	16,192,921	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	13,085,064	11,403,480	*> 3 - ≤ 12 months*
	94,772,034	80,728,014	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	3,015,020	4,546,476	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	286,078	501,012	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	226,946	247,949	*> 3 - ≤ 12 months*
	3,528,044	5,295,437	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
≤ 1 bulan	292,475	20,181	*≤ 1 month*
	98,592,553	86,043,632	

d. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp919.584 dan Rp2.264.618, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 8,10 dan 11).

d. Mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp919,584 and Rp2,264,618, as of 31 December 2021 and 2020, respectively (Note 8,10 and 11).

e. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah.

f. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

f. The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits are as follows:

	2021	2020*)	
Rupiah	0.09% - 4.70%	1.69% - 5.64%	*Rupiah*
Valuta Asing	0.09% - 0.28%	0.38% - 1.57%	*Foreign Currencies*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH

	2021	2020*)	
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi	1,375,000	1,375,000	*Subordinated Sukuk Mudharabah*

Sukuk *mudharabah* subordinasi - PT Bank BRISyariah Tbk

Pada tanggal 17 November 2016, PT Bank BRISyariah Tbk menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil pada Bursa Efek Indonesia. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat masing-masing $_{id}$AA$_{(sy)}$ dan A(idn) dari Pefindo dan *Fitch.*

Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:
- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Bank, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.

Subordinated sukuk mudharabah - PT Bank BRISyariah Tbk

On 17 November 2016, PT Bank BRISyariah Tbk issued Rp1,000,000 Subordinated Sukuk Mudharabah I Year 2016 which is issued at 100.00% of its nominal value using profit sharing method in Indonesia Stock Exchange.The amount of Sukuk holder's nisbah is 80.2013% which was calculated from liquid gross revenue, which was indicated at 11.8452%. Profit sharing will be paid quarterly and will be due on 16 November 2023.

The Subordinated Sukuk Mudharabah I is not guaranteed by special collateral nor guaranteed by the Republic of Indonesia or other third parties and is not included in the bank guarantee program implemented by the Deposit Insurance Agency (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) or the other insurance corporation.

As of 31 December 2021 and 2020, Bank's Subordinated Sukuk Mudharabah I obtained a rating of $_{id}$AA$_{(sy)}$ and A(idn) from Pefindo and Fitch, respectively.

The trustee of this Subordinated Sukuk Mudharabah I is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and requires a written approval from the trustee before conducting the following:
- *Issuing another Sukuk or MTN which has higher position and priority payment over Subordinated Sukuk Mudharabah.*
- *Changing the main business.*
- *Reducing authorized, issued and paid in capital stock.*
- *Conducting merger, consolidation, acquisition with other parties which causes dissolution of the Bank, or would have negative impact on business continuity.*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *mudharabah* subordinasi - PT Bank BRISyariah Tbk (lanjutan)

Pembatasan dan kewajiban Bank tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger Bank Syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal “Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri”.

Manajemen Bank berpendapat bahwa semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I sebesar Rp1.000.000 sebagai komponen modal pelengkap Bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

Sukuk *mudharabah* subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal tanggal 22 Desember 2016, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Tahun 2016 sebesar Rp375.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated sukuk mudharabah - PT Bank BRISyariah Tbk *(continued)*

Several covenants affecting Bank without written approval from the trustee that the Bank will not do the following:

- *Selling or transfering fixed assets of the Bank to other parties, either all or most of fixed assets (over 50%) based on the latest audited financial statements.*
- *Conducting transactions with affiliated parties, unless either the transaction is performed under favorable terms or at least equal to the requirements obtained by the Bank from independent third parties in ordinary transactions.*
- *Providing financing or investment in stock shares to other parties.*

Regarding the merger of Sharia Bank where BRIS will become the surviving entity, The Trustee has been informed by letter No. S.B.06-MDB/01-2021 dated 6 January 2021 about “Information Regarding the Planned Merger of PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, and PT Bank Syariah Mandiri".

Management of Bank has complied with the above covenants contained on the trustee agreement.

Based on the letter No. SR-32/PB.13/2016 dated 29 November 2016 the Financial Service Authority (FSA) has agreed with the Bank’s request to make the proceeds of Subordinated Sukuk Mudharabah I amounting to Rp1,000,000 as a complementary capital component of the Bank (maximum 100% of core capital).

Subordinated sukuk mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri

On 22 December 2016, the Bank issued Sukuk Mudharabah Tahun 2016 amounting to Rp375,000 and is due on 22 December 2023.

The proceeds from the issuance of the Subordinated Sukuk Mudharabah I are intended to strengthen the capital structure in order to support business development activities such as financing expansion.

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

<u>Sukuk *mudharabah* subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri</u> (lanjutan)

Subordinated notes (subnotes) mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2016 sebesar Rp375.000 merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Syarat dan ketentuan:

- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang subnotes Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- Nisbah yang diberikan kepada pemegang subnotes adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Subnotes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

<u>Subordinated sukuk mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri</u> *(continued)*

Bank Syariah Mandiri mudharabah subnotes (subnotes) in 2016 amounting to Rp375,000 are securities issued by the Bank on 22 December 2016 and will mature on 22 December 2023.

Terms and Conditions:

- *Profit sharing income is calculated based on the multiplication between the ratio of the Bank's subnotes holder and the revenue shared, which is the amount listed in the unaudited last quarter of the Bank's financial report, which is available and approved by the Bank's Board of Directors no later than 10 (ten) working days before the date of payment of the relevant revenue sharing.*
- *The income that is shared is obtained from the income of the Rupiah financing portfolio (blended) Bank amounting to 7 (seven) times the Subordinated Sukuk Mudharabah Fund in Rupiah currency owned by the Issuer, which is obtained for 1 (one) quarter as stated in each unaudited Bank financial report.*
- *The ratio given to subnotes holders is 27.07% of the shared revenue which is paid every 3 (three) months.*

These subnotes are not guaranteed by any special guarantees and are not guaranteed by third parties. Including not guaranteed by the Republic of Indonesia and not included in the Bank Guarantee Program which is carried out by the Deposit Insurance Corporation or its replacement in accordance with the applicable laws and regulations and following the provisions of Article 17 paragraph (1) letter f of OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014. Subnotes are subordinated obligations of the Bank.

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *mudharabah* subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (*audited*) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan endapatan Bagi Hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri *(self assessment)* pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

Bank tanpa persetujuan tertulis Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (iv) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank.

DPS Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan opini melalui surat No. 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa *subordinated notes* syariah *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah mudharabah (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 dan No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang *subordinated notes* diambil dari porsi Bank.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2021, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 memiliki peringkat idAA (Double A Sharia) dari agen pemeringkat efek PT Pefindo.

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated sukuk mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri *(continued)*

During the validity period of the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah and prior to repayment of all principal and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a CAR (Capital Adequacy Ratio) ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2016 Subordinated Sukuk Mudharabah will not be owned by more than 50 (fifty) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows: annual financial statements (audited) not later than the end of the 4th month after the date of the reporting book, quarterly financial statements not later than the end of the 1st month after the date of the reporting book, financial statements used as the basis for calculating Revenue Sharing, and the bank's soundness level assessment report and self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance to OJK.

Banks without written approval from the Monitoring Agent will not do the following: (i) reduce the issued and paid-up capital; (ii) make changes in business fields; (iii) carry out a merger or consolidation or reorganization, except because of the provisions of the Government or Bank Indonesia; (iv) enter into mergers, consolidations, acquisitions with other entities which will result in the dissolution of the Bank.

Bank Syariah Mandiri's Sharia Supervisory Board has issued an opinion by letter No. 18/13/DPS/ X/2016 dated 1 November 2016 stated that the subordinated notes for sharia mudharabah are in accordance with the DSN fatwa regarding Islamic bonds and Islamic mudharabah bonds (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 and No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Profit sharing given to holders of subordinated notes is taken from the Bank's portion.

Acting as trustee of the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Based on the last rating report published in November 2021, the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah has an idAA (Double A Sharia) rating from the securities rating agency PT Pefindo.

27. EKUITAS

Modal saham

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

27 . *EQUITY*

Share Capital

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

2021

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Penuh)/ *Amount of Issued and Fully-Paid Share Capital (Full Amount)*	Persentase Pemilikan/ *Ownership Percentage*	Jumlah Modal/ *Amount of Capital*	*Shareholders*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,905,219,379	50.83%	10,452,610	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,220,230,418	24.85%	5,110,115	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	17.25%	3,546,381	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah	379,142,500	0.92%	189,571	*DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah*
PT BNI Life Insurance	5,250,415	0.01%	2,625	*PT BNI Life Insurance*
PT Mandiri Sekuritas	33	0.00%	-	*PT Mandiri Sekuritas*
Masyarakat	2,526,702,943	6.14%	1,263,352	*Public*
	41,129,307,343	100.00%	20,564,654	

2020*)

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Penuh)/ *Amount of Issued and Fully-Paid Share Capital (Full Amount)*	Persentase Pemilikan/ *Ownership Percentage*	Jumlah Modal/ *Amount of Capital*	*Shareholders*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	71.64%	3,546,381	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah	817,146,000	8.25%	408,573	*DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah*
Masyarakat	1,990,601,043	20.11%	995,300	*Public*
	9,900,508,698	100.00%	4,950,254	

Pada tanggal 1 November 2020, 70% dari total program MESOP Tahap I dan telah dilakukan eksekusi pembelian saham oleh karyawan. Jumlah saham yang dieksekusi oleh karyawan sebesar 184.395.200 lembar saham dan senilai Rp92.197. Perubahan peningkatan modal ditempatkan berdasarkan program MESOP telah diterima dan dicatat di Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0424817 tanggal 29 Desember 2020 dari Rp4.858.057 menjadi Rp4.950.254.

As of 1 November 2020, 70% of the total MESOP Phase I program has been carried out by employee shares purchase. The total number of shares exercised by the employees was 184,395,200 shares and was valued at Rp92,197. Changes in the increase in issued capital under the MESOP program have been received at the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0424817 dated 29 December 2020 from Rp4,858,057 to Rp4,950,254.

Pada tanggal 1 Februari 2021 Bank telah melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah sebagaimana dijelaskan pada catatan 53 dalam laporan ini.

As of 1 February 2021 the Bank has merged with PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah as described in note 53 on this report.

Pada tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 telah berlangsung periode pelaksanaan program MESOP Tahap I tahun 2021 dengan total jumlah saham yang dieksekusi oleh karyawan dan manajemen sebanyak 97.659.800 lembar saham (nilai penuh) atau senilai Rp48.830. Perubahan peningkatan modal ditempatkan berdasarkan program MESOP ini dicatat di Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0434796 tanggal 5 Agustus 2021 dari Rp20.515.604 menjadi Rp20.564.434.

As of 1 May 2021 to 18 June 2021, the MESOP Phase I program implementation period in 2021 has taken place with a total number of shares executed by employees and management of 97,659,800 shares (full amount) or Rp48,830. Changes in the increase in issued capital based on the MESOP program are recorded in the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0434796 dated 5 August 2021 from Rp20,515,604 to Rp20,564,434.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

27. EKUITAS (lanjutan)

Pada tanggal 1 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 telah berlangsung periode pelaksanaan program MESOP Tahap II tahun 2021 dengan total jumlah saham yang dieksekusi oleh karyawan sebanyak 438.600 lembar saham (nilai penuh) atau senilai Rp219. Perubahan peningkatan modal ditempatkan berdasarkan program MESOP ini dicatat di Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0494300 tanggal 30 Desember 2021 dari Rp20.564.434 menjadi Rp20.564.654.

Cadangan Umum

Cadangan umum pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Program Saham Bonus dan Opsi Saham

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Bank mengadakan program *Employee Stock Allocation* (“ESA”) dengan mengalokasikan saham sebesar 2,50% dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 65.583.700 saham berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2018.

Atas program tersebut Bank telah membeli 65.583.700 lembar saham dari saham beredar senilai Rp33.448 dan telah tercatat sebagai bagian dari Modal Disetor. Nilai wajar dari ESA diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi selama masa *vesting* pada laba rugi.

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018, pemegang saham juga telah menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan Program *Management and Employee Stock Option Program* (“MESOP”) dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 300.498.300 saham. Nilai wajar dari MESOP diamortisasi sesuai masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi, sedangkan akumulasi alokasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas sebagai cadangan atas Opsi Saham.

***27. EQUITY** (continued)*

As of 1 November 2021 to 10 December 2021, the MESOP Phase II program implementation period in 2021 has taken place with a total number of shares executed by employees of 438,600 shares (full amount) or a value of Rp219. Changes in the increase in issued capital based on the MESOP program are recorded in the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0494300 dated 30 December 2021 from Rp20,564,434 to Rp20,564,654.

General Reserve

The general reserves are originally provided in accordance with Law No. 1/1995 article 61 (1) on Limited Liability Company (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-in capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Stock Bonus and Stock Option Program

Along with the Initial Public Offering, the Bank enters into an Employee Stock Allocation ("ESA") program by allocating 2.50% of the number of Shares Offered in the Initial Public Offering or 65,583,700 shares based on Deed No. 8 of 2018.

For the program, the Bank has purchased 65,583,700 shares from outstanding shares valued at Rp33,448 and was listed as part of the Paid-in Capital. The fair value of ESA is recognised as prepaid expenses and amortized over the vesting period in profit or loss.

Based on Deed No. 8 dated 8 January 2018, shareholders have also approved the Bank's plan to implement the Management and Employee Stock Option Program ("MESOP") Program with a maximum number of shares of 300,498,300 shares. The fair value of MESOP is amortized over the vesting period and recognised in profit or loss, while the accumulated cost allocation over the vesting period is recognised in equity as reserve for Stock Option.

27. EKUITAS (lanjutan)

Program Saham Bonus dan Opsi Saham (lanjutan)

Pada tanggal 9 Mei 2019 dan 9 Mei 2020, masing - masing 34% dan 33% dari total ESA telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 aktuari telah melakukan perhitungan atas nilai wajar ESA dan nilai opsi MESOP. Berdasarkan perhitungan aktuaria, Bank telah membukukan beban ESA masing-masing Rp5.451 dan Rp11.149, serta membukukan beban MESOP pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Nihil dan Rp4.128.

Tambahan Modal Disetor

Pada tanggal 31 Desember 2021, Bank memiliki saldo modal disetor yang terdiri dari :

***27. EQUITY** (continued)*

***Stock Bonus and Stock Option Program** (continued)*

On 9 May 2019 and 9 May 2020, 34% and 33% from total ESA were already distributed to each employee, respectively. As of 31 December 2021 and 2020, respectively actuary has calculated the fair value of ESA and the option value of MESOP. Based on actuary's calculation, the Bank has recorded a total expense of ESA for Rp5,451 and Rp11,149, respectively, the Bank also recorded a total expense of MESOP for Nihil and Rp4,128, for 31 December 2021 and 2020, respectively.

Additional Paid in Capital

As of 31 December 2021 Bank has additional paid capital balance as follows :

	2021	
Agio saham	3,237	*Paid in capital excess of par value*
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	(5,374,061)	*Net consideration effectively transferred in reverse acquisition*
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum	(995,952)	*Adjustment arising from reverse acquisition to reflect the Bank's legal capital*
Saldo akhir	(6,366,776)	*Ending balance*

Seperti diungkapkan dalam Catatan 52, efektif pada tanggal 1 Februari 2021, BRIS melakukan penggabungan usaha dengan BSM dan BNIS dimana BRIS menjadi entitas yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS bubar demi hukum. Penggabungan usaha antara BRIS, BSM dan BNIS ini menimbulkan saldo SNTRES sebesar Rp6.370.013 yang dihitung sebagai berikut:

As disclosed in Note 52, the merger between BRIS, BSM and BNIS was effective on 1 February 2021, with BRIS as the surviving entity, BSM and BNIS being dissolved by the law. The merger between BRIS, BSM and BNIS has resulted in a DUCC balance amounting to Rp6,370,013 which was calculated as follows:

	2021	
Nilai buku BRIS	5,509,267	*BRIS's net book value*
Nilai buku BNIS	5,494,306	*BNIS' net book value*
Nilai pasar saham baru yang dikeluarkan (nilai imbalan bersih)	(16,377,634)	*Market price of new shared issued (net consideration costs)*
Penyesuaian untuk mencerminkan modal menurut hukum	(995,952)	*Adjustment to reflect the Bank's legal capital*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (SNTRES)	(6,370,013)	*Restructuring transactions of entities under common control (DUCC)*

28. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

28. INCOME FROM SALES AND PURCHASES

	2021	2020*)	
Murabahah	10,184,021	9,126,077	*Murabahah*
Istishna	215	346	*Istishna*
	10,184,236	9,126,423	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

29. PENDAPATAN BAGI HASIL / *29. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	2021	2020*)	
Musyarakah	4,237,160	4,347,511	*Musyarakah*
Mudharabah	218,525	305,576	*Mudharabah*
	4,455,685	4,653,087	

30. PENDAPATAN DARI *IJARAH* - BERSIH / *30. INCOME FROM IJARAH - NET*

	2021	2020*)	
Ijarah muntahiyah bittamlik	499,177	836,607	*Ijarah muntahiyah bittamlik*
Ijarah	105,591	113,665	*Ijarah*
Ijarah multijasa	26,796	31,852	*Ijarah multi-services*
	631,564	982,124	
Beban penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai aset *ijarah*	(556,345)	(777,681)	*Depreciation expense, amortization, maintenance expense and impairment of ijarah assets*
Bersih	75,219	204,443	***Net***

31. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *31. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	2021	2020*)	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	2,683,489	2,327,358	*Income from investments in marketable securities*
Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	318,264	456,616	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Pendapatan kas bagi hasil *fee* *Ujroh* anjak utang piutang	12,487	63,815	*Cash income for fee revenue Ujroh factoring in receivables*
Bagi hasil penempatan pada bank lain	1,545	4,095	*Profit sharing from placements with other bank*
Lain-lain	77,507	93,755	*Others*
	3,093,292	2,945,639	

32. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *32. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN*

	2021	2020*)	
Deposito *mudharabah*	3,465,544	3,986,747	*Mudharabah time deposits*
Tabungan *mudharabah*	616,928	648,754	*Mudharabah savings deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	133,723	131,437	*Subordinated sukuk mudharabah*
Giro *mudharabah*	93,645	157,536	*Mudharabah demand deposits*
Investasi terikat	50,902	49,444	*Bound investment*
Musyarakah-mudharabah musytarakah	5,158	17	*Musyarakah-mudharabah musytarakah*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	1,098	21,148	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Lain-lain	11,809	9,171	*Others*
	4,378,807	5,004,254	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

33. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *33. OTHER OPERATING INCOME*

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari: / *Other operating income consists of:*

	2021	2020*)	
Pendapatan imbalan jasa perbankan			*Fee based income from banking services*
Pendapatan *rahn*	590,574	507,732	*Income from rahn*
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	300,317	260,941	*Income from saving deposits administration*
Pendapatan administrasi pembiayaan	265,808	349,424	*Income from financing administration*
Pendapatan transaksi ATM	262,428	286,287	*Income from ATM transactions*
Pendapatan layanan *internet banking*	180,420	92,459	*Income from internet banking services*
Pendapatan komisi asuransi	94,055	59,884	*Income from insurance commission*
Pendapatan kartu Hasanah	81,149	77,329	*Income from Hasanah Card*
Pendapatan jasa pembayaran	73,008	50,829	*Income from payment services*
Keuntungan pelepasan surat berharga	62,077	108,367	*Gain on sale of marketable securities*
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	61,074	71,870	*Income from administration and commission other than financing*
Pendapatan jasa ekspor impor	43,473	16,649	*Income from export import services*
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	40,198	75,402	*Income from foreign exchange transaction - net*
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (*ta'widh*)	36,891	47,714	*Income from restructuring compensation (ta'widh)*
Pendapatan pembiayaan sindikasi	25,578	37,104	*Syndicated financing fee*
Pendapatan transaksi *remittance*	25,307	26,140	*Income from remittance transactions*
Pendapatan penjualan sukuk dan reksadana	13,556	5,439	*Income from sale of sukuk and mutual funds*
Lainnya	93,797	162,958	*Others*
	2,249,710	2,236,528	
Pendapatan lainnya			*Other income*
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	762,536	540,173	*Subsequent recoveries of receivables and financing written-off*
	3,012,246	2,776,701	

34. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *34. SALARIES AND BENEFITS EXPENSE*

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari: / *Salaries and benefits consist of:*

	2021	2020*)	
Gaji dan upah	3,420,083	3,067,748	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	815,363	712,010	*Employee allowances*
Pendidikan dan pelatihan	99,992	96,746	*Education and training*
Lainnya	156,337	214,529	*Others*
	4,491,775	4,091,033	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

General and administrative expenses consist of:

	2021	2020*)	
Beban *outsourcing*	651,917	642,099	*Outsourcing expenses*
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 14)	610,595	563,132	*Depreciation of fixed assets and right-of use assets (Note 14)*
Beban penjaminan dana pihak ketiga	438,727	369,839	*Underwriting expenses of third parties fund*
Beban sewa	287,234	242,572	*Rent expenses*
Beban promosi	271,172	189,721	*Promotion expenses*
Beban pemeliharaan dan perbaikan	207,987	155,780	*Service and maintenance expenses*
Beban perlengkapan	189,747	115,753	*Supplies expenses*
Beban barang dan jasa lain	157,876	120,188	*Other goods & services*
Beban listrik, air dan gas	151,885	174,939	*Electricity, water and gas expenses*
Beban komunikasi	136,550	77,238	*Communication expenses*
Beban Pungutan OJK	135,874	103,499	*OJK fees*
Ujrah administrasi	125,558	52,719	*Administrative ujrah*
Beban transportasi	108,379	71,392	*Transportation expenses*
Beban barang cetak	103,046	156,190	*Printing expenses*
Beban jasa tenaga ahli	99,406	80,791	*Professional fees*
Beban kantor	79,769	71,283	*Office stationery*
Beban asuransi	76,281	108,015	*Insurance expenses*
Beban lisensi *software*	36,362	16,534	*Software license expenses*
Lain-lain	101,846	151,907	*Others*
	3,970,211	3,463,591	

36. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF - BERSIH / *36. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET*

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih terdiri dari:

Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:

	2021	2020*)	
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	(52,029)	63,954	*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	(6,783)	(16,175)	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Tagihan akseptasi (Catatan 8)	(933)	179	*Acceptances receivables (Note 8)*
Piutang (Catatan 9)	1,397,845	1,995,809	*Receivables (Note 9)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)	251,313	189,065	*Funds of qardh (Note 10)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)	(1,954)	38,496	*Mudharabah financing (Note 11)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)	2,057,965	1,333,737	*Musyarakah financing (Note 12)*
Aset non-produktif	(89,995)	14,555	*Non-earning assets*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 39)	(3,173)	812	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 39)*
Aset lain-lainnya	(1,007)	14	*Other assets*
	3,551,249	3,620,446	

37. PENDAPATAN/(BEBAN) NON - USAHA - BERSIH / *37. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSES) - NET*

	2021	2020*)	
Pendapatan non-usaha			***Non-operating income***
Sewa gedung	698	600	*Rent building*
Beban non-usaha			***Non-operating expenses***
Kerugian selisih kurs - bersih	(12,846)	(37,137)	*Loss on foregin exchange - net*
Lainnya	(33,493)	(10,430)	*Others*
Beban non-usaha - bersih	(45,641)	(46,967)	***Total non-operating expenses - net***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

38. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

38. *EARNINGS PER SHARE*

The computation of earnings per share for the period ended 31 December 2021 and 2020, are as follows:

	2021	2020*)	
Laba tahun berjalan	3,028,205	2,187,649	*Income for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (nilai penuh)	41,096,058,485	40,877,546,276	*Weighted average number of shares outstanding (full amount)*
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	73.69	53.52	*Basic earnings per share (full Rupiah)*
Saham yang akan diterbitkan jika MESOP dieksekusi (nilai penuh)	890,800	98,989,200	*Shared to be issued if MESOP is exercised (full amount)*
Jumlah rata-rata tertimbang saham dilusian (nilai penuh)	41,109,280,978	40,883,453,826	*Weighted average number of diluted shares (full amount)*
Laba bersih per saham dilusian (Rupiah penuh)	73.66	53.51	*Diluted earnings per share (full Rupiah)*

39. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

39. *INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. The Bank's receivables and payables from commitments and contingencies are as follows:

	2021	2020*)	
Liabilitas Komitmen			***Commitments payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2,686,540	2,336,179	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	64,179	25,015	*Irrevocable L/C*
	2,750,719	2,361,194	
Pihak berelasi			***Related parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	252,777	646,611	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	18,587	*Irrevocable L/C*
	252,777	665,198	
Liabilitas Komitmen	3,003,496	3,026,392	***Commitments payables***
Tagihan Kontinjensi			***Contingencies receivables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah	247,100	297,482	*Revenue from non-performing financing*
Bank garansi (*kafalah*) yang diterima	202,029	224,502	*Bank guarantees (kafalah) received*
	449,129	521,984	
Liabilitas Kontinjensi			***Contingencies payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Garansi yang diterbitkan	1,659,346	2,013,253	*Bank guarantees issued*
Kewajiban Subrogasi	116,405	119,410	*Subrogation Payables*
Lainnya	23,819	7,785	*Others*
	1,799,570	2,140,448	
Pihak berelasi			***Related parties***
Garansi yang diterbitkan	1,083	-	*Bank guarantees issued*
	1,800,653	2,140,448	
Liabilitas kontinjensi - bersih	1,351,524	1,618,464	***Contingencies payables - net***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

39. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***39. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

b. Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pinjaman adalah sebagai berikut:

b. The transactions of commitments and contingencies in the normal course of the Bank's activities that have credit risks are as follows:

	2021	2020*)	
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2,939,317	2,982,790	*Unused financing facilities*

c. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

c. The collectibility of commitments and contingencies with credit risk on administrative accounts are as follows:

	2021	2020*)	
Lancar	2,904,126	2,947,759	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	16,972	17,497	*Special Mention*
Kurang Lancar	18,219	17,534	*Substandard*
	2,939,317	2,982,790	

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi adalah sebagai berikut:

d. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies are as follows:

	2021	2020*)	
Saldo awal tahun	20,323	19,451	*Beginning balance*
(Pembalikan)/Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(3,173)	812	*(Reversal)/Provisions during the year (Note 36)*
Selisih kurs	44	60	*Exchange rate difference*
Saldo akhir tahun	17,194	20,323	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontijensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan POJK.

Management believes that the allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies is adequate and in compliance with FSA regulations.

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA

40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	2021	2020*)	
Imbalan pasca kerja jangka panjang	644,221	605,742	*Long-term employee benefits*
Cuti besar	192,270	303,009	*Grand leaves*
	836,491	908,751	

Bank mempunyai program pensiun manfaat pasti yang meliputi seluruh karyawan tetap yang didanai melalui iuran tetap bulanan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia. DPLK ini memperoleh pengesahan terakhir kali dari Menteri Keuangan yang tertuang dalam Surat Keputusan No.KEP-51/NB.1/2014 tanggal 5 Maret 2014. Iuran program pensiun ini didanai oleh Bank sebesar 10% dari gaji kotor karyawan

Bank has a defined benefit plan for all permanent employees which are funded through monthly contribution to the pension fund DPLK Bank Rakyat Indonesia. The pension fund was approved by the Minister of Finance as stipulated in Decree No.KEP-51/NB.1/2014 dated 5 March 2014. The pension fund contribution is funded by the Bank amounting to 10% of employee's gross salaries.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perhitungan aktuaria periode 31 Desember 2021 dilakukan oleh KKA Steven & Mouritz, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 10 Januari 2022.

Perhitungan aktuaria periode 31 Desember 2020 dilakukan oleh PT Willis Tower Watson, Dayamandiri Dharmakonsilida, dan PT Bestama Aktuaria masing-masing untuk *ex legacy* BSM, *ex legacy* BNIS dan *ex legacy* BRIS, dalam laporannya tertanggal masing-masing 11 Januari 2021, 30 November 2020 dan 4 Januari 2021.

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

***40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

The actuarial calculations for the period 31 December 2021 were prepared by KKA Steven & Mouritz, an independent actuary, in its reports dated 10 January 2022.

The actuarial calculations for the period 31 December 2020 were prepared by PT Willis Towers Watson, Dayamandiri Dharmakonsilida, and PT Bestama Aktuaria for ex legacy BSM, ex legacy BNIS and ex legacy BRIS, in their reports dated 11 January 2021, 30 November 2020 and 4 January 2021, respectively.

The above actuarial calculations were using the Projected Unit Credit Method with the following assumptions:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2021	2020*)	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto *Discount rate*	6.80%	6.25% - 9.50%	
Tingkat kenaikan gaji	7.00%	7.00%	*Rate of salary increases*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	36 - 56 tahun/*years*	36 -56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalita/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	Modifikasi Tabel Mortalita/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-III-2019 - TMI-IV-2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% - 10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate*	5% - 10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*

Imbalan pasca kerja jangka panjang

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun disajikan sebagai berikut:

Long-term employee benefits

A reconciliation of the funding status of the pension plan are as follows:

	2021	2020*)	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	757,010	723,092	*Present value of funded defined benefit obligations*
Nilai wajar aset dana pensiun	(112,789)	(117,350)	*Fair value of pension plan assets*
Nilai bersih kewajiban	644,221	605,742	*Net liability*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan) / ***Long-term employee benefits*** *(continued)*

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:

	2021	2020*)	
Pada awal periode	723,092	593,433	*At the beginning of the period*
Biaya jasa kini	89,345	71,702	*Current service cost*
Biaya bunga	47,160	41,852	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	25,495	(28,537)	*Past service cost*
Keuntungan/(kerugian) pengukuran kembali	(69,256)	67,860	*Actuarial gain/(loss) on remeasurement*
	815,836	746,310	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(58,826)	(23,218)	*Payment of post-employment benefits during the year*
	757,010	723,092	

Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas bersih selama tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net liabilities during the years ended 31 December 2021 and 31 December 2020 is as follows:

	2021	2020*)	
Kewajiban bersih pada awal periode	605,742	503,377	*Net liabilities at beginning of period*
Beban tahun berjalan	162,000	81,022	*Current year expenses*
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya akibat:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income due to:*
Perubahan asumsi demografi	6,251	(1,005)	*Changes in demographic assumptions*
Perubahan asumsi ekonomis	(37,408)	67,794	*Changes in financial assumptions*
Perubahan dari penyesuaian historis	(33,538)	(22,228)	*Changes from experience adjustment*
	(64,695)	44,561	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(58,826)	(23,218)	*Payment of post-employment benefits during the year*
	644,221	605,742	

Mutasi nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets for the years ended are as follows:

	2021	2020*)	
Pada awal periode	117,350	112,426	*At beginning of period*
Hasil dari aset program	(4,468)	(905)	*Return on plan assets*
Keuntungan aktuarial	8,566	9,086	*Actuarial gains*
Imbalan yang dibayar dan beban administrasi	(8,659)	(3,257)	*Benefits paid and administrative expenses paid*
	112,789	117,350	

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognised in profit or loss, are as follows:

	2021	2020*)	
Biaya jasa kini	89,345	71,702	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	25,495	(28,537)	*Past service cost*
Bunga bersih	47,160	37,857	*Net Interest*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	162,000	81,022	*Expense recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(69,256)	67,860	*Remeasurement effect recognised in other comprehensive income*
	92,744	148,882	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, aset program diinvestasikan ke dalam instrumen utang masing-masing sebesar Rp112.789 dan Rp117.349.

Investasi telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang. Diyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima. Untuk program manfaat pasti sebagian besar instrumen surat utang merupakan portofolio obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan obligasi korporasi di Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

Bank tereskpos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi yang telah diatur dalam kerangka *Asset Liability Matching* (ALMA), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 9,29 tahun (31 Desember 2020: 11,46 tahun)

40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Long-term employee benefits (continued)

As of 31 December 2021 and 31 December 2020, plan assets invested to debt instrument each amounting to Rp112,789 and Rp117,349.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact to the overall group of assets. The largest proportion of assets are invested in debt instruments. Debt instruments are expected to contribute best yields in the long term at an acceptable risk level. For defined benefit program, most of the debt instruments are Government of Indonesia bonds and corporate bonds.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date. Expected returns on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to pension fund.

To ensure that the result of investments is consistent with the Asset Liability Management (ALMA) framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefits with its realization.

The average duration of the defined benefit obligation as of 31 December 2021 is 9.29 years (31 December 2020: 11.46 years)

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Cuti besar / ***Grand leaves***

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for grand leaves as of 31 December 2021 and 2020, respectively, are as follows:

	2021	2020*)	
Liabilitas pada awal tahun	303,009	224,484	*Liabilities at beginning of the year*
Beban cuti besar pada tahun berjalan	(66,232)	125,208	*Grand leaves expense during the year*
Pembayaran cuti besar selama tahun berjalan	(44,507)	(46,683)	*Payment of grand leaves during the year*
	192,270	303,009	

Beban cuti besar untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Grand leaves expense for the period ended 31 December 2021 and 2020, based on actuarial calculation are as follows:

	2021	2020*)	
Beban jasa kini	68,468	63,220	*Current service cost*
Beban bunga	19,228	16,302	*Interest cost*
Kerugian aktuaria	(34,469)	39,148	*Actuaria loss*
Biaya jasa lalu	(119,459)	6,538	*Past service costs*
Jumlah	(66,232)	125,208	***Total***

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligation to changes in the weighted assumptions is as follows:

	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities*		
2021	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation*	**2021**
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1%	(50,993)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	67,204	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	146,341	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(114,105)	

	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities*		
2020*)	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation*	**2020*)**
	Kenaikan/*increase* 1%	345,198	
Tingkat diskonto	Penurunan/*decrease* 1%	426,450	*Discount rate*
	Kenaikan/*increase* 1%	433,684	
Tingkat kenaikan gaji	Penurunan/*decrease* 1%	338,228	*Salary increase rate*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

Expected maturity analysis of undiscounted pension is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
2021					***2021***
Pensiun	63,864	407,745	2,418,249	2,889,858	*Pension*
Cuti besar	80,867	441,155	1,274,117	1,796,139	*Long leave*
Total	144,731	848,900	3,692,366	4,685,997	*Total*

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
2020*)					***2020*)***
Pensiun	52,881	264,475	530,841	848,197	*Pension*
Cuti besar	53,063	259,401	524,157	836,621	*Long leave*
Total	105,944	523,876	1,054,998	1,684,818	*Total*

41. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (disajikan dalam nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijaminkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah Rp438.723 dan Rp369.839 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

41. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004 effective on 22 September 2005, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated 25 November 2010 the deposits guaranteed included demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings deposits and deposits from other banks.

Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008, regarding "the Amount of Public Deposits Guaranteed by the Government Established Deposit Insurance Institution", as of 31 December 2021 and 2020 the amount of Deposits that are guaranteed by LPS amounted to Rp2,000,000,000 (express in full amount) for each customer each bank.

As of 31 December 2021 and 31 December 2020, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to the Deposit Insurance Institution (LPS) amounted to Rp438,723 and Rp369,839 for the years ended 31 December 2021 and 2020, respectively.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi terdiri dari entitas induk, Pemerintah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Entitas Anak (entitas dan lembaga Pemerintah), Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

a. Jenis hubungan

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Related parties consist of parent company, Government of the Republic of Indonesia, State-Owned Enterprises and their subsidiaries (Government entities and institutions), Board of Commissioners, Board of Directors and key employees of the Bank and other parties as defined in SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

a. Type of relationships

Related parties from the entity level and/or management are:

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama	*Related party relationship as the ultimate shareholder*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	*The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali	***Related party relationship as the controlling shareholder***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham	***Related party relationship as the shareholder***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT BNI Life Insurance	*PT BNI Life Insurance*
PT Mandiri Sekuritas	*PT Mandiri Sekuritas*
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah	*DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah*
Entitas dan lembaga pemerintah	***Government entities and institutions***
Dana Pensiun Pusri Dapensri	*Dana Pensiun Pusri Dapensri*
KPPN Khusus Penerimaan	*KPPN Khusus Penerimaan*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Percetakan Negara Republik Indonesia	*Percetakan Negara Republik Indonesia*
Perum BULOG	*Perum BULOG*
Perum DAMRI	*Perum DAMRI*
Perum Jaminan Kredit Indonesia	*Perum Jaminan Kredit Indonesia*
Perum LPPNPI	*Perum LPPNPI*
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	*Perum Percetakan Negara Republik Indonesia*
Perum Perhutani	*Perum Perhutani*
Perum Perumnas	*Perum Perumnas*
Perum Peruri	*Perum Peruri*
Perum PNRI	*Perum PNRI*
Perum Produksi Film Negara	*Perum Produksi Film Negara*
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	*Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia*
PT Adhi Commuter Properti	*PT Adhi Commuter Properti*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Persada Beton	*PT Adhi Persada Beton*
PT Adhi Persada Gedung	*PT Adhi Persada Gedung*
PT Adhi Persada Properti	*PT Adhi Persada Properti*
PT Amarta Karya (Persero)	*PT Amarta Karya (Persero)*
PT Aneka Tambang Tbk	*PT Aneka Tambang Tbk*
PT Angkasa Pura Hotel	*PT Angkasa Pura Hotel*
PT Angkasa Pura I (Persero)	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Angkasa Pura II (Persero)	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Angkasa Pura Kargo	*PT Angkasa Pura Kargo*
PT Angkasa Pura Logistik	*PT Angkasa Pura Logistik*
PT Angkasa Pura Solusi	*PT Angkasa Pura Solusi*
PT Angkasa Pura Supports	*PT Angkasa Pura Supports*
PT Antam Resourcindo	*PT Antam Resourcindo*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships *(continued)*

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT ASABRI (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi Askrida Syariah
PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
PT Asuransi Jasindo Syariah
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Asuransi Takaful Keluarga
PT Asuransi Tri Pakarta
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT AXA Mandiri Financial Services
PT Bahana Artha Ventura
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana TCW Investment Management
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia
PT BNI Sekuritas
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT Bringin Girgantara
PT Bringin Rancang Sejahtera
PT BRIngin Sejahtera Makmur
PT Bukit Asam Tbk
PT Celebes Railway Indonesia
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Citra Waspphutowa
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Tbk
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Fintek Karya Nusantara
PT Gapura Angkasa Cab Solo
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Hakaaston
PT Haleyora Powerindo
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus
PT Indonesia Kendaraan Terminal
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT INKA (Persero)
PT Infrastruktur Indonesia
PT Inhutani IV
PT Inhutani IV Distrik Aceh

Government entities and institutions *(continued)*

PT ASABRI (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi Askrida Syariah
PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
PT Asuransi Jasindo Syariah
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Asuransi Takaful Keluarga
PT Asuransi Tri Pakarta
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT AXA Mandiri Financial Services
PT Bahana Artha Ventura
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana TCW Investment Management
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia
PT BNI Sekuritas
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT Bringin Girgantara
PT Bringin Rancang Sejahtera
PT BRIngin Sejahtera Makmur
PT Bukit Asam Tbk
PT Celebes Railway Indonesia
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Citra Waspphutowa
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Tbk
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Fintek Karya Nusantara
PT Gapura Angkasa Cab Solo
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Hakaaston
PT Haleyora Powerindo
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus
PT Indonesia Kendaraan Terminal
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT INKA (Persero)
PT Infrastruktur Indonesia
PT Inhutani IV
PT Inhutani IV Distrik Aceh

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships *(continued)*

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)	***Government entities and institutions*** *(continued)*
PT Inka Multi Solusi	*PT Inka Multi Solusi*
PT Inti Bumi Perkasa	*PT Inti Bumi Perkasa*
PT Inti Konten Indonesia	*PT Inti Konten Indonesia*
PT Istaka Karya (Persero)	*PT Istaka Karya (Persero)*
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	*PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung*
PT Jalin Pembayaran Nusantara	*PT Jalin Pembayaran Nusantara*
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	*PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)*
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	*PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*
PT Jamsostek (Persero)	*PT Jamsostek (Persero)*
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	*PT Jasa Armada Indonesia Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Jasa Raharja Putera	*PT Jasa Raharja Putera*
PT Jasa Tirta Energi	*PT Jasa Tirta Energi*
PT Jiep (Persero)	*PT Jiep (Persero)*
PT Kawasan Berikat Nusantara	*PT Kawasan Berikat Nusantara*
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	*PT Kawasan Industri Makassar (Persero)*
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	*PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)*
PT KBN Graha Medika	*PT KBN Graha Medika*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Kereta Api Logistik	*PT Kereta Api Logistik*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Kimia Farma Apotek	*PT Kimia Farma Apotek*
PT Kimia Farma Trading & Distribution	*PT Kimia Farma Trading & Distribution*
PT Kodja Terramarin	*PT Kodja Terramarin*
PT Krakatau Bandar Samudera	*PT Krakatau Bandar Samudera*
PT Krakatau Daya Listrik	*PT Krakatau Daya Listrik*
PT Krakatau Industrial Estate	*PT Krakatau Industrial Estate*
PT Krakatau Medika	*PT Krakatau Medika*
PT Krakatau National Resources	*PT Krakatau National Resources*
PT Krakatau Pipe Industries	*PT Krakatau Pipe Industries*
PT Krakatau Sarana Infrastruktur	*PT Krakatau Sarana Infrastruktur*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Krakatau Tirta Industri	*PT Krakatau Tirta Industri*
PT Krakatau Wajatama	*PT Krakatau Wajatama*
PT Laras Astra Kartika	*PT Laras Astra Kartika*
PT Len Industri (Persero)	*PT Len Industri (Persero)*
PT LRT Jakarta	*PT LRT Jakarta*
PT Maintenance Facility Aero asia Tbk	*PT Maintenance Facility Aero asia Tbk*
PT Mandiri AXA General Insurance	*PT Mandiri AXA General Insurance*
PT Mandiri Capital Indonesia	*PT Mandiri Capital Indonesia*
PT Mandiri Manajemen Investasi	*PT Mandiri Manajemen Investasi*
PT Mandiri Tunas Finance	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Mandiri Utama Finance	*PT Mandiri Utama Finance*
PT Mega Eltra	*PT Mega Eltra*
PT Mitra Transaksi Indonesia	*PT Mitra Transaksi Indonesia*
PT Multi Terminal Indonesia	*PT Multi Terminal Indonesia*
PT Nindya Karya (Persero)	*PT Nindya Karya (Persero)*
PT Nusantara Medika Utama	*PT Nusantara Medika Utama*
PT Nusantara Regas	*PT Nusantara Regas*
PT Nusantara Terminal Service	*PT Nusantara Terminal Service*
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi	*PT Nusantara Turbin Dan Propulsi*
PT PAL Indonesia (Persero)	*PT PAL Indonesia (Persero)*
PT PAL Marine Service (Persero)	*PT PAL Marine Service (Persero)*
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	*PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)*
PT Patra Telekomunikasi Indonesia	*PT Patra Telekomunikasi Indonesia*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships (continued)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan) / ***Government entities and institutions** (continued)*

PT Pegadaian (Persero)
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelindo Husada Citra
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara III
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Persero Batam
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Optima Jasa
PT Pindad (Persero)
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Urban

PT Pegadaian (Persero)
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelindo Husada Citra
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara III
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Persero Batam
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Optima Jasa
PT Pindad (Persero)
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Urban

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Prima Armada Raya
PT Prima Indonesia Logistik
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Purna Sentana Baja
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Padang (Persero)
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo Advisory Utama
PT Sucofindo Episi
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Taspen (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Selular
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Tbk
PT Tugu Pratama Indonesia
PT United Tractors Semen Gresik
PT Varia Usaha Beton
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Wahana Sentana Baja
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Realty

Pengendalian Kegiatan Perusahaan

Karyawan Kunci

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Type of relationships (continued)

Government entities and institutions *(continued)*

PT Prima Armada Raya
PT Prima Indonesia Logistik
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Purna Sentana Baja
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Padang (Persero)
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo Advisory Utama
PT Sucofindo Episi
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Taspen (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Selular
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Tbk
PT Tugu Pratama Indonesia
PT United Tractors Semen Gresik
PT Varia Usaha Beton
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Wahana Sentana Baja
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Realty

Control on Company's Activities

Key Employees

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

b. Transaction with related parties

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

	2021	2020*)	
Aset			*Assets*
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Pemegang saham utama	134,181	1,868,326	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham pengendali	335,261	352,192	*Controlling shareholders*
	469,442	2,220,518	
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)			*Investments in marketable securities (Note 7)*
Pemegang saham utama	36,989,653	27,765,308	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham pengendali	47,711	9,783	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	289,678	13,296	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,104,000	2,485,367	*Government entities and institutions*
	38,431,042	30,273,754	
Tagihan akseptasi (Catatan 8)			*Acceptance receivables (Note 8)*
Pemegang saham pengendali	75,059	40,016	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	9,801	87,310	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	22,812	107,357	*Government entities and institutions*
	107,672	234,683	
Piutang *murabahah* (Catatan 9)			*Murabahah receivables (Note 9)*
Entitas dan lembaga pemerintah	487,968	850,775	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	12,660	47,597	*Key employees*
	500,628	898,372	
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)			*Funds of qardh (Note 10)*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,285,008	2,311,168	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	820	6,617	*Key employees*
	1,285,828	2,317,785	
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)			*Mudharabah financing (Note 11)*
Entitas dan lembaga pemerintah	473,842	1,210,059	*Government entities and institutions*
	473,842	1,210,059	
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)			*Musyarakah financing (Note 12)*
Entitas dan lembaga pemerintah	20,334,972	17,519,068	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	21,356	103,760	*Key employees*
	20,356,328	17,622,828	
Aset lain-lain (Catatan 15)			*Other assets* (*Note 15*)
Pemegang saham	-	29,113	*Shareholders*
	-	29,113	
Jumlah aset dari pihak-pihak berelasi	61,624,782	54,807,112	*Total assets from related parties*
Jumlah aset	265,289,081	239,581,524	***Total assets***
Persentase jumlah aset dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset	23.23%	22.88%	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

b. Transaction with related parties *(continued)*

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	2021	2020*)	
Liabilitas			*Liabilities*
Liabilitas segera (Catatan 16)			*Obligations due immediately (Note 16)*
Pemegang saham pengendali	69,411	212,345	*Controlling shareholders*
Simpanan *wadiah*			*Wadiah deposits (Note 18)*
Giro *wadiah* (Catatan 18)			*Wadiah demand deposits*
Pemegang saham utama	14	-	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	214	13,128	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,333,323	2,379,140	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	1,753	1,429	*Key employees*
	1,335,304	2,393,697	
Tabungan *wadiah* (Catatan 19)			*Wadiah savings deposits (Note 19)*
Entitas dan lembaga pemerintah	848	1,505	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	8,768	17,555	*Key employees*
	9,616	19,060	
Jumlah simpanan *wadiah*	1,344,920	2,412,757	*Total wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			*Deposits from other banks (Note 20)*
Giro *wadiah*			*Wadiah demand deposits*
Pemegang saham pengendali	22	22	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	5	-	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,710	3,385	*Government entities and institutions*
Jumlah simpanan bank lain	1,737	3,407	*Total deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi (Catatan 8)			*Acceptance liabilities (Note 8)*
Pemegang saham pengendali	44,827	34,706	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	4,253	34,481	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	36,388	39,413	*Government entities and institutions*
	85,468	108,600	
Liabilitas imbalan kerja (Catatan 40)			*Employee benefits liabilities (Note 40)*
Karyawan kunci	11,946	71,325	*Key employees*
	11,946	71,325	
Liabilitas lain-lain (Catatan 22)			*Other liabilities (Note 22)*
Karyawan kunci	120,000	40,000	*Key employees*
	120,000	40,000	
Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi	1,633,482	2,848,434	***Total liabilities from related parties***
Jumlah liabilitas	61,886,476	66,040,361	*Total liabilities*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties *(continued)*

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows (continued):

	2021	2020*)	
Persentase jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	2.64%	4.31%	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***
Dana *syirkah* temporer			*Temporary syirkah funds*
Giro *mudharabah* (Catatan 23)			*Mudharabah demand deposits (Note 23)*
Pemegang saham utama	1,730,383	1,752,805	*Ultimate shareholders*
Pemagang saham	8,672	8,809	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	2,453,545	1,426,272	*Government entities and institutions*
	4,192,600	3,187,886	
Tabungan *mudharabah* (Catatan 24)			*Mudharabah savings deposits (Note 24)*
Pemegang saham pengendali	-	10	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	77	-	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	272,630	129,750	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	19,593	33,374	*Key employees*
	292,300	163,134	
Deposito *mudharabah* (Catatan 25)			*Mudharabah time deposits (Note 25)*
Pemegang saham utama	-	2,000,000	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	60,950	136,400	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	6,770,527	10,738,109	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	61,110	61,805	*Key employees*
	6,892,587	12,936,314	
Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi	11,377,487	16,287,334	***Total temporary syirkah funds from related parties***
Jumlah dana syirkah temporer	178,388,671	151,798,018	*Total temporary syirkah funds*
Persentase jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer	6.38%	10.73%	***Percentage of total temporary syirkah funds from related parties to total temporary syirkah funds***

43. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Seiring dengan berkembangnya bisnis Bank, risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal agar dapat beradaptasi dengan kompleksitas kegiatan usaha tersebut. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.

43. RISK MANAGEMENT

The Bank's business is constantly exposed to various risks. Along with the development of the Bank's business, risks faced by the Bank became increasingly complex. The Bank is required to implement a reliable risk management in order to adapt to the complexity of the business. The principles of risk management practices should be used to support the Bank in the development of business activities and banking operations very rapid.

**) Disajikan kembali, lihat Catatan 52*

**) Restated, see Note 52*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Upaya yang dilakukan Bank untuk mengurangi eksposur risiko pembiayaan, diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan Bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

1) Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah;

2) Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan;

3) Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan;

4) Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non-Performing Financing* (*NPF*);

5) Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri;

6) Menentukan Batas Maksimum Penyaluran Dana internal;

7) Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

a. Financing Risk

Financing risk is the risk of the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank in accordance with the agreed contract.

Efforts are made to reduce the Bank's exposure to financing risk, such as through a variety of measures of financing risk mitigation by using a number of techniques such as collateral and third party guarantees to reduce the risks. Financing risk mitigation techniques enable the Bank to be protected against the deterioration of the quality of financing.

The actions taken by the Bank to minimize the financing risk include the following:

1) Conducting an analysis of funding requests from prospective customers;

2) Reviewing the financial policies and standard operating procedures for each segment of the financing;

3) Developing receivables and financing originating system for micro financing and consumer financing as a tool to help reduce the financing risk;

4) Defining the customers market target in order to anticipate the occurrence of Non-Performing Financing (NPF);

5) Conducting a portfolio analysis of the financing provided both by business and industry segments;

6) Defining internal Disbursement Limit;

7) Analyzing the impact on Bank's financing due to lower commodity prices and a decline in exports.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***43. RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

a. Risiko pembiayaan (lanjutan) / ***a. Financing risk*** *(continued)*

(i) Kualitas aset keuangan / ***(i) Financial assets quality***

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

The table below shows financial assets quality per class of assets for all financial assets exposed by financing risk (gross of allowance for impairment losses):

2021

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,563,580	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	1,858,789	-	-	-	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	67,597,145	-	-	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	161,495	-	-	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	85,630,031	11,445,478	1,990,981	2,619,070	101,685,560	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	321	-	38	-	359	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	1,221	100,349	101,570	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	8,259,026	814,861	33,933	311,411	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,503,578	103,290	234	21,335	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	45,000,050	9,720,756	999,571	1,834,059	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain**)	772,011	3,572	5,057	-	780,640	*Other assets***)
	231,346,026	22,087,957	3,031,035	4,886,224	261,351,242	

2020*)

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	21,527,933	-	-	-	21,527,933	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	8,764,198	-	-	-	8,764,198	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	49,130,495	-	-	-	49,130,495	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	295,337	-	-	-	295,337	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	74,898,397	9,434,611	3,090,204	2,420,878	89,844,090	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	388	-	228	21	637	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	4,657	34,510	39,167	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	8,599,903	509,953	24,079	146,920	9,280,855	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,355,785	275,859	4,739	34,599	2,670,982	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	40,914,113	10,146,908	508,799	1,778,713	53,348,533	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain**)	842,860	-	-	-	842,860	*Other assets***)
	207,329,409	20,367,331	3,632,706	4,415,641	235,745,087	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*
) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima / *) Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pembiayaan (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi.
(d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

(a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi.
(d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financing risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financing quality are defined as follows:

High grade

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the government institutions, local government institutions, banks listed in the stock exchange and transaction with reputable banks with low probability of insolvency.
(b) Investments in marketable securities are securities issued by Government and investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn as due during the term of the loan and borrowers whose accounts has never been restructured.
(d) Other assets are receivables from Sovereign (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

(a) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with non-listed banks.
(b) Investments in marketable securities are non-investment grade securities with a rating of at least idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to borrowers with an average track record of loan repayment and borrowers whose accounts has been restructured.
(d) Other assets are financial assets other than income receivables from Sovereign or local government such as other receivables to third parties.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***43. RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

a. Risiko pembiayaan (lanjutan) / ***a. Financing risk*** *(continued)*

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan) / ***(i) Financial assets quality*** *(continued)*

Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap pembiayaan, piutang dan pinjaman yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

According to SFAS 60, financial asset is due when the repayment is default. The table below shows aging analysis of past due but not impaired financing, receivables and fund:

	2021				
	≤ 30 hari/ *days*	**31 - 60 hari/ *days***	**61 - 90 hari/ *days***	**Jumlah/ *Total***	
Piutang *murabahah*	1,074,728	540,058	376,194	1,990,980	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	10	28	38	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	352	291	578	1,221	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	24,605	7,902	1,426	33,933	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	10	224	-	234	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	946,232	37,961	15,379	999,572	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain**)	10,415	9,097	10,586	30,098	*Other assets**)*
	2,056,342	595,543	404,191	3,056,076	

	2020*)				
	≤ 30 hari/ *days*	**31 - 60 hari/ *days***	**61 - 90 hari/ *days***	**Jumlah/ *Total***	
Piutang *murabahah*	2,199,027	472,846	418,331	3,090,204	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	136	92	-	228	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	1,812	458	1,061	3,331	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	22,944	691	444	24,079	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	968	319	3,452	4,739	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	438,141	48,188	22,470	508,799	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain**)	14,106	9,133	10,659	33,898	*Other assets**)*
	2,677,134	531,727	456,417	3,665,278	

(ii) Analisis konsentrasi risiko / ***(ii) Risk concentration analysis***

(a) Sektor geografis / *(a) Geographical sectors*

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

The following tables show the details of financing exposures categorized by geographic area as of 31 December 2021 and 2020. Geographic grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region:

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*
) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima / *) Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *43. RISK MANAGEMENT (continued)*

a. Risiko pembiayaan (lanjutan) / *a. Financing risk (continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan) / *(ii) Risk concentration analysis (continued)*

(a) Sektor geografis (lanjutan) / *(a) Geographical sectors (continued)*

	2021						
	Jabodetabek	Jawa/*Java*	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,563,580	-	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	1,856,775	43	19	1	1,951	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	67,545,904	51,241	-	-	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	104,588	56,907	-	-	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	24,779,015	24,757,523	32,132,888	8,830,800	11,185,334	101,685,560	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	255	104	-	-	-	359	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	4,918	89,375	5,855	497	925	101,570	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	4,873,127	1,925,283	1,076,312	443,117	1,101,392	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	755,085	546,500	310,368	1,708	14,776	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	37,800,078	9,494,156	6,891,281	1,947,146	1,421,775	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain**)	676,328	33,697	24,206	8,382	38,027	780,640	*Other assets***)*
	158,959,653	36,954,829	40,440,929	11,231,651	13,764,180	261,351,242	
Cadangan kerugian penurunan nilai						(7,512,701)	*Allowance for impairment losses*
Neto						253,838,541	***Net***
Rekening Administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2,503,815	125,087	275,844	24,994	9,397	2,939,137	*Unused financing facility*
Letter of Credit	49,158	15,021	-	-	-	64,179	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	918,492	331,910	335,448	24,501	50,078	1,660,429	*Bank guarantees issued*
	3,471,465	472,018	611,292	49,495	59,475	4,663,745	

	2020*)						
	Jabodetabek	Jawa/*Java*	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	21,527,933	-	-	-	-	21,527,933	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	8,764,198	-	-	-	-	8,764,198	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	49,130,495	-	-	-	-	49,130,495	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	295,337	-	-	-	-	295,337	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	18,526,688	24,161,595	28,452,964	8,471,332	10,231,511	89,844,090	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	490	147	-	-	-	637	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	29,113	2,658	701	6,029	666	39,167	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	7,990,574	625,903	495,521	122,669	46,188	9,280,855	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,694,151	842,775	71,659	31,160	31,237	2,670,982	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	34,033,630	9,177,089	7,533,565	1,432,853	1,171,396	53,348,533	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain**)	617,956	77,771	97,090	12,394	37,649	842,860	*Other assets***)*
	142,610,565	34,887,938	36,651,500	10,076,437	11,518,647	235,745,087	
Cadangan kerugian penurunan nilai						(5,915,058)	*Allowance for impairment losses*
Bersih						229,830,029	***Net***
Rekening Administratif							***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2,567,346	100,414	299,627	4,595	10,808	2,982,790	*`Unused financing facility*
Letter of Credit	34,627	8,975	-	-	-	43,602	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	975,715	478,287	452,898	37,770	68,583	2,013,253	*Bank guarantees issued*
	3,577,688	587,676	752,525	42,365	79,391	5,039,645	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*
***) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima* / ***) Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***43. RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

a. Risiko pembiayaan (lanjutan) / ***a. Financing risk*** *(continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan) / ***(ii) Risk concentration analysis*** *(continued)*

(b) Sektor industri / *(b) Industrial sector*

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

The following tables provide the details of the financing exposure at the carrying amounts categorized by industrial sector as of 31 December 2021 and 2020:

	2021					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,563,580	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	1,858,789	-	-	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	36,989,653	29,942,892	664,600	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	86,139	75,356	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	242	260,104	8,378,976	93,046,238	101,685,560	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	359	359	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	83,955	17,615	101,570	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	-	200,000	4,675,520	4,543,711	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	108,708	683,423	832,657	3,649	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	1,333	1,735,993	43,482,618	12,334,492	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	609,499	41,776	10,559	118,806	780,640	*Other assets*)*
	58,273,015	34,809,116	58,204,241	110,064,870	261,351,242	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(7,512,701)	*Allowance for impairment losses*
Bersih					253,838,541	***Net***
Rekening Administratif Liabilitas						***Administrative Accounts Liabilities***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	-	238,546	518,310	2,182,461	2,939,317	*Unused financing facility*
Letter of Credit	-	-	64,179	-	64,179	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan		54,052	1,590,852	15,525	1,660,429	*Bank guarantees issued*
	-	292,598	2,173,341	2,197,986	4,663,925	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***43. RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

a. Risiko pembiayaan (lanjutan) / ***a. Financing risk*** *(continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan) / ***(ii) Risk concentration analysis*** *(continued)*

(b) Sektor industri (lanjutan) / *(b) Industrial sector (continued)*

	2020*)					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	21,527,933	-	-	-	21,527,933	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	8,764,198	-	-	8,764,198	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	25,729,517	2,083,911	21,317,067	-	49,130,495	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	-	295,337	-	295,337	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	1,111	449,081	10,045,575	79,348,323	89,844,090	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	90	547	637	*Istishna receivables*
Piutang sewa *ijarah*	-	-	2,681	36,486	39,167	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	2,771	-	5,091,137	4,186,947	9,280,855	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	258,076	1,414,875	991,238	6,793	2,670,982	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,885	2,433,277	39,286,914	11,625,457	53,348,533	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain**)	-	-	842,860	-	842,860	*Other assets**)*
	47,522,293	15,145,342	77,872,899	95,204,553	235,745,087	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(5,915,058)	*Allowance for impairment losses*
Bersih					229,830,029	***Net***
Rekening Administratif Liabilitas						***Administrative Accounts Liabilities***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	145,919	-	198,141	2,638,730	2,982,790	*Unused financing facility*
Letter of Credit	-	-	43,602	-	43,602	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	-	1,669	1,992,824	18,760	2,013,253	*Bank guarantees issued*
	145,919	1,669	2,234,567	2,657,490	5,039,645	

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima / **) *Other assets consist of income receivables*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pembiayaan (lanjutan)

(iii) Analisis eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya (lanjutan)

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

Untuk *secured financing*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan terdiri dari:

a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dan properti.

b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga dan emas.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

43. RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Financing risk *(continued)*

(iii) Analysis of maximum exposure to financing risk after considering the effect of collateral and other financing enhancements *(continued)*

1. Secured financing
2. Partially secured financing

For secured financing, Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, such as land and buildings, proof of vehicle ownership and properties.

b. Financial collateral, such as deposits (time deposits, savings, demand deposit), securities and gold.

In case of default, Bank will use the collateral as the last resort in recovering its investment.

Partially secured financing are financing for fixed income employees, financing for retirees, and other consumer financing. In their payment obligations, partially secured financing are generally made through automatic payroll deduction. Hence, maximum exposure to financing risk is lower than the carrying value.

Financing risk mitigations for partially secured financing consist of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pembiayaan (lanjutan)

Manajemen risiko kredit dalam kondisi Pandemi Covid-19

Meningkatnya penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) secara global maupun domestik, menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kemampuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepada Bank. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku dunia usaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat memacu stabilitas perekonomian nasional.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi tersebut, Bank telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang terdampak Covid-19 melalui Kebijakan perusahaan perihal Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena Dampak *Coronaviruses* (Covid-19).

Kebijakan tersebut mengatur ketentuan yang terkait antara lain, kriteria nasabah pembiayaan terdampak, sektor usaha yang terdampak Covid-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas pembiayaan, monitoring, pelaporan kepada regulator serta jurnal akuntansi. Kebijakan disusun mengacu pada POJK No. 17/POJK.03/2021, POJK No.48/POJK.03/2020, dan POJK No. 11/POJK.03/2020 serta ketentuan internal Bank lainnya. Usulan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 dilakukan secara selektif serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga terlaksananya *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik. Secara umum, Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
b. Penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financing risk** (continued)*

Credit risk management during Covid-19 Pandemic

The unstoppable pandemic of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in both domestic and global transmission, influences the customers' ability to pay their financing to the bank, whether directly or indirectly. With the purpose to recover the declining market condition, the Government released a policy that is expected to accelerate the national economics stability.

In order to support the Government's project in maintaining the economic stability, the Bank has proposed restructuring policy for the customers affected by the Covid-19 through the Extraordinary Policy for Financing Affected by The Coronavirus (Covid-19) Pandemic

The particular policy manages the specific requirement including the debtor's criteria, industrial sector affected by Covid-19, mechanism and restructuring scheme, decision making, collectibility ratio, monitoring, reporting to the regulator, and accounting journal entries. This policy refers to POJK No. 17/POJK.03/2021, POJKNo.48/POJK.03/2020 and POJK No. 11/POJK.03/2020 and corresponding internal regulations. The loan restructuring affected by Covid-19 is being done selectively and focusing on the precautionary principle as well as maintaining the quality of Good Corporate Governance (GCG) principle. Generally, the Bank has been setting up the restructuring scheme with following mechanism:

a. Extend the financing timeline
b. Postpone/redefine the payment base and/or margin/ujrah/profit sharing

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pembiayaan (lanjutan)

Manajemen risiko kredit dalam kondisi Pandemi Covid-19 (lanjutan)

Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider* (*moral hazard*) dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran. Begitupun dengan pemberian stimulus yang hanya dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank dan regulator.

Dalam kaitan dengan kondisi pandemic Covid-19 yang tengah berlangsung, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada mekanisme monitoring pembiayaan, baik terhadap nasabah pembiayaan secara entitas maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan *early warning signal* sehingga penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas pembiayaan selama masa pandemi.

Penyesuaian mekanisme *monitoring* pembiayaan dilakukan melalui:

1. Analisis *watchlist* terhadap seluruh nasabah pembiayaan, terutama entitas nasabah pembiayaan yang berada pada sektor usaha terdampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK No.17/POJK.03/2021 dan POJK No.48/POJK.03/2020 (sebagai penyesuaian atas POJK No. 11/POJK.03/2020) dan ketentuan internal Bank. *Output watchlist* untuk nasabah pembiayaan yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan *action plan* yang di-monitoring pelaksanaannya secara berkelanjutan.
2. Pengendalian pencairan/ penambahan/ perpanjangan plafon pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK No.17/POJK.03/2021 dan POJK No.48/POJK.03/2020 (sebagai penyesuaian atas POJK No. 11/POJK.03/2020), sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna.
3. Melakukan *stress testing* secara berkala dengan skenario melibatkan aspek kondisi Pandemi Covid-19 sebagai pendukung *judgemental decision making*.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financing risk** (continued)*

***Credit risk management during Covid-19 Pandemic** (continued)*

In the process of financing relaxation, the Bank must be comprehensively doing assessment to the granted debtors on this restructuring scheme and ensuring the granted are those who are affected by the Covid-19, to avoid the free rider (moral hazard) and minimize the risk of improper restructuring. Similarly with the stimulus that will only be given to the affected debtors with particular criteria set by the Bank and the regulator.

In the relevance of Covid-19 pandemic situation, the Bank has made several adjustments on the financing monitoring mechanism, whether for the portfolio or entities kind of debtors. The adjustments are being taken into consideration to provide an early warning signal to mitigate the risk that may occur and properly maintaining the financing quality during the pandemic era.

The several monitoring adjustments are explained as below:

1. *Watchlist analysis for all debtors, particularly for the debtors' whose industrial sector is affected by Covid-19 referring to POJK No. 17/POJK.03/2021 and POJK No. 48/POJK.03/2020 (as the adjustment for POJK No. 11/POJK.03/2020) and internal Bank's policy. The watchlist output is related to the debtors with declining performance followed by the continuous supervised action plan.*
2. *The financing disbursement/ addition/ extension controls of the restructuring debtors (especially from the National Economic Stimulus POJK No. 17/POJK.03/2021 and POJK No. 48/POJK.03/2020 scheme (for the adjustment of POJK No.11/POJK.03/2020), to address the proper restructuring scheme.*
3. *Perform periodical stress testing with considering the scenario of Covid-19 pandemic as the judgmental decision making support.*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pembiayaan (lanjutan)

Manajemen risiko kredit dalam kondisi pandemi Covid-19 (lanjutan)

Penyesuaian mekanisme *monitoring* pembiayaan dilakukan melalui: (lanjutan)

4. Melaksanakan *post facto review* nasabah pembiayaan restrukturisasi terdampak Covid-19 untuk menghindari *moral hazard* dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta memantau keberlangsungan usaha/kemampuan nasabah pembiayaan.

Bank senantiasa melakukan *review* atas pelaksanaan mekanisme *monitoring* pembiayaan di tengah kondisi pandemi Covid-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi pandemi Covid-19 dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

Selanjutnya Bank melakukan *review* terhadap kecukupan cadangan kerugian/CKPN atas pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi Covid-19 untuk mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko pasar diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja Bank.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financing risk** (continued)*

***Credit risk management during Covid-19 Pandemic** (continued)*

The several monitoring adjustments are explained as below: (continued)

4. Executing the post facto review of the restructuring debtors (with Covid-19 scheme) to avoid moral hazard and minimize the risk of inappropriate restructuring grants and monitor the debtor’s business continuinity.

The Bank is committed to review the monitoring mechanism in the midst of Covid-19 pandemic, so the adjustments could be done at the first occasion of the changes of the condition of Covid-19 pandemic refers to the Government’s and related authority’s regulation.

Furthermore, the Bank conducts a review of the adequacy of the allowance for losses on the financing of the Covid-19 restructuring to anticipate potential credit risks in the future.

b. Market risk

Market risk is a risk due to changes in market prices, such as risks of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risk comprise two types of risk: exchange rate risk and the risk of price movement of sukuk that classified at fair value.

The actions taken by the Bank to minimize market risk include the following:

- *Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of market risk.*
- *Monitoring the development of margin rates in the market and analyzing its effect on the Bank's performance.*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya *gap* posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Bersih (PDN) baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

Exchange rate risk

Exchange rate risk is the risk due to the gap of foreign exchange positions held by the Bank which is reflected in the Net Open Position (NOP) either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position is the position of the trading book which is done either to gain foreign exchange transaction income in the short-term period or banking book positions in order to control NOP.

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/ PBI/2003 dated 1 July 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The NOP of Bank as of 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021			
Mata Uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	***Currencies***
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	6,479,373	6,491,705	12,332	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	339,143	296,644	42,499	*Saudi Arabian Riyal*
Euro	6,043	6,215	172	*Euro*
Dolar Australia	1,014	-	1,014	*Australian Dollar*
Dolar Hongkong	2,947	-	2,947	*Hongkong Dollar*
Dolar Singapura	12,772	12,843	71	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	6,680	-	6,680	*British Pounds*
Yen Jepang	886	-	886	*Japanese Yen*
			66,601	
Modal (Catatan 45a)			25,122,769	*Capital (Note 45a)*
Rasio PDN			**0.27%**	***NOP Ratio***

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

b. Risiko pasar (lanjutan) / ***b. Market risk** (continued)*

Risiko nilai tukar (lanjutan) / ***Exchange rate risk** (continued)*

	2020*)			
Mata Uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	***Currencies***
Laporan Posisi Keuangan Dan Rekening Administratif				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	14,471,152	15,316,259	845,107	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	379,662	272,976	106,686	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	38,730	7,853	30,877	*Singapore Dollar*
Euro	2,127	23,500	21,373	*Euro*
Dolar Australia	932	58	874	*Australian Dollar*
Yen Jepang	206	-	206	*Japanese Yen*
			1,005,123	
Modal (Catatan 45a)			22,497,241	*Capital (Note 45a)*
Rasio PDN			4.47%	*NOP Ratio*

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit):

The tables below demonstrated the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in exchange rate, assuming all other variables are constant for the period ended 31 December 2021 and 2020 (unaudited):

	2021		
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or (loss) and other comprehensive income before tax***	
Mata Uang Asing	+1%	666	*Foreign Currencies*
	-1%	(666)	

	2020*)		
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or (loss) and other comprehensive income before tax***	
Mata Uang Asing	+1%	10,051	*Foreign Currencies*
	-1%	(10,051)	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53 / **) Restated, see Note 53*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dampak atas perubahan nilai tukar dari mata uang selain Dolar Amerika Serikat tidak material.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai berikut:

1) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
2) Melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas Bank secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio kewajiban antar bank, arus kas dan kesenjangan likuiditas.
3) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan juga *secondary reserve*.
4) Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

***Exchange rate risk** (continued)*

For the year ended 31 December 2021 and 2020 the effect of fluctuations in exchange rates of currency other than United States Dollar is not material.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk due to the inability of the Bank to meet its maturing obligations. Along with the development of the Bank's business, liquidity risk is the risk that is one of the major concerns of the Bank. This risk may result from the growth of the Bank's financing greater than the growth in deposits. The difference between the availability of funds and the receivable and financing maturity can lead to difficulty in meeting obligations of the Bank to the customers and other parties.

The actions taken by the Bank to minimize the liquidity risk include the following:

1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.
2) Monitoring the liquidity conditions periodically through some liquidity ratios such Financing to Deposit Ratio (FDR), the ratio of inter-bank liabilities, cash flow and liquidity gaps.
3) Determining the liquidity risk limit such as limit of Statutory Reserve Requirement (GWM) and secondary reserve.
4) Maintaining access to the money market through placements and financing between banks.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Table of asset and liabilities maturity analysis as of 31 December 2021 and 2020, based on the remaining maturity are as follows:

	2021						
Keterangan	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities***	**Jumlah/ *Total***	***Descriptions***
Aset							***Assets***
Kas	4,119,903	-	-	-	-	4,119,903	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,421,055	142,525	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	1,846,596	12,193	-	-	-	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	24,935,573	6,611,482	2,296,562	33,753,528	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	13,265	74,396	73,834	-	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istihsna,* dan *ijarah*	364,903	259,978	2,386,389	98,776,219	-	101,787,489	*Receivables - murabahah, Isthishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	1,596,932	3,234,700	3,584,237	1,003,362	-	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	12,173	113,569	778,672	724,023	-	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	3,297,674	4,378,516	8,875,472	41,002,774	-	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	1,711	3,189	31,522	865,143	-	901,565	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain **)	107,271	67,268	26,995	579,106	-	780,640	*Other assets**)*
Jumlah aset	56,717,056	14,897,816	18,053,683	176,704,155	-	266,372,710	***Total Asset***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	608,554	-	-	-	-	608,554	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	158,478	-	-	-	-	158,478	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan dari nasabah	57,247,890	-	-	-	-	57,247,890	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	115,938	-	-	-	-	115,938	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	13,265	74,396	73,834	-	-	161,495	*Acceptance liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	836,491	-	836,491	*Estimated liabilities for employee benefits*
Liabilitas sewa	-	-	-	289,101	-	289,101	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain ***)	-	-	-	22,672	-	22,672	*Other liabilities***)*
Jumlah liabilitas	58,144,125	74,396	73,834	1,148,264	-	59,440,619	***Total liabilities***
Dana *Syirkah* Temporer							***Temporary Syirkah Funds***
Tabungan *mudharabah*	65,102,491	-	-	-	-	65,102,491	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	61,692,817	23,587,726	13,312,010	-	-	98,592,553	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	13,318,627	-	-	-	-	13,318,627	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk mudharabah subodinasi	-	-	-	1,375,000	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Jumlah dana *syirkah* temporer	140,113,935	23,587,726	13,312,010	1,375,000	-	178,388,671	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(142,214,614)	(9,071,059)	4,566,821	174,180,891	-	27,462,039	***Maturity gap***

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
***)Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi, dan rekening sementara

***) Other assets consist of income receivables*
*****) Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium, and temporary accounts*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Table of asset and liabilities maturity analysis as of 31 December 2021 and 2020, based on the remaining maturity are as follows: (continued)

	2020*)						
Keterangan	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities***	**Jumlah/ *Total***	***Descriptions***
Aset							***Assets***
Kas	3,180,739	-	-	-	-	3,180,739	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	14,619,494	2,098,516	4,809,923	-	-	21,527,933	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	8,764,198	-	-	-	-	8,764,198	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	14,939,583	4,475,972	7,302,941	22,411,999		49,130,495	*Investments in marketable securities*
Tagihan Akseptasi	27,413	149,581	118,343	-	-	295,337	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna dan ijarah*	267,511	487,628	2,821,868	86,306,887		89,883,894	*Receivables - murabahah istishna, and ijarah*
Pinjaman *qardh*	1,614,398	4,376,874	2,198,500	1,091,083	-	9,280,855	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	41,501	185,294	1,310,475	1,133,712	-	2,670,982	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,885,346	5,480,182	6,155,610	38,827,395	-	53,348,533	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	80	953	24,003	1,484,425		1,509,461	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain **)	721,226	-	-	-	-	721,226	*Other assets**)*
Jumlah aset	47,061,489	17,255,000	24,741,663	151,255,501	-	240,313,653	***Total Asset***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	989,362	-	-	-	-	989,362	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	170,010	-	-	-	-	170,010	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan dari nasabah	60,403,583	-	-			60,403,583	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	806,560	-	-	-	-	806,560	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	27,413	149,581	118,343	-	-	295,337	*Acceptance liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	1,184,240	-	1,184,240	*Estimated liabilities for employee benefits*
Liabilitas sewa	-	-	-	180,928	-	180,928	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain ***)	-	-	-	477,769	-	477,769	*Other liabilities***)*
Jumlah liabilitas	62,396,928	149,581	118,343	1,842,937	-	64,507,789	***Total liabilities***
Dana *Syirkah* Temporer							***Temporary Syirkah Funds***
Tabungan *mudharabah*	59,008,934	-	-	-	-	59,008,934	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	57,698,270	16,693,933	11,651,429	-	-	86,043,632	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	5,370,452	-	-	-	-	5,370,452	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subodinasi	-	-	-	1,375,000	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Jumlah dana *syirkah* temporer	122,077,656	16,693,933	11,651,429	1,375,000	-	151,798,018	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(137,413,095)	411,486	12,971,891	148,037,564	-	24,007,846	***Maturity gap***

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

***) Other assets consist of income receivables*
****) Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

Bank senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem operasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas bank melalui beberapa rasio likuiditas. Bank meyakini bahwa jumlah angsuran yang didapat dari pembiayaan kepada nasabah yang belum jatuh tempo masih cukup untuk mengatasi *maturity gap* negatif yang ada.

The Bank continually evaluates the effectiveness of the operating system to ensure that sufficient funds are available to meet all needs by monitoring the condition of the bank's liquidity through several liquidity ratios. The Bank believes that the amount of installments obtained from financing to customers that have not matured is still sufficient to cover the negative maturity gap.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional merupakan risiko utama yang dikelola Bank dalam bentuk pengembangan pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kontrol di kantor cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan dan pelaksanaan audit internal.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional diantaranya sebagai berikut:

1) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko operasional.

2) Mengembangkan panduan pengelolaan risiko operasional untuk kantor cabang.

3) Menerapkan alat bantu *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) untuk menilai dan mitigasi risiko operasional yang sedang melakukan secara mandiri oleh unit-unit bisnis.

4) Melakukan analisis risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.

5) Mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

d. Operational risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, failure of internal processes, human error, system failure and/or external events affecting the operations of the Bank.

Operational risk is a major risk that is managed internally in the form of development control. One of the efforts is the increased control at the branch through the separation of duties and responsibilities, dual control mechanism in the implementation of the transaction function, deviation/authorization, restrictions on access to the system authority, increasing employee competence and the implementation of internal audit.

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following:

1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of operational risk.

2) Developing guidelines for the management of operational risk for branches.

3) Applying Risk & Control Self Assessment (RCSA) tools to assess and mitigate operational risk by doing independent business units.

4) Performing operational risk analysis for proposed new products or activities which will be launched by the Bank.

5) Developing a Business Continuity Management (BCM) to ensure the continuity of operations of the Bank despite the disturbance (disaster) and to protect the interests of stakeholders.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko operasional (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional diantaranya sebagai berikut: (lanjutan)

6) Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan.*

e. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena kurangnya pendukung hukum atau kelemahan dari kontrak. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia.

Selain itu, Bank juga harus mengikuti semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank. Jika terjadi klaim litigasi terhadap Bank dalam jumlah yang cukup signifikan, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan diantaranya:

1) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum.
2) Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
3) Dilakukannya standardisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Operational risk** (continued)*

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following: (continued)

6) Developing risk management policies including information technology and standardization of data communication network software, access system management, and the development of electronic banking services in terms of accessibility security and Disaster Recovery Plan.

e. Legal risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects. The emergence of legal risk, among others can be caused by lack of legal support or weakness in the documentation of the contract. As a company governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must comply with all applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia/Financial Service Authority (FSA) as a regulator in the banking industry in Indonesia.

In addition, the Bank must also follow all rules and regulations that apply in the community either directly or indirectly related to the business activities conducted by the Bank. Failure to comply with applicable laws and regulations can lead to litigation claims against the Bank. In case of litigation claims against the Bank with significant amounts involved, it can directly affect the financial performance of the Bank.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of legal risk.
2) Developing a strong legal organisation.
3) Standardising contract and cooperation agreement for a specific financing program.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan hukum yang berlaku dan peraturan untuk Bank Syariah. Dalam terlibat jasa industri perbankan, Bank wajib untuk selalu mematuhi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Bank sebagai lembaga perbankan syariah, seperti:

1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
2) Kualitas Aset Produktif;
3) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA);
4) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
5) *Good Corporate Governance* (GCG); dan
6) Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan diantaranya:

1) Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan kode etik.
2) Penguatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
3) Mempersiapkan laporan rencana aksi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) kepada Bank Indonesia.
4) Meningkatkan *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
5) Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.
6) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.
7) Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk meninjau dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

f. Compliance risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank failures in complying and/or enforcing applicable laws and regulations for Sharia Banks. In regards of the involvement in the banking industry, the Bank is obliged to maintain compliance with banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia, Financial Services Authority (FSA) and the National Sharia Council. In general, this risk is closely related to compliance with applicable laws and regulations, which governs the Bank as an Sharia Banking institution, such as:

1) *Capital Adequacy Ratio (CAR);*
2) *Quality of Earning Assets;*
3) *Allowance of Earning Assets (PPA);*
4) *Legal Lending Limit;*
5) *Good Corporate Governance (GCG); and*
6) *Bank Business Plan (RBB).*

The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to banking activities may affect the continuity of the Bank.

In managing the compliance risks, the Bank performs actions such as:

1) *Improving understanding of Good Corporate Governance (GCG) and the code of conduct.*
2) *Strengthening Good Corporate Governance (GCG) implementation and ensure that all financing debtors meet all financing needs.*
3) *Preparing action plan report on Good Corporate Governance (GCG) to Bank Indonesia.*
4) *Increasing the Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (APU) and the Prevention of Financing for Terrorism (PPT).*
5) *Improving the implementation of compliance certification.*
6) *Working closely with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank operation with Sharia principles.*
7) *Empowering Sharia Compliance to review and analyse the compliance of the Bank's products/activities with Sharia principles.*

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of 31 December 2021 and 2020 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

As of 31 December 2021 and 2020, the carrying value of the Bank's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	2021		**2020*)**		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Value***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
					Current accounts and
Investasi pada surat berharga	67,597,145	68,281,642	49,130,495	48,652,002	*Investments in marketable securities*

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

The tables below show the financial instruments recognised at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.

(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.

(iii) Level 3: Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for asset and liability that are not based on observable market data.

	2021				
	Nilai Wajar/ *Fair Value*	**Tingkat/ *Level 1***	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Investasi pada surat berharga	67,597,145	67,597,145	-	-	*Investments in marketable securities*

	2020*)				
	Nilai Wajar/ *Fair Value*	**Tingkat/ *Level 1***	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Investasi pada surat berharga	49,130,495	49,130,495	-	-	*Investments in marketable securities*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang dan pembiayaan yang diberikan, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain

Nilai tercatat dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b. Investasi pada surat berharga

Nilai wajar untuk investasi pada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik risiko kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

c. Liabilitas segera, simpanan *wadiah*, simpanan dari bank lain, liabilitas lain-lain dan dana *syirkah* temporer.

Estimasi nilai wajar dari liabilitas segera, simpanan mudharabah dan liabilitas lain-lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan *wadiah* dan simpanan dari bank lain dengan tingkat margin tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

***44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES** (continued)*

The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity, receivables and financing, and marketable securities issued approximate their carrying values due to their short-term maturities.

a. Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other bank, acceptance receivables, and other assets

The carrying amount of current accounts and placements with Bank Indonesia and other banks, acceptance receivables, and other assets are a reasonable approximation of fair value.

b. Investments in marketable securities

The fair value for amortized cost investments in marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit risk, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

c. Obligations due immediately, wadiah deposits, deposits from other banks, other liabilities and temporary syirkah funds.

The estimated fair value of obligations due immediately, mudharabah deposits, and other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of wadiah deposits and deposits from other banks with fixed rate margin and acceptance liabilities are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for with similar remaining maturities.

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

d. Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost.*

Estimasi nilai wajar terhadap piutang dan pembiayaan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin yang berlaku untuk piutang dan pembiayaan dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

e. Efek-efek dan sukuk Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara broker/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik piutang dan pembiayaan, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

c. Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate. Receivables and financing are stated at amortized cost.

The estimated fair values of receivables and financing are determined based on discounted cash flows using margin rates applied for receivables and financing with similar credit risk and remaining maturities.

The carrying amount of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate are the reasonable approximation of their fair values.

The estimated fair value of loans represent the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates. The carrying amounts of variable rate receivables and financing and short-term fixed rate receivables and financing are the reasonable approximation of their fair values.

e. Securities and Government sukuk

The fair values of held-to-maturity marketable securities and Government sukuk are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

45. INFORMASI PENTING LAINNYA

45. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

a. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

a. As of 31 December 2021 and 2020, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) are calculated based on Financial Service Authority (FSA) No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014, as amended in previous regulation. The CARs are as follows:

	2021	2020*)	
Modal inti	23,173,019	20,420,394	*Core capital*
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	527,083	802,084	*Supplementary capital (maximum 100% over core capital)*
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	1,422,667	1,274,763	*General reserves of allowance for impairment losses of earning assets (maximum 1.25% of ATMR)*
	25,122,769	22,497,241	
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit	113,643,146	101,719,501	*Risk Weighted Assets (RWA) for Financing Risk*
ATMR Risiko Pasar	103,913	1,035,985	*RWA for Market Risk*
ATMR Risiko Operasional	-	20,569,561	*RWA for Operational Risk*
	113,747,059	123,325,047	
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, dan Risiko Operasional	22.11%	18.40%	*Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit Risk, and Operational Risk*
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	22.09%	18,24%	*Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM yang diwajibkan	9.98%	9.99%	*Minimum CAR*

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Based on the risk profile as of 31 December 2021 and 2020, which is satisfactory, the minimum CAR as of 31 December 2021 and 2020, was determined at 9% to less than 10%.

Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Bank wajib untuk memenuhi *Countercyclical Buffer* yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

In addition to provide core capital and supplementary capital, the Bank is required to provide Countercyclical Buffer ranging from 0% to 2.5% of RWA based on POJK regulation (POJK) No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital Adequacy Ratio of Sharia Bank.

Hasil penilaian menunjukan bahwa Bank mampu untuk memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

The assessment result shows that Bank has met the Minimum CAR in accordance to its risk profile, and met additional capital buffer requirement.

b. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan bersih masing-masing adalah sebagai berikut:

b. As of 31 December 2021 and 2020, ratio of Non-Performing Financing (NPF) gross and net, respectively, are as follows:

	2021	2020*)	
NPF - Bruto	2.93%	2.88%	*NPF - Gross*
NPF - Bersih	0.87%	1.12%	*NPF – Net*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

45. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

***45. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION** (continued)*

c. Rasio piutang, pembiayaan, dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang diberikan Bank adalah sebesar 23,02% dan 22,39% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

c. The ratio of small business receivables, financing and funds to total sharia receivables, financing and funds are 23.02% and 22.39% as of 31 December 2021 and 2020, respectively.

d. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp27.740.235 dan Rp29.701.858.

d. Receivables, financing and funds that have been restructured by the Bank 31 December 2021 and 2020 which are reported to Financial Service Authority amounted to Rp27,740,235 and Rp29,701,858, respectively.

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar :

Total amount of restructured financing related Covid-19 based on FSA Regulation No. 11/POJK.03/2020 until 31 December 2021 and 2020 amounted to:

	2021	2020*)	
Lancar	15,785,699	21,682,865	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	871,531	913,547	*Special Mention*
Kurang Lancar	454,182	216,377	*Substandard*
Diragukan	340,995	34,186	*Doubtful*
Macet	282,552	28,356	*Loss*
Jumlah	17,734,959	22,875,331	*Total*

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

Restructuring scheme involves extension of receivables/financing maturity date, rescheduling and additional plafond of debtor's receivables/financing.

e. Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar (BMPD) kepada Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman pihak terkait yang melampaui ketentuan sebesar 0,51% dan pada tanggal 31 Desember 2020 tidak terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman yang melampaui ketentuan BMPD.

e. Based on the Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds (BMPD) to the Financial Services Authority as of 31 December 2021 there are receivables, financing and funds related parties which exceeded the regulation of 0.51% and as of 31 December 2020, there are no receivables, financing and funds which violated or exceeded the BMPD Regulation.

Pelampauan terjadi karena pembentukan *Holding* BUMN Ultra Mikro dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("Bank BRI") yang merupakan salah satu pemegang saham BSI, ditetapkan oleh Pemerintah sebagai induk dari *Holding* tersebut dan mengakibatkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) yang merupakan nasabah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk menjadi pihak berelasi BSI. Atas pelampauan tersebut, Bank akan menambah modal melalui pertumbuhan laba dan melakukan aksi korporasi lainnya dalam jangka waktu sesuai ketentuan.

The excess occurred due to the formation of the Ultra Micro BUMN Holding where PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("Bank BRI") which is one of the shareholders of BSI, which was determined by the Government as the Parent of the Holding and resulted in PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and PT Pegadaian (Persero) which is a customer of PT Bank Syariah Indonesia, Tbk becomes a related party to BSI. For this excess, the Bank will increase capital through profit growth and perform other corporate actions within a period according to the regulation.

46. INFORMASI SEGMEN

Segmen operasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Wholesale*, SME, Konsumer, Mikro dan Lainnya. Dalam menentukan hasil segmen operasi, beberapa akun aset dan liabilitas dan pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- *Wholesale*: Segmen *Wholesale* PT Bank Syariah Indonesia Tbk melayani badan usaha seperti BUMN dan anak perusahaannya, BUMD dan anak Perusahaannya, Lembaga Negara, *Multinational Company*, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (termasuk Modal Ventura *non linkage*), Pembiayaan sindikasi, Perusahaan Terbuka, Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Surat Berharga.

- SME: Segmen SME melayani pembiayaan produktif kepada kepada badan usaha swasta berbentuk Badan Hukum dan Non Badan Hukum, Pendidikan Dasar & Menengah, klinik, kepada/melalui koperasi, pola *linkage*, dan/atau inti plasma.

- Konsumer: Segmen Konsumer saat ini difokuskan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk Griya, Multiguna, Kendaraan, Pensiunan, Kartu Pembiayaan, Cicil emas dan Gadai Emas, pembiayaan program pemerintah).

- Mikro: Segmen mikro ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat. Serta produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

- Lainnya: Segmen lainnya meliputi produk-produk diluar pembiayaan, produk simpanan dan non-simpanan.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang di-*review* oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

46. SEGMENT INFORMATION

PT Bank Syariah Indonesia Tbk's operating segment is divided into several operating segments as follows: Wholesale, SME, Consumer, Micro and Other. In determining the results of the operating segment, several asset and liability accounts and related revenues and costs are attributed to each segment based on management's internal reporting policy. The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting:

- *Wholesale: PT Bank Syariah Indonesia Tbk Wholesale segment serves business entities such as BUMN and its subsidiaries, BUMD and its subsidiaries, State Institutions, Multinational Companies, Banks and Non-Bank Financial Institutions (including non-linkage Venture Capital), Syndicated Financing, Public Companies, Regional Governments, Hospitals, State and Private Universities, Securities.*

- *SME: The SME Segment serves productive financing to private business entities in the form of Legal Entities and Non Legal Entities, Primary & Secondary Education, clinics, to/through cooperatives, linkage patterns, and/or plasma nuclei.*

- *Consumer: The Consumer segment is currently focused on consumptive/ multipurpose purposes (among others Griya products, Multipurpose, Vehicles, Pensioners, Financing Cards, Gold Installments and Gold Pawning, government program financing).*

- *Micro: The micro segment is intended to serve individual customers and micro entrepreneurs, including the distribution of subsidized financing to support government programs in empowering community businesses. As well as deposit products and other banking services for the needs of each customer.*

- *Others: Other segments include products outside of financing, savings and non-deposit products.*

Performance is measured based on segment profit before income tax, as reported in an internal management report reviewed by Bank Management. Segment profit is used to measure performance where management believes that the information is most relevant in evaluating the results of the segment relative to other entities operating in the industry.

**) Restated, see Note 53*

46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

46. SEGMENT INFORMATION (continued)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows:

Keterangan	2021						Descriptions
	Wholesale	*SME*	Konsumer/ *Consumer*	Mikro/ *Micro*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	3,074,844	1,673,544	8,073,157	1,947,104	3,039,783	17,808,432	*Revenue from fund management as mudharib*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(165,819)	(373,137)	(1,848,120)	(10,576)	(1,981,155)	(4,378,807)	*Third parties' share on return*
Hak bagi hasil milik Bank	2,909,025	1,300,407	6,225,037	1,936,528	1,058,628	13,429,625	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan (beban) usaha lainnya	520,101	283,075	1,365,552	329,347	514,171	3,012,246	*Other operating income (expenses)*
Beban usaha	(1,516,453)	(825,360)	(3,981,525)	(960,273)	(1,499,162)	(8,782,773)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif bersih	(1,556,506)	(740,589)	(1,085,395)	(168,759)	-	(3,551,249)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(3,072,959)	(1,565,949)	(5,066,920)	(1,129,032)	(1,499,162)	(12,334,022)	*Total expenses*
Pendapatan / (Beban) non-operasional	(7,880)	(4,289)	(20,691)	(4,990)	(7,791)	(45,641)	*Non-operating income/ (expenses)*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	348,287	13,244	2,502,978	1,131,853	65,846	4,062,208	*Income before zakat and income tax expenses*
Zakat	(8,718)	(332)	(62,654)	(28,332)	(1,648)	(101,684)	*Zakat*
Beban pajak	(79,935)	(3,040)	(574,460)	(259,772)	(15,112)	(932,319)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan	259,634	9,872	1,865,864	843,749	49,086	3,028,205	*Net income*

Keterangan	2021						Descriptions
	Wholesale	*SME*	Konsumer/ *Consumer*	Mikro/ *Micro*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Aset segmen							***Segment of assets***
Piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan, dan aset yang diperoleh untuk *ijarah* - bersih	45,183,228	17,312,925	85,749,598	15,569,634	-	163,815,385	*Receivables, funds of qardh, financing and assets acquired for ijarah - net*
Non-piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan	-	-	-	-	101,473,696	101,473,696	*Non-receivables, funds of qardh and financing*
	45,183,228	17,312,925	85,749,598	15,569,634	101,473,696	265,289,081	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen							***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	12,807,174	7,199,056	35,656,377	1,467,512	177,247,380	234,377,499	*Funding*
Non-pendanaan	-	-	-	-	30,911,582	30,911,582	*Non-funding*
	12,807,174	7,199,056	35,656,377	1,467,512	208,158,962	265,289,081	

Keterangan	2020*)						Descriptions
	Wholesale	*SME*	Konsumer/ *Consumer*	Mikro/ *Micro*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	3,323,073	2,357,900	6,513,668	1,775,873	2,959,078	16,929,592	*Revenue from fund management as mudharib*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(982,274)	(696,977)	(1,925,389)	(524,934)	(874,680)	(5,004,254)	*Third parties' share on return*
Hak bagi hasil milik Bank	2,340,799	1,660,923	4,588,279	1,250,939	2,084,398	11,925,338	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan usaha lainnya	545,033	386,730	1,068,337	291,269	485,332	2,776,701	*Other operating income*
Beban usaha	(1,561,514)	(1,107,979)	(3,060,777)	(834,484)	(1,390,473)	(7,955,227)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif bersih	(1,077,840)	(579,841)	(1,633,548)	(329,217)	-	(3,620,446)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(2,639,354)	(1,687,820)	(4,694,325)	(1,163,701)	(1,390,473)	(11,575,673)	*Total expenses*
Pendapatan / (beban) non-operasional	(9,219)	(6,541)	(18,071)	(4,927)	(8,209)	(46,967)	*Non-operating income/ (expenses)*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	237,258	353,293	944,220	373,580	1,171,048	3,079,399	*Income before zakat and income tax expenses*
Zakat	(5,717)	(8,513)	(22,752)	(9,002)	(28,218)	(74,202)	*Zakat*
Beban pajak	(62,990)	(93,795)	(250,681)	(99,182)	(310,900)	(817,548)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan	168,551	250,985	670,787	265,396	831,930	2,187,649	*Net income*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi: (lanjutan)

46. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows: (continued)

Keterangan	2020*)						Descriptions
	Wholesale	*SME*	Konsumer/ *Consumer*	Mikro/ *Micro*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Aset segmen							***Segment of assets***
Piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan, dan aset yang diperoleh untuk *ijarah* - bersih	44,849,283	24,127,366	67,972,492	13,698,843	-	150,647,984	*Receivables, funds of qardh, financing and assets acquired for ijarah - net*
Non-piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan	-	-	-	-	88,933,540	88,933,540	*Non-receivables, funds of qardh and financing*
	44,849,283	24,127,366	67,972,492	13,698,843	88,933,540	239,581,524	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen							***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	7,351,931	29,388,606	84,528,662	1,336,349	89,027,613	211,633,161	*Funding*
Non-pendanaan	-	-	-	-	27,948,363	27,948,363	*Non-funding*
	7,351,931	29,388,606	84,528,662	1,336,349	116,975,976	239,581,524	

47. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

Liabilitas kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun “Liabilitas Lain-lain”) untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp9.167 dan Rp17.280. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Contingent liabilities

In the conduct of its business, the Bank is a defendant in various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely to have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of the Bank.

As of 31 December 2021 and 2020, the Bank has established a provision (included in “Other Liabilities”) for several pending lawsuits filed against the Bank amounted to Rp9,167 and Rp17,280, respectively. Management believes that the provision is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

48. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

48. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statements are as follows:

Keterangan	2021						Descriptions
	1 Januari/ *1 January 2020*	Aktivitas non-kas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Liabilitas sewa	180,928	238,388	(130,215)	-	-	289,101	*Lease liabilities*

Keterangan	2020*)						Descriptions
	1 Januari/ *1 January 2020*	Aktivitas non-kas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,279,000	-	96,000	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Liabilitas sewa	34,960	266,320	(120,352)	-	-	180,928	*Lease liabilities*

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

49. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 04/BSI/DPS/OPINI/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

Berdasarkan surat No. 001/BRIS/DPS/01/2021 tanggal 21 Januari 2021, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank BRISyariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BRIsyariah Tbk telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

Berdasarkan surat No. 22/24/DPS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Mandiri telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

Berdasarkan surat No. BNISy/DPS/OPINI/IXX /2020/026 tanggal 31 Desember 2020, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BNI Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

49. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. 04/BSI/DPS/OPINI/I/2022 dated 13 January 2022, the Sharia Supervisory Board (DPS) of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2021, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and sharia opinion of DPS.

Based on letter No. 001/BRIS/DPS/01/2021 dated 21 January 2021 for the year ended 31 December 2020, the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank BRIsyariah expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank BRIsyariah Tbk have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and sharia opinion of DPS.

Based on letter No. 22/24/DPS/XII/2020 dated 30 December 2020, for the year ended 31 December 2020, the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank Syariah Mandiri expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Mandiri have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and sharia opinion of DPS.

Based on letter No. BNISy/DPS/OPINI/IXX /2020/026 dated 31 December 2020, for the year ended 31 December 2020, the Sharia Supervisory Board (DPS) of BNI Syariah expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank BNI Syariah have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and sharia opinion of DPS.

50. RENCANA BARANG MODAL

Bank memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor cabang serta pengadaan perlengkapan komputer dan ATM adalah sebesar Rp668.040 dan Rp131.795 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (tidak diaudit).

50. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

The Bank has capital expenditure plans in relation to the construction of branch offices and procurement of computer equipment and ATMs amounting to Rp668,040 dan Rp131,795 as of 31 December 2021 and 31 December 2020 (unaudited), respectively.

51. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

51. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows:

- *Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";*
- *Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";*
- *Annual improvement SFAS 71: "Financial instruments"; and*
- *Annual improvement SFAS 73: "Leases".*

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of financial statement"*
- *Amendment of SFAS 16 "Fixed Assets";*
- *Amandement of SFAS 25: "Accounting policies, changes of accounting estimates, and error".*

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

As at the authorization date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

52. AKUISISI TERBALIK

Seperti diungkapkan dalam Catatan 1c, efektif pada tanggal 1 Februari 2021, BRIS melakukan penggabungan usaha dengan BSM dan BNIS dimana BRIS menjadi entitas yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS bubar demi hukum.

Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait kontrol atas Bank setelah penggabungan usaha, termasuk salah satunya yaitu pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank.

52. REVERSE ACQUISITION

As disclosed in Note 1c, the merger between BRIS, BSM and BNIS was effective on 1 February 2021, with BRIS as the surviving entity, BSM and BNIS being dissolved by the law.

The Bank's merger transactions are treated as reverse acquisitions for accounting purposes considering several factors related to the control over the Bank after the merger, one of them is the BSM's controlling shareholder as the controlling shareholder of the Bank.

52. AKUISISI TERBALIK (lanjutan)

Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- Pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank pada saat penyelesaian transaksi;
- Komposisi organ pengatur Bank didominasi oleh ex-*legacy* BSM;
- Komposisi manajemen senior Bank didominasi oleh ex-*legacy* BSM;
- Komposisi total aset, total pendapatan, dan laba pada saat penggabungan didominasi oleh ex-*legacy* BSM.

Dengan demikian, BSM dianggap sebagai pihak yang menerima bisnis dan BRIS (sebagai pihak yang mengakuisisi secara hukum) dianggap sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Laporan keuangan Bank merupakan keberlanjutan dari laporan keuangan BSM.

Pada 1 Februari 2021, BRIS menerbitkan 31.130.700.245 saham dengan nilai nominal Rp500 kepada pemegang saham BSM dan BNIS (setara dengan Rp15.565.350). Saham baru yang diterbitkan tersebut menghasilkan 51,18% kepemilikan pemegang saham BSM, 25,03% kepemilikan pemegang saham BNIS di entitas setelah penggabungan. Jumlah saham BRIS yang beredar per 1 Februari 2021 sebanyak 41.031.208.943 saham atau setara dengan Rp20.515.604.

Imbalan bersih yang dialihkan secara efektif yang timbul dari akuisisi terbalik sebesar Rp16.377.633 ditentukan dengan menggunakan nilai wajar saham BSM sebelum akuisisi, yaitu 599.437.496 saham dengan harga nilai wajar saham BSM sebesar Rp27.322 (Rupiah penuh) per saham. Imbalan bersih dihitung berdasarkan jumlah saham yang harus dikeluarkan BSM kepada entitas induk yang sah untuk memberi pemilik entitas induk yang sah persentase kepemilikan yang sama dalam entitas gabungan (BSI).

Selisih antara imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dengan aset bersih yang diperoleh sebesar Rp11.003.573 sebesar Rp5.374.061 diakui sebagai “Selisih Nilai Transaksi Penggabungan Bisnis Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari “Tambahan Modal Disetor” di bagian ekuitas laporan posisi keuangan.

52. REVERSE ACQUISITION *(continued)*

The Bank’s merger transactions are treated as reverse acquisitions for accounting purposes for the following reasons:

- *The shareholders of BSM become the controlling shareholders of the Bank at the time of transaction settlement;*
- *The composition of the Bank's regulatory organs is dominated by ex-legacy BSM;*
- *The composition of the Bank's senior management is dominated by ex-legacy BSM.*
- *The composition of total asset, total revenue, and profit at the merger date is dominated by ex-legacy BSM.*

Thus, BSM is considered the acquirer in accounting terms, and BRIS (as the legal acquirer) is considered the acquiree for accounting purposes. The Bank's financial statements is a continuation of the BSM financial statements.

On 1 February 2021, BRIS issued 31,130,700,245 shares with a nominal value of Rp500 to BSM and BNIS shareholders (equivalent to Rp15,565,350). The newly issued shares resulted in 51.18% ownership of BSM’s shareholder, 25.03% ownership of BNIS’s shareholder in the entity after the merger. The number of outstanding BRIS shares as of 1 February 2021 was 41,031,208,943 shares or equivalent to Rp20,515,604.

The net consideration effectively transferred arising from the reverse acquisition amounting to Rp16,377,633 was determined using the fair value of BSM shares before the acquisition, which was 599,437,496 shares at a fair value price of BSM shares amounting to Rp27,322 (full amount) per share. The net consideration was calculated based on number of shares BSM would have had to have issued to the legal parent to give the owners of the legal parent the same percentage ownership in the combined entity (BSI).

The difference between net consideration effectively transferred and the net assets acquired of Rp11,003,573 amounting to Rp5,374,061 is recognised as “Difference in Value from Business Combination Transactions of Entities Under Common Control” and presented as part of “Additional Paid-in Capital” in the equity section of the statement of financial position.

52. AKUISISI TERBALIK (lanjutan)

***52. REVERSE ACQUISITION** (continued)*

Terkait dengan penggabungan usaha, berikut adalah rangkuman nilai buku neto atas jumlah aset dan jumlah liabilitas yang diserahkan oleh BRIS dan BNIS kepada BSM per tanggal 1 Februari 2021 :

In relation to the merger, below is a summary of the net book value of total assets and total liabilities trasnferred by BRIS and BNIS to the Bank as of 1 February 2021:

	1 Februari 2021/ *1 February 2021*	
Total aset	114,463,592	*Total assets*
Total liabilitas	(33,553,129)	*Total liabilities*
Total dana *syirkah* temporer	(69,906,890)	*Total temporary syirkah funds*
Nilai buku neto	11,003,573	*Net book value*
Imbalan neto yang secara efektif dialihkan	(16,377,634)	*Net consideration effectively transferred*
Selisih	(5,374,061)	*Difference*
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum dari Bank	(995,952)	*Adjustment arising from reverse acquisition to reflect the Company's legal capital*
Total tambahan modal disetor yang timbul dari akuisisi terbalik	(6,370,013)	*Total aditional paid in capital arising from reverse acquisition*

Sebagai akibat dari akuisisi terbalik, modal saham Bank disesuaikan untuk mencerminkan modal saham dari pihak yang melepas bisnis secara akuntansi sebesar Rp995.952 dengan penyesuaian terkait ke dalam akun “Tambahan modal disetor”.

As a result of the reverse acquisition, the Bank's share capital was adjusted to reflect the share capital of the acquiree on an accounting basis amounting to Rp995,952 with a related adjustment to the “Additional paid-in capital” account.

Total tambahan modal disetor yang timbul dari akuisisi terbalik senilai Rp 6.370.013 merupakan penjumlahan antara selisih imbalan neto yang secara efektif dialihkan dengan nilai buku neto BNIS dan BRIS, ditambah dengan penyesuaian untuk mencerminkan modal Bank menurut hukum pada tanggal 1 Februari 2021.

The total additional paid-in capital arising from the reverse acquisition of Rp6,370,013 is the sum of the difference between the net consideration effectively transferred and the net book value of BNIS and BRIS, plus adjustments to reflect the Bank's legal capital as of 1 February 2021.

53. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA

53. RESTATEMENT OF THE PRIOR YEAR FINANCIAL STATEMENTS

Laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020 disusun berdasarkan tiga laporan keuangan terpisah PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah.

The financial statements as of and for the year ended 31 December 2020 and 1 January 2020 are prepared based on three separate financial reports for PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah and PT Bank BNI Syariah.

Penggabungan usaha ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dan diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis entitas Sepengendali”. Untuk penyajian transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan metode penyatuan kepemilikan, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan seakan-akan penggabungan usaha tersebut terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

The merger constitutes a common control business combination and was accounted for under the pooling-of-interest method following the provisions of Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 38 (Revised 2012), “Common Control Business Combination”. In presenting the common control business combination transaction under the pooling-of-interests method, the statements of financial position as of 31 December 2020 were presented as if it had occured since beginning period of the merged entity under common control.

53. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA (lanjutan)

53. RESTATEMENT OF THE PRIOR YEAR FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Pengaruh penyajian kembali pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The effects of the restatement to the statements of financial position as of 31 December 2020 are as follows:

	2020*)						
	Sebelum Penyajian Kembali / *Before Restatement*						
	PT Bank BRIsyariah Tbk	PT Bank Syariah Mandiri	PT Bank BNI Syariah	Penyesuaian/ *Adjustment*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Setelah penyajian Kembali/*After restatement*	
Laporan Posisi Keuangan							*Statement of Financial Positions*
ASET							***ASSETS***
Kas	1,126,358	1,638,321	416,060	-	-	3,180,739	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,584,299	13,181,288	6,762,346	-	-	21,527,933	*Current Account and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	1,844,890	6,250,157	600,758	-	80,000	8,775,805	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	13,039,500	22,500,456	13,565,681	-	(80,000)	49,025,637	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	43,693	174,740	76,671	(2,315)	-	292,789	*Acceptance receivables*
Piutang, bersih	22,697,541	44,083,188	19,685,172	-	123,287	86,589,188	*Receivables, net*
Pinjaman *qardh*, bersih	311,562	7,244,190	1,498,621	-	-	9,054,373	*Funds of qardh, net*
Pembiayaan *mudharabah*, bersih	307,597	793,678	1,497,512	-	-	2,598,787	*Mudharabah financing, net*
Pembiayaan *musyarakah*, bersih	14,171,405	27,818,238	8,906,532	-	-	50,896,175	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* - bersih	1,094,012	198,923	216,526	-	-	1,509,461	*Assets acquired for ijarah - net*
Biaya dibayar di muka	-	-	107,741	-	(107,741)	-	*Prepaid expenses*
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	434,818	1,793,564	1,168,153	-	540	3,397,075	*Fixed assets and right of use asset - net*
Aset pajak tangguhan	305,228	596,182	207,871	-	-	1,109,281	*Deffered tax assets*
Aset lain-lain - bersih	754,683	635,015	299,699	-	(65,116)	1,624,281	*Other assets - net*
Total aset	57,715,586	126,907,940	55,009,343	(2,315)	(49,030)	239,581,524	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	266,876	482,679	53,010	-	186,797	989,362	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	67,283	78,810	30,337	-	(6,420)	170,010	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Giro *wadiah*	6,328,866	20,875,425	3,618,322	-	-	30,822,613	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	9,247,604	7,921,252	12,407,768	-	4,346	29,580,970	*Wadiah savings deposits*
Simpanan dari Bank lain	704,536	84,015	18,009	-	-	806,560	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	43,693	176,505	77,454	(2,315)	-	295,337	*Acceptance liabilities*
Utang pajak	208,143	239,776	89,595	-	-	537,514	*Taxes payable*
Imbalan kerja	58,260	-	689,557	-	160,934	908,751	*Employee benefit*
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	25,233	-	(25,233)	-	*Accrued expense*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	3,602	15,878	1,082	-	(239)	20,323	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Liabilitas lain-lain	546,249	1,484,987	242,552	-	(364,867)	1,908,921	*Other liabilities*
Total liabilitas	17,475,112	31,359,327	17,252,919	(2,315)	(44,682)	66,040,361	***Total liablities***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER							***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Dana *syirkah* temporer							*Temporary syirkah funds*
Giro *mudharabah*	1,623,563	913,927	2,832,962	-	-	5,370,452	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	6,147,015	39,670,511	13,195,754	-	(4,346)	59,008,934	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	26,025,608	43,749,616	16,268,408	-	-	86,043,632	*Mudharabah time deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,000,000	375,000	-	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Total dana *syirkah* temporer	34,796,186	84,709,054	32,297,124	-	(4,346)	151,798,018	***Total temporary syirkah funds***
EKUITAS							***EQUITY***
Modal saham	4,950,254	3,142,019	2,921,335	(7,871,589)	-	3,142,019	*Share capital*
Tambahan modal disetor	14,964	-	-	(14,964)	-	-	*Additional paid in capital*
Ekuitas *Merging Entities*	-	-	-	10,903,586	-	10,903,586	*Merging Entities Equity*
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak	-	395,725	81,461	(81,461)	-	395,725	*Gain on revaluation of fixed assets - net of tax*
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	5,007	53,998	(75,197)	70,190	-	53,998	*Remeasurement of defined benefit plan - net of tax*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	-	-	1,083	(1,083)	-	-	*Unrealized gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Opsi saham	3,046	-	-	(3,046)	-	-	*Stock option*
Saldo laba							*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	78,470	597,804	454,016	(532,486)	-	597,804	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	392,547	6,650,013	2,076,600	(2,469,147)	-	6,650,013	*Unappropriated*
Total ekuitas	5,444,288	10,839,559	5,459,298	-	-	21,743,145	***Total equity***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 53

**) Restated, see Note 53*

53. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA (lanjutan)

53. RESTATEMENT OF THE PRIOR YEAR FINANCIAL STATEMENTS *(continued)*

Pengaruh penyajian kembali pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The effects of the restatement to the statements of financial position as of 1 January 2020 are as follows: (continued)

	1 Januari 2020/ *1 January 2020*						
	Sebelum Penyajian Kembali / *Before Restatement*						
	PT Bank BRISyariah Tbk	PT Bank Syariah Mandiri	PT Bank BNI Syariah	Penyesuaian/ *Adjustment*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Setelah penyajian kembali/*After restatement*	
Laporan Posisi Keuangan							*Statement of Financial Positions*
ASET							***ASSETS***
Kas	262,485	1,591,962	355,843	-	-	2,210,290	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4,600,895	11,010,935	8,228,726	-	-	23,840,556	*Current Account and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	302,738	2,259,530	247,893	-	850,000	3,660,161	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	10,268,270	21,088,127	8,349,580	(96,000)	(850,000)	38,759,977	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	1,381	233,514		-	-	234,895	*Acceptance receivables*
Piutang - bersih	13,213,440	39,102,924	18,692,519	-	76,398	71,085,281	*Receivables - net*
Pinjaman *qardh* - bersih	399,335	6,441,269	1,629,692	-	-	8,470,296	*Funds of qardh - net*
Pembiayaan *mudharabah* - bersih	407,246	1,706,416	1,560,734	-	-	3,674,396	*Mudharabah financing - net*
Pembiayaan *musyarakah* - bersih	11,019,873	25,956,876	9,417,026	-	-	46,393,775	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - bersih	1,597,231	367,516	286,519	-	-	2,251,266	*Assets acquired for ijarah - net*
Biaya dibayar di muka	-	-	190,302	-	(190,302)	-	*Prepaid expenses*
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	224,050	1,121,079	528,379	-	2,742	1,876,250	*Fixed assets and right of use asset - net*
Aset pajak tangguhan	238,999	386,499	183,013	-	-	808,511	*Deffered tax assets*
Aset lain-lain - bersih	587,545	1,025,220	310,009	-	108,599	2,031,373	*Other assets - net*
Total aset	43,123,488	112,291,867	49,980,235	(96,000)	(2,563)	205,297,027	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	61,253	312,026	153,017	-	615,747	1,142,043	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	52,503	97,155	52,001	-	(759)	200,900	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Giro *wadiah*	2,029,898	11,510,300	2,888,042	-	-	16,428,240	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	6,951,688	5,126,726	9,052,362	-	4,852	21,135,628	*Wadiah savings deposits*
Simpanan dari bank lain	15,999	67,135	23,761	-	-	106,895	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	1,381	235,873	-	-	-	237,254	*Acceptance liabilities*
Utang pajak	80,926	187,853	109,973	-	-	378,752	*Taxes payable*
Liabilitas Imbalan kerja	43,232	-	514,976	-	169,653	727,861	*Employee benefit liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	38,554	-	(38,554)	-	*Accrued expense*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1,972	16,740	1,079	-	(339)	19,452	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Liabilitas lain-lain	2,641,184	1,498,495	238,448	-	(748,309)	3,629,818	*Other liabilities*
Total liabilitas	11,880,036	19,052,303	13,072,213	-	2,291	44,006,843	***Total liablities***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER							***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Dana *syirkah* temporer							*Temporary syirkah funds*
Giro *mudharabah*	4,080,803	2,969,821	4,829,580	-	-	11,880,204	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	2,025,354	35,016,524	11,027,320	-	(4,852)	48,064,346	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	19,049,259	45,632,384	16,316,046	-	-	80,997,689	*Mudharabah time deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,000,000	375,000	-	(96,000)	-	1,279,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Total dana *syirkah* temporer	26,155,416	83,993,729	32,172,946	(96,000)	(4,852)	142,221,239	***Total temporary syirkah funds***
EKUITAS							***EQUITY***
Modal saham	4,858,057	2,989,022	2,501,500	(7,359,557)	-	2,989,022	*Share capital*
Tambahan modal disetor	517	-	-	(517)	-	-	*Additional paid in capital*
Ekuitas *Merging Entities*	-	-	-	9,823,110	-	9,823,110	*Merging Entities Equity*
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak	-	395,725	81,461	(81,461)	-	395,725	*Gain on revaluation of fixed assets - net of tax*
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	(2,181)	47,049	(26,877)	29,058	-	47,049	*Remeasurement of defined benefit plan - net of tax*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	-	710	2,693	(2,693)	-	710	*Unrealized gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Opsi saham	8,679	-	-	(8,679)	-	-	*Stock option*
Saldo laba							*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	63,668	597,804	333,365	(397,033)	-	597,804	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	159,296	5,215,525	1,842,932	(2,002,228)	-	5,215,525	*Unappropriated*
Total ekuitas	5,088,036	9,245,835	4,735,074	-	-	19,068,945	***Total equity***

Lampiran

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah Indonesia dan Unit Usaha Syariah

KETERANGAN	HALAMAN
PERIODE TAHUNAN	
1. Ruang Lingkup	
a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:	√
1) informasi umum;	√
2) informasi kinerja keuangan;	√
3) eksposur risiko dan permodalan;	√
4 tata kelola;	√
5) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	√
6) informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.	
b. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:	
1) Informasi Umum	
Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:	1-191; 194-255
a) Ikhtisar Data Keuangan Penting	16-19
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:	16-19
(1) net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	18
(2) laba/rugi operasional;	18
(3) laba/rugi sebelum pajak;	18
(4) laba/rugi bersih;	18
(5) total laba/rugi komprehensif;	18
(6) laba bersih per saham;	18
(7) jumlah aset;	16
(8) jumlah liabilitas;	16
(9) jumlah ekuitas;	17
(10) aset produktif;	16
(11) dana pihak ketiga;	17
(12) pembiayaan yang diterima;	16
(13) rasio keuangan, paling sedikit meliputi:	19
i. rasio KPMM;	19
ii. rasio ROA;	19
iii. rasio ROE;	19
iv. rasio BOPO;	19
v. rasio CIR;	19
vi. persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	19
vii. GWM;	19
viii. rasio PDN;	19
ix. rasio NPF *gross* dan *net*; dan	19
x. rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	19
(14) informasi lain yang relevan	16-19

KETERANGAN				HALAMAN
b)	Profil BUS			
	Profil BUS paling sedikit meliputi:			
	(1)	nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;		70
	(2)	informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:		71
		i.	alamat;	√
		ii.	nomor telepon;	√
		iii.	nomor faksimile;	√
		iv.	alamat surat elektronik; dan	√
		v.	alamat situs web;	√
	(3)	riwayat singkat BUS;		72-73
	(4)	visi dan misi BUS;		76
	(5)	kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;		78-88
	(6)	struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;		102-103
	(7)	susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:		182-184
		i.	pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	182
		ii.	anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	183
		iii.	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	184
		iv.	informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	185
	(8)	profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:		105-129
		i.	susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	√
			Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	√
		ii.	foto terbaru;	√
		iii.	usia;	√
		iv.	kewarganegaraan;	√
		v.	riwayat pendidikan;	√
		vi.	riwayat jabatan, meliputi informasi:	√
			(i) nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	√
			(ii) rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	√
			(iii) pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	√
		vii.	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	√
		viii.	hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	√
	(9)	profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;		132-140
	(10)	jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;		143-152

KETERANGAN				HALAMAN
		(11)	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	187-189
			Dalam hal terdapat lembaga dan/atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (*fee*), dan periode penugasan; dan	√
		(12)	penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	24-29
			i. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√
			ii. badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	√
			iii. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	√
	c)	Laporan direksi		49-57
		Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:		
		(1)	strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	53
		(2)	perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	54
		(3)	kendala yang dihadapi BUS;	52
		(4)	gambaran tentang prospek usaha;	54
		(5)	penerapan tata kelola BUS;	55-56
		(6)	perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	57
		(7)	aktivitas utama;	-
		(8)	teknologi informasi;	56
		(9)	penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	54
		(10)	persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	54
		(11)	perkembangan perekonomian dan target pasar;	52
		(12)	jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	89
		(13)	jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	92-101
		(14)	kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	183
		(15)	perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	55
		(16)	hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	55
		(17)	sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	56
	d)	Laporan dewan komisaris		39-45
		Laporan dewan komisaris paling sedikit meliputi:		
		(1)	penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	42
		(2)	hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	42-43
		(3)	tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	43
		(4)	tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	43-44
		(5)	perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	45
		(6)	frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.	44
2)	Informasi Kinerja Keuangan			194-255
	Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:			
	a)	tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumer, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:		200-209
		(1)	pendapatan; dan	√
		(2)	profitabilitas;	√
	b)	tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:		210-218
		(1)	penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	215
		(2)	dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	215-216
		(3)	ekuitas;	216

KETERANGAN	HALAMAN
(4) pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	216-218
(5) arus kas;	218
c) analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;	219
d) struktur permodalan;	225-226
e) informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);	227
f) aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	230-234
g) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	234
(1) kebijakan dividen;	-
(2) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	-
(3) jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	-
(4) jumlah pembayaran dividen per tahun;	-
(5) perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	245-252
(6) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	252-253
h) laporan distribusi bagi hasil;	219-220
i) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan	220
j) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.	221
3) Eksposur Risiko dan Permodalan	279-331
Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	
4) Tata Kelola	333-509
a) Informasi tata kelola	√
Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	
b) Laporan Keberlanjutan	√
(1) Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√
Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√
(2) Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	520-554
(a) lingkungan hidup;	530-532
(b) praktik ketenagakerjaan;	532-536
(c) praktik kegiatan institusi yang sehat;	525-530
(d) konsumen; dan	537-542
(e) pengembangan masyarakat.	543-554
Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	

KETERANGAN	HALAMAN
5) Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	√
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:	√
a) laporan posisi keuangan;	√
b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√
c) laporan perubahan ekuitas;	√
d) laporan arus kas; dan	√
e) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.	
6) Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha BUS	185
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:	
a) struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:	
(1) struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder;	
(2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan	
(3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*).	-
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	-
b) transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:	237-244
(1) informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	237-244
(2) pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	237-244
(3) jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:	
(a) kepemilikan silang (*cross shareholding*);	√
(b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	√
(c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	√
(d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	√
(e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	√
(f) pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement* (repo);	√
c) transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	237-244
d) penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;	-
e) adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (*regulatory capital*) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan	-
f) nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).	-
c. BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	√

Referensi SEOJK

Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik

KETERANGAN				HALAMAN
I.	Ketentuan Umum			
	1.	Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		√
		a.	Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	√
		b.	Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	√
		c.	Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	√
		d.	Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	√
		e.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	√
		f	Direksi:	
			1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
			2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
		g.	Dewan Komisaris:	
			1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
			2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
		h.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	
			1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	√
			2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	
	2.	Laporan Tahuna Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		√
	3.	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.		√
	4.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.		√

KETERANGAN				HALAMAN
	5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.		
II.	Bentuk Laporan Tahunan			
	1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		√
	2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.		√
	3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.		√
	4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.		√
III.	Isi Laporan Tahunan			
	1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		
		a.	Ikhtisar data keuangan penting;	16-18
		b.	Informasi saham (jika ada);	20-21
		c.	Laporan Direksi;	49-57
		d.	Laporan Dewan Komisaris;	39-45
		e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	68-191
		f.	Analisis dan pembahasan manajemen;	194-255
		g.	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	333-509
		h.	Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	517-539
		i.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	555-712
		j.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	68-69
	2.	Uraian Isi Laporan Tahunan		
		a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	16-18
			Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
			1) pendapatan/penjualan;	18
			2) laba bruto;	18
			3) laba (rugi);	18
			4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	18
			5) total laba (rugi) komprehensif;	18
			6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	18
			7) laba (rugi) per saham;	18
			8) jumlah aset;	16
			9) jumlah liabilitas;	16
			10) jumlah ekuitas;	17
			11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	18
			12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	18
			13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	18
			14) rasio lancar;	18
			15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	18
			16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	18

KETERANGAN				HALAMAN
	17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;		18
b.	Informasi Saham			20-21
	Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:			
	1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:		20-21
		a)	jumlah saham yang beredar;	20
		b)	kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	20
		c)	harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	20
		d)	volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	20
		Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;		√
		Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;		√
	2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:		22
		a)	tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	-
		b)	rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham	-
		c)	jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	-
		d)	jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	-
		e)	harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	-
	3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan		22
	4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;		-
c.	Laporan Direksi			49-57
	Laporan Direksi paling sedikit memuat:			
	1)	uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:		52-54
		a)	strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	53
		b)	peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik ;	53-54
		c)	proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	53-54
		d)	perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	54
		e)	kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	52
	2)	gambaran tentang prospek usaha;		54
	3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan		55-56
	4)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);		57
d.	Laporan Dewan Komisaris			39-45
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:			
	1)	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;		42
	2)	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;		42-43

KETERANGAN					HALAMAN
	3)	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;			43
	4)	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;			43-44
	5)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan			45
	6)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;			44
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik				68-191
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:				
	1)	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;			70
	2)	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:			72
		a)	Alamat;		√
		b)	Nomor telepon;		√
		c)	Nomor faksimile;		√
		d)	Alamat surat elektronik; dan		√
		e)	Alamat Situs Web;		√
	3)	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;			72-73
	4)	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;			76
	5)	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;			78-88
	6)	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;			89-91
	7)	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;			102-103
	8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan			104
	9)	Profil Direksi, paling sedikit memuat:			120-129
		a)	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;		√
		b)	Foto terbaru;		√
		c)	Usia;		√
		d)	Kewarganegaraan;		√
		e)	Riwayat pendidikan;		√
		f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		√
			(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√
			(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√
			(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√
		g)	hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;		√
		h)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		57
	10)	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:			105-115
		a)	Nama;		√
		b)	Foto terbaru;		√
		c)	Usia;		√
		d)	Kewarganegaraan;		√

KETERANGAN				HALAMAN
	e)	Riwayat pendidikan;		√
	f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		√
		(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√
		(2)	Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√
		(3)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√
		(4)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√
	g)	hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias		√
	h)	Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);		-
	i)	perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		45
11)	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;			-
12)	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;			143-148
13)	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:			182-184
	a)	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;		182
	b)	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan		183
	c)	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;		184
14)	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;			183
15)	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:			182
	a)	Kepemilikan institusi lokal;		182
	b)	Kepemilikan institusi asing;		182
	c)	Kepemilikan individu lokal; dan		182
	d)	Kepemilikan individu asing;		182
16)	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;			185
17)	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);			186
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;			-
18)	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);			186

			KETERANGAN	HALAMAN
	19)		Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	187
	20)		informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	187
		a)	nama dan alamat;	√
		b)	periode penugasan;	√
		c)	informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	√
		d)	biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	√
		e)	dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	-
	21)		Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;	188-189
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen			194-255
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:			
	1)		Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	200-209
		a)	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	√
		b)	Pendapatan/penjualan; dan	√
		c)	Profitabilitas;	√
	2)		Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	210-218
		a)	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	211-213
		b)	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	214-216
		c)	Ekuitas;	216
		d)	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	216-218
		e)	Arus kas	218
	3)		Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	221-222
	4)		Tingkat Kolektibilitas Piutang Emiten Atau Perusahaan Publik Dengan Menyajikan Perhitungan Rasio Yang Relevan;	223-224
	5)		Struktur Modal (Capital Structure) Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal (Capital Structure) Tersebut Disertai Dasar Penentuan Kebijakan Dimaksud;	225-226
	6)		Bahasan Mengenai Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal Dengan Penjelasan Paling Sedikit Meliputi:	226
		a)	Tujuan Dari Ikatan Tersebut;	-
		b)	Sumber Dana Yang Diharapkan Untuk Memenuhi Ikatan Tersebut;	-
		c)	Mata Uang Yang Menjadi Denominasi; Dan	-
		d)	Langkah Yang Direncanakan Emiten Atau Perusahaan Publik Untuk Melindungi Risiko Dari Posisi Mata Uang Asing Yang Terkait;	-
	7)		Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	227
		a)	Jenis Investasi Barang Modal;	227
		b)	Tujuan Investasi Barang Modal; Dan	-
		c)	Nilai Investasi Barang Modal Yang Dikeluarkan;	227
	8)		informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	227

KETERANGAN				HALAMAN
9)	Prospek Usaha Dari Emiten Atau Perusahaan Publik Dikaitkan Dengan Kondisi Industri, Ekonomi Secara Umum Dan Pasar Internasional Disertai Data Pendukung Kuantitatif Dari Sumber Data Yang Layak Dipercaya;			227-228, 254-255
10)	Perbandingan Antara Target/Proyeksi Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi), Mengenai:			229
	a)	Pendapatan/penjualan;		√
	b)	Laba (rugi);		√
	c)	Struktur modal (capital structure);		√
	d)	Kebijakan dividen; atau		-
	e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;		√
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:			229
	a)	Pendapatan/penjualan;		√
	b)	Laba (rugi);		√
	c)	Struktur modal (capital structure);		√
	d)	Kebijakan dividen; atau		-
	e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;		√
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;			230-234
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:			234
	a)	Kebijakan dividen;		-
	b)	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;		-
	c)	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan		-
	d)	Jumlah dividen per tahun yang dibayar;		-
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.			
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:			235
	a)	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan		√
	b)	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;		-
15)	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:			236-244
	a)	Tanggal, nilai, dan objek transaksi;		-
	b)	Nama pihak yang melakukan transaksi;		238-243
	c)	Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);		238-243
	d)	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan		244
	e)	Pemenuhan ketentuan terkait;		244
	f)	dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		244
		1)	pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle); dan	244

KETERANGAN				HALAMAN
			2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle);	244
		g)	Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	-
		h)	untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	-
		i)	dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	231
	16)	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan		245-252
	17)	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);		252-253
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik			333-509
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:			
	1)	RUPS, paling sedikit memuat:		340-358
		a)	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	√
			1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√
			2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	√
		b)	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	√
	2)	Direksi, mencakup antara lain:		377-395
		a)	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	380
		b)	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	379
		c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;	381-386, 343, 351
		d)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	386, 162-171
			(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	386
			(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	162-171
		e)	penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	388-389
			(1) prosedur penilaian kinerja; dan	√
			(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	√
		f)	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	-
	3)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:		358-371
		a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	359
		b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	360-361

KETERANGAN				HALAMAN
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;;		366-368, 343, 351
	d)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:		369, 152-160
		(1)	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	369
		(2)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	152-160
	e)	penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:		387, 369
		(1)	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	√
		(2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	√
		(3)	Pihak yang melakukan penilaian;	√
	f)	penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:		371
		(1)	prosedur penilaian kinerja; dan	√
		(2)	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	√
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:			396-398
	a)	prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan		396
	b)	prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		396-398
		(1)	prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	396
		(2)	struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	397
		(3)	besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	-
5)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:			372-377
	a)	nama;		116-119
	b)	dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;		116-119
	c)	periode penugasan dewan pengawas syariah;		372
	d)	tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan		372
	e)	frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;		-
6)	Komite Audit, mencakup antara lain:			398-410
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		402-403
	b)	Usia;		402-403
	c)	Kewarganegaraan;		402-403
	d)	Riwayat pendidikan;		402-403
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		402-403
		(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	402-403
		(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	402-403
		(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	402-403
	f)	Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;		401
	g)	Pernyataan independensi Komite Audit;		404-405

KETERANGAN				HALAMAN
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan		176-177
	i)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;		406-410
	j)	Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;		410
7)	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:			410-417
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		412-413
	b)	Usia;		412-413
	c)	Kewarganegaraan;		412-413
	d)	Riwayat pendidikan;		412-413
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		412-413
		(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	412-413
		(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	412-413
		(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	412-413
	f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;		412
	g)	Pernyataan independensi komite;		414
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan		-
	i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;		411
	j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;		-
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;		415-416
	l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan		417
	m)	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		-
		(1)	alasan tidak dibentuknya komite; dan	-
		(2)	pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	-
8)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:			417-443
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		√
	b)	Usia;		√
	c)	Kewarganegaraan;		√
	d)	Riwayat pendidikan;		√
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		√
		(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√
		(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√
		(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√
	f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;		√
	g)	Pernyataan independensi komite;		√
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan		√
	i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;		√
	j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;		√

KETERANGAN				HALAMAN
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;		√
	l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan		√
9)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:			432-434
	a)	nama;		432
	b)	domisili;		432
	c)	riwayat jabatan, meliputi informasi:		432
		(1)	dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	432
		(2)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	432
	d)	riwayat pendidikan;		432
	e)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan		181
	f)	uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;		434
10)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:			443-450
	a)	Nama kepala Unit Audit Internal;		444
	b)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		444
		(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	444
		(2)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	444
	c)	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);		446-447
	d)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;		181, 448-449
	e)	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;		443-444
	f)	Uraian tugas dan tanggung jawab;		445-446
	g)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan		-
	h)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;		449-450
11)	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:			450-456
	a)	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan		450-456
	b)	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;		456
	c)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;		456
12)	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:			270-333
	a)	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;		271-278
	b)	Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan		279-289
	c)	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;		278
	d)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;		278
13)	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:			471-479
	a)	Pokok perkara/gugatan;		471-479
	b)	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan		471-479
	c)	Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;		471-479
14)	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);			476-479

KETERANGAN				HALAMAN
	15)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:		500-502
		a)	Pokok-pokok kode etik;	501
		b)	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	501
		c)	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	501
	16)	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/ MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:		235, 508
		a)	jumlah saham dan/atau opsi;	235
		b)	jangka waktu pelaksanaan;	235
		c)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	235
		d)	harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	235
	17)	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:		364
		a)	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	√
		b)	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	√
	18)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:		502-504
		a)	Cara penyampaian laporan pelanggaran;	502
		b)	Perlindungan bagi pelapor;	503
		c)	Penanganan pengaduan;	503
		d)	Pihak yang mengelola pengaduan; dan	5503
		e)	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	503-504
			(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	503
			(2) Tindak lanjut pengaduan;	504
	19)	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		497
		a)	program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	498
		b)	pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	498-499
	20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:		513-517
		a)	pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	
		b)	penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik			517-539
	1)	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
		a)	penjelasan strategi keberlanjutan;	
		b)	ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	
		c)	profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	
		d)	penjelasan Direksi;	

KETERANGAN				HALAMAN
		e)	tata kelola keberlanjutan;	
		f)	kinerja keberlanjutan;	
		g)	verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	
		h)	lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	
		i)	anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	
	2)	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;		
	3)	Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:		
		a)	diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	
		b)	merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	
	4)	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;		
	5)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
		a)	memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	
		b)	disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	
	6)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan		
	7)	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit			
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan			
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan			68-69
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.			68-69

Kriteria Annual Report Awards

	KETERANGAN	HALAMAN
I.	**Umum**	
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	√
4	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	√
	a. Sampul muka;	
	b. Samping;	√
	c. Sampul belakang; dan	√
	d. Setiap halaman.	√
5	Laporan tahunan ditampilkan di *website* perusahaan	√
	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√
II.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting**	
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain:	18
	a. Penjualan/pendapatan usaha;	18
	b. Laba (rugi):	18
	• Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	18
	• Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali;	18
	c. Penghasilan komprehensif periode berjalan:	18
	• Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	18
	• Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan	18
	d. Laba (rugi) per saham.	18
	Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain:	16-17
	a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	-
	b. Jumlah aset;	16
	c. Jumlah liabilitas; dan	16
	d. Jumlah ekuitas.	17
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	19
	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	20-21

	KETERANGAN	HALAMAN
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	20
	a. Jumlah saham yang beredar;	20
	b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:	20
	• Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	20
	• Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	21
	• Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	21
	c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:	21
	• Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	21
	• Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	
	Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	23
	Informasi memuat:	23
	a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*);	23
	b. Tingkat bunga/imbalan;	23
	c. Tanggal jatuh tempo; dan	23
	d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2019.	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	-
III.	**Laporan Dewan Komisaris dan Direksi**	
1	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut:	39-45
	a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	42
	b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	43
	c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	43-44
	d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	45
2	Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:	49-57
	a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:	52-54
	• kebijakan strategis;	53
	• perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	54
	• kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	52
	b. Analisis tentang prospek usaha;	54
	c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	55-56
	d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	57
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:	68-69
	a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	68-69
	b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	68-69
	c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	66-67
	d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	-

KETERANGAN		HALAMAN
IV.	**Profil Perusahaan**	**68-191**
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan *website*.	70-71
2	Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	73
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	-
3	Bidang usaha Uraian mengenai antara lain:	78-88
	a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	78-79
	b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	79
	c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	80-88
4	Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	102-103
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:	76-77
	a. Visi perusahaan;	76
	b. Misi perusahaan;	76
	c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	-
	d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan.	77
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain:	105-115
	a. Nama;	105-115
	b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	105-115
	c. Umur;	105-115
	d. Domisili;	105-115
	e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	105-115
	f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	105-115
	g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	105-115
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain:	120-129
	a. Nama;	120-129
	b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	120-129
	c. Umur;	120-129
	d. Domisili;	120-129
	e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	120-129
	f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	120-129
	g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	120-129
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain:	143-152
	a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	√
	b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	√
	c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	√
	d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	149-152
	e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	152

KETERANGAN		HALAMAN
9	Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain:	182-184
	a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	182
	b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:	182-814
	• Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	182
	• Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	184
	c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.	183
	Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:	186
	a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;	186
	b. Persentase kepemilikan saham;	186
	c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan	186
	d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	186
11	Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).	185
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain:	186
	a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*);	186
	b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan	186
	c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	186
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	-
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain:	187
	a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	187
	b. Nilai penawaran efek lainnya;	187
	c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	187
	d. Peringkat efek.	187
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan	-
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain:	187-189
	a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	188
	b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	187
	c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	188
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain:	24-29
	a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	24-29
	b. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;	24-29
	c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	24-29
	d. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	24-29

KETERANGAN		HALAMAN
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain:	92-101
	a. Nama dan alamat entitas anak; dan	-
	b. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	92-101
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	-
17	Informasi pada *Website* Perusahaan Meliputi paling kurang:	190-192
	a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	-
	b. Isi Kode Etik;	191
	c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	190
	d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	190
	e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	190
	f. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	191
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):	152-181
	a. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;	152-160
	b. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;	162-171
	c. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;	176-177
	d. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	-
	e. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;	178-181
	f. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan	181
	g. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku.	181
	Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	-
V.	**Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan**	**194-255**
1	Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai:	200-209
	a. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	200-209
	b. Kinerja per segmen usaha, antara lain:	200-209
	• Produksi;	√
	• Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	√
	• Penjualan/pendapatan usaha; dan	√
	• Profitabilitas.	√
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:	210-218
	a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	211-213
	b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	214-216
	c. Ekuitas;	216
	d. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan	216-218
	e. Arus kas.	218

	KETERANGAN	HALAMAN
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang:	221-224
	a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan	221-222
	b. Tingkat kolektibilitas piutang.	223-224
4	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*) Penjelasan atas:	225-226
	a. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	225-226
	b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*); dan	225
	c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	225
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang:	226
	a. Nama pihak yang melakukan ikatan;	-
	b. Tujuan dari ikatan tersebut;	-
	c. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	-
	d. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	-
	e. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	-
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	-
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang:	227
	a. Jenis investasi barang modal;	227
	b. Tujuan investasi barang modal; dan	-
	c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	227
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	-
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain:	229
	a. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	229
	b. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	229
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	227
	Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	227
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	227-228, 254-255
10	Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	230-234
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai:	234
	a. Kebijakan pembagian dividen;	-
	b. Total dividen yang dibagikan;	-
	c. Jumlah dividen kas per saham;	-
	d. *Payout ratio*; dan	-
	e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.	-
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	234

	KETERANGAN	HALAMAN
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai:	235
	a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;	235
	b. Jangka waktu;	235
	c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	235
	d. Harga *exercise*.	235
	Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	-
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai:	235
	a. Total perolehan dana;	235
	b. Rencana penggunaan dana;	235
	c. Rincian penggunaan dana;	235
	d. Saldo dana; dan	235
	e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	-
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	-
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai:	237-244
	a. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	238-243
	b. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	244
	c. Alasan dilakukannya transaksi;	244
	d. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	244
	e. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi; dan	244
	f. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	244
	Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	-
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain:	245-252
	a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	245-252
	b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	245-252
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain:	252-253
	a. Perubahan kebijakan akuntansi;	252-253
	b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	252-253
	c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	252-253
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-
17	Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:	253
	a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	253
	b. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	253
	c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*.	253
	Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	-

KETERANGAN		HALAMAN
VI.	*Good Corporate Governance*	336-554
1	Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain:	358-371
	a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;	359
	b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan	371
	c. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	360-361
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain:	365-366
	a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	365
	b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	366
3	Uraian Direksi Uraian memuat antara lain:	377-395
	a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	380
	b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan	388-389
	c. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	379
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2019 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai:	371, 388
	a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;	371, 388
	b. Pihak yang melakukan penilaian;	371, 388
	c. Skor penilaian masing-masing kriteria;	371, 388
	d. Rekomendasi hasil penilaian; dan	-
	e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	-
	Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2019, agar diungkapkan.	-
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain:	396-398
	a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;	396
	b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;	396
	c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	397
	d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;	397
	e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan	397
	f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).	397
	Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	
6	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Informasi memuat antara lain:	366-368, 381-386
	a. Tanggal Rapat;	√
	b. Peserta Rapat; dan	√
	c. Agenda Rapat.	√
	untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	

	KETERANGAN	HALAMAN
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	340
	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.	
	Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain:	363, 380
	a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	380
	b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	380
	c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	380
	d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	363
	e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.	363
	Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	-
9	Komite Audit Mencakup antara lain:	398-410
	a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	402-403
	b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	402-403
	c. Independensi anggota komite audit;	404-405
	d. Uraian tugas dan tanggung jawab;	398-400
	e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	410
	f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	406-410
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain:	410-417
	a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	412-413
	b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	414
	c. Uraian tugas dan tanggung jawab;	411
	d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku;	417
	e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	415-416
	f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	-
	g. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	416
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain:	417-431
	a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	√
	b. Independensi komite lain;	
	c. Uraian tugas dan tanggung jawab;	
	d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	
	e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran rapat komite lain.	
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain:	432-434
	a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	432
	b. Domisili;	432
	c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	433-434
	d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	434

	KETERANGAN	HALAMAN
13	Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain:	443-450
	a. Nama ketua unit audit internal;	444
	b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	446
	c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	446-447
	d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	443-444
	e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	449-450
	f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	445
14	Akuntan Publik Informasi memuat antara lain:	457-458
	a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	458
	b. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	458
	c. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	458
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	-
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain:	270-333
	a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	271-278
	b. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	278
	c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	279-289
	d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	279-289
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain:	450-456
	a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	450-456
	b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan	456
	c. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	456
17	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tata kelola tanggung jawab sosial	520-
	a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial	521
	b. Informasi mengenai methoda dan lingkup *due diligent* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan	522
	c. Informasi tentang *stakeholder* penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan	522
	d. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan	522-523
	e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakankan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban	524
	f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholder* dan *shareholder*	524
	g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijlaankan	524
	h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	524
18	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Hak Azasi Manusia	524-525
	a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia	524
	b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial *core subject* Hak Azasi Manusia	524
	c. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang Hak Azasi Manusia	525
	d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	525
	e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	525

	KETERANGAN	HALAMAN
19	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Operasi yang adil	525-530
	a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial *core subject* Operasi yang adil	525-526
	b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial *core subject* operasi yang adil	526
	c. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang operasi yang adil	527-528
	d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	528-530
	e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	530
20	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang:	530-532
	a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan	530
	b. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan	-
	c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen;	530
	d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan	530-532
	e. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup	530-532
	f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	530-532
	g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	-
21	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:	532-
	a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan *core subject* ketenagakerjaan	532
	b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan	532
	c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; dan	533
	d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut	533-535
	e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	535-536
22	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, mencakup antara lain:	537-542
	a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun buku ditetapkan manajemen	538
	b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut	538-541
	c. Informasi Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	541-542
23	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:	543-554
	a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan *core subject* pengembangan sosial dan kemasyarakatan	543
	b. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan	-
	c. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan	-
	d. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan	-
	e. Target/rencana kegiatan pada tahun buku yang ditetapkan manajemen;	-
	f. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	543-551
	g. Biaya yang dikeluarkan	551-554
	h. Informasi terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	√

	KETERANGAN	HALAMAN
24	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain:	471-479
	a. Pokok perkara/gugatan;	471-475
	b. Status penyelesaian perkara/gugatan;	471-475
	c. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	471-475
	d. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	476-479
	Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	
25	Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	483-497
26	Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain:	500-502
	a. Pokok-pokok kode etik;	501
	b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	501
	c. Penyebarluasan kode etik;	501
	d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	501
	e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	502
	Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-
27	Pengungkapan mengenai *whistleblowing system* Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain:	502-504
	a. Penyampaian laporan pelanggaran;	502
	b. Perlindungan bagi *whistleblower*;	503
	c. Penanganan pengaduan;	503
	d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	503
	e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	503
	f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	503-504
	Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-
28	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	389-395
	Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	

KETERANGAN		HALAMAN
VII.	**Informasi Keuangan**	
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	66
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan	√
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang:	√
	a. Nama dan tanda tangan;	√
	b. Tanggal Laporan Audit; dan	√
	c. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik.	√
4	Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:	555
	a. Laporan posisi keuangan;	√
	b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√
	c. Laporan perubahan ekuitas;	√
	d. Laporan arus kas;	√
	e. Catatan atas laporan keuangan;	√
	f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	√
	g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	√
5	Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	216-218
6	Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	218
	a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	218
	b. Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	
	c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	
	d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya:	
	a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	√
	b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	
	c. Pajak penghasilan;	
	d. Imbalan kerja; dan	
	e. Instrumen Keuangan.	
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	
	a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	√
	b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	
	c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	

	KETERANGAN	HALAMAN
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan:	
	a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan:	
	a. Metode penyusutan yang digunakan; b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	√
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan:	
	a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	√
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan:	
	a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; d. Kebijakan manajemen risiko; dan e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	√
13	Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	
	a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√

2021 Laporan Tahunan



Energi Baru untuk Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930



www.bankbsi.co.id
BSI Call 14040